C 486,831

Digitized by Google

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

No. 53 Agustus 1988

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

GOLKAR DAN KUALITAS DEMOKRASI

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

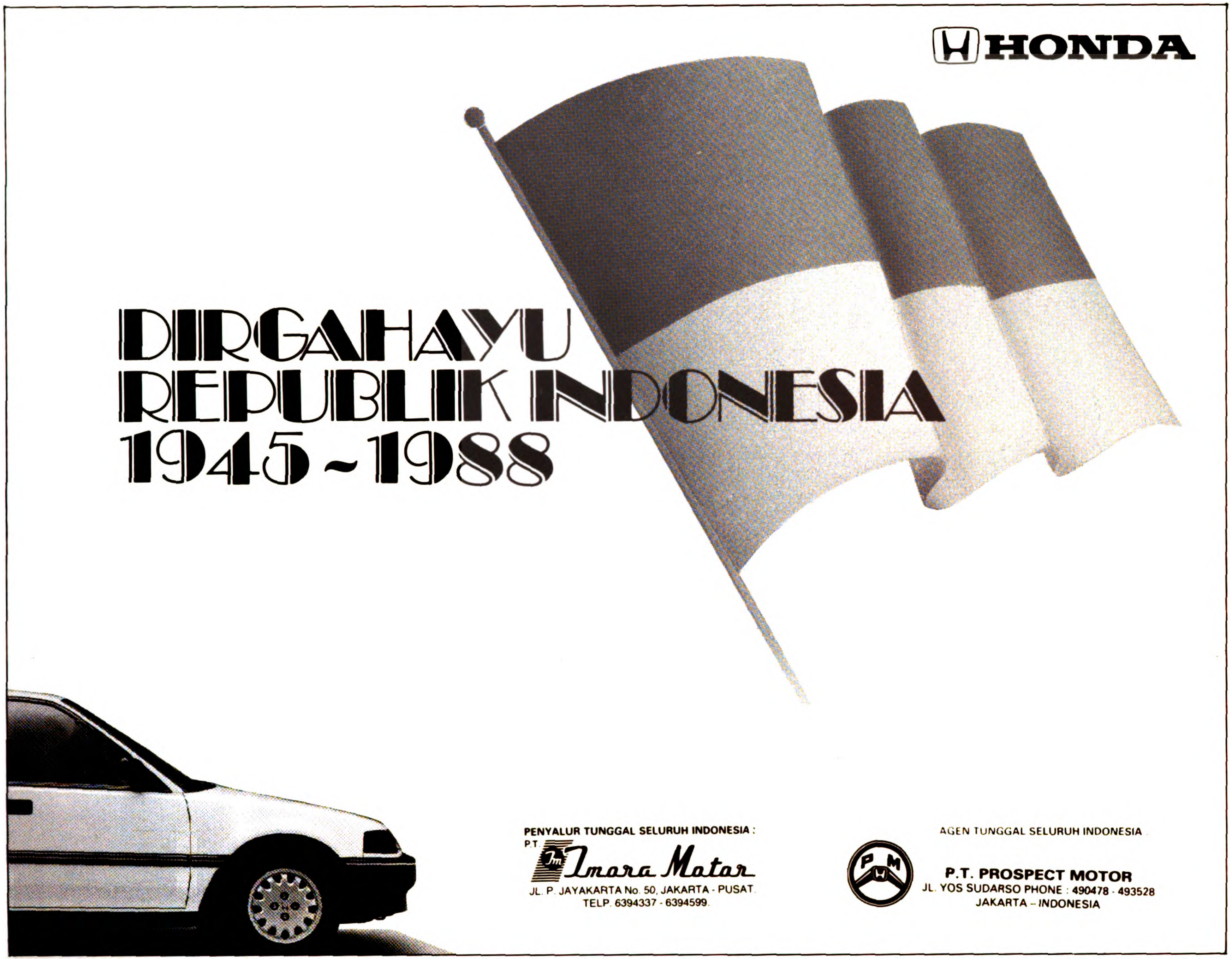

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja
Akbar Tandjung
AA Oka Mahendra SH
Drs Soedarmadji
David Napitupulu
Zarlons Zaghlul SH
Ny TS Darsoyo
Andi Mochtar SH
Zulharmans
Anang Adenansi
Prof Dr Fuad Hasan
Yusuf Wanandi SH
Drs M. Syafaat Habib
M. Sani
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff
Bambang Warih Kusumah
Indra Abidin
Drs Thomas Suyatno
Ny Maria Sugiharto
Widjanarko Poespoyo MA
Ny Ida Ayu Utami Pidada
Drs Ishadi
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi
Peter Tomasoa
HM Irsyad Sudiro
Sugyanto
Soegyarto PS
M Dawoed Atmodiwirjo

Staf Redaksi :
Sudarsono SH
T Ariono Poernomo
Subandrio
Djonharro
Rum Aly
Ibnu Sawarno
Tata Usaha :
Sudarsono SH
Rd Pand Dv Noenjathy
Robert Puang Sunur
Issidarto BA
Subyanto SP
Untung Djumadi
H Mesri Pasaribu

STT NO 823 SK DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asal-kan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Ujian Demokratisasi

FOKUS

Generasi Penerus perlu siapkan diri ambil tanggungjawab kehidupan bangsa. Ikuti wawancara Media Karya dengan mantan ketua FKP DPR RI, Sugiharto, dan Achmad Tahir, mantan Menparpostel. Juga baca pandangan Sayuti Melik tentang Indie Verloren Rampspoed Geboren.

LAPORAN UTAMA

Ujian Pertama Dari Bawah Ke Atas, Golkar tidak bisa menghindari hukum pertumbuhan, Ikuti pendapat AE Manihuruk, Dr Alfian, Albert Hasibuan, Rachmat Witoelar, Pinantun Hutasoit. Juga baca pendapat Ny. Nani Soedarsono tentang Paternalistik Yang Komunikatif. Pangab Jendral Try Sutrisno menanggapi sejumlah pertanyaan yang timbul di seputar kehadiran beberapa tokoh Abri, agar lebih jelas, silakan baca Dari ABRI Untuk Golkar, Dan juga baca Arus Positif Bagi Demokratisasi.

LAPORAN KHUSUS

Sudah 43 tahun Indonesia Merdeka, dalam era yang relatif pendek itu, pembangunan bangsa dan negara mencatat sukses di berbagai sektor. Laporan Khusus kali ini menyoroti industri surat-menyurat yang banyak memberikan manfaat tidak saja penduduk perkotaan, tetapi sampai pelosok pedesaan sudah dijangkaunya. Ikutilah Tukang Pos, Potret Pengabdian Perum Pos Dan Giro.

NASIONAL

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto Menyegarkan semangat, Memperluas Wawasan. Juga Ikuti beberapa peristiwa nasional lainnya; Pemantapan Stabilitas Nasional Tetap Menjadi Perhatian Jajaran ABRI; Presiden, Anak Indonesia Harus Dibekali Kepribadian Yang Utuh; Musyawarah Besar Angkatan '45; Generasi Muda Jangan Jadi Konsumen Ide Tetapi Tampil Secara Mandiri; AMPI Hendaknya Angkat Konsepsi; Indonesia Mampu Menerapkan Prinsip-prinsip Konvensi ILO; Idul Adha, Rutinitas Yang Tidak Pernah Kehilangan Makna.

IN MEMORIUM

KOMENTAR

ORGANISASI

Berbagai Kegiatan Dalam Rangka Persiapan Munas IV Golkar; Diskusi Desa, Di DPP Golkar.

INTERNASIONAL

Kompleksitas Masalah Kampuchea Setelah Jakarta Informal Meeting, oleh J. Kusnanto Anggoro.

SENI & BUDAYA

Dalang dan Seninya, oleh Maria Sugiharto.

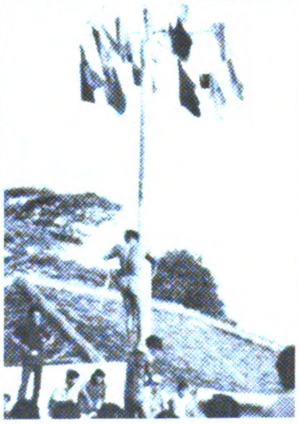

AA Oka Mahendra SH

Digitized by Google
44 167AA XL2
04/94 02-013-01

Ujian Demokratisasi

Didasari keinginan meningkatkan demokratisasi di tubuh organisasi, Oktober tahun lalu Rapim Golkar memutuskan untuk menjalankan mekanisme baru 'dari bawah ke atas' — bottom up system. Suatu mekanisme yang merubah urut-urutan pelaksanaan Munas dan Musda. Bila sebelumnya Munas diselenggarakan lebih dulu daripada Musda I dan II, kini urutannya menjadi berturut-turut Musda II lalu Musda I dan Munas. Dan sekarang, di bulan Agustus 1988, dapat dikatakan lebih dari separuh dari proses pelaksanaan mekanisme baru itu telah dijalani. Musyawarah Daerah tingkat II relatif rampung pada akhir Juli sedang Musyawarah Daerah tingkat I pada bulan Agustus. Lalu puncak pelaksanaan mekanisme baru ini akan terjadi bulan Oktober mendatang, yaitu pelaksanaan Musyawarah Nasional — Munas ke IV.

Mendahulukan pelaksanaan Musda II dan Musda I daripada Munas, memang merupakan hal baru bagi Golkar. Tiga kali Munas sebelum ini selalu didahulukan pelaksanaannya daripada Musda I dan Musda II — dalam suatu mekanisme yang top down sifatnya. Pembaharuan ini tiada lain bertujuan untuk lebih mendemokratiskan tubuh Golkar. Suatu mekanisme yang bottom up diharapkan akan lebih menumbuhkan lebih baik demokrasi internal itu dibanding dengan mekanisme yang top down. Segala sesuatu yang bersifat dari bawah dan dari lebih banyak orang — yakni dari akar-akar kehidupan masyarakat — memang akan terasa lebih dekat dengan citarasa yang terkandung dalam pengertian demos kratos.

Dan bagaimana Golkar menjalani proses demokratisasi di alam demokrasi Pancasila ini melalui mekanisme 'dari bawah ke atas' itu? Ternyata ada sejumlah kritik dilontarkan, baik dari para pengamat politik maupun dari antara anggota keluarga besar Golkar sendiri. Kendati sementara itu tak kurang pula nada cukup puas. Tapi kritik-kritik itu tentu tidak akan mengecilkan arti dari upaya pembaharuan dan demokratisasi yang tengah dijalankan Golkar ini. Bahkan dalam hal tertentu kritik akan berguna bagi Golkar untuk mengoptimalkan kadar pencapaian demokratisasi yang dicita-citakannya.

Kritik yang terlontar antara lain bahwa kendati mekanisme dari bawah ke atas secara formal telah dijalankan dengan baik, di sana sini para pelaku proses masih terpengaruh oleh arus kehendak yang tidak proporsional dari atas. Artinya arus dari atas masih cukup kuat — melebihi takaran — mempengaruhi pengambilan-pengambilan keputusan dalam musda-musda tersebut. Tak terkecuali dalam pengambilan keputusan mengenai penentuan atau pemilihan jajaran kepemimpinan. Mereka yang mendapat 'restu' dari 'atas' — atas, dalam pengertian perorangan maupun kelompok orang berposisi dari berbagai jalur — dalam beberapa kejadian masih lebih unggul daripada yang mendapat 'dukungan' dari floor, dari grass of the root.

Kalau kita mencoba melihat lontaran kritik itu secara jernih, barangkali kita tidak perlu tergesa-gesa menampilkan mekanisme defensif yang berupa reaksi penolakan dan atau bantahan. Dapat kita akui bahwa meskipun kritik-kritik tidak serta merta seluruhnya benar, setidak-tidaknya toh ada juga kebenaran terkandung di dalamnya. Dan itu semua perlu kita pelajari bila kita memang menghendaki demokratisasi yang optimal seperti yang menjadi tujuan mekanisme baru bottom up yang diputuskan Rapim 1987. Tak perlu terlalu disangkal tentang adanya aktivitas tertentu sementara rekan di tubuh keluarga besar kita yang masih kikuk dan tak segera mampu mengantisipasi perkembangan baru menuju demokratisasi yang lebih tuntas. Di sana sini terkesan masih ada penampilan 'kebiasaan lama' yang serba [illegible] nempatkan orang-orangnya [illegible] sempit. Dalam pada itu masih juga terdapat orang-orang yang ingin masuk gelanggang kepemimpinan dengan senjata 'restu' dari atas. Maka cukup terasa ada terselip kesibukan 'mengejar restu' di tengah kesibukan objektif dan pragmatis para kader secara umum. Setidaknya suasana minor ini masih terasa di sana sini. Suatu keadaan yang kadang-kadang memang dapat menimbulkan kesan belum padu dan utuhnya konsistensi keluarga besar ini terhadap tujuan pokok maupun terhadap kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan sendiri bersama-sama. Terlalu kaku dan sempit menjalankan kriteria memang juga tidaklah menguntungkan. Tetapi bilamana kriteria-kriteria tidak dipenuhi sedekat mungkin dan secara adil tanpa penjelasan yang cukup masuk akal tentu mudah timbul kekecewaan bahkan komplain.

Barangkali untuk tahap permulaan, semua ini masih harus diterima dengan lapang dada. Belum lagi bila disadari bahwa memang sulit untuk memuaskan semua pihak sekaligus. Katakanlah ini semua harga yang masih harus dibayar dalam tahap belajar mengenai esensi dan tujuan dilaksanakannya mekanisme dari bawah ke atas. Bagian dari harga pencapaian Golkar yang demokratis dan mandiri.

Namun pada sisi lain yang rasional, bagaimanapun perlu disadari bahwa dalam usia menjelang 24 tahun, Golkar semestinya telah punya kematangan yang memadai, sehingga cukup janggal untuk memperoleh terlalu banyak excuse. Biar lambat asal selamat memang baik. Tetapi dalam kehidupan — termasuk kehidupan politik — yang berdinamika sesuai kemajuan berpikir di masyarakat, prinsip cepat-tepat-selamat adalah lebih memenuhi aspirasi dan lebih mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Perkembangan tuntutan kehidupan politik yang lebih modern berjalan cukup cepat. Akar-akar rumput kehidupan politik yang lebih pasif di masa lampau, kini terasa lebih dinamis dan lebih kritis. Telah tumbuh rumput-rumput yang tidak ingin sekedar dipermainkan angin. Pemilihan umum yang lalu saja telah memperlihatkan mulai tampilnya selera dan keinginan baru — bahkan aspirasi-aspirasi baru — yang harus bisa dihadapi dan diantisipasi secara tepat oleh kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada. Terutama sekali dengan makin tampilnya generasi baru dengan aspirasi yang bergeser dari model tradisional. Hal-hal konvensional yang pada masa sebelumnya memadai bagi para pemilih yang ada, belakangan menjadi tak memadai lagi. Kampanye monolog memang masih dapat diterima, tetapi kampanye dengan gaya dialog seperti yang dijalankan oleh tokoh-tokoh puncak Golkar ternyata menimbulkan antusiasme baru dan menghasilkan credit point tersendiri. Forum diskusi — yang memberi warna demokratis yang kuat karena sifat keterbukaannya — terbukti efektif bagi tokoh-tokoh politik untuk menguji lontaran gagasan-gagasan, karena reaksi dan jawaban muncul dengan cepat dari floor. Apalagi dalam suatu forum yang dihadiri oleh kalangan generasi muda yang akan menjadi pelaku, pelaksana dan akan mengalami kehidupan politik masa mendatang.

Secara menyeluruh segala sesuatu yang makin demokratis, memang akan lebih disukai dan lebih memikat — dan karenanya akan lebih diterima — dalam kehidupan politik mendatang. Tujuan peningkatan demokratisasi Golkar melalui mekanisme baru 'dari bawah ke atas' tak terlepas dari itu semua. Kendati lebih dari separuh proses awal penterapan mekanisme baru telah berlangsung toh masih ada separuh lainnya yang penting dan bahkan akan merupakan puncak proses. Bagian puncak dari piramida yang sedang dibangun itu baru akan di-[illegible] di bulan Oktober mendatang. Bagian yang paling stra-[illegible] alam pembuktian keberhasilan dan kesungguhan kita melaksanakan demokratisasi Golkar!

Digitized by Google

Generasi Penerus Perlu Siapkan Diri Ambil Tanggungjawab Kehidupan Bangsa

Untuk membangun bangsa Indonesia di masa mendatang, tidak hanya diperlukan tenaga-tenaga ahli berkualitas sarjana tetapi juga berkualitas sujana, atau budayawan. Pembangunan mendatang tidak saja menuntut kualitas fisik, tetapi juga kualitas di bidang budaya, dengan tampilnya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengacu pada Pancasila.

Untuk dapat memenuhi tuntutan pembangunan yang demikian tinggi itu diperlukan tampilnya generasi penerus yang siap mengabdi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta rela mengorbankan kepentingannya pribadi untuk kepentingan masyarakat banyak. "Tidak bisa bangsa ini kelak dipimpin oleh generasi yang bermental bisnis, mengabdi kepentingan bangsa atas dasar untung rugi", demikian dikemukakan Sugiharto, seorang tokoh Golkar, dalam percakapan dengan *Media Karya,* untuk menyongsong HUT Proklamasi 43.

Ia berharap, kepemimpinan bangsa di masa mendatang benar-benar berada di tangan tenaga-tenaga yang rela bekerja keras, bukan kelompok yang ingin hidup enak dengan menempuh jalan pintas, berkuasa tetapi tidak bersedia bekerja keras. Bahkan menurut anggota DPA itu, tidak layak kepemimpinan itu jatuh ke tangan orang-orang yang terlibat dalam kehidupan bisnis. "Terus terang saya was-was dengan orang bisnis, "kata mantan Ketua FKP DPR itu. Menurut hematnya orang bisnis yang hidupnya dikejar pertimbangan untung rugi cenderung menjadi orang oportunis bila integritas pribadinya kurang teguh. Ia berpendapat, hanya generasi penerus yang memiliki integritas tinggi, rela bekerja keras demi kepentingan bersama bisa membawa bangsa ke arah kemajuan.

Di lain pihak, Sugiharto mengungkapkan bahwa generasi 45 akan segera mengakhiri masa pengabdiannya. "Dalam jangka 5 - 10 tahun, generasi pejuang angkatan 45 akan menjadi manusia lanjut usia, bahkan mungkin menjadi jompo", katanya. Generasi pejuang ini perlu merelakan sepenuhnya kepemimpinan bangsa kepada generasi penerus. Generasi pejuang ini boleh merasa berjasa kepada bangsa, bahkan kepada generasi penerus, tetapi nasib bangsa selanjutnya ada di tangan generasi penerus. Generasi pejuang tidak boleh bersikap bahwa bangsa ini akan kacau tanpa mereka. Mereka perlu yakin bahwa tiap jaman mempunyai corak tersendiri, dan generasi yang mengalaminya akan mampu mengatasi persoalan jamannya.

Sugiharto

Tokoh Golkar itu juga tidak meragukan semangat nasionalisme generasi penerus yang hidup pada era sekarang. Ia mengakui, sulit mencari tolok ukurnya, karena corak kehidupan generasi muda sekarang beraneka ragam, dan terpengaruh akan lingkungan tempat keberadaan mereka. "Saya sering melihat ada sejumlah anak-anak muda yang bersikap seenaknya ketika dinyanyikan lagu kebangsaan, tetapi saya juga kagum bila menyaksikan acara cepat tepat di TVRI karena anak-anak muda itu sepertinya tahu betul masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita," katanya. Kesan yang diperolehnya itu menjadikan sulit untuk menilai apakah terjadi erosi nasionalisme atau tidak di kalangan generasi penerus. Soal erosi ini menurut Sugiharto bukan menjadi permasalahan generasi penerus, atau generasi muda, khususnya. Bahkan generasi tua atau generasi pejuang pun menghadapinya. Misalnya saja, sikap rakyat yang dapat ditangkap dari pembicaraan sehari-hari atas peristiwa nasional, misalnya penganugerahan bintang jasa kepada pejabat-pejabat. Bintang jasa yang menjadi dambaan warga negara itu kadangkala membuat kagum masyarakat bila diserahkan kepada mereka yang benar-benar dirasakan berjasa bagi bangsa, tetapi sering pula masyarakat mempunyai penilaian lain terhadap tokoh yang menerima anugerah sehingga menimbulkan sikap sinis dan memancing masyarakat untuk "rerasan" *(bergosip red).*

Ciri nasionalisme yang diperlukan dan terbukti membawa kesatuan bangsa adalah nasionalisme independen, yaitu nasionalisme yang bersemangatkan Pancasila. Sugiharto mengungkapkan, dalam sejarah perjuangan bangsa, ternyata berkembang pula nasionalisme yang mempunyai asas ciri, yaitu nasionalisme bercirikan keagamaan dan nasionalisme berciri sosialis marxistis. Ketiga corak nasionalisme itu sempat bersatu ketika menghadapi penjajah, tetapi kemudian menjadi faktor desintegrasi bangsa setelah musuh bersama, yaitu penjajah pergi dari bumi Indonesia. Orang-orang seperti Kartosuwirjo tidak diragukan lagi semangat nasionalismenya, tetapi rela mengatakan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, kalau tidak senang di bumi tempat kami menjalankan Syariat Islam, boleh pindah ke mana suka. Demikian pula, orang-orang nasionalis komunis tidak segan-segan mengatakan, kalau tidak setuju dengan komunisme, silakan pindah ke akherat. Perjuangan mereka baik secara fisik, ideologis maupun dalam kehidupan demokrasi tidak segan-segan mengorbankan persatuan bangsa dan menem-

Digitized by Google

puh garis separatis. Hanya orang-orang "independen" yang berjiwa Pancasila menginginkan kesatuan bangsa. Dalam kelompok ini, peranan kekuatan ABRI sangat besar. "Jadi kalau kita melihat adanya kelompok separatis itu kita lalu dapat menilai apakah nasionalisme masa lalu mengalami erosi atau tidak?" katanya.

Setelah merdeka 43 tahun, kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia sangatlah besar. Kemajuan di bidang pendidikan merupakan prestasi yang bukan main. "Pada awal jaman kemerdekaan dulu, di seluruh kota Solo hanya ada satu SMA. Sekarang bisa di lihat di tiap kecamatan terdapat sekurang-kurangnya satu SMA," katanya. Dulu mencari tenaga sarjana ekonomi sangat sulit. Sekarang ini kemana orang pergi pasti akan ketemu dengan sarjana ekonomi. Tokoh bekas anggota Tentara Pelajar itu mengemukakan, sebenarnya tidak layak membandingkan masa sekarang dengan masa awal kemerdekaan. "Bahkan dengan tahun 60-an saja sangat berbeda," katanya. Suatu perubahan radikal yang dicapai berkat kemerdekaan adalah sikap mental, yaitu sikap mental bangsa terjajah dengan sikap mental bangsa yang merdeka. "Itu berbeda sekali", katanya.

Pembangunan saat ini mencapai tingkat tidak saja pada tuntutan kebutuhan fisik, tetapi juga non fisik seperti tuntutan akan keadilan, pelayanan umum yang lebih baik, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara. Bahkan sekarang ini ada tuntutan untuk kehidupan politik yang lebih demokratis. Tentang hal ini, Sugiharto mengungkapkan, bangsa ini sebenarnya menghadapi trauma dengan kehidupan demokrasi. Praktek demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950-an memberikan pengalaman yang amat pahit bagi bangsa Indonesia. Demokrasi yang didasari ideologi golongan yang dipraktekkan pada tahun 1950an membawa bangsa ke ambang perpecahan. Kaum nasionalis agama yang didukung oleh partai agama yang berpengaruh waktu itu meriskir perpecahan bangsa dengan pemberontakan di berbagai daerah. Sedangkan golongan nasionalis Marxis membawa bangsa ke lembah kesengsaraan dengan peristiwa G.30.S/PKI. Betapa banyaknya korban harta dan terlebih jiwa akibat praktek dari demokrasi parlementer ala tahun 50-an yang membebaskan tiap kelompok membawa ideologi ciri masing-masing. Saat sekarang pun perlu ada sikap kewaspadaan terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila. Jangan sampai ideologi negara yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dengan penambahan dan pengurangan unsur. "Jadi jangan ada pancasilais plus dan pancasilais minus, tetapi pancasilais yang murni", katanya. tuntutan yang wajar terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi saat ini ialah bagaimana mengembangkan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bangsa.

Prestasi lain yang perlu dicatat selama 43 tahun merdeka ialah kemajuan di bidang ekonomi. Dalam kaitan dengan kedaulatan negara, kini kita telah memiliki angkatan bersenjata yang terkonsolidasi secara rapi, bukan model *"war lords"* seperti pada awal perjuangan kemerdekaan dulu. Semua keberhasilan yang dicapai berkat kemerdekaan ini perlu dijaga dan dikembangkan dan dilestarikan untuk kesejahteraan bangsa, demikian Sugiharto.

Achmad Tahir:
Kita Berada Pada Jalur yang benar

Mengevaluasi perkembangan secara periodik, memang kebiasaan yang baik. Setiap bulan Agustus, kita menjadi begitu terbiasa untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian-pencapaian kita di dalam mengisi kemerdekaan.

Achmad Tahir

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tugas perjuangan selanjutnya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu sendiri sampai sekarang. Kita sepakat bahwa mengisi kemerdekaan berarti melanjutkan dan menggalakkan pembangunan di berbagai bidang. Untuk melakukan evaluasi yang rinci, tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Hanya saja, perlu dimaklumi bahwa sebagai bangsa yang baru merdeka selama 43 tahun dan mengisi kemerdekaan itu dengan upaya pembangunan di berbagai sektor kehidupan, kurun 43 tahun rasanya terlalu pendek. "Namun kita harus berbangga karena telah banyak hal yang dicapai oleh pembangunan dalam kurun kemerdekaan yang masih sangat singkat itu," kata Ahmad Tahir, mantan Menparpostel yang Ketua Legiun Veteran RI.

Pembangunan bangsa secara terprogram memang lebih kentara setelah bangsa kita memasuki era Orde Baru, dua dasawarsa terakhir ini. Kita patut bersyukur bahwa ABRI, rakyat dan pemuda serta mahasiswa, bangkit bersama-sama di tahun 1966 menumpas G'30'S PKI, mengumandangkan Tritura dan sejalan dengan itu melahirkan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekuen. Tekad ini mencerminkan political will Orde Baru untuk melaksanakan pengisian kemerdekaan secara sungguh-sungguh dan lebih bermakna.

Political will yang mulia itu tentu harus dibarengi tekad menyelenggarakan pembangunan itu sendiri secara teratur, berencana dan berkelanjutan. "Tanpa itu, agaknya sulit kita mampu mencapai hasil yang optimum. Bila menempatkan pembangunan dalam perspektif masyarakat adil dan makmur di tengah persaingan yang terus meningkat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka pembangunan pada hakekatnya adalah pekerjaan yang tidak pernah akan selesai. Setiap jaman menghadirkan tantangan dan tuntutan yang berlainan.

Sebagai realisasi dari tekad Orde Baru, maka sejak 1966 kita sebagai bangsa mulai melakukan pekerjaan pembangunan secara berencana. Kita mengenal yang namanya Program Jangka Panjang 25 Tahun Pertama yang akan berakhir pada Pelita V, dan sekarang pun kita mulai membicarakan tentang Program Jangka Panjang 25 Tahun Kedua. Pembangunan yang berencana inilah yang merupakan hal yang paling menonjol selama Orde Baru. Selain itu, swasembada pangan

Digitized by Google

adalah prestasi yang fantastis. Bayangkan, Belanda sia-sia mengupayakan swasembada pangan di Indonesia dalam kurun 3,5 abad masa penjajahannya, sementara Indonesia berhasil mewujudkannya hanya dalam tempo kurang dari 20 tahun.

Belum lagi kalau kita bicara soal sarana dan prasarana. Jalan beraspal yang menjangkau desa-desa potensial, kini bukan merupakan sarana yang mewah lagi. Sarana transportasi darat, laut maupun udara semakin canggih dan menjangkau hampir seluruh wilayah nusantara. Indonesia kini sudah menyelenggarakan jenis-jenis industri dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling canggih.

Pembangunan Yang Berbudaya

Kehidupan beragama, terutama di kalangan muda berkembang pesat. Gereja, masjid, pure dan kelenteng dipadati kaum muda pada hari-hari ibadah. Dan kemajuan yang luar biasa, dicapai di sektor pendidikan pada segala jenjang. Bila dulu memasuki bangku SMP saja sudah menjadi kebanggaan, maka sekarang lembaga-lembaga pendidikan ada yang mengeluh kekurangan murid. Para orang tua sekarang ini mulai sadar bahwa menyekolahkan anak adalah keharusan, bila menghendaki anaknya sukses di kemudian hari.

Kita semua sadar dan yakin, bahwa untuk bersaing baik dalam lingkup domestik maupun internasional, ketrampilan dan kapasitas intelektualitas menjadi tuntutan mutlak. Dengan terus memperbaiki mutu maupun jenis pendidikan, maka tugas mengisi kemerdekaan akan semakin bermakna dan bermutu. Kemajuan di bidang pendidikan yang dibarengi dengan kemajuan di bidang kehidupan beragama, merupakan salah satu indikator bahwa kita memang mengupayakan manusia yang adil dan makmur serta berbudaya. "Ini mungkin dua sektor yang bisa dicontohkan bagaimana kita merealisir pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini penting karena kemajuan pendidikan yang mengabaikan pembangunan di bidang kehidupan beragama, akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang kehilangan pegangan hidup.

Kita justru ingin menangkal akibat negatif dari kemajuan yang kita programkan dalam pembangunan. Kita tidak ingin menciptakan manusia Indonesia yang berhamba pada mesin

Kehidupan beragama berkembang pesat

dan teknologi. Karena itu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebenarnya berwatak pembangunan yang berbudaya. Kita memiliki Ideologi Pancasila yang mengharuskan manusia Indonesia berwatak perikemanusiaan, adil dan beradab. "Ini adalah nilai yang hebat." Kita juga membangun manusia Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme dan berwatak patriotis. Tapi, tentu saja kita tidak mengembangkan nasionalisme "Indonesia Uber Alles."

"Jadi, bila kita dalam perjalanan ke depan melaksanakan pembangunan, tetap konsisten pada Pancasila dan UUD '45, maka saya kira kita sekarang telah berada pada jalur yang benar," katanya.

Dengan mengetengahkan prestasi-prestasi pembangunan yang dicapai dalam dua dasawarsa terakhir dalam rangka mengisi kemerdekaan, tidak terkandung maksud bahwa kita membusung dada karena apa yang kita raih sudah sempurna. Kita harus jujur mengakui, masih banyak hal yang belum terjangkau oleh prestasi pembangunan itu sendiri. Namun alangkah naifnya kita bila mengeksploitir kekurangan disana-sini untuk mencap pembangunan telah gagal total.

Orang memang cenderung terjerumus dalam sikap apriori tentang hasil pembangunan bila mengacu pada standar-standar kualitatif. Salah satu yang sering diperdebatkan adalah pendapat bahwa penggalakan pembangunan ekonomi akhirnya mengabaikan aspek-aspek demokrasi. Pendek kata orang sering berbicara tentang benturan pembangunan ekonomi dengan sektor-sektor lain yang tertinggal dalam penanganannya, atau yang dikorbankan karena pembangunan ekonomi itu sendiri.

Berbicara tentang benturan maupun bias dari pembangunan memang selalu menarik perhatian. Kita tidak arif bila tidak mengakui bahwa benturan terutama pada aspek-aspek kualitatif tidak ada sama sekali. Tetapi kita juga tidak arif bila mencap pembangunan ekonomi gagal atau tidak diperlukan.

Kekurangan-kekurangan dari pembangunan sebagai instrumen pengisian kemerdekaan, memang banyak dan menggejala. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena political will untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan tetap tidak luntur di kalangan para pelaksana dan perencana pembangunan itu sendiri, yang dalam hal ini tentu saja pemerintah.

Bila ada yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berbenturan dengan pembangunan demokrasi, kita sebenarnya harus kembalikan itu kepada pegangan bersama yaitu UUD '45 dan Pancasila. Artinya, kalau ada persoalan di sekitar itu, maka koreksi dan analisa harus mengacu ke sana.

Kita mempunyai cita-cita ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip koperasi agar melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam semangat kebersamaan. Koperasi memang belum sukses dalam meng-

Digitized by Google

hidupkan potensi ekonomi masyarakat pedesaan. Dia masih membutuhkan kader-kader yang tangguh, trampil dan memiliki wawasan serta kemampuan managerial. Tapi yang terpenting, kita sudah berada pada rel yang benar. Kekurangan di sana-sini kita lakukan perbaikan secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh.

Kita memang harus bersabar dalam menilai sukses pembangunan. Kemerdekaan yang kita capai, bukan sebuah kertas putih. Bangsa kita memulai kemerdekaan dan pembangunan dalam suasana sekeliling kita telah banyak berubah. Kita melihat, mempelajari dan menyempurnakan tujuan dan cara mencapai manusia Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan ini sudah sangat jelas, tinggal bagaimana cara mencapai tujuan itu.

Kita telah memulai upaya itu dalam empat Pelita. Setiap akhir Pelita kita lakukan analisa untuk menentukan mana yang sudah kita capai dan mana yang belum. Setelah pembangunan ekonomi kita lancarkan, maka pada Pelita IV kita mencapai kesepakatan penting di bidang politik yaitu menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dengan menata kehidupan politik, kita berusaha menterjemahkan kedaulatan rakyat. Kita juga mempunyai mekanisme lima tahunan berupa GBHN yang merupakan arahan yang lebih operasional dalam mewujudkan cita-cita dasar keberadaan kita sebagai bangsa dan negara. Jadi dalam bahasa yang lebih populer, dalam 25 tahun terakhir ini pembangunan yang kita jalankan sebenarnya baru pada tahap mengatur rumah tangga, seperti bentuk kursi, letak rumah, meja dan tempat tidur. Suasana seperti ini memang menonjol. Bila kerja membenahi ini selesai, maka secara bertahap kita diharap memasuki tahap kualitatif yaitu masyarakat yang adil makmur. "Walaupun ini pekerjaan besar, tapi yang menggembirakan adalah bahwa kita telah berada pada jalur yang tepat. Hal ini hanya mungkin, karena kita konsekuen dan konsisten terhadap UUD '45 dan Pancasila.

Dengan konsistensi seperti ini, kita berharap akan semakin menghasilkan karya-karya bermutu dan pengabdian yang bermutu pula. Sukses kita menata aspek-aspek kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tercermin dalam kestabilan yang mantap selama era Orde Baru. Bahkan dalam perjalanan sejarah kita, era Orde Baru mencatat kestabilan yang paling lama, karena dalam kurun ini jarang terjadi gejolak yang merusak sendi-sendi kemasyarakatan maupun kenegaraan.

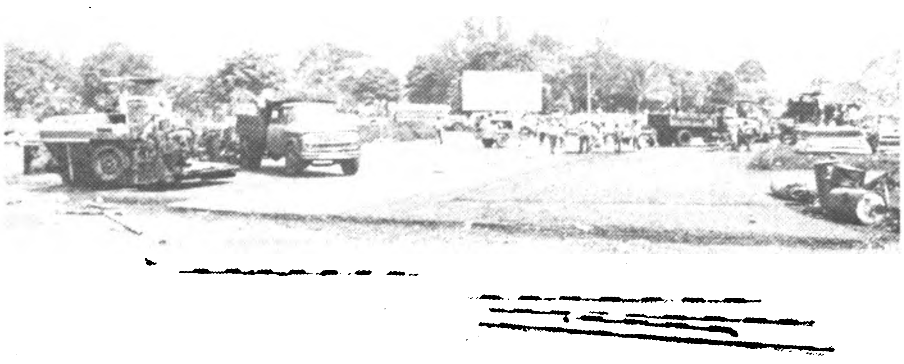

Jalan aspal telah masuk ke desa-desa

Itulah situasi umum yang kita capai dalam 43 tahun merdeka. Kita mengukir situasi yang kita namakan kestabilan yang dinamis. Ini tentu membutuhkan keseimbangan. Kita menghargai kebebasan pendapat dan berbicara asal hal itu tidak merusak kestabilan. Dinamika kreativitas, inovasi dan terobosan hendaknya diupayakan tanpa mengganggu kestabilan. "Saya kira kualitas pengisian kemerdekaan di masa yang akan datang, akan sangat tergantung sampai sejauh mana kita memelihara keseimbangan itu. Di sana letak seninya," ujarnya. Bila disana-sini ada kekurangan dalam pengisian kemerdekaan kita upayakan penyempurnaan. Hanya berdebat, tidak akan menyelesaikan persoalan.

Soal Kacamata

Sekarang, tentang sinyalemen erosi nasionalisme terutama di kalangan kaum muda kita. Perdebatan tentang ini bisa saja panjang dan menarik. "Tapi bagi saya masalahnya tergantung pada kacamata yang kita pakai untuk menilai," ujarnya.

Apakah remaja yang memakai sepatu kickers, berambut gondrong dan menggandrungi musik Barat, harus kita cap sebagai erosi nasionalisme? Bagaimanapun juga kita harus menerima bahwa nasionalisme yang diinginkan adalah nasionalisme yang dinamis. Artinya nasionalisme di kalangan remaja kita terekspresi dalam suasana interaksi dengan pengaruh-pengaruh ekstern. Dalam mengungkapkan rasa nasionalisme, mereka lebih kritis karena sentuhan pengaruh faktor luar sebagai perbandingan. Mereka mempunyai selera dan mutu kepuasan yang berbeda dengan pemuda-pemuda Indonesia 43 tahun lalu. Remaja kita sekarang bagaimanapun juga lebih terpelajar, sehingga menuntut yang lebih bermutu.

Kalau dulu dalam rangka mengusir penjajah kita membakar kampung sendiri dianggap nasionalis, sekarang mungkin dianggap konyol. Bila dulu merusak jembatan dianggap pejuang, maka sekarang hal itu melanggar undang-undang. "Jadi saya kira masalahnya terpulang pada soal selera."

Bila masyarakat tidak suka menonton acara-acara yang disajikan TVRI, atau kurang berminat mendengar siaran-siaran RRI, jangan buru-buru mencap mereka kurang mencintai bangsa dan tanah air. Pemirsa TV dan pendengar radio sekarang sudah memiliki selera yang lebih tinggi, karena mereka toh pernah melihat, mendengar dan membaca tentang siaran TV dan radio di negara-negara yang sudah maju.

Dengan demikian, bila masyarakat tidak berminat terhadap sajian TV atau radio, masalahnya bukan lantas mencap mereka tidak mencintai bangsa sendiri, tetapi harus dicari cara lain agar orang tertarik. Jadi masalahnya adalah bagaimana cara penyampaian, bukan substansinya. Bila berbicara tentang pembangunan, P4 dan program-program pembangunan lainnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menyampaikannya secara lebih menarik.

"Kalau orang sekarang mengatakan ada erosi nasionalisme, saya kira cukup kontradiktif, karena permintaan warga asing untuk menetap di Indonesia cukup tinggi. Mereka senang karena di negeri ini tidak terjadi pe-

Digitized by Google

rang, jarang ada angin ribut walaupun ada yang khawatir kalau kecopetan.'' Jadi bila ada yang tidak berminat terhadap buatan bangsa sendiri, masalahnya ada pada persoalan teknis, bukan substansial.

Bukan Rela Tak Rela

Masalah lain dalam rangka pengisian kemerdekaan ini adalah alih generasi. Perdebatan selama ini seakan bersandar pada dugaan konflik generasi. Regenerasi yang hakikatnya alamiah diperdebatkan seolah-olah ada konflik di dalamnya. Bagaimanapun juga regenerasi dalam arti pergantian yang tua oleh yang muda dalam memegang roda pemerintahan di sebuah negara, adalah keharusan alamiah yang tidak bisa dilawan.

Bila generasi 45 menyuarakan tentang nasionalisme dan cinta kemerdekaan lewat pembangunan yang tak kenal lelah dan berusaha terlibat dalam pengelolaan kenegaraan, hal itu adalah ungkapan rasa cinta kepada kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah dan mempertaruhkan segala-galanya.

Setelah kemerdekaan, kita menggeluti pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan itu sendiri. Sudah menjadi keputusan politik bahwa pembangunan harus berkelanjutan, dan kemerdekaan harus lestari. Logis, bila para pejuang 45 merasa khawatir kalau-kalau generasi penerus tidak lebih baik dari generasi sebelumnya. Untuk memacu generasi sekarang tampil lebih bermutu, tentu wajar kalau generasi 45 menyuarakan kekurangan-kekurangan generasi penerusnya.

Tetapi suara-suara yang memacu ini, keliru bila ditafsirkan sebagai pantulan keengganan generasi 45 mengalihkan estafet kepemimpinan bangsa ini kepada generasi berikutnya. Jadi keliru bila membicarakan alih generasi dalam prasangka rela tak rela. Kemerdekaan dan tekad membawa bangsa ini ke kondisi kehidupan yang lebih baik, adalah buah dari perjuangan generasi 45. Kemerdekaan adalah bibit yang disirami dan dirawat begitu lama dan intens. Tentu naif bila seorang pejuang yang mempertaruhkan segala-galanya merawat bibit, lantas bersikap acuh pada saat sang bibit telah menjelma menjadi pohon. Sang pejuang baru merasa lega kalau menemukan perawat yang sama baiknya dalam memelihara pohon itu agar tidak dirusak oleh hama apa pun. Jadi

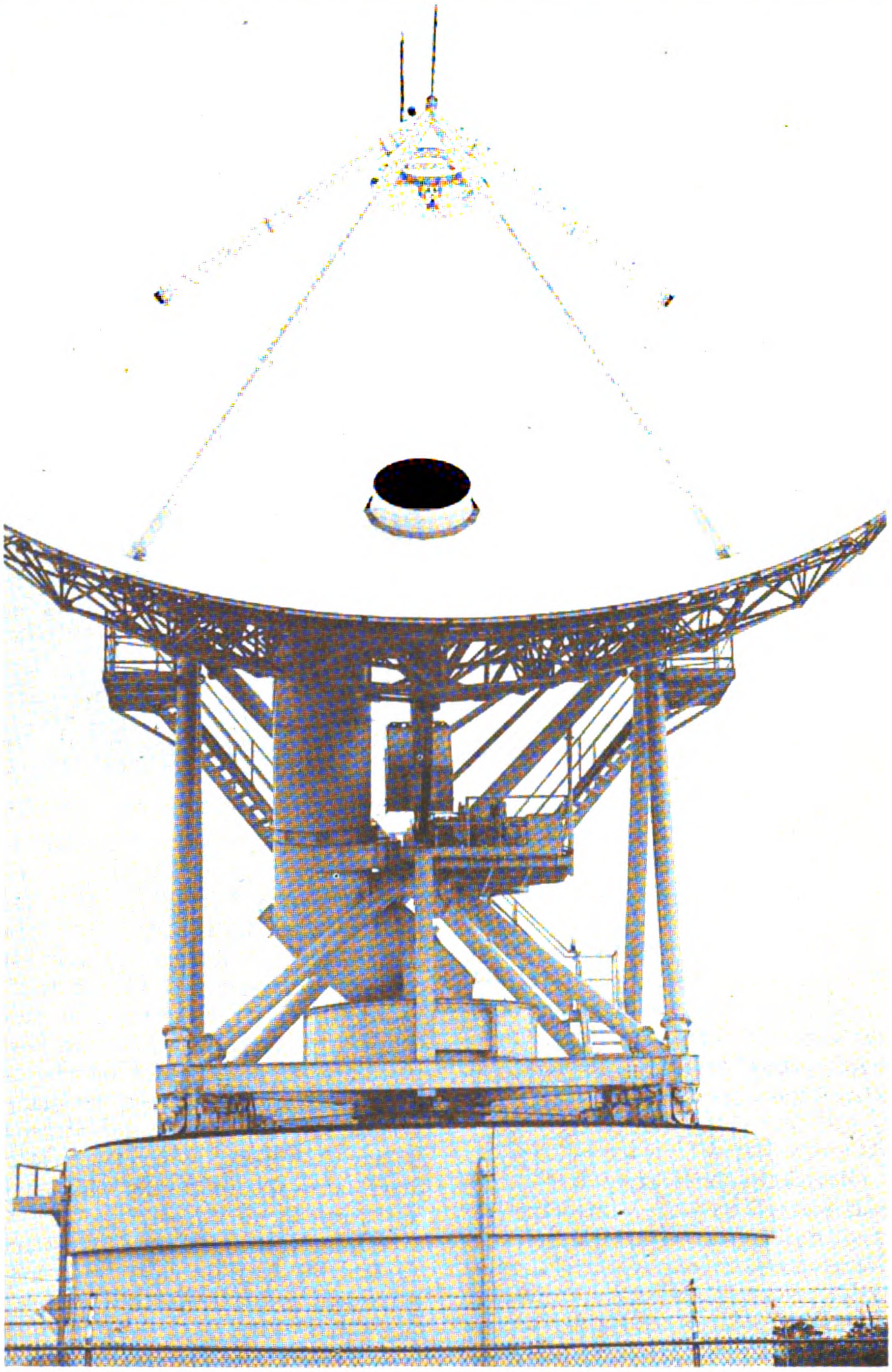

Peralatan teknologi canggih

komitmen generasi 45 terhadap kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan, harus dipahami dalam perspektif itu.

Dua puluh lima tahun pembangunan jangka panjang pertama, tak lama lagi akan kita lewati. Dalam kurun itu, kita telah berbuat banyak. Kehidupan ekonomi mulai tertata baik, kehidupan politik pun dibenahi agar semakin mencerminkan nafas-nafas demokrasi. Selama Orde Baru kita telah mencoba untuk tampil demokratis dan konstitusional dalam segala aspek kehidupan dengan landasan utama Pancasila dan UUD'45. ''Tapi bagi saya bangsa yang baik kehidupan demokrasinya, apabila pergantian pemimpin puncaknya berlangsung secara konstitusional. Tidak melalui revolusi. Kita agaknya mencoba ke arah sana,'' ujarnya. Prinsip-prinsip konstitusi hendaknya harus menjadi tradisi bagi bangsa kita dalam perjalanan ke masa depan.

Pembangunan manusia seutuhnya memang berwatak pembangunan yang berbudaya. Banyak hal yang telah kita capai, walaupun kekurangan-kekurangan tidak sedikit. Tapi yang menggembirakan, dalam mengisi kemerdekaan, kita telah berada pada jalur yang benar. □ (LT/BM)

Digitized by Google

Indie Verloren Rampspoed Geboren

Di antara sekian banyak peristiwa yang patut dikenang di bulan Agustus, Proklamasi Kemerdekaan yang teksnya dibacakan oleh Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta, 43 tahun lalu, merupakan kenangan yang menempati urutan terpenting untuk diperingati.

Bagi generasi sekarang, peristiwa yang sangat monumental itu mungkin hanya dipahami sebatas bobot sejarah. Sedangkan detik-detik proklamasi dan jalannya peristiwa bersejarah itu 17 Agustus 1945, pasti banyak yang tidak mengetahui.

Kini sudah 43 tahun berlalu. Para pelaku kemerdekaan mungkin sebagian besar telah tiada. Tapi kita sebenarnya masih menyimpan seorang tokoh "segala jaman": Sayuti Melik. Dia adalah orang yang mengetik naskah proklamasi itu.

Tapi kini, dalam usianya yang 80 tahun, tokoh ini tidak bisa lagi bercerita secara logis dan runtun tentang pengalamannya dulu, karena terlalu tua.

Penulis merasa beruntung karena pernah mewawancarainya tahun 1974, tatkala dia berusia 66 tahun. Rekaman wawancara 14 tahun lalu itu, coba disajikan bagi pembaca Media Karya, semoga ada gunanya.

***

Kata-kata dalam judul di atas adalah bahasa Belanda yang kalau di-Indonesia-kan kira-kira berarti: "Kalau Indie (Indonesia) bebas, maka akan terjadi mala petaka." Belanda mungkin sadar betul bahwa sebuah bangsa yang dijajah selama 3,5 abad, akan menimbulkan mala petaka bagi penjajahnya bila diberi kebebasan (kemerdekaan).

Mengapa Proklamasi?

Menurut Sayuti Melik, dengan mengucapkan kata-kata Indie verloren Rampspoed geboren, Belanda sebenarnya bertekad tidak akan melepaskan daerah jajahannya itu, bila tidak dipaksakan lewat proklamasi oleh orang Indonesia sendiri.

Dan sebenarnya di antara tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu pun tidak semuanya sependapat dengan langkah proklamasi, karena dianggap terburu-buru. Alasan mereka, kemerdekaan tidak bisa dicapai dalam tenggang yang begitu pendek dari Perang Dunia II. Kalau Indonesia mau merdeka, harus menunggu dua atau tiga tahun lagi. Alasan ini mungkin ada benarnya, karena negara-negara seperti India, Pakistan dan Filipina, tidak perlu melakukan aksi pertumpahan darah untuk memperoleh kemerdekaan, karena tenggang waktu yang cukup jauh dari Perang Dunia II. "Menurut mereka proklamasi hanya memboroskan waktu saja," tutur Sayuti Melik.

Sayuti Melik pengetik naskah Proklamasi

Namun yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah pendapat yang menentang proklamasi bisa disetujui begitu saja?" Kelompok yang kontra proklamasi memang berpikir dalam kerangka acuan internasional. Namun yang menjadi pertanyaan lagi, "Apakah kelompok nasionalis yang tidak kenal kompromi dalam memperjuangkan kemerdekaan, mau menerima pendapat seperti itu?". "Karena bagi kelompok nasionalis, untuk kemerdekaan tidak perlu kompromi dengan siapa pun juga, maka perjuangan untuk itu perlu digalang," kata tokoh yang juga seorang jurnalis ini.

Bahwa India, Pakistan dan Filipina bisa memperoleh kemerdekaan tanpa perlu melakukan perjuangan bersenjata, patut dimengerti karena Inggeris dan Amerika yang menjajah mereka hanya bermotivasi memperluas pasar. Lain dengan Belanda. Negara yang termasuk kecil di Eropa ini waktu itu bermotivasi mencari daerah jajahan untuk mengeruk kekayaan alam dari koloninya agar mereka bisa bertahan hidup. Ditambah dengan Indie verloren rampspoed geboren yang menjadi motto mereka, maka kemerdekaan bagi Indonesia hanya mungkin diperoleh lewat pertumpahan darah.

Sayuti Melik bertutur, sebelum Perang Dunia II berakhir, perjuangan kemerdekaan Indonesia memang belum jelas operasionalnya, karena perbedaan pendapat antara kalangan nasionalis yang tidak kenal kompromi dengan kaum sosialis komunis yang berpandangan internasional.

Almarhum bekas Presiden Soekarno waktu itu berkata setengah meramal bahwa Indonesia bisa merdeka bila Perang Dunia berkecamuk di Lautan Teduh (Pasifik) Rupanya "ramalan" Soekarno itu bertolak dari perhitungan strategis, karena pada tahun 1943, Internationale III (komunisme) yang menjadi kiblat para pejuang sosialis komunis, dibubarkan atas desakan Amerika Serikat.

Kaum nasionalis — termasuk Sayuti Melik tentu —, yang tidak mengenal kompromi, bertentangan dengan kaum komunis yang dalam perjuangan memerdekakan Indonesia ingin bekerjasama dengan Belanda untuk

Digitized by Google

mengusir Jepang. Pihak nasionalis yang tidak ingin berkomprom i dengan siapa pun dalam soal kemerdekaan, akhirnya tetap mengambil langkah proklamasi. Sedangkan pihak komunis yang menginginkan kerjasama dengan Belanda dalam upaya memperoleh kemerdekaan mewujudkan niat mereka dengan membentuk SIBAR, Serikat Indonesia Baru.

Perbedaan di antara kedua kelompok ini tercermin juga ketika Indonesia merasa perlu mendirikan partai. Kelompok nasionalis menghendaki munculnya partai-partai nasosial, sedangkan kelompok sosialis komunis menginginkan banyak partai agar gema politik dan demokrasi di Indonesia lebih nyaring di mata internasional. Padahal, demikian Sayuti Melik, pembentukan partai-partai nasional diarahkan agar menggalang persatuan nasional dalam mewujudkan kemerdekaan. Maka muncullah Gerakan Republik Indonesia (GRI).

Tokoh yang mengaku selalu keluar masuk penjara di jaman Belanda maupun Jepang ini menjelaskan, kaum nasionalis waktu itu bukannya meremehkan arti dan manfaat orientasi internasional dalam mendukung gerakan kemerdekaan di Indonesia. Namun untuk memperoleh dukungan internasional, syarat yang paling penting adalah keterpaduan kekuatan-kekuatan nasional terlebih dahulu.

Di tengah-tengah perbedaan pendapat tentang arah perjuangan kemerdekaan itu, maka terjadilah apa yang pernah diramalkan Soekarno bahwa suatu saat akan terjadi Perang Dunia di Pasifik. Ketika itu Amerika dan Rusia (Uni Soviet) bersatu melawan Jepang. Amerika tentu tidak mau kehilangan muka bila bukan dia yang mengalahkan Jepang. Untuk itu maka jatuhlah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. "Seandainya yang membom Hiroshima dan Nagasaki adalah Rusia, mungkin jalan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia akan lain," tuturnya. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika merupakan kesempatan emas bagi Seokarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Kisah Mengetik Naskah

Kenangan manis dari detik-detik proklamasi bagi Pak Yuti adalah bagaimana peranan dia dalam mengetik naskah proklamasi itu sendiri. Dia bercerita, sebagai seorang yang bergerak di bidang jurnalistik dia terbiasa menulis tajuk rencana yang sarat dengan kritik-kritik terhadap Jepang di koran Pesat yang ia pimpin. Gara-gara tulisannya dia dipanggil serdadu Jepang untuk mempertanggungjawabkannya, dan langsung setelah itu disekap dalam penjara. Dipukul dan ditendang, adalah siksaan yang "wajar" ketika itu bagi mereka yang "masuk bui". Perlakuan serupa juga dialami teman-teman nasionalis lainnya.

Tapi Pak Yuti cukup cerdik. Didalam penjara dia memilih pekerjaan sebagai koki. Dengan "profesi" koki bukan saja makanan baginya terjamin, tetapi teman-teman seperjuangan di penjara bisa memperoleh ransum yang cukup dan bergizi.

Suatu saat pemerintah mengadakan sayembara mengarang. Seorang teman mendorongnya ikut dengan mengusulkan tema: "Kemerdekaan dan Kebudayaan Indonesia." Karena sebagai terhukum tidak diperkenankan mengikuti sayembara, maka dia memakai nama samaran "Hadikoesoemo", nama seorang juru tulis penjara di Jogyakarta.

Tidak disangka, tulisan "Hadikoesoemo" ditetapkan dewan juri sebagai peraih juara pertama. Ternyata kehadiran Pak Yamin (Mohamad Yamin) dalam dewan juri mempunyai andil atas kemenangan "Hadikoesoemo."

Celakanya, penyerahan hadiah dilakukan di Jakarta, sehingga Hadikoesoemo yang sebenarnya harus hadir. Sebagai seorang terhukum Sayuti Melik tentu tidak boleh keluar masuk penjara seenaknya, apalagi mendapat hadiah segala. Tentu sebagai peraih hadiah pertama, Hadikoesoemo harus memberikan sepatah kata dalam upacara penyerahan hadiah. Karena sebagai juru tulis penjara yang tidak terbiasa dengan pidatopidatoan, Hadikoesoemo meminta petunjuk Sayuti yang kemudian menyarankan agar Hadikoesoemo menemui isterinya di Jakarta, Trimurti, yang waktu itu pembantu dekat Bung Karno. Sialnya, pidato yang disusun oleh Trimurti itu ada kalimat-kalimat bahasa Inggeris.

Beberapa bulan kemudian, temanteman Pak Yuti yang kenal dengan gaya penulisannya, menggugat Hadikoesomo. Alhasil, Hadikoesoemo dimasukkan ke penjara, dan Sayuti Melik yang masih berusia 35 tahun kala itu dinyatakan bebas.

Setelah keluar, Pak Yuti memperoleh khabar bahwa ada pesan untuk menghadap Bung Karno. Dari pertemuan dengan Bung Karno itu Sayuti Melik mengetahui bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan telah terbentuk. Sejak itu Pak Yuti menjadi orang yang selalu dimintai nasehat oleh Bung Karno.

Dalam wawancara ketika itu Sayuti Melik juga meluruskan kesimpangsiuran cerita, seolah-olah Bung Karno mengatakan kepada sekelompok pemuda dari Menteng Raya yang datang kepadanya mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan, bahwa dia tidak akan memproklamirkan kemerdekaan biar digorok lehernya. Yang benar menurutnya, kepada kelompok pemuda itu Soekarno mengatakan, "Saya punya kawankawan, sehingga saya tidak bisa berbuat sendiri tanpa berkonsultasi dengan mereka. Kalau nggak percaya gorok leher saya."

Ketika perundingan telah begitu makan waktu dan tenaga, maka pada tanggal 16 Agustus 1945, jam 02 dinihari (berarti sudah tanggal 17 Agustus), Pak Yuti akhirnya disuruh oleh Bung Karno mengetik naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno sendiri. Itu berlangsung di Jalan Imam Bonjol No. 1.

Sebagai "sekretaris" yang baik, Sayuti tentu tidak asal ketik, tetapi memperbaiki baik dari segi bahasa maupun makna kata. Dia memberi contoh, dalam tulisan tangan naskah proklamasi oleh Bung Karno dicantumkan "atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia," dirobahnya menjadi, "atas nama bangsa Indonesia."

Tentang asli dan tidak asli naskah proklamasi ini memang pernah diperdebatkan. Tapi Sayuti membela bahwa naskah asli itu diketiknya atas dasar tulisan tangan Soekarno. Bahwa ada yang menyatakan naskah itu diketik oleh seorang wanita, karena nama "Sayuti" mirip nama wanita.

Tapi menurutnya, yang dibacakan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta adalah naskah yang diketik Sayuti atas dasar tulisan tangan Soekarno. Masalah tulisan tangan dan asli tidak asli ini pernah diributkan karena pada suatu masa terbit sebuah buku yang menonjolkan peranan pemuda dalam proklamasi. Tetapi Bung Hatta mengkonter lewat bukunya "Waarheit und Dichtung" yang mengatakan naskah asli proklamasi memang tulian tangan, tetapi yang dibacakan adalah hasil ketikan Sayuti Melik atas dasar tulisan tangan Bung Karno itu.□

(Maria Sugiharto)

Digitized by Google

Ujian Pertama 'Dari Bawah Ke Atas'

Golkar tidak bisa menghindari hukum pertumbuhan

Semangat (peningkatan) demokratisasi tampil dominan di sekujur tubuh Golkar — organisasi politik yang dalam Pemilihan Umum 1987 meraih suara terbanyak — belakangan ini. Rangkaian Musyawarah Daerah Golkar di tingkat II dan tingkat I dalam suatu mekanisme baru 'dari bawah ke atas' yang diharapkan menunjang hasrat demokratisasi itu, tengah berlangsung, bahkan mendekati rampung. Maka, cukup banyak yang tertegun sejenak, tatkala seorang doktor ilmu politik tiba-tiba menggambarkan semacam komplain yang menyentuh kadar demokratisasi dalam tubuh Golkar.

Dr Alfian dari LIPI — yang bagi orang-orang Golkar sebenarnya tidak dikategorikan sebagai 'orang luar' — dikutip pers ibukota mengatakan "salah satu hal yang selama ini dirisaukan masyarakat terhadap Golkar adalah proses seleksi pemimpinnya yang kadang-kadang terlihat masih kurang demokratis". Tapi terbawa oleh semangat demokratisasi, tampaknya para pemimpin Golkar memilih untuk tidak bersikap reaktif. Bahkan beberapa di antara mereka menganggap hal itu suatu masukan yang bisa cukup berguna. "Anggapan bahwa seleksi kepemimpinan Golkar kurang demokratis, mungkin ada benarnya", ujar Albert Hasibuan SH Ketua Departemen Cendekiawan DPP Golkar kepada pers.

Lebih dari itu — dalam suatu wawancara dengan Media Karya — Albert bahkan mengakui Golkar saat ini memang belum mampu sepenuhnya bertindak demokratis dalam seluruh hal. "Tetapi, yang menjadi penting di sini adalah keinginan untuk lebih demokratis". Dan pada giliran berikutnya, wawasan demokratis dalam Golkar itu harus dibuktikan dalam kenyataan sehari-hari. "Keinginan kita untuk melihat ke belakang, mungkin ada baiknya. Tapi menurut saya adalah lebih baik melihat ke depan guna lebih memberikan arti pada dinamika yang ada. Sehingga, demokratisasi dalam Golkar bisa lebih luas lagi".

A.E. Manihuruk

Sejumlah Konsekuensi Logis

Sebenarnya, upaya meningkatkan kadar demokratisasi dalam Golkar bukan soal yang baru dijamah. Peningkatan demokratisasi dalam Golkar bahkan memang merupakan keharusan yang mempunyai hubungan sebab dan akibat dengan penegakan Demokrasi Pancasila yang menjadi komitmen Orde Baru. Prasyarat yang ideal bagi Demokrasi Pancasila adalah penyaluran aspirasi dan pengikutsertaan masyarakat melalui kekuatan sosial politik yang ada dalam ruang lingkup sistem demokratis dalam batasan Pancasila. Dalam konsep Golkar, seperti pernah diutamakan Ketua Umum Golkar empat tahun yang lalu, aspek lain yang terkait ialah persyaratan mengenai manusianya, yaitu yang turut serta dalam sistem Demokrasi Pancasila tersebut. Apalagi, menurut ketentuan Undang-undang politik yang ada dan kini berlaku, keanggotaan organisasi politik adalah berdasarkan perorangan. "Makin tinggi kadar peran dalam menjalankan sistem, makin tinggi persyaratan kualitas manusia yang dibutuhkan". Namun dicatat pula bahwa secara umum bilamana mekanisme tidak berjalan, hal itu cenderung pula mengundang sikap perseorangan yang tidak demokratis.

Dalam hal pemenuhan tuntutan undang-undang mengenai keanggotaan perorangan, Golkar merupakan organisasi politik yang paling cepat memberi tanggapan. Melalui Musyawarah Nasional III tahun 1983, Golkar melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, dengan mencantumkan pengaturan keanggotaan berdasarkan stelsel aktif perorangan. Dan stelsel aktif ini, menurut Ir Rachmat Witoelar — Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Golkar — memberikan sejumlah konsekuensi logis. Dalam hal ini Rachmat menyebutkan pelaksanaan pengkaderan serta pelaksanaan mekanisme baru Musda II, Musda I dan Munas yang dimulai tahun ini.

Hakekat dari pelaksanaan mekanisme baru — 'dari bawah ke atas' — ini, kata Rachmat, "adalah agar anggota-anggota Golkar lambat laun mempunyai kesempatan partisipasi lebih luas". Kalau kita lihat, untuk pendekatan dari bawah, yang pertama-tama di sana dari sudut organisasi adalah kader-kader di desa. Konsep-konsep merekalah yang dirangkum di

Digitized by Google

DPD II dan untuk seterusnya dirangkum lagi di tingkat DPD I dan seterusnya. Bagaimanapun, "ini merupakan peluang bagi mereka untuk secara aktif turut menentukan nasib organisasi". Mekanisme baru ini memang diintroduksi DPP Golkar untuk tujuan itu. Ketua Umum Golkar Sudharmono SH — berbicara dalam Rapim Golkar 1987 — membentangkan bahwa gagasan ini dilandasi pemikiran dalam rangka mengembangkan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan organisasi Golkar. Golkar ingin memberikan peranan yang lebih besar kepada para anggota dan kader yang berada di akar-akar rakyat dalam partisipasinya pada organisasi. Sekaligus, dikaitkan dengan langkah konsolidasi organisasi setelah suksesnya pelaksanaan Pemilu 1987. "Merupakan harapan, dengan terciptanya mekanisme baru ini akan terdapat perasaan yang meluas bahwa jajaran kepemimpinan Golkar benar-benar tumbuh dan didukung dari bawah, atau dari daerah ke pusat". Harapan ini didukung dengan keyakinan seperti diutarakan seorang tokoh Golkar di daerah tingkat II Pandeglang Haji Moch Zein BA, "Aspirasi dari bawah akan mendukung kepemimpinan Golkar tanpa menghilangkan proses peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri."

Tentu saja, Rachmat mengingatkan, kita tidak gegabah mengasumsi bahwa konsolidasi organisasi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, melainkan melalui tahapan-tahapan. Namun tahapan-tahapan itu harus memberi peluang yang cukup dan memerlukan keterlibatan sebanyak mungkin anggota dalam perubahan, kalau kita tidak menginginkan konsolidasi itu hanya di atas kertas.

Adakah proses berjalan sebagaimana yang dikehendaki secara ideal?

Hingga pertengahan Agustus ini, boleh dikatakan proses penyelenggaraan Musda II dalam suasana dan lingkup mekanisme baru mendekati rampung seluruhnya. Sementara itu, beberapa daerah juga telah melaksanakan Musda I. Yang belum, diharapkan menyelesaikan paling lambat bulan September, yakni sebelum Munas bulan Oktober.

Untuk sementara ini, ujar Rachmat Witoelar, "dari hasil-hasil dan dari laporan-laporan yang telah masuk DPP, saya lihat jajaran kader Golkar cukup menggunakan kesempatan berpartisipasi". Ini cukup konkrit. Yang penting pula, melalui kebersamaan, mereka tahu bahwa dengan berpartisipasi keinginan mereka dapat disalurkan ke dalam tingkatan organisasi yang lebih tinggi untuk pada akhirnya sampai di tingkat Munas. Kecenderungan meningkatnya partisipasi para anggota itu jelas menggembirakan, kata Rachmat.

Akan tetapi, bukannya tak ada kritik dalam pada itu terhadap penyelenggaraan Musda. Bagi beberapa pihak, segalanya kelewat lancar. Maka ada yang misalnya mempertanyakan dengan nada sangsi, apakah cukup terjamin sifat demokratis dari pemilihan atau penentuan pengurus yang terselesaikan dalam tempo 1-2 jam saja? Pers mentransfer pertanyaan seperti ini kepada para pimpinan Golkar. Lalu salah satu Ketua DPP Golkar, A.E.

Paternalistik Yang Komunikatif

Penilaian terhadap hasil Musda-Musda Golkar di tingkat I dan II tidak terlepas dengan cita-cita, sejarah perkembangan, latar belakang dan motivasi keberadaan Golkar sendiri. Kendatipun ada beberapa daerah yang belum menyelenggarakan Musda itu, akan tetapi pembalikan dari proses top down menjadi bottom up ini memberikan suasana yang lebih segar dan menciptakan kegairahan di kalangan masyarakat Golkar.

Pada sisi lain penyelenggaraan Musda Golkar yang sedemikian rupa ini, menurut penilaian Ketua Umum HWK Ny Nani Soedarsono, SH, mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan demokrasi internal Golkar yang semakin berkembang. Memperkaya bahan pertimbangan Golkar dengan hal-hal, yang secara nyata dihadapi masyarakat di lapisan terbawah. Dimana sebelum ini biasanya dideteksi melalui pemantauan dan ketajaman analisa. Bahkan, memberi peluang bagi kader-kader yang berbobot, berprestasi serta dikenal oleh masyarakat untuk tampil dan atau terorbitkan.

Nani Soedarsono, SH

Oleh karena itu, arus balik ini mendapatkan perhatian dan sambutan dari masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat ilmuwan. Gagasan Golkar dalam menyelenggarakan Musda ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Langsung atau tidak langsung, pembalikan proses top down menjadi bottom up ini besar pengaruhnya dalam penciptaan masyarakat berprestasi. Karena masyarakat berprestasi hanya berkembang dari masyarakat yang berpartisipasi. Sedangkan masyarakat yang berpartisipasi ini hanya berkembang dari masyarakat yang peranannya dihargai, diakui, disalurkan dan dikembangkan. Untuk itu masyarakat yang berprestasi sangat diperlukan dalam rangka mengemban misi bangsa selanjutnya.

"Saya kira motivasi dasar yang mendorong pimpinan Golkar menggagaskan dan menyelenggarakan Musda-Musda mendahului penyelenggaraan Munas, adalah tekad Golkar untuk meningkatkan bobot pelaksanaan demokrasi. Sehingga proses demokratisasi ini berkembang seiring dengan proses gerak maju dinamika kemajuan bangsa dan memberikan dukungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang," tegas Ny. Nani Soedarsono.

Sedang kualitas pelaksanaan demokrasi yang ada kuat menurut zamannya, menjanjikan segala praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan ber-

Digitized by Google

Manihuruk, menjawab bahwa keputusan penentuan pimpinan organisasi tidak dilakukan oleh satu dua orang tetapi oleh kader-kader secara bersama-sama. Sebenarnya, proses pemilihan pimpinan DPD itu berlangsung cukup lama, sebab sebelumnya terlebih dahulu dilakukan inventarisasi nama yang selanjutnya disaring untuk kemudian keputusan akhirnya dilakukan oleh para kader yang hadir dalam Musda. Penentuan dilakukan melalui musyawarah mufakat, sedang voting hanyalah jalan terakhir bilamana tak tercapai mufakat bulat. Dengan uraian ini, Manihuruk menggambarkan bahwa dengan cara yang efisien dan sistimatis itulah pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat tidak bertele-tele. Kepada Media Karya, A.E. Manihuruk menyimpulkan bahwa rangkaian Musda yang telah berlangsung sejauh ini berjalan secara demokratis dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Tidak ada main paksa-paksaan. Dalam musyawarah muncul berbagai pendapat. Memang ada pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam pembicaraan-pembicaraan, tetapi perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan melalui musyawarah sehingga tercapai mufakat. Maka tidak diperlukan voting.

Pembangunan politik memerlukan tahap-tahap tertentu

Bahwa Musda-musda Golkar pada umumnya berjalan lancar, itu memang benar. Di Jakarta Misalnya, seperti dituturkan Drs Agung Laksono, penyelenggaraan Musda di lima wilayah DKI berlangsung tertib dan lancar. Terlihat kerjasama yang kuat dari tiga jalur dalam Keluarga Besar Golkar.

negara senantiasa didesain serta dilaksanakan atas dasar konstitusi, demokrasi dan hukum.

Adapun motivasi dasar menurut mantan menteri Sosial ini, ditopang oleh dua faktor, pertama tuntutan dan tantangan yang dihadapi bangsa. Baik sekarang maupun nanti, yang untuk menjawabnya dan mensyaratkan masyarakat berprestasi. Kedua, kondisi Golkar saat ini dengan memiliki kurang lebih 8 juta kader di samping kualitas organisasi dan pengorganisasian kegiatannya yang semakin mapan, menuntut adanya suatu mekanisme dalam daur kehidupan organisasi yang memungkinkan — peranan kader akan semakin jernih, jelas dan bermakna. Komunikasi internal Golkar berkembang penuh makna serta pemaduan aspirasi serta penyalurannya berlangsung tepat substansi, cara, waktu, koridor serta hasil.

Memang demikian pembalikan proses ini merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat. Sehingga pimpinan Golkar di tingkat pusat mempunyai dukungan dan akar ke bawah. Apalagi 'salah satu sisinya'' karena Golkar tidak hanya dicintai oleh masyarakat dari aspek cita-cita perjuangannya, melainkan juga dari aspek karya-karyanya yang bermanfaat dan dirasakan masyarakat. Sementara manusia Indonesia sendiri tidak hanya berbicara dengan nalar, tapi juga dengan rasa. Dengan demikian, hubungan antara pimpinan Golkar dengan masyarakat tidak hanya kita ciptakan atas dasar 'ada bersama' dalam satu kubu. Namun, juga perlu diperkuat dengan hubungan bathin karena organisasi Golkar adalah kumpulan orang yang tidak hanya memiliki nalar, melainkan juga memiliki rasa dan karsa.

Ny. Nani Soedarsono mengakui, bahwa salah satu ciri kepemimpinan dalam organisasi politik atau sosial kemasyarakatan kita adalah kepemimpinan yang paternalistik. Karena kepemimpinan semacam ini merupakan bagian dari dan dalam tatanan kehidupan bangsa kita dari masa ke masa — semenjak bangsa ini menghuni nusantara. Digagaskannya bottom up sistem ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi ciri kepemimpinan paternalistik. Tetapi dimaksudkan untuk mengaktualisasikannya sesuai dengan semangat zaman. Kepemimpinan yang sesuai dengan semangat zaman kontemporer ini bagi kita, adalah kepemimpinan paternalistik yang komunikatif dan bukan yang terkesan otoriter melainkan yang demokratik.

Persepsi kader-kader Golkar terhadap proses dan hakekat bottom up, katanya, menurut perhitungan berdasarkan nalar semata mestinya sudah sesuai. Sebab arus balik ini dilakukan dengan didahului oleh gerakan kaderisasi, ikhtiar konsolidasi secara menyeluruh. Baik konsolidasi ideologi, wawasan maupun organisasi, adanya juklak (petunjuk pelaksanaan) dan diiringi dengan berbagai pertemuan yang melicinkan jalannya Musda dan dapat berfungsinya Musda sebagaimana mestinya sesuai dengan hakekat bottom up yang digagaskan Golkar itu. Dengan tidak mengurangi bobot kelancaran dan kesuksesan Musda-Musda yang telah berlangsung. Kita melihat bahwa belum sepenuhnya Musda terbebas dari kendala. Kendala-kendala yang secara samar atau dengan jelas menampak, dimana banyak asal muasalnya dapat dipulangkan pada masih besarnya pengaruh kedaerahan. Kemudian komunikasi antar jalur belum sepenuhnya terselenggara sebagaimana yang diharapkan, kendatipun secara formal memang telah dilakukan dan sikap pandang yang masih membedakan asal kader dari segi jalur pembinaannya. ☐

(DT/BM)

Digitized by Google

"Sehingga penyelenggaraan Musda tidak menemui suatu hambatan atau halangan apapun". Kelancaran itu dalam gambaran Agung melajuri pula baik penyusunan program kerja maupun penyusunan komposisi personalia DPD II. "Semua berjalan sesuai ketentuan". Kelancaran ini menurut Agung tidak perlu mengorbankan suasana demokratis dan keterbukaan pembicaraan. Kelancaran dan keterlibatan tercipta karena kendatipun terjadi perbedaan pendapat dan adu argumentasi yang cukup ketat disatu pihak, pada pihak lain terjaga pula suasana dan sikap saling menghargai di antara peserta Musda.

Demokratisasi, Bukan Keajaiban

Jadi, sejauh ini memang ada banyak hal yang menggembirakan dari Musda dalam iklim bersuasana baru 'dari bawah ke atas' ini. Namun Rachmat Witoelar tetap merasa perlu mengingatkan untuk tidak cepat-cepat berpuas diri. Karena terlepas dari langkah-langkah maju yang telah tercapai,

Rachmat Witoelar

ia melihat bahwa jelas kualitas partisipasi para anggota masih memerlukan peningkatan. Kita tentu mengetahui bahwa pembangunan politik dan pembangunan bangsa, bagaimanapun perlu melewati tahap-tahap tertentu. Agaknya, Rachmat bermaksud mengingatkan bahwa betapapun, pembangunan politik bukanlah sesuatu yang penuh keajaiban. Sedikit-dikitnya proses pembangunan politik mengandung jalinan proses yang rasional. "Kita harus tetap realistis, kita tidak boleh mengharapkan serta merta tercapai suatu struktur yang sempurna segera pada waktu sekarang ini juga". Rachmat kurang lebih menggambarkan bahwa para pimpinan Golkar sendiri pun masih memerlukan waktu untuk belajar mendengarkan dengan baik apa aspirasi yang hidup di kalangan masyarakat maupun di kalangan anggota sendiri. "Kita memang sudah melangkah dengan mengganti mekanisme pelaksanaan Musda itu, kitapun sudah melangkah ke suatu cara baru menyalurkan dan menampung aspirasi dari bawah sebagaimana yang berkembang dalam floor Musda-musda itu, tetapi untuk sempurnanya masih perlu beberapa tahapan lagi sampai semuanya terpenuhi dengan sebaik-baiknya".

Terlepas dari itu semua, dikritik ataupun tidak dikritik, persoalan demokratisasi bagi Golkar menurut

Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat

Digitized by Google

logika politik yang terkait dengan proyeksi masa depan, sesungguhnya adalah soal to be or not to be. Berhasil tidaknya (peningkatan) demokratisasi Golkar akan menyangkut kesinambungan eksistensi dan kehadiran perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.

Adalah jelas bahwa secara universal di masa mendatang ini segala bentuk demokrasi, termasuk Demokrasi Pancasila di Indonesia, harus lebih berkembang secara kualitatif dalam menjawab tuntuan kemajuan pola pikir masyarakat.

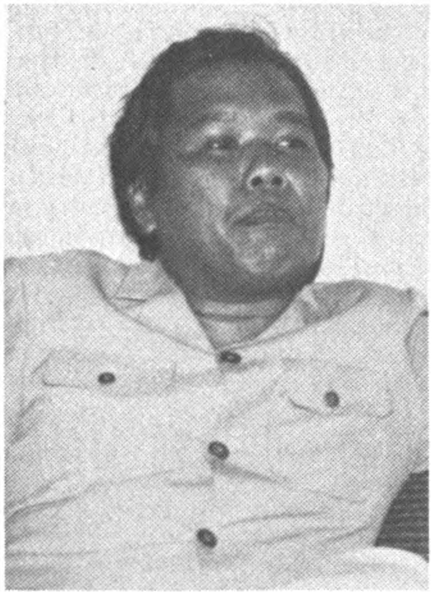

Albert Hasibuan

Dengan pola pikir yang lebih maju, antara lain sebagai dampak kemajuan pendidikan dan informasi, terlihat menguatnya kecenderungan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan sesuatu hal yang tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusannya. Kecenderungan ini terlihat kuat dan jelas umpamanya di daerah Sumatera Barat — sebagaimana digambarkan seorang tokoh Golkar di sana, dr Alis Marajo (Media Karya, 52/Juli 1988) — dan daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan banyak lagi.

Dukungan dan keikutsertaan anggota masyarakat di masa depan banyak ditentukan oleh kemampuan organisasi politik menampilkan wajah demokratisnya. Sampai sejauh ini segala sesuatu yang lebih demokratis merupakan hal yang lebih memikat. Loyalitas sempit makin ketinggalan zaman, dan diganti oleh dedikasi dan loyalitas yang kreatif dan rasional. Kalau sebelum ini kita lebih condong menganggap bahwa rakyat adalah sekedar sasaran pendidikan politik, maka sejalan dengan kemajuan berpikir yang terjadi yang diperoleh dan tercipta oleh keadaan dan pengalaman masyarakat itu sendiri sehari-hari dengan atau tanpa bantuan siapa pun, pada akhirnya keadaan akan berubah dengan berubahnya mereka menjadi subyek politik yang harus ditampung keinginan dan aspirasinya.

Hukum Pertumbuhan

Mengacu kepada pokok masalah

Pinantun Hutasoit

yang sama tentang demokratisasi, Albert Hasibuan mengutarakan pandangannya dengan nada lebih lunak. "Sebetulnya bukan terutama soal kebutuhan", ujarnya, "tapi suatu trend perkembangan demokrasi di negara kita secara makro, bahwa dalam perkembangan demokrasi setelah Orde Baru berjalan kurang lebih 22 tahun arahnya adalah menuju kualitas demokrasi itu sendiri". Proses mengarah kepada kualitas ini adalah suatu proses searah dengan kemajuan yang telah dicapai di berbagai bidang. Di bidang ekonomi misalnya, kita telah menikmati sejumlah hasil dan karena perkembangan ekonomi itu Indonesia mengalami kemajuan dan kita sudah lebih mampu berbicara tentang hak-hak. Sudah lebih mampu pula berbicara mengenai hal-hal yang lebih dari hasil yang telah dicapai sekarang ini. Pada sisi lain, kemajuan-kemajuan tersebut mempengaruhi pula perkembangan politik dan demokrasi. "Kalau dulu ada semacam kecenderungan orang untuk menerima pluralisme dalam politik dan demokrasi, maka dengan kemajuan yang ada orang sudah meninggalkan pluralisme dan melihat politik serta demokrasi ini dari sudut kualitas". Salah satu aspek demokrasi, yakni kebebasan untuk menyatakan pendapat, kini memerlukan 'tambahan'. Dan itu adalah kebebasan untuk berpartisipasi dalam penentuan-penentuan keputusan maupun dalam menentukan pemimpin-pemimpinnya. "Hal ini juga mempengaruhi kehidupan Golkar sebagai organisasi politik", demikian Albert. "Dan Golkar pada saat ini juga tidak terlepas dari keharusan untuk mengembangkan kualitas demokrasi ini". Bagi Golkar pengembangan kualitas demokrasi ini implikasinya adalah bahwa Munas yang akan datang itu diberi latar yang lebih kuat akan kualitas demokrasi dan itu dinyatakan dengan Munas yang dimulai dengan penyelenggaraan lebih dahulu Musda-musda di daerah. Penyelenggaraan Musda-musda ini mempunyai titik senggang pemikiran, yaitu bahwa partisipasi anggota Golkar yang berada di daerah-daerah agar diberi kesempatan lebih dulu membicarakan masalah-masalahnya sekaligus untuk menentukan pemimpin-pemimpinnya. Dari sini, Golkar ingin menggambarkan bahwa komitmen mereka terhadap demokrasi pada saat ini sudah lebih diharapkan.

Di situlah tampaknya posisi bottom up system yang sedang dikembangkan Golkar dikaitkan dengan demokratisasi yang pada gilirannya bermuara pada demokratisasi kehidupan bangsa di masa mendatang. Namun hingga sejauh ini, terhadap bottom up system ini terdapat beberapa pandangan tentang faset-fasetnya.

Bukannya memasang reserve terhadap bottom up system, tetapi Pinantun Hutasoit — anggota Golkar yang juga adalah ketua salah satu ormas tingkat nasional, MKGR — memohon kecermatan seraya mengingatkan adanya plus minus dari sistim ini. Menurut Pinantun, baik bottom up system maupun top down system, tak terlepas dari keadaan masyarakat bangsa. Pada hakekatnya, 'bangsa baru' itu selalu bertitik awal dari masyarakat agraris. Sedang masyarakat agraris itu biasanya berkaitan dengan pola paternalistis. Dalam peralihan menyongsong masyarakat industri, diperlukan sejumlah pengendalian masalah secara dini, karena pola pemikiran masyarakat agraris dan industri itu sangat berbeda. Dalam

Digitized by Google

kasus perkembangan Indonesia, Pinantun menyatakan sepakat dengan "tindakan dini yang dilakukan DPP Golkar". Tindakan dini yang dimaksud adalah diintroduksikannya mekanisme yang bottom up sifatnya. Di mata Pinantun, pelaksanaan mekanisme yang bottom up tak lain bertujuan mempertemukan pola pikir dari bawah dengan pola pikir dari atas. Tapi, dengan pengertian bahwa masyarakat Indonesia itu dalam memutuskan suatu hal akan selalu mencari musyawarah dan mufakat.

Kalau kemudian Pinantun yang sudah puluhan tahun berkecimpung di lingkungan Golkar ini menaruh sedikit sikap hati-hati, itu karena ia beranggapan "pendidikan politik masih belum merata betul" kendati di sana sini telah ada keberhasilan. Dari sudut dinamisasi, serba top down memang tidak menguntungkan. "Suatu bangsa yang sudah tidak ada inisiatifnya, sama dengan masyarakat yang sudah mati semua, tidak beda dengan bangsa jajahan". Akan tetapi kalau kita selalu berteriak tentang bottom up saja, juga tidak baik. "Maka dari itu, dalam Golkar pola bottom up dan top down perlu kita pertemukan di tengah. Dan inilah saya rasa pola musyawarah dan mufakat".

Sebenarnya memang dengan mengintrodusir mekanisme baru yang bersifat bottom up, Golkar bukannya sedang mengadakan pembalikan — termasuk pembalikan menuju hal yang lebih liberalistis seperti yang sempat dipertanyakan beberapa pihak. "Tidak ke sana", tegas A.E. Manihuruk. "Kalau kita mengutamakan vote-vote, mungkin begitu. Tapi ini tidak". Dan menurut Rachmat Witoelar, "Motif kita adalah meningkatkan Demokrasi Pancasila". Jadi jelas, pokok masalah bukanlah soal pembalikan — apalagi dari Demokrasi Pancasila — melainkan soal peningkatan kualitas demokrasi, dalam hal ini peningkatan kualitas pelaksanaannya di tubuh Golkar sendiri. Dan ini semua tak lain untuk menjawab tantangan kemajuan. Albert Hasibuan menguraikan "Golkar sebagai organisasi sosial politik tidak bisa menghindari hukum pertumbuhan". Setiap pemikiran yang berkembang biasanya terkait dengan periode-periode tertentu dalam pertumbuhannya. Begitu juga dengan pemikiran dan perkembangan demokrasi. Tidak berarti bahwa di dalam bentuk-bentuk yang awal demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita mengaitkan dengan hukum-hukum pertumbuhan, demokrasi pun secara dinamis berkembang dan tumbuh mengarah pada kualitas.

Kalau Golkar sudah mengarah pada kualitas demokrasi, artinya dinamika berlangsung. "Itu berarti Golkar sudah mempersiapkan agar tahun-tahun yang dimasuki sebagai suatu konsepsi dan usaha yang mempunyai arti masa depan. Masa depan itu adalah tahun 2000 atau abad 21. Artinya, dengan konsepsi demokrasi itu, Golkar sudah mempersiapkan dirinya untuk memasuki abad 21".

Terlalu jauh dan agak muluk? Tidak, bagi suatu organisasi politik yang bercita-cita. Kegagalan maupun kelambanan langkah dan proses peningkatan demokratisasi suatu organisasi politik, dapat menjadi tanda-tanda akan berakhirnya kelanjutan eksistensi dan peranan organisasi tersebut dalam percaturan kehidupan politik dan kenegaraan yang modern. Golkar sedang melangkah untuk ini, memasuki ujian pertama dengan mekanisme baru yang bertujuan dengan jangkauan jauh ke depan....□

WT/DT/BM/LT/RA

Dari ABRI Untuk Golkar

Memang ada sejumlah pertanyaan timbul di seputar kehadiran 'beberapa tokoh Abri' dalam kancah Musda Golkar di beberapa daerah tingkat II maupun tingkat I. Di Daerah Istimewa Aceh misalnya, tampil mantan Kadapol menjadi Ketua baru bagi DPD I Golkar.

Bisakah seorang anggota Abri aktif, duduk dalam kepengurusan suatu organisasi politik? Jelas tidak, karena tidak dimungkinkan oleh perundang-undangan yang ada. Tak kurang dari Pangab Jenderal Try Sutrisno sendiri menegaskan hal tersebut. Usai bertemu Wakil Presiden RI Sudharmono SH — yang kebetulan adalah pula Ketua Umum Golkar — beberapa waktu yang lalu, Pangab mengatakan tidak benar ada anggota Abri aktif, menjadi pengurus Golkar. Kalau purnawirawan Abri, memang ada.

Salah seorang Ketua DPP Golkar A.E. Manihuruk memperkuat penegasan Pangab. Memang ada yang disangka masih Abri aktif, tapi menurut Manihuruk "sebelum terpilih sudah dipensiunkan lebih dulu". Barangkali administrasinya saja yang terlambat.

Tapi sementara itu, selain masalah perundang-undangan, secara internal berlaku kriteria bahwa seseorang yang menjadi pimpinan Golkar selain memenuhi syarat PDLT juga harus mempunyai masa perjuangan dan atau kegiatan sekurang-kurangnya lima tahun untuk Golkar. Bagi purnawirawan yang telah lama pensiun, jelas tidak ada soal. Sebaliknya secara sepintas, tokoh Abri yang baru pensiun, tampaknya mustahil memenuhi kriteria ini. Untuk ini, Manihuruk menjelaskan bahwa kriterianya bukan menyangkut masa keanggotaan, tapi 5 tahun aktif dalam jajaran. Ini yang mungkin perlu dicatat, karena bagi Golkar, Abri pada hakekatnya bisa terhitung sebagai jajaran dalam Keluarga Besar Golkar — suatu hubungan aspiratif yang berlatar belakang historis — yaitu yang dikenal sebagai Jalur A.

Menurut Ir Rachmat Witoelar, dalam masalah yang satu ini kita sebenarnya bicara soal perjuangan. "Perjuangan untuk menumbuhkan demokrasi, membangun bangsa, tidak boleh dihalangi oleh hal-hal administratif yang mengikat diri kita sendiri. Karena perjuangan Golkar dan Abri itu adalah kongkurensi yang sama dan sebangun, tentu tidak ada masalah selama kita tidak melanggar peraturan-peraturan Abri itu sendiri". Anggota Abri yang pensiun diterima dengan tangan terbuka di Golkar, karena kesamaan tujuan perjuangan.

Rachmat mengingatkan, Abri sebagai suatu institusi jelas memang tidak melimpahkan dukungan secara pilih kasih kepada organisasi politik yang ada. Tapi dalam hal ini, kita tidak bicara mengenai Abri sebagai institusi, tetapi mengenai perorangan yang sudah pensiun.

Yang jelas memang, Golkar bersikap tangan terbuka kepada purnawirawan Abri. Dan sikap terbuka itu, tak hanya berlaku untuk purnawirawan Abri. Sebagai organisasi politik yang ingin berkembang, apalagi sebagai pembaharu, Golkar tentulah harus berkemampuan melakukan penggalangan-penggalangan dan berupaya memperoleh dukungan seluas-luasnya, dan kawan seperjuangan sebanyak-banyaknya, sepanjang tidak melanggar undang-undang.□

Digitized by Google

Dari Bawah Ke Atas, Arus Positif Bagi Demokratisasi!

Menyambut musda-musda tingkat satu di seluruh Indonesia, telah didahului dengan musda-musda Golkar tingkat dua se Tanah Air, dan hampir rampung. Berjalan sangat dinamis dan aspiratif serta akomodatif, di sana sini dirasa ada kesegaran dalam menjalankan musyawarah untuk mengambil keputusan akhir, untuk menentukan kepengurusan sebagai langkah awal di dalam menjabarkan program-program organisasi di masa-masa akan datang.

Suatu langkah yang tepat dan strategis bagi Golkar sebagai pengemban cita-cita perjuangan bangsa dalam melanjutkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai pengamalan Pancasila. Semakin terbuka lebar kesempatan bagi setiap kader Golkar untuk memperkembangkan kapasitasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan sistem dari bawah ke atas ini. Keyakinan tersebut dikemukakan oleh kader-kader Golkar yang dengan sangat inten mengamati dan sekaligus mengevaluasi perjalanan musda-musda tingkat dua yang hampir selesai.

Moh.Hatta BBA kader Golkar yang mendapat kepercayaan sebagai Sekjen MDI juga anggota DPR-MPR.RI periode 1987-1992 mengatakan, menyongsong Munas yang dimulai dari musda-musda tingkat dua dan kemudian tingkat satu justru makin membuka kesempatan setiap kader memberikan peranannya, partisipasinya secara langsung sehingga aspirasinya dapat disalurkan dengan baik, karena tahapan-tahapan konsolidasi, kaderisasi telah berjalan dengan baik di dalam rangka meningkatkan kwalitas dan kadar setiap kader. Kini tiba saatnya untuk tiap kader menyumbangkan fikiran-fikirannya kepada Golkar melalui mekanisme dari bawah ke atas, katanya.

Didiet Haryadi, Kader Golkar yang mendapat kepercayaan memimpin KNPI duduk sebagai anggota DPR. RI-MPR periode 1987-1992 berharap mekanisme yang sangat tepat dan baik dari bawah ke atas ini harus benar-benar konsisten dilaksanakan oleh semua pihak agar semakin hari semakin kokoh bangunan sistem yang ada dalam diri Golkar, aturan permainan itu harus benar-benar dipatuhi, kelak tak ada lagi istilah katrol dan loncat pagar. Sedangkan **Ardi Partadinata,** anggota DPR-MPR.RI dari FKP pengurus pusat Ikatan Sarjana Kosgoro, mengingatkan bahwa pelaksanaan musda-musda tingkat dua dan tingkat satu untuk menyambut Munas Golkar bukanlah tujuan akhir dari rangkaian perjuangan. Namun dikatakannya merupakan awal babak baru dari rangkaian perjuangan untuk masa-masa yang akan datang, sebagai perwujudan dalam mengemban cita-cita Proklamasi dan amanat rakyat.

GBPH. Mangkubumi, Ketua Golkar DIY, sependapat yang dikatakan banyak pengamat bahwa kini sudah saatnya Golkar Mandiri dalam arti kwalitatif, untuk itu Munas yang dimulai dari bawah adalah langkah maju dalam menuju demokratisasi. Mekanisme seperti ini harus terus dikembangkan dalam berbagai sektor hingga akhirnya rakyat benar-benar merasa memiliki dan mewakili program-program yang ditelurkan oleh Pemerintah yang tidak dapat dipungkiri bahwa terbesar adalah prodak Golongan Karya. Karenanya menurut **H.Agus Tagor** Anggota MPR.RI yang juga Ketua Umum PRSSNI, Golkar sebagai kekuatan sosial politik berhak diwakili dan mewakili semua rakyat Indonesia, dengan demikian menurutnya, mekanisme dari bawah ke atas membuka banyak peluang untuk mempercepat proses agar Golkar benar-benar mengakar di tengah rakyat. Pemantauan dari lima kader Golkar di atas terhadap pelaksanaan mekanisme dari bawah ke atas didasari atas beberapa pemikiran dan harapan-harapan agar kelak tidak lagi menunggu petunjuk dari atas terus menerus tanpa ada keberanian menyampaikan gagasan dan kritiknya.

Memang banyak persamaan evaluasi dari kelima tokoh Golkar di atas dalam mengamati perjalanan musda-musda tingkat dua yang hampir saja berakhir secara keseluruhan di semua daerah tingkat dua se Indonesia. Namun cara melihat dan menelaah masing-masing menarik untuk disimak.

Moh.Hatta BBA, Sekjen MDI Anggota DPR.RI dari FKP
Jangan Asal-asalan

Kepengurusan Golkar bukan asal-asalan, karena kita tahu kepengurusan Golkar itu membawa aspirasi warga Golkar. MDI sendiri, tidak mengharapkan karena yang bersangkutan adalah pengurus MDI lalu harus duduk sebagai pengurus Golkar, tanpa memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama. Jadi mekanisme dari bawah ke atas justru diharapkan lebih menggairahkan semangat meningkatkan kwalitas diri dari dan bagi masing-masing kader Golkar. Karena dari sanalah secara konsisten akan diuji kemampuan masing-masing kader. Tidak dapat dipungkiri terlaksananya secara baik dan lancar serta demokratis dengan bottom-up system, tidak dapat berjalan sendiri, kerjasama yang baik di antara jalur, baik A B dan G membuktikan suasana demokratis, dinamis dan akomodatif, sehingga melahirkan komposisi kepengurusan yang berbobot di hampir setiap daerah tingkat dua yang saya lihat.

Siapapun dia dari unsur manapun sepanjang kader Golkar dan berwawasan cukup dengan kwalitas yang memadai tidak perlu kita ragukan untuk menduduki jabatan kepengurusan Golkar di tiap-tiap daerah tingkat dua, tentunya tidak menutup kemungkinan bila dari unsur MDI mempunyai kader yang disebutkan di atas tadi duduk sebagai pengurus.

Apa jadinya Golkar di masa yang akan datang, bila para pengurusnya tidak mempunyai kemampuan yang lebih, karena makin hari rakyat semakin kritis, katanya. Lebih jauh Moh.Hatta BBA menekankan, bahwa pada akhirnya mekanisme yang selama ini berlaku menjadi lebih tertopang setelah adanya dari bawah ke atas. Sebetulnya cara-cara ini adalah kelanjutan dari Munas Golkar yang telah lalu, sedangkan menyangkut Tri Sukses I, adalah merupakan jawaban

Digitized by Google

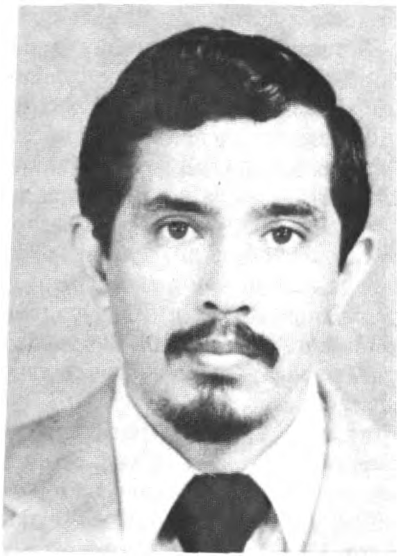

Moh.Hatta BBA

Golkar pada amanat GBHN. Pasti sesuatu sistem yang dirasa baru akan timbul persoalan-persoalan, namun tidak akan terlalu prinsipil.

Yang penting adalah dengan bottom-up system akan terbuka bagi setiap kader untuk berkembang. Namun mekanisme serta sistem yang baik tetap akan berpulang kepada manusia-manusianya. Demikian juga Golkar semakin ke depan semakin membutuhkan manusia-manusia tidak hanya saja berkwalitas tetapi bermoral.

Golkar sebagai kekuatan sospol terbesar harus selalu mampu tampil paling depan sebagai pelopor pembangunan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan perangkat manusia yang berkwalitas. Karena kwalitas suatu bangsa, suatu organisasi juga akan berpangkal kepada manusia-manusianya.

Dengan mengandalkan kader-kadernya yang berkwalitas dan bermoral, Golkar akan mampu memerangi kebodohan dan kemiskinan, sehingga saat itulah datang hari yang ditunggu sebagai suatu masa yang adil dan makmur dengan stabilitas nasional yang tak tergoyahkan, karena Pancasila sebagai satu-satunya landasan serta jiwa Bangsa Indonesia dalam melanjutkan pembangunan.

Kesadaran semacam itulah menurut Hatta, yang harus selalu dikembangtumbuhkan terutama di kalangan keluarga besar Golkar di seluruh Tanah Air, sehingga tumbuh secara wajar kesadaran berbangsa bernegara dengan melaksanakan hak dan kewajibannya. Bila harapan tersebut dapat dipenuhi, maka akan tercapai yang disebut kesadaran berdisiplin Nasional. Disiplin Nasional tak bisa tidak harus dimulai dari diri sendiri. Untuk mencapai wawasan yang memadahi memang perlu selalu diciptakan forum-forum dialog, karena dengan dialog semakin dapat dirasakan manfaatnya, iklim semacam itu harus diciptakan dalam berbagai kesempatan. Bahkan menurut Hatta, melalui Munas yang diawali dari bawah sebetulnya terbuka kemungkinan seluasluasnya yang diutarakan di atas tadi. Semua tadi adalah sarana, perangkat untuk menyongsong hari depan yang lebih baik dalam rangka tinggal landas. Ke depan Golkar memerlukan manusia-manusia yang berkwalitas. Karena manusia yang berkwalitas akan melahirkan program-program yang berbobot dan akan membuat Bangsa menjadi berkwalitas, dengan hasil pembangunan yang berkwalitas. Semua tadi menurut Hatta akan bersumber kepada Pendidikan, Agama, keyakinan terhadap Tuhan YME, dan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam melanjutkan perjuangan. Kesemuanya tadi adalah bentengnya untuk menolak bahaya laten komunis yang mungkin saja dapat masuk dari berbagai cara dan sektor.

Didiet Haryadi : Harus benar-benar konsisten

Kader Golkar, Ketua Umum KNPI, angota DPR.RI dari FKP. Menurut dia mekanisme dari bawah ke atas

Didiet Haryadi

lebih banyak segi positifismenya, karena aspek demokratisasi peluang-peluang aspirasi bagi anggota dalam memberikan kontribusinya semakin terbuka. Dan hal ini membuktikan bahwa Golkar exis mengakar dan menjadi milik rakyat.

Memang ada hal-hal yang prinsip menurut Didiet yang harus diperhatikan dalam menseleksi kehadiran kader dalam forum-forum musda baik di tingkat dua yang telah berlangsung dan hampir selesai, ataupun bagi tingkat satu, apalagi untuk tingkat Nasional (pusat). Harus jelas darimana yang bersangkutan datang, unsur perorangan siapa. Ini pengalaman saya di KNPI, dimana ada seorang anggota pengurus yang sampai sekarang tidak hanya tidak hadir tapi tidak dikenal siapa dan darimana yang bersangkutan datang. Celaka besar bila hal ini terjadi dalam tubuh Golkar.

Hal-hal semacam yang saya sebut tadi harus diperhatikan untuk menghindari penyusupan-penyusupan bahaya laten komunis atau kader-kadernya, yang sangat pandai bermain dan membawa diri. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, daripada mengobati penderita sakit.

Betapapun akomodatifnya Golkar dalam penyelenggaraan musda ke musda tapi faktor-faktor selektifitas harus mendapat porsi yang serius. Karena walaupun hanya datang sebagai peserta bila tidak jelas identitasnya darimana datangnya mungkin saja dapat mengganggu stabilitas yang selama ini terjaga dengan baik, apalagi sampai duduk sebagai pengurus Golkar.

Kader Golkar yang adalah kader pembangunan kader Pancasila harus bersama-sama ABRI membantu terlaksananya stabilitas keamanan Nasional, untuk itulah menurut Didiet, setiap penyelenggaraan musda, kita semua tidak boleh lengah sebentarpun terhadap kemungkinan-kemungkinan tadi.

Golkar tidak lagi hanya sekedar menampung seseorang masuk dan direkomindir karena yang bersangkutan berangkat dari organisasi yang seaspirasi dengan Golkar. Tapi Golkar hendaknya konsisten, dalam merekomindir seorang calon pengurus, karena ia akan jadi pemimpin organisasi yang sekaligus akan menjadi harapan anggotanya, harus benar-benar manusia yang terpilih dalam segi moral kwalitas dan lingkungan. Jadi modal dasar itulah menurut Didiet, yang mampu membawa setiap calon pengurus.

Bila iklim demokratisasi dengan bottom-up system dalam tubuh Golkar ingin lebih berwujud hendaknya di-

Digitized by Google

hilangkan cara-cara droping dan campur tanga dari atas mulai dikurangi. Karena menurutnya droping dan campur tangan dari atas dalam mewarnai iklim demokratisasi akan sangat mengganggu pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Sehingga pada akhirnya bukan membuka peluang bagi kader-kader yang berkemampuan tapi malah sebaliknya mempersempit kesempatan malah mungkin terjadi arus kemunduran.

Semakin hari rakyat semakin kritis untuk itu diperlukan konsepsi yang berbobot. Kita semua harus mematuhi aturan main, kreteria, standart, dan mekanisme yang sudah disepakati bersama. Didiet menolak isue yang berkembang bahwa ABRI merebut posisi, ia mengambil contoh, harus diakui oleh kita semua hampir sebagian besar posisi ketua hasil musda-musda tingkat dua di seluruh Tanah Air dipercayakan kepada tokoh-tokoh yang berangkat dari ABRI. Saya rasa bukan ABRI nya tapi kwalitasnya memang memadahi memenuhi kreteria lalu warga Golkar yang memilihnya. Hendaknya kita tidak bicara lagi dari jalur apakah dia, dari manapun dia asal komitet terhadap Pancasila UUD 45, bermoral, berkwalitas, berwawasan luas dan terpilih dalam musda itulah yang harus diterima. Saya rasa hal semacam itupun akan berlaku di tiap-tiap penyelenggaraan musda-musda tingkat satu dan harapan kita semua itu berlaku sampai di-TK munas.

Kalau kebetulan yang dipilih adalah ABRI, jangan batasi haknya, biarkan rakyat atau warga Golkar yang menentukan pilihannya perlu diingat meskipun demikian anggota ABRI tidak akan berjalan tanpa perintah dan seijin atasannya, kepadanya jangan ragukan loyalitasnya terhadap bangsa. Sekarang rakyat butuh sesuatu yang riil antara yang diucapkan dengan yang dikerjakan. Kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Golkar demi kelangsungan dan cita-cita perjuangan, saatnya kini Golkar memberi peluang kepada orang yang berkemampuan, bukan hanya kepada orang yang berkemauan, baru budaya politik tumbuh secara sehat.

Kepada generasi muda perlu diberi pemahaman, bahwa semuanya butuh perjuangan dan kerja keras, bukan hanya meminta tanpa memberi. Agar pada akhirnya angkatan 1945 secara perlahan rela memberikan kepercayaan kepada kaum muda untuk melanjutkan cita-cita perjuangan, melalui Golkar barangkali satu-satunya media, wadah yang bermasa depan untuk mengabdi, berjuang dalam merenda hari depan melanjutkan cita-cita perjuangan.

Ardi Partadinata
Wakil Sekjen Ikatan Sarjana Kosgoro
Anggota DPR.RI dari FKP
Dari bawah ke atas pencerminan demokratisasi

Menurut Ardi, mekanisme dari bawah ke atas yang ditandai dengan musda-musda tingkat dua adalah momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan serta mengaktualisasikan mekanisme demokrasi Pancasila sekaligus mengembangkan kemandirian Golkar. Dengan Munas yang dimulai dari musda maka aspirasi dari bawah sesuai dengan kondisi masing-masing membuka peluang yang sangat lebar keterlibat anggota dalam peran serta pengambilan keputusan-keputusan musda yang pada akhirnya akan bermuara kepada Munas Golkar.

Menurut Ardi, aktualisasi peningkatan system demokrasi Pancasila

Ardi Partadinata

dan kemandirian Golkar tampak mewarnai jalannya musda-musda tingkat dua selama ini, terasa lebih nampak memacu kepada kadar kualitas yang semakin meningkat, walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dan itu sangat wajar karena hanya menyangkut masalah teknis. Selanjutnya Ardi merasa lega bahwa dari hasil pengamatannya di daerah Jabar di masing-masing tingkat dua, banyak munculnya kader-kader muda Golkar yang mendapat kepercayaan duduk sebagai pengurus, hal ini, wujud nyata dari keberhasilan kaderisasi dalam tubuh Golkar. Dikatakannya kaderisasi di dalam Golkar tampak semakin mempacu kepada harapan yang dicanangkan, karena pada dasarnya kesinambungan dan peningkatan pengabdian serta perjuangan bagi Golkar, adalah untuk Bangsa dan Negara sebagai tanggung jawab yang amat mendasar.

Program organisasi hasil musda-musda tingkat dua yang baru berlangsung semakin terarah yang bermuara kepada Tri Sukses Golkar sejalan dengan GBHN.

Akhirnya Ardi Partadinata, mengingatkan bahwa musda bukanlah tujuan akhir dari rangkaian perjuangan, akan tetapi merupakan awal dari babak baru dalam melanjutkan perjuangan untuk masa yang akan datang. Dimana menuntut tanggung jawab dari semua pihak yang terkait dalam mewujudkan tujuan sasaran dan cita-cita organisasi. Antara lain memenangkan Golkar dalam pemilu 1992 dan mensukseskan sidang umum MPR 1993, kesemuanya adalah semata-mata dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional, mensukseskan konsolidasi organisasi, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam suasana yang demokratis, konstitusi dan hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

KGPH. MANGKUBUMI:
Ketua DPD.Golkar DIY, Anggota DPR.RI dari FKP
Menyerap aspirasi

Walaupun mekanisme dari bawah ke atas adalah langkah baru bagi Golkar namun sangat positif menurut Mangkubumi, karena aspirasi dari bawah dapat didengar secara langsung dan terakomondir dalam forum Musda. Selanjutnya musda-musda tingkat satu juga harus mampu menyerap aspirasi yang datang dari anggotanya dari utusan peserta musda yang datang dari tingkat dua. Persoalannya sekarang apakah di tingkat pusat dapat dengan pasti menampung dan menyalurkan aspirasi yang akan muncul atau di bawah oleh tingkat satu dari seluruh Indonesia. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka mekanisme di dalam menumbuhkan semangat demokrasi akan

Digitized by Google

semakin berkembang, dan semakin lebar pula peluang bagi kader-kader daerah yang bekemampuan untuk duduk dalam posisi/kepengurusan DPP.Golkar periode 1988-1993.

Sekarang tinggal kita berharap agar ke depan aturan main atau sistem yang telah disepakati harus dijalani tanpa cacat. Ini mengandung suatu maksud bahwa apa yang dikerjakan Golkar dalam era post pemilu 1992 akan bergantung terhadap kesiapan konsolidasi sejak dini.

Yang lalu memang kita telah mencapai sukses dalam segala hal sampai kepada kepemimpinan Nasional, untuk ke depan tentu harus lebih baik dari yang sudah. Untuk itulah menurut Mangkubumi, mekanisme dari bawah ke atas benar-benar suatu ajang kwalitas yang memberikan peluang kepada setiap kader yang berprestasi untuk

GBPH Mangkubumi

mendapat kepercayaan memimpin organisasi Golkar masa lima tahun mendatang. Tidak memandang darimana yang bersangkutan datang, yang terpenting adalah kader Golkar dan paling sedikit telah mengabdi lima tahun dengan tanpa cela dan berwawasan cukup dengan kwalifikasi yang memadahi.

Tuntutan yang lebih berupa harapan bagi semua pihak, agar mekanisme baru dari bawah ke atas dapat dilaksanakan dengan konsisten. Sebetulnya semata-mata untuk dapat menjamin terselenggaranya pengertian berkembangnya demokratisasi dalam tubuh Golkar yang akan memberikan warna terhadap demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Mangkubumi, beranggapan, bahwa mekanisme dari bawah ke atas, bukan hal yang berupa uji coba, tapi lebih dari itu adalah suatu tuntutan pembaharuan yang harus dipenuhi, sebagai perwujudan nyata tentang demokratisasi, partisipasi yang sekaligus rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap cita-cita perjuangan Golkar.

Dari bawah ke atas yang dimulai dari musda-musda Golkar tingkat dua adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat ditangguhkan.

H.Agus Tagor
Kader Golkar, Ketua Umum PRSSNI
Anggota MPR.RI periode 1987-1992

Berhak diwakili dan mewakili

Mekanisme di dalam tubuh Golkar yang disebut bottom-up system atau dari bawah ke atas bukan lagi hanya

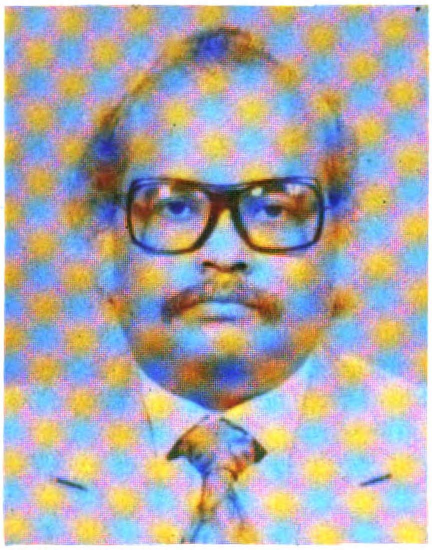

H.Agus Tagor

tekad, tapi telah berwujud dalam suatu bentuk kongkrit yang berupa musda-musda tingkat dua untuk mengawali musda tingkat satu sebagai awal pula dalam rangka menyongsong munas Golkar.

Angin segar yang lebih pas kalau disebut langkah maju dalam menciptakan iklim demokratis, merangsang kepada kita semua untuk menyambut suasana tersebut lebih hidup dinamis dan kreatif. Suatu celah yang memberi kepada setiap anggota Golkar berbangsa, bahwa akhirnya tiba juga saat yang dinanti-nantikan saatnya kepada setiap kader yang berprestasi untuk mengembangkan potensinya dalam bidang masing-masing.

Menurut Tagor, musyawarah Golkar yang dimulai dari musda tingkat dua selain menyusun program kerja dan memilih kepengurusan untuk periode mendatang, adalah suatu gambaran bahwa Golkar semakin tampil ke depan sebagai pelopor dalam mengartikulasikan pengertian demokrasi.

Dimulai dengan musda inilah demokratisasi itu akan dijabarkan dan berkumandang di seluruh tanah air, melalui forum mekanisme dari bawah ke atas inilah menurut Tagor semakin jelas intonasi program Golkar ke depan dalam menyambut era tinggal landas sebagai pengamalan Pancasila.

Menurut Tagor ke depan Golkar membutuhkan manusia-manusia yang profesional di bidangnya, bukan hanya manusia-manusia yang profesional dalam bagaimana mengatrol dirinya. Mekanisme dari bawah ke atas ini benar-benar sehat bila diselenggarakan secara benar dan konsekwen.

Karena tujuan demokratisasi itu adalah terwujudnya missionari, atau mekanisme kemasyarakatan atau kenegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, hidup berbangsa dan bermasyarakat yang demokratis konstitusional dan berdasarkan hukum. Dengan mekanisme yang baru in akan terasa aspirasi pemilih akan didengar oleh yang dipilih, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan karena beberapa alasan yang tidak mendasar.

Harapannya setelah mekanisme dari bawah ke atas terselenggara dengan baik, berikutnya diharapkan agar komunikasi timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin tanpa jarak, terjadi dialog, sehingga suasana demokrasi betul-betul terasa, bukan malah jadi sebaliknya.

Kalau wakil-wakil ini tidak sanggup menjalankan mesin aspiratif yang respons masyarakat, maka akan terjadi stagnasi dan ini yang Presiden katakan pada Rapim Abri 88, hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan karena nanti akhirnya akan berhadap-hadapan kekuatan penyelenggara negara dengan kekuatan aspirasi rakyat. Ini yang diinginkan oleh bahaya laten komunis, bahaya laten komunis menuju ke sini; teori kontradiksi ini menimbulkan situasi sedemikian antara penyelenggara negara yang akan digulingkan oleh mereka dengan aspirasi rakyat yang wajar supaya jangan nyambung, kalau tidak nyambung, bertumpuk sehingga menjadi situasi yang mereka sebut situasi revolusioner, situasi kontradiktif.

Masalah kita yang reel adalah antara lain produktivitas, daya saing di pasaran internasional, kreativitas, kecerdasan, kemiskinan, keterbelakangan, kesempatan dan lapangan kerja; jangan masalah-masalah besar ini di-

Digitized by Google

Dialog dari bawah ke atas

tambah lagi dengan masalah residual yang dibikin oleh penyelenggara negara yang juga fungsionaris organisasi golkar.

Golkar harus membenahi itu semua, golkar harus bisa menggairahkan masyarakat. Sebagai suatu kekuatan sosial politik yang dipercaya oleh rakyat golkar harus memelihara dan memanfaatkan kepercayaan ini. Rakyat mempersilahkan golkar memimpin negara ini. Silahkan tuan-tuan pimpin penyelenggaraan negara ini dengan membangkitkan, memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang kita miliki; potensi sumber daya manusia, human resourses development, supaya bergairah supaya beretos kerja, cerdas, sehat. Silahkan pimpin, itu kan artinya rakyat berbicara.

Media massa semacam aliran darahnya daripada pada arus penyaluran aspirasi itu. Sistim aliran darahnya aspirasi itu kan masa media. Aksesnya luas, pembaca, kelompen campir dan sebagainya; itu kekuatan dahsyat sebetulnya, cuma sekarang yang ketinggalan biasanya substansinya, isinya; mekanismenya sudah hebat, isinya yang harus ditingkatkan terus; namun harus kita akui sekarang sudah jauh lebih baik.

Warna-warna inilah yang akhirnya menjadi mekanisme demokrasi Pancasila diwarnai oleh sub kultur setempat. Bagaimana menghidupkan mekanisme itu? ini baru di atas kertas; demokrasi Pancasila, di suatu daerah, lain dengan daerah lain bentuknya, versinya, tatakramanya, budaya politiknya, mungkin ada warna-warna nuansa tertentu, tetapi kerangka umumnya sama yaitu Pancas Sila.

Ini semua masih di atas kertas. Demokratisasi, konstitusional berdasarkan hukum; tapi bagaimana leaving mekanismenya. Inilah yang akan dibangun golkar. Golkar sebagai leading organisation kekuatan sosial politik di Indonesia ingin me-lead, ingin menunjukkan. Silahkan organisasi kekuatan sosial politik lain juga boleh saja, asal ke arah trend yang sama.

Demokrasi dalam arti yang utuh. Karena terus terang, selama kita merdeka belum sempat kita melaksanakan mekanisme bagaimana rakyat menyalurkan kedaulatannya, kecuali tingkat makro, di nasional melalui pemilu beberapa kali; melalui konvensi-konvensi di tingkat nasional.

Hal ini harus merembes ke bawah, harus di semua tingkat merasakan itu. Bahwa adanya kesalahan-kesalahan, kekakuan-kekakuan bahkan kekonyolan-kekonyolan itu biasa dalam suatu proses belajar; bahwa ada oknum-oknum yang nanti tidak sanggup, kurang fit melaksanakan ini, akan kelihatan dan tidak ada masalah. Tetapi sebagai organisasi, golkar harus mendewasakan dirinya, paling sedikit diarahkan ke arah itu.

Buttom up merupakan mekanisme organisasi biasa; artinya kalau dulu didahulukan yang atas baru yang bawah karena sifatnya menanamkan garis-garis pokok. Garis-garis pokoknya sekarang sudah jelas, yang kita kenal dengan tri sukses golkar itu; sudah dimengerti sudah membudaya.

Sesudah itu bagaimana mengisi ini dengan real problem masyarakat; tri sukses ini dengan masalah real masyarakat harus diisi. Tri sukses itu hanya kerangka, frim; yang mengisi ini harus kader yang sensitip yang peka dan tanggap terhadap apa real problem masyarakat. Gunanya politik kan itu.

Gunanya politik, struktur politik, budaya politik adalah mesin untuk bisa mengalirnya aspirasi rakyat yang respon dari penyelenggara negara yang baik. Kalau iklim demokrasi ini jalan teorinya tentu gairah masyarakat akan meningkat; sesudah itu baru bisa ngomong tentang disiplin nasional, produktivitas, etos kerja setelah akomodasi aspirasi politik ini kurang lebih memadailah. Memadai sehingga rakyat merasa betul bahwa negara ini

Digitized by Google

Aspirasi politik masyarakat sudah banyak kelihatan

untuk mereka, bahwa betul kedaulatan di tangan mereka, kepentingan mereka yang diutamakan. Di sini tugas wakil-wakil rakyat, dalam hal ini fungsionaris-fungsionaris kekuatan sosial politik baik yang duduk di dalam lembaga-lembaga perwakilan maupun yang tidak.

Soal-soal pembangunan, pertanian, perikanan sudah banyak di dalam peredaran informasi itu. Aspirasi politik sudah banyak juga kelihatan, kepincangan-kepincangan, represi-represi, opresi-opresi, sikap-sikap yang tidak demokratis, sudah banyak diexpos di dalam mas media; secara korektif, bukan secara membangkitkan pertentangan, lurah yang begini, pejabat yang begini, pln yang begini, telp yang begini. Itu semuanya bagus, dalam hal tertentu ada baiknya untuk informasi, tulisan pembaca dan lain-lain. Ini harus dipelopori oleh kader-kader golkar yang mengelola masa media; mereka harus memimpin harus lead; tetapi itu semua ada hubungannya dengan profesionalisme jurnalistik. Untuk menjalankan mesin missioneri sirkulasi aspirasi masyarakat, bagaimana orang-orang mass media yang ada di Golkar mendorong iklim ini, iklim informasi demokratis, demokratisasi politik, ekonomi, kebudayaan secara bertahap sesuai dengan tatakrama dan jiwa UUD 45.

Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik berhak diwakili dan mewakili semua rakyat Indonesia; teoritis kan semua rakyat Indonesia boleh pilih mau menyalurkan aspirasi politiknya kemana. Persoalan mekanisme transisional dalam membentuk restrukturisasi politik dan membentuk budaya politik masih excuseable; karena memang perlu engineering, perlu rekayasa sosial, dimana Abri sebagai stabilisator dan dinamisator perlu mendorong Golkar.

Sebagai golongan fungsional Abri tidak mempunyai power interest, karena sudah diwakili menurut per UUD 45 melalui Abri; tetapi sebagai stabilisator dan dinamisator bisa saja Abri membantu suatu engineering struktur politik, seperti kita kan baru membangun struktur politik yang 3 ini dan budaya politiknya juga baru berjalan, dalam rangka transisional masih excuseable; asal nantinya seperti Pak Harto katakan bahwa Abri itu semacam bidannya dari lahirnya dan tumbuhnya demokrasi Pancasila. Karena pada akhirnya struktur kekuatan sosial politik harus mandiri dalam arti self sistimi dan self growth. Apalagi Golkar sudah didukung rakyat begitu banyak harusnya kan bisa; cuma apa punya kader yang cukup, ini yang menjadi masalah. Bagi Golkar sendiri, buttom up ini sendiri akan membuat Golkar mandiri; kalau berhasil. Tekadnya harus bisa; kalau kita mau bisa, banyak contoh, antara lain kemerdekaan, restrukturisasi kehidupan politik dari sekian partai, swasembada pangan dan lain sebagainya. Masalah kita mau atau tidak menghidupkan suatu mekanisme organisasi kekuatan sosial politik yang wajar, kalau mau bisa! Golkar mendapat kesempatan pada iklim yang memungkinkan, karena iklimnya, kesempatan ini bisa tidak memanfaatkannya. Karena pada dasarnya setiap bangsa dichalens bukan di dalam ketidakmungkinan tetapi di dalam kemungkinan; kalau di dalam ketidakmungkinan sih namanya bukan chalengs; momentum ini kalau tidak digunakan sayang! seperti momentum migas dan non migas; soal kemungkinan dan itu harus didorong harus dilead harus dipimpin, seperti sekarang ini kita berpemerintahan, bernegara, bermasyarakat kan ada kemungkinan untuk itu, untuk benar-benar demokrasi, untuk benar-benar buttom up.

Keamanan baik, stabilitas baik, Abri tidak cenderung kepada militerisme; ini kan kemungkinan-kemungkinan yang bagus untuk menumbuhkan suatu bangsa yang demokratis, aspirasinya bebas berkembang, pikiran-pikirannya bagus, kreatif. Masalahnya kita mau pakai itu tidak kesempatan ini. Mass media harus menyebarluaskan, harus menggebu-gebu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan ini dan chalens-chalensnya; jangan kecil sektoris Golkar saja namun untuk mengikutsertakan seluruh bangsa ini berkiprah di dalam itu. Di dalam mendemokratisasikan dirinya dengan suatu mekanisme yang berkepribadian Pancasila, mendidik masyarakat; kesempatan ini terbuka luas, public education. Mass education, untuk menggerakkan potensi; potensi pemikiran, potensi informasi demokratis itu bisa disebarluaskan. Prinsipnya demokratisasi informasi; lapisan bawah kadangkala tidak mendapatkan informasi yang cukup yang bisa meningkatkan aspirasi dan kecerdasannya; informasi untuk mengajak mereka berdemokratis, berdemokrasi supaya tidak segan berdemokrasi wajar di tingkat desa, kecamatan di tingkat Kabupaten. Berkebudayaan demokrasi inilah yang menjadi tantangan mass media dan mekanismenya sudah ada. Golkar harus mampu menggerakkan. ☐ **Rendy MS**

Digitized by Google

Tukang Pos, Potret Pengabdian Perum Pos Dan Giro

Kantor pusat Pos dan Giro di Bandung

Sudah 43 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Dalam era yang relatif pendek itu, pembangunan bangsa dan negara mencatat sukses di berbagai sektor. Bersamaan dengan itu kiranya arif bila kita juga mengakui bahwa sukses yang menyertai pembangunan, dibarengi pula oleh kekurangan dan hambatan disana-sini. Tugas kita, tentu saja, ialah bagaimana mengatasi hambatan itu demi suksesnya pembangunan.

Kantor Pos bukan barang langka

Banyak sektor kehidupan yang memberi kontribusi dalam derap dan kisah sukses pembangunan itu sendiri. Ada sektor yang dominan seperti migas dan nonmigas dan masih banyak sektor lain yang potensial tapi masih terseok-seok dalam kontribusinya.

Anda mungkin akan menganggap suatu keseharian yang lumrah saja bila berpapasan dengan seorang tukang pos di ujung gang sempit. Sepeda mereka yang reot, keringat yang men-

Digitized by Google

cucur dan seragam yang khas mungkin saja tidak menggugah Anda untuk bertanya "apakah mereka?".

Mereka jelas para pengantar surat yang terkenal dengan sebutan tukang pos. Karena begitu terbiasa dalam kesaharian kita, maka banyak orang yang tidak memahami bahwa mereka adalah jaringan terdepan dari sebuah sektor yang disebut informasi. Atau dengan kata lain, mereka adalah pelayan-pelayan jasa informasi yang langsung berhadapan dengan konsumen. Mereka adalah bagian yang vital dari jasa pelayanan informasi yang dikelola oleh Perum Pos Dan Giro.

Pembangunan sektor informasi mencakup substansi dan aktivitas yang demikian rumit dan luas. Untuk mempermudah ulasan ini kita sebut saja beberapa substansi dan kegiatan pelayanan jasa informasi yang umum dikenal oleh masyarakat internasional pada umumnya maupun Indonesia khususnya.

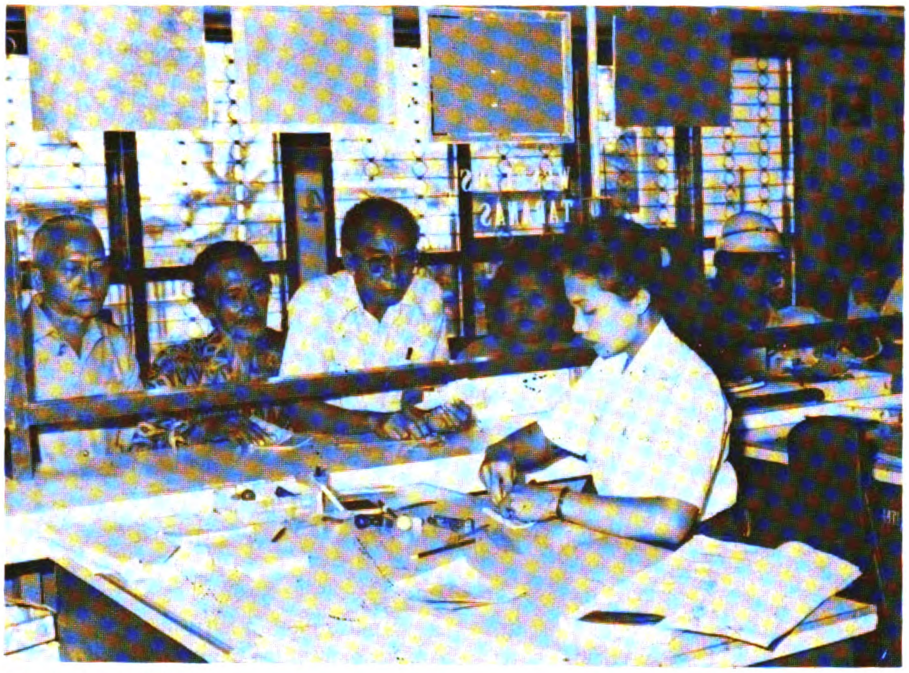

Kantor Pos Rengat

Industri jasa informasi dalam praktek sebenarnya dibagi dalam tiga kelompok dasar, yaitu pertama, industri telekomunikasi yang melayani kebutuhan informasi dengan cepat dan langsung, misalnya melalui telepon, telegram, telex dan sebagainya. Di Indonesia industri jenis ini dikelola oleh Perumtel.

Kedua, adalah industri penyebaran berita bagi publik yang menggunakan sarana audio-visual, seperti radio dan televisi. Bidang ini dikelola oleh perusahaan negara maupun swasta, seperti TVRI dan RRI.

Ketiga, adalah industri surat-menyurat yang di Indonesia ditangani oleh Perum Pos dan Giro.

Dua sektor pertama, yaitu telekomunikasi dan penyebaran berita lewat sarana audio-visual, tidak kita bahas dalam tulisan ini. Kita hanya menyoroti sektor ketiga, yaitu industri surat-menyurat yang dikelola oleh Perum Pos dan Giro.

Kantor Pos Kuala Kapuas

Masih Rendah

Sepintas, Anda mungkin menganggap sebagai hal yang biasa saja bila menerima sepucuk surat dari seorang kekasih atau sahabat yang disampaikan kepada Anda melalui seorang tukang pos. Anda mungkin tidak sadar bahwa sepucuk surat yang Anda terima atau kirim adalah komoditi dari sebuah industri *public service*. Dan tukang pos adalah armada terdepan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Mereka merupakan bagian dari sebuah jaringan kerja yang luas dan kompleks, yang melibatkan 24.000 manusia di seluruh Indonesia yang berpenduduk 170 juta jiwa sekarang ini.

Bila seorang penduduk rata-rata mengirim satu (1) pucuk surat dalam seminggu, maka akan terjadi lalu lintas surat sebanyak 170 juta pucuk dalam kurun itu. Dan bila sepucuk surat rata-rata dibebani perangko Rp.200, maka dalam seminggu terkumpul uang sebanyak 200 x 170.000.000 = Rp 34 milyar. Tentu bisa dihitung berapa pemasukan uang dalam setahun. Angka-angka ini sangat ideal memang.

Namun Anda mungkin terperangah kaget. Data tahun 1986 menunjukkan bahwa lalu lintas surat di Indonesia mencapai 389.873.100 pucuk. Ini berarti rata-rata penduduk Indonesia hanya mengirim/memperoleh 2,30 surat per orang per tahun. Ratio seperti ini terbilang rendah bila dibanding dengan beberapa negara maju. Bahkan di kalangan kelompok negara-negara ASEAN pun, ratio kita masih rendah.

Dari data 1986, Malaysia sudah mencapai rata-rata 50 surat/orang/tahun; Thailand 7 surat/orang/tahun;

Digitized by Google

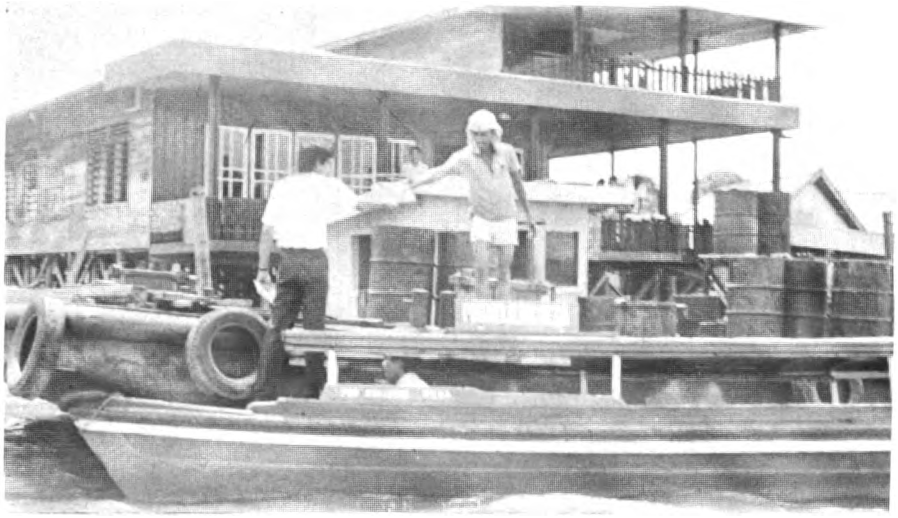

Tekad yang tetap hidup

Singapura 119 surat/orang/tahun dan Amerika Serikat 680 surat/orang/tahun.

Dari totalitas surat tahun 1986, maka rata-rata seorang tukang pos memperoleh beban 40 surat/hari, atau 14.500 surat/orang/tahun.

Lalu lintas surat di sebuah negara merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan maupun intelektualitas masyarakat bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan intelektualitas, akan semakin tinggi pula lalu lintas surat di antara sesama warga. Jadi antara tingkat kesejahteraan dan intelektualitas dengan lalu lintas surat, mempunyai hubungan paralel.

Di atas kertas, potensi lalu lintas surat di Indonesia memang menggiurkan, karena kita memiliki 170 juta penduduk yang akan terus bertambah. Tetapi bila melihat data 1986 bahwa di Indonesia lalu lintas surat rata-rata adalah 2,30 surat/orang/tahun, maka kita harus mengakui alangkah rendahnya angka tersebut.

Potensi memang besar, tetapi hambatan yang dihadapi Perum Pos dan Giro pun tidak sedikit. Selain kebiasaan bersurat yang masih rendah, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau (kita mempunyai lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil) menghadirkan kendala tersendiri bagi Perum Pos dan Giro dalam melayani publik. Untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia yang tersebar di ribuan kepulauan itu, membutuhkan jaringan kantor pos yang sangat luas, dan sebagai konsekuensi logisnya, dibutuhkan pula jaringan transportasi yang memadai, seperti sarana transport laut, udara maupun darat.

Mengirim surat dengan menyeberang sungai.

Digitized by Google

Kita sama mengetahui bahwa untuk menambah sebuah kapal laut, apalagi pesawat udara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan untuk pembangunan sarana jalan darat, pun membutuhkan biaya yang sangat besar.

Tekad Membara

Dengan demikian jelas, bahwa kualitas pelayanan Perum Pos dan Giro berkaitan erat dengan pekembangan/kemajuan sektor-sektor lain.

Sebagai Perusahaan Negara yang bergerak di bidang pelayanan publik, kendala-kendala obyektif yang masih menggejala, menjadi tantangan Perum Pos dan Giro untuk memperbaikinya. Penyampaian surat yang cepat dan tepat menjadi keharusan yang semakin membara di kalangan pengelola Perum ini. Keinginan untuk menghadirkan sebuah kantor pos di setiap desa di seluruh pelosok tanah air, adalah tekad yang tetap hidup dalam proyeksi Perum Pos dan Giro.

Pos dan Giro tidak sedikit dalam menunjang kemajuan

Potensi lalu lintas surat

Dalam kurun eksistensinya, kesulitan dan kekurangan memang masih banyak. Namun Perum Pos dan Giro pun tidak sedikit menyumbang kemajuan dalam pelayanan surat-menyurat antara sesama warga bangsa Indonesia. Bila dulu kehadiran kantor pos di desa merupakan impian, maka sekarang — kendati belum merata — Perum Pos dan Giro mulai menyusup sampai kesana. Di tingkat Kecamatan, kantor pos bukan barang langka lagi bagi penduduk Indonesia.

Inilah selintas pencapaian oleh Perum Pos dan Giro. Perusahaan Negara ini ingin menjangkau seluruh pelosok tanah air, seperti halnya SD Inpres maupun Puskesmas yang menerobos jauh ke pedalaman di Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan daerah-daerah lainnya di Nusantara ini.

Keinginan untuk menjangkau konsumen di seluruh pelosok Nusantara ini adalah idealisme Perum Pos dan Giro yang tak pernah pudar. Perusahaan negara tersebut memiliki apa yang disebut Fasilitas Fisik Pelayanan (FPP) untuk melayani desa-desa atau tempat pemukiman yang karena berbagai hambatan belum bisa memiliki kantor pos permanen. Dengan demikian sebuah kantor pos di tingkat Kecamatan misalnya bisa berfungsi sebagai sentra pelayanan yang menjangkau ke desa-desa atau Kecamatan lainnya. Dengan penyebaran sentra-sentra pelayanan kantor pos, maka lama kelamaan impian kantor pos masuk desa, terealisir.

Namun sebagaimana layaknya industri public service, setiap upaya pengembangan, selain memerlukan dukungan kemajuan sarana dan prasarana sektor lain yang terkait, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Anda bisa membayangkan, kalau kantor pos didirikan di setiap desa, berapa banyak biaya yang diperlukan untuk mendukung operasinya, seperti sepeda, kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta gaji karyawan dan sebagainya.

Memang sekarang ini ada sejumlah perusahaan swasta yang menekuni pelayanan lalu lintas kiriman surat dan barang. Namun sebagaimana lazimnya sebuah institusi yang mencari laba, mereka hanya beroperasi di daerah-daerah yang ''gemuk''. Sedangkan konsumen di pelosok-pelosok Nusantara yang belum terjangkau oleh sarana angkutan, tidak menjadi prioritas mereka.

Tapi bagi Perum Pos dan Giro, konsumen di daerah terpencil adalah sasaran yang ingin dijangkau. Bila untuk mencapai konsumen di sana seorang tukang pos harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda butut, hal itu tidak mengurangi semangat pelayanan si tukang pos yang tidak

Digitized by Google

Menparpostel Susilo Sudarman dan sebuah maket.

lain adalah pegawai Perum Pos dan Giro.

Potret Pengabdian

Sebagai Perusahaan Umum (Perum) milik negara, Perum Pos dan Giro harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang umum berlaku pada sebuah perusahaan. Prinsip-prinsip efisiensi serta daya saing untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terpantul dari serangkaian kebijaksanaan yang diambil Perum Pos dan Giro selama ini.

Salah satu upaya yang ditempuh ialah meningkatkan kesejahteraan para pegawai khususnya para pengantar surat (tukang pos) berupa tiga stel pakaian/tahun; sarana sepeda dan sepeda motor; paket anti angin sekali setahun; insentif untuk setiap antaran ditambah satu pasang sepatu serta perlengkapannya.

Insentif-insentif ini selain disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, juga didorong oleh kesadaran bahwa kesejahteraan yang membaik di kalangan pegawai Perum Pos dan giro akan meningkatkan dedikasi bekerja mereka dalam melayani kebutuhan publik.

Selain itu, untuk menggugah semangat publik menggunakan jasa Pos dan Giro diadakan perbaikan dalam mutu amplop dengan lukisan dan kemasan yang menarik, kampanye penulisan surat dengan insentif khusus berupa keringanan biaya perangko seperti pada musim Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan sebagainya.

Memang masih banyak yang harus dilakukan oleh Perum Pos dan Giro agar kehadiran dan pelayanannya menjangkau warga bangsa ini dimana pun dia berada. Untuk mencapai tekad ini selain dibutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, juga yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat itu sendiri.

Di tengah kecanggihan sarana komunikasi dan informasi yang ditawarkan kepada konsumen seiring dengan perkembangan dan laju teknologi, surat mempunyai tempat tersendiri dalam industri pelayanan publik. Bila Anda membaca sepucuk surat dari kekasih, atau menerima surat dalam suatu transaksi bisnis, disana sebenarnya ada komunikasi yang spesifik. Surat sebagai sarana mengungkap rindu maupun berkomunikasi antar sesama tetap akan mempunyai tempat tersendiri. Dia agaknya tidak bisa digeser oleh alternatif sarana komunikasi lain, karena ciri dan karakternya yang spesifik itu.

Nah Perum Pos dan Giro mengemban fungsi sosial kemasyarakatannya lewat urusan surat-menyurat ini. Namun kualitas pelayanan sosial yang dibebankan kepada Perum Pos dan Giro sangat tergantung pada frekuensi dan volume surat-menyurat dalam masyarakat. Salah satu tugas sosial Perum Pos dan Giro adalah menjangkau manusia Indonesia dimanapun dia berada di persada Nusantara ini.

Tuga sosial ini akan terpenuhi bila kita membudayakan surat-menyurat sebagai sarana komunikasi. Bila setiap manusia Indonesia yang 170 juta jiwa ini menulis surat minimal sekali dalam sebulan, maka akan menghasilkan uang bagi Perum Pos dan Giro sebanyak 12 x (170.000.000 x Rp 200) = Rp 408 milyar setahun.

Bila perhitungan yang sangat pesimistik ini terealisir, maka banyak hal yang bisa dikerjakan Perum Pos dan Giro dalam mengemban fungsi sosial keberadaannya.

Dan si tukang pos yang Anda jumpai setiap hari adalah potret pengabdian seorang aparat Perum Pos dan Giro dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kepada mereka, tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan kecuali terimakasih. Mungkin Anda akan merasa iba bila melihat si tukang pos bermandi hujan dan diterpa panas dalam rangka menyampaikan sepucuk surat dari seorang kekasih, kenalan, sahabat atau rekan bisnis.

Rasa iba itu tidak perlu Anda bayar terlalu mahal. Anda turut membantu si tukang pos khususnya dan Perum Pos dan Giro pada umumnya, bila Anda rajin menulis surat. "Jadikanlah surat sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kebutuhan informasi Anda."□

Digitized by Google

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto

Menyegarkan Semangat, Memperluas Wawasan

"Pinjaman luar negeri yang berada dalam batas kemampuan membayar kembali bukan merupakan warisan beban hutang kepada generasi yang akan datang"

Memahami cita-cita dan nilai-nilai luhur Proklamasi

SEJUMLAH pokok masalah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat 'terjawab' dalam Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1988 ini. Pokok masalah itu antara lain mengenai hutang luar negeri, kesinambungan swa sembada pangan, dan masalah disiplin nasional dalam kaitan peningkatan kualitas manusia.

Khusus mengenai hutang luar negeri, Presiden secara terbuka mengatakan tingkat debt service ratio kita cukup tinggi, dan karenanya kita bertekad menurunkannya. Menurut Presiden, yang menjadi masalah utama bukan besarnya pinjaman, tetapi kemampuan membayar kembali. Pinjaman luar negeri yang dalam batas kemampuan membayar kembali bukan merupakan warisan beban hutang kepada generasi yang akan datang.

Pada bagian awal, Presiden memberikan semangat dengan menunjukkan apa yang menjadi 'kekuatan hidup bangsa kita'. Kekuatan hidup itu, kata Presiden, tak lain dari penyegaran yang terus menerus dilakukan oleh bangsa kita selama ini. "Menyegarkan kembali dan menghayati cita-cita dan nilai-nilai luhur Proklamasi". Bahwa kita memahami cita-cita dan nilai-nilai luhur Proklamasi itu dalam memberi jawaban yang setepat-tepatnya terhadap tantangan-tantangan baru yang sedang dan akan kita hadapi sebagai bangsa. Maka, "Bangsa kita perlu terus menerus mengembangkan wawasan yang luas, mendasar dan mendalam, dengan melihat jauh ke depan". Dalam arti itulah, jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan harus kita segarkan terus menerus.

Pidato kenegaraan Presiden selengkapnya, adalah sebagai berikut ini.

Digitized by Google

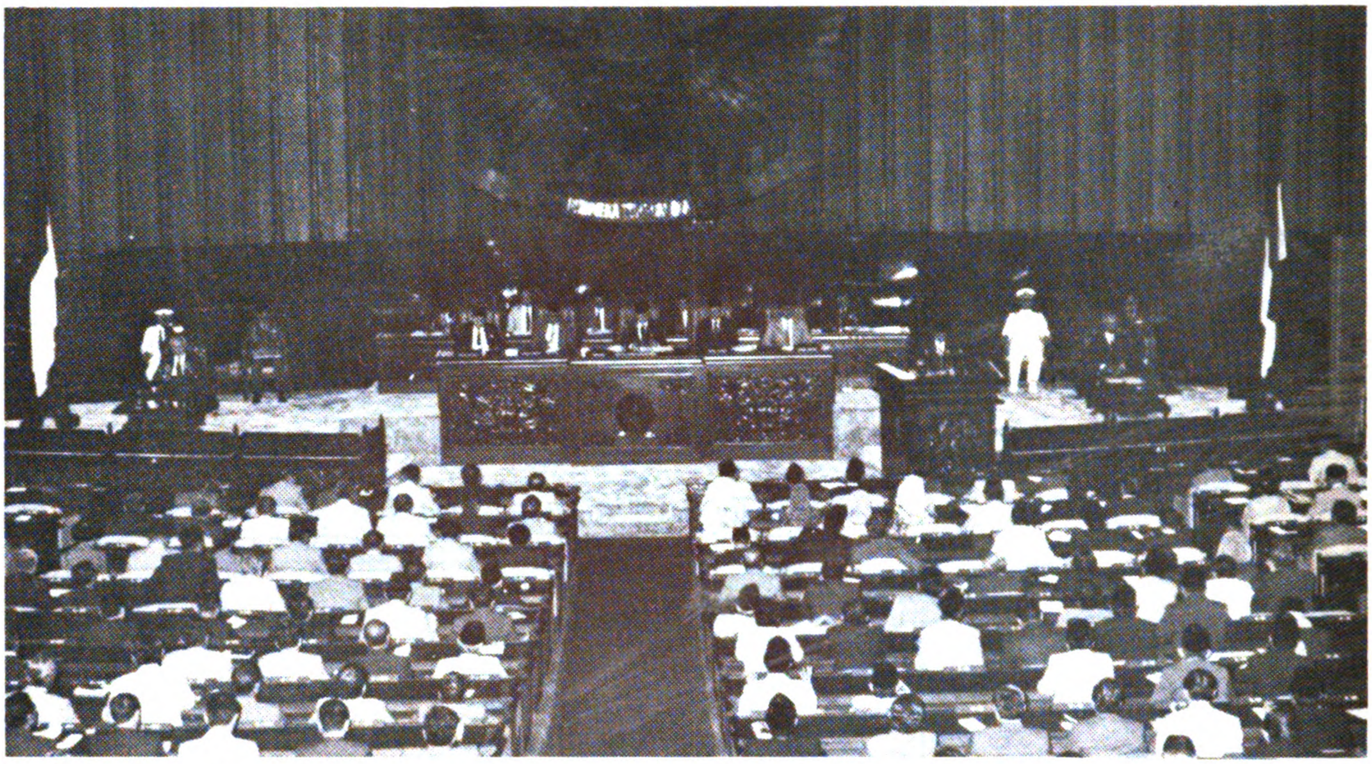

Jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan harus kita segarkan

Seluruh bangsa Indonesia kembali memperingati hari yang paling besar dalam sejarahnya, ialah hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peringatan itu akan kita adakan untuk yang ke-43 kali. Tahun depan kita akan memperingatinya lagi. Kita akan memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan itu setiap tahun sepanjang zaman, karena kita bertekad mempertahankan Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus '45 itu buat selama-lamanya.

Walaupun demikian peringatan Hari Proklamasi tidak akan pernah kita lakukan secara rutin belaka.

Sebab, peringatan Hari Proklamasi yang berlangsung setiap tahun itu, selalu akan berlangsung dalam kehidupan kita yang berkembang dinamis. Kendatipun demikian, setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi, maka secara rohaniah jiwa dan semangat kita terasa kembali kepada hari bersejarah 17 Agustus '45. Dalam saat-saat seperti ini, jiwa dan semangat kita semuanya seolah-olah menyaksikan dan ikut menghayati setiap detik peristiwa yang terjadi di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, 43 tahun yang lalu. Kita semua tanpa kecuali, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, seolah-olah mengikuti kata demi kata Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkannya ke seluruh dunia oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Kata-kata sederhana, tapi penuh kekuatan jiwa yang dahsyat, yang mengubah jalannya sejarah bangsa Indonesia!

Setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi, maka hati sanubari kita semuanya menyatukan diri dengan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang berada di belakang Proklamasi Kemerdekaan kita, seperti yang telah kita langgengkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi, maka untuk beberapa saat, seolah-olah lenyaplah jarak waktu pemisah antara kita yang hidup sekarang dengan para pendahulu yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Untuk beberapa saat, jiwa dan semangat kita seolah-olah ikut memproklamasikan Kemerdekaan.

Itulah arti peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan kita yang setiap tahun sepanjang zaman akan kita adakan. Setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi, maka kita semua tanpa kecuali, akan menyegarkan kembali jiwa dan semangat kita dalam menghayati dan tekad mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai luhur Proklamasi Kemerdekaan. Karena itulah tadi saya katakan, bahwa peringatan Hari Proklamasi setiap tahun sepanjang zaman, oleh semua generasi, tidak pernah akan menjadi peristiwa yang bersifat biasa dan rutin saja.

Menyegarkan kembali dan menghayati cita-cita dan nilai-nilai luhur Proklamasi berarti, bahwa kita memahami cita-cita dan nilai-nilai luhur Proklamasi itu dalam memberi jawaban yang setepat-tepatnya terhadap tantangan-tantangan baru yang sedang dan akan kita hadapi sebagai bangsa.

Kita adalah laksana bangsa yang mengadakan perjalanan panjang.

Dalam perjalanan bangsa kita yang panjang dan berat tetapi mulia itu, maka generasi akan mengganti generasi. Jika semua generasi di masa datang ingin mencapai kemajuan yang lebih jauh dari yang telah kita capai, maka generasi demi generasi di masa datang itu perlu tetap menggabungkan diri dengan pendahulu-pendahulunya, dengan cita-cita dan semangat Proklamasi Kemerdekaan. Artinya, semua generasi sepanjang zaman harus sepenuhnya menghayati, mengamalkan dan memperjuangkan nilai-nilai dan cita-cita luhur yang melandasi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus '45. Jika tidak, mereka terpaksa menghadapi tantangan masa depan itu tanpa landasan, tanpa pegangan, tanpa arah.

Penghayatan, pengamalan dan perjuangan tadi akan selalu kita hadapkan dengan tantangan-tantangan baru yang berada di depan kita. Masalah dan tantangan yang kita hadapi itu terang berbeda dengan masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa kita dalam kurun-kurun waktu sebelumnya. Karena itu jawaban yang kita berikan juga jelas akan berlainan dari generasi ke generasi, walaupun semangat dan nilai-nilai dasarnya tetap sama.

Bangsa kita perlu terus menerus mengembangkan wawasan yang luas, mendasar dan mendalam, dengan melihat jauh ke depan. Dalam arti itulah mengapa tadi saya katakan, bahwa jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan harus kita segarkan terus menerus.

Penyegaran yang terus menerus itulah yang telah dilakukan oleh bangsa kita selama ini. Penyegaran inilah yang menjadi kekuatan hidup bangsa kita. Penyegaran itulah yang akan tetap menjadi kekuatan hidup bangsa kita.

Di tahun 1908 bangsa kita telah me-

Digitized by Google

nyegarkan diri sehingga mampu meningkatkan perjuangan lokal menjadi perjuangan nasional, meninggalkan cara-cara perjuangan pramoderen menjadi perjuangan moderen. Di tahun 1928 bangsa kita telah menyegarkan diri sehingga dapat bergerak maju dari perjuangan yang menonjolkan paham-paham kedaerahan menjadi perjuangan sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan berbahasa nasional yang satu. Di tahun 1945 bangsa kita menyegarkan diri sehingga siap untuk menjadi bangsa yang merdeka, dan bersatu berdaulat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di tahun 1966 bangsa kita menyegarkan diri sehingga kita mampu memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama.

Sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang, bangsa kita juga harus menyegarkan diri untuk bersiap-siap memasuki tahap tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Menjawab Tantangan dan Aspirasi Baru

Kali ini, ulang tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan kita peringati dalam suasana penuh kegembiraan, persaudaraan yang akrab dan kesegaran, karena beberapa bulan yang lalu kita telah menyelenggarakan Sidang Umum MPR.

Suasana gembira meliputi kalbu kita semua karena Sidang Umum Majelis itu telah berjalan lancar, sukses dan selamat. Suasana persaudaraan yang akrab menyelimuti hati kita semua karena keputusan-keputusan Majelis yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat telah diambil dengan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih serta semangat persatuan dan kesatuan nasional yang kokoh.

Kita merasakan kesegaran baru, karena secara bersama kita telah mengembangkan wawasan yang luas, mendasar dan mendalam dalam upaya-upaya kita menjawab tantangan dan aspirasi-aspirasi baru. Semuanya itu telah kita tuangkan dalam dokumen konstitusional yang sangat penting, ialah dalam GBHN 1988 dan keputusan-keputusan MPR lainnya. Hal itu terwujud berkat semangat persatuan dan kenyalnya cara-cara yang telah kita tempuh dalam mempersiapkan dan melangsungkan Sidang Umum MPR itu sendiri. Penyegaran diri juga kita rasakan berkat kemampuan kita bersama untuk menyalurkan secara kreatif semua aspirasi dan kekuatan yang telah dan akan muncul dalam masyarakat kita sebagai hasil dari pembangunan di segala bidang yang telah kita lakukan selama dua dasawarsa terakhir.

Kemampuan penyegaran diri yang demikian tadi harus tetap kita miliki dalam menghadapi perkembangan di dunia pada umumnya menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 mendatang. Kita perlu berpikir dalam kerangka dunia itu, karena kita adalah bagian dari dunia. Kesadaran bahwa perjuangan kita adalah bagian dari perjuangan yang meliputi seluruh dunia telah diungkapkan dalam kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Di sana dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa kita memikul tanggung jawab untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perjuangan bangsa kita memang dipengaruhi oleh perkembangan dunia. Bersamaan dengan itu perjuangan bangsa kita juga ikut mempengaruhi perkembangan dunia. Kita hidup saling berhubungan dan saling membutuhkan dengan bagian-bagian dunia yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain. Makin maju kita dalam pembangunan bangsa, akan makin mampu pula kita mengendalikan pengaruh perkembangan dunia terhadap perkembangan kita. Dan makin mampu pula kita ikut mempengaruhi perkembangan dunia dalam rangka panggilan tugas mulia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ada tanda-tanda yang kuat bahwa menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang besar dan mendasar di berbagai bidang dan tingkatan. Tanggung jawab moral kita adalah ikut menghindarkan dunia dari kehancuran karena perang nuklir, karena ketidakadilan antara Utara dan Selatan, karena ketidakadilan dalam pembangunan suatu negara dan karena kerusakan lingkungan hidup. Di manamana kita juga menyaksikan gejala krisis di berbagai bidang, antara lain di bidang moral dan spiritual.

Kita harus mengikuti dengan cermat perubahan-perubahan yang sedang dan akan berlangsung di dunia tadi, agar pada satu pihak, kita dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari peluang yang dibawa perubahan itu bagi kelanjutan pembangunan kita dan dapat menghindarkan diri dari akibat-akibat negatif dari perubahan-perubahan tadi. Di lain pihak, melalui pembangunan yang kita lanjutkan, kita berusaha memberi sumbangan yang sebesar-besarnya kepada upaya seluruh umat manusia untuk menikmati kehidupan yang lebih tenteram, lebih maju dan lebih sejahtera dari yang dirasakan sampai sekarang.

Menyadari semua kemungkinan, tantangan dan harapan akan masa depan seperti yang saya gambarkan sekilas tadi, —baik di dalam negeri maupun di luar negeri— maka dalam melaksanakan semua amanat MPR yang memberi tugas kepada saya selaku Presiden Republik ini, saya telah merumuskan Panca Krida Kabinet Pembangunan V. Panca Krida itu berupa lima tugas pokok dan sekaligus sasaran untuk kurun waktu lima tahun mendatang, yang meliputi:

Pertama, Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan ketahanan nasional.

Kedua, meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparat negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketiga, membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keempat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Kelima, melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1992.

Izinkan saya selanjutnya, Saudara Ketua yang terhormat, menguraikan pokok-pokok Panca Krida itu, yang sekaligus merupakan penegasan-penegasan sikap dan wawasan Pemerintah mengenai masalah-masalah di berbagai bidang, yang sedang atau akan kita hadapi di masa datang.

Krida yang pertama, mencerminkan tugas pokok kita yang utama dan kebulatan tekad kita untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila kita telah maju selangkah lagi, karena GBHN 1988 memberi arah yang makin jelas dari pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itu. Ini menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkan wawasan yang makin luas, mendasar dan mendalam dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa datang, seperti yang saya katakan tadi. Hal ini juga membuktikan keberhasilan kita dalam memahami Pancasila secara makin jernih, kritis, kreatif dan dinamis. Dengan demikian Pancasila tidak kita kerdilkan menjadi dogma nasional yang beku dan kaku, melainkan menjadi ideologi terbuka yang pengembangannya kita lakukan melalui rangkaian konsensus-konsensus nasional.

Upaya melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itu kita kaitkan dengan Trilogi Pembangunan dan dengan Ketahanan Nasional.

Dengan Trilogi Pembangunan kita akan menyerasikan unsur-unsur stabilitas nasional dengan dinamika pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, yang sekaligus kita kaitkan dengan pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial.

Dengan Ketahanan Nasional kita meningkatkan kemampuan dan ketangguhan bangsa kita untuk menjamin kelangsungan hidup berdasarkan kondisi yang dinamis dalam mengintegrasikan tiap-tiap segi dari kehidupan bangsa dan negara kita. Kita

Digitized by Google

tidak dapat menerima pembangunan yang tidak meningkatkan ketahanan nasional. Kita menolak pembangunan yang mengakibatkan kemunduran ketahanan nasional kita. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila justru kita maksudkan untuk terus menerus meningkatkan ketahanan nasional itu.

Ketika kita memproklamasikan Kemerdekaan pada tahun 1945 kita berketetapan hati untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang bersumber kepada kepribadian kita sendiri dengan arah dan tujuan yang jelas. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam mempertahankan dan menumbuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu, kita tidak mengambil alih begitu saja konsep-konsep kenegaraan yang telah ada di dunia. Kita justru telah mengembangkan konsep-konsep kenegaraan yang paling sesuai dengan kepribadian dan perkembangan sejarah kita di masa lampau serta harapan kita di masa datang.

Sama seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas mempunyai dasar, kepribadian, arah dan tujuan yang jelas, yang akan mampu menyalurkan semua aspirasi dan kekuatan yang terdapat dalam masyarakat kita secara serasi dan kreatif.

Dengan demikian kita dapat menangkal dan menanggulangi beraneka ragam ancaman yang dapat menghadang proses pembangunan menuju tinggal landas, seperti yang pernah dan sedang dialami oleh bangsa-bangsa lain.

Ancaman itu antara lain berupa kekosongan dalam kehidupan moral, etik dan spiritual. Dapat juga berupa ancaman terhadap martabat serta hak-hak dan kewajiban asasi warga negara. Dapat pula berupa ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Juga ancaman otoriterisme, militerisme dan totaliterisme. Atau ancaman makin melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas, maka kita berupaya untuk meniadakan berbagai ancaman tadi. Pengalaman pembangunan bangsa-bangsa menunjukkan bahwa tidak sedikit bangsa-bangsa yang gagal untuk mencapai tinggal landas. Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila kita mengupayakan agar kita termasuk bangsa yang berhasil mencapai tinggal landas dalam pembangunan.

Dalam memperkuat landasan pembangunan yang kokoh menuju tinggal landas tadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kondisi kemantapan dan kemajuan di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pertahanan keamanan dan seterusnya.

Proses tinggal landas berarti bahwa secara berangsur-angsur kita akan makin mengembangkan dan memantapkan ciri-ciri suatu negara dan masyarakat yang maju, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Karena itu, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas akan merupakan ujian yang berat dan besar bagi ketangguhan kita sebagai bangsa pejuang menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Semua golongan, kalangan, lapisan dan generasi bangsa kita akan ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan bangsa kita dalam menempuh ujian yang berat dan besar tadi.

Di bidang pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bangsa kita dan khususnya golongan-golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan menghadapi ujian yang berat dan besar untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Di bidang pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bangsa kita akan menghadapi ujian yang berat dan besar untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan di muka bumi.

Di bidang pengamalan Sila Persatuan Indonesia bangsa kita akan menghadapi ujian yang berat dan besar untuk meningkatkan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dan kebersamaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Di bidang pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan kita akan menghadapi ujian yang berat dan besar untuk makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara serta bergairahnya rakyat dalam proses politik.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Demokrasi Pancasila ini, dwi fungsi ABRI tetap akan merupakan faktor yang positif dan kreatif untuk menjawab ujian yang berat dan besar yang akan dihadapi oleh bangsa kita.

Di bidang pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia kita akan menghadapi ujian yang berat dan besar untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Demikianlah tugas-tugas besar bangsa kita tahun-tahun yang akan datang dalam melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia

Krida kedua adalah meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Disiplin nasional dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan prasyarat mutlak bagi tahap tinggal landas pembangunan kita nanti. Pengalaman menunjukkan bahwa di antara bangsa-bangsa yang berhasil dalam pembangunannya ada sejumlah bangsa yang tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah. Yang mereka miliki adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdisiplin nasional.

Meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia itulah yang merupakan warna dasar dari GBHN 1988. Hal ini sejalan dengan hakekat pembangunan yang sejak semula menjadi tekad kita, ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini kita memandang sangat penting penggarapan Rancangan Undang-undang mengenai pendidikan nasional yang dewasa ini sedang dikaji bersama oleh Dewan yang terhormat dan Pemerintah. Kita perlu membahas Rancangan Undang-undang itu secara mendasar dan berorientasi kepada cita-cita, tujuan dan sasaran nasional kita.

Dalam hubungan dengan peningkatan kualitas manusia itu kita memberi perhatian yang besar kepada upaya untuk meningkatkan disiplin nasional. Disiplin nasional yang kita perlukan jelas bukan disiplin yang mati dan statis atau yang hanya berpegang kepada perintah dan peraturan secara harfiah semata-mata. Yang kita perlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan menuju tinggal landas adalah disiplin nasional yang hidup, dinamis dan kreatif, yang dijiwai oleh kesadaran akan nilai-nilai dan tujuan luhur yang telah kita sepakati bersama, ialah pengamalan Pancasila.

Disiplin nasional itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara saja, akan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini berarti panggilan tugas bersama dari tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat kita, pemimpin-pemimpin politik kita, pemuka-pemuka keagamaan kita, dari semua kalangan dan lapisan. Apabila dalam Panca Krida Kabinet Pembangunan V dinyatakan bahwa aparatur negara harus merupakan pelopor dalam menegakkan disiplin nasional, maka

Digitized by Google

hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal aparatur negara yang tugasnya memang untuk melayani bangsa dan masyarakatnya. Kepeloporan di sini berarti, bahwa aparatur negara harus menjadi kekuatan pendorong yang memberi tauladan yang baik, dengan menegakkan disiplin dalam dirinya sendiri dan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian aparatur negara sekaligus memainkan peranan yang aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam rangka semuanya itu telah diambil langkah awal untuk membudayakan dan melaksanakan pengawasan melekat yang kini sedang giat-giatnya dilancarkan di kalangan aparatur negara.

Pemerintah terus mengharapkan dukungan dan bantuan yang aktif dari masyarakat dalam upaya mengefektifkan pengawasan di semua bidang. Peningkatan disiplin nasional menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap aparatur saja. Pengawasan terhadap Pemerintah sendiri harus kita kembangkan secara efektif sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar, sesuai dengan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, maka setiap kekuasaan di negara ini diawasi oleh rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, penyelenggaraan negara yang berkembang dalam praktek dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan seperti itu merupakan unsur yang penting dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Demikian pula, masyarakat umumnya, antara lain melalui peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan disiplin nasional tadi.

Krida yang ketiga —yaitu membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara—, merupakan salah satu tugas utama kita untuk memantapkan kerangka landasan pembangunan yang akan kita tuntaskan dalam Repelita V.

Pembangunan tidak hanya berupa pertumbuhan di segala bidang; seperti di bidang ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lainnya saja. Bagi kita, pembangunan juga berarti perubahan yang menyeluruh menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila, seperti yang saya kemukakan tadi. Ini berarti bahwa perubahan yang menyeluruh itu tidak lalu menyimpang dari kepribadian, cita-cita dan tujuan-tujuan kita semula; akan tetapi justru harus makin mengungkapkan secara nyata segenap kepribadian bangsa kita yang telah kita langgengkan dalam Pancasila. Ini berarti bahwa Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 tidak cukup hanya kita pahami belaka; melainkan harus kita hayati sehingga menyentuh semua segi-segi kemanusiaan kita, termasuk kesadaran, perasaan, perilaku kita semua tanpa kecuali.

Upaya membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 memerlukan keterlibatan pemuka-pemuka dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semuanya tadi melibatkan semua orang tua yang mendidik anak-anak mereka; para guru dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi; para pemikir di bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara; tokoh-tokoh politik dan pemuka-pemuka masyarakat; prajurit ABRI, pegawai negeri, para usahawan, petani, dan pekerja, kalangan pers dan seterusnya.

Selanjutnya Krida keempat adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa kita menjalankan politik luar negeri dengan sikap nasionalisme yang sempit. Politik luar negeri yang demikian tadi justru menunjukkan perhitungan yang cermat dan kesadaran yang realistis mengenai kedudukan dan peranan yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan di dunia.

Politik luar negeri kita yang bebas aktif itu memang pertama-tama ditujukan untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas. Tetapi politik luar negeri kita itu juga sekaligus kita tujukan kepada cita-cita untuk ikut menyelenggarakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberhasilan kita dalam pembangunan nasional akan memberi bobot yang makin besar bagi pelaksanaan politik luar negeri kita yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang luhur tadi.

Dewasa ini umat manusia hidup dalam keadaan perekonomian dunia yang lamban pertumbuhannya. Kebanyakan negara-negara yang sedang membangun mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang disebabkan oleh meningkatnya beban hutang, meningkatnya proteksionisme dan menurunnya harga barang-barang ekspor pertanian. Singkatnya umat manusia sekarang hidup dalam lingkungan ekonomi dunia yang rawan, sedang bagian terbesar umat manusia belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak. Itulah sebabnya, kita tetap meletakkan bidang ekonomi sebagai prioritas. Karena itu pula pelaksanaan politik luar negeri harus diabdikan kepada tercapainya prioritas nasional itu.

Pembangunan memerlukan suasana dunia yang damai. Karena itu politik luar negeri kita selalu mendorong terciptanya suasana ke arah terwujudnya perdamaian yang didasarkan atas kemerdekaan nasional, penghormatan kedaulatan, saling menghormati dan saling bekerjasama. Sikap dan langkah-langkah kita sangat jelas dalam rangka ini; baik dalam menghadapi perlombaan persenjataan antara negara-negara besar dunia, menghadapi perkembangan di Asia Tenggara, di Afghanistan, di Timur Tengah, dan menghadapi politik rasialis dan apartheid di Afrika Selatan.

Dalam rangka itu kita menyambut dengan penuh harapan akan dimulainya gencatan senjata dalam perang Iran-Irak yang telah membawa bencana dan penderitaan bagi kedua bangsa.

Dalam rangka itu pula prioritas utama politik luar negeri kita tertuju pada pembinaan dan pengembangan ASEAN, yang makin hari makin kuat dan terus akan kita perkuat di masa datang. Mengembangkan suasana damai di kawasan ini, mendorong kita bersedia menjadi tuan rumah Pertemuan Informal Jakarta. Diliaht dari rumitnya masalah Kampuchea, maka kita merasa berbahagia bahwa Pertemuan Informal Jakarta itu telah menghasilkan momen yang historis, yang mudah-mudahan menjadi awal bagi penyelesaian secara tuntas masalah Kampuchea selanjutnya.

Kita juga memandang KTT Non Blok sebagai forum yang sangat penting untuk mendorong perdamaian dunia dan pembangunan bangsa-bangsa, terutama bagi dunia ketiga.

Krida yang kelima adalah pelaksanaan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun '92. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian yang penting dari usaha kita untuk terus menerus menyegarkan kehidupan kita sebagai bangsa, menyegarkan gagasan-gagasan kita dan menyalurkan aspirasi-aspirasi yang berkembang dinamis dalam masyarakat kita. Dengan demikian kita dapat mengembangkan terus sistem Demokrasi Panasila ke tahapan-tahapan pertumbuhan yang makin maju dalam menghadapi tantangan dan masalah-masalah baru yang akan terus muncul dalam masyarakat yang dinamis. Karena itu, pemilihan umum yang kita lakukan lima tahun sekali juga harus memperlihatkan kemajuan dalam pertumbuhan sistem politik Demokrasi Pancasila dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya. Dalam proses kemajuan itu, di satu pihak, harus tetap terjamin kelangsungan hidup dan sistem politik Demokrasi Pancasila itu sendiri; dan demikian juga harus terjamin persatuan, kesatuan, stabilitas dan keamanan nasional. Di lain pihak, pelaksanaan dan hasil-hasil pemilihan umum itu harus mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan dan kegairahan pembangunan di bidang yang lain.

Dalam mempersiapkan langkah maju tadi kita harus selalu waspada terhadap gagasan-gagasan bagi perubahan-perubahan yang dapat membawa kita kepada penyimpangan dari sistem politik Demokrasi Pancasila. Dalam hubungan inilah kita perlu memahami benar-benar Pancasila dan

Digitized by Google

penjabarannya dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya maupun sistem pertahanan keamanan kita.

Pemilihan Umum tahun '87 telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dibandingkan dengan pemilihan umum-pemilihan umum sebelumnya. Sebabnya ialah karena dalam pemilihan umum tahun '87 semua kekuatan sosial politik telah menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemilihan Umum tahun '92 nanti akan mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan bangsa kita, sebab dalam pemilihan umum nanti itu semua kekuatan sosial politik akan menyampaikan gagasan-gagasan dan program-program mereka kepada masyarakat mengenai Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua, yang akan kita tuangkan dalam GBHN '93. Karena itu baik pemerintah maupun kekuatan-kekuatan sosial politik dan juga semua golongan dan kekuatan dalam masyarakat kita secara dini harus menyiapkan diri agar pelaksanaan pemilihan umum tahun '92 nanti dapat berjalan sebaik-baiknya.

Memantapkan Swasembada Pangan

Demikianlah arah yang akan kita tempuh bersama dalam persiapan kita memasuki proses tinggal landas pembangunan. Kita perlu secara jernih melihat perspektif perjalanan panjagn bangsa kita itu, agar kita dapat mengarahkan secara mantap apa yang kita lakukan dalam bidang masing-masing menuju cita-cita dan arah bersama dalam jangka panjang tadi. Kita perlu menyadari, bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan dewasa ini akan mempengaruhi keadaan kita di masa datang.

Pandangan jauh ke depan itulah yang kita gunakan untuk menyusun Repelita V sebagai penjabaran GBHN 1988.

GBHN 1988 menegaskan bahwa Repelita V harus dapat menjadi landasan pembangunan yang kuat, sebagai tahap penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Bersamaan dengan itu, Repelita V sekaligus harus mampu menjadi ancang-ancang bagi persiapan kita memasuki proses tinggal landas yang akan kita mulai dalam Repelita VI, yang merupakan awal dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Sesuai dengan arah yang diberikan oleh GBHN, maka dalam Repelita V prioritas pembangunan tetap kita letakkan pada pembangunan bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Bersamaan dengan itu juga meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Titik beratnya ditekankan pada sektor pertanian dan sektor industri. Pembangunan pertanian diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Sedangkan pembangunan sektor industri terutama ditujukan pada industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap banyak tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kerangka landasan pembangunan yang kuat, maka struktur ekonomi kita juga harus makin seimbang pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini berarti kita harus berusaha sekuat tenaga agar pertumbuhan sektor industri dan sektor-sektor lainnya maju lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian sendiri harus terus kita tingkatkan.

Berdasarkan perkiraan kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, dan juga dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia, maka laju pertumbuhan ekonomi selama Repelita V diperkirakan sebesar rata-rata 5% setahun. Perkiraan itu cukup realistis, mengingat sejak memasuki Repelita IV kita menghadapi ujian dan tantangan berat di bidang ekonomi, yang terutama disebabkan oleh perkembangan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan pembangunan kita.

Sebagai bagian dari ekonomi dunia, perkembangan ekonomi kita juga akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia itu. Dengan beberapa pengecualian, sampai sekarang negara industri maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tersendat-sendat. Kalaupun ada perbaikan, maka tidak akan menjadi kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong perkembangan ekonomi dunia. Unsur lain yang mempengaruhi kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perubahan-perubahan besar dalam nilai tukar sejumlah mata uang asing dan belum mantapnya harga minyak bumi di pasaran dunia.

Hal-hal tadi meminta kesadaran kita semua tanpa kecuali untuk membulatkan tekad dan mengerahkan segala daya upaya agar sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setahun dalam Repelita V nanti benar-benar dapat kita capai. Dalam pada itu laju pertumbuhan penduduk harus kita usahakan dapat turun dari 2,1% dalam Repelita IV sekarang, menjadi 1,9% dalam Repelita V nanti. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setahun dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,9% setahun, maka produksi nasional nyata per jiwa akan meningkat dengan rata-rata 3,1% per tahun selama Repelita V yang akan datang.

Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan pertanian akan meliputi pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan, perikanan, peternakan serta kehutanan; yang kita arahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta peternak dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian kita manfaatkan secara efisien segala sumber daya yang ada dan yang dapat kita kembangkan. Semuanya ini kita laksanakan sehingga menjadi upaya yang terpadu dan saling menunjang dengan pembangunan di sektor lain terutama pembangunan industri, pembangunan daerah dan pedesaan, transmigrasi, serta upaya memelihara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian akan didukung oleh pengaturan tata ruang dan tata guna tanah agar penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha-usaha pertanian serta benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata. Dalam pada itu keikutsertaan petani akan makin didorong lagi melalui koperasi unit desa dan kelompok tani, sedangkan usaha pertanian yang besar dikembangkan agar dapat membantu berkembangnya usaha pertanian rakyat.

Dengan arah tadi kita harapkan sektor pertanian secara keseluruhan dapat mencapai pertumbuhan yang memadai, dan sekaligus dapat memberi dukungan kepada perkembangan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi kita.

Dalam pada itu pembangunan industri ditujukan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di pasar dalam negeri dan di luar negeri, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa, menunjang pembangunan dareah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta sekaligus pengembangan penguasaan teknologi. Usaha-usaha tadi didukung oleh peningkatan efisiensi serta pengembangan iklim usaha dan iklim investasi yang sehat. Segala upaya tadi dilakukan dengan memperkuat keterkaitan yang saling menguntungkan dan saling menunjang antara industri kecil, industri menengah dan industri besar, serta antara industri hilir, industri antara dan industri hulu.

Sampai sekarang industri kita telah mampu menghasilkan mesin-mesin dan peralatan industri. Malahan juga berhasil membuat pabrik-pabrik tertentu. Di waktu-waktu yang akan datang kemampuan tadi terus kita kembangkan dan kita arahkan agar secara bertahap makin banyak macam serta jumlah mesin dan peralatan industri yang dapat kita hasilkan. Demikian pula kita kembangkan terus penguasaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan yang dalam tahun-tahun terakhir ini mencapai kemajuan pesat. Dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional, kita juga meningkatkan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai dalam industri maritim, industri penerbangan, industri alat-alat berat,

Digitized by Google

industri elektronika dan industri pertahanan keamanan.

Dalam rangka memperluas pemerataan dan memantapkan landasan pembangunan industri maka industri kecil, industri kerajinan, industri rumah tangga, termasuk kegiatan yang informal dan tradisional, juga terus kita dorong perkembangannya. Demikian pula kita lanjutkan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri di seluruh Tanah Air yang didasarkan atas potensi-potensi yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini sangat diperhatikan keterpaduan pengembangan industri antar daerah dalam rangka memperkokoh kesatuan ekonomi nasional. Dalam keseluruhan pembangunan industri itu kemampuan dan peranan usaha swasta dan koperasi terus kita kembangkan.

Mengenai pembangunan pertambangan, maka arahnya adalah pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari kekayaan tambang bagi pembangunan nasional. Tujuannya untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan penerimaan devisa, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan bahan dan hasil tambang kita tingkatkan, baik untuk ekspor maupun untuk keperluan dalam negeri.

Dalam pada itu kita menyadari tetap pentingnya peranan minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sumber penerimaan devisa. Karena itu sejalan dengan upaya memperbesar dan menganekaragamkan sumber penerimaan negara dan penerimaan devisa, akan terus kita lanjutkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta penemuan cadangan baru.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terus kita lakukan pembangunan prasarana ekonomi pada umumnya; seperti pembangunan perhubungan di darat dan di laut serta melalui udara, pembangunan telekomunikasi, pembangunan kelistrikan dan energi pada umumnya serta lain-lainnya lagi.

Peningkatan produksi di berbagai bidang di masa datang, jelas memerlukan dukungan sistem tata niaga dan distribusi nasional yang efisien dan efektif melalui kebijaksanaan perdagangan yang terpadu dan saling mendukung dengan kebijaksanaan di bidang-bidang lainnya. Pengembangan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan makin meratakan kesempatan berusaha. Guna terus mendorong ekspor non migas, kita tingkatkan daya saing serta kita buat terobosan-terobosan baru dan perluasan pasaran di luar negeri. Kebijakan impor terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa; khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong serta teknologi yang diperlukan untuk pembangunan di berbagai sektor dan berkembangnya industri dalam negeri yang efisien. Sementara itu, kebijaksanaan perdagangan yang mendorong berkembangnya koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah akan dilanjutkan dan disempurnakan.

Dalam rangka membangkitkan semua potensi ekonomi dalam masyarakat agar dapat memberi sumbangan yang sebesar-besarnya bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, akan dilanjutkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang selama ini telah membawa hasil yang membesarkan hati.

Makin terwujudnya demokrasi ekonomi harus makn tampak dalam Repelita V, agar kita benar-benar mampu meletakkan landasan pembangunan yang kokoh kuat dalam ancang-ancang kita memasuki proses tinggal landas.

Karena itu dalam lima tahun mendatang dan seterusnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat harus terus kita dorong agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Koperasi harus menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri dan tumbuh dengan akar-akar yang kuat di dalam masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas dalam berkoperasi. Untuk membudayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat harus kita perluas pengertian tentang koperasi serta pembinaan koperasi secara profesional. Dorongan bagi berkembangnya koperasi terus kita lanjutkan; seperti bantuan tenaga manajemen, penyelenggaraan latihan ketrampilan dan pendidikan keahlian. Dengan jalan itu maka kita akan memperbesar kemampuan koperasi untuk berperan dalam berbagai sektor dan kegiatan ekonomi. Untuk itu perlu dorongan-dorongan bagi berkembangnya kerjasama antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta.

Transmigrasi Swakarsa

Dalam menyongsong peningkatan pembangunan yang makin luas dan berat akan tetapi penuh harapan di masa datang, kita harus memperluas kesempatan dan tanggung jawab bersama. Masalah dan tantangan pembangunan di masa datang tidak memungkinkan negara membiayai sendiri atau melaksanakan semua kegiatan pembangunan. Di samping hal itu tidak mungkin, juga keliru karena bertentangan dengan semangat kebersamaan dan demokrasi ekonomi kita. Ini berarti di tahun-tahun mendatang kita harus makin mengembangkan kemampuan dan peranan dunia usaha nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara, koperasi dan usaha swasta itu harus kita kembangkan dengan semangat kekeluargaan, sehingga saling menunjang dan saling menguntungkan. Di samping koperasi, perhatian yang khusus akan kita berikan kepada pengusaha-pengusaha kecil, informal dan tradisional serta golongan ekonomi lemah umumnya. Potensi mereka sangat besar dan dapat menjadi kekuatan penyangga terhadap pukulan-pukulan ekonomi yang datang dari luar.

Dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, maka pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi agar pembangunan setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah, sedang secara keseluruhan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional. Dengan jalan ini, di satu pihak, daerah memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya sendiri dalam membangun; dan di lain pihak, integrasi nasional tetap dapat kita mantapkan. Dalam rangka ini perhatian khusus diberikan kepada daerah-daerah yang relatif masih tertinggal, daerah dan kepulauan terpencil serta daerah-daerah perbatasan. Menyadari luasnya wilayah Tanah Air kita, serta keadaan dan tingkat pembangunan daerah yang berbeda-beda, akan didorong berkembangnya kerjasama antar daerah dalam pembangunan, sehingga daerah-daerah dalam suatu wilayah tumbuh secara serasi dan dapat memecahkan masalah-masalah wilayah secara bersama-sama. Demikian pula perhatian yang besar tetap tertuju pada pembangunan pedesaan, karena di desa-desa inilah bertempat tinggal bahagian terbesar penduduk kita. Desa-desa akan kita bangkitkan lebih lanjut kemampuannya untuk berproduksi, mengolah dan memasarkan hasil produksinya.

Dalam pada itu sekarang mulai terasa tekanan-tekanan berat kepada daerah-daerah perkotaan. Karena itu pembangunan perkotaan dilaksanakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan perkembangan penduduk, sehingga terwujud lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja dan berusaha.

Segala upaya kita untuk meningkatkan pertumbuhan di segala bidang tadi, pada akhirnya harus terasa nanti dalam wujud bertambah baiknya tingkat kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat akan terangkat, apabila makin banyak orang yang melakukan pekerjaan produktif sehingga memperoleh penghasilan yang lebih baik dan memiliki harga diri. Karena itu semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, terutama bagi angkatan kerja usia muda yang akan bertambah besar jumlahnya. Demikian pula penting sekali kita lanjutkan pelaksanaan transmigrasi sebagai salah satu upaya pendayagunaan tenaga kerja dan penyebaran penduduk; yang serentak dikaitkan dengan perbaikan mutu kehidupan, peningkatan pendayagunaan sumber daya alam dan pembangunan daerah. Dengan mengembangkan pusat-pusat pemukiman baru yang dikaitkan dengan pembukaan dan pengembangan daerah produksi, akan makin terdorong bergeraknya transmigrasi swakarsa.

Digitized by Google

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan kita lanjutkan pembangunan perumahan dan perbaikan lingkungan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Demikian pula kita lanjutkan upaya-upaya perbaikan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Tingkat kesejahteraan rakyat akan tampak antara lain pada tingkat kematian bayi dan ibu. Dalam Repelita V yang akan datang kita usahakan agar tingkat kematian bayi menurun dari 62 per 1000 kelahiran hidup seperti yang sekarang menjadi 50; sedangkan tingkat kematian ibu akan kita turunkan pula. Di balik penurunan tingkat kematian bayi dan ibu tadi, sesungguhnya terbentang pekerjaan luas, sebab hal itu berarti langkah-langkah besar untuk meningkatkan kualitas hidup ditengah-tengah masyarakat kita. Kita harus meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki lingkungan hidup sehari-hari, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan ibu, memperbaiki mutu gizi makanan, memperbanyak air yang bersih dan banyak perbaikan-perbaikan kehidupan nyata lainnya. Dan semuanya itulah yang memang kita tuju dengan melaksanakan segala kegiatan pembangunan.

Pembangunan kita jelas tidak hanya mengejar kemajuan-kemajuan serba benda, sebab kecukupan lahir saja tidak menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena itu kita perlu terus memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan kita yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Dengan ini pembangunan kita akan terasa mempunyai makna rohaniah yang dalam.

Peningkatan derajat hidup dan tanggung jawab terhdap kelanjutan pembangunan di masa datang, mengharuskan kita terus menaruh perhatian besar terhadap pembangunan pendidikan. GBHN 1988 menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia; dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan keluarga. Pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan kita pusatkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, serta perluasan pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama.

Abad ke-21 yang akan kita masuki 12 tahun dari sekarang, akan merupakan abad kehidupan dan peradaban manusia yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Bangsa yang tertinggal dalam kedua bidang ini akan makin tertinggal oleh kemajuan bangsa-bangsa lain. Ini berarti di tahun-tahun yang akan datang kita juga harus terus mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

Pengalaman pembangunan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa pembangunan dapat merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebab itu dalam memantapkan landasan pembangunan menuju tinggal landas nanti, segala upaya pembangunan sekaligus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup tadi. Dengan ini kita menunjukkan tanggung jawab kepada generasi-generasi yang akan datang, karena kita tetap akan meninggalkan bumi yang subur.

Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan memerlukan biaya besar. Makin banyak yang kita bangun makin besar pula dana-dana yang kita kerahkan; baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri.

Sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai bangsa merdeka, dan untuk memantapkan landasan pembangunan yang kuat, maka dana-dana pembangunan harus kita utamakan dari sumber dalam negeri. Untuk itu pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara akan terus kita sempurnakan agar penerimaan negara meningkat; sedangkan pengeluarannya makin terkendali, terarah dan efisien.

Dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan perkembangan harga minyak bumi di pasaran dunia, tidak ada jalan lain kecuali memperbesar penerimaan negara yang berasal dari non migas. Demikian pula pengerahan dana-dana tabungan masyarakat harus makin digalakkan. Peningkatan penerimaan devisa melalui ekspor non migas, jasa-jasa dan kepariwisataan harus merupakan perjuagnan habis-habisan.

Karena besarnya masalah dan tantangan pembangunan yang kita hadapi, maka pinjaman luar negeri tetap kita perlukan guna mendukung pembangunan. Kebijakan pinjaman luar negeri yang sekarang kita lanjutkan dalam arti tanpa ikatan politik, syarat-syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas-batas kemampuan kita untuk membayarkan kembali.

Mengenai pinjaman luar negeri perlu saya jelaskan bahwa yang menjadi masalah utama bukanlah besarnya jumlah pinjaman; akan tetapi kemampuan kita untuk membayar kembali tadi. Pinjaman luar negeri yang berada dalam batas kemampuan membayar kembali bukan merupakan warisan beban hutang kepada generasi yang akan datang. Sebab, pinjaman luar negeri itu akan terbayar oleh hasil-hasil pembangunan yang kita biayai dari pinjaman tadi.

Kemampuan untuk membayar kembali dari hasil pembangunan tercermin dalam besarnya *"debt service ratio"* (DSR). Memang, karena berbagai perkembangan ekonomi dunia yang datang bersamaan —yaitu terutama merosotnya harga minyak bumi dan perubahan nilai tukar sejumlah mata uang asing— dewasa ini tingkat "debt service ratio" kita cukup tinggi, ialah sekitar 35%. Kita bertekad untuk menurunkan tingkat tadi, agar pada akhir Repelita V nanti menjadi di bawah 25%.

Demikianlah gambaran umum mengenai apa yang ingin kita kerjakan dan arah yang kita tuju dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Masalah yang kita hadapi cukup besar dan tantangan yang harus kita tundukkan cukup besar. Tetapi kita tetap mempunyai kepercayaan yang teguh terhadap masa depan kita.

Sampai sekarang kerangka landasan pembangunan di berbagai bidang telah dapat kita letakkan; yang selanjutnya akan kita mantapkan dalam Repelita V yang akan datang.

GBHN menyatakan bahwa kerangka landasan ekonomi itu berupa struktur ekonomi yang makin seimbang antara bidang industri dan pertanian, sedangkan kebutuhan pokok masyarakat sudah tersedia dan terjangkau oleh rakyat banyak.

Di bidang pertanian kita mencapai kemajuan-kemajuan besar, terutama setelah kita berhasil mencpai swasembada beras sejak tahun 1984. Ini merupakan sukses awal yang membesarkan hati. Kemajuan lain di bidang pertanian, juga dapat kita capai; seperti perikanan, peternakan, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Diperkirakan selama Repelita IV yang akan berakhir nanti, pertumbuhan pertanian kita akan mencapai sekitar 3,4% per tahun. Kita menyadari bahwa kewaspadaan dan kerja keras masih harus kita lakukan di bidang pertanian ini di masa datang.

Kemajuan-kemajuan penting dan terobosan-terobosan baru juga berhasil kita lakukan di bidang industri. Tanda yang sangat jelas adalah makin besarnya sumbangan industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Repelita IV ini pertumbuhan industri diperkirakan dapat mencapai 10,2% per tahun, yang berarti melampaui pertumbuhan ekonomi nasional kita.

Hasil industri kita mutunya bertambah baik dan harganya makin memadai. Malahan hasil industri kita berhasil menerobos pasaran dunia; esperti tekstil, pakaian jadi, semen, pupuk, kertas, ban, besi baja dan banyak lagi jenis lainnya. Dalam jumlah yang masih terbatas kita juga mengekspor peralatan alat-alat berat, kendaraan bermotor, elektronika. Dewasa ini kita merupakan pengekspor kayu lapis terbesar di dunia; dan dalam waktu dekat ini mudah-mudahan disusul dengan ekspor barang-barang jadi dari rotan yang merupakan kekayaan alam yang sedikit dimiliki oleh negara-negara lain. Yang jauh lebih penting lagi adalah terobosan ke pasaran dunia yang berhasil kita lakukan atas barang-barang hasil industri kecil dan kerajinan rakyat, dengan nilai yang besar. Dengan pembangunan industri kita bertekad untuk mengolah sebanyak-bayaknya kekayaan alam di negeri sendiri, agar nilainya bertambah tinggi sehingga dapat memperbesar lapangan kerja dan menaikkan pendapatan masyarakat.

Seperti telah saya singgung tadi, kemaju-

Digitized by Google

an-kemajuan penting juga kita capai dalam rancang bangun dan rekayasa industri, sehingga sekarang kita mampu membuat komponen-komponen mesin, peralatan dan membangun pabrik-pabrik tertentu, mulai dari yang menggunakan teknologi sederhana sampai teknologi maju. Industri hulu dan industri hilir pada bagian-bagian yang penting telah berhasil kita bangun, sehingga di tahun-tahun yang akan datang terbuka luas kesempatan untuk mengisi dengan industri-industri antara dalam rangka pemantapan landasan pembangunan di sektor industri. Kemampuan mengelola industri dan kewiraswastaan juga tumbuh pada berbagai tingkatan dan kemampuan. Dengan kata lain secara keseluruhan kita telah mulai meletakkan dasar-dasar perkembangan masyarakat industri.

Pertumbuhan di bidang pertanian dan industri tadi telah membuat struktur ekonomi kita makin seimbang pada tingkat yang lebih tinggi.

Kemajuan-kemajuan di bidang pertanian dan industri tadi berhasil kita capai berkat pembangunan prasarana ekonomi; seperti pengairan, perhubungan, telekomunikasi, dan sebagainya. Sementara itu pemerataan pembangunan berhasil makin kita sebarkan ke semua daerah, sampai ke desa-desa. Kebutuhan dasar manusia makin dapat kita penuhi dengan mutu yang makin baik; seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan seterusnya.

Secara umum dapat kita katakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kita makin meningkat. Hal ini tampak jelas karena makin sedikitnya anggota masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Penerimaan negara meningkat dari tahun ke tahun dan bertambah sehat. Sejak tahun '86 penerimaan negara dari sektor non migas melampaui penerimaan negara dari sektor migas. Nilai ekspor kita juga terus naik dari tahun ke tahun, dan sejak tahun '87 penerimaan nilai ekspor non migas juga berhasil melampaui nilai ekspor migas. Ini berarti bahwa kita mulai berhasil mengatasi kerawanan dari ketergantungan yang besar terhadap penerimaan dari sektor migas, baik dalam penerimaan negara maupun dalam ekspor.

Kita memang merasakan tekanan-tekanan berat dalam pembayaran kembali pinjaman luar negeri, terutama karena perubahan nilai sejumlah mata uang asing yang kuat di dunia. Akan tetapi kita menunjukkan kemampuan dalam mengelola secara bertanggung jawab pinjaman-pinjaman luar negeri tadi. Ini membawa pengaruh yang positif terhadap dunia luar, sehingga negara-negara lain tetap menaruh kepercayaan kepada kita dengan tetap memberi pinjaman dengan syarat-syarat yang memadai. Kepercayaan dunia luar itu tercermin dengan tetap mengalirnya penanaman modal asing ke negeri kita.

Kemampuan kita dalam mengelola pinjaman luar negeri, langkah-langkah yang kita ambil secara tepat dalam pengendalian moneter dan meningkatnya ekspor non migas telah membuat cadangan devisa kita cukup memadai untuk mengamankan kehidupan ekonomi nasional dan memelihara gerak pembangunan.

Karena semuanya tadi, dengan perasaan lega, kita dapat mengatakan bahwa dalam Repelita IV kita dapat meletakkan kerangka landasan pembangunan di bidang ekonomi seperti yang digariskan oleh GBHN.

Demikian pula, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah dapat meletakkan kerangka landasan di bidang politik karena kita telah menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan makin meluasnya penataran P4 dan dialog-dialog nasional, makin terasa kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasinal dalam putaran lima tahunan makin mantap dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun '87 yang berjalan lebih baik dan lebih berbobot dari pemilihan-pemilihan umum yang terdahulu; yang kemudian disusul oleh Sidang Umum MPR tahun '88 yang memberi arahan-arahan baru dalam perjalanan bangsa kita untuk lima tahun berikutnya serta terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Penjabaran pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam GBHN '88 merupakan unsur yang sangat penting dalam kerangka landasan di bidang politik. Sidang Umum MPR tahun '88 telah memperkaya wawasan dan pengalaman kita mengenai pelaksanaan dari musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka Demokrasi Pancasila, yang akan merupakan sumbangan besar bagi perkembangan kehidupan politik yang makin dinamis dan stabil di masa datang.

Di bidang sosial budaya kita dapat makin memantapkan keserasian dalam masyarakat kita yang majemuk dan terus bergerak dinamis. Corak khas kedaerahan dapat kita pertahankan, kita perdalam dan kita perkaya dalam memberi warna yang makin indah terhadap semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kehidupan keagamaan makin terasa dalam, sedangkan kerukunan hidup antar umat beragama mulai melangkah maju kepada hasrat menuju kerjasama yang saling menghormati dalam upaya besar pembangunan masyarakat kita. Semuanya tadi menunjukkan bahwa kerangka landasan sosial budaya juga dapat kita bangun.

Kerangka landasan di bidang pertahanan keamanan terasa dalam suasana umum keamanan dan ketertiban tanpa adanya pergolakan-pergolakan yang dapat membahayakan keamanan nasional. Dalam hal ini ABRI telah memberi sumbangan yang sebaik-baiknya dengan melaksanakan dwifungsi secara bertanggung jawab.

Siap Melaksanakan Repelita V

Demikianlah pada peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan ini, kita telah membuat neraca perjuangan kita.

Kita telah melihat kembali ke belakang, ke titik awal perjuangan kita memproklamasikan Kemerdekaan Nasional pada tanggal 17 Agustus '45. Kita telah meneliti kembali perjuangan kita sejak melaksanakan pembangunan selama dua dasawarsa sampai menjelang akhir Repelita IV sekarang. Kita bersiap-siap melaksanakan Repelita V sebagai penutup babak Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, ialah menyusun landasan pembangunan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Kita merasa lega atas keberhasilan kita meletakkan kerangka pembangunan nasional. Kita menyadari betapa masih banyak yang harus kita tangani dan betapa besar tantangan-tantangan yang masih harus kita atasi. Kita juga melihat peluang dan harapan kita mengenai masa depan.

Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa betapapun beratnya tantangan dan ujian yang kita hadapi, namun kita tetap diberiNya petunjuk untuk mengatasi, menangkal dan bahkan menanggulanginya.

Pandangan kita ke tahun-tahun yang akan datang memperlihatkan besarnya masalah dan beratnya tantangan yang kita hadapi. Namun kita juga melihat di masa depan itu terbentang harapan-harapan kita. Karena itu kita akan melanjutkan perjalanan dengan keteguhan tekad dan kebulatan semangat, yang kita ilhami dari Proklamasi Kemerdekaan yang kita peringati besok pagi.

Kita semua digugah oleh kalimat-kalimat dari bagian penutup GBHN 1988, bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Kita juga disadarkan oleh pesan, agar semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan menyusun program menurut bidang dan kemampuan masing-masing dalam rangka melaksanakan GBHN.

Hati kita dikuatkan oleh keyakinan yang kita percayai, bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bukan bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Dan kita memang menyadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di masa datang akan ditentukan oleh peranan sentral manusia Indonesia yang berkualitas.

Semoga Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Pemurah tetap melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, kepada bangsa pejuang yang memutuskan untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada tahun '45, sebagai wahana luhur untuk mengatur dan menentukan nasib kita sendiri. ☐

Digitized by Google

Pemantapan Stabilitas Nasional Tetap Menjadi Perhatian Jajaran ABRI

Presiden Soeharto foto bersama peserta Rapim ABRI

Pemantapan stabilitas nasional tetap menjadi perhatian pokok jajaran ABRI. Usaha dan langkah untuk mewujudkan stabilitas nasional itu baru-baru ini dibahas dalam Rapat Pimpinan ABRI yang berlangsung di gedung Ardhyaloka, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 4 - 6 Agustus lalu, Rapim pertama di bawah kepemimpinan Jendral Try Sutrisno yang menjabat Panglima ABRI sejak Februari diikuti oleh 170 peserta yang terdiri atas pimpinan dan staf ketiga angkatan dan Polri, serta unsur-unsur ABRI yang berasal dari Fraksi ABRI DPR/MPR, pengurus Pusat Pepabri, Legiun Veteran dan para Pakokar dari Departemen Sipil dan Lembaga Tinggi Negara sebagai peninjau.

Betapa perhatian ABRI terhadap perwujudan stabilitas nasional yang mantap tercermin dari ucapan Menhankam Jendral LB Moerdani ketika memberikan prasaran dalam kesempatan itu. Menhankam mengemukakan, pembangunan selama dua dasawarsa terakhir ini dapat terlaksana hanya karena stabilitas nasional yang mantap. Stabilitas yang mantap tidak saja menjamin terlaksananya pembangunan nasional, tetapi juga mendorong perkembangan kehidupan nasional yang sehat di semua bidang, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. ''Kondisi seperti itu harus kita pelihara bahkan kita tingkatkan demi sukses Repelita V dan Repelita lainnya,'' kata Menhankam. Menurut Menhankam, perkembangan segala aspek kehidupan bangsa perlu diikuti oleh seluruh jajaran ABRI, agar segala kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dapat dicegah secara dini. Menurut Menhankam, dalam kurun satu dasawarsa mendatang, ancaman yang akan dihadapi bangsa akan lebih banyak bersumber dari dalam negeri, meski ancaman dari luar negeri juga harus tetap diwaspadai. Dikatakan-

Digitized by Google

nya, gejolak yang dapat timbul di masyarakat, diperkirakan justru berupa akibat sampingan pembangunan nasional.

Panglima ABRI Jendral Try Sutrisno juga mengemukakan hal sama dalam penutupan Rapim. Ia mengemukakan, dalam jangka waktu lima tahun mendatang, ABRI lebih mengutamakan pemeliharaan stabilitas nasional sebagai upaya untuk mengamankan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Pembicaraan-pembicaraan mengenai stabilitas nasional yang berlangsung dalam Rapim itu sejalan pula dengan amanat Presiden Soeharto yang disampaikan di Istana Negara, 7 Agustus lalu ketika menerima seluruh peserta Rapim. Presiden mengemukakan, jajaran ABRI perlu menyadari bahwa aspirasi dan harapan rakyat terus meningkat sejalan dengan kemajuan pembangunan yang tercapai. Aspirasi dan harapan rakyat itu perlu memperoleh saluran yang sebaik-baiknya agar menjadi pendorongan bagi kemajuan pembangunan. Sebaliknya, bila aspirasi dan harapan itu tidak tersalur dengan baik, tidak mustahil dapat menjadi sumber kerawanan yang tidak menguntungkan bagi proses tinggal landas. "Karena itu, penting sekali kematangan dan kearifan kita dalam mengembangkan konsep stabilitas nasional yang dinamis," kata Kepala Negara. Kepala Negara sangat menghargai ABRI yang bertekad untuk memantapkan stabilitas nasional yang demi kesinambungan pembangunan nasional. Diakui oleh Kepala Negara, pengembangan stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh peran ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. "Tugas ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator di masa datang tidak bertambah ringan, karena masalah-masalah pembangunan yang dihadapi bertambah berat dan rumit, sejalan dengan kemajuan masyarakat", kata Presiden.

Untuk menghadapi situasi dan perkembangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa datang, jajaran ABRI menempuh strategi penangkalan dengan inti kekuatan ABRI yang kecil, efektif dan efisien. Menurut Jendral Try Sutrisno, strategi ABRI dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa tetap berpedoman doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. "Jumlah anggota ABRI terbatas, namun tangguh. ABRI tetap memilih suatu format yang relatif kecil, tetapi efektif, efisien, mampu diandalkan, memiliki kemampuan menangkal siapa saja yang mengacau baik orang maupun virus-virus yang ada di dalam negeri", kata Jendral dalam kesempatan berbicara dengan pers, seusai bersama peserta Rapim diterima oleh Presiden di Istana Negara. Di bidang pertahanan negara, menurut Pangab, meski tidak ada tanda-tanda akan terjadi situasi internasional dan regional yang memberikan dampak negatif bagi Indonesia, namun kesiapsiagaan ABRI senantiasa terus ditingkatkan, sehingga apapun bentuk ancaman dapat dihalau sedini mungkin.

Selain masalah stabilitas nasional, Jendral Try Sutrisno mengungkapkan bahwa Rapim ABRI juga membahas masalah pelaksanaan pengawasan. Segala bentuk penyimpangan, menurut Try akan di atasi dan pelakunya akan ditindak tegas. "Tidak pandang bulu. Kita sudah sepakat semua, ingin ABRI makin kuat dan makin baik sebagai stabilisator dan dinamisator," kata Try menutup pembicaraan.☐ **(MKSG)**

PIMPINAN, STAF & KARYAWAN
BP. BALAI SIDANG JAKARTA

MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-43
(17 AGUSTUS 1945 – 17 AGUSTUS 1988)

Digitized by Google

Presiden: Anak Indonesia Harus Dibekali Kepribadian Yang Utuh

Presiden pada hari anak nasional

Presiden Soeharto, dua tahun lalu mencanangkan dasawarsa anak Indonesia. Sejak itu pula, setiap tanggal 23 Juli ditetapkan menjadi ''Hari Anak Nasional''.

Di Jakarta, perayaan hari anak dilakukan dengan berbagai cara. Tanggal 23 Juli lalu, Presiden bersama Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden Sudharmono bersama Ibu EN Sudharmono, sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan V serta masyarakat berbondong-bondong menuju Balai Sidang, Senayan, Jakarta, untuk menghadiri perayaan hari anak tersebut.

Selain menyampaikan pidato, Presiden juga berbicara dengan anak-anak dan kemudian menyaksikan berbagai atraksi.

Sedangkan pada hari sebelumnya, Himpunan Wanita Karya (HWK) yang merupakan organisasi kemasyarakatan dan berorientasi pada kekaryaan itu juga menyelenggarakan diskusi sehari yang mengambil tempat di Departemen Sosial.

Diskusi sehari yang menampilkan tokoh-tokoh dari masyarakat itu seperti Yaumil Agoes Achir, ketua jurusan Psikologi Universitas Indonesia, serta tokoh-tokoh yang lain itu mengambil tema ''Peningkatan Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Membentuk Generasi Penerus Yang Berkualitas Dan Mandiri''.

Pada acara peringatan hari Anak Nasional yang mengambil lokasi di Balai Sidang Senayan itu, yang juga dianggap sebagai puncak acara kegiatan itu menampilkan kesenian operete dan mengisahkan berbagai kegiatan anak yang ada di desa maupun di kota-kota besar.

Kegiatan yang cukup memikat itu, menggambarkan berbagai kesibukan anak. Misalnya anak-anak yang masih muda usia itu menjajakan koran ditempat-tempat lampu merah, anak sedang mencari uang dengan menyemir sepatu dan yang lainnya.

Sedangkan pada babak berikutnya juga dilukiskan bagaimana terjadinya suatu keakraban dari anak kota yang sedang bertandang ke desa. Mereka (anak-anak kota) disambut dengan penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Namun dalam serangkaian kegiatan acara tersebut yang tidak kalah menariknya adalah terjadinya dialog langsung antara Presiden dan anak-anak tersebut. Salah satu cuplikan dialog itu, seperti :
Namamu siapa? ''Suhendar, dari Cipanas'', ''Sekolahmu dimana? SMP Wijaya Kusuma, Kelas II. ''Wah, masih kecil sudah kelas II. Hebat! Kalau sudah besar mau jadi apa?'' Jadi ABRI'' kata Suhendar polos.

Digitized by Google

Presiden dialog dengan anak-anak

Utuh

Dialog antara Presiden itu terasa begitu akrab. Mereka (anak-anak) tidak merasa canggung dan takut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan presiden itu.

Presiden Soeharto dalam kata sambutannya mengatakan, dengan mengadakan peringatan ini, semua orang tua Indonesia digugah kembali kesadarannya dalam memikul tanggungjawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

''Kita semua memikul tanggung jawab itu, karena anak-anak kita inilah yang kelak mengganti kita semua, menjadi pemilik dan pembangun masa depan, penentu kejayaan bangsa kita di masa datang dalam mewujudkan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur,'' kata Presiden.

Jika anak-anak kita nanti menjadi dewasa, mereka akan hidup dalam abad ke-21. Suatu abad yang jelas akan berlainan dengan abad ke-20 sekarang. Dapat kita bayangkan dari sekarang, bahwa abad ke-21 adalah abad yang penuh dengan ujian dan tantangan, karena peradaban manusia akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan ekonomi yang penuh dengan segala kemungkinan. Zaman yang demikian itu banyak mengandung harapan bagi kebaikan hidup manusia. Akan tetapi bersamaan dengan itu juga akan penuh dengan ujian dan tantangan terhadap nilai-nilai kehidupan.

Karena itu kita memikul tanggungjawab dan kehormatan untuk mengantarkan ke arah kebaikan hidup. Kita harus memberi bekal dengan keimanan, kepribadian, kecerdasan, ketrampilan, jiwa dan semangat kebangsaan. Tujuannya adalah agar mereka kelak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia yang utuh, di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang akan penuh dengan ujian dan tantangan mengenai nilai-nilai kehidupan.

Persiapan untuk menghadapi masa depan itu memang telah mulai kita rintis dari sekarang. Sejak semula kita telah bertekad bahwa pembangunan yang kita laksanakan sekarang tidak saja untuk kita yang hidup di masa kini, akan tetapi juga untuk menyiapkan masa depan yang akan lebih baik lagi bagi generasi-generasi yang akan datang. ''Karena itu saya sering mengingatkan bahwa pembangunan kita harus merupakan pembangunan yang berkesinambungan.'' □ (BM)

Sebuah atraksi dari anak

Digitized by Google

Musyawarah Besar Angkatan '45

Sebuah Cenderamata dari Soerono kepada Presiden Soeharto

Tomohon, daerah wisata yang sejuk di Sulawesi Utara, 20 Juli lalu menjadi perhatian publik karena di tempat ini para pejuang yang tergabung dalam Angkatan '45 dan tersebar di berbagai penjuru tanah air, berkumpul untuk menyelengarakan Musyawarah Besar Nasional.

Musyawarah Besar Nasional Angkatan '45 ke VIII yang dibuka oleh Presiden Soeharto itu berhasil menetapkan Soerono menjadi Ketua Umum Dewan Harian Nasional (DHN) Angkatan '45 untuk periode 1988-1992. Selain itu, Mubes yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut juga menerima secara bulat laporan-laporan dari tiga komisi.

CJ Rantung, Gubernur Sulawesi Utara, yang memimpin sidang pleno pada acara Mubes ini memberikan tugas kepada formatur untuk menyusun kepengurusan organisasi Angkatan '45 yang terdiri dari Dewan Penasehat Nasional yang beranggotakan delapan orang, Dewan Paripurna Nasional dengan 45 orang anggota, serta Dewan Harian Nasional yang beranggota 17 orang. Dalam menyusun keanggotaan, Rantung memberi waktu hanya satu bulan.

Sementara, laporan tiga komisi yang diterima secara bulat itu di antaranya Komisi I yang membahas tentang pertanggungjawaban Dewan Harian Nasional untuk periode 1984-1988.

Komisi II membahas pokok-pokok kebijaksanaan organisasi Angkatan '45 untuk masa bhakti 1988-1992. Sedangkan Komisi III membahas dan merumuskan peranan koperasi agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan daya beli dan mencegah praktek monopoli yang dapat merugikan rakyat.

Selain itu, Mubes yang mengambil tempat di Bukit Inspirasi, Tomohon, Sulawesi Utara ini, juga menetapkan pengesahan tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Harian Nasional Angkatan '45 masa periode 1984/1988, pokok-pokok kebijaksanaan organisasi Angkatan '45 dan Pedoman Umum Tentang Pelestarian Jiwa, Semangat Dan Nilai-Nilai '45.

Presiden Soeharto dalam sambutannya menyinggung tentang kehadiran suatu generasi. Dikatakan, saat ini hampir setengah abad Angkatan '45 menyumbangkan darma bhaktinya bagi perjuangan bangsa. Kehadiran suatu generasi dalam sejarah bangsa biasanya hanya berlangsung setengah abad. Karena itu, kurun waktu sekarang jelas merupakan bagian akhir dari darma bhakti Angkatan '45 kepada bangsa Indonesia.

Rampung Dan Tuntas

Dalam meninggalkan panggung sejarah bangsa, Angkatan '45 memang

Digitized by Google

Angkatan 45 bertekad tidak tinggalkan masalah-masalah pelik

harus bertekad untuk tidak meninggalkan masalah-masalah pelik yang akan membahayakan generasi penerus dan generasi-generasi selanjutnya. Tekad inilah yang dihayati oleh setiap unsur Angkatan '45, terutama karena dorongan tanggungjawab sebagai pejuang untuk terus mengabdi kepada negara yang kita tegakkan, kita pertahankan, kita bangun dan kita cintai bersama agar seterusnya dapat dilanjutkan, ditingkatkan dan disempurnakan oleh generasi demi generasi yang akan datang.

Secara mendasar, kata Presiden, masalah pelik itu telah kita lampaui dan kita rampungkan secara tuntas, dengan penegasan kita semua bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula penegasan kita bahwa pembangunan nasional kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila. Ini merupakan jaminan bahwa pembangunan bangsa kita selanjutnya — di tengah-tengah peradaban manusia yang akan penuh dengan cobaan karena kemajuan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi — akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang kita anggap luhur, yang diamanatkan oleh pendahulu-pendahulu kita.

Lebih lanjut dikatakan, Angkatan '45 merasa lega bahwa tuntutan yang amat mendasar ini berlangsung di tengah-tengah kurun waktu Angkatan '45 masih menyumbangkan pikiran dan tenaga kepada bangsa dan negaranya.

Dengan penegasan kita itu, bahwa pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka kita dapat menghindarkan diri dari ekses-ekses pembangunan masyarakat moderen. Ekses-ekses tersebut berupa pendangkalan kehidupan di bidang spiritual yang dapat memerosotkan harkat dan martabat manusia. Sebab, dalam Pancasila terkandung Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan mengamalkan Pancasila maka benturan-benturan kepentingan yang merupakan salah satu ekses pembangunan masyarakat modern akan dapat dihindarkan. Sedangkan pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengharuskan kita untuk terus menerus mengembangkan sistim demokrasi Pancasila, yang kita percaya merupakan kekuatan hidup bangsa kita. Dan dengan mengamalkan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita pasti akan dapat mengatasi kesenjangan sosial yang cenderung menyertai masyarakat modern.

Sedangkan Angkatan '45 juga merasa bahagia, karena pada bagian-bagian akhir pengabdiannya kepada bangsa dan negara, masih ada kesempatan untuk ikut mengantarkan bangsa Indonesia memantapkan landasan pembangunan dalam Repelita V yang akan datang.

Apabila semua itu terjadi, karena rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Angkatan '45 telah mengantarkan bangsanya merampungkan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, sebagai ancang-ancang untuk memasuki tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Dalam bagian akhir dari pengabdiannya, Angkatan '45 perlu meneruskan nilai-nilai kejuangan kepada generasi yang lebih muda. "Hal ini penting," ujar Presiden. Sebab pembangunan juga kita anggap sebagai perjuangan, sebagai kelanjutan dan pengisian perjuangan kemerdekaan dulu.□ (BM)

Digitized by Google

Generasi Muda Jangan Jadi Konsumen Ide Tetapi Tampil Secara Mandiri

DPD I AMPI DIY Yogyakarta baru-baru ini menyelenggarakan sarasehan untuk membahas peran generasi muda. Sarasehan yang berlangsung "lesehan" (duduk di tikar) di auditorium RRI (yang masih baru) berhasil menarik minat 300-an peserta terdiri atas pemuda, mahasiswa dan sejumlah cendekiawan. Sarasehan yang dipandu oleh Drs Westra SH dari Pemda itu menampilkan pembicara Menpan Ir Sarwono Kusumaatmadja, Drs G Mudjanto MA dari IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, Dr Kunto Wibisono, Rektor UNS Surakarta, dan Dr Kuntowijoyo dari UGM, Yogyakarta. Sarasehan juga dihadiri oleh GPBH Mangkubumi (Ketua DPD Tingkat I Golkar DIY) dan Ketua Umum dan Sekjen DPP AMPI Agung Laksono dan Widjanarko Puspoyo.

Mengawali pembicaraannya, Sarwono mengemukakan, ia lebih senang bila pembicara yang tampil datang dari kalangan generasi muda sendiri. "Saya lebih senang kalau yang bicara di sini salah satu dari anda, karena andalah yang lebih berhak atas masa depan anda, dan masa depan anda tentukan sendiri, bukan orang lain," kata Sarwono seraya menambahkan, ia lebih senang tampil hanya untuk memberikan sumbangan pengalaman.

Menurut Sarwono, generasi muda jangan menjadi "konsumen ide", yang hanya mengharapkan dan minta pengarahan dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya generasi muda harus tampil dengan ide-idenya sendiri. "Generasi muda harus mandiri, berani tampil dengan sikapnya sendiri untuk menentukan masa depan" kata Sarwono.

Dalam forum itu Sarwono melecut semangat generasi muda dengan dorongan agar berani bersikap mandiri, dan berani bertindak serta tidak terbelenggu oleh kecengengan. Peningkatan kualitas manusia, menurut Mempan, hanya dapat tercapai dengan peningkatan kemampuan masing-masing orang. "Kita masing-masing harus memacu diri menjadi manusia yang lebih baik dan lebih mandiri", kata Sarwono, yang juga Sekjen DPP Golkar itu. Diakuinya, untuk pengembangan diri, situasi lingkungan yang tidak kondusif memang berpengaruh cukup besar. Tetapi sebagai manusia, katanya, kita justru harus mempengaruhi lingkungan. Tokoh-tokoh yang berhasil adalah orang-orang yang dapat mengatasi lingkungan yang tidak kondusif baginya, katanya, memberikan contoh. Kepada generasi muda, ia berharap hendaknya tidak bertindak cengeng, penuh dengan tuntutan, karena justru bisa terbelenggu oleh berbagai tuntutan tanpa sempat dapat bertindak. Sebaliknya, generasi muda perlu berusaha mengatasi kendala yang dihadapinya, bahkan perlu memberikan sumbangan pikiran untuk mengubah keadaan yang tidak "favourable". "Di sinilah peran generasi muda itu diharapkan", kata tokoh mahasiswa di tahun 1966.

Sarwono, Generasi muda harus tampil dengan ide-ide sendiri.

Digitized by Google

Lebih jauh, Sarwono mengungkapkan, bahwa generasi muda yang hidup saat ini merupakan generasi muda pasca kemerdekaan. Bagi mereka sudah sulit membayangkan bagaimana dinamika perjuangan fisik, perjuangan menentang PKI, menghadapi kesulitan ekonomi berupa praktek antri untuk mendapatkan beras, minyak, sabun dan garam. Tidak relevan menggugah minat mereka dengan contoh-contoh masa lalu karena kesulitan akan kebutuhan fisik bukan masalah yang sangat mendesak saat ini. Sebaliknya, tuntutan yang mereka lihat saat ini lebih bersifat kualitatif, dan nonfisik, seperti keadilan,pelayananumum yang lebih baik, hak asasi yang harus dijunjung tinggi serta penegakan hukum. Melihat tantangan itu, generasi muda justru diharapkan ikut tampil untuk memberikan jawabannya.

Sarwono mengungkapkan, sejumlah pengamat asing menilai dewasa ini rakyat Indonesia telah maju pesat, dibandingkan sebelum Repelita. bahkan dibandingkan dengan Repelita II. Orang asing yang disebutkan Sarwono itu mengemukakan bahwa ciri stereotip orang Indonesia umumnya sudah berubah yaitu menjadi lebih lugas, lebih tegas, lebih menghargai waktu, dan lebih percaya diri, tidak hanya mengandalkan keramahtamahan seperti sebelumnya. "Gambaran yang diperoleh orang asing itu ada benarnya, dan kita memang berada dalam arus maju. Kita harus melihat masa depan dengan optimis dan percaya diri", katanya.

Ia juga memberikan contoh, beberapa negara yang disebut NIC (negara industri baru, yang juga disebut Macan Asia) keadaannya lebih buruk dari Indonesia sekarang saat mereka mulai membangun. Seorang tokoh ekonomi Taiwan yang bertemu dengannya menyatakan, Indonesia dapat menjadi bintang di Asia di bidang industri, karena memiliki tiga faktor pendukung yaitu ABRI yang kuat, stabilitas politik yang mantap dengan dukungan kekuatan politik mayoritas serta birokrasi yang responsif. "Pencapaian kemajuan itu tergantung pada tekad kita," kata Sarwono, seraya menambahkan bahwa kemampuan bangsa Indonesia untuk itu ada. Sebagai contoh, ia mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan. Dengan upayanya sekuat tenaga Indonesia berhasil mengubah dirinya dari importir beras terbesar menjadi swasembada. "Kalau kita mau sebenarnya mampu," katanya.

Pembicara lain, G Mudjanto menggarisbawahi pendapat Sarwono. Tentang citra manusia berkualitas, G Mudjanto selaku pendidik mengatakan, sasaran utama dalam dunia pendidikan penciptaan manusia yang mandiri, bisa berpikir, berprakarsa atas tanggung jawab sendiri, serta mampu bertahan dan mencari jalan keluar dalam kesulitan apapun, serta tidak terlepas kendali dalam keadaan yang menyenangkan.

Sementara itu Dr Kunto Wibisono mengatakan, kualitas manusia bukanlah predikat, tetapi melekat pada jati diri manusia. Untuk mencapai manusia berkualitas hanya melalui pendidikan dan peningkatan kesejahteraan. Ukuran manusia berkualitas adalah manusia yang sejahtera lahir dan batin. "Hanya manusia sejahtera yang dapat berpartisipasi terhadap pembangunan", kata Kuntowibisono.☐

(MK Sgt)

Dewan Pimpinan Pusat beserta Segenap Keluarga Besar Golongan Karya

Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya:

K.R.Ay. SITI HATMANTI SOEMOHARYOMO

(Ibunda Ibu Tien Soeharto)

pada tanggal 30 Juli 1988. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa

Dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan iman

A m i n

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Ketua Umum	Sekretaris Jenderal
ttd	ttd
Sudharmono SH	Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Digitized by Google

"Agung Laksono"
AMPI Hendaknya Angkat Konsepsi!

Tidak dapat dipungkiri di dua tempat baik di Bandar Lampung dan Semarang dalam rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun AMPI ke sepuluh diselenggarakan beberapa mata acara kegiatan yang melibatkan generasi muda pesta seni dan budaya, pesta olahraga, saresehan, seminar dan diskusi. Malam harinya, baik di GOR Saburai Bandar Lampung dan GOR Pancasila Semarang di selenggarakan malam resepsi HUT AMPI.

Di Lampung tak kurang dari lima ribu warga AMPI menghadiri dan memenuhi GOR selain menyaksikan pagelaran kesenian antara seni daerah dan seni musik lawak dengan dimeriahkan oleh artis-artis AMPI dari Jakarta, juga mendengar sambutan pengarahan dari Gubernur Lampung Pujono Pranyoto.

Sama halnya di Semarang malam resepsi ulang tahun AMPI juga dimeriahkan selain oleh musik populer dan dangdut juga ada lawak dari group Sri Mulat. Gubernur Ismail yang malam itu berseragam Jaket AMPI memberikan sambutannya. Baik Gubernur Lampung dan Jawa Tengah berharap bahwa AMPI hendaknya tanggap dalam membaca tanda-tanda zaman dengan segala tantangannya.

Bahkan di Semarang Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara selaku pembina AMPI menguraikan secara rinci proses kelahiran AMPI sepuluh tahun silam. Dengan sangat seksama dan disambut hangat oleh warga AMPI yang memadati GOR Pancasila, antara lain di tekankan bahwa AMPI lahir bukan untuk tiada, namun dikatakannya bahwa kehadirannya mengandung nilai dan harapan, agar AMPI dalam kondisi apapun mampu mencerminkan sikap dan perilaku pembaharuan.

Di dua tempat dihadapan warga AMPI Ketua Umum AMPI Agung Laksono, menekankan pentingnya setiap warga AMPI untuk segera menyadari bahwa peran itu jangan dinanti seperti menanti hujan dimusim kemarau. Tapi berperanlah sebaik-baiknya bagi setiap warga AMPI dimanapun berada sesuai dengan bidangnya merupakan panggilan kewajiban.

Menggaris bawahi apa yang dikemukakan oleh pembina AMPI Cosmas Batubara di Semarang. Agung menganjurkan janganlah sering-sering kita warga AMPI membuat acara-acara

Kehadiran AMPI mengandung nilai dan harapan

Digitized by Google

Jadikan AMPI tumpuan bagi kaum muda

yang hanya hura-hura dan berupa seremoni. Acara itu bisa saja dikerjakan sepanjang tidak melepas permasalahan yang lebih menarik untuk diperhatikan bahkan bila siap harus segera ditangani, seperti misalnya masalah ledakan tenaga kerja muda kita yang kini menjadi beban Negara. AMPI sebagai suatu kekuatan pemuda yang telah menamakan diri sebagai pembaharu, harus dengan tangkas memerangi keterbelakangan, kemiskinan dan pengangguran karena persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, menurut hemat saya, lanjut Agung harus mendapat penanganan secara bersama-sama, antara pemerintah dan kita.

Sebagai wadahnya kaum muda pembaharu hendaknya tampil secara konsepsional dan jadikanlah dirinya tumpuan harapan bagi kaum muda lainnya. Untuk mencapai tahapan itu kepada AMPI Ketua Umum Agung Laksono, mengingatkan, tiba saatnya kini kita untuk segera berbuat sebanyak-banyaknya di berbagai sektor didalam peran serta terhadap kelangsungan pembangunan. Modalnya adalah kreatif, dan dapat membawakan diri secara baik ditengah masyarakat lingkungannya.

Karena zaman kini bukan lagi keadaan yang hanya banyak bicara tanpa ada karya, tapi sekarang banyak bicara yah harus banyak kerja, banyak berbicara yah harus berprestasi.

Meskipun cara memperingati agak berbeda di Jogjakarta menyambut hari ulang tahun AMPI tak kalah mengesankannya, karena di selenggarakan secara lesehan digedung RRI Jogjakarta dengan mengambil thema peningkatan kwalitas manusia Indonesia, terlebih bukan hanya saja para rektor yang angkat bicara dalam soal itu, budayawan dan secara khusus bahkan Sarwono Kusumaatmaja selaku Menpan diundang untuk berdialog dari pukul delapan hingga larut malam.

Dalam kesempatan yang lain dihadapan pengurus AMPI Jogjakarta Agung Laksono menaruh harapan yang sama seperti yang disampaikan pada sambutan pengarahan di dua tempat Lampung dan Semarang.

Selain acara pesta olahraga, seni dan budaya, AMPI Jateng siang sebelum malam resepsi juga diselenggarakan saresehan dengan pembicara tunggal Cosmas Batubara, mengambil tempat di Auditorium RRI Semarang, tak kurang dari tiga ratus peserta. Saresehan yang lebih mendekati seminar itu tak kalah menariknya, karena topik yang dibahas adalah yang sedang menjadi isu sentral akhir-akhir ini, kwalitas manusia sebagai sumber pembangunan.

Di dua tempat baik RRI Semarang dan RRI Jogjakarta acara tersebut diwarnai suasana tawa, hangat, kritis, sehingga terkesan oleh banyak peserta, nampaknya AMPI mulai mengarah kepada peningkatan kwalitas diri.

Dalam percakapannya dengan Media Karya Agung Laksono menyatakan, bahwa cara-cara semacam lesehan, saresehan yang non protokoler semacam inilah sambil menunjuk acara lesehan Jogja yang baru selesai mulai harus dimasyarakatkan oleh AMPI untuk tahun-tahun mendatang.

Dikatakannya dengan cara berdialog akan semakin jelas persoalan apa yang paling penting untuk mendapatkan tidak hanya sekedar diperhatikan tapi untuk segera ditangani. Itu sisi yang lain, dari sisi dalam rangka meningkatkan kwalitas diri cara-cara dialog, bertemu, tanpa ada batasan akan menumbuhkan gairah, serta tambah wawasan kita.

Karena persoalan yang makin hari mengintip kita adalah masalah ledakan tenaga kerja. Bagaimana kita sekarang berfikir agar setiap orang yang selesai sekolah paling tidak dengan bekal yang ada dari sekolahnya mampu menciptakan kerja untuk diri sendiri. Meskipun pada akhirnya memang, persoalannya tidak sesederhana itu karena prodak lembaga pendidikan yang cenderung tidak siap pakai akan memperbanyak pengangguran. Pada akhirnya kita akan terbentur pada fokus tentang sistem pendidikan kita, untuk itu AMPI secara keseluruhan segera membuat terobosan-terobosan besar agar setiap persoalan kaum muda, pada masing-masing daerahnya, desanya dapat terpecahkan dengan cara-cara yang kreatif. Menurut Agung, dimasa depan hanya orang-orang yang kreatiflah yang akan mendapat tempat, ada banyak contoh orang-orang kreatif yang memulai usahanya dari kecil Agung menyebut Bob Sadino misalnya dan masih banyak lagi katanya.

Kita harus kreatif dan tanggap itulah ciri-ciri pembaharuan. □ RENDY. MS

Digitized by Google

Indonesia Mampu Menerapkan Prinsip-prinsip Konvensi ILO

Setiap tahun organisasi pekerja dunia, International Labour Organization (ILO), mengadakan sidangnya untuk membahas masalah perburuhan internasional. Tahun in konferensi yang berlangsung di Geneva itu, diselenggarakan sejak tanggal 1 sampai dengan 22 Juni yang lalu.

Tak kurang dari 150 negara di dunia mengutus wakil-wakilnya dalam Konferensi ILO itu. Tiap delegasi terdiri dari unsur-unsur tripartite, yakni unsur pemerintah, unsur pekerja dan unsur pengusaha dari masing-masing negara. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Drs Cosmas Batubara, yang didampingi oleh Drs Bomer Pasaribu dari unsur pekerja dan Soeprapto Boedjosastro dari unsur pengusaha, serta para anggota lainnya.

Konferensi ILO yang ke 75 itu membahas materi pokok tentang laporan Dirjen ILO mengenai hak-hak asasi manusia dan kegiatan ILO tahun 1987, tentang masalah budget organisasi, dan tentang pelaksanaan konvensi serta rekomendasi-rekomendasi ILO. Selain itu juga dibahas masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya seperti tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tentang peningkatan tenaga kerja di pedesaan, tentang deklarasi ILO berkenaan dengan masalah apartheid di Afrika Selatan, dan beberapa materi lainnya yang masing-masing dibahas melalui komite-komite yang dibentuk untuk itu.

Prinsip yang sama

Cosmas Batubara yang bertindak selaku utusan unsur pemerintah Indonesia dalam pidatonya di depan forum sidang pleno Konferensi ILO di Geneva itu mengatakan, bahwa pada garis besarnya ILO dan pemerintah Indonesia mempunyai pandangan dan menerapkan prinsip-prinsip yang sama. Dalam Undang Undang Dasar Negara telah ditentukan hal-hal mengenai hak berorganisasi dan mengemukakan pendapat, tentang kebebasan beragama, dan hak memperoleh pekerjaan. Diuraikannya juga tentang peniadaan diskriminasi atas dasar sex, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang

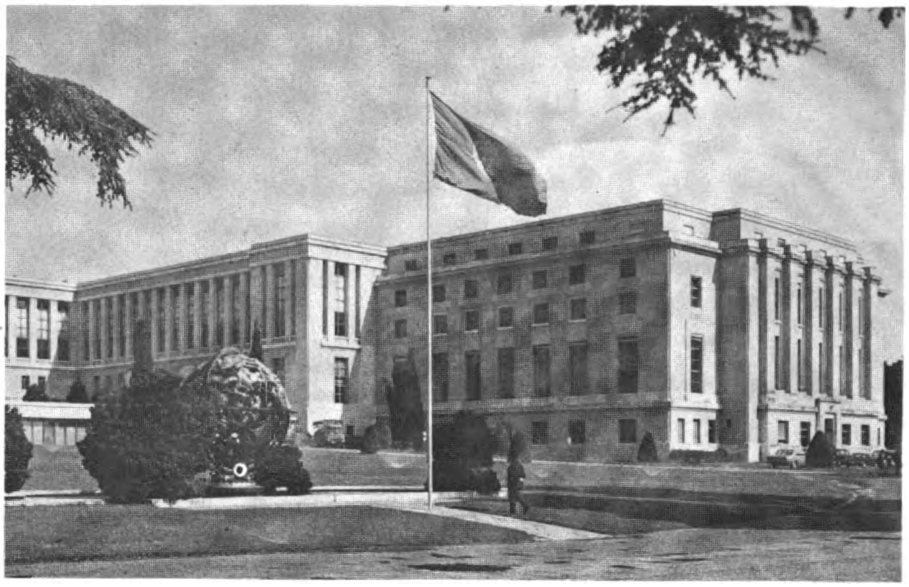

Markas Besar ILO di Jenewa

Mahaesa, suku atau daerah asal-usul dalam kesempatan memperoleh pekerjaan.

Ungkapan Menteri Tenaga Kerja ini diperkuat oleh Drs Bomer Pasaribu dari SPSI yang berbicara mewakili unsur pekerja. Ia mengatakan para pekerja Indonesia telah mampu mengembangkan dirinya dalam meningkatkan kondisi demokratis yang memungkinkan mereka bebas berorganisasi, bebas untuk mengadakan perjanjian kerja bersama dan mengemukakan pendapat khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja. "Semua itu dijamin dengan peraturan perundang-undangan," ujar Bomer.

Mengenai masalah demokrasi yang sering dilontarkan orang sebagai kritik terhadap Indonesia, Menteri Cosmas menjelaskan bahwa setiap negara dan masyarakatnya mempunyai tingkatan dan pengembangan demokrasinya masing-masing. Demokrasi berkaitan erat dengan berbagai faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan dan peran pemerintahnya, dan lain-lain.

Khusus mengenai Indonesia Menteri Tenaga Kerja mengungkapkan, bahwa, peraturan perundang-undangan di Indonesia menciptakan iklim untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi yang mampu mewujudkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan demokrasi amatlah penting memelihara keseimbangan antara pelaksanaan hak-hak pribadi dengan kepentingan bangsa. "Kebebasan pribadi harus mengindahkan kebebasan orang lain. Kepentingan pribadi harus mengingat aspek kepentingan masyarakat secara luas," kata Cosmas. "Jika tidak," lanjutnya, "keseimbangan demokrasi akan terganggu."

Lebih jauh Mennaker mengemukakan, bahwa, dalam masyarakat demokratis, kepentingan bersama dicapai melalui wadah-wadah organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Dalam hubungan ini, sekali seseorang telah memilih menjadi anggota suatu organisasi, maka ia akan terikat kepada kepentingan bersama dari semua anggota organisasi itu. Melalui organisasi, seseorang dapat ikut serta mengusahakan kesejahteraan masyarakat, ikut mengupayakan hapusnya kemiskinan, memajukan pendidikan, meningkatkan tingkat hidup masyarakat, dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara Indonesia Cosmas menyatakan kebanggaannya bahwa Indonesia telah berhasil meletakkan dasar yang kuat guna melaksanakan demokrasi. Dasar itu adalah

Digitized by Google

ideologi negara Pancasila. Melalui Pancasila, ungkap Mennaker, bangsa Indonesia mampu mengembangkan organisasi dan infrastruktur dalam suasana musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Pelaksanaan Pancasila dalam bidang ketenagakerjaan telah menciptakan hubungan industrial yang pada hakekatnya sejalan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip konvensi ILO.

Mengenai hal itu Bome Pasaribu dalam pidatonya mengatakan bahwa prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila (HIP) memungkinkan para pekerja dijamin untuk menggunakan kebebasannya sepanjang penggunaan kebebasannya itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. "Kebebasan harus digunakan untuk menciptakan keserasian dan saling menghargai antar sesama," ujarnya.

Cosmas, Bomer, dan Soeprapto Boedjosastro mengemukakan tentang keberhasilan lembaga Bipartite dan Tripartite serta pembentukan unit-unit serikat pekerja, disamping meningkatnya jumlah Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di perusahaan-perusahaan. Kondisi seperti ini telah mampu mengurangi tingkat perselisihan perburuhan dan menekan pemogokan sampai ke tingkat minimal.

Perlu pengertian

Dalam pidatonya di gedung *Palais des Nations* yang terkenal itu, Cosmas lebih lanjut mengemukakan bahwa Indonesia dan kebanyakan negara berkembang lainnya harus menghadapi kenyataan struktur ekonomi yang masih cenderung agraris dan tradisional. Jika negara-negara maju sudah sampai kepada tingkat penerapan teknologi canggih dengan robotisme dalam sistem ketenagakerjaan, maka Indonesia dalam kondisinya sekarang ini masih memerlukan pola padat karya dalam penerapan teknologi. Buat Indonesia sekarang ini pengembangan industri skala kecil dan sektor informal merupakan jawaban yang tepat untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan sebagai suatu tahap menuju era industri lebih lanjut.

Dalam hubungan ini Mennaker menegaskan perlunya pengertian dari negara-negara maju terhadap posisi dan kondisi negara-negara berkembang. Pengertian yang diperlukan itu dirinci oleh Cosmas: pertama, teknologi yang diperlukan adalah teknologi tepat guna untuk lingkungan padat karya, kedua, agar negara-negara maju membuka pintu lebar-lebar untuk mengimpor produk-produk negara berkembang antara lain hasil kerajinan tangan, dan yang ketiga, masalah ketenagakerjaan di negara-negara berkembang bukan semata-mata masalah perluasan lapangan kerja saja, tetapi juga penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia demi tetap tegaknya martabat manusia itu sendiri sebagaimana juga dicita-citakan oleh ILO.

Oleh sebab itu Cosmas menghimbau agar prioritas ILO lebih diarahkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan program-program pembangunan negaranya serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. ILO sebagai badan internasional diharapkan berfungsi sebagai jembatan agar negara-negara maju membantu negara-negara berkembang dalam usaha-usahanya itu.

Akhirnya Mennaker mengajak seluruh delegasi yang hadir untuk bekerjasama seerat-eratnya dalam mengupayakan kesejahteraan bersama bangsa-bangsa di dunia.

Corry Aquino

Suatu hal yang istimewa dalam Konferensi ILO ke 75 itu adalah hadirnya dua orang pimpinan pemerintahan negara yakni Perdana Menteri Spanyol Felipe Gonzale dan Presiden Filipina Corry Aquino, yang masing-masing menyampaikan pidatonya di depan forum Sidang Pleno Konferensi.

Konon, dihadirkannya Corry Aquino adalah karena keberhasilan pemerintah yang dipimpinnya dalam menegakkan hak-hak azasi manusia di negerinya. Berbagai ulasan dan komentar mass-media setempat menyambut kehadiran presiden wanita dari Asia Tenggara di forum ILO tersebut.

Kehadiran tokoh pimpinan negara ASEAN dalam forum internasional seperti ILO itu mengingatkan kita kepada kehadiran Presiden Soeharto dalam Konferensi FAO di Roma pada tahun 1986. Kala itu Presiden Soeharto mendapat kehormatan dan penghargaan dari organisasi tani dunia itu berkat jasa-jasa, perhatian dan keberhasilannya dalam memajukan pertanian di Indonesia.

Menarik untuk dicatat bahwa penyelengaraan sidang-sidang pleno dalam konferensi ILO itu dilakukan berbarengan dengan rapat-rapat komisi. Ini menyebabkan banyaknya bangku kosong dalam sidang-sidang pleno. Hanya pada acara-acara tertentu saja sidang pleno dipadati oleh seluruh peserta, seperti pada saat kehadiran Perdana Menteri Spanyol atau Corry Aquino untuk menyampaikan pidatonya, atau pada saat pembukaan dan penutupan Konferensi.

Interupsi dimungkinkan jika ada peserta yang tidak dapat menerima hal-hal yang sedang disampaikan oleh delegasi lain dalam sidang pleno. Ini sering terjadi antara delegasi negeri-negeri tertentu di Timur Tengah. Tak jarang dengan memukul-mukul meja mereka meminta ijin pimpinan sidang guna melakukan interupsi. Bagi delegasi yang diperbolehkan melakukan interupsi dipersilahkan untuk ganti naik ke mimbar untuk memberikan penjelasan atas duduk masalah yang sebenarnya terhadap hal yang dipersoalkan (point of order).

Mengamati rapat-rapat komisi menarik pula untuk dicatat bahwa usul dari salah satu delegasi tidak bakal dibahas jika tidak didukung oleh sekurang-kurangnya satu delegasi yang lain.

Secara umum penyelenggaraan konferensi cukup rapi dan menarik kiranya untuk dipelajari oleh para organisator. Keluhan umum yang sering terdengar adalah tentang mahalnya biaya hidup di Geneva yang konon merupakan kota termahal di Eropa bahkan di dunia itu.

Tetapi, terlepas dari mahalnya kota Geneva, tentu tak dapat disangkal adanya manfaat dari konferensi ILO bagi kita semua. Pandangan dan pengalaman berbagai negara yang dikemukakan dalam sidang maupun dalam lobby-lobby informal antar delegasi akan sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan menghadapi masalah di bidang ketenagakerjaan. Di samping itu, ILO dengan 150 negara anggota yang setiap tahun mengirimkan delegasinya itu merupakan forum yang strategis guna memperkenalkan Indonesia kepada dunia, mencakup aspek perjuangan, pandangan, masalah yang dihadapi, potensi untuk mengadakan kerjasama bilateral atau melalui badan internasional, dan sebagainya.

Rupanya delegasi Indonesia sejauh ini telah mampu memanfaatkan forum ILO dengan baik. Buktinya, seperti dikatakan oleh Cosmas sekembalinya di tanah air, yaitu bahwa dalam konferensi ILO kali ini tidak tampil lagi pendapat-pendapat yang menyerang kebijaksanaan Indonesia di bidang ketenagakerjaan atau di bidang lainnya. ☐ T.A. Purnomo

Digitized by Google

Idul Adha, Rutinitas Yang Tidak Pernah Kehilangan Makna

Islam memperhatikan orang yang tergolong lemah

Setiap tanggal 10 Zulhijah umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha atau Idul Qurban, sholat sunah berjamaah dan, sejumlah ternak diqurbankan.

Di Jakarta, Presiden Soeharto, Wapres Sudharmono dan istri, para Menteri Kabinet Pembangunan V, pejabat dari berbagai lembaga tinggi negara, dan perwakilan negara sahabat, bersama masyarakat muslimin, berjamaah sholat Id di Masjid Istiqlal, dipimpin Imam Besar KH Muchtar Natsir.

Islam dengan ajaran Zakat Fitrah di Idul Fitri dan berqurban di Idul Adha, jelas sangat memperhatikan nasib orang yang tergolong lemah. Yang sangat diperhatikan Islam dengan santunan itu adalah mereka yang selalu tertindas dan dirugikan, yang sering diabaikan, bahkan suaranya tidak didengar, demikian bagian pernyataan Dr HM Subki Abdul Kadir, dalam khotbahnya pada hari Idul Adha, Ahad 24 Juli di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Qurban ini, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, surat Sjafaat, merupakan puncak tauladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim as, antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada anak yang disayangi, yaitu Ismail satu-satunya putranya, diperintahkan oleh Allah lewat mimpinya untuk disembelih. Ujian ini merupakan ujian yang kedua yang paling berat. Ujian antara cinta dan pengabdian sebagai seorang Nabi kepada Allah. Karena itu perintah dari Allah, maka kedua orang anak dan ayah, meskipun sangat berat tetapi tetap memilih pengabdian dan ujian kepada Allah. Ismail sebagai putera tersayang pun rela berqurban demi mentaati perintah Tuhannya.

Tetapi di puncak ujian dimana Ismail telah merebahkan diri dan meletakkan pelipisnya di atas landasan, serta pisau sang ayah nyaris memotong urat nadi dari leher Ismail, tiba-tiba yang disembelih adalah seekor domba yang besar, dan Ismail telah terduduk di samping ayahnya.

Peristiwa itulah yang kemudian menjadi sumber inspirasi dan sumber disyariatnya berqurban dengan menyembelih ternak, apakah kambing atau sapi atau kerbau. Kita umat Islam telah diberi ujian yang sangat ringan yaitu menyembelih hewan Qurban yang dagingnya diberikan kepada kaum fakir miskin, agar mereka bisa mendapat makanan yang bergizi.

Itulah yang terjadi, setiap kali umat Islam mengisi peringatan Idul Adha. Kegiatan itu memang rutin, karena berlangsung setiap tahun. Tetapi rutinitas itu, kita — umat Islam — tidak pernah merasa kehilangan makna yang

Digitized by Google

hakiki dari Idul Qurban. Malah dalam rutinitas itulah kita senantiasa memperoleh kesadaran baru akan pentingnya arti berqurban dalam kehidupan. Dalam rutinitas itu kita senantiasa memperoleh kesadaran baru bahwa dalam kehidupan ini kita tidaklah sendirian. Kita adalah bagian dari sebuah kehidupan bermasyarakat.

Makna Bermasyarakat

Kita melaksanakan shalat sunah berjamaah sebagai perwujudan dari kesadaran kita bahwa dalam hidup ini kita memerlukan kebersamaan. Banyak hal yang kerap kali menimbulkan kesadaran kita bahwa kita memerlukan kehadiran orang lain. Sehingga dengan kesadaran itu kerap kali kita semakin maklum bahwa dalam kehidupan ini kita juga harus memperhitungkan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita adalah bagian dari masyarakat, dan hidup bermasyarakat adalah kebutuhan mutlak dalam mengisi perjalanan kehidupan.

Shalat sunah berjamaah seringkali kita rasakan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk bersilaturrahmi. Kesibukan kita sehari-hari kerapkali harus membuat kita seolah-olah terlepas dari lingkungan. Kita harus bergulat dengan kegiatan kita sendiri, dalam upaya mengisi dan mempertahankan hidup. Kesibukan yang tinggi itu, yang semakin merupakan tuntutan dalam kehidupan moderen membuat kita tak lagi mempunyai kesempatan bersilaturrahmi. Bahkan dengan tetangga, kerap kali kita hanya mampu saling menyapa. Kita seolah tak lagi punya kesempatan untuk secara berpanjang lebar berbagi pengalaman.

Kehidupan moderen yang semakin keras, cenderung membuat kita menjadi individualistis, materialistis. Kecenderungan itu perlu dicegah agar kita tidak semakin jauh menyimpang dari jalan Allah. Tuhan telah memberikan berbagai cara agar kita terhindar dari kecenderungan yang buruk itu. Allah telah menunjukkan berbagai sarana yang harus kita gunakan agar kita tetap melangkah di jalan-Nya. Memperingati Idul Adha, pada dasarnya adalah perwujudan dari kesadaran kita untuk berusaha memenuhi pertunjuk Allah. Dilandasi kesadaran itulah kita berusaha memberi makna dari peringatan Idul Adha. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang berlimpah. Maka dirikanlah shalat demi Tuhanmu dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (dari rahmat-Ku)". Itulah petunjuk Allah SWT melalui surat Al Kausar. Berqurban adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam. Berqurban berarti tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berqurban, yang dalam peringatan Idul Adha diwujudkan dalam bentuk menyerahkan ternak untuk disembelih dan dibagikan dagingnya kepada fakir miskin, adalah bukti kesadaran kita untuk tidak bersikap individualis dan materialistis. Melalui Idul Adha dengan kewajiban berqurban, Allah memperingatkan kita akan makna hidup bermasyarakat. Bahwa dalam hidup bermasyarakat, kerap kali kita harus mengorbankan kepentingan diri sendiri bagi kepentingan masyarakat.

Melalui peringatan Idul Adha, kita diingatkan bahwa rezeki yang kita miliki pada hakekatnya adalah rezeki titipan. Maka seyogyanyalah apabila rezeki titipan itu tidak hanya kita nikmati sendiri. Kita perlu membagi rezeki kepada orang lain yang kebetulan memperoleh cobaan hidup dalam serba kekurangan. Hal itu telah kita lakukan ketika kita memperingati Idul Adha. Sikap itu akan kita terapkan hari ini serta hari-hari berikutnya, dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini.☐ (WT)

APKINDO

MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA KE – 43

(17 AGUSTUS 1945 – 17 AGUSTUS 1988)

ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA

(INDONESIAN WOOD PANEL ASSOCIATION)

Forestry Centre, Block IV, Wing A, 9th. floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
JAKARTA – 10270 INDONESIA
Phone : 583011, 583015, 583017, 588623 Telex: 46977 INDWPA IA

Digitized by Google

ANGGOTA DPA PERIODE 1988-1993

Ali Said, Ketua Mahkamah Agung, Sabtu pekan pertama Agustus lalu di Istana Negara melantik 40 anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Anggota Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 204/M tertanggal 3 Agustus itu di antaranya terdapat beberapa nama-nama dari mantan Menteri Kabinet Pembangunan IV, mantan gubernur dan praktisi.

Nama-nama dari mantan itu di antaranya Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, dr Abdul Gafur, Ny Nani Soedarsono, Prof Dr J.H Hutasoit, Ir Achmad Affandi, Dr Ir Suyono Sosrodarsono dan Soedjarwo.

Selain itu, anggota Dewan Pertimbangan Agung yang baru ini juga terdapat nama-nama dari anggota sebelumnya misalnya Makmun Murod, Panggabean, Sabam Sirait, Soegiharto dan Barlianta Harapan.

Sedangkan nama selengkapnya anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk masa periode lima tahun mendatang (1988-1993) adalah K.H Achmad Sidik, Achmad Lamo, H. Achmadi, Drs Bambang Sumarsono, Drs Ben Mang Reng Say, Eddy Sabara, KHAR Fachrudin, Drs Gani MA, Gatot Suherman, Hari Suharto SH, H Hartono Mardjono, Prof H. Ismail Muhamad SH, Izaac Hindom, Prof Drs Lafran Pane, F. Lopez dan Cruz, G.H Mantik, A.E Manihuruk, Drs H.Mukron As'a, J.Muskita, H.M Said, Drs Salamun Alfian Tjakradiwirja, C.I.Santosa, H.Sugandhi, Prof Dr Suhardiman SE, Sukamdani Sahid Gitosardjono, KH Tohir Widjaja Ny Wahyudi dan Yasir Hadibroto.

Pelantikan yang berlangsung khidmat dari 40 anggota dewan itu dihadiri oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono. Kemudian tiga hari setelah pelantikan, dilakukan pemilihan Ketua Dewan. Sidang pertama lembaga ini yang dipimpin Kiai Haji A.R Fachrudin menetapkan Jendral TNI (Purn) Maraden Panggabean terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung masa lima tahun mendatang. Sedangkan empat wakil ketua DPA yang mendampingi Panggabean itu di antaranya H. Sugandhi, Makmun Murod, Hartono Mardjono dan Drs Ben Mang Reng Say.☐ BM

SIDANG UMUM OANA

Sidang Umum Kantor Berita Asia dan Pasifik (OANA) yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 27 sampai 29 Juli 1988, telah memilih Pimpinan LKBN Antara Handjojo Nitimihardjo sebagai Presiden OANA masa bakti 1988-1991 menggantikan pejabat lama P Unnikrishnan.

Dalam sidang ini juga dibahas upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota di bidang kewartawanan, terutama yang menyangkut masalah arus informasi.

Pada kesempatan menerima para peserta Sidang Umum OANA ini, Wakil Presiden Sudharmono, SH, mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut baik hasil-hasil sidang wartawan kantor-kantor berita Asia dan Pasifik. Bahkan, sangat besar artinya bukan saja bagi perkembangan pers di negara-negara anggota OANA, tapi juga bagi pers di seluruh dunia pada umumnya.

Wakil Presiden Sudharmono yang didampingi Menteri Penerangan Harmoko dan Dirjen PPG, Dr Janner Sinaga, juga menerima laporan Presiden OANA yang baru tentang hasil-hasil sidang yang dihadiri 54 peserta dari 16 negara dan 19 peninjau dari delapan negara serta badan-badan internasional.☐ (DT)

Digitized by Google

PELANTIKAN ANTAR WAKTU DPR/MPR-RI

Ketua DPR/MPR-RI Kharis Suhud telah melantik empat orang anggota DPR/MPR-RI dan dua orang anggota MPR-RI dalam rangka pergantian antarwaktu lembaga tersebut. Mereka yang dilantik itu adalah H Mohammad Hatta, BBA, menggantikan Ir Sarwono Kusumaatmadja, Drs Postdam Hutasoit menggantikan Ir Akbar Tanjung, Nikolaas He, MTH menggantikan Kanis Pari dan Drs Didiet Haryadi menggantikan Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo yang mengundurkan diri dari keanggotaan DPR/MPR-RI.

Sedangkan dua orang anggota MPR-RI yang dilantik, yaitu Ir Sarwono Kusumaatmadja menggantikan H Mohmad Hatta, BBA, dan Ir Akbar Tanjung menggantikan Drs Postdam Hutasoit.

Pada kesempatan itu Kharis Suhud kepada pers menyatakan, senang bila DPR mendapat kritik dari masyarakat. Namun, harus diingat bahwa tugas DPR bukan hanya mengeritik kebijaksanaan pemerintah, melainkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Ini terbukti dengan adanya pengaduan masyarakat tentang kasus yang melibatkan instansi tertentu, dimana, pimpinan DPR meneruskan langsung kepada menteri yang bersangkutan.

Untuk itu, pimpinan DPR selalu berusaha meningkatkan kualitas para anggotanya, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pers.☐ (DT)

BERIKAN KETELADANAN

Sejumlah pejabat baru di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden beberapa waktu lalu, dilantik Menteri Sekretaris Negara Drs Moerdiono di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.

Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Wapres itu dilakukan berdasarkan Keputusdan Presiden No. 180/M tahun 1988 Tanggal 8 Juli 1988.

Mereka yang dilantik itu adalah, AF. Wirasoetisna MA sebagai Asisten Wapres Urusan Politik dan Keamanan; Drs Israwan sebagai Asisten Wapres Urusan Pengawasan, Drs Soesilo sebagai Pembantu Asisten Wapres Urusan Polkam Bidang Komunikasi Sosial; Sudarsono, SH sebagai Pj Kepala Biro Umum Sekretariat Wakil Presiden, dan Zaenal Abidin sebagai Pj Pembantu Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Usaha Pimpinan.

Mensesneg Moerdiono dalam kesempatan itu mengajak para aparat pemerintah untuk dapat dan harus mampu membuktikan diri sebagai pelopor dalam perwujudan disiplin nasional. Untuk itu kepada segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Negara, khususnya pejabat eselon I dan II agar memberikan contoh keteladanan dan kepeloporan dalam mewujudkan disiplin nasional di lingkungan masing-masing.☐ (WT)

Digitized by Google

KRAy Soemoharjomo Telah Tiada

Sabtu pagi tanggal 30 Juli 1988, keluarga Presiden dan Ny. Tien Soeharto diselimuti suasana berkabung yang mendalam, kepergian Ibunda Ny. Tien Soeharto, Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Siti Hatmanti Soemoharjomo menghadap ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa.

Almarhum wafat dalam usia sekitar 88 tahun, setelah mendapatkan perawatan medis secara intensif beberapa hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka keluarga Presiden dan Ny. Tien Soeharto di jalan Cendana, Jakarta, sebelum diberangkatkan langsung ke rumah duka di dalem Kalitan Solo, Jawa Tengah.

Semasa hidupnya, almarhumah pernah jatuh sakit sekitar bulan Mei lalu, tetapi setelah mendapatkan penanganan dari tim dokter kepresidenan beliau sembuh dan diboyong keluarga Presiden Soeharto ke Jakarta. Kemudian, di tengah kesibukan Presiden Soeharto menerima kedatangan Pangeran Norodom Sihanok, berkaitan dengan Jakarta Informal Meeting (JIM), ibu mertua Presiden ini kembali sakit dan langsung mendapat perawatan di RSPAD Gatot Subroto.

Jenazah almarhumah setibanya di Solo dimakamkan pada hari Minggu, di makam keluarga Astana Giribangun, Mangadeg, Kabupaten Karanganyar, 30 km sebelah timur kota Solo.

Ribuan pelayat mengantar jenazah almarhumah. Mulai pukul 06.30 banyak yang telah mendahului naik ke makam di lereng Pegunungan Mangadeg. Untuk menjaga kelancaran arus para takziah ini, sejak pagi hari satuan petugas kepolisian menjaga setiap persimpangan jalan yang menuju ke Giribangun. Padahal, pemberangkatan jenazah almarhumah KRAy Siti Hatmanti Soemoharjomo dari rumah duka di dalem Kalitan dijadwalkan pukul 07.20, dengan didahului berobosan, yaitu upacara adat berjalan merunduk di bawah keranda sebagai simbol penghormatan terakhir yang dipimpin Presiden dan Ny. Tien Soeharto, kemudian diikuti segenap keluarga serta ahli waris di halaman dalem Kalitan.

Ibunda Ny. Tien Soeharto ini dimakamkan di sisi jirat suaminya - RMTH Soemoharjomo yang mendahului meninggal dunia pada tahun 1972. "Saya selaku wakil keluarga almarhumah memintakan maaf atas kesalahan almarhumah semasa hidupnya. Baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Juga, kalaupun ada persoalan yang belum selesai, maka keluarga Soemoharjomo bersedia untuk menyelesaikannya," kata putra ketiga mendiang KRAy Siti Hatmanti Soemoharjomo, RMNg Ibnu Hartomo.

Jenazah di semayamkan di rumah duka

Dari rumah duka, jenazah diantar sekitar 800 mobil pelayat yang membentuk barisan panjang. Iring-iringan ini diawali kendaraan jeep CPM, yang disusul mobil pembawa jenazah, mobil yang dikendarai Presiden beserta Ny Tien Soeharto dan mobil pelayat lainnya.

Di Giribangun setelah jenazah selesai dibaringkan dalam liang lahat dan diuruk tanah, Ny Tien Soeharto mengalungkan untaian bunga pada batu nisan Ibundanya tersebut. Yang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Wakil Presiden Sudharmono, SH, Menhankam LB Moerdani dan terakhir Gubernur Jawa Tengah Ismail sekaligus penaburan bunga oleh kalangan keluarga.

Sehubungan dengan banyaknya takziah ini, pelayat yang diperkenankan masuk ke makam dibatasi. Sedangkan pelayat lainnya, termasuk masyarakat atau penduduk setempat yang ingin berbelasungkawa hanya bisa diperkenankan memadati halaman luar Astana.

Selanjutnya, dalam upacara pemanjatan doa dengan pembacaan surat Yassin Presiden dan Ny Tien Soeharto tidak ikut hadir. Menurut keterangan Drs G Dwipayana, Presiden dan Nyonya sangat letih setelah dua malam tidak dapat tidur karena menunggu almarhumah saat sakit. Sementara di antara padatnya para takziah ini, hadir pula Pangab Try Sutrisno, Menag H Munawir Sjadzali, Ketua BPK HM Yusuf, mantan Menko Polkam Surono, Menko Kesra Soepardjo Roestam, Menkop Bustanil Arifin serta pejabat tinggi pusat maupun daerah.

Riwayat Hidup

KRAy Siti Hatmanti Soemoharjomo lahir dengan nama RA Hatmanti pada 13 Ramadhan 1829. Beliau adalah cicit KGPAA Mangkoenagoro III dan menikah dengan RMNg Soemoharjomo di tahun 1919, yang memperoleh karunia anak dari perkawinan itu sebanyak 11 orang putra, di mana 4 orang di antaranya telah meninggal dunia.

Karier RMNg Soemoharjomo diawal sebagai Mantri Gunung (Camat) di Nangsri, Karanganyar. Kemudian pindah tugas menjadi Pangreh Praja di Jumapolo sekaligus menjadi Wedono di Wonogiri dan Wuryantoro. Pada tahun 1941, RMNg Soemoharjomo pensiun dengan pangkat Wedono Satrya. Yang akhirnya mendapatkan gelar Raden Mas Tumenggung Haryo dari Mangkoenagaran. Sedangkan almarhumah KRAy Soemoharjomo mendapatkan sebutan Kanjeng Raden Ayu pada tahun 1983.☐ (DT)

Digitized by Google

Angkatan '45

Ketika membuka Musyawarah Besar Nasional Angkatan 45 di Tomohon (20/7) Presiden Soeharto menyatakan bahwa sebelum meninggalkan panggung sejarah, Angkatan 45 bertekad takkan "meninggalkan masalah-masalah pelik yang dapat membahayakan generasi penerus". Dan terhadap pernyataan itu, Wakil Ketua DPR/MPR-RI Soekardi, menambahkan pendapat "merupakan kebanggaan tersendiri" bagi Angkatan 45 "apabila cepat meninggalkan panggung sejarah". Karena, itu berarti kaderisasi telah berjalan dengan baik.

Agaknya, boleh dikatakan seluruh bangsa ini memang mengharap jangan sampai Angkatan 45 mewariskan masalah-masalah pelik yang dapat membahayakan generasi penerus. Bila memang kini adalah tahun-tahun bagi Angkatan 45 berangsur-angsur meninggalkan panggung sejarah bangsa sebagai pelaku selama hampir setengah abad, patutlah kita semua berharap suatu 'happy ending'. Angkatan 45 telah membawa bangsa ini mencapai persatuan dan kesatuan yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan memantapkan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam dua dasawarsa terakhir melalui sejumlah tokoh utamanya, Angkatan 45 telah mengoreksi kelalaian pembangunan ekonomi dua dasawarsa sebelumnya.

Secara umum generasi baru sesudah Angkatan 45 tidaklah mengajukan komplain yang berarti terhadap Angkatan 45 itu. Kecuali barangkali sejumlah kecil yang kurang sabar, menganggap Angkatan ini membutuhkan waktu terlalu panjang di atas panggung sejarah. Selain itu, ada pula sedikit kritik bahwa Angkatan 45 masih sedikit kurang cepat dalam proses peningkatan demokratisasi kehidupan bangsa. Tapi untuk ini, agaknya pernyataan pak Harto merupakan salah satu jawaban yang memadai. Bahwa karena Angkatan 45 tak ingin meninggalkan masalah pelik yang bisa membahayakan di masa depan, maka sikap hati-hati menjadi pilihan — dan karenanya dibutuhkan waktu lebih panjang dalam banyak hal. Dan bahwa sebenarnya — seperti yang tersirat dari pernyataan R. Soekardi — pada hakekatnya Angkatan 45 bukanlah ingin berlama-lama di atas panggung. Hanya saja, merasa belum tuntas merampungkan kaderisasi.

Jelaslah bahwa segalanya didasari itikad baik, bukan karena pamrih tertentu. Bagaimanapun, kiranya generasi baru patut berterima kasih. Tetapi tentu tak salah pula untuk mengharap Angkatan 45 untuk menaruh kepercayaan bahwa generasi baru pun bisa memecahkan tantangan-tantangan bila kesempatan untuk itu tiba....

Sertifikat Tanah

Sungguh menarik kisah sertifikat tanah yang dituturkan Menpan baru-baru ini. Terutama karena itu semua berdasarkan pengalaman pribadinya.

Kurang lebih sepuluh tahun yang lalu tatkala masih anggota DPR ia membeli tanah. Bertahun-tahun ia mengurus sertifikat tanahnya tanpa hasil. Bahkan setelah menjadi Sekjen Golkar, usahanya tetap tak mempan. Tapi di tahun 1988 ini, sesudah menjadi Menpan, sertifikat selesai dalam tempo 2 minggu.

Sebenarnya, sebagai anggota DPR — dan kemudian menjadi Sekjen Golkar — ia adalah anggota masyarakat yang bukan lagi golongan 'papan bawah'. Toh urusan dengan instansi agraria ternyata tidaklah mudah.

Lalu timbul pertanyaan, bagaimana pula dengan golongan 'papan bawah'? Barangkali, justru kisah 'papan bawah' akan menjadi bahan yang dapat mengantarkan 'tugas' panjang bagi jajaran koordinasi Menpan. Dan kisah 'papan bawah' itu — yang mengandung banyak bagian yang tidak cerah — tidaklah terbatas di bidang keagrariaan. Maka bilamana ada keinginan menambah masukan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur dalam pelayanan masyarakat, informasi dari kalangan 'papan bawah' diperlukan. Hanya, sayang seribu sayang... 'papan bawah' ini ada lemahnya: sering agak apatis karena menurut mereka pengaduan lebih banyak buntunya daripada memberi hasil. Soalnya, terlanjur traumatis. Sulit dijelaskan, hanya bisa dirasakan apa kenapanya oleh 'papan bawah' itu sendiri, atau oleh mereka yang pernah mengalami sendiri! Kebetulan, Menpan sempat mengalaminya sedikit.

DPR dan Kritik

Dua tokoh yang 'vocal' di masyarakat, Arif Budiman dan Darmanto Jatman, belum lama ini dikutip komentarnya oleh pers mengenai kritik melalui DPR. Keduanya menyatakan kritik melalui DPR tidak efetif. Yang terjadi di DPR bukan kritik, melainkan sekedar saran-saran terhadap pemerintah. Kritik lewat pers bisa lebih efektif.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, sebelumnya, pers juga mengutip beberapa ucapan Ketua MPR/DPR Kharis Suhud, yang antara lain berisi perbandingan kesan antara posisi eksekutif dan posisi legislatif di mata masyarakat. Menurut Kharis Suhud, di Indonesia kekuasaan eksekutif lebih menonjol dibandingkan kekuasaan legislatif. Ini antara lain disebabkan karena UUD 1945 sendiri secara tegas lebih banyak mencantumkan pengaturan Presiden dibandingkan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi lainnya. Lalu diakuinya, dalam situasi dimana pihak eksekutif lebih dominan, maka timbul kesan badan legislatif atau DPR sekarang ini melempem, tak ada gigi.

Kendati diutarakan dalam irama dan pendekatan yang berbeda, pendapat dari tiga tokoh tersebut menuju satu titik objektivitas yang relatif sama.

Dengan tidak mengurangi penghargaan dan tidak menutup mata terhadap sejumlah prestasi DPR dalam pemenuhan fungsinya, bagaimanapun terbaca betapa kedudukan lembaga perwakilan rakyat ini belumlah 'mapan' dihadapan opini umum di masyarakat. Sesungguhnya tidaklah terlalu tepat untuk mengatakan DPR itu melempem atau tidak efektif dan sebagainya. Cukup banyak yang dicapai lembaga ini, tetapi agaknya pencapaian itu belumlah sebesar apa yang diharapkan masyarakat yang diwakilinya. Apalagi memang cukup tampak kekurangan kemampuan kalangan DPR sendiri mengkomunikasikan sepak terjang dan perjuangannya bagi kepentingan masyarakat, terutama kepada mereka (rakyat) yang justru menjadi akar eksistensinya sendiri. Secara umum bahkan terlihat kekurangtrampilan kebanyakan dari wakil-wakil rakyat itu dalam berkomunikasi dengan akar-akar eksistensi tersebut (Meskipun tentu harus diakui tidak sedikit pula di antaranya yang sebenarnya telah tampil cemerlang). Padahal namanya 'wakil rakyat'!

Diluar itu, sesekali tampil pula sikap kurang tegas dan lugas kalangan wakil rakyat dalam menjalankan fungsi kontrolnya misalnya. Hari ini umpamanya mereka bisa tampak cukup tegas dan lugas menyorot sesuatu masalah. Besoknya ada reaksi cukup tajam dan pedas atau bernada teguran dari kalangan eksekutif. Lusanya, mereka kendor dan seakan-akan meralat sorotannya. Maka tentu saja masyarakat yang 'menonton' bisa jadi termangu-mangu, bertanya-tanya gerangan apa sebenarnya yang sedang terjadi? Begitulah, sayangnya, kadang-kadang.

Dalam keadaan demikian, tak dapat dipersalahkan, bila kemudian menjadi dominan opini yang menyebut DPR melempem, tidak efektif, dan sebagainya. Tapi apapun, dan bagaimanapun 'sulit' posisi citra DPR di mata 'rakyat' yang diwakilinya, kiranya para wakil rakyat takkan berkecil hati, melainkan sebaliknya lebih rajin mendekatkan diri kepada pemenuhan harapan-harapan besar yang sebenarnya terkandung di hati masyarakat terhadap mereka. Tetapi, ya, untuk sementara ini yang dapat dikatakan hanyalah bahwa semuanya tetap terpulang kepada yang menjalani...!

Digitized by Google

Berbagai Kegiatan Dalam Rangka Persiapan Munas IV Golkar

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Golkar mengadakan Musyawarah Nasional sekali dalam lima tahun, untuk menentukan arah ke depan perjalanan Golkar. Karena itu setiap kali Munas berlangsung, seluruh tubuh Golkar merasa segar kembali dan memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Agar Golkar makin dapat menjawab tantangan zaman dalam mengemban tugasnya sebagai kekuatan sosial politik dalam negara Pancasila yang sedang membangun ini Golkar akan mengadakan Musyawarah Nasionalnya yang ke IV di bulan Oktober tahun ini, dan akan mengambil sejumlah keputusan penting bagi masa depan Golkar, di antaranya yang terpenting adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum yang akan menjadi pedoman perjalanan Golkar untuk kurun waktu lima tahun mendatang, Pernyataan Politik dan Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat baru.

Untuk itu kelompok kerja Panitia Munas IV yang mempersiapkan Konsep rancangan Materi dan Konsep rancangan Keputusan, sejak ditetapkannya kepanitiaan Munas bulan Mei lalu, telah mulai mengadakan rapat-rapat secara intensif, satu minggu masing-masing kelompok mengadakan rapat dua kali. Sampai akhir bulan Juli, Pokja A, dengan pimpinan Ny TS Darsoyo yang membidangi jadwal acara, Tata Tertib dan Rancangan Keputusan telah melaksanakan rapat 12 kali. Pokja B, dengan pimpinan Drs Moerdopo yang membidangi Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah menyelenggarakan rapat 10 kali. Pokja C, dengan pimpinan Ir Usman Hasan yang membidangi Program Umum Golkar telah mengadakan rapat 12 kali. Pokja D, dengan pimpinan Ir Rachmat Witoelar yang membidangi Pernyataan Politik telah mengadakan rapat 11 kali. Sedang Team Sinkronisasi yang di Ketuai AE. Manihuruk telah mengadakan rapat pleno dengan

Kelompok kerja panitia Munas mengadakan rapat

Pokja A,B,C dan D sebanyak 6 kali.

Rapat-rapat persiapan Materi Munas IV Golkar ini telah berjalan cukup hangat saling adu argumentasi untuk mencari titik temu, mencari rumusan terbaik yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kilas balik

Agar memperoleh gambaran jelas, Munas ke-3 Golkar 5 tahun lalu telah menghasilkan 12 Keputusan Munas dan sebuah Memorandum tentang peraturan pelaksanaan organisasi. Di antara 12 Keputusan Golkar tersebut, sebagian telah dilaksanakan oleh dan selama Munas itu sendiri, sedangkan yang merupakan produk untuk dilaksanakan oleh DPP dan seluruh slagorde Golkar adalah; Satu, Keputusan No. V tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar yang merupakan penyempurnaan daripada AD/ART sebelumnya, antara lain mengenai asas organisasi yang harus disesuaikan dengan Tap MPR hasil Sidang Umum bulan Maret 1983 dan keanggotaan organisasi yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku (organisasi kader; keanggotaannya terdiri dari perorangan).

Dua, Keputusan No VI tentang Program Umum Golkar dalam 5 tahun, meliputi program konsolidasi ke dalam dan program keluar mensukseskan Repelita IV dalam rangka menciptakan kerangka landasan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila serta program memenangkan Pemilu 1987, serta mensukseskan Sidang Umum MPR 1988 yang menjamin kesinambungan pembangunan dan kepemimpinan Orde Baru. Yang selanjutnya terkenal dengan Tri Sukses Golkar.

Tiga, Keputusan No VII tentang penerimaan pertanggungjawaban DPP Golkar masa bakti 1978-1983, yang merupakan bahan bagi DPP masa bakti 1983-1988 untuk kelanjutan, penyempurnaan dan peningkatan pengabdiannya kepada negara dan masyarakat.

Empat, Keputusan No VIII tentang Pernyataan Politik Golkar yang merupakan penegasan dan kejelasan sikap politik Golkar mengenai berbagai masalah nasional dan internasional yang sangat penting bagi kehidupan negara dan bangsa. Sikap politik ini tentu dipegang teguh untuk

Digitized by Google

Rapat untuk mencari titik temu dan rumusan yang baik

diamalkan oleh DPP dan seluruh jajaran Golkar.

Lima, Keputusan No IX tentang pemberian penghargaan kepada para Pinisepuh Golkar. Keputusan ini menugaskan kepada DPP Golkar untuk mengadakan pengaturan mengenai pemberian penghargaan pinisepuh Golkar. Khususnya mengenai pelaksanaan Keputusan ini DPP sangat memperhatikan pandangan dan petunjuk Ketua Dewan Pembina Golkar.

Enam, Keputusan No X tentang penetapan Bapak Soeharto sebagai ketua Dewan Pembina Golkar.

Tujuh, Keputusan No XII tentang pengesahan Susunan dan Personalia DPP Golkar masa bhakti 1983-1988 dengan struktur, 1 Ketua Umum, 8 Ketua, 1 Sekjen, 4 Wakil Sekjen, 1 Bendahara 2 Wakil Bendahara dan 14 Departemen yang masing-masing dipimpin oleh dua orang pimpinan departemen. Seluruh anggota DPP Golkar berjumlah 45 orang yang merupakan Pengurus Pleno.

Akhirnya keputusan mengenai Memorandum Munas ke-3 Golkar tentang peraturan pelaksanaan organisasi. Memorandum ini menugasi DPP Golkar masa bakti 1983-1988 untuk menyusun dan menerbitkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan organisasi mengenai, pelaksanaan keanggotaan/kaderisasi, pengorganisasian Golkar dalam tingkat kota administratif, hubungan Golkar dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan kejelasan hubungan antara DPD I dengan Dewan Pertimbangan dan DPD II dengan Dewan Penasehat.

Dengan modal hasil Munas ke-3 Golkar itulah, Golkar berkiprah selama 5 tahun, dan hasilnya telah kita ketahui Golkar menang mutlak dalam pemilu 1987 lalu meraih 73 persen dari jumlah pemilih. □ (WT)

Dirgahayu Republik Indonesia

BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru, Telp. 24445-22717-21195
Alamat Kawat BANKRIAU Pekanbaru, Kotak Pos 22. Telex : 56122
BPD PBR.

Kantor Cabang : Tembilahan - Tanjung Pinang - Dumai - Selat Panjang - Batam - Pasar Pusat Pekanbaru - Bengkalis.

Digitized by Google

Diskusi Desa, Di DPP Golkar

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat seperti, LKMD, PKK, KUD belum semuanya berkembang seperti yang diharapkan pemerintah, demikian dikemukakan Direktur Jendral Pembangunan Desa Adnan Widodo, pada panel diskusi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, baru-baru ini di Jakarta.

Panel diskusi yang berlangsung sehari dengan thema "Peningkatan Pembangunan Desa dengan Mengefektifkan Petugas Lapangan Pembangunan Desa" itu dipimpin langsung oleh Ketua DPP Golkar AE Manihuruk. Hadir dalam kesempatan itu para pejabat di lingkungan Dirjen Bangdes Departemen Dalam Negeri, Pengurus DPP Golkar di antaranya Oka Mahendra, SH, Zarlons Zaghlul, SH, Ny Eny Busyiri dan para anggota FKP DPR-RI.

Diskusi tentang pembangunan desa.

Masalah-masalah yang menyebabkan lambannya pertumbuhan desa, menurut Adnan Widodo adalah, masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk, masih rendahnya pendapatan, gizi dan keperluan sosial lainnya. Masih terdapatnya desa-desa yang terpencil atau terisolasi dari pusat-pusat pembangunan yang lebih kurang 15.520 desa dari jumlah 66.173 desa di seluruh Indonesia, dan terdapatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang di desa berpenduduk padat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan desa untuk menjadi desa swakarsa, yang selanjutnya menjadi desa swasembada, untuk menuju desa Pancasila seperti yang diharapkan oleh Pemerintah dalam rangka meletakkan kerangka landasan, pemerintah telah mengembangkan beberapa langkah kebijaksanaan pembangunan desa yang antara lain menyangkut keseluruhan kegiatan 18 sektor yang berlangsung di pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat (ipoleksosbudhankam agama) yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Telah dikembangkan pula, Kader Pembangunan Desa (KPD) yaitu seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan pembangunan desanya, yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di desa, dan kader yang diharapkan ini telah dimiliki kader-kader Golkar, "Karakterdes". □ (WT)

Telah dikembangkan kader pembangunan desa.

Digitized by Google

J. Kusnanto ANGGORO

Kompleksitas Masalah Kampuchea Setelah Jakarta Informal Meeting

Meskipun diwarnai dengan ketidakpastian hingga hari-hari terakhir, pada akhirnya pertemuan tidak resmi Jakarta *(JIM, Jakarta Informal Meeting)* dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Bogor tanggal 26-28 Juli 1988 itulah untuk pertama kalinya keempat faksi Kampuchea yang saling bertikai dapat berjumpa dalam satu forum untuk membicarakan tentang bagaimana mengakhiri kemelut Kampuchea yang telah berusia hampir sepuluh tahun.

Keberhasilan untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang saling bertikai itu sendiri memang dapat dianggap sebagai suatu terobosan psikologis. Hal itu memberi petunjuk bahwa penyelesaian masalah Kampuchea melalui jalur diplomatik bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Tetapi lebih dari sekadar suatu terobosan psikologis, sebenarnya JIM dapat dianggap pula sebagai langkah maju terutama bila diingat bahwa formasi pertemuan serupa yang pernah diajukan sebelumnya menurut sekenario Mochtar-Tach (29 Juli 1987) ditolak oleh CGDK (Pemerintahan Koalisi Demokratik Kampuchea) maupun negara-negara ASEAN.

Perubahan sikap CGDK dan ASEAN itu, tanpa bermaksud mengabaikan beberapa perbedaan antara skenario Mochtar-Tach dan JIM, mengisyaratkan pergeseran posisi diplomatik berbagai pihak yang terlibat dan/atau berkepentingan dalam masalah Kampuchea. Pengumuman pemerintah Heng Samrin untuk melibatkan CGDK dalam rekonsiliasi nasional (27 Agustus 1987) yang kemudian dikukuhkan dalam Deklarasi Lima Pasal (8 Oktober 1987) dan pertemuan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan Perdana Menteri Hun Sen di Paris (2 Desember 1987 dan 20 Januari 1988), misalnya, dalam batas-batas tertentu memperbesar kemungkinan diselenggarakannya pertemuan antar kelompok Kampuchea. Dan bersama dengan pengumuman Hanoi untuk menarik pasukannya dari Kampuchea sebelum akhir tahun 1990 (26 Mei 1988), isyarat dari pemerintahan Heng Samrin itu tampaknya telah dianggap memenuhi sebagian dari Prakarsa Delapan Pasal yang diajukan oleh Pangeran Sihanouk (17 Maret 1986).

Presiden Soeharto menerima empat faksi peserta JIM

Digitized by Google

Pendek kata, CGDK maupun ASEAN tampaknya telah menafsirkan perkembangan-perkembangan selama setahun terakhir ini sebagai gelagat diplomatik yang kondusif untuk menyelesaikan masalah Kampuchea. Di pihak lain, Hanoi maupun Pnom Penh juga didesak keadaan dan karenanya didorong pula untuk mengawali pertemuan perundingannya dengan pihak CGDK dan ASEAN. Kesulitan ekonomi yang berkepanjangan melanda Vietnam, jelas merupakan salah satu faktor pendorong kuat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa Hanoi dan Pnom Penh tampaknya merasa puas dengan perubahan sikap Pangeran Sihanouk yang mencabut tuntutannya atas keberadaan pasukan internasional yang bertugas mengawasi proses rekonsiliasi nasional *(IPKF, International Peace Keeping Forece)* dan pembubaran Rejim Heng Samrin sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pergeseran-pergeseran posisi diplomatik itu yang telah memungkinkan diselenggarakannya JIM. Selebihnya, dari pergeseran-pergeseran itu, terlihat pula bahwa paling banyak JIM hanya akan memberi keabsahan formal pada gelagat-gelagat diplomatik yang selama setahun terakhir diisyaratkan pihak-pihak yang terlibat dan/atau berkepentingan dalam masalah Kampuchea, terutama mengenai dua isyu pokok, yaitu, penarikan mundur pasukan Vietnam dan penataan kembali struktur politik Kampuchea sebagai wujud rekonsiliasi nasional maupun sebagai langkah permulaan untuk mengembalikan "netralitas Kampuchea".

Pada akhirnya JIM memang hanya menyepakati prinsip-prinsip itu tetapi belum berhasil merumuskan operasionalisasinya. Bagaimana Vietnam menarik mundur pasukannya dari Kampuchea, bagaimana struktur rekonsiliasi nasional, bagaimana membentuk badan pengawas internasional untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dan pelaksanaan pemilu dan apa identitas Kampuchea setelah rekonsiliasi nasional masih merupakan masalah-masalah pokok yang harus diselesaikan dalam masa mendatang. Penyelesaian itulah yang menurut kesepakatan akan digarap oleh suatu Kelompok Kerja yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi keempat kelompok Kampuchea dan yang harus meman mengenai prinsip tetapi berbeda rumusan mengenai operasionalisasinya dan pembentukan suatu Kelompok Kerja itu merupakan salah satu bukti bahwa JIM telah berhasil menunaikan fungsi dan mencapai tujuannya, seperti diharapkan semula, yaitu sebagai "langkah awal" penyelesaian politik kemelut Kampuchea. Di lain pihak, buat rekomendasi pada akhir tahun 1988.

Di satu pihak, persamaan pandang-

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA

17
AGUSTUS
1945

17
AGUSTUS
1988

GOLONGAN KARYA

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

hasil-hasil yang dicapai itu sekaligus juga memperlihatkan bahwa pergeseran posisi diplomatik pihak-pihak yang terlibat dan/atau berkepentingan dalam masalah Kampuchea belum disertai dengan perubahan yang mendasar dalam kalkulasi politiknya. Vietnam, misalnya, meskipun telah mempertegas keinginannya untuk menarik diri dari Kampuchea sebelum permulaan tahun 1990 bahkan seandainya tidak tercapai suatu penyelesaian politik, tampaknya tetap mengkhawatirkan kemungkinan dominasi Khmer Merah dalam pemerintahan koalisi di Kampuchea. Pnom Penh, sebagai pihak yang kini berkuasa, tentu tidak menginginkan suatu penyelesaian politik yang justru hanya akan melenyapkannya dari peta kekuasaan politik di Kampuchea, atau sekurang-kurangnya memberi peluang berkuasanya kembali Khmer Merah. Sementara itu, unsur-unsur nasionalis CGDK, yaitu FUNCIPEC (Front Persatuan untuk Kampuchea yang Merdeka, Netral, Damai dan bekerjasama) pimpinan Pangeran Sihanouk dan KPLNF (Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer) pimpinan Son Sann, mengharapkan rumusan rekonsiliasi nasional tertentu yang memberi peluang memperoleh kekuasaan dan sekaligus menutup kemungkinan dominasi Khmer Merah.

Dalam batas-batas tertentu memang terlihat persamaan posisi antara rejim Heng Samrin dan kelompok nasionalis CGDK, khususnya dalam mengucilkan Khmer Merah. Tetapi persamaan posisi itu tampaknya belum cukup mampu mempertemukan kalkulasi politik untuk merancang langkah-langkah penarikan mundur pasukan Vietnam maupun struktur koalisi bagi pemerintahan sementara Kampuchea. Isyu-isyu pokok yang menunjukkan persamaan posisi tetapi perbedaan kalkulasi politik itu adalah, antara lain, pemerintahan sementara, pengawasan dan jaminan internasional serta karakter identitas Kampuchea. Dan kini isyu-isyu itu menjadi semakin sulit dipecahkan justru karena Vietnam telah mengemukakan keinginannya untuk menarik diri tanpa syarat dari Kampuchea akhir tahun 1989 atau sekurang-kurangnya akhir kwartal pertama tahun 1990, beberapa bulan lebih cepat sebelum jadwal yang ditentukannya semula.

Dari pembicaraan yang berlangsung dalam JIM baru terlihat persamaan asasi mengenai perlunya suatu pemerintahan transisi. Pangeran Sihanouk, misalnya, mengusulkan pembentukan suatu pemerintahan koalisi empat kelompok Kampuchea. Tanpa perlu membubarkan kelompok-kelompok yang sekarang ada, Sihanouk menginginkan sistem kolegial yang sederajat sehingga satu kementerian dipimpin oleh empat menteri dari keempat kelompok Kampuchea. Bagi Pangeran Sihanouk, pemerintahan sementara inilah yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Son Sann mengusulkan formasi kerukunan nasional atas dasar koalisi empat kelompok, yang hingga kini masih belum jelas bagaimana formasi itu harus disusun. Terlepas dari perbedaan yang melekat dalam rumusan Sihanouk dan Son Sann, kedua pemimpin dari unsur nasionalis CGDK itu berpendapat bahwa pemerintahan sementara, bagaimanapun formasinya, harus terbentuk secepatnya dan sebelum semua pasukan Vietnam ditarik dari Kampuchea.

Di pihak lain, bagi rejim Heng Samrin, pemerintahan sementara tidak perlu dibentuk secepatnya, karena ia adalah suatu formasi pemerintahan hasil pemilihan umum yang dirancang oleh Dewan Rekonsiliasi Nasional. Jadi, rumusan politik kelompok nasionalis CGDK adalah pembentukan pemerintahan sementara sebelum pemilihan umum. Sedang rejim Pnom Penh berpendapat sebaliknya. Barangkali rejim Heng Samrin berharap bahwa mereka dapat menggalang massa sebanyak mungkin ketika Dewan Rekonsiliasi Nasional mengawali fungsinya hingga saat dilangsungkannya pemilihan umum. Dan

UNIVERSITAS JAYABAYA
DAN
AKADEMI-AKADEMI JAYABAYA

Jl. Jend. A. Yani - By Pass, JAKARTA PUSAT

No.	FAKULTAS/AKADEMI	STATUS	TELP.
1.	FAKULTAS HUKUM		413105
	a. Jurusan Pidana	Disamakan	
	b. Jurusan Perdata	Disamakan	
	c. Jurusan Tata Negara	Disamakan	
2.	FAKULTAS EKONOMI		4200127
	a. Jurusan Manajemen Perusahaan	Disamakan	
	b. Jurusan Akuntansi	Terdaftar	
3.	FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK		4200126
	a. Jurusan Hubungan Internasional	Disamakan	
	b. Jurusan Administrasi Negara	Disamakan	
4.	FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN		8400560
	a. Jurusan Teknik Sipil	Diakui (Dalam Proses Disamakan)	
	b. Jurusan Arsitektur	Terdaftar	
5.	FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI		8400490
	a. Jurusan Teknik Mesin	Diakui (Dalam Proses Disamakan)	
	b. Jurusan Teknik Kimia	Terdaftar	
	c. Jurusan Teknik Elektro	Terdaftar	
6.	AKADEMI AKUNTANSI	Disamakan	4203836
7.	AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN	Disamakan	4200357
8.	PROGRAM DIPLOMA D III TEKNIK		
	a. Jurusan Teknik Sipil	Diakui	
	b. Jurusan Teknik mesin	Diakui	

Rektor Universitas Jayabaya
ttd
Prof.Dr.Moeslim Taher SH

Digitized by Google

dengan mempertahankan status quo kelompok-kelompok yang ada sekarang, rejim Pnom Penh memang memiliki peluang lebih besar untuk menggalang massa daripada kelompok-kelompok nasionalis CGDK.

Perbedaan perhitungan taktis untuk menggalang kekuatan selama masa pemerintahan transisi itulah yang mendasar perbedaan lebih lanjut mengenai bentuk dan fungsi pengawasan dan jaminan internasional. Pangeran Sihanouk, misalnya, menginginkan agar Komisi Pengawas Internasional (ICC) bukan hanya mengawasi proses penarikan mundur pasukan Vietnam, melainkan juga membantu pemerintahan kolegial dalam menjaga ketertiban dan kedamaian rakyat Kampuchea serta mengamankan pemilihan umum. Pangeran Sihanouk memang merinci lebih lanjut bahwa Komisi Pengawas itu merupakan suatu konfederasi internasional yang terdiri dari dua negara netral yang tidak terlibat dalam masalah Kampuchea, dua negara sosialis dan dua negara lain dari "dunia bebas", tetapi, berbeda dari pendapat Son Sann, ia tidak mengemukakan dengan jelas mengenai apakah dalam pelaksanaannya Komisi itu perlu dilengkapi dengan suatu pasukan internasional penjaga perdamaian. Di pihak lain, pemerintah Pnom Penh hanya mengatakan bahwa pengawas internasional itu hendaknya mengawasi pelaksanaan semua persetujuan yang dicapai dan menolak keberadaan pasukan pengawas internasional.

Dari perbedaan pandangan itu terlihat bahwa pemerintahan Heng Samrin mengaitkan ruang lingkup fungsi komisi pengawas yang akan dibentuk dengan hasil persetujuan antar kelompok Kampuchea. Sementara di pihak lain, kelompok-kelompok nasionalis CGDK hanya mengaitkannya dengan tuntutan-tuntutan politik yang secara resmi telah diajukannya ke permukaan. Gejala ini mengisyaratkan bahwa pihak nasionalis CGDK telah menggariskan batas-batas perundingan yang harus dicapai, yaitu mengenai formasi pemerintahan sementara dan penarikan mundur pasukan Vietnam, sedang pihak Pnom Penh belum melakukan hal yang sama, tampaknya karena ia selalu menekankan tuntutannya bahwa penarikan mundur pasukan Vietnam harus disertai dengan penghentian bantuan asing kepada CGDK dan perlindungan yang diberikan pihak luar kepada kelompok-kelompok anti Vietnam.

Perbedaan posisi itu menunjukkan bahwa pihak luar, apapun bentuknya, memainkan peranan penting dalam penyelesaian politik masalah Kampuchea. Secara tidak langsung, dalam pertemuan JIM, aspek ini terlihat dari bagaimana kelompok-kelompok Kampuchea mengemukakan gagasannya mengenai forum dan mekanisme jaminan internasional. Pangeran Sihanouk dan Son Sann, misalnya, dengan jelas telah mengatakan bahwa jaminan internasional itu hendaknya diatur oleh konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar dan disertai oleh Sekjen PBB, lima anggota tetap Dewan Keamanan, enam negara ASEAN, Vietnam, Laos, Jepang, India, Australia dan empat kelompok Kampuchea. Sedang Perdana Menteri Kampuchea Hun Sen, tanpa merinci siapa yang menyelenggarakan konferensi itu, mengharapkan agar ia diikuti oleh Sekjen PBB, lima anggota tetap Dewan Keamanan, enam negara anggota ASEAN, Vietnam, Laos, Kampuchea dan Ketua-ketua KTT Non Blok ke VI (Kuba), VII (India) serta ke VIII (Zaire).

Dari peserta konferensi internasional itu yang terpenting bukanlah bagaimana Pangeran Sihanouk dan Son Sann tampaknya ingin memanfaatkan kehadiran Australia dan Jepang yang selama ini memberi dukungan politik anti-Vietnam, atau bagaimana PM Hun Sen ingin melindungi kepentingan rejimnya melalui kehadiran Kuba dan Zaire, melainkan bahwa, menurut pandangan Hun Sen, konferensi internasional itu baru akan memainkan peranannya setelah terbentuk suatu pemerintahan sementara. Berbeda dari Pangeran Sihanouk dan Son Sann yang menggunakan istilah "empat kelompok Kampuchea", misalnya, Hun Sen hanya menyebut "Kampuchea" sebagai salah satu peserta konferensi itu. Ini memperlihatkan bahwa pengawasan dan jaminan internasional, yang menjadi salah satu tuntutan utama kelompok nasionalis CGDK, bukan merupakan prioritas penting dalam kalkulasi politik rejim Pnom Penh.

PT. INHUTANI I Persero

BIDANG KEGIATAN:
EKSPLOITASI HUTAN, INDUSTRI PERKAYUAN & PEMBINAAN HUTAN
KOMODITI:
KAYU BULAT, KAYU GERGAJIAN, MOULDING, DAUN PINTU/JENDELA, KUSEN,
KOMPONEN RUMAH PREFAB, BANTALAN KERETA API DAN BENIH TANAMAN HUTAN

KANTOR PUSAT:

PT. INHUTANI I Persero

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV WING C LANTAI 5
JL. GATOT SUBROTO JAKARTA 10270 INDONESIA
TELEPON (021) 581724 581765 581778
TELEX 45919 WAKTI IA
FACSMILE (021) 584335
CABLE INHUT JKT
P.O. BOX 25 Y.K.W.B.

KANTOR CABANG:

PT. INHUTANI I UNIT I
JL. A. YANI No. 30 BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR
TELEPON (0542) 24688
TELEX 37114 INHBP IA
FACSMILE (0542) 24526
CABLE INHUT BPP

PT. INHUTANI I UNIT II
KOMPLEK INHUTANI PENINGKI BARU
JL. MULAWARMAN, TARAKAN - KALIMANTAN TIMUR
TELEPON (0551) 21040
TEKEX 38359 INHUT IA
FACSMILE (0551) 21042
CABLE INHUT TAR

Digitized by Google

Dalam batas-batas tertentu, kelompok nasionalis CGDK maupun rejim Heng Samrin sesungguhnya beranjak dari persoalan yang sama dalam menyusun prioritasnya, yaitu bagaimana harus mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah. Meskipun demikian tampaknya masih terdapat perbedaan penting mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi persoalan itu. Dan ia menjadi semakin sulit dipecahkan karena masing-masing pihak, kelompok nasionalis CGDK dan rejim Heng Samrin, selalu memperhitungkan langkah-langkah itu dengan potensi kekuatan yang akan dipergunakannya dalam menyongsong pelaksanaan rekonsiliasi nasional. Pangeran Sihanouk maupun Son Sann berpendapat bahwa kembalinya Khmer Merah ke panggung kekuasaan akan dapat dicegah jika negara-negara Barat tetap mempertahankan kebijakannya untuk memberi dukungan finalis dan persenjataan kepada kelompok nasionalis CGDK sedang Republik Rakyat Cina menghentikan dukungan militernya kepada Khmer Merah. Di lain pihak, PM Hun Sen menuntut dihentikannya semua jenis bantuan asing kepada kelompok nasionalis CGDK maupun Khmer Merah.

Hingga kini masih belum jelas apakah Kelompok Kerja yang akan dibentuk mampu menjembatani perbedaan kalkulasi kekuatan antar kelompok-kelompok yang saling bersengketa. Masih belum jelas pula apakah pertemuan Sihanouk-Hun Sen yang menurut rencana akan dilangsungkan di Paris dalam bulan Oktober mendatang mampu menghapus perbedaan antara kelompok nasionalis CGDK maupun rejim Heng Samrin tidak menghendaki Khmer Merah kembali menguasai peta politik Kampuchea. Hampir dapat dipastikan bahwa isyu Khmer Merah itu pula yang akan mewarnai pertemuan Sihanouk-Hun Sen mendatang.

Tetapi isyu Khmer Merah merupakan suatu persoalan yang sulit diselesaikan karena ia melibatkan bukan hanya peta kekuatan militer antar kelompok Kampuchea tetapi juga hubungan yang kompleks antar pelaku di luar Kampuchea tetapi juga hubungan yang kompleks antar pelaku di luar Kampuchea, terutama Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Usulan Pangeran Sihanouk mengenai pembubaran semua kelompok di Kampuchea, atau keinginan Hun Sen mengenai perlucutan Khmer Merah, selalu ditolak pemimpin Khmer Merah Kieu Samphan. Kunci penyelesaian masalah Kampuchea tampaknya memang terletak pada Khmer Merah. Pangeran Sihanouk boleh saja dianggap sebagai kunci, terutama oleh karena langkah-langkah politiknya sering mempengaruhi kesinambungan dan arah diplomasi penyelesaian politik masalah Kampuchea. Tetapi sebagai kekuatan militer yang paling besar di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai di Kampuchea, Khmer Merah dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu upaya diplomatik.

Setelah JIM, sesuai dengan keterbatasan dan hasil yang dicapainya, penyelesaian politk masalah Kampuchea itu kini tampaknya tergantung pada pertemuan Cina-Soviet yang akan diselenggarakan di Beijing akhir bulan Agustus 1988. Sebagai suatu persiapan KTT Cina-Soviet yang menurut rencana akan dilaksanakan bulan Desember mendatang, dapat diharapkan bahwa pertemuan yang khusus membahas masalah Kampuchea itu akan diwarnai dengan konsesi-konsesi tertentu yang membuka peluang lebih besar bagi penyelesaian masalah Kampuchea. Demi perbaikan hubungannya dengan Cina, misalnya, mungkin Uni Soviet dapat meminta Vietnam, dan oleh karenanya juga rejim Heng Samrin, untuk lebih moderat. Sebaliknya, perbaikan hubungan Sino-Soviet mungkin mempengaruhi hubungan Sino-Vietnam sehingga pemerintah Beijing mengurangi, atau bahkan menghentikan, bantuannya kepada Khmer Merah. Gejala ini memperlihatkan bahwa penyelesaian politik masalah Kampuchea masih akan melalui jalan panjang dan berliku.□

KANTOR PEMASARAN BERSAMA
PT. PERKEBUNAN X, XI, XII, XIII, XVIII
(KPB JAKARTA)

Alamat : Gedung Prince Centre Lt. 8.
Jalan Jend. Sudirman No. 3 – 4
Jakarta 10220
P.O. Box 463/JAKPUS – Alamat Kawat : INTEA
Telex : 45411 tiffins ia – Fax : 584873
Telepon : 586898 - 586899 - 588056 - 588057 - 587316 - 587326 - 582506 - 582606

Memasarkan untuk ekspor : TEH, BIJI COKLAT, KARET produksi
PT. Perkebunan X, XI, XII, XIII, XVIII

Digitized by Google

Maria Sugiharto

Dalang Dan Seninya

Kata *Dalang*, kerap dipakai untuk menunjukkan seseorang yang memegang peranan yang sangat penting di latar belakang sesuatu peristiwa. Sedangkan pelaku-pelaku atau mereka yang berperanan itu hanya menjalankan sebagaimana ditunjukkan oleh apa yang dinamakan Dalang tersebut. Memang demikianlah layaknya seseorang yang dinamakan Dalang.

Dalang, adalah seorang pelakon atau yang menjalankan wayang-wayang dengan segala implementasinya. Di dalam hal ini, ialah menjalankan gerak-gerik wayang sesuai perannya dan lakon cerita, dibarengi dengan orkes atau karawitan (orkes gamelan) yang melatar belakangi, serta melaksanakan dialog bagi wayang-wayang yang sedang dilakonkan itu. Dalang berfungsi komplit.

Sulit penerjemahan di dalam bahasa lain bagi Dalang, bila orang asing menanyakan dan minta dijelaskan dengan bahasanya, apakah itu dalang. Tidak cukup kata yang tepat bagi seorang dalang, kecuali kata Dalang itu sendiri, karena fungsi dalang yang amat komplit itu. Dalang dituntut mengerti lakon atau repertoire yang akan dipertunjukkan, yang sesuai dengan pakem wayang, berjumlah lebih dari seratus lima puluh lakon. Dasar pengertian dari lakon, dia pelajari dari senior dalang, dan cerita itu disebut balungan. Balungan ini sendiri bisa jadi sangat kompleks, tetapi dalam mampu mengembangkan dan berimprovisasi bagi lakon yang sedang dipertunjukkan yang memakan waktu selama sembilan jam atau semalam suntuk. Gaya dalang, sangat dipengaruhi oleh guru yang mengajar, atau biasanya dalang-dalang seniornya. Banyak merupakan keturunan. Ayah dalang, anakpun dalang.

Dalam menjalankan lakon-lakon. Dalang boleh berimprovisasi tentu saja, tetapi satu hal sangat penting, ialah, dia tidak boleh melanggar pakem atau cerita serta bagian-bagian yang esensiil.

Fungsi Dalang

Di dalam pertunjukan wayang kulit,

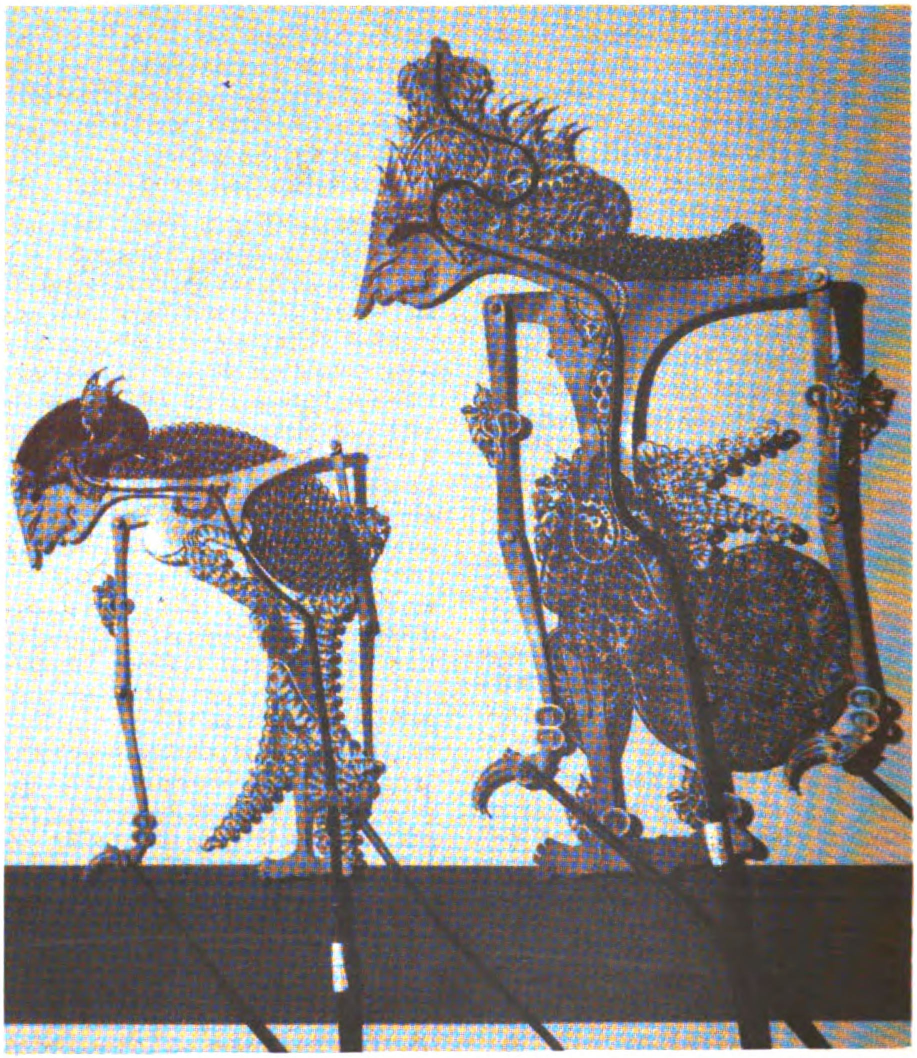

dalang mengerjakan banyak tugas, dimana di dalam kesenian lainnya, pekerjaan itu akan dilaksanakan oleh beberapa orang. Dalang berfungsi sebagai penulis lakon, direktur atau sutradara, juga aktornya. Untuk itu dia harus memiliki kemampuan teknik-teknik yang teatral. Dia harus mengenal masing-masing perwatakan aktor (wayang) yang dijalankan atau yang muncul di dalam lakon. Dia harus dapat memberikan jiwa kepada tokoh yang dilakonkan, sesuai kepribadiannya, suaranya serta gaya bicaranya, bahkan untuk tokoh-tokoh wanitanya, dalang harus mampu menjalankan serta teknik menjalankan gerak gerik tokoh itu, dalam gerakan-gerakan tari yang distilir sedemikian rupa. Dalang harus mampu menguasai banyak tembang atau gending (lagu) yang setiap kali dimunculkan di dalam dialog-dialog tokoh yang diwayangkan itu.

Di dalam beberapa keadaan, dalang juga menjadi semacam medium, bila dia harus menjalankan lakon yang dianggap sakral, misalnya bila dia menjalankan lakon untuk ruwatan ialah mengusir roh jahat yang dianggap menodai kehidupan manusia. (Exorcist). Dalam hal demikian, maka dalang berfungsi sebagai pendeta. Fungsi begini banyak terjadi di Bali, bila beberapa pertunjukan yang sifatnya sakral diadakan. Di Jawa, tugas demikian kurang penting. Dalang biasanya mendapatkan julukan dengan nama *KI* (Ki Narto Sabdo; Ki Anom Suroto; Ki Timbul Darsono; Ki

Digitized by Google

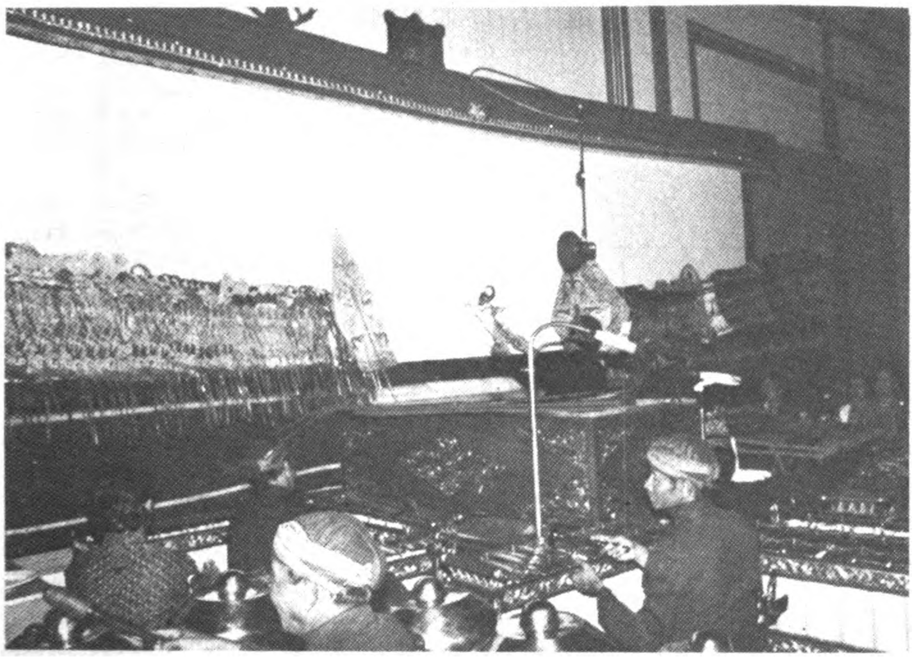

Dalang juga berfungsi sebagai sutradara sekaligus juga penulis

Manteb Sudarsono, dan lain-lainnya), kata mana merupakan akronim dari kata *KYAI*. Kyai, adalah sebuah julukan yang diberikan kepada seseorang yang terhormat karena kedudukannya, karena piwulangnya (pengajarannya). Sebutan demikian juga diberikan kepada benda-benda yang dianggap berkekuatan serta berpengaruh magis seperti keris, gamelan dan lain-lainnya.

Perkataan Dalang itu sendiri memiliki banyak interpretasi. Kata LANG bisa dianalisa sebagai berarti bepergian (melanglang). Hal ini dapat dikaitkan dengan jaman dulu, bahwa dalang mengadakan pertunjukan dengan melanglang ke beberapa tempat, dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti troubadour (penyair berkelana) pada abad pertengahan di Eropa. Pemain wayang di beberapa tempat tertentu seperti di Andhra, India, misalnya, merupakan rombongan keliling, terdiri dari dalang, penabuh gamelan, dan segala sesuatunya atau segala *ubo rampenya*. Kata dalang, bisa juga diartikan serta dihubungkan dengan pengajaran. Jadi diambil dari akronim *da* dari kata *Weda* (prasasti India kuno, yang biasanya berisi atau semacam kitab-kitab ajaran) dan *mulang* yang artinya mengajar. Dan, tentu saja Dalang memainkan peranan yang sangat penting, karena dia berperan sebagai pengajar atau guru dalam hal spirituil serta filosofis melalui pertunjukannya.

Dalang biasanya mendapatkan pelajaran mendalang dari turun temurun, juga karena guru-guru yang dekat di dalam masyarakat sekitarnya, dimana bapak merupakan *panutan*, sehingga perkembangan panutan ini, ditenggang dengan masyarakat Jawa yang paternalistis, maka perkembangan dalang menjadi lebih banyak bersifat turun temurun. Meskipun kini, di dalam modernisasi pedalangan, akademi-akademi kebudayaan dan kesenian berusaha membakukan pedalangan yang pada dasarnya bersifat kekeluargaan, kepada suatu bentuk akademis, dan dengan sendirinya ada beberapa perubahan di dalam gaya.

Dalang, Repertoire, tanpa Partitur

Karena pelajaran yang diterima oleh seseorang dalang berdasarkan turun temurun dan diceritakan secara verbal, maka repertoire akan sangat dikuasainya, tanpa tertulis di dalam sebuah partitur. Adalah menjadi suatu tradisi bagi dalang, agar sukses mendalang, sebelum seorang dalang mengadakan pertunjukan, dia akan berpuasa, serta menyajikan mantera-mantera dan sesaji, untuk mengumpulkan konsentrasi baik fisik maupun secara moril, sehubungan dia harus mengadakan pertunjukan selama sembilan jam nonstop. Pada kedatangannya di tempat pertunjukan dimulai, dikelir (layar) sudah tersedia sederetan wayang di sisi kanan dan kiri, ditancapkan pada batang pisang. Di samping tokoh-tokoh wayang penting yang akan dilakonkan nanti, selalu ada sederetan wayang yang nantinya tidak ikut bermain, tetapi lebih banyak bersifat dekoratif, dinamakan *simpingan*. Dia akan membekali dirinya dengan *keprak* yang terdiri dari lempengan-lempengan kuningan atau metal yang akan digunakan untuk melatarbelakangi dialog-dialog yang bergantian, di samping *cempala* yang terbuat dari kayu masif untuk memberikan semacam aba-aba kepada orkes, di dalam hal ini karawitan atau gamelan, dalam adegan meninggi merendahnya situasi. Tidak mendramatisir, tetapi adalah merupakan semacam tradisi, bahwa, bila seorang dalang mengadakan pertunjukan, maka selalu didampingi sesaji yang berupa pembakaran kemenyan serta beberapa *ubo rampe* (kelengkapan lainnya). Maksudnya adalah untuk memintakan *pelilah* atau ijin kepada para makhluk halus, agar pertunjukan yang dipertunjukkan nanti tidak mendapatkan gangguan, serta sukses. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminta maaf kepada para makhluk halus itu, karena keterbatasan manusia yang kadang-kadang tidak mengerti tata cara kehidupan yang lain itu. Mengingat adanya aspek-aspek perdukunan di dalam pertunjukan oleh dalang, — dengan menjembatani antara dua dunia, dunia nyata dan dunia halus — maka masyarakat Jawa (jaman dulu) menganggap betapa pentingnya peran dalang.

Di belakang tempat duduk dalang, adalah orkes gamelan. Dari para pemain atau penabuh gamelan, dua memegang peranan penting sekali di dalam pertunjukkan wayang, ialah kendang dan gender. Setiap dalang bila mengadakan pertunjukan, biasanya membawa pengendang tersendiri. Pengendang dan dalang ini seperti sudah menjadi majemuk, karena tanpa pengendang ini, pertunjukan kurang hidup. Pengendang ini akan menjiwai gerak tari wayang yang ditarikan oleh dalang, juga bila antara yang sedang bermusuhan berbentrok fisik. Kendang memegang peranan penting, karena memberikan aba-aba serta tekanan-tekanan kepada gerakan-gerakan tersebut, sehingga dirasakan sangat hidup. Kendang juga berfungsi sebagai conductor atau dirigen kepada karawitan atau gamelan, karena dengan tempo yang diberikan oleh pengendang, gamelan akan memulai atau mengakhiri. Sedangkan gender, yang permainannya sangat halus, memberikan suasana kepada adegan-adegan yang halus, dimana dibutuhkan latar belakang kepada situasi adegan, yang *dinarasikan* oleh dalang.

Digitized by Google

Kayon

Salah satu bentuk wayang yang tidak merupakan figur tertentu, adalah gunungan. Ini disebut *kayon*. Kayon ini berfungsi sekali bagi pertunjukan wayang, bahkan seperti berfungsi mistik. Pada permulaan pertunjukkan wayang, dalang mengambil kayon dari tempatnya, serta menggerak-gerakan dengan gerakan-gerakan yang mistis. Ujung dari kayon tersebut ditempelkan kekelir (layar) bagian atas, hal ini merupakan lambang dari suatu kesatuan bentuk dengan dunia yang akan dia masuki. Kemudian, disentuhkannya pada dasar kelir, yang melambangkan sentuhan kepada dunia nyata, atau alam semesta. Setelah itu kayon diputar tiga kali pada kelir, dan meletakkan pada gedebog tempat seluruh tokoh wayang dijajarkan. Dan dari sini, mulailah pertunjukan wayang.

Dengan mengikuti gerakan-gerakan kayon, lakon wayang dibagi di dalam tiga bagian besar, dalam bahasa Jawa disebut Patet. Di dalam setiap patet, terjadilah adegan-adegan yang sudah standar, bahkan sangat penting artinya serta mendasar, dan disinilah bentuk standar wayang kulit dipertahankan.

Komunikasi antar Dalang dan Gamelan

Dalang melakonkan wayang tanpa partitur. Ini adalah sangat istimewa. Di samping itu, seperti sudah diuraikan di atas, dalang menguasai segala bentuk yang merupakan pertunjukan, ya sutradara, ya pengatur gending, ya pengatur cerita, pengarah acara, narator dan lain-lainnya, yang di dalam drama atau lakon berbentuk lainnya, akan dimainkan oleh banyak orang, masing-masing tugas dipegang oleh seorang.

Yang sangat esensiil, serta artistik, ialah bilamana dalang akan memulai suatu adegan dan membutuhkan latar belakang gending (lagu), instruksi kepada karawitannya dengan kata-kata sembunyi, mirip seloka. Maka, di samping pengendang atau penggender, peranan pesinden (penyanyi solo) dan pemain rebab adalah sangat esensiil. Dalang akan mengucapkan permintaannya atau instruksinya, dengan bernarasi tentang adegan yang akan dimunculkan, kadang narasi itu dilagukan — ini disebut suluk. Maka dia akan memberikan tanda-tanda dengan sepatah atau dua patah kata yang merupakan seloka, dan perebab atau pesinden segera menangkap maksud Ki Dalang. Demikianlah komunikasi yang sangat unik di dalam pertunjukan wayang, sebuah keunikan yang sangat artistik sekaligus akademis. Beberapa contoh akan kami kemukakan di sini:

(1). Pada sebuah adegan di negeri Hastina. Ketika di negeri Hastina kedatangan tamu agung yang sudah dilaporkan oleh seorang panglima yang bernama Kartomarmo kepada sang Raja Duryudana. Sang raja menginstruksikan agar Kartomarmo mempersilahkan sang tamu masuk ke Istana, Ki Dalang akan memberikan sasmita atau petunjuk yang bersifat narasi tetapi poetis, begini.... Karena agak gugup menerima perintah sang raja, maka Kartomarmo menjalankan titah dengan tergesa-gesa, sehingga pating klewer sesondere (selendang yang merupakan asesorinya berkeleweran...), dengan perkataan klewer dan sonder ini, Ki Dalang minta gending atau lagu Ladrang moncer (mengambil bunyi wer, der, cer yang berpantun).

(2). Adegan di Taman Kadilengeng di mana tinggal istri Duryudana, Banuwati. Dilukiskan bahwa Banuwati yang cantik molek, pokoknya sangat ideal bagi seorang wanita karena sangat rupawan, dalam kesenduannya ditinggal sang suami serta merindukan pacar idealnya (sang Arjuna), dia berjalan-jalan di taman, sembari memandang tanaman yang merambat bernama Bayemtur. Ki Dalang di dalam hal ini memang meminta gending Bayemtur.

(3). Satu adegan lagi, ketika beberapa anggota Pandawa, setelah berunding sejenak memutuskan untuk masuk ke Istana sambil menghibur diri, dengan kata-kata *"anglelipur ndriyo"*, dan karawitan sudah harus tahu bahwa yang dimaksud Ki Dalang adalah gending Perawan Pupur... dan rebabpun memulai membuka dengan gending tersebut.

Demikianlah beberapa hal tentang seni yang dimiliki seorang dalang, seni yang bersifat akademis, tetapi didapatkan dengan belajar secara alamiah dan kewarisan. Meskipun, kini pengetahuan itu dibakukan secara akademis. Memang, kata Dalang sulit untuk diterjemahkan begitu saja, karena keluasan pengetahuan yang dimiliki, dalamnya wawasan yang bersifat filosofis yang dilontarkan di dalam pertunjukannya serta kemantangan pengetahuannya tentang gending serta pendalaman tentang cerita bahkan sejarah pewayangan, dapat mengejawantahkan di dalam banyak versi yang dititipkan di dalam pertunjukan-pertunjukannya, bahkan kerap diaktualisasikan dengan keadaan masa kini, sesuai kebutuhan di dalam pesan-pesan yang akan disampaikan dalam setiap pertunjukan yang diadakan.

Maka, kerap kita dengar kata-kata mutiara *"Dalang ora kurang lakon"* atau Dalang tidak pernah kering akan lakon. Sebab, pada dasarnya lakon selalu dapat dikarang, asal tidak menyeleweng dari pakem (bakunya). Mereka, yang pintar serta genius, kerap kali menjadi dalang di dalam kehidupan manusia, karena dialah yang pandai mengotak-atik situasi, serta menempatkan tokoh-tokoh *wayang* atau orang yang dilakonkan, yang terjadi di dalam kehidupan yang nyata.

Digitized by Google

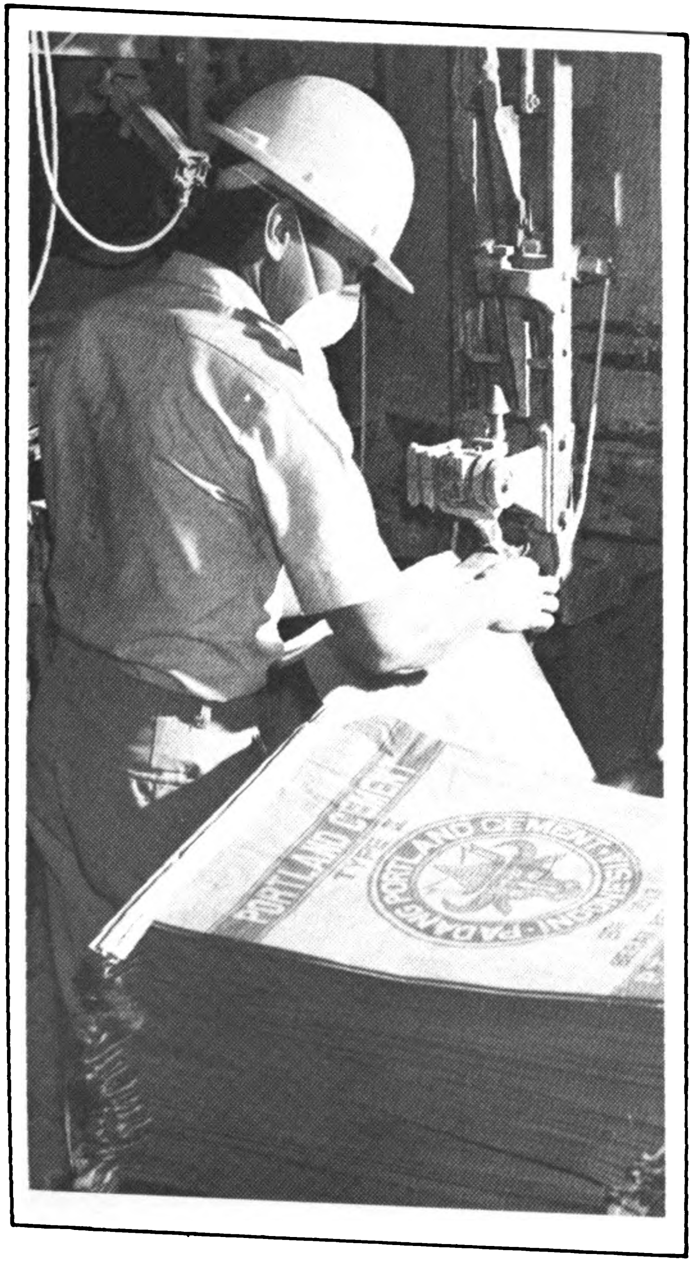

Sejak 1910

LAMBANG KUALITAS dan KEKUATAN

PT SEMEN PADANG (PERSERO)

KANTOR PUSAT/PABRIK : — INDARUNG – PADANG : TELP (0751) 25066. TELEX : 55116 PTSPIN IA, 55161 PTSPIN IA FAX : (0751) 25032.
KANTOR CAB. JAKARTA : — GEDUNG VETERAN LT. II, JL. JEND. SUDIRMAN 50 TELP. (021) 511557. TELEX : 62649 PTSGIA FAX (021) 512177
KANTOR CAB. MEDAN : — JL. KOLONEL SOEGIONO NO. 14 – 14A. TELP. 327275 – 321998.

Kami telah membuat sebelum yang lain memikirkannya

Digitized by Google

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA KE-43

(17 AGUSTUS 1945 – 17 AGUSTUS 1988)

"43 Tahun sudah perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia,
Didalamnya kami mengabdi dan berkarya mengisi Kemerdekaan
Melalui Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila"

ASSOSIASI BAHAN BAKU IMPORT MAKANAN TERNAK INDONESIA

(A S B I M T I)

Sekretariat : Jalan Hayam Wuruk 103 - 104
Telp. 6297539, 6295291, 6292508, 6290065, 631337
J A K A R T A B A R A T

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

No. 54 September 1988

IEDIAKARYA

N PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

MUSDA RAMPUNG
IUNAS MENJELANG

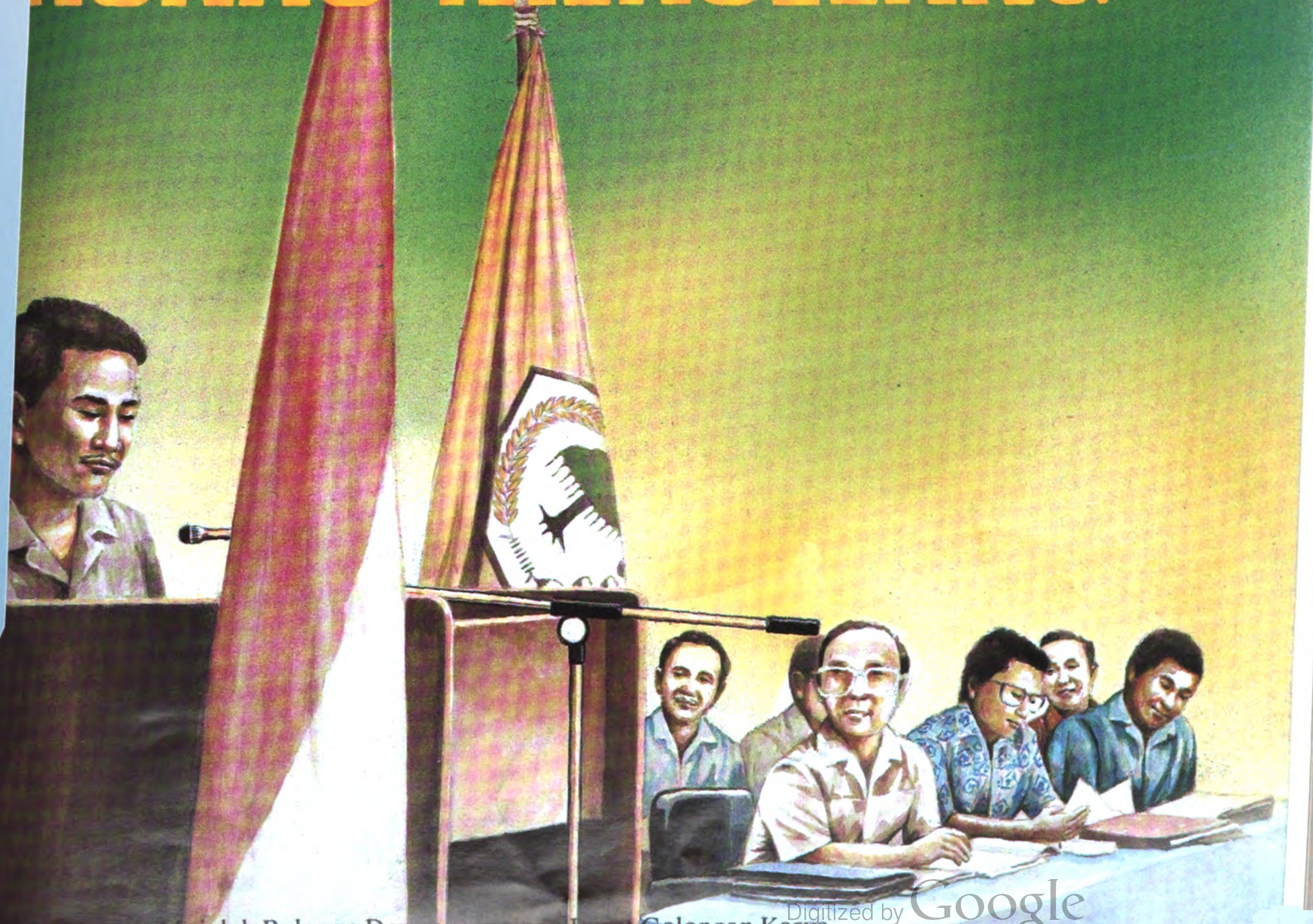

Majalah Bulanan Dew... ...Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Dirgahayu

GOLONGAN KARYA

KE XXIV

20 Oktober 1988

&

SUKSESKAN MUNAS KE IV
GOLONGAN KARYA

Humpuss Group
Indonesia

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli
Staf Redaksi :
Sudarsono SH
T Anono Poernomo
Subandrio
Djonharro
Rum Aly.
Ibnu Sawarno
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noenjathy
Robert Puang Sunur
Issidarto BA.
Subyanto SP
Untung Djumadi
H Mesri Pasaribu

STT NO 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Kritik dan Demokrasi

FOKUS

Menpera Ir Siswono Yudohusodo menulis tentang Perkembangan Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Indonesia.

LAPORAN UTAMA

Budaya Kritik Kita Antara Cara dan Kebutuhan. Prof Padmo Wahyono, Ir Sarwono Kusumaatmadja, Saiful Sulun dan Gunawan Mohamad berbicara tentang tema yang selalu aktual tersebut. Juga pengutaraan kritik gaya wayang yang ditulis oleh Maria Sugiharto.

LAPORAN KHUSUS

Pengawasan melekat belakangan ini menjadi drive yang dibicarakan kalangan luas. Bagaimana Wapres yang ditugasi mengkoordinir pengawasan melakukan pengawasan itu? Rapat-rapat dinas yang langsung dipimpinnya di sejumlah kabupaten bisa dijadikan contoh.

NASIONAL

RUU Pendidikan di Mata FKP; Lahir Bakorstanas, Berakhir ERa Kopkamtib; Transmigran Agar Bersikap Mandiri; Para Gubernur Baru dan Perbankan Menterjemahkan Bahasa Pembangunan.

KOMENTAR

ORGANISASI

Prestise Karena Prestasi, Sebuah Catatan tentang Golkar 1983-1988; Musda Menggali Pemikiran Yang Berjangkauan Jauh ke Depan; Tidak Ada Larangan Wapres Dipilih Menjadi Ketua Umum Golkar; dan Karyawan Golkar Masuk Astek.

SPEKTRUM

Pembaharuan Perundang-undangan dan Permasalahannya; Angkatan Kerja Wanita dalam Pertumbuhan Ekonomi; UU Pendidikan Sebagai Perangkat Tinggal Landas dan Sebuah Upaya Pemberantasan Korupsi.

INTERNASIONAL

Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Suatu Refleksi

SENI & BUDAYA

Pekan Kebudayaan Aceh, Antara Tradisi dan Semangat Perubahan, serta Perhatian Terhadap Asmat Agar Tidak Meninabobokan.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

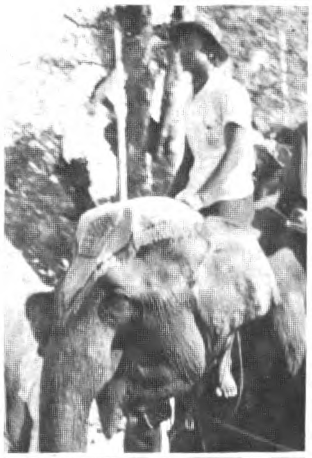

Drs Soedarmadji

Digitized by Google

Kritik Dan Demokrasi

TATKALA cara dan bentuk penyampaian kritik dipersoalkan beberapa waktu lalu melalui media pers, secara tak langsung yang sebenarnya disentuh adalah masalah demokratisasi. Dan memanglah pada akhirnya beberapa dari penyampai pendapat 'mau tidak mau' menyinggung sejauh mana demokratisasi dalam kehidupan bangsa ini telah terlaksana. Bahkan di sana-sini terdapat nada gugatan terhadap beberapa aspek dan indikasi tingkat demokratisasi itu, baik yang dikutip pers maupun yang berkembang sesudahnya di berbagai forum.

Memang ada kaitan antara kritik dengan demokrasi. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya pilihan-pilihan, termasuk pilihan untuk berbeda pendapat. Dalam perbedaan pendapat tadi terkandung juga didalamnya kemungkinan untuk menyatakan bahwa suatu pendapat tertentu, adalah lebih baik dari pendapat lain, mengenai suatu hal yang sama. Tatkala perbedaan pendapat ini muncul, maka muncul pula kritik. Dengan demikian kritik adalah bagian dari demokrasi. Berarti juga, menegakkan demokrasi adalah juga mengakui adanya kritik sebagai salah satu gejala yang sah. Oleh karena itulah, salah satu ukuran demokrasi yang paling penting dari suatu sistim politik adalah derajat kebebasan berpendapat dari warga masyarakatnya.

Hadirnya kritik dengan demikian menjadi penting karena merupakan konsekuensi dari diakuinya hak orang untuk mempunyai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu hadirnya kritik itu sendiri, tidak selayaknya dipersoalkan jika kita memang menghayati kehidupan politik yang demokratis. Yang layak dipersoalkan jadinya adalah batasan-batasan yang harus disepakati mengenai kritik itu sendiri, karena masyarakat bangsa didirikan bukan untuk menampung hasrat untuk berbeda pendapat. Suatu masyarakat bangsa berdiri karena adanya persamaan cita-cita dan persamaan tujuan. Dalam rangka mengolah berbagai kemungkinan mencapai cita-cita dan tujuan bersama itulah orang mempunyai beragam pendapat, dan dengan demikian munculah kritik sebagai akibat dari padanya. Oleh karena itu hadirnya kritik mempunyai batasan-batasan. Disatu pihak, kritik harus dimungkinkan karena dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan bersama terdapat alternatif-alternatif pendapat yang masing-masing harus diuji, sebelum tiba pada suatu putusan politik untuk memilih salah satu dari sekian banyak alternatif yang hadir tadi. Dipihak lain, kritikpun harus dibatasi karena suatu masyarakat bangsa tidak mungkin akan dapat bekerja untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, jika perbedaan pendapat dibiarkan berlarut-larut karena kritik tidak dibatasi. Mengingat batasan tadi maka kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara tirani dan anarki. Suatu sistim politik yang totaliter dan diktatorial, tidak mengizinkan adanya perbedaan pendapat dan dengan demikian tidak mengizinkan adanya kritik. Suatu anarki tidak mengizinkan adanya penyelesaian perbedaan pendapat dan oleh karena itu kritik menjadi raja dan akhirnya menjadi tiran juga. Suatu sistim yang demokratis, tidak hanya membatasi kecenderungan manusia untuk berperilaku otoriter, namun juga membatasi kecenderungan manusia untuk bertahan tanpa batas pada apa yang dianggapnya benar. Oleh karena itulah maka setiap bangsa menciptakan mekanisme untuk mengatur hak dan kewajiban. Pengaturan hak dan kewajiban adalah urusan semua orang dan oleh karena itu, suatu negara yang demokratis selalu mendasarkan kekuasaan negara atas dasar kedaulatan rakyat, dan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan konstitusi, demokrasi dan hukum.

Prinsip dasar demokrasi disemboyankan dengan 'Dari, untuk dan oleh rakyat'. Esensi pelaksanaannya dalam kehidupan demokrasi — yang diterima secara universal — terletak pada pengambilan keputusan-keputusan untuk kepentingan semua yang dilakukan secara bersama melalui tukar pendapat (musyawarah), dan menyatakan pendapat yang mungkin saja berbeda (kritik) untuk didekatkan satu sama lain agar mencapai kesepakatan atau keputusan (mufakat). Dalam demokrasi Pancasila hal itu dirumuskan sebagai "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Rumusan ini disampingi oleh Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya menjamin kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

Tradisi berbeda pendapat dan menyampaikan kritik sebagai bagian kehidupan demokrasi terdapat dalam akar-akar budaya Nusantara. Hanya saja, feodalisme dan 350 tahun kolonialisme telah banyak menghilangkan bagian-bagian tentang persamaan hak dan kebebasan menyatakan pendapat. Pengalaman 43 tahun Indonesia merdeka memperlihatkan betapa erosi 350 tahun itu telah mewariskan aneka kendala dalam membangun manusia pembangunan yang dinamis, kreatif, mandiri dan demokratis. Secara khusus, untuk yang disebut belakangan ini, kita masih harus dari waktu ke waktu menjalankan pendidikan politik dan terus menerus mengkaitkannya dengan penegakan konstitusi, demokrasi dan hukum.

Pendidikan politik yang demokratis dengan sendirinya bukanlah komunikasi satu arah, bukan indoktrinasi. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat, terjadi kritik, termasuk kritik mengenai kritik itu sendiri. Dalam hal ini maka terjadi perdebatan yang cukup menarik yang antara lain dimuat dalam pers, mengenai cara, substansi maupun batasan mengenai kritik. Hadirnya diskusi ini sendiri menguatkan keyakinan kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kita tidak perlu kuatir mengenai polemik tentang kritik ini, karena di satu pihak kita memang memerlukan adanya silang pendapat yang sehat untuk mencari kebenaran, dan di pihak lain kita juga dapat merasakan bahwa silang pendapat tadi berada dalam batas-batas yang membangun karena mencerminkan persamaan keyakinan bahwa kritik adalah bagian yang melekat pada Demokrasi Pancasila. Terdapat keinginan yang sama untuk dari waktu ke waktu meningkatkan kadar demokratisasi. Terdorong oleh keinginan seperti itu, mekanisme kritik pun memerlukan perhatian antara lain aspek 'aturan main' dalam melancarkan kritik. Keinginan mengatur cara kritik agaknya didasari pemikiran bahwa kebebasan toh ada batasnya, yakni di tepi pagar hak dan kebebasan orang lain yang menjadi sesama peserta kehidupan demokratis. Sebab, kritik maupun kebebasan yang semena-mena dapat juga menjadi tirani baru. Tetapi sebaliknya adalah sama benarnya bahwa kekhawatiran yang berlebihan pada kritik adalah menggelisahkan karena mengandung kesan adanya kehendak untuk menciptakan terlalu banyak pembatasan hak — yang pada gilirannya menambah kendala bagi pendidikan dan pembangunan politik. Kerangka batasan yang berupa 'budaya Pancasila' dalam hal ini memang terasa ideal. Hingga saat ini kita belum memiliki rumusan yang baku, dan diskusi mengenai kritik dapat dilihat secara positif sebagai upaya untuk membentuk sikap budaya yang sama mengenai hakekat, fungsi dan batasan kritik.

Oleh karena itu, maka para pengambil keputusan di bidang politik hendaknya dapat bersifat arif terhadap munculnya kritik sebagai isyu yang hangat dewasa ini, karena merupakan pertanda bahwa kita menghendaki adanya kualitas kehidupan politik yang meningkat dari waktu ke waktu kearah sosoknya yang makin mendekati cita-cita demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45. Hal ini sejalan dengan sikap Golkar sendiri yang berpendirian bahwa dimasa mendatang, soal-soal yang kualitatif seperti demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum akan muncul sebagai masalah-masalah pembangunan yang mendesak. Kita sudah mempunyai rumusnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, yaitu dengan selalu mengembalikan masalahnya pada kaitan konstitusi, demokrasi dan hukum. Dengan perkataan lain, maka penyelesaian berbagai soal yang timbul mengharuskan kita untuk mempertinggi kepekaan lembaga-lembaga politik kita baik di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur agar setiap gejolak masyarakat dapat ditampung, bukan saja untuk sekedar secara formal menyelesaikan soalnya, namun juga untuk memberikan bentuk dan substansi yang lebih berbobot terhadap kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 itu sendiri. □

Digitized by Google

Oleh : Ir. Siswono Yudo Husodo

Perkembangan Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman di Indonesia

Pada waktu ini kita berada pada tahun terakhir pelaksanaan Pelita IV dan sedang mempersiapkan diri untuk memasuki Pelita V. Dalam hubungan ini, MPR telah menetapkan GBHN, yang di dalamnya termasuk Pola Umum Pelita Kelima.

Di bidang Perumahan dan Pemukiman, GBHN mengamanatkan agar upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi.

Pembangunan perumahan dan pemukiman mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional kita. Dalam pembangunan nasional kita, yang pada hakekatnya adalah

Ir. Siswono Yudo Husodo

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, dan oleh karenanya kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakatnya perlu ditingkatkan. Usaha-usaha ke arah peningkatan kualitas manusia pada taraf pertama dilakukan melalui pendekatan memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kualitas kehidupan masyarakat mengandung makna tingkat perwujudan kesejahteraan ekonominya dan sosial budayanya, serta kebersamaan manusia dalam suatu kesatuan masyarakat atau wilayah.

Dengan pengertian yang demikian, GBHN menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan perumahan mempunyai arti penting.

Satu kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan perumahan dan pemukiman mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor pembangunan yang lain, baik yang menjadi faktor pendukung, maupun yang mendapat manfaat atau dampak dari pembangunan perumahan dan pemukiman. Manfaat dan dampak di

Digitized by Google

bidang peningkatan kesejahteraan rakyat sangat dirasakan oleh masyarakat melalui perseorangan dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya.

Di bidang ekonomi, proses pembangunan perumahan melibatkan dan mendorong pengembangan sejumlah perusahaan dan industri hulu maupun hilir, yang menyerap modal dan menciptakan kesempatan kerja yang besar. Sebagai unsur pengarah pertumbuhan wilayah, pembangunan perumahan dan pemukiman dalam bentuk fisiknya merupakan pelaksanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang tersebut mengatur berbagai fungsi dan lokasi kegiatan pembangunan yaitu tempat tinggal, tempat bekerja, prasarana dan fasilitas perkotaan, dalam satu kesatuan yang serasi dan dinamis.

Fungsi Perumahan

Perumahan dan pemukiman mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan pencerminan, pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Ada ungkapan *"Rumahmu, Wajahmu dan Jiwamu"*. Perumahan memberi arti dan makna yang dalam, dalam kehidupan manusia. Keadaan perumahan mencerminkan taraf hidup, kepribadian dan dan peradaban manusia, suatu masyarakat, atau suatu bangsa.

Perumahan tidak dapat dilihat sebagai benda atau sarana kehidupan semata-mata tetapi lebih dari itu merupakan suatu proses bermukim manusia, yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang hidup dalam lingkungan masyarakat dalam alam sekitarnya. Bermukim pada hakekatnya adalah hidup bersama, dan untuk itu fungsi rumah dalam kehidupan manusia adalah sebagai tempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai prasarana dan sarana yang diperlukan oleh manusia untuk memasyarakatkan dirinya.

Dilihat dari proses bermukim, rumah merupakan sarana pengamanan diri manusia, pemberi ketentraman hidup, sebagai pusat kegiatan berbudaya manusia. Di dalam rumah dan lingkungannya, manusia dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Dengan demikian maka dalam skala nasional, perumahan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan insan sosial, insan ekonomi dan insan politik. Sebagai insan sosial, manusia memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budayanya dalam masyarakat. Di samping itu, perumahan mempunyai fungsi ekonomis yang sangat penting bagi manusia sebagai insan ekonomi, karena memiliki rumah merupakan investasi ekonomi jangka panjang, yang akan memperkokoh jaminan kehidupannya di masa depan. Oleh karenanya pembangunan perumahan dapat dilihat dalam lingkup permasalahan sosial, ekonomi dan kenegaraan, dimana perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural, yaitu sebagai bagian dari peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pembangunan perumahan bukan hanya berupaya mencapai sasaran kuantitatif, tetapi juga yang lebih penting adalah pencapaian sasaran kualitatif

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

MENGUCAPKAN:

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
DAN
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar
Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka
Kesinambungan Pembangunan Nasional

BIMANTARA GROUP

Jalan Kebon Sirih No. 17—19 Jakarta 10340 Phone: 3803220 (Hunting System)

Digitized by Google

yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan perumahan sesuai dengan hakekat dan fungsinya.

Perkembangan Kebijaksanaan Dan Program Perumahan

Sejak tahun limapuluhan telah dilakukan upaya-upaya pengembangan di bidang perumahan, yang pelaksanaannya tersendat-sendat, sebagai akibat dari situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi pada waktu itu. Pengembangan pembangunan perumahan rakyat secara berencana dan berkesinambungan baru dimungkinkan sejak Pelita I, berkat adanya dukungan stabilitas politik, sosial dan ekonomi secara Nasional. Pada Pelita I, pembangunan di bidang perumahan

Rumah sederhana yang dibangun Perumnas.

Rumahmu, Wajahmu dan Jiwamu.

masih sangat sederhana dan bersifat uji coba sebagai persiapan bagi program pembangunan perumahan yang sesungguhnya, yang mulai dilaksanakan dalam Pelita II. Program perumahan dalam Pelita I meliputi peningkatan, penelitian dan pengembangan di bidang teknik-teknologi perumahan dan bahan bangunan, pengembangan proyek-proyek percontohan, penyuluhan tentang rumah sehat, dan penyiapan sistim kelembagaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan perumahan.

Pelita II (1974-1979)

Pelita II merupakan tahap pengembangan kebijaksanaan dan program di bidang perumahan. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1973, bidang perumahan mendapat prioritas yang tinggi. Kebijaksanaan dan program perumahan dapat dirumuskan secara lebih jelas dan sistematik, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Pendekatan kebijaksanaan perumahan di kota dilakukan dengan melihat adanya berbagai golongan penghasilan di dalam masyarakat. Pemerintah menangani secara langsung perbaikan lingkungan dan pengadaan perumahan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang. Program-program yang berkaitan dengan ini ialah Perbaikan Kampung, pengadaan tanah matang untuk pembangunan perumahan (site and services), dan pembangunan rumah sederhana. Program perumahan di pedesaan dilaksanakan dengan Proyek Perintis Pemugaran Perumahan Desa (P3D) yang sistimnya telah diujicoba dalam Pelita I.

Pengembangan sistem kelembagaan dibidang perumahan selama Pelita II meliputi: (a) Pembentukan Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) dengan Keputusan Presiden Nomor: 35 Tahun 1974; (b) Pendirian Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) dengan Pengaturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1974; (c) Mengenai lembaga pembiayaan perumahan, Menteri Keuangan menugaskan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk berfungsi sebagai Bank yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi rumah sederhana yang dibangun Perumnas dan perusahaan pembangunan perumahan (developer) swasta, dengan surat Menteri Keuangan Nomor B-49/MK/IV/1/1974; (d) Pembangunan perumahan oleh sektor swasta ditingkatkan dan dikembangkan melalui Real Estate Indonesia (REI); (e) Pusat Informasi Teknik Pembangunan (PITB) sebagai pusat penyuluhan pembangunan perumahan dan bangunan dibentuk di seluruh ibukota propinsi, dan (f) Tim Koordinasi Perumahan Desa dikembangkan, dan meliputi unsur-unsur Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan.

Secara kuantitatif program perumahan dalam Pelita II masih sangat kecil. Di antaranya adalah pembangunan 73.000 unit rumah sederhana dan kapling tanah matang dengan rumah inti oleh Perumnas, Program Perbaikan Kampung di Jakarta dan Surabaya.

Kredit Pemilikan Rumah diberikan oleh BTN untuk rumah sederhana dengan luas lantai maksimum 70 M2 di atas kapling maksimum 200 M, dikenakan bunga 5% sampai 9% setahun dengan jangka waktu pengembalian selama maksimum 20 tahun. Dalam bidang perumahan desa, selama Pelita II diprogramkan 1.000

Digitized by Google

lokasi desa sebagai proyek P3D, yang dipilih dari kurang lebih 60.000 desa yang ada di seluruh Indonesia.

Meskipun tidak dapat terlaksana sepenuhnya dari segi kuantitas, namun pada umumnya pelaksanaan Pelita II dapat dikatakan berhasil baik dan disamping memupuk pengalaman yang berharga telah membawa dampak yang luas dan yang sangat positif dalam masyarakat, sehingga memungkinkan untuk lebih meningkatkan lagi program pembangunan perumahan dalam Pelita III secara berkesinambungan.

Pelita III (1979-1984)

Pelita III merupakan tahap peningkatan di bidang pembangunan perumahan. GBHN 1978 mengamanatkan agar dalam Pelita III pembangunan perumahan rakyat yang terjangkau oleh rakyat banyak semakin ditingkatkan. Peningkatan ini menyangkut baik programnya maupun penanganannya, dimana azas keterjangkauan dan pemerataan lebih lanjut ditekankan dalam pelaksanaanya.

Di bidang perumahan kota dilakukan peningkatan Program Perbaikan Kampung melalui perintisan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota yang meliputi 200 kota kecil, kota sedang dan kota besar.

Pembangunan rumah sederhana ditingkatkan menjadi 150.000 unit, dimana 120.000 dilaksanakan oleh Perum Perumnas dan 30.000 unit oleh perusahaan pembangunan perumahan swasta, dengan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara. Syarat-syarat Kredit Pemilikan Rumah BTN sama dengan Pelita II, dengan penegasan bahwa sebagai ukuran keterjangkauan adalah bahwa besarnya angsuran bulanan maksimum sepertiga dari penghasilan keluarga. Melalui program ini partisipasi masyarakat dan kegiatan sektor usaha swasta ditingkatkan secara nyata. Di samping itu dalam Pelita III dirintis pembangunan rumah susun dan sistim peremajaan kota sebagai pengembangan program baru di bidang perumahan rakyat.

Di bidang perumahan desa, Proyek Perintisan Penugasan Perumahan Desa (P3D) yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum Ditingkatkan dan dikembangkan sehingga meliputi 6.000 lokasi desa dari 60.000 desa.

Bersamaan dengan itu dikembangkan pula program Peningkatan Swadaya Masyarakat dalam Perumahan dan Lingkungan (PSMPL) yang ditangani oleh Departemen Sosial, dan program Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa (PPLD) oleh Departemen Dalam Negeri. Dalam hubungan ini maka untuk dapat mencapai hasil yang optimal dan dampak yang luas mengenai kegiatan di bidang perumahan di daerah pedesaan, sistim koordinasi yang telah dirintis dalam Pelita II terus ditingkatkan.

Peningkatan Swadaya Masyarakat dalam perumahan dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor usaha swasta dibentuk PT. Papan Sejahtera, yang merupakan lembaga keuangan nonbank yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. KPR dari PT. Papan Sejahteran diberikan untuk rumah dengan harga maksimum Rp. 50 juta dan dikenakan bunga 18% setahun dengan jangka waktu pengembalian maksimum 15 Tahun.

Sebagaimana dalam pelaksanaan Pelita II, hasil-hasil yang dicapai pada akhir Pelita III secara kuantitatif untuk perumahan sederhana di kota melampaui sasaran. Pembangunan rumah sederhana yang diprogramkan 150.000 unit dapat dilampaui, namun komposisinya berbeda, yaitu dari yang direncanakan 120.000 oleh Perum Perumnas dan 30.000 oleh Developer Swasta, yang dapat dicapai oleh Perum Perumnas 100.000 unit dan oleh perusahaan pembangunan perumahan swasta 70.000 unit. Hal ini memberikan indikasi bahwa peranan sektor usaha swasta memang dapat ditingkatkan apabila diberikan kondisi-kondisi pendukung yang diperlukan, yang dalam hal ini adalah perkreditan.

Di bidang perumahan desa, dari 6.000 lokasi P3D yang diprogramkan, dapat dicapai 4.900 lokasi desa. Mengenai masalah ketercapaian sasaran ini, yang lebih penting bukanlah ketercapaian secara kuantitatif tetapi ketercapaian kualitatif dalam arti kata sasaran fungsional dari kebijaksanaan dan program yang kita rumuskan, sesuai dengan azas-azas keterjangkauan dan pemerataan yang menjadi pegangan pokok dalam menangani masalah perumahan rakyat, di samping pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik guna perbaikan program-program selanjutnya.

Pelita IV (1984-1989)

GBHN 1983 mengamanatkan agar pembangunan perumahan rakyat dan pemukiman ditingkatkan dan dikembangkan. Dalam hubungan ini, sebagaimana tertuang dalam Repelita IV, wawasan pembangunan perumahan rakyat sebagai kebutuhan dasar manusia telah berkembang menjadi wawasan perumahan dan pemukiman sebagai satu kesatuan fungsional.

Pelita IV merupakan tahap kerangka tinggal landas. Di samping meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perumahan, disempurnakan pula berbagai kebijaksanaan di bidang perumahan yang diarahkan untuk mewujudkan kerangka tinggal landas pembangunan nasional.

Peningkatan dan pengembangan secara kuantitatif program perumahan dan pemukiman di daerah kota meliputi Perintisan Perbaikan Lingkungan

Digitized by Google

Perumahan Kota di 400 lokasi kota, perintisan peremajaan kota di beberapa kota besar, pengembangan kota dan pusat pertumbuhan baru, pembangunan 300.000 unit rumah sederhana, dan pembangunan rumah sewa 25.000 unit. Dari 300.000 unit rumah sederhana yang akan dibangun, 140.000 unit ditugaskan kepada Perumnas dan 160.000 unit diserahkan kepada perusahaan pembangunan perumahan swasta, dengan dukungan Kredit Pemilikan Rumah dari BTN. Dari rencana pelaksanaan ini terlihat bahwa peranan sektor usaha swasta semakin lebih ditingkatkan.

Di bidang perumahan desa, lokasi P3D ditingkatkan menjadi 10.000 desa, dan di samping itu ditingkatkan keterpaduan penanganan perumahan desa melalui pengembangan program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). Azas keterjangkauan dan pemerataan dalam Pelita IV lebih ditingkatkan pelaksanaannya dengan kebijaksanaan untuk lebih banyak membangun rumah sederhana tipe kecil, dengan luas lantai sampai dengan 36 M2, yang merupakan 70% dari seluruh 300.000 unit rumah sederhana yang dibangun dalam Pelita IV.

Sementara itu suku bunga Kredit Pemilikan Rumah BTN disesuaikan dengan perkembangan di bidang moneter, yaitu menjadi 9%, 12%, dan 15% setahun. Hal ini sejalan pula dengan usaha untuk mengamankan tercapai sasaran pembangunan perumahan dalam Pelita IV sehubungan dengan mulai direncanakannya gejala keterbatasan sumber dana yang diperlukan untuk mendukung program perumahan. Sementara itu dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, masalah tanah perkotaan semakin menonjol, baik dilihat dari segi penataan ruang dan pengadaannya maupun dari segi terus membubungnya harga yang belum dapat dikendalikan. Dengan demikian maka dalam usaha meningkatkan pembangunan perumahan dan pemukiman, masalah pembiayaan dan pertahanan ini akan menjadi faktor-faktor yang sangat penting dan menentukan.

Permasalahan Yang Aktuil

Kebutuhan perumahan akan terus meningkatkan terutama di daerah perkotaan. Persebaran penduduk Indonesia antar daerah, antar pulau, sangat tidak merata. Pulau Jawa yang luasnya hanya lebih kurang 4% dari Indonesia harus mengakomodasikan sekitar 60% penduduknya (lebih dari 100 juta orang).

Dari standar kepadatan kota-kota di Eropa, Pulau Jawa praktis dewasa ini sudah merupakan kota pulau. Jumlah penduduk di kota, yang sekarang merupakan kurang lebih 27% dari seluruh penduduk Indonesia, di tahun 2000 akan mencapai 40% sehingga beban pengadaan perumahan di daerah perkotaan akan semakin berat. Secara keseluruhan, penduduk Indonesia dewasa ini berjumlah 176 juta dengan angka pertumbuhan 1,9%, di tahun 2000 akan mencapai lebih kurang 210 juta, bertambah dengan 35 juta dalam 12 tahun. Kebutuhan perumahan sebagai akibat pertambahan penduduk tersebut dan mengisi kekurangan tahun-tahun yang lalu diperkirakan rata-rata 780.000 unit per tahunnya.

Dalam waktu 12 tahun dari sekarang, khusus penduduk kota akan bertambah lebih kurang 32 juta orang, yang memerlukan lebih kurang 6 juta rumah baru.

Di samping masalah pertambahan penduduk, rendahnya kenaikan daya beli masyarakat dibanding dengan kenaikan harga rumah, keterbatasan sumber dana dan semakin tingginya suku bunga, maka dalam pembangunan rumah sederhana pada waktu-waktu yang akan datang, khususnya dalam Repelita V, akan lebih banyak dibangun rumah-rumah sederhana tipe kecil, yaitu dengan luas lantai: 15 dan 18 M2 (tipe rumah sub inti), 21 dan 27 M2 (tipe rumah inti) dan 36 M2 di samping Kapling Siap Bangun yang tanpa rumah. Tipe-tipe rumah sub inti dan inti merupakan *"Core house"* yang kemudian dapat dikembangkan menjadi tipe 36 M2.

Kecuali permasalahan tersebut di atas, yaitu aspek-aspek kependudukan dan daya beli masyarakat, masalah penting lainnya adalah masalah penyediaan tanah Sekitar 7.000 Ha lahan diperlukan setiap tahunnya, untuk perumahan dan pemukiman. Sebagian besar adalah tanah-tanah pertanian atau perkebunan di sekitar perkotaan.

Bila dilihat sejarah berdirinya kota-kota di Indonesia pada umumnya, kota-kota tersebut selalu dikelilingi oleh daerah pertanian dan/atau perkebunan sebagai *"Hinterland"* yang menunjang kehidupan kota, karena orientasi kota-kota tersebut pada waktu pendiriannya dahulu, masih bersifat agraris. Dengan demikian pertumbuhan dan perluasan kota tidak akan dapat menghindari pengurangan dari tanah-tanah yang subur yang terletak di sekeliling kota itu.

Permasalahan lainnya yang sekarang sedang kita hadapi, adalah meningkatkan disiplin sosial dari masyarakat yang masih rendah. Di samping oleh sebab-sebab ekonomis yang bisa dimengerti masalah disiplin sosial inilah yang telah menyebabkan tingginya angka tunggakan cicilan KPR-BTN.

Data dari BTN menunjukan, bahwa posisi tunggakan angsuran pada tanggal 31 Maret 1988 adalah sebesar Rp. 84,4 milyar dari jumlah KPR-BTN sebesar Rp. 1,62 trilyun atau sebesar 5%. Jumlah debitur KPR-BTN seluruhnya adalah 425.283 sedang yang menunggak berjumlah 210.932 atau sekitar 47%.

Diharapkan kesadaran dari para debitur KPR-BTN untuk meningkatkan disiplin mereka dalam membayar cicilan KPR-BTN, karena dengan jalan ini masyarakat yang lain yang juga masih membutuhkan perumahan akan dapat tertolong. Bagi mereka yang sebenarnya mampu mengangsur tetapi tidak mau mengangsur, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi bagi mereka yang benar-benar menghadapi kesulitan dalam mengangsur, mau mengangsur tetapi tidak mampu mengangsur sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, akan dicarikan cara penyelesaian yang tidak akan memberatkan golongan masyarakat tersebut.

Kapling Siap Bangun

Keadaan Dewasa ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat kota yang berpenghasilan sangat rendah belum mampu menjangkau Uang Muka dan cicilan yang terendah sekalipun. Uang Muka Rp. 350.000,- yang harus dibayar di muka dan cicilan Rp. 30.000,- per bulan, tak mungkin dijangkau oleh sebagian besar masyarakat kota dengan penghasilan keluarga yang lebih kecil dari Rp. 90.000,- per bulan. Selama kurun waktu 10 tahun ke belakang, ternyata harga rumah mengalami kenaikan menjadi 2,5 kali (250%) sedangkan pendapatan pegawai negeri golongan I/II hanya mengalami kenaikan menjadi 1,8 kali (180% saja). Kesenjangan (sebesar 70%) antara kenaikan harga rumah dan kenaikan pendapatan masyarakat

Digitized by Google

seperti diuraikan di atas, nampaknya akan tetap ada bahkan cenderung meningkat di waktu yang akan datang.

Urbanisasi yang cenderung meningkat menyebabkan pada tahun 2025 mendatang, jumlah penduduk perkotaan sudah mendekati 40% (dari keadaan sekarang 27%), dibanding jumlah penduduk pedesaan yang cenderung menipis mendekati 60% (dari keadaan sekarang 73%) dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Situasi sulit seperti yang digambarkan di atas menimbulkan makin meningkatnya perumahan kumuh dan akan lebih mempersulit usaha-usaha kita dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan, apabila kita tidak sedini mungkin mengupayakan cara-cara dan pendekatan pengadaan perumahan yang lain, di samping melanjutkan pengadaan perumahan dengan fasilitas KPR yang sudah ada.

Disadari adanya perilaku dari lapisan golongan masyarakat tertentu yang tidak dipunyai oleh lapisan golongan masyarakat yang lebih atas dalam proses membangun rumah. Golongan tersebut adalah masyarakat setingkat dengan pegawai negeri golongan I dan II atau masyarakat umum di sektor non-formal seperti supir, pembantu rumah tangga, tukang sayur dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, mula-mula rumah-rumah mereka itu dibangun dengan bahan bangunan yang sederhana ataupun bekas dan lambat laun mengikuti proses bermukimnya masyarakat yang semakin mantap, akan diperbaiki menjadi rumah-rumah permanen.

Adapun kondisi kumuh dan kepadatan penduduk yang tinggi tersebut untuk sebagian besar bukanlah akibat dari kurangnya kemampuan membangun rumah dari masyarakat, melainkan karena tidak tersedianya kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk mendapatkan kapling yang terencana sebagai suatu lingkungan perumahan yang layak. Sebenarnya tersedia kapling perumahan yang ada di daerah pinggiran yang pada umumnya dijual dalam ukuran besar tetapi tidak akan terjangkau oleh masyarakat tersebut. Sesungguhnya sebagian besar dari rumah-rumah di daerah perkotaan telah dibangun sendiri oleh masyarakat tanpa bantuan dari sektor formal seperti Developer Swasta, Perumnas ataupun Kontraktor.

Kenyataan lain adalah bahwa banyak tersedia tenaga kerja yang membantu masyarakat dalam pembangunan rumahnya sebagai tukang batu/kayu yang dibutuhkan dalam proses membangun perumahan oleh masyarakat sendiri. Kota-kota besar yang tumbuh tidak mungkin meniadakan tumbuhnya kampung-kampung yang merupakan kebutuhan dari kota tersebut.

Suatu lingkungan perumahan yang layak.

Adapun Kapling Siap Bangun bagi masyarakat ini merupakan pembangunan kampung yang terencana dan diharapkan menjadi kampung yang tertib dan bersih. Dari pengamatan di lapangan, ada potensi yang nyata tentang kemampuan masyarakat untuk membangun rumahnya sendiri.

Yang dibutuhkan adalah lahan yang terencana di atas mana rumahnya dibangun oleh masyarakat sendiri. Dengan dibangunnya rumah oleh masyarakat sendiri merupakan partisipasi riil masyarakat dalam proses membangun rumah. Di samping itu ternyata pula bahwa masyarakat pada umumnya tidak akan terangsang membangun/memperbaiki rumah kediamannya, apabila status hukum tanahnya tidak pasti (takut digusur) atau bila bukan rumahnya sendiri (rumah sewa/kontrakan). Hal ini antara lain salah satu sebab timbulnya perumahan kumuh.

Demi sebagian besar masyarakat kota yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu menjangkau harga rumah KPR-BTN (membeli kapling + rumah), sudah saatnya kita memperkenalkan suatu alternatif baru yaitu pengadaan Kapling Siap Bangun dalam lahan/kawasan siap bangun melalui fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun dari Bank Tabungan Negara.

Alternatif ini memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli Kapling Siap Bangun dengan harga yang terjangkau, di atas tanah Perum Perumnas ataupun developer swasta (REI) yang sudah direncanakan sebagai suatu lingkungan perumahan yang layak. Masyarakat kemudian dapat membangun rumahnya sendiri dengan bahan bangunan yang sederhana ataupun bahan bangunan bekas, tetapi harus mengikuti ketentuan perencana-

Digitized by Google

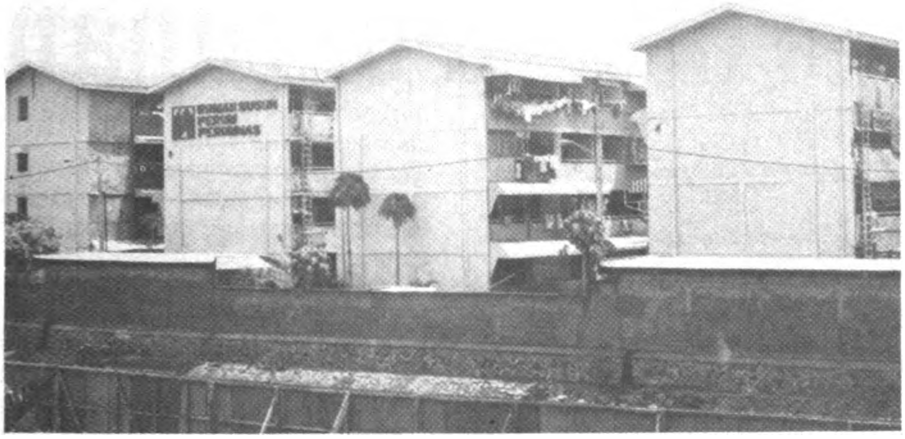

Pembangunan rumah susun.

an lingkungan yang berlaku dengan bimbingan teknik yang diperlukannya.

Membangun rumah dilakukan dengan cara ''sambatan'' yang dilandasi semangat gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan yang sudah tertanam di sanubari masyarakat Indonesia.

Diharapkan masyarakat tersebut terdiri dari mereka yang sebagian besar penghidupannya ada di daerah sekitarnya, baik yang bekerja di sektor nonformal maupun pegawai-pegawai golongan I/II atau karyawan rendahan dari perusahaan-perusahaan.

Rencana Kapling

Luas Kapling Siap Bangun adalah 54 M2, dengan jalan setapak konstruksi sederhana, dan lebar jalan maksimal 2 meter yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, serta kelengkapan fasilitas mandi/cuci/kakus (MCK umum).

Maksud dari lebar jalan terbatas maksimum 2 meter yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 agar Kapling Siap Bangun tersebut tidak menarik bagi golongan masyarakat berpendapatan menengah serta menghindari kemungkinan dijadikan bahan spekulasi untuk pasaran golongan mampu.

MCK dimaksudkan untuk membantu dalam tahap awal pembangunan perumahan oleh masyarakat sebelum mereka mempunyai MCK sendiri di setiap rumah masing-masing. Sesuai dengan proses bermukimnya yang semakin mantap, masyarakat kemudian meminta sambungan listrik maupun air bersih untuk rumahnya masing-masing menurut kemampuannya.

Direncanakan untuk terlebih dahulu mengadakan uji coba secara terbatas di beberapa lokasi proyek perumahan KPR-BTN yang dibangun oleh Perum Perumnas dan developer swasta (REI), masing-masing di kota-kota: Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan, dengan masing-masing 100 kapling di lingkungan perumahan Perum Perumnas dan 50 kapling di lingkungan developer swasta.

Harga satu unit Kapling Siap Bangun kurang lebih Rp. 1,2 juta, dengan uang muka Rp. 120.000,- (10%) dan dengan cicilan setiap bulan Rp. 10.954/Rp. 9.717,- untuk jangka waktu 15 tahun/ 20 tahun, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 90.000,- per keluarga per bulan.

Bagi masyarakat berpenghasilan tetap dipersyaratkan mempunyai Tabungan di BTN (Tabanas/Deposito) yang jumlah minimal sebesar tiga kali cicilan (Rp. 33.000,-/Rp.30.000,-) sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap dipersyaratkan mempunyai tabungan sebesar enam kali cicilan (Rp. 66.000,-/Rp. 60.000,-). Suku bunga kredit pemilikan kapling siap bangun bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp. 90.000,-/bulan, diusulkan sebesar 9%/tahun selama waktu 15/20 tahun.

Dewasa ini telah dibangun beberapa bangunan rumah susun dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya. Mengingat akan keterbatasan lahan di perkotaan maka ada kecenderungan pembangunan rumah susun akan merupakan salah satu alternatip penyelesaian masalah perumahan di waktu mendatang.

Pada waktu ini pembangunan rumah susun bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah masih merupakan tantangan yang perlu di atasi. Masalah tersebut antara lain dari tingginya biaya pembangunan dibandingkan dengan rumah tidak bersusun menyebabkan tidak terjangkaunya oleh daya beli masyarakat yang dituju, serta pandangan/persepsi masyarakat terhadap rumah susun. Sehingga dalam kurun waktu 5 - 10 tahun mendatang, upaya dan langkah untuk memasyarakatkan rumah susun di kalangan masyarakat luas masih perlu ditingkatkan.

Repelita V

Repelita V mempunyai posisi yang sangat strategis, karena merupakan penutup dari kurun waktu pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap pertama dan merupakan jembatan untuk memasuki pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun tahap kedua. Repelita V, di samping merupakan kesinambungan dan peningkatan pembangunan selama Pelita I sampai dengan Pelita IV, harus pula menciptakan landasan yang mantap untuk memasuki tahap tinggal landas pembangunan nasional dalam Repelita VI.

Pemantapan kerangka landasan di bidang perumahan meliputi beberapa hal, sebagai berikut: (a) Pengendalian pembangunan fisik yang berwawasan tata ruang dan lingkungan, (b) Peningkatan peran Pemerintah Daerah dan sektor usaha swasta dan masyarakat; (c) Peningkatan peranan dan kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan; (d) Penyempurnaan sistim kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; (e) Peningkatan tabungan masyarakat untuk pembiayaan perumahan serta pengurangan subsidi; (f) Penyempurnaan sistim pembiayaan di sektor formal dan non-formal dan (g) Pola penyediaan lahan dan prasarana pemukiman dalam skala besar.

Dengan bekal pengalaman dalam pelaksanaan Pelita I sampai dengan Pelita IV sekarang ini, kita harus memantapkan kerangka landasan pembangunan bagi tahap tinggal landas pembangunan nasional dalam Pelita VI.

Digitized by Google

Budaya Kritik Kita Antara Cara dan Kebutuhan

Kritik mendapat sorotan lagi. Beberapa waktu berselang, masalah ini ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan, termasuk pakar-pakar disiplin ilmu sosial dan kenegaraan. Perbincangan, perdebatan dan tukar pendapat sekitar kritik menghasilkan konsensus bahwa kritik adalah kebutuhan. Dengan demikian, dia diperlukan. Tapi yang tetap menjadi persoalan ialah bagaimana cara melontarkan kritik?

Adalah FABRI di DPR yang belum lama ini melontarkan pernyataan pers bahwa kritik "diperlukan, asal memperhatikan cara penyampaiannya." Kontan saja sejumlah tanggapan dari para ahli analisa kritik bermunculan di surat khabar. Seminar dan diskusi dengan tema utama, kritik, pun diadakan.

Ahli sosiologi terkemuka Indonesia, Prof Dr Selo Soemardjan, dalam satu kesempatan diskusi secara berkelakar mengatakan bahwa kritik yang dapat diterima adalah yang tidak membuat malu sasaran yang dikritik. Sementara Prof Dr Koesnadi Hardjosoemantri, rektor Universitas Gajah Mada berpendapat, kritik yang bisa diterima adalah yang selaras dengan kondisi sosial budaya kita. Ia (kritik) membutuhkan pengucapan khas dan membumi di alam Indonesia. "Kritik tidak bisa diluncurkan begitu saja, tanpa menunjukkan imbangan alternatif."

Namun di mata Sarwono Kusumaatmadja, Sekjen Golkar yang kini Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, kritik harus dilihat secara lebih fundamental. "Orang harus memahami terlebih dahulu fungsi dasar kritik, baru mempersoalkan cara, karena gaya atau cara akan beres dengan sendirinya bila fungsi dasar kritik dipahami," katanya. "Jadi jangan dibalik."

Menurut Sarwono, fungsi dasar kritik adalah, (1) sebagai media menemukan alternatif; (2) sebagai mekanisme kontrol dan (3) dia diperlukan karena memang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. "Kebebasan berpendapat sendiri adalah bagian dari demokrasi. Jadi dengan kata lain, tidak ada demokrasi tanpa ada kritik."

Sarwono Kusumaatmadja

Tanpa pretensi untuk menunjukkan mana cara terbaik melemparkan kritik, Wakil Ketua DPR/MPR Saiful Sulun, menyebut kritik yang bisa diterima "adalah kritik yang sehat." Dengan demikian mempersoalkan cara seperti yang dikehendaki oleh FABRI, dianggap ikhtiar yang benar. Kritik menurutnya, adalah ungkapan atau pernyataan sikap yang menolak atau tidak sependapat dengan suatu keadaan, aturan atau policy.

Sebuah kritik, kata Gunawan Mohamad, budayawan yang kini Pemred mingguan berita *Tempo*, tidak hanya sekedar sindiran. Dia sebenarnya berisi evaluasi terhadap sebuah peristiwa atau keadaan. Baginya, mempersoalkan cara penyampaian kritik menimbulkan kerumitan tersendiri. "Kritik yang terlampau halus dilontarkan terkadang tidak efektif, karena bisa saja sebuah kritik tidak ditanggapi karena sasaran kritik menganggap kritik sama dengan pujian. "Kita menghendaki kritik yang sesuai dengan kebudayaan kita, tapi yang namanya kebudayaan kita (Indonesia) belum terlalu jelas," ujarnya. "Budaya kritik yang sesuai dengan falsafah Pancasila pun masih memerlukan diskusi panjang."

Bukan Senang Tak Senang

Walaupun kritik adalah kebutuhan yang wajar dalam totalitas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, namun menurut Sarwono "hanya orang sakit jiwa saja yang senang dikritik." Ibarat obat, tidak ada orang yang senang makan obat, kecuali pecandu narkotika. Jadi dalam masalah kritik ini, persoalannya jangan dikaitkan senang atau tidak senang. "Tapi dia diperlukan."

Bahwa orang akan bereaksi terhadap kritik yang diluncurkan kepada dirinya, itu merupakan mekanisme pembelaan yang wajar. Membalas kritik dengan kritik juga sebuah bentuk kritik. "Ini bagus," kata Sarwono. Dalam konteks ini, kritik memang tidak perlu disukai, karena tidak enak. Tetapi karena kritik itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditolak selama masih ada kehidupan, maka dia diperlukan.

Sejalan dengan Sarwono adalah pendapat guru besar Fakultas Hukum UI yang kini menjabat Wakil Ketua BP7, Padmo Wahyono SH. "Karena anggota masyarakat dimana kritik biasanya berproses adalah manusia yang berperasaan dan berakal budi, maka terhadap kritik orang akan selalu bereaksi. Kalau ada orang yang memberikan pipi kirinya ditampar setelah pipi kanan dihajar, hal semacam itu adalah perilaku kuno dan mungkin hanya terdapat dalam dongeng," kata-

Digitized by Google

nya.

Menurut guru besar ini, apresiasi terhadap kritik berkaitan erat dengan kemampuan nalar seseorang atau suatu bangsa. Semakin rasional seseorang, akan semakin tinggi apresiasinya terhadap kritik. Dan Sarwono menambahkan semakin maju suatu bangsa, semakin tinggi kebutuhan akan kritik.

Padmo coba menjelaskan esensi kritik dari sudut kenegaraan. Menurutnya, sepanjang sejarah kenegaraan, kritik mempunyai peran yang sama. Perbedaannya terletak pada kesanggupan tiap negara untuk mempolakan kritik menjadi sistim. Kritik yang dipolakan menjadi sistim agaknya tergantung pada keyakinan terhadap dialektika these-antithese-sinthese. Dalam pola ini, kebenaran dan kemajuan diyakini sebagai buah dari proses pertentangan yang terus-menerus.

Pola seperti ini memang tidak membudaya dalam masyarakat kita, tapi cukup berpengaruh, sehingga ada yang coba memakainya dalam hidup berkelompok. Agar sistim seperti ini bisa berjalan, dibutuhkan kemampuan intelektual yang tinggi, serta kondisi dimana emosi tidak lebih berkuasa daripada nalar. "Sebab bila kritik dipola dalam sistim yang konsekuensinya adalah pengakuan terhadap pertentangan yang terus menerus, maka untuk masyarakat tertentu, kritik dalam bentuk seperti ini akan menumbuhkan keresahan," ujarnya. Dan kita, berdasarkan kondisi-kondisi obyektif yang berkembang, tidak meladeni kritik dalam pola dialektika seperti ini.

Mempersoalkan cara, agaknya dibutuhkan pembicaraan panjang. Namun seperti kata Sarwono, untuk menumbuhkan kritik hidup secara wajar, selain dibutuhkan pemahaman terhadap fungsi-fungsinya yang esensial, juga diperlukan kesadaran bahwa kita harus bisa menerima suatu yang tidak kita sukai sekalipun. Ini *state of mind* yang mendukung tumbuhnya kritik secara sehat.

Ada banyak ungkapan bernada arif yang mengharapkan kritik berproses secara sehat. Kita mengenal berbagai himbauan dan harapan agar kritik yang dilontarkan sebaiknya tidak destruktif, berdasar fakta-fakta otentik, mendidik, bertanggungjawab dan sebagainya. Syarat-syarat yang dibebankan atas kritik ini, membersitkan satu hal, yakni, kritik dibutuhkan, tapi cara juga penting.

Kritik memang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana membuat sasaran kritik "senang" dengan kritik? Ketentuan formal dalam hidup kenegaraan, seperti diungkapkan Padmo Wahyono, memang ada. Yaitu UUD 1945. Di dalamnya fungsi dan tempat kritik telah diatur dan diakui.

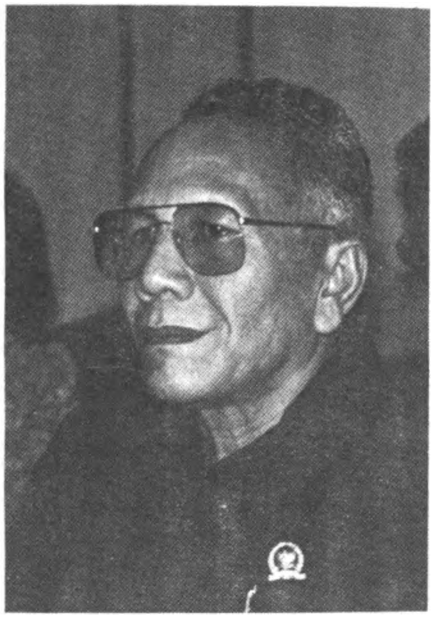

Saiful Sulun

Bila suara-suara dalam masyarakat kita pantau secara sempurna, maka terasa bahwa ada semacam kengerian melontarkan kritik, apalagi terhadap orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan. Kritik akhirnya dianggap sebagai hal yang riskan. Dan dalam mempersoalkan kritik, terasa ada dua front diametral, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Menurut Sarwono dalam masyarakat akan selalu ada orang yang kebal hukum atau lembaga yang seolah-olah tidak mempan terhadap kritik, sehingga pengeritik akhirnya ngeri sendiri. Tapi harus diakui, tidak ada negara di dunia yang tidak menganggap penting kritik. "Negara atau pemerintahan yang mengabaikan kritik akan jebol dengan sendirinya," ujarnya.

Dan Saiful Sulun misalnya beranggapan tidak benar kalau dikatakan kritik terhadap pemerintah terasa sulit. Pemerintah, katanya, semakin terbuka terhadap kritik. Ini tertuang secara eksplisit ketika Presiden Soeharto dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI pada tanggal 11 Maret lalu, meminta agar DPR melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan, "agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang tidak perlu."

Walaupun pemerintah membuka diri terhadap kritik, namun cara penyampaian tetap penting. "Kritik itu harus memperhatikan sopan santun serta tidak memecah-belah," katanya. Pemerintah sebagai lembaga memang mempunyai apresiasi yang baik terhadap kritik. "Bahwa ada pejabat tertentu yang tidak suka dikritik, itu adalah persoalan oknum, bukan pemerintah," ujarnya.

Trauma

Dalam penilaian Sarwono, pemerintah sekarang bahkan mempunyai apresiasi yang makin baik terhadap kritik. Digiatkannya pengawasan dewasa ini merupakan indikasi membaiknya apresiasi tersebut. Bahwa dalam beberapa hal, terutama yang menyangkut stabilitas, pemerintah "seolah-olah" tidak begitu ramah terhadap kritik, hal itu disebabkan oleh trauma tumbangnya Orde Lama.

Orde Baru terbentuk atas dasar kritik yang sangat dahsyat terhadap Orde Lama. Bila kritik mampu menumbuhkan sebuah sistim, maka kritik juga mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menciptakan sebuah sistim. "Akhirnya orang mulai waspada terhadap kritik karena ia memiliki daya hancur yang luar biasa," ujar Sarwono.

Tapi yang penting buat kita sekarang ialah bagaimana tetap memelihara dan menumbuhkan iklim yang menyadarkan orang akan pentingnya kritik sebagai kebutuhan. Suasana itu kini lebih baik dibanding masa sebelumnya. Bagaimana pun juga kritik akan melembaga. Persoalannya sekarang apakah kita mau melawan kritik atau tidak. Pada saat kritik melembaga, kita harus mengakui bahwa yang namanya kepuasan itu tidak pernah tampil dalam wujudnya yang ideal. Ini berarti kritik akan selalu hidup selama ada kehidupan. "Kritik akhirnya otomatis ada, baik di negara maju maupun berkembang, baik di pemerintahan yang korup maupun bersih," ujar Sarwono.

Namun di luar trauma dan alasan stabilitas, kualitas kritik yang berkembang dalam masyarakat kita sebenarnya juga bergantung pada persepsi masyarakat sendiri tentang kritik. Ada yang takut omong karena memang tidak bisa omong, lantas sebagai kompensasi menuduh sistim (baca pemerintah) yang tidak memberi keleluasaan untuk itu. Apresiasi terhadap sejumlah premis budaya, seperti keengganan untuk tidak membuat orang lain merasa tersinggung, orang yang lebih tua

Digitized by Google

selalu memperoleh hak penghormatan, dan juga budaya feodalisme, adalah kendala lain yang turut mempengaruhi kehidupan kritik itu sendiri.

Kritik memang bersifat multi media. Artinya dia bisa disalurkan lewat berbagai sarana dan bentuk. Salah satu media formal konstitusional yang mempunyai legitimasi dalam melaksanakan kritik sebagai pemenuhan fungsi kontrol, adalah lembaga perwakilan rakyat. Tetapi terhadap DPR, banyak suara yang melontarkan ketidakpuasan atas fungsi lembaga ini dalam melakukan kritik.

Atas keluhan seperti itu, Saiful Sulun coba memberi penjelasan. Menurutnya, fungsi kontrol yang dilakukan DPR selama ini cukup berbobot. Dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah, kritik dan kontrol disampaikan secara terbuka dan bahkan tajam. ''Hanya karena kita ini masih menghargai sopan santun, maka kritik-kritik itu tidak untuk dimuat di koran,'' ujarnya.

Banyak sekali kritik dan saran DPR yang didengar dan dihargai oleh pemerintah. Dalam rapat kerja, misalnya, DPR membicarakan berbagai hal termasuk penyimpangan-penyimpangan dalam program pelaksanaan pembangunan yang diupayakan pemerintah.

Dan kalau terhadap peranan DPR orang merasa tidak atau belum puas, menurut Sarwono yang sebelum menjadi menteri adalah anggota DPR, memperlihatkan bahwa kritik mulai membudaya. ''Karena salah satu indikasi dalam kehidupan kritik adalah orang selalu merasa tidak puas dengan apa yang ada. Demi kepentingan kritik, hal itu positif,'' ujarnya.

Orang cenderung untuk menilai DPR berfungsi atau tidak dari sudut peranannya di bidang yang nonlegislatif. Tapi harus diingat, fungsi kritik DPR sebenarnya sudah built-in dalam peranannya di bidang pembuatan perundang-undangan. Dalam bidang ini ''siapa yang berani bilang DPR tidak berfungsi?''

Dalam bidang pembuatan perundang-undangan ini peranan DPR sangat besar, bahkan substansial. Perubahan KUHP menjadi KUHAP adalah contoh bahwa DPR telah berfungsi baik. Dan seandainya masyarakat berkesempatan mengikuti pembahasan terhadap RUU yang masuk ke DPR, akan terlihat betapa kritik-kritik yang berkembang di sana sangat tajam. ''Hanya saja kritik-kritik itu tidak semua keluar di surat khabar, karena surat khabar bukan bulletin DPR. Dan kalau surat khabar memuat utuh perdebatan dan pandangan DPR terhadap RUU, maka ruang yang diperuntukkan bagi berita lain tersita. Dan celakanya, kalau ada surat khabar yang melakukan itu, pasti tidak laku,'' ujar Sarwono.

Gunawan Mohamad

Bagaimana pun juga, tidak akan dijumpai di negara manapun di mana rakyat setuju sepenuhnya dengan peranan yang diemban para wakilnya di DPR.

Dan tentang lembaga pers? Terus terang, pers berperanan sangat vital dalam menyalurkan kritik, karena dia mempunyai power dan sarana yang menjangkau publik. Dia bisa membentuk perasaan dan reaksi. Tapi kritik pers, kita agaknya masih dihinggapi trauma pembredelan. ''Pers kita agaknya masih harus mengolah diri untuk mendapatkan persepsi dan apresiasi yang tepat mengenai batasan bebas dan bertanggungjawab. Efektifnya fungsi kritik pers, sangat tergantung bagaimana dia pintar-pintar mendefinisi tentang kebebasan dan tentang tanggungjawabnya,'' ujar Sarwono.

Namun pers yang bebas, seperti yang diperlihatkan di negara-negara Barat, bukannya tanpa cacat. Kebebasan pers disana terkadang menindas orang yang tidak berdaya, tetapi pers pun tidak bisa berbuat banyak setelah si korban jatuh. Skandal Watergate yang menjungkalkan Presiden Nixon dari tahtanya di Gedung Putih, sebenarnya hanya dilakukan oleh beberapa penerbitan (pers) di New York dan Washington. Tidak semua pers Amerika melakukan itu. Karena seperti kemudian menjadi jelas, Nixon ternyata diakui oleh kalangan luar negeri seperti presiden yang paling matang dalam masalah-masalah internasional.

Kita memang tidak perlu meniru kebebasan pers seperti itu. Untuk kita fungsi kritik pers telah ditentukan kaidahnya, yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab. Format operasionalnya yang pas, memang masih harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Tapi yang juga penting adalah persepsi orang pers sendiri terhadap kebebasan yang bertanggungjawab itu.

Dan bagi Gunawan Mohamad, kritik yang dilancarkan pers memang diupayakan agar diperhalus. ''Sebab kalau kritik itu diperkeras pasti ada yang tersinggung,'' ujarnya.

Budaya Politik

Bila kritik dalam konteks perbedaan pendapat tidak dipolakan dalam sistim di negara kita, sebagaimana lazimnya di negara-negara Barat yang liberal, maka bagaimana kritik itu sendiri dalam budaya politik kita?

Padmo Wahyono yang ahli hukum tata negara coba mengurai panjang lebar. Kita memang tidak mempolakan kritik jadi sistim. Soal dialektika yang terus-menerus antara these-antithese-sinthese dalam rangka mencapai kebenaran yang teruji, boleh saja dijadikan sistim di negara liberal, tetapi tidak disini.

Di negara-negara liberal, pola dialektika dianggap baik dan dijadikan sistim. Orang atau kelompok yang sependapat berkoalisi untuk merebut kekuasaan, sementara yang tidak sependapat mendefinisi diri dalam kelompok oposisi. Dengan demikian beda pendapat yang bersumber pada kritik dijadikan sistim, dengan asumsi bahwa dengan sistim itu akan terjadi sinthese baru.

Karena dialektika ini cocok, maka sistim pun menumbuhkan keharusan untuk bertentangan. ''Maksudnya kalau lawan bicara A kita harus bicara B supaya hasilnya C,'' jelas Padmo. Tapi dialektika ini tidak bersifat permusuhan karena telah sangat fungsional. ''Bila sistim atau mekanisme ini dipraktekkan dalam budaya politik di Indonesia akan menimbulkan permusuhan. Persoalannya, kita harus jujur mengakui, ''orang Indonesia belum bisa memisahkan antara rasio dengan emosi,'' ujarnya.

Sistim yang kita anut ialah tidak membudayakan pertentangan untuk menghasilkan sinthesa, tetapi musyawarah. Namun ahli hukum ini menya-

Digitized by Google

yangkan karena terjadi kerancuan dalam pengertian sistim musyawarah ini. Bahwa musyawarah untuk mufakat, itu betul. Tapi musyawarah itu sendiri, seperti termaktub dalam penjelasan pasal 3 UUD '45, adalah tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memperhatikan semua aliran/pemikiran yang ada dan terjadi dalam masyarakat. Tapi tidak ada aliran yang berkoalisi. "Disini lah bedanya sistim musyawarah dengan liberal." Dalam sistim liberal aliran yang berbeda atau yang tidak sependapat, praktis masuk dalam kubu oposisi, sedangkan dalam sistim musyawarah tidak ada oposisi karena MPR memperhatikan semua aliran yang berbeda tersebut. Sehingga oposisi tidak menjadi sistim.

Tapi bagi Indonesia yang tidak mengenal sistim oposisi, penafsirannya harus jelas. Beda pendapat ada di Indonesia. Tetapi kalau yang berbeda pendapat membentuk oposisi, tidak dipolakan dalam sistim yang kita anut. Kita tidak mengenal oposisi kecuali musyawarah. Antara musyawarah dan mufakat pun harus ditafsirkan secara jitu. Musyawarah menurut Padmo adalah cara berembuk, sedangkan mufakat adalah cara mengambil keputusan. "Jangan sampai pesawat yang sudah harus berangkat, tetapi ditunda karena menunggu musyawarah," ujarnya bercanda. Dalam sistim liberal, tidak ada musyawarah, tetapi aklamasi.

Beda pendapat dalam sistim musyawarah tidak menjadi persoalan kita, karena kita memang tidak mempolakannya jadi sistim. Yang menjadi soal sekarang ialah bagaimana kalau terjadi beda pendapat yang menyangkut ketatanegaraan. Sistim kita mengatur itu. Kalau terjadi perbedaan pendapat dalam sistim ketatanegaraan, misalnya kalau DPR berbeda pendapat dengan Mandataris, maka Majelis (MPR) bisa memanggil Mandataris untuk mempertanggungjawabkannya kepada Majelis. Kalau ada perbedaan pendapat antara DPR dengan pemerintah soal APBN, maka yang dipakai adalah APBN tahun sebelumnya.

Jalan keluar seperti ini tidak ada di negara lain. Dalam sistim kita, beda pendapat yang relevan adalah antara eksekutif dengan legislatif. Sedangkan beda pendapat dalam atau antara peradilan, masih ada jalan keluar yaitu lewat grasi, kasasi dan lembaga terakhir untuk menyelesaikannya ialah Mahkamah Agung.

Beda pendapat mengenai GBHN pun disediakan mekanismenya, yaitu lewat rapat-rapat komisi. Di negara lain, pembahasan GBHN hanya terbatas dalam sidang pleno. Bagi orang Barat sistim seperti ini dinilai agak aneh. Dalam rapat komisi-komisi terjadi perbedaan pendapat, tetapi setelah di pleno, bisa mufakat.

Padmo Wahyono SH

Kritik Yang Berbudaya

Kritik memang problema yang pelik tapi menarik. Dia ada dan tak mungkin terbendung, selama masih ada kehidupan. Memang ada soal bahwa kritik yang begitu dibutuhkan dalam suatu kehidupan yang demokratis berdampak tersentuhnya emosi seseorang. Maka terhadap kritik, pasti timbul reaksi yang bisa berdimensi jamak.

Terlepas dari itu semua, kita memang mempunyai konsensus tentang kritik ini. Konsensus itu ialah, kritik sebagai penyalur perbedaan pendapat tidak dilarang, asalkan dia disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya kita. Dengan kata lain, kita menumbuhkembangkan kritik yang berbudaya dan beradab.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa belum lama ini di Jakarta, Pangab Try Sutrisno secara gamblang memberi sejumlah kriteria kritik yang dikehendaki itu. Antara lain, kritik-kritik yang obyektif, didukung data otentik, konstruktif dalam arti mendorong pihak yang dikritik memperbaiki diri. Pangab juga menyatakan bahwa asal dalam konteks yang konstruktif, ABRI pun bisa dikritik. Terus terang, ABRI adalah wilayah yang selama ini jarang disentuh sasaran kritik.

Bila demikian, kita sebenarnya mempersoalkan cara dalam menyampaikan kritik. Walaupun orang seperti Sarwono menganggap mempersoalkan cara kritik sama dengan membalikkan prioritas kritik itu sendiri, namun masalah cara ini tetap penting. Dan kendati Gunawan Moehammad menyangsikan efektivitas kritik yang terlampau halus, karena bisa-bisa sasaran kritik malah merasa senang karena dikira kritik sama dengan pujian, namun sekali lagi, cara tetap penting.

Menurut Gunawan, untuk menemukan cara kritik yang baik, terlebih dahulu harus dilihat siapa dan apa sasaran kritik. Karena orang yang mau dikritik memiliki selera yang berbeda-beda, maka cara penyampaian harus sesuai dengan selera tersebut.

Karena menyangkut selera dan cara, maka persoalan kritik akhirnya berpulang kepada masalah budaya kritik itu sendiri. Maksudnya, apakah ada akar-akar budaya yang mampu meredam kritik yang diluncurkan sehingga efektif? Ada yang bilang kritik gaya wayang (baca: Mau Kritik? Wayang Bisa Menjadi Media) merupakan contoh kritik yang halus tapi menyentil itu, yang tentu saja berakar dari kultur Jawa. Atau dalam istilah Pangab, kritik yang mengkilik-kilik.

Menjaga perasaan, adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ini adalah premis tersendiri dari kultur kita dalam konteks penyampaian kritik. Kita memang, mempunyai konsensus tentang kritik yang sesuai dengan budaya Pancasila. Tetapi seperti kesangsian Gunawan, konsensus yang terlampau ideal ini, bisa menimbulkan kesulitan tersendiri. Karena budaya Indonesia itu selalu berkembang, dan budaya Pancasila pun masih memerlukan diskusi yang teramat panjang dan rumit.

Karena kritik, seperti diyakini Sarwono, akan melembaga, maka diperlukan semacam kaidah yang gamblang. Karena akan melembaga, maka kritik akhirnya membentur kehidupan masyarakat baik di sektor formal maupun nonformal. Sebab bila hanya mempersoalkan cara, tanpa kaidah yang jelas, kritik yang memang dibutuhkan itu harus melalui mata rantai apresiasi dan persepsi yang terlampau panjang. Kritik yang berbudaya, sepertinya harus melalui birokratisasi diri dan self censoring yang bermata rantai panjang.

Karena kritik harus melalui tahap-tahap self censoring seperti ini, maka muncullah kesan seolah kritik agak tersumbat salurannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak saja mempersoalkan budaya kritik yang sesuai dengan kondisi kita, tapi juga berkepentingan terhadap kritik yang berbudaya. □ (LT/BM/DT/RS/S)

Digitized by Google

Mau Mengeritik? Wayang Dapat Menjadi Medianya

Lakon Banjaran Bimo yang dipagelarkan rutin sekali sebulan selama tahun ini, dalam salah satu episodenya, menceritakan tentang gugurnya Dursasana. Dursasana yang adalah adik Prabu Suyudana, seorang Pangeran dari kubu Hastina, dilukiskan sebagai tokoh yang emosional, tidak sabaran, penuh humor, dan sangat tunduk kepada perintah-perintah yang diberikan oleh abangnya yang adalah Raja di Hastina, Prabu Duryudana atau Suyudana. Pada suatu saat Sang Dalang melakonkan Dursasana, dengan mendialogkan Patih Sengkuni dengannya, dalam mana dibicarakan tentang sibuknya Dursasana karena mendapatkan perintah dari kakandanya untuk bebenah dan membersihkan alun-alun.

Dialog yang dijalin sedemikian lancar serta humoristis itu memancing banyak ketawa, serta mengena kepada yang dituju, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto. Wiyogo, yang waktu itu baru saja menjadi gubernur DKI, dan pada malam itu mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan wayang Bimo yang dipagelarkan, memang berada di sana sampai tengah malam. Sindiran bebenah alun-alun oleh Dursasana, memang ditujukan kepada pak Gubernur, karena Wiyogo yang rupanya berpedoman banyak bekerja sedikit berbicara itu, benar-benar sibuk membenahi DKI-nya, yang tidak pernah rapih karena masalah-masalah yang multikompleks, sehingga suatu saat gubernur menyadari pula bahwa mengasuh DKI Jakarta, tidak usah mengharapkan bintang Prasamya Nugraha, karena agak musjkil pada masa-masa sekarang ini. Bagi Wiyogo, kerja lebih penting dari pada Prasamya itu. Dan, Dursasana benar, karena dia memang sedang membenahi alun-alun, yang tidak pernah bersih dari sampah.

Kritik, dapat dilemparkan melalui pagelaran wayang, melalui tokoh siapa saja, dengan cara yang humoristis, tetapi kena. Ini tentu saja tergantung dari kemahiran sang Dalang dalam mempegelarkannya. Baladewa, saudara Kresna, seorang raja dari Madura, adalah menantu Prabu Salya, raja di Mandaraka. Meskipun dia keluarga Pandawa, tetapi setelah menjadi menantu Salya, berpihak kepada Kurawa, walau dia sebenarnya bersikap netral, karena tidak senang ber-

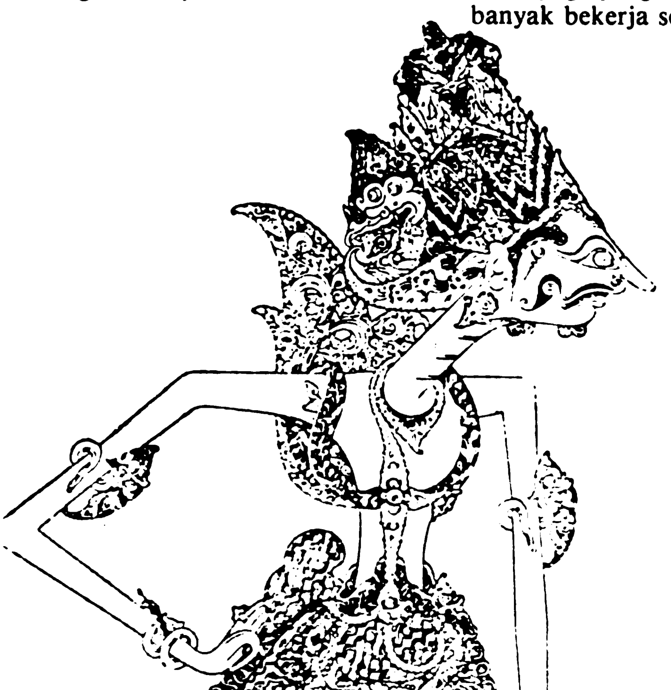

Prabu Baladewa

Raden Puntadewa

Digitized by Google

perang. Pada suatu adegan, dia bertemu dengan beberapa tokoh yang kurang penting di dalam pewayangan. Dia agak emosional, karena pihak lain tidak mengenal siapa dia. Maka katanya: "Lho, bagaimana kalian tidak tahu siapa saya. Apakah kalian tidak pernah baca koran... tentang diriku setiap kali keluar di surat kabar.... (Memangnya di Hastina ada koran?).

Kritik mikro, dan makro

Patih Harya Sengkuni, adalah sang maha Patih di negeri Hastina. Dia merupakan tokoh penghasut, serta seorang strateeg. Tetapi strateginya, justru membakar-bakar pihak Kurawa, agar permusuhan dengan Pandawa makin hari makin membara.

Tokoh ini, tokoh tua, berpengalaman, pandai, tetapi juga culas, disamping kerap berhumor. Karena ketokohannya yang tua agak renta, bila berjalan tertatih-tatih. Dari dia, kerap kali mengalir kritik, baik kritik ke dalam secara mikro, maupun kritik ke luar yang bisa bersifat umum bahkan bersifat nasional.

Pada suatu adegan, Patih Sengkuni harus menghadapi seorang tamu, yang adalah raja dari negeri seberang, karena Prabu Duryudana tidak berkenan menemuinya. Banyak dialog humor dilontarkan. Ketika raja seberang memaksanya untuk cepat disampaikan pesannya kepada sang Raja, maka Sengkuni, kendati jengkel, menggerundel: "Yah, orang tua seperti saya ini kini hanya menjadi pesuruh anak-anak muda saja. Akan menjalani sendiri tidak sempat, tetapi hanya menjadi pesuruh saja.... Juga, ketika akhirnya Prabu Suyudana tetap tidak berkenan menemui, dan raja dari seberang diusir, tetapi tidak mau pergi dari negeri Hastina, maka bertanyalah Sengkuni: "Lho, paduka tidak mau pergi dari sini, ini negerinya siapa..." dan jawab Raja seberang: "Ini kan tempat untuk semua orang...." (bila dikaji, maka ini adalah kata-kata yang diucapkan seorang sosialis...).

Satu adegan, yang mengandung kritik mikro, yaitu tentang sikapnya terhadap Ki Dalang, yang dimediakan melalui forum pertemuan antara Kartamarmo, adik Duryudana, ketika melaporkan gugurnya Resi Durna. Dengan sistimatis dilaporkan oleh Kartomarmo perjalanan Resi Durna menuju palagan, dan bagaimana para Pandawa, yang semuanya adalah bekas murid sang resi, menghadapinya. Ketika dilaporkan bahwa Arjuna maju berhadapan dengan Durna, tetapi memilih untuk menghindarinya, Sengkuni berkomentar: "Meskipun Arjuna terkenal di dunia sebagai seorang pemanah ulung, dia tidak akan berani menghadapi Resi Durna, karena ini adalah gurunya. Arjuna adalah seorang yang tahu aturan, dan dia tidak akan berani membunuh Durna. Kepada sang Guru, memang murid sebaiknya tidak berani. Bila murid berani nantang gurunya, ya biar dia kena walat....

Dialog ini disampaikan sedemikian rupa, tetapi kena, karena sang dalang akan menghantam tim karawitan dan pesinden, yang kemahirannya diraih karena ajaran sang guru (dalang), tetapi kadang-kadang di dalam pagelaran dimana sang dalang membutuhkan, dia atau mereka telah menjalin komitmen dengan grup lain, bahkan menantang dengan menanyakan honornya berapa.... Ini memang kritik mikro, tetapi bagaimanapun juga, media ini bisa menjadi forum yang bagus, tanpa menyakitkan, tapi kena.

Dalam sebuah lakon yang diberi judul Semar Kuning, di mana diceritakan bahwa Semar, yang adalah punakawan, sehingga di dalam banyak hal ketokohannya mewakili rakyat banyak, diusir oleh Kresna, seorang Ksatrya dari Pandawa. Semar diusir, karena di dalam perhelatan yang diadakan oleh Kresna, dia menyuguhkan senandung yang isinya menyindir tuan rumah. Dalam lakon ini, tindakan Kresna memang tercela, sehingga Semar bermaksud memberi peringatan dengan cara yang halus. Kresna, mengagung-agungkan dirinya bahwa keturunannya Sang Hyang Wishnu, sehingga seakan-akan kebal terhadap hukum, baik itu hukum buatan manusia, maupun hukum Dewa-dewa.

Patih Haryo Sangkuni

Kresna dengan sombong mengumumkan bahwa dia titisan atau turunan Wishnu, sehingga segala tindak-tanduknya *can do no wrong* atau tidak dapat diganggu gugat. Dia pun bertindak sewenang-wenang, apalagi terhadap para punakawan. Dan, suatu saat salah seorang anggota kerajaan berunding dengan Pandawa, bahwa rakyat telah sangat gelisah dengan tingkah lakunya Kresna, bahkan tidak ada orang berani berkomentar atau memberikan pendapatnya, karena setiap kali berani mengemukakan pendapatnya, apakah itu benar, apalagi bila tidak benar atau tidak berkenan bagi sang penguasa (Kresna), maka jabatannya lah taruhannya. Bahkan, secara terang-teragan Kresna pernah berucap kepada salah seorang pejabat kerajaan begini: "Apakah kau ingin kehilangan posisimu, dengan menasehati diriku demikian?" (ini pastilah merupakan *kritik* yang sifatnya makro).

Tetapi, di dalam kehidupan ini, yang zalim pasti akan dikalahkan, cepat atau lambat, oleh kebenaran. Dan, ternyata Kresna yang mengaku dirinya Wishnu ini tidak dapat bertahan lama, bahkan pemberontakan disana-sini, dia tidak sanggup meredakan, dan dia menjadi sasaran pemberontakan itu. Ternyata kuncinya berada di tangan Kyai Semar, yang sementara itu berada di hutan untuk menyepi, karena merasa tidak terpakai, bahkan dihina. Para Dewa memerintahkan Kresna untuk menghadap Semar, minta ampun. Dewa berceloteh kepada Kresna: "Mana yang namanya Wishnu itu,.... Kok katamu kau ini titisan Wishnu, ternyata dengan percobaan demikian saja sudah tidak tahan menghadapi...."

Petruk Dadi Ratu

Bagi masyarakat pewayangan, *Petruk Dadi Ratu* merupakan sebuah lakon yang unik, tetapi banyak dikenal, dan hanya tokoh Petruk lah dari para Punakawan yang terdiri dari Kyai Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang pernah menduduki kedudukan terhormat ini, ialah menjadi Raja. Berbicara tentang Petruk Dadi Ratu, selalu ada jurusan kepada sebuah sindiran atau satire, cemoohan, karena Petruk yang asal usulnya dari seorang Punakawan atau bila diterjemahkan secara umum

Digitized by Google

adalah rakyat jelata, kok menjadi raja. Di sini lah letak uniknya, bahwa seorang rakyat menduduki suatu kedudukan tinggi. Hal demikian memang langka, bila kita berbicara tentang sistim pemerintahan yang sifatnya monarki. Ini tentu saja menggambarkan masyarakat sebelum republik berdiri, atau sebelum para demokrat memperjuangkan demokrasi. Namun demikian, sindiran klasik ini selalu dapat diterapkan pada segala masa dan periode, karena bila namanya sebuah sindiran, maka kapan saja dapat diterapkan, bahkan menjadi alat kritik yang paling manjur, tanpa menyinggung perasaan ataupun menyakitkan yang dikritik.

Adalah merupakan suatu kebetulan, bahwa Petruk saja yang pernah menjadi raja, sehingga tokoh Petruk yang mewakili rakyat banyak ini, menganggap adalah hak patennya bila berbicara tentang penyampaian kehendak rakyat. Petruk, yang anaknya Kyai Semar itu, bersosok tinggi, langsing, bermuka manis, dengan senyum yang senantiasa menarik hati, serta pandai berbicara dengan humor-humornya. Dia pernah menjadi Raja di negeri Ngrancangkencana, dan bergelar Helgeduelbek. Kesaktiannya sehingga dapat menjadi raja, dia peroleh karena melarikan surat Kalimahusada (dalam bahasa kerap disebut Jimat Kalimasodo), Pusaka milik Pandawa.

Tak seorang pun dapat mengalahkannya, bahkan tidak juga Dewa, karena memegang Kalimahusada kesaktiannya tiada bandingnya. Tetapi, karena dia ini saudara muda Nala Gareng, anak Kyai Semar yang sulung, maka dia takut kepadanya. Karena bujukan sang kakak, kendati secara fisik Gareng tidak meyakinkan, tetapi sebagai saudara tua, dia memiliki kharisma tertentu, sehingga Petruk kalah di hadapannya. Tokoh Petruk, bersama Semar, Gareng dan Bagong selalu bersama-sama, disebut punakawan atau penderek (pelayan, tetapi yang bertugas mengasuh) dari Pandawa. Yang paling banyak dipunakawani adalah sang penengah Pandawa, Raden Arjuna.

Bila Petruk Dadi Ratu, maka ada beberapa aspek yang masuk di dalam kritik yang disampaikan di sana. Petruk sendiri, yang mewakili tokoh rakyat jelata, bila mendapatkan kedudukan yang sedemikian tingginya (Raja), kadang-kadang menjadi seorang OKB (orang kaya baru) atau feodal gaya baru. Gelar yang dipakainya bisa saja

Petruk

satu meter panjangnya. Pernah misalnya di dalam lakon Petruk Dadi Ratu, gelarnya Sang Prabu Helgeduelbek, Kantong Bolong, Tong Tong Sot, Trotuk, Tritik, Dung Pyeng.... Apapun artinya, itu tidak perlu, yang penting, dia bisa saja berbuat apa-apa, karena dia ini adalah Raja.

Kritik yang terselip di situ justru adalah terhadap orang bawahan yang mendapatkan kedudukan tinggi, terus kena mental shock. Maka, Petruk pun berkelakuan aneh-aneh. Selirnya banyak sekali, memiliki Patih yang diberi gelar Patih Joyo Setliko (mustinya Joyo Sentiko, tetapi dikelirukan menjadi setliko karena setliko artinya seterika). Dan dalam suasana begini, sang Patih harus tunduk, karena Raja berkekuasaan absolut.

Maka, dalam lakon Petruk Dadi Ratu, biasanya dialog-dialog penuh dengan humor karena kelakuan Petruk yang eksentrik karena mental shock tadi. Sebaliknya, para Pangeran, bangsawan yang memiliki kerajaan seperti Amerta, Hastina, sementara terpaksa tunduk serta prihatin, karena mau tidak mau sang Petruk pemegang surat wasiat yang tiada tara nilainya bagi sebuah kekuasaan atau pemerintahan.

Dari aspek lain, dapat juga untuk sebuah satire, bahwa seorang punakawan atau rakyat, toh memiliki hak, sebagai manusia, untuk suatu kali berada di tempat yang penting. Hal ini tentu saja dapat diterapkan pada suatu tempat yang sifatnya demokratis, dengan mengenyampingkan, atau bahkan menghapus feodalisme.

Dalam banyak hal, tokoh Petruk, kerap kali menjadi semacam juru bicara bagi thema pagelaran. Segala sesuatunya yang berupa pesan titipan atau penjelasan-penjelasan kepada khalayak, maka Petruk lah yang berbicara. Bahkan, di dalam hal *entertainment* atau selingan hiburan yang disuguhkan dalam setiap pagelaran di dalam acara yang namanya Goro-Goro, maka Petruk lah yang berfungsi sebagai penyampai kepada khalayak atau penonton, atau di dalam menentukan gending-gending apa yang akan disuguhkan di dalam pagelaran itu, beserta penjelasan-penjelasannya.

Petruk dadi Ratu bahkan merupakan pemeo bagi seseorang, atau siapa saja yang naik derajatnya, dan terus mengadakan tindakan sewenang-wenang, meski dikamuflir dengan senyuman-senyuman manis khas Petruk, karena memang senyuman manis itu dimiliki Petruk secara alamiah. Di dalam kehidupan sehari-hari, sikap Petruk yang demikian itu disindirkan kepada orang yang mendapatkan derajat lebih tinggi atau memiliki kekayaan yang lebih, bersikap flamboyant, lupa kepada asal-usulnya, biasanya ada kecenderungan sombong, sewenang-wenang, sok bermacam-macam.

Seorang pakar di dalam pewayangan, di ruang tamu utamanya memasang dua buah wayang yang dilist dengan indahnya di atas kain beludru, tokoh Puntadewa, raja Amerta, dan Petruk, Raja Kantng Bolong. Seperti peraturan di dalam pewayangan, peletakan pada kelir, maka di sebelah kanan dalang atau khalayak, adalah tempatnya tokoh-tokoh yang lebih diunggulkan serta yang lebih baik. Sedangkan di sebelah kiri, adalah tokoh kelas dua.

Di ruang tamu pakar wayang tersebut, Petruk Kantong Bolong dihadapkan dengan Puntadewa, dan Petruk menempati sebelah kanan, sedangkan Puntadewa sebelah kiri. Ketika ditanyakan kepadanya, mengapa, termasuk pertanyaan yang dilontarkan beberapa diplomat asing yang berkunjung ke rumahnya, maka jawabnya "Petruk kini sedang menjadi Ratu, jadi layaklah dia menempati sebelah kanan. Sedangkan Puntadewa sementara biar berada di sebelah kiri, karena demokrasi adalah untuk rakyat".☐

(Maria Sugiharto)

Digitized by Google

Wapres, Waskat Dan Rapat Dinas

JAWA TIMUR agaknya mendapat kehormatan khusus karena penataran pengawasan melekat tingkat propinsi, dibuka langsung oleh Wakil Presiden Sudharmono SH, ketika melakukan kunjungan kerja empat hari di propinsi ini, Awal Agustus lalu. Kehormatan tersebut beralasan, karena Jawa Timur adalah propinsi pertama di Indonesia yang melakukan penataran pengawasan melekat tingkat daerah.

Seperti diketahui, pengawasan melekat merupakan ikhtiar pemerintah untuk lebih meningkatkan bobot pelaksanaan pengawasan dalam rangka menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu seluruh pejabat eselon I telah rampung ditatar pengawasan melekat yang dilaksanakan di Jakarta, akhir Juli lalu, yang kemudian disusul dengan penataran serupa di tingkat daerah.

Kunjungan kerja Wakil Presiden ke Jawa Timur memantulkan secara gamblang, bahwa pengawasan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kunjungan tersebut juga mengisyaratkan bahwa Wapres yang oleh Presiden Soeharto diserahi tugas mengkoordinir pelaksanaan pengawasan secara nasional, ingin melihat, mendengar dan mencek dari tangan pertama tentang kebenaran laporan serta fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Ini tentu sebuah contoh yang patut ditiru. Dari rangkaian kegiatan di Jawa Timur yang begitu padat, — kecuali membuka Musda Golkar Tingkat I Jatim dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Golkar —, semua kegiatan lainnya mengacu pada satu sasaran pokok, yaitu melaksanakan pengawasan.

Dan tatkala membuka penataran pengawasan melekat propinsi Jawa Timur, Sudharmono menegaskan bahwa pengawasan melekat adalah kegiatan yang inheren pada fungsi seorang pejabat. Dengan kata lain, pengawasan itu adalah fungsi yang melekat pada setiap jabatan yang dipangku oleh seseorang, baik dalam organisasi terkecil maupun organisasi besar, apalagi organisasi pemerintahan. Dan yang tidak

Kunjungan Wapres Sudharmono di Jawa Timur

kalah penting, pengawasan melekat yang digalakkan dewasa ini, tidak dilakukan dalam iktikad mencari-cari kesalahan.

Dalam rangka melakukan pengawasan ke bawah, Wapres selama kunjungannya di Jawa Timur, tidak saja membuka penataran pengawasan melekat, tapi langsung memimpin rapat dinas baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Dan dua kabupaten yang memperoleh kehormatan karena rapat dinasnya dipimpin langsung oleh Wapres adalah, Kabupaten Bojonegoro dan Sidoarjo.

Sederhana saja

Ada satu hal pokok yang selalu ditekankan Wapres selama kunjungannya di Jawa Timur ialah bahwa, kegiatan pengawasan adalah hal yang penting dan harus dilakukan secara terus-menerus. Bahwa sekarang dimasyarakatkan istilah pengawasan melekat, bukan berarti esensi dari pekerjaan pengawasan melekat itu tidak atau belum tersentuh dalam keseluruhan proses kerja instansi pemerintah selama ini.

Mungkin ada saja yang belum mengetahui apa sebenarnya pengawasan itu. Menurut Wapres, kegiatan pengawasan itu sebenarnya sederhana saja. Yaitu kegiatan mengikuti secara sungguh-sungguh, terus-menerus dan tertib, agar mengetahui apakah pelaksanaan dari sebuah rencana sesuai dengan rencana itu sendiri atau tidak. "Jadi kegiatan pengawasan adalah pekerjaan biasa yang mutlak dilaksanakan," ujar Wapres.

Sebuah rencana, tidak selamanya mulus dalam proses pelaksanaannya. Hambatan bisa saja muncul menghadang. Hal ini bisa disebabkan karena pelaksanaannya yang tidak sempurna, tapi bisa juga karena perencanaannya yang kurang akurat. Dalam kaitan dengan perencanaan, maka pada saat sebuah perencanaan siap dioperasionalkan, maka pada saat itu juga pekerjaan pengawasan berlangsung.

Kalau kini kita menggalakkan pengawasan melekat, menurut Wapres, tidak berarti pengawasan tidak mendapat porsi perhatian di masa-masa sebelumnya. Sejak Orde Baru, demikian Sudharmono, pemerintah berusaha melembagakan pengawasan. Di tingkat pusat, ada Irjen, di tingkat propinsi ada Irwilprop dan di tingkat kabupaten ada Irwilkab.

Namun lembaga-lembaga ini melakukan pengawasan dari luar. Ada satu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan dan yang melekat pada tanggungjawab seorang pimpinan, yaitu yang kita namakan pengawasan melekat. Pengawasan yang satu inilah yang kini digiatkan pelaksanaannya.

Alasannya? Menurut Sudharmono, ada beberapa pertimbangan strategis yang mendasarinya. Memasuki Pelita V (mulai 1 April mendatang) semua daya dan dana harus dimanfaatkan semaksimal dan se-efektif mungkin. Termasuk penggalakan kerja keras. Ini berarti pengawasan pun harus ditingkatkan. Karena, Pelita V sebagai era penciptaan kerangka tinggal landas agar dapat lepas landas pada Pelita selanjutnya, menuntut optimalisasi upaya di segala bidang.

Selain itu sejumlah kendala yang disebabkan oleh gejolak internasional, terutama di bidang ekonomi, merupakan sebab lain mengapa pengawasan melekat perlu digalakkan dewasa ini. Keadaan dunia yang sangat mempengaruhi efektivitas pembangunan kita, adalah gejolak harga minyak.

Digitized by Google

Wakil Presiden menjelaskan panjang lebar tentang gejolak harga minyak yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Minyak yang sejak lama menjadi andalan pembiayaan pembangunan dan penerimaan negara sejak tahun 1983, merosot terus harganya di pasaran dunia. Dari harga sekitar 30 dollar per barrel antara tahun 70-an sampai 1983, harga minyak anjlog terus sejak 1983, sampai pernah mencapai 8 dollar per barrel pada Agustus 1986. Seiring dengan itu, tentu saja penerimaan negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan terus merosot. Pada tahun 1986/1987, seiring dengan tekad OPEC mengkonsolidasi diri, harga minyak ketika itu membaik hingga mencapai 18 dollar. Tetapi menjelang akhir tahun anggaran itu, karena sejumlah anggota yang tidak disiplin dalam memproduksi minyaknya, maka harga sempat anjlog lagi. Belajar dari pengalaman itu maka untuk tahun anggaran 1988/1989 ini, Indonesia menyusun APBN dengan proyeksi harga minyak 16 dollar. Tapi Wapres mengingatkan agar kita waspada, karena harga minyak sekarang ini bergejolak antara 14 sampai 15 dollar per barrel.

Sumber dari kemerosotan harga minyak ini adalah jumlah persediaan yang terlalu banyak di pasaran. Penyebabnya antara lain, karena sejumlah anggota OPEC tidak menahan diri dalam memproduksi minyak mereka demi kebutuhan penerimaan negara masing-masing. Sebab lain ialah negara-negara maju mulai menggalakkan penggunaan energi alternatif, agar tidak terlalu menggantungkan diri pada minyak bumi. Dan Indonesia sebagai penghasil minyak bumi pun melakukan hal yang sama. Batubara yang harganya membaik di pasaran dunia akhir-akhir ini, pun digalakkan eksplorasi maupun penggunaannya.

Kondisi-kondisi obyektif ini lah yang menjadi perhatian pokok Wakil Presiden, baik dalam rapat dinas di Surabaya (tingkat propinsi) maupun di Bojonegoro, Sidoarjo dan Aceh. Seperti diketahui, dalam rangka membuka Pekan Kebudayaan Aceh, akhir Agustus, Wakil Presiden pun memimpin rapat dinas di daerah tersebut dalam rangka melaksanakan pengawasan melekat.

Kendala-kendala di bidang penerimaan, dan tekad melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan seoptimal mungkin, merupakan salah satu sebab mengapa Wakil Presiden harus turun sampai ke kabupaten untuk melihat dan mengawasi proses pengawasan melekat itu sendiri. Seperti dikatakannya di Bojonegoro, "pengawasan sebagai upaya mengoptimalkan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan, perlu diawasi pelaksanaannya."

Penerimaan yang bersumber dari minyak bumi memang terus merosot. Tetapi Wakil Presiden menegaskan, kemerosotan di sektor penerimaan migas, tidak berarti Indonesia kehilangan sumber pendapatan. Banyak potensi dalam masyarakat yang harus dipompa agar berguna bagi kelanjutan dan kelangsungan gerak pembangunan bangsa.

Potensi itu berada di sektor swasta dan anggota masyarakat pada umumnya. Kita yakin negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini menyimpan segudang kekayaan yang sangat tinggi potensinya. Masalahnya sekarang ialah bagaimana menggerakkan potensi itu agar bermanfaat.

Untuk itu maka potensi masyarakat dalam penggalian dana dan investasi perlu didorong lewat kemudahan-kemudahan peraturan. Oleh sebab itu Wapres mengingatkan aparat di daerah agar meniadakan peraturan perijinan yang tidak perlu. "Mata rantai birokrasi yang menghambat, hendaknya dihilangkan," ujarnya tegas.

Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, maka swasta dan swadaya masyarakat akan mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Logikanya, bila swasta bertumbuh pesat, maka investasi berkembang, produksi bertambah dan kebutuhan pembangunan terpenuhi. Tidak hanya itu. Tumbuh dan berkembangnya sektor swasta, akan

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN
P.T. INDUSTRI SANDANG I (PERSERO)

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
DAN
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan
Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

P.T. INDUSTRI Sandang 1 (PERSERO)

Jl. Patal Senayan I No.5 Jakarta 12210 Telp. (021) 5485383
(4 lines) Telex 45210 INSAN I IA, 44151 INSAN I IA

Digitized by Google

menciptakan penerimaan bagi pemerintah dari segi pajak.

Semangat Deregulasi

Kebutuhan untuk mempermudah proses investasi dan produksi sehingga partisipasi semua potensi dalam masyarakat tergalang, sangat kentara dari semangat deregulasi yang kini dicanangkan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ditambah dengan upaya debirokratisasi, kedua upaya ini (debirokratisasi dan deregulasi) seperti menghadirkan istilah keren. "Tetapi pada dasarnya sederhana saja. Yaitu bagaimana kita memberi keleluasaan berproduksi dan melakukan kegiatan ekonomi dan pembangunan semudah-mudahnya," tegas Sudharmono.

Semangat-semangat seperti inilah yang hendaknya menjiwai pimpinan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Tidak hanya itu. Wapres menekankan, dalam keseluruhan gerak pembangunan, pemda hendaknya mensinkronkan program-program sektoral dari pusat dengan program pembangunan daerah. Dan bagi gubernur, bupati, camat, tugasnya tidak hanya melaksanakan serta mendukung program sektoral, tapi sekaligus mengawasinya. Dengan demikian seorang pemimpin di daerah, tidak saja mengkoordinasi pelaksanaan program-program sektoral, tapi juga mengawasinya.

Latar belakang tentang kendala dan peluang serta keterbatasan yang dikemukakan Sudharmono dalam rapat-rapat dinas di Jawa Timur maupun Aceh dimaksudkan agar para pejabat di daerah memahami problematik pembangunan nasional, serta mengupayakan sekuat tenaga agar bagaimana meraih manfaat seoptimal mungkin dari keterbatasan itu. Dan karena itu pengawasan menjadi aktual.

Efektivitas pengawasan yang kini mendapat bobot perhatian istimewa, selain karena kita akan memasuki Pelita V dan menjelang era Strategi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, serta menciutnya sumber penerimaan migas yang menyebabkan kita semakin dikungkung oleh sejumlah keterbatasan, juga disebabkan oleh alasan stabilitas.

Menurut Sudharmono, stabilitas wilayah memainkan peranan yang penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Untuk mengetahui aspirasi dan keinginan yang berkembang di daerahnya, seorang pejabat di daerah bersangkutan harus well informed. Salah satu cara, ialah dengan melakukan pengawasan.

Rakyat kita sekarang, demikian Wapres, semakin rasional dan cerdas dalam menilai. Walaupun pembangunan selama ini telah menunjukkan hasil di berbagai bidang, tetapi seiring dengan kemajuan itu maka rakyat yang kian cerdas dan rasional itu, makin memiliki citarasa dan harapan yang lebih tinggi lagi. Mereka semakin rasional dalam menilai, apakah aparatur pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Apabila seorang pemimpin pemerintah di daerah mampu menjawab harapan rakyat ini secara sempurna, maka stabilitas di wilayahnya akan terjamin.

Untuk ini tentu saja pengawasan menjadi penting. Memang ada lembaga pengawasan yang secara fungsional bertugas untuk itu. Namun menurut Sudharmono, menggantungkan pengawasan kepada lembaga-lembaga

ASTEK

DIREKSI SERTA SELURUH JAJARAN
PERUM ASTEK
MENGUCAPKAN:

DIRGAHAYU 24 TAHUN GOLONGAN KARYA
20 OKTOBER 1988
D A N
SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai
Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan
Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

Digitized by Google

fungsional saja tidak cukup. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan yang memegang sebuah jabatan terhadap bawahannya. Dewasa ini pengawasan seperti itu dikenal dengan istilah pengawasan melekat.

Rakyat yang berdaulat dalam negara kita yang memegang prinsip demokrasi ini pun berhak melakukan pengawasan melalui saluran-saluran yang tersedia dan sah menurut konstitusi, seperti DPR(D). "Mereka (rakyat) bukan saja berkewajiban, tapi berhak mengawasi apakah kepercayaan yang diberikannya kepada pemerintah dilaksanakan dengan baik atau tidak," ujar Wakil Presiden.

Kotak Pos 5000

Ketika ditugaskan oleh Presiden untuk mengkoordinir pelaksanaan pengawasan, Wakil Presiden Sudharmono membuka Kotak Pos 5000 dengan maksud menampung keluhan dan saran serta informasi dari masyarakat ramai sebagai masukan yang berharga untuk tugas-tugas pengawasan. Dan di depan peserta rapat dinas di Bojonegoro, Wapres memberitahu bahwa sekitar 20 persen surat yang masuk ke Kotak Pos 5000 dalam empat bulan terakhir ini, berasal dari rakyat Jawa Timur! "Tidak perlu kaget. Ini menandakan bahwa rakyat Jawa Timur ini makin kritis dan rasional," ujarnya.

Wapres dalam kunjungannya di Jawa Timur selain membuka penataran juga memimpin rapat dinas.

Menurut Sudharmono, surat-surat yang masuk ke Kotak Pos 5000, bila hal itu menyangkut instansi tertentu di daerah, maka dikirim ke pejabat instansi tersebut untuk dicek kebenaran dari laporan warga bersangkutan.

Selain menjelaskan tentang hakekat dan kebutuhan pengawasan, Wapres Sudharmono sebenarnya melakukan pengawasan melekat itu sendiri dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur dan Aceh baru-baru ini. Dengan memimpin sendiri rapat kerja bahkan sampai ke tingkat kabupaten, Wapres ingin mencek kebenaran laporan-laporan yang disampaikan bawahannya di daerah-daerah.

Dan laporan bupati Bojonegoro yang serba menggembirakan, tidak sepenuhnya diterima begitu saja. Dalam kesempatan dialog dengan maksud "mencek sedikit-sedikit" kebenaran laporan pak Bupati, Wapres mengajukan pertanyaan, "apa ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi angka-angka yang dilaporkan pak Bupati?" Walaupun tidak ada yang berani, namun pertanyaan Wapres tersebut mempunyai makna bahwa setiap laporan harus dicek kebenarannya.

Kepada peserta rapat dinas, Wapres mengatakan, "kehadiran saya dalam rapat dinas ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan melekat, yaitu mengawasi bawahan saya para gubernur dan bupati." Pengawasan seperti ini perlu karena sebelum dikritik oleh orang dari luar, yaitu para inspektur apalagi dikritik oleh rakyat, lebih baik kita mengontrol diri kita sendiri. "Ini hakekat dari pengawasan melekat."

Ternyata kehadiran Wapres dalam rapat dinas ini bermanfaat. Paling tidak setiap jajaran pemda berusaha melakukan yang terbaik, termasuk laporan. Di Bojonegoro misalnya, Wapres akhirnya mengetahui bahwa jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu belum ada instansi yang menanganinya. Ketika angka anak usia sekolah yang tidak mampu ini ditanyakan kepada pejabat Depdikbud setempat, dijawab bahwa soal pendataan ada pada Dinas Sosial. Dan ketika ditanyakan kepada Kandep Sosial, jawabannya adalah "soal jumlah anak-anak dalam kategori ini adalah urusan Kandep Depdikbud." Mana yang benar?

Cukilan dialog Wapres dengan peserta rapat dinas di Bojonegoro ini membersitkan bahwa peninjauan di lapangan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sangat penting. Gema tentang niat Wapres untuk memimpin rapat dinas paling tidak telah memaksa pejabat di daerah untuk menampilkan prestasi yang lebih baik. Data-data laporan yang mungkin tidak tergarap sebelumnya, dicari. Para pejabat yang takut ditanya di forum rapat dinas tentang bidang yang dibawahinya, mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Memang tugas Wapres yang begitu banyak, tidak memungkinkannya untuk melakukan rapat dinas di setiap propinsi apalagi kabupaten. Andaikata bisa, maka gema dan efektivitas pengawasan melekat mungkin akan lebih semarak. Tapi satu hal penting yang dipesan Wapres kepada aparat pemda di Jawa Timur ialah, manfaatkan rapat dinas sebagai sarana pengawasan melekat.

Lewat forum rapat dinas itu, akan terjalin komunikasi timbal balik sebagai syarat bagi efektifnya pengawasan melekat. "Bawahan yang diawasi harus memberi laporan sejujur-jujurnya, jangan yang baik-baik saja. Sedangkan atasan yang mengawasi harus melakukannya dengan penuh rasa tanggungjawab," pesan Wapres.□

(Laurens Tato/Suwito)

Digitized by Google

Pemandangan Umum FKP Terhadap RUU Pendidikan Nasional

Fraksi Karya Pembangunan setelah meneliti naskah RUU dan penjelasan Pemerintah serta mengkaji sejarah, dapat memastikan upaya nyata yang telah ditempuh oleh Pemerintah serta segenap bangsa Indonesia sejak tahun 1947. Demikian banyak produk tentang penyelenggaraan pendidikan yang telah diterbitkan dan hasil didikan yang telah dicapai merupakan bukti upaya yang sungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Kalau kita lebih dalam lagi mengamatinya, maka keberhasilan tersebut mengandung pula tiga benih yang besar nilainya, bagi bangsa kita, yaitu : *pertama,* tumbuhnya keyakinan akan kebenaran tujuan pendidikan nasional yang bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional; *kedua,* tertanamnya rasa daya mampu dan rasa percaya diri bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh serta dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya tentu berhasil. *ketiga,* pengalaman selama berpuluh-puluh tahun telah menumbuhkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan membangkitkan naluri serta nalar kita akan tuntutan zaman yang selalu berkembang dan dengan demikian memacu keberanian mawas diri menatap kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Sebagaimana kita sadari keyakinan terhadap kebenaran tujuan, rasa daya mampu, dan kemampuan adalah sumber sukses menghadapi masa depan.

Sekarang Pemerintah menilai perangkat Undang-undang masa lalu yang kini masih berlaku sebagai dasar pengaturan pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan nasional kita.

Oleh karena itu, Pemerintah berhasrat menggantinya dengan Undang-undang yang materinya mengatur sistem pendidikan nasional. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan nasional mendatang akan merupakan satu sistim yang menyeluruh dan terpadu sebagai perwujudan Wawasan Nusantara. Yang didambakan adalah Undang-undang yang senantiasa mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan GBHN 1988 demi terbentuknya manusia Indonesia yang mampu melaksanakan pembangunan nasional dan terpenuhinya tuntutan ketahanan nasional serta tuntutan masyarakat. Dengan demikian undang-undang tersebut diharapkan bersifat mendasar, luas jangkauannya, dan memiliki daya laku berjangka panjang.

Kewajiban kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pola pikir dalam menanggapi hasrat Pemerintah tersebut di atas adalah merupakan kewajiban kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai UUD 1945 dan ketrampilan menciptakan kader bangsa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan Pembangunan Nasional jangka pendek, menengah dan panjang secara bertahap dan berkesinambungan serta berpedoman kepada "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)". Memupuk terus semangat perjuangan bangsa yang patriotik berjiwa kebangsaan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia Pancasila seutuhnya (materiil dan spiritual), diselenggarakan melalui pendidikan nasional dalam satu sistim Pendidikan Nasional.

Konsisten

Fraksi Karya Pembangunan lewat anggotanya dr. Bawadiman, dalam sidang paripurna DPR, 8 September lalu sangat menghargai sikap Pemerintah yang lugas dan penuh percaya diri dalam mengamati tantangan kenyataan dan masa depan. Alasan membenarkan sikap Pemerintah adalah, karena hasrat tersebut konsisten dengan tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang dan GBHN 1988 menyebutkan bahwa : Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional perlu segera disempurnakan sistim pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang mengenai pendidikan nasional. Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa di dalam pengertian pendidikan nasional sudah termasuk pengajaran nasional.

Latar belakang pemikiran Fraksi Karya Pembangunan dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang ini dipandang dari sudut peralihan generasi, bijaksanalah kalau kita segera meletakkan konstruksi dasar pendidikan untuk membentuk kader penerus yang tangguh dan tanggap dalam me-

Digitized by Google

masuki tahap tinggal landas.

Bagaimana pun sebagai insan Pancasila setiap siswa/mahasiswa tentu ingin mendapatkan keyakinan dan kepastian dalam usaha meraih keterampilan, ketahanan, serta kesempatan sebagai bekal untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya.

Rakyat memang selalu mendambakan suatu penyelenggaraan pendidikan nasional yang mantap dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan bagi putra-putrinya. Oleh karena itu wajarlah kalau masyarakat memberikan tanggapan serius setiap kali ada cetusan gagasan yang bernada perubahan kebijaksanaan pendidikan. Walaupun situasi dan kondisi memang acapkali menghendaki penyesuaian, akan tetapi kalau perubahan kebijaksanaan sering terjadi dan membawa akibat kian bertambahnya beban mereka, maka pada suatu saat akan timbul kerisauan. Kerisauan yang beberapa kali tersadap juga berkaitan dengan kesulitan yang mereka hadapi untuk memasukkan anaknya ke sekolah, biaya tinggi, sulitnya belajar, dan sulit mencari lapangan kerja setelah tamat belajar. Dikatakannya pendidikan dengan lapangan kerja merupakan pertama luasnya (kompleks) hubungan pendidikan dengan masalah sosial lainnya.

Ketanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan mempunyai segi yang positif sebagai balikan yang perlu diperhitungkan. Apalagi kalau hal tersebut dihubungkan dengan kesepakatan naisonal seperti yang tertuang dalam GBHN, bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah/sekolah.

Hal lain yang besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah faktor lingkungan. Dampak lingkungan dan faktor-faktor sosial yang potensial sebagai sumberdaya dan penyangga kehidupan manusia yang langsung atau tidak langsung bisa menghambat usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional antara lain adalah beberapa kerawanan sebagai berikut : aneka sumber alam yang belum maksimal tergali, termanfaatkan, atau terbina kelestariannya. Penyebab utamanya adalah kurang tersedianya tenaga ahli/terampil yang sebanding di samping terbatasnya sumber dana yang tersedia; Struktur geografi Indonesia yang terdiri atas 17.508 pulau (sumber: Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL 1987) menuntut penyesuaian lokasi/sekolah atau mungkin juga menuntut penyesuaian metode pendidikan; Jumlah penduduk yang besar, bertebar di seluruh pelosok tanah air dengan kepadatan yang tidak merata, dan pertambahan rata-rata 2,1% setahun sangat mempengaruhi penentuan lokasi sekolah dan pengaturan wajib belajar; Kondisi keluarga dan masyarakat yang dewasa ini masih kurang mampu berperan aktif dalam melaksanakan pendidikan informal berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar. Dilihat dari sudut ekonomi, kondisi ekonomi keluarga pedesaan belum mampu menghimbangi hasrat mencapai pendidikan setinggi-tingginya, padahal tamatan sekolah dasar belum mampu memasuki "pasaran kerja", karena usia maupun keterampilan yang dipersyaratkan. Hal ini amat erat hubungannya dengan kurikulum pendidikan dan batasan arti serta standa "tenaga siap pakai" pada tiap jenjang/jenis pendidikan.

Pendirian Pemerintah untuk membentuk Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional dihubungkan dengan hasrat dan ketanggapan rakyat serta faktor lingkungan adalah berbagai faktor berpengaruh yang harus diperhitungkan dalam perubahan selanjutnya.

Di samping itu kita juga harus mengenal berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Rancangan Undang Undang dan memecahkannya secara tuntas, agar muatan RUU berisi ketentuan yang benar-benar menjawab kebutuhan mendasar, untuk itu Fraksi kami menggunakan pangkal tolak pikir sebagai berikut; (1) Oleh karena kita hendak menempa sistim pendidikan nasional, maka ukuran yang kami pakai adalah sistim; yaitu suatu cara mendekati/memecahkan masalah dengan menggunakan/memanfaatkan keseluruhan arti, sifat ciri, dan hakikat sistim. Sistim pada hakikatnya adalah totalitas sejumlah sub sistim yang saling berkaitan yang mengolah masukan dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang pasti.

(2) Sistim pendidikan nasional harus berkerangka acuan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN 1988, Konsekuensi lanjut dari kerangka acuan tersebut adalah perlu digunakannya Ketetapan MPR-RI No. : II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) sebagai pedoman dasar dalam merumuskan sistim pendidikan nasional. Dengan demikian pendidikan dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan terinci secara relevan.

(3) Hakikat pendidikan adalah usaha sadar yang berlangsung seumur hidup dalam bentuk mengajar, membimbing, dan melatih siswa/mahasiswa di sekolah maupun di luar sekolah untuk mengembangkan kepribadiannya serta memperoleh keterampilan/keahlian, ketahanan, dan kesempatan bagi kehidupan masa depannya dan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian akan lebih memantapkan pengertian tentang pendidikan nasional sebagai pross budaya.

(4) Di dalam mengarungi kehidupan masa depannya siswa/mahasiswa yang telah lulus hendaknya menempatkan posisinya sebagai bagian/anggota masyarakat yang harus memiliki cara pandang tentang diri dan lingkungannya berdasarkan falsafah bangsanya. Sehubungan dengan itu pendidikan nasional harus berorientasi kepada Wawasan Nusantara.

(5) Keberhasilan seseorang di dalam kehidupan masa depannya akan bergantung pada kemampuan lingkungan di dalam memikul beban. Sejauh mana lingkungan mampu memberi kesempatan kepada mereka untuk bertahan hidup dengan menggunakan keterampilan/keahlian yang diperolehnya dari pendidikan. Di sinilah pentingnya mengaitkan sistim pendidikan dengan perencanaan tenaga kerja yang berorientasi kepada sumber daya alam.

(6) Sehubungan dengan itu gagasan mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu ditegaskan kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam rangka pengelolaan pendidikan informal, penyelenggaraan perguruan swasta, maupun dalam rangka membentuk mekanisme balikan.

(7) Oleh karena materi yang kita bahas ini bukan bidang eksakta, maka akan terbuka berbagai alternatif yang serba mungkin dengan pembatasan cirinya masing-masing. Dengan demikian kita perlu memilih alternatif yang paling baik dan yang paling mungkin serta dengan memperhitungkan pembatasan yang sekecil mungkin.

(8) Undang-Undang Pendidikan Nasional harus dirumuskan secara tuntas, lugas dan lengkap agar muatannya benar-benar menjawab kebutuhan yang mendasar, sehingga tidak terlalu banyak hal-hal yang diatur dengan peraturan perundangan dibawah Undang-Undang.

Digitized by Google

Beranjak dari delapan pangkal tolak pikir sebagaimana diuraikan diatas, perkenankanlah Fraksi Karya Pembangunan mengajukan alternatif pemecahan masalah dengan memusatkan pandangan pada penyusunan kerangka sistim pendidikan nasional yang andal dan memiliki daya laku berjangka panjang.

Kesesuaian

Dalam menyoroti materi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional Fraksi Karya Pembangunan berpendirian sebagai berikut: bahwa sistem pendidikan nasional yang hendak kita bangun adalah konstruksi akal budi manusia Indonesia yang harus menciptakan kesesuaian antara dunia kenyataan dengan alam cita-cita (tujuan nasional).

Penyesuaian kedua hal tersebut diarahkan demi terwujudnya dasar, tujuan, struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang berhasil guna serta berdaya guna. Sistem pendidikan nasional seyogyanya memuat unsur-unsur yang antara lain terdiri atas; *kerangka acuan, masukan, sarana pembanding, perangkat, keluaran,* dan *balikan.* Dengan menggunakan unsur-unsur sistem tersebut sebagai tolok ukur, FKP telah mengkaji secara seksama keseluruhan isi Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional dan ternyata diperoleh beberapa permasalahan pokok berikut ini.

(1) Dalam kaitan dengan unsur kerangka acuan, FKP menemukan hal-hal sebagai berikut: (a) Dicantumkannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 RUU adalah tepat, karena Pancasila menjadi landasan pendekatan, penekanan, dan dasar pemikiran dalam memecahkan masalah pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya bidang pendidikan nasional. (b) Rumusan tujuan pendidikan nasional hendaknya bersumber dan dijabarkan dari tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional tersebut harus kita tatap secara integral, sehingga pengertian "mencerdaskan kehidupan bangsa" tidaklah berdiri sendiri, melainkan kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk; Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kami percaya, Pemerintah telah beberusaha merumuskan tujuan pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 RUU. Meskipun demikian tampaknya akan lebih mantap lagi apabila rumusan tujuan Pendidikan Nasional itu disesuaikan dengan GBHN 1988. Walaupun penyesuaian rumusan itu hanyalah berarti penambahan rangkaian kata *beriman, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, rasa kesetiakawanan sosial, rasa percaya pada diri sendiri, inovatif, dan kreatif,* akan tetapi justru akan tampak paripurnanya kriteria manusia Indonesia seutuhnya.

Secara khusus kami ingin menggaris bawahi pentingnya disiplin yang merupakan kesesuaian antara sikap dan perilaku seseorang dengan kaidah yang berlaku dengan dilandasi oleh kesadarannya.

(c) Tentang fungsi pendidikan nasional. Mengenai hal ini kiranya Pemerintah dapat mempertimbangkan rumusan yang lebih lengkap dengan bersumber pada pengertian fungsi. Fraksi Karya Pembangunan mengartikan fungsi sebagai sekelompok usaha dan kegiatan esensial vital yang satu sama lain berkaitan erat untuk melaksanakan tugas pokok (tujuan) dan bersifat menentukan ruang lingkup serta kelangsungan hidup organisasi.

(2) Unsur masukan yang terpenting adalah, siswa/mahasiswa, pendidik, kurikulum, dan metode belajar mengajar. Dihubungkan dengan ketentuan Bab VI, VII, dan IX RUU, maka Fraksi Karya Pembangunan ingin menitikberatkan tinjauan berikut: (a) Tentang siswa/mahasiswa. Dalam kaitan dengan siswa/mahasiswa, Fraksi Karya Pembangunan ingin menitikberatkan tinjauan terhadap masalah wajib belajar. Sejak semula kami mengamati dan mendukung kebijaksanaan Pemerintah tentang wajib belajar yang diwujudkannya dengan memberi kesempatan belajar kepada anak-anak

PIMPINAN BESERTA STAF DAN SEGENAP KARYAWAN
PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN

Mengucapkan :

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
(17 AGUSTUS 1945 — 17 AGUSTUS 1988)

Dengan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Kami siap melayani Jasa & Dana berupa pemberian pinjaman untuk tujuan produktif kepada Petani kecil, Nelayan kecil, Industri kecil, Pedagang kecil, dll.

Dengan Kredit
MUDAH - MURAH - CEPAT dan AMAN

Hubungilah Kantor-kantor Cabang kami di seluruh pelosok Indonesia.

Digitized by Google

di sekolah dasar. Apalagi sekarang ini rakyat menyambut gembira terbitnya GBHN 1988 yang antara lain mengisyaratkan persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama. Kegembiraan yang penuh harapan itu niscaya akan disyukurinya, apabila peningkatan wajib belajar itu dimuat di dalam ketentuan undang-undang sebagai bukti peningkatan upaya pendidikan, kendatipun pelaksanaannya mungkin baru dimulai pada akhir Pelita V.

(b)Permasalahan penting berikutnya yang perlu disempurnakan rumusannya, adalah, mengenai tenaga pendidik sebagaimana diatur di dalam Bab VII RUU. Menurut FKP ketentuan mendasar yang perlu diatur adalah pembentukan, persyaratan/mutu, penggunaan, penyebaran dan pembinaannya. Sehubungan dengan itu, maka Fraksi Karya Pembangunan mengharap agar wadah pembentukan pendidik dituntaskan dalam pendidikan prajabatan untuk menjamin mutu yang setara.

Hal lain yang perlu diatur adalah ketentuan wajib mengajar bagi mereka yang memiliki kualifikasi pendidik dengan imbalan hak atas kesejahteraan yang sebanding dan kesempatan untuk menitik jenjang karir tertinggi sesuai dengan kemampuan serta pengabdiannya. Disamping itu perlu kiranya dipertimbangkan upaya pengayoman hukum oleh aparatur keamanan terhadap lingkungan satuan pendidikan/sekolah untuk menciptakan iklim belajar-mengajar yang tenteram, tenang, dan tertib.

(c) Mengenai Bab IX RUU yang mengatur ketentuan tentang kurikulum, FKP berpendapat perlu ditetapkan kurikulum baku yang berlaku secara nasional disamping kurikulum inti/tambahan yang disesuaikan dengan jenis dan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Sebagaimana dimaklumi kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mewujudkan dasar, tujuan, dan sifat pendidikan nasional.

Masa depan kita akan dipengaruhi oleh sains dan teknologi sebagai faktor dominan yang memang besar faedahnya untuk memanfaatkan atau melestarikan sumber daya insani, sumber daya alami, serta sumber daya lainnya. Meskipun begitu kita tidak boleh melupakan keseimbangannya dengan bidang keilmuan/kejuruan lainnya sesuai dengan cita-cita untuk membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Seiring dengan prinsip tersebut, maka Fraksi Karya Pembangunan berpendapat pentingnya mencantumkan pendidikan agama disamping adanya pendidikan Pancasila, dan pendidikan jasmani serta pendidikan lainnya sebagai komponen kurikulum. Melalui pendidikan agama, kita akan meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual dalam rangka membentuk manusia yang beriman serta bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Akan halnya dengan pendidikan jasmani, kita telah menyadari betapa pentingnya kesehatan jasmani seimbang dengan kesehatan rohani. Dengan ini pula diharapkan kesejajarannya dengan upaya Pemerintah dalam memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.

Masih dalam kaitan dengan permasalahan kurikulum, dengan mengingat Pasal 2 Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/1988 Fraksi Karya Pembangunan sangat mengharapkan agar dalam membahas RUU ini kita tetap waspada terhadap bahaya laten G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya. Untuk itu dengan menunjuk Pasal 2 dan Pasal 3 Ketetapan MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966, FKP mengusulkan, agar RUU ini mencantumkan ketentuan yang melarang diajarkannya paham/ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme. Kalaupun sebagai studi perbandingan hal itu perlu diberikan kepada siswa/mahasiswa, hendaknya dibatasi hanya dilakukan di perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan dengan materi yang ditetapkan oleh Menteri. Studi perbandingan tersebut adalah dalam rangka mempertebal keyakinan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional nasional.

(d) Metode belajar-mengajar yang dapat menciptakan situasi dialogis antara tenaga pendidik dengan siswa/mahasiswa merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kreativitas dan daya inovasi siswa/mahasiswa, disamping merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi pendidikan/pengajaran.

(3) Unsur sarana pembanding: karena akan berperan dalam memban-

Masa depan kita dipengaruhi sains dan teknologi.

Digitized by Google

dingkan masukan dan keluaran sesuai dengan acuan, maka Fraksi Karya Pembangunan mengkaitkannya dengan Bab XII, XIII RUU. Sehubungan dengan itu FKP menjaring hal-hal sebagaimana diuraikan berikut ini:

(a) Sungguhpun Bab XII RUU telah menegaskan adanya kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, namun Fraksi kami mengusulkan suatu penegasan tentang persyaratan tenaga pendidik, bangunan sekolah, dan pengelolaan satuan pendidikan bagi perguruan swasta sebagai mitra Pemerintah yang sekaligus sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional; (b) Dalam hal tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah, seperti tercantum dalam Bab XIII Fraksi kami mengharap dipertimbangkannya ketentuan pembagian tugas/tanggung jawab antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri lainnya, untuk mencegah kemungkinan timbulnya tumpang-tindih kewenangan.

(4) Unsur perangkat yang langsung melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan penyelenggaraan pendidikan kami kaitkan dengan Bab IV dan V RUU. Dalam kaitan itu Fraksi kami menjumpai permasalahan sebagai berikut: (a) Belum ditegaskannya jalur nonformal dan informal di dalam RUU, menyebabkan tidak jelasnya kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka keseluruhan sistem pendidikan nasional. Menurut pengamatan FKP sekarang ini sudah saatnya menata peran keluarga sebagai pendidik informal. Keluarga adalah pangkalan utama yang harus membekali anak-anaknya dengan kemauan untuk masuk sekolah, disiplin, hasrat/ingin mengetahui, semangat belajar di rumah (tidak hanya di sekolah), dan kesadaran sebagai insan sosial yang mengharuskan mereka untuk berkomunikasi dengan anak-anak/orang lain. Penegasan tersebut akan menanamkan rasa tanggung jawab keluarga dan pada giliran selanjutnya akan memperlancar proses belajar-mengajar di sekolah. Di samping itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa keberadaan pendidikan non formal adalah merupakan kenyataan. Dan keberadaan tersebut harus merupakan bagian dan berada dalam sistem Pendidikan Nasional.

(b) Mengenai jenjang pendidikan ada beberapa hal yang menarik perhatian Fraksi Karya Pembangunan ialah: (1) Sekalipun pendidikan prasekolah tidak termasuk jalur formal, apakah Pemerintah tidak mempertimbangkan kemungkinan dituangkannya cara penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam pola tertentu, sehingga terbuka penerapannya oleh keluarga di daerah pedalaman/terpencil. (2) Dalam hubungan dengan perguruan tinggi ada hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam RUU yakni: (a) tentang ketentuan kebebasan akademik/keilmuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 25 ayat (1) serta penjelasannya kiranya perlu dirinci lagi ketentuan yang mengatur pengertian, tujuan, subyek/pelaku, lingkungan, dan tata caranya. (b) tentang Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat). Hal ini sudah memasyarakat dan terlaksana dalam praktek kehidupan kampus, karena itu tepatlah kalau dilestarikan dengan memuatnya dalam RUU, (c) tentang kerja sama dengan instansi Pemerintah, swasta, dan asing dalam rangka penelitian dan pengembangan, penyiapan naskah, pertukaran mahasiswa dan kerja sama antar perguruan tinggi atas izin Menteri.

(d) Mengenai jenis pendidikan dikaitkan dengan sistem Pendidikan Nasional Fraksi Karya Pembangunan berpendirian perlu dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai pengertian, fungsi dan tanggung jawab dari pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus supaya tetap berada dalam sistem Pendidikan Nasional.

(5) Unsur keluaran, sebagai hasil penyelenggaraan pendidikan berupa sejumlah lulusan siswa/mahasiswa. Yang kami permasalahkan di sini bukanlah sekedar jumlah lulusan, melainkan kualitas yang setara dengan tingkat/jenjang pendidikan yang bersangkutan. Fraksi Karya Pembangunan berpendapat perlunya ketentuan yang mengatur tolok ukur yang sesuai dengan batasan tujuan pendidikan/kurikulum.

(6) Unsur mekanisme balikan; yang membawa pesan/kesan hasil pendidikan. Mekanisme balikan ini amat penting artinya bagi unsur pembanding dalam rangka penelitian dan pengembangan kualitas lulusan dengan kepentingan pembangunan nasional. Sebagaimana kita maklumi kelemahan dalam mekanisme ini mengakibatkan kurang tertampungnya tuntutan persyaratan pihak pengguna hasil pendidikan. Kalau kita telusuri lebih lanjut akan tampak makin melebarnya celah tersebut, bukan hanya antara produsen dan konsumen didikan, tetapi juga antara penyelenggara pendidikan dengan siswa/mahasiswa dan/atau orang tua. Kelugasan dan kelancaran balikan ini akan bergantung pada subyek/perangkat yang terlibat dalam mekanisme balikan. Tidaklah berkelebihan kiranya, kalau kami menanggapi hal ini sebagai mata rantai yang lemah.

Kurang terpantaunya balikan secara lugas, proporsional, dan tepat waktu merupakan hambatan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Padahal masyarakat dapat diharapkan peransertanya secara aktif dalam mekanisme balikan di samping perangkat yang organik. Itulah sebabnya Fraksi Karya Pembangunan mengharap agar Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan membentuk sesuatu wadah yang memungkinkan bertemu dan berkomunikasinya para pejabat bidang pendidikan dengan para tokoh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan duduknya para tokoh masyarakat (agama, kebudayaan/adat, pengusaha, politik dan lain-lain) di dalam wadah tersebut, dapatlah dipetik kemanfaatan yang menopang pendidikan, antara lain:
(a) Agar terjalin saling pengertian, loyalitas, kerjasama, dan keterpaduan atau kesejajaran upaya. Sebagaimana dimaklumi kedudukan para tokoh masyarakat adalah penanggungjawab utama putera-puterinya, pencipta lapangan kerja, dan penyalur tamatan pendidikan yang selalu mengharapkan tenaga siap pakai. Pada sisi lain pendidikan sebagai lembaga yang memproduksi tenaga kerja harus memahami tuntutan pengguna tenaga kerja (lingkungan). (b) Supaya ada peningkatan kemampuan masyarakat dan keluarga untuk melaksanakan pendidikan informal di rumah/di masyarakat. (c) Menumbuhkan rasa ikut memiliki, rasa wajib mempertahankan, dan keberanian mawas diri serta berani bertanggungjawab.

Kami percaya, bahwa keberhasilan sistem pendidikan nasional akan bergantung pada ketajaman sistem pendidikan itu dalam mengenal isi serta kemampuan lingkungan dalam memikul beban, kemudian menyatukan diri

Digitized by Google

dengan lingkungan dalam satu sistem sosial yang bulat dan setiap saat dapat dikoreksi.

Apa yang kami kemukakan di atas tadi adalah hasil pengamatan dengan belajar dari pengalaman pendidikan yang telah diselenggarakan selama ini dan menghubungkannya dengan perkiraan tuntutan perkembangan zaman, karena langkah kita ini adalah kelanjutan masa lalu dan yang akan berlanjut pada masa mendatang.

Dasar Hukum

Sekarang mari kita renungkan sejenak mengenai undang-undang yang akan kita bentuk dan memuat sistem pendidikan nasional itu. Menurut hemat kami undang-undang tersebut haruslah menjadi dasar hukum yang melandasi keabsahan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional mendatang. Tanpa mengurangi makna, persyaratan yuridis, dan prosedur pembentukannya, kedudukan serta peran undang-undang ini hendaknya menjamin relevansi sistem pendidikan nasional yang berwawasan pembangunan dan membuka kesempatan mengantisipasi masa depan bangsa kita. Itulah sebabnya undang-undang ini harus berisi ketentuan yang mengatur seluruh unsur sistem secara terpadu, saling kait, dan berwatak mendidik para penyelenggara pendidikan serta terbebaskan dari citra sebagai alat pemaksa semata-mata.

Berhubung dengan itu, maka Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan agar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVI diganti dengan ketentuan pembinaan, pembekuan, dan penutupan. Dengan mengganti ketentuan tersebut akan memberi citra yang mengayomi, mendidik dan lebih demokratis.

Hal lain yang tidak kalah penting kedudukan dan peranannya terhadap RUU ini adalah sistem pendidikan nasional itu sendiri. Sistim sebagai interdependensi dari sejumlah subsistim mempunyai ciri yang berlanjut dan berjangka panjang, karena daya koreksinya untuk mengantisipasi masa depan dengan mempertahankan hal yang baik dan menyempurnakan hal yang tertantang oleh tuntutan zaman. Ciri dan watak itulah yang memungkinkan diserapnya ketentuan pendidikan nasional yang lampau ke dalam RUU demi kesinambungan penyelenggara pendidikan masa mendatang.

Itulah sebabnya Fraksi Karya Pembangunan menatap berbagai ketentuan undang-undang lama yang mungkin saja masih dapat diangkat kembali. Kesemuanya itu harus kita musyawarahkan untuk memperoleh kesepakatan kita bersama. Ketajaman kita dalam menjenguk masa lalu, memantau masa kini, dan kearifan kita dalam menyoroti masa mendatang adalah salah satu tuntutan yang dipersyaratkan.

Demikianlah beberapa permasalahan pokok yang kami jaring dengan jalan mengamati pengalaman di lapangan dan menyelami RUU tentang Pendidikan Nasional yang kemudian dengan menggunakan delapan pangkal tolak pikir kami mencoba mencari pemecahan serta mewadahinya dalam pola pikir sistem pendidikan nasional.

Fraksi Karya Pembangunan menyajikan keseluruhan pemikiran tersebut dalam bentuk Pemandangan Umum untuk mendapat tanggapan/jawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Wakil Pemerintah. Dari Tanggapan/jawaban itulah Fraksi kami akan mencari titik temu pendekatan sebagai bekal pangkal memasuki pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat II kelak.

Kita berhasrat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh untuk; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk itulah lebih dahulu kita harus menempa sistim pendidikan nasional yang andal di dalam bentuk undang-undang yang memiliki daya laku berjangka panjang.

Dengan mengamati beberapa masalah pokok sebagaimana diungkapkan di atas, tampak jelaslah betapa berat dan luhur tugas yang harus kita hadapi bersama ini. Adalah suatu kehormatan tersendiri bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode sekarang ini memperoleh kepercayaan rakyat untuk menanganinya secara tuntas dan sebaik mungkin. □

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
(17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 1988)

KANTOR PUSAT : JL. BASUKI RAKHMAT 98-104, SURABAYA.
Tlp. 510090 - 99. Tlx. 32376, 32377, 32378.
KANTOR CABANG : BANYUWANGI, JEMBER, MALANG, MADIUN, KEDIRI, PAMEKASAN, BOJONEGORO, LUMAJANG, NGAWI, JOMBANG, PROBOLINGGO, KRAKSAAN, BLITAR.

Digitized by Google

Lahir Bakorstanas, Berakhir Era Kopkamtib

Peningkatan stabilitas memerlukan saling bantuan antar instansi.

Baru-aru ini Presiden Soeharto membubarkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga yang telah berperan selama 23 tahun, dan bersamaan dengan itu, membentuk Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Kebijakan Presiden itu tertuang dalam Keputusan Presiden 29 tahun 1988 tanggal 5 September 1988. Selanjutnya, Presiden melalui Keppres 252/M tahun 1988 memberhentikan dengan hormat Jendral LB Moerdani dari jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib, dan melalui Keppres 253/M tahun 1988 mengangkat Panglima ABRI Jendral Try Sutrisno menjadi Ketua Bakorstanas. Kedua Keppres itu bertanggal 6 September 1988. Masih dalam rangkaian kebijakan itu, Presiden juga menghapus Operasi Tertib yang dikenal dengan Opstib melalui Keppres 30 tahun 1988 tanggal 7 September. Dengan demikian, lembaga Opstib yang telah bertugas sejak tahun 1977, dinyatakan bubar.

Keputusan Presiden tentang Bakorstanas itu diumumkan oleh Mensesneg Moerdiono dalam suatu kesempatan berbicara dengan wartawan di Bina Graha.

Pasal 1 Keppres 29 tahun 1988 itu menyatakan bahwa Bakorstanas merupakan wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana tercakup dalam pasal 2 dan 3, Bakorstanas bertugas mengkordinasikan upaya departemen dan instansi dalam rangka pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Badan juga bertugas menyampaikan usulan kebijakan dan saran tindak yang diperlukan kepada Presiden sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pemberian petunjuk yang diperlukan bagi terselenggaranya upaya pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional. Bakorstanas juga bertugas memberi petunjuk pelaksanaan teknis bagi penyelenggaraan upaya pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional. Dalam hal saran tindak tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif, khususnya dalam menghadapi ancaman fisik yang sangat membahayakan stabilitas nasional, Presiden berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas ABRI memerintahkan Pangab untuk menggunakan kekuatan angkatan bersenjata guna menyelesaikannya.

Dalam hal pelaksanaan petunjuk atau perintah Presiden oleh departemen atau instansi yang bersangkutan menemui hambatan, dan untuk mengatasinya diperlukan dukungan ABRI, departemen atau instansi dapat minta bantuan yang diperlukan kepada Pangab.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorstanas menyelenggarakan fungsi: (1) mengumpulkan dan mengolah data dan informasi mengenai berbagai kemungkinan timbulnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan; (2) memantau pelaksanaan upaya departemen atau instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; (3) memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah tersebut; (4) membina sistim dokumentasi yang berkaitan dengan setiap peristiwa yang merupakan hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap stabilitas nasional di masa lalu dan yang terjadi di masa yang akan datang; (5) lain-lain sesuai dengan pengarahan Presiden atau yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bakorstanas dipimpin oleh seorang Ketua sebagai koordinator yang dijabat oleh Panglima ABRI, dan berang-

Digitized by Google

gotakan Sekretaris Menteri Koordinator, wakil-wakil dari Mabes ABRI, Angkatan, Polri, Kejaksaan Agung, dan Bakin sebagai anggota tetap. Selain anggota tetap, Ketua Bakorstanas dapat menetapkan wakil dari beberapa departemen dan instansi tetentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai anggota tidak tetap.

Di daerah, dibentuk Bakorstanasda yang dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer. Tugas dan fungsi serta tata kerja Bakorstanasda ditetapkan oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.

Pembiayaan administrasi dan kegiatan rutin Bakorstanas termasuk sekretarisnya dibebankan kepada anggaran Mabes ABRI. Pembiayaan kegiatan teknis operasional dibebankan kepada anggaran masing-masing departemen termasuk Mabes ABRI.

Opstib Bubar

Opstib yang keberadaannya didasarkan pada Inpres 9 tahun 1977 dinyatakan dibubarkan dengan lahirnya Keputusan Presiden nomor 30 tahun 1988, tertanggal 7 September 1988. Dalam konsiderans "menimbang" dinyatakan bahwa usaha-usaha pembinaan dan pengawasan aparatur yang dilaksanakan selama ini dinilai telah memberikan landasan yang cukup bagi penyelenggaraan selanjutnya oleh instansi masing-masing. Atas dasar itu pula, perlu ditinjau kembali pelaksanaan pengawasan dan penertiban aparatur yang selama ini didasarkan pada Inpres 9 tahun 1977.

Dalam keterangan pada suatu kesempatan setelah Bakorstanas terbentuk, Panglima ABRI, Jendral Try Sutrisno mengatakan bahwa ia akan segera menyusun tata kerja dan struktur organisasi yang dipimpinnya, agar tidak terjadi kevakuman.

Atas pertanyaan wartawan, ia mengatakan badan yang dipimpinnya mempunyai jangkauan luas. "Karena stabilitas menyangkut masalah-masalah sosial, budaya dan hankam. Kita menginginkan keterpaduan dalam stabilitas itu," katanya. Lebih lanjut dikatakannya, hanya dengan stabilitas yang kuat dan baik pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini Kopkamtib telah menyelesaikan tugasnya sebagai sarana perjuangan mewujudkan stabilitas. Tahapan berikutnya, hasil perjuangan itu perlu mendapatkan perhatian terus-menerus.

Ditegaskan oleh Try Sutrisno, stabilitas nasional merupakan tanggung-jawab bersama, seluruh bangsa, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kenyataan hidup tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, tetapi mesti bersama dalam suatu koordinasi, terutama dalam hal masalah pemeliharaan dan pemulihan stabilitas. "Peningkatan stabilitas memerlukan saling bantuan antar instansi," katanya.

Tentang inspektur Opstib di daerah-daerah dan di departemen-departemen yang berasal dari ABRI, Pangab mengatakan bahwa instruksi pencabutannya sedang disiapkan. Kalau sudah keluar, mereka akan dilikuidasi, menyangkut aspek personal dan perangkat-perangkat lainnya.

Menurut Try, hadirnya Badan itu diharapkan masyarakat puas, dan kepuasan itu diharapkan pula meningkatkan rasa solidaritas.

Akhir Era Kopkamtib

Lahirnya Bakorstanas merupakan akhir era Kopkamtib yang secara resmi lahir 23 tahun lalu, tahun 1965. Bahkan secara de facto, Kopkamtib ini mulai berfungsi beberapa bulan sebelumnya, yaitu 1 Oktober 1965, ketika Presiden Sukarno mengangkat Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad sebagai Pangkopkamtib, untuk melaksanakan tugas menumpas pemberontakan G30S/PKI. Secara resmi komando itu lahir ketika Presiden Sukarno mengeluarkan surat keputusan 1 November 1965 yang dinyatakan berlaku surut pada 1 Oktober 1965. Dengan berbagai keputusan, lembaga itu mengalami penyempurnaan dalam tata kerja dan organisasi.

Siapa pun yang merasakan perjuangan Orde Baru untuk menegakkan kehidupan Pancasila, khususnya dalam menghadapi bahaya dari gerakan G30S/PKI serta gerakan-gerakan kaum ekstremis lain, peran Kopkamtib sangat besar. Lembaga ini berperan besar dalam meredam tiap gejolak yang terjadi, tidak saja dalam hal mengatasi bahaya-bahaya dan gerakan sisa-sisa G30S/PKI, tetapi juga gejolak lain seperti peristiwa "Malari", pengumpulan senjata liar, kebringasan dalam kampanye pemilu, gerakan kaum subversif ekstrim seperti gerakan "komando Jihad" dan peristiwa besar terakhir: kasus "Tanjung Priok".

Peran Opstib dalam memberantas korupsi dan pungli juga tidak dapat diabaikan. Sejak berdirinya, tahun 1977, Opstib berhasil membongkar berbagai penyelewengan.

Gebrakan-gebrakan Opstib yang kala itu dipimpin Laksamana Sudomo selaku Kaskopkamtib mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Gebrakan itu menyadarkan masyarakat bahwa banyak masalah penyelewengan dalam tubuh pemerintah perlu dibereskan. Bahkan dalam membereskan penyelewengan, tubuh Opstib sendiri juga tidak kebal dari penindakan.

Nama Sudomo yang lekat dengan Opstib, populer dengan gebrakan-gebrakan memberantas pungli, terutama di jalan raya.

Opstib kemudian bekerjasama dengan Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan). Dalam 5 tahun, kerjasama itu berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak 700 milyar rupiah. Pada 9 Agustus 1982, Sudomo mengumumkan bahwa Opstib berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 400 milyar rupiah. Sementara itu Menpan Sumarlin (kini Menkeu) dalam kesempatan lain mengungkapkan keberhasilan Opstib mengamankan 300 milyar rupiah.

Sorotan Opstib juga tertuju pada bagian-bagian pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu banyak berita muncul mengenai usaha-usaha memergoki pungli di jalan raya, di bagian-bagian pelayanan umum, termasuk dalam pemberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Masalah pungli sampai sekarang masih terasa. Surat-surat yang masuk ke Tromolpos 5000 di kantor Wapres, menurut Menpen masih banyak yang berisi pengaduan tentang pungli.

Akan halnya pembubaran Kopkamtib, sebenarnya jauh-jauh hari telah ada pertanda-pertandanya. Hal itu pernah diungkapkan oleh Kasad Jendral Try Sutrisno (waktu itu). Menurut Jendral Try, tugas Kopkamtib perlu diperluas, selain menertibkan keamanan, ancaman dan subversi, ekstrim kanan dan kiri, juga bertugas mengamankan pembangunan nasional.

Ketika masalah yang sama dikonfirmasikan kepada Jendral LB Moerdani di tengah-tengah suasana Sidang Umum MPR, Pangkopkamtib itu tidak membantah. Bahkan Sudomo saat itu juga mengatakan bahwa Kopkamtib perlu diubah.

Kini Kopkamtib telah berubah dengan Bakorstanas. Harapan masyarakat, sebagaimana terungkap dari kalangan pimpinan DPR, hendaknya kewaspadaan terhadap ancaman ideologis, khususnya dari sisa-sisa PKI dan kekuatan ekstrim lainnya, tidak mengendor.☐ (Sgi)

Digitized by Google

Transmigran Agar Bersikap Mandiri

Wakil Presiden Sudharmono SH, baru-baru ini selama tiga hari berada di Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga dikenal dengan sebutan "Serambi Mekah", dalam rangka menghadiri sekaligus membuka Pekan Kebudayaan Aceh ke 3 dan kunjungan kerja. Di antaranya memberikan pengarahan penataran pengawasan melekat Pemda Tingkat I Aceh, peninjauan proyek serta temu wicara dengan warga transmigran.

Dalam kesempatan temu wicara itu Wapres Sudharmono SH, menganjurkan kepada warga transmigran agar menumbuhkan sikap mandiri dan senantiasa bergotong royong dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan di daerahnya yang baru.

"Sikap mandiri harus menjadi tekad warga transmigran, karena dengan demikian akan menumbuhkan semangat untuk bekerja keras," ujar Wapres ketika bertemu wicara dengan warga transmigran di proyek transmigrasi Jantho, Kabupaten Aceh Besar yang terletak sekitar 60 km dari Banda Aceh. Hal itu dikemukakan Wapres, dalam menanggapi para wakil transmigran yang meminta bantuan pemerintah untuk membuatkan jalan beraspal, sarana listrik, irigasi, ternak, masjid, pengusiran hama babi dan sebagainya.

Menurut Wapres, Pemerintah memberi perhatian besar terhadap perkembangan transmigrasi, dimana sampai Repelita IV ini sudah sekitar 1 juta KK yang berhasil dipindahkan dari Jawa dan Bali ke tempat-tempat yang masih perlu pertambahan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penduduk yang ditransmigrasikan itu maupun penduduk setempat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di lokasi yang baru itu, Wapres mengharapkan, warga transmigran dapat memanfaatkan potensi yang ada sebaik mungkin dan jangan terlalu mengharapkan bantuan terus dari pemerintah. Karena itu kegotong royongan harus selalu diwujudkan dalam berbagai kegiatan untuk menuju ke masa depan yang lebih baik.

Dihadapan warga transmigran yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga penduduk setempat yang ikut berbaur di lokasi transmigran di Jantho itu, Wapres menyatakan kegembiraannya karena mereka telah merasa betah tinggal di tempat yang baru. Meskipun baru sekitar dua setengah tahun mereka telah menunjukkan kesungguhannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. "Mudah-mudahan saudara dapat menjadi contoh bagi warga transmigran lainnya," kata Wapres.

Dalam temu wicara itu Wapres juga menyatakan kegembiraannya setelah menerima penjelasan dari warga transmigrasi bahwa di lokasi itu juga telah ada KUD. Djayusman, transmigran asal Boyolali, Jateng, yang menjadi ketua KUD Warga Manunggal kepada Wapres menjelaskan, bahwa KUD yang dipimpinnya kini telah mempunyai 322 anggota dan 28 calon anggota. Modal yang dimiliki koperasi ini berjumlah Rp 805.450,- yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Sementara perputaran uang dalam berbagai jenis kegiatan koperasi ini mencapai sekitar Rp 4,5 juta setahun. Hingga saat ini KUD masih belum dapat menampung hasil bumi masyarakat karena masih kekurangan modal, kilah Djayusman.

Pemerintah memberi perhatian besar terhadap perkembangan transmigrasi.

KUD warga transmigrasi.

Digitized by Google

Wapres memberi petunjuk kredit bank.

Anggota Koperasi

Untuk itu Wapres memberikan petunjuk, agar mengajukan kredit kepada Bank Rakyat setempat. Dan dalam kesempatan itu, Sudharmono SH mencatatkan diri untuk menjadi anggota KUD Warga Manunggal sesuai dengan permintaan warga, setelah mengisi formulir keanggotaan KUD, dan untuk pertama kali Wapres menyimpan uang sebesar Rp. 270.000,- yang dikeluarkan langsung dari dompetnya secara spontan. Uang sebesar Rp 270.000,- tersebut sebagai uang simpanan pokok Rp. 1.000,- dan sisanya untuk simpanan wajib yang besarnya Rp. 150,- per bulan. "Uang simpanan itu cukup untuk simpanan wajib beberapa tahun," ujar Wapres sambil menjanjikan bahwa ia juga akan memberikan simpanan sukarela apabila KUD ini nantinya telah benar-benar berkembang. "Tapi jangan harap saya bisa datang mengikuti rapat anggota tahunannya. Tapi saya tetap minta laporannya, sehingga saya bisa tahu perkembangan koperasi ini," kata Wapres dengan tersenyum yang diiringi tepuk tangan warga transmigran yang memenuhi halaman balai desa Jantho.

Menanggapi keinginan Ny. Fatimah, penduduk lokal Aceh Barat yang ikut bertransmigrasi di lokasi ini agar disediakan listrik sehingga anak-anaknya dapat belajar pada malam hari dengan baik, Wapres mengatakan itu tergantung pada warga transmigran mampu untuk membayar iuran langganan listrik. "Apakah saudara-saudara mampu membayar iuran langganan listrik setiap bulan?" tanya Wapres yang secara serempak dijawab "sanggup" oleh warga transmigran.

Terhadap keinginan ini Wapres meneruskan kepada Bupati Aceh Besar untuk memikirkan kemungkinannya, apalagi mengingat lokasi transmigrasi ini terletak hanya sekitar 3 km dari kota Jantho, Ibukota Kab. Aceh Besar. "Insya Allah dalam Repelita V nanti sudah bisa dilakukan pemasangan listrik di sini," ujar Wapres yang disambut gembira para warga transmigran dengan tepuk tangan.

Menanggapi permintaan pembangunan masjid, untuk lebih mengembangkan kegiatan keagamaan di lokasi transmigran yang seluruhnya beragama Islam dan sebagian besar warga tersebut berasal dari Pondok Pesantren Sabilil Mutakin Takaran Jawa Timur yang pimpinannya H Tharmudji dan pada keberangkatannya juga dilepas oleh Ketua Umum DPP Golkar, Wapres Sudharmono SH selaku Ketua Umum DPP Golkar memberikan bantuan dana sebesar Rp 1 juta bagi pembangunan masjid. "Bantuan ini dalam rangka gotong royong dan terserah kalau Pak Bupati juga mau membantu," ujarnya sambil menambahkan bahwa bantuan itu akan disalurkan melalui DPD Golkar Aceh.

Rumah warga transmigrasi.

Dalam kunungan ke lokasi transmigrasi di Jantho itu, Wapres yang disertai Ny. EN. Sudharmono dan didampingi Gubernur Aceh beserta Ny. Ibrahim Hasan memberikan bantuan berupa seperangkat Gamelan, televisi, generator listrik, sejumlah kitab suci Al Qur'an dan seperangkat alat olah raga. Selain itu Wapres juga memberikan bantuan berupa dua buah mobil tangki air kepada Bupati Aceh Besar yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten itu, termasuk warga transmigran.

Pada kesempatan itu, Wapres berkesempatan pula membuka rapat dinas Kabupaten Aceh Besar di kantor DPRD Tingkat II Aceh Besar. Dan dalam kesempatan sebelumnya Wapres juga membuka sekaligus memberikan pengarahannya dalam Penataran Pengawasan Melekat se-Daerah Istimewa Aceh yang dilangsungkan di Gedung DPRD Tingkat I Aceh, diikuti para pejabat eselon II dan III dari berbagai instansi pemda tingkat I Aceh, antara lain Bupati/Walikotamadya, para kakanwil, instansi vertikal nondepartemen, perbankan, BUMN, perguruan tinggi. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan rapat dinas para pejabat Daerah Istimewa Aceh.

Sementara itu Wapres dalam kunjungan kerjanya di Aceh ini juga meninjau pelaksanaan proyek sungai Krueng Aceh. Sebuah proyek pengendalian banjir rutin di kawasan pemukiman penduduk dan persawahan disana.

Upaya yang dilakukan, perbaikan sungai di hilir, pelebaran penampungan sungai di hulu dan pembuatan saluran banjir kanal. Keseluruhan usaha itu diperkirakan menelan biaya Rp 147 milyar.

Sementara itu Ny. EN Sudharmono yang menyertai kunjungan kerja Wapres ke daerah Aceh ini telah mengadakan pertemuan dengan Dharmawanita Tk I dan Tk II Daerah Istimewa Aceh, meninjau pameran Pekan Kebudayaan Aceh III, meninjau pameran Dewan Kerajinan Nasional di Blang Padang, meninjau sekolah dasar luar biasa bagi anak-anak penyandang cacad di desa Labui, dan dalam kesempatan itu menyerahkan sumbangan dua buah kursi roda dan sejumlah mainan anak-anak. Di Kabupaten Aceh Besar Ny. EN Sudharmono juga mengadakan ramah tamah dengan anggota Dharma Wanita setempat.□

(wt)

Digitized by Google

Lima Gubernur Dilantik Mendagri

Pengangkatan seorang gubernur adalah hak prerogatif Presiden. Sedang masa jabatan gubernur lima tahun. Apabila diakhir masa jabatan itu, seorang gubernur berdasarkan hasil pemeriksaan Irjen Departemen Dalam Negeri — ia berhasil menunaikan tugas sesuai sumpah jabatan yang diucapkan, berdasarkan usul DPRD tingkat I setempat dan mendapat persetujuan Presiden (hak prerogatif), gubernur bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua kalinya.

Berkaitan dengan ini, Menteri Dalam Negeri Rudini telah melantik dan mengambil sumpah lima gubernur, baik bagi muka lama maupun baru.

Letjen TNI (Purn) H.M. Ismail, adalah muka lama yang mendapat kepercayaan kembali untuk memangku jabatan gubernur Jawa Tengah untuk periode 1988-1993.

Pada pelantikan Gubernur H.M. Ismail di Gedung Olahraga Semarang dalam sidang pleno DPRD Tingkat I, Rudini mengatakan, bahwa pembangunan Jawa Tengah memang berhasil menyentuh dan meningkatkan kualitas pada semua aspek kehidupan masyarakat kendatipun tidak mempunyai sumber migas serta bahan tambang yang berarti. Keberhasilan ini hendaknya jangan membuat puas diri karena tantangan pembangunan semakin besar di samping devisa sulit diperoleh, tuntutan masyarakat pun bertambah besar. Untuk itu, agar ada peningkatan kreativitas aparatur pemerintahan tentang pengetahuan, kemampuan, kerja keras, disiplin, efisien dan efektif dalam pelaksanaan segala kegiatan.

Begitupun, seorang pamong tidak layak membawa tongkat komando. Kedua belah tangannya harus terbuka lebar-lebar sehingga setiap waktu dapat melayani warganya. Menteri Rudini meminta supaya pelaksanaan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 6 tahun 1981 tentang tata cara pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian kepala desa selalu sinkron dengan TAP MPR Nomor II/MPR/1988. Sedangkan usaha memunculkan calon-calon kepala desa yang capable dan acceptable, agar diproses secara demokratis dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang diawali dengan menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Sikap Legowo

Sementara itu dalam sidang paripurna DPRD Tingkat I Jawa Timur di Graha Wicaksana Pradja, Kantor Gubernur di Surabaya, Menteri Rudini juga melantik dan mengambil sumpah jabatan gubernur terhadap Mayjen TNI (Purn) Soelarso sebagai Gubernur Jawa Timur menggantikan gubernur lama Letjen TNI (Purn) Wahono yang telah memimpin Jawa Timur selama lima tahun.

"Saya sangat menghargai sikap legowo (ikhlas) Wahono yang tidak bersedia dicalonkan lagi, sebagai gubernur untuk masa jabatan kedua kalinnya. Beliau merupakan salah seorang putera terbaik Jawa Timur. Atas permintaan beliau sendiri, beliau menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan kembali," kata Rudini.

Mendagri mengingatkan, perlu disadari bahwa dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan — pergantian pejabat merupakan suatu hal yang perlu dan rutin atau berulang. Melalui pergantian pejabat dibuka kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas lingkup pengabdiannya. Apalagi masyarakat Jawa Timur, adalah masyarakat yang terkenal sebagai masyarakat dinamik, yang memungkinkan Jawa Timur selalu berhasil dalam menciptakan keseimbangan yang kreatif. Antara yang lama dan baru serta yang tradisional dengan modern. Bahkan, basis ekonomi tradisional yang ada telah berhasil disesuaikan dengan ekonomi modern. Secara berangsur-angsur namun pasti akan menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang penting dan mencerminkan wujud dari masyarakat ekonomi Indonesia yang modern.

Masyarakat Jawa Timur sangat menonjol kemampuannya untuk berorga-

Pelantikan Gubernur Jawa Timur Soelarso.

Digitized by Google

nisasi. Karenanya, kata Rudini, koperasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat dijadikan wahana untuk mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan pemimpin-pemimpin yang berwawasan kemajuan, mampu menyatukan dan mendayagunakan potensi-potensi yang ada, kritis dan sangat tanggap supaya tidak tertinggal oleh dinamika masyarakat yang bergerak sangat cepat. Ini mengharuskan adanya kontak yang lebih intim antara pemimpin dengan masyarakat. Kalau hal itu sering dilakukan, prakarsa dan aspirasi rakyat diakomodir, maka tidak akan sulit untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Soelarso bagi masyarakat Jawa Timur bukan orang baru. Karena, ia pernah menjabat sebagai Panglima V/Brawijaya tahun 1985. Gubernur Jawa Timur ini kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 11 Agustus 1929, pernah mendapat kepercayaan sebagai atase pertahanan RI di Soviet tahun 1971/1974 dan terakhir sebelum menjabat gubernur, ia adalah Dirjen Imigrasi di Departemen Kehakiman.

Gubernur baru lainnya, adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali Prof. Dr. Ida Bagus Oka, menggantikan Prof. Ida Bagus Mantra, yang telah menjabat Gubernur Bali dua periode. Sedangkan dalam sidang pleno DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Barat (NTB), Menteri Rudini melantik Brigjen TNI Warsito sebagai Gubernur NTB untuk periode 1988-1993 menggantikan pejabat lama Brigjen TNI (Purn) Gatot Suherman yang telah memangku jabat gubernur selama dua periode.

Gubernur NTB Warsito dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1938. Menikah dengan Yati Azizah Aningsih dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu dua putra dan satu putri. Warsito lulus SMA bagian B tahun 1959, yang melanjutkan pendidikan ke AMN sampai lulus tahun 1962. Kemudian masuk pendidikan Seskoad tahun 1974-1975 dan Seskogab tahun 1978-1979.

Tahun 1963, Warsito pernah menjadi Dan Ton Kodam III/17 Agustus di Payakumbuh, Dan Kie Ins tahun 1965-1966 RPKAD Magelang, Dan Ki Pur 1967-1969 Puspassusad di Pontianak serta tahun 1971 menjabat Dan Den Pur Kopasanda Magelang. Sedang jabatan yang pernah disandang, adalah Panglima Komando Operasi Keamanan Timor Timur, Panglima Divisi I/Kostrad Jakarta dan Kasdam IX/Udayana Denpasar.

Sedangkan pelantikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Brigjen TNI H. Ramli Hasan Basri, menurut rencana dilakukan bulan Setember ini, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 200/M/1988 tertanggal 28 Juli 1988. Gubernur baru ini menggantikan pejabat lama H. Sainan Sugiman, yang berakhir masa jabatannya setelah memimpin daerah ini selama dua periode.

Dalam pemilihan gubernur, Brigjen TNI H. Ramli Hasan Basri memperoleh 32 suara dengan calon yang lain yaitu H. Nung Rozali, SH, dengan 7 suara dan Drs. Idrus Achmad memperoleh 5 suara pada sidang DPRD Tingkat I Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Selatan H. Zainal Abidin Ning.

H. Ramli Hasan Basri lahir 1 Oktober 1937 di Ranau Palembang, menikah dengan Fauzia Ulva Bari dan telah dikaruniai tiga orang anak, yakni 2 putra dan 1 putri. Pendidikan formal yang ditempuh, adalah Sekolah Rakyat (SD), SMP dan SMA sampai tahun 1957. Kemudian masuk AMN di Magelang tahun 1961.

Perwira Tinggi ini pernah mengikuti kursus Para, Kupaltu, Suslapa, Seskoad, Seskogad dan Lemhanas. Jabatan yang pernah didudukinya, Komandan Pleton di Amurang Sulawesi Utara, Komandan Kompi di Kota Mobagu Sulawesi Utara, pelatih di Pusdik Infantri Bandung, Wadam Yonif 721 di Pare-Pare Sulawesi Selatan, Dan Yonif 721 Pare-Pare, Kas Brigif 8 di Prabumulih Sumatera Selatan, Kasrem 41 di Curup Bengkulu, Dan RTP 8/IV tugas Operasi Timor Timur, Dan Brihanan RI di Iran, Kas Kopur II/Kostrad di Jakarta, Kasdam VII di Ujungpandang serta terakhir menjabat Inspektur Pendidikan dan Latihan pada Inspektorat Jenderal TNI-AD.☐ DT

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUH INDONESIA

*Importers Association of Indonesia * Association d' Importateurs de l' Indonesia * Indonesichen Importer Vereinigung*

Telepon	:	*(377008, 359121-5)*	*Telex*	:	*46793 GINSI IA.*
		Pes. 255,341 & 342	*Alamat kantor*	:	*Jl. Kesejahteraan*
		360643 (langsung)			*No. 98 APRJ*
Alamat kawat	:	*GINSI Jakarta*	*JAKARTA 10110 - INDONESIA*		
Alamat pos	:	*P.O. Box. 2744 JKT.*			

MENGUCAPKAN:

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"

DAN

"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Menterjemahkan Pembangunan Dalam Bahasa Perbankan

Masyarakat mungkin masih ingat akan sebuah nama yang pernah menjadi buah bibir di sekitar bulan Maret lalu, karena berhasil mengumpul 70.000 anggota dalam daftar tunggu memperoleh pinjaman. Para anggota ini sebenarnya antri menunggu giliran pinjaman dari Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang menjanjikan syarat ringan tapi jumlah pinjaman menggiurkan.

Namun setelah diteliti, ternyata yayasan itu tidak visible baik sebagai lembaga keuangan maupun organisasi pengerah hibah. Akhirnya dibubarkan, karena menjurus kepada praktek penipuan dana publik.

Yang menarik bagi kita adalah jumlah antrian yang demikian membengkak. Masyarakat kita ternyata begitu mengkerubuti peluang untuk memperoleh uang secara lebih mudah.

Sejalan dengan meletusnya peristiwa YKAM, masyarakat pun mulai mempersoalkan peranan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Timbul pertanyaan, apakah antrian panjang anggota YKAM, merupakan pencerminan dunia perbankan kita yang kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat?

Arifin Siregar yang waktu itu masih menjadi Gubernur Bank Indonesia menjawab, bahwa jumlah anggota YKAM mencerminkan kebutuhan masyarakat akan uang, ya. Tapi, bahwa jumlah itu diartikan sebagai potensi pemohon kredit, belum tentu.

Bank adalah lembaga penyalur kredit, bukan organisasi hibah. Sebagai penyalur kredit, bank berkewajiban mengetahui kemampuan si debitur mengembalikan kredit tersebut. Sedangkan lembaga hibah, tidak mau pusing untuk apa pinjaman digunakan. Bank berkewajiban mengamankan pengembalian kredit, karena bank sendiri menghimpun dana masyarakat yang harus dibayarkan bunga. Bank tidak bisa seenaknya menyalurkan uang kepada setiap yang membutuhkannya, karena bank sendiri harus bertanggungjawab terhadap dana masyarakat yang dikelolanya.

Sedangkan Nyoman Muna, Ketua Perbanas menilai membengkaknya anggota masyarakat yang antri menunggu pinjaman pada YKAM, sebenarnya menggugat sampai sejauh mana perbankan telah menjalankan fungsinya secara tepat dan tanggap. Bank memang tidak perlu menjadi lembaga hibah yang mengabaikan keharusan kelayakan kredit. "Tapi bank juga harus malu karena kalah ulet dari para rentenir yang beroperasi di desa-desa dengan prasarana yang minim, tapi mampu bertahan hidup," katanya. Kalau rentenir bisa hidup di desa, ini berarti potensi pengembalian kredit di desa sebenarnya cukup tinggi.

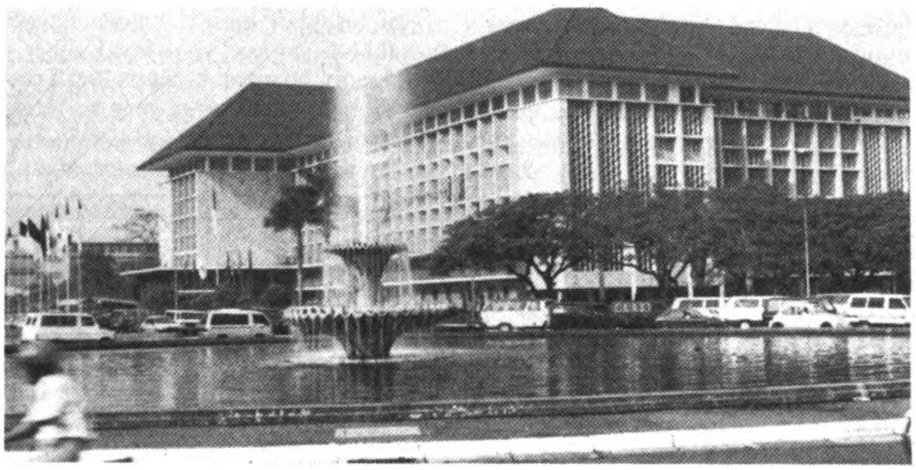

Gedung Bank Indonesia.

Dosa Profesi

Yang menjadi soal ialah perbankan kita belum berfungsi secara ideal, yaitu yang memenuhi fungsi komersial dan fungsi sosial sekaligus. Jadi masalah perbankan kita adalah bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan dan program-program pembangunan dalam bahasa perbankan yang lebih operasional. Dalam fungsi komersial bank memang harus mementingkan solvabilitas, rentabilitas dan likuiditas. Sedangkan fungsi sosial perbankan ialah bagaimana dia menjadi lokomotif perkembangan. "Untuk menjalankan kedua fungsi ini secara proporsional, memang diperlukan kemampuan menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam bahasa perbankan yang lebih operasional," kata Nyoman. Untuk ini bank-bank harus mampu memasukkan tanggungjawab sosial dalam perencanaan keuangan, perencanaan ekonomi, perencanaan strategi dan teknologi secara integral.

Dan mantan Dirut BNI '46, H Somala Wiria, senada dengan Arifin Siregar, mengatakan bagaimanapun juga kebutuhan uang dalam masyarakat adalah potensi kredit yang perlu digarap oleh perbankan. Tetapi pemberian kredit oleh bank diarahkan untuk tujuan produktif, bukan konsumtif. "Bila seorang yang membutuhkan kredit Rp 5 juta hanya cukup mencari uang muka Rp 250.000 untuk disetorkan ke bank, itu namanya urusan tekor," kata Somala Wiria.

Oleh karena itu untuk menggalang potensi kredit masyarakat secara optimal, bank-bank di Indonesia sejak deregulasi perbankan tahun 1983, berlomba-lomba menawarkan pelayanan yang cepat, murah dan efisien. Namun perlombaan dalam service ini, tidak berarti bank-bank melupakan kharakternya sebagai penyalur kredit yang bertanggungjawab terhadap uang masyarakat yang dititipkan padanya.

Dengan demikian, bagaimana pun juga, bank tetap memperhatikan faktor kelayakan kredit ini. Kendati demikian, bagi Nyoman Muna, peranan perbankan di Indonesia tetap belum ideal. Apa yang dia sebut dengan bahasa perbankan yang operasional,

Digitized by Google

belum terpenuhi. Bila dalam GBHN diamanatkan bahwa pembangunan ekonomi mengandalkan pertanian yang tangguh, maka perbankan harus menterjemahkan itu ke dalam bahasa yang operasional dari segi teknis perbankan. Karena kekurangan yang masih menggejala ini, maka dia menilai perbankan di Indonesia sampai sekarang masih terbelenggu pada fungsinya sebagai pedagang uang.

Karena itu dalam pemberian kredit bank-bank kita masih mengutamakan prime customer, atau nasabah yang sudah jadi. Padahal bank sebenarnya harus pula menciptakan nasabah baru yang bakal berkembang menjadi prime customer. "Bank-bank justru melakukan dosa profesi, bila dia menyebabkan pembengkakan jumlah orang miskin," kata Nyoman.

Namun bagi Arifin Siregar, perbankan bekerja atas dasar suatu prinsip tertentu yang pada dasarnya merupakan sikap bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam urutan prioritas pemberian kreditnya, nasabah yang sudah jadi biasanya mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha baru sebab risiko yang ditanggungnya diperkirakan relatif lebih kecil. Bagi bank, nasabah-nasabah yang baik tersebut merupakan nasabah prima (Prime Customer) karena kecilnya risiko.

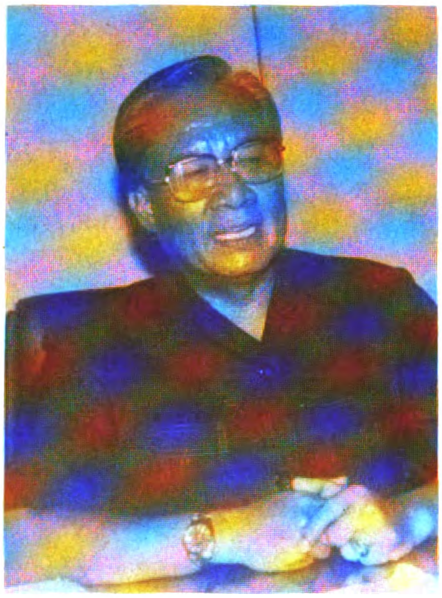

Nyoman Muna.

Ini tidaklah berarti bahwa hanya nasabah besar saja yang layak diberikan kredit. Nasabah kecilpun layak untuk diberikan kredit jika yang bersangkutan mempunyai berbagai karakteristik sesuai yang diinginkan perbankan. Bahkan banyak pula dari nasabah-nasabah kecil tersebut yang kemudian berkembang menjadi nasabah besar.

Di banyak negara maju usaha untuk menciptakan pengusaha baru biasanya dilakukan oleh lembaga venture capital. Di Indonesia hal itu belum terlalu populer sehingga kegiatan semacam venture capital banyak pula dilakukan oleh perbankan. Ini tampak nyata dari kredit-kredit kepada golongan pengusaha lemah seperti KIK/KMKP dan sebagainya. Dalam ketentuan pemberian KIK/KMKP. agunan tidaklah merupakan faktor yang utama. Dalam kredit semacam itu risiko kegagalan memang tinggi. Hal ini telah pula disadari oleh pemerintah dan Bank Sentral, sehingga risiko kegagalan tersebut sebagian besar ditanggung oleh pemerintah, Bank Sentral maupun lembaga asuransi yaitu Askrindo. Dari kredit ini telah banyak dihasilkan pengusaha-pengusaha baru yang berhasil mengembangkan usahanya. Sebagai ilustrasi, suatu perusahaan garment di Bali yang bernama Sari Busana beberapa tahun yang lalu memperoleh KIK/KMKP. Dengan kredit tersebut perusahaan dapat mengembangkan usahanya sehingga layak pula memperoleh kredit dalam

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

BAKRIE & BROTHERS
GROUP OF COMPANIES

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
D A N
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

P.T. BAKRIE & BROTHERS
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B - 1
Tel. : 510192 - 510212
Jakarta 12920

Digitized by Google

jumlah yang lebih besar yaitu melalui Kredit Modal Kerja sampai dengan Rp 75 juta yang merupakan kredit program Bank Indonesia. Perkembangan usahanya terus meningkat sehingga pada saat ini mampu untuk melakukan ekspor sebesar US$ 60.000 per bulan sehingga mendekati omset ekspor Rp 1 milyar per tahun disamping penjualannya di dalam negeri. Contoh ini tentunya bisa dilanjutkan lagi dengan ribuan pengusaha lainnya. Di samping itu, kita bisa melihat sendiri perkembangan nasabah bank dalam dua puluh tahun terakhir baik dalam jumlah maupun kualitas.

Dia mengatakan sependapat bahwa pemberian kredit seyogyanya lebih didasarkan pada kelayakan usaha daripada agunan. Hal ini telah ditekankan kepada perbankan setidak-tidaknya dalam tiga tahun terakhir. "Mudah-mudahan perubahan sikap ke arah itu cepat terlaksana seperti yang kita inginkan," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan "dagang uang" sebenarnya bukanlah merupakan kegiatan utama suatu bank. Sebagaimana diketahui, peranan bank adalah bagaimana menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada dunia usaha dalam bentuk kredit. Memang disadari bahwa kegiatan "dagang uang" sekarang ini justru berkembang di luar negeri, akan tetapi aktivitas tersebut lebih banyak berupa *"of-balance sheet activities"*.

Perkembangan perbankan di Indonesia justru pada tahap dimana aspek pembangunan memperoleh perhatian yang besar. Perbankan tetap memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan dunia usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari peranan perbankan dalam menyalurkan kreditnya kepada dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir. Selama tahun 1987 pertambahan kredit perbankan mencapai Rp 6,5 trilyun atau 25% sehingga posisi kredit pada akhir 1987 adalah sekitar Rp 34 trilyun. Perlu ditekankan bahwa pertumbuhan kredit sebesar 25% tersebut adalah amat tinggi jika dibandingkan dengan perkembangan kredit di negara-negara lain. Di Malaysia, suatu pertumbuhan kredit sebesar 10% sudah dipandang sebagai suatu pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa perbankan di Indonesia sebagai penghimpun dana dan sekaligus penyalur kredit, telah melakukan kegiatan sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan. Tercapainya swasembada beras, peningkatan ekspor bukan migas, perkembangan kegiatan pengusaha kecil dan menengah, pembangunan ratusan ribu rumah untuk golongan pendapatan rendah dan menengah, pendirian dan pengelolaan pabrik-pabrik serta hotel-hotel dan pengembangan perkebunan, sulit dibayangkan dapat terlaksana tanpa dukungan perbankan. Dengan demikian, kesan seolah-olah bank lebih berorientasi kepada kegiatan "dagang uang" nampaknya tidak didukung oleh kenyataan.

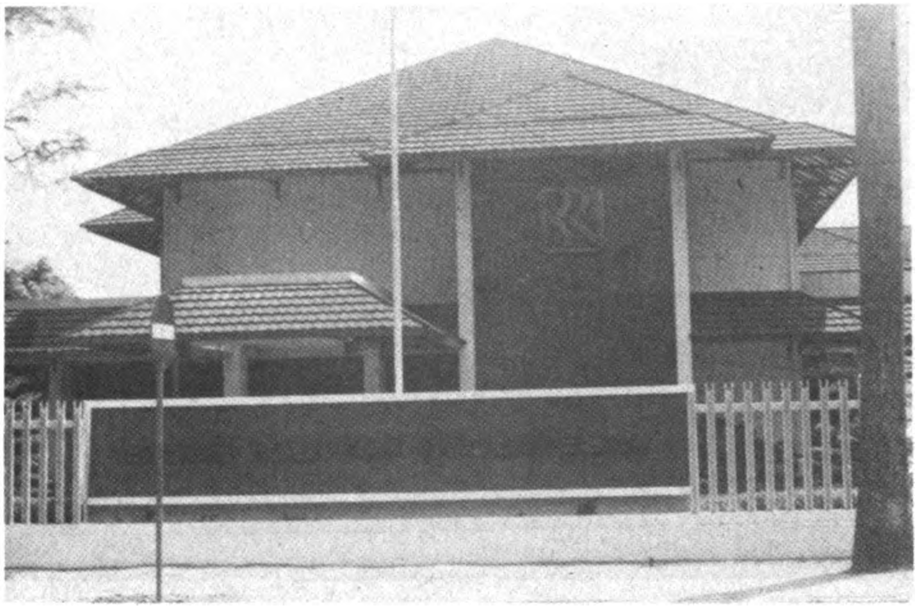

Gedung BRI

Untuk membantu kebutuhan kredit kalangan dengan penghasilan menengah ke bawah berbagai usaha dalam beberapa tahun terakhir ini tampak terus digiatkan. Di samping Jawatan Pegadaian maupun lembaga keuangan formal lainnya, perlu dikemukakan adanya perkembangan yang pesat dari lembaga-lembaga perkreditan desa yang melayani kebutuhan masyarakat baik untuk investasi maupun untuk konsumsi bagi rakyat kecil.

Perkembangan Di Daerah

Di Sumatera Barat telah didirikan lembaga yang bernama Lumbung Pitih Nagari sejak tahun 1972. Bahkan dalam tahun 1987, lembaga tersebut telah berjumlah 588 dan tersebar di 100 kecamatan. Jumlah nasabah yang dilayani di seluruh Sumatera Barat telah mencapai lebih dari 50 ribu dengan jumlah pinjaman bernilai lebih dari Rp 3 milyar. Pinjaman yang dapat diberikan adalah antara Rp 50 ribu sampai Rp 3 juta per nasabah dengan bunga sebesar 20% per tahun. Lembaga yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah, uang pangkal maupun simpanan wajib ini menetapkan beberapa persyaratan dalam pemberian pinjamannya antara lain rekomendasi dari kepala desa maupun ninik mamak.

Di Jawa Timur berkembang pula lembaga serupa sejak tahun 1980 yang bernama Lembaga Kredit Untuk Rakyat Kecil. Lembaga ini memberi pinjaman sebesar antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per nasabah. Pada akhir 1987 lembaga tersebut telah berhasil memberikan pinjaman lebih dari Rp 7 milyar kepada sekitar 260 ribu nasabah yang tersebar di sekitar 1.200 desa. Keberadaan dari lembaga tersebut telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat maupun dalam upaya menggerakkan pembangunan di desa-desa.

Di Bali, lembaga yang bernama Lembaga Perkreditan Desa telah berdiri sejak tahun 1984. Pada mulanya lembaga tersebut hanya didirikan sebanyak 8 buah sebagai proyek percontohan. Pada tahun-tahun berikutnya lembaga tersebut berkembang sehingga pada akhir tahun 1987 telah menjadi 138 lembaga yang tersebar di seluruh kecamatan di Bali. Dalam lembaga ini pinjaman sampai dengan Rp 250 ribu diberikan atas dasar kepercayaan sedangkan selebihnya diberikan dengan jaminan tertentu.

Di Jawa Tengah, lembaga yang bernama Badan Kredit Kecamatan mempunyai operasi yang kurang lebih

Digitized by Google

Logo BNI yang baru.

sama. Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah tersebut memperoleh modal pertama dari APBD pinjaman yang bisa diberikan paling tinggi adalah sebesar Rp 200 ribu. Pada akhir tahun 1987 seluruh 497 kecamatan di Jawa Tengah sudah memiliki lembaga tersebut dengan jumlah pos pelayanan sebesar 2.860 pos BKK, sehingga diharapkan dapat melayani daerah yang lebih luas serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jumlah nasabah yang dilayani pada akhir tahun 1987 telah mencapai lebih dari 500 ribu nasabah dengan jumlah pinjaman bernilai Rp 18 milyar.

Di Jawa Barat, lembaga yang sejenis dengan itu adalah Lembaga Perkreditan Kecamatan. lembaga ini pada akhir tahun 1987 telah berhasil menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 30 milyar kepada sekitar 350 ribu nasabah melalui kantornya yang berjumlah 966 buah. Di samping itu, lembaga ini pun menerima dana dari masyarakat yang pada akhir tahun yang lalu telah menampung dana dari hampir 200 ribu penabung.

Sebagaimana dijelaskan, lembaga-lembaga perkreditan desa tersebut dapat membantu memecahkan kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa keuangan yang dapat diperoleh dalam waktu yang singkat dan dengan persyaratan yang lebih lunak. Namun demikian, jika dibandingkan dengan cepatnya pelayanan serta mudahnya persyaratan yang dikenakan YKAM serta besarnya jumlah pinjaman yang dijanjikan, nampaknya apa yang dijanjikan oleh YKAM tersebut adalah lebih menarik meskipun tidak mungkin dapat dipenuhi. Oleh karena itulah kesempatan pertumbuhan anggota YKAM dan popularitasnya melebihi lembaga-lembaga tersebut. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan, janji dari YKAM tersebut sama sekali tidaklah berlandaskan pada kemungkinan dapat dipenuhinya janji tersebut tetapi terutama untuk menarik minat calon anggota sebanyak mungkin.

Bank Minded

Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah telah pula dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia baik dalam bentuk kerjasama dengan badan-badan di luar negeri maupun dalam bentuk dorongan kepada pihak swasta yang berminat untuk melakukannya. Dalam hal ini ingin dikemukakan beberapa upaya tersebut. Yang pertama adalah survey yang dilakukan Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengenai seberapa jauh yang telah dilakukan oleh BRI serta unit desanya, lembaga-lembaga perkreditan desa koperasi. Yang kedua adalah bantuan dari Asosiasi Bank-Bank Agraria Asia Pasifik (APRACA) kepada lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah bantuan Bank Dunia dan ADB untuk menyalurkan kredit ke pedesaan. Yang keempat adalah pilot proyek dari Asian Pacific Development Center di Malaysia untuk mempraktekkan keberhasilan Grameen Bank di Bangladesh untuk diterapkan di Indonesia. Yang terakhir adalah kerjasama Rabobank dari Belanda dengan Bukopin.

Hal-hal tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan keuangan bagi masyarakat kecil baik di kota mupun di pedesaan. Meskipun demikian, hal ini tetaplah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan masyarakat kecil pada umumnya, yaitu dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan maupun pendidikan mereka yang memerlukan waktu yang panjang untuk mengatasinya.

Dalam hal kebutuhan kredit untuk investasi, orientasi perbankan kita, maupun perbankan di seluruh dunia pada umumnya, memang memberikan perhatian yang lebih besar pada nasabah-nasabah yang layak diladeni. Hal ini tidaklah bisa dilepaskan dari kenyataan adanya sikap tanggung jawab dari lembaga perbankan terhadap dana masyarakat yang dikelolanya. Justru di Indonesialah kita patut bersyukur bahwa perbankan dengan dukungan Pemerintah dan Bank Sentral telah mengambil prakarsa untuk memberikan kredit kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah yang mempunyai resiko yang besar bagi terjadinya kegagalan pemberian kredit. Namun resiko itu secara sadar diambil untuk dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru sehingga secara bertahap dapat dimunculkan kelompok pengusaha yang dapat berkembang dengan baik di kemudian hari.

Perkembangan jumlah pengusaha golongan ekonomi lemah yang memperoleh kredit dari bank telah mencapai jumlah yang cukup besar. Untuk KIK/KMKP saja jumlah nasabah tersebut telah mencapai lebih dari 2,5 juta orang pada akhir 1987 dengan posisi pinjaman lebih dari Rp 1,2 trilyun. Demikian pula nasabah kredit Candak Kulak yang telah mencapai jutaan orang, serta KUPEDES yang telah mencapai 1,3 juta orang dengan nilai sekitar Rp. 430 milyar menunjukkan hal-hal yang mendukung pendapat bahwa masyarakat telah bank-minded. Terlebih jika dikaitkan dengan jumlah penabung TABANAS, TASKA serta deposito, maka keyakinan tersebut kiranya cukup beralasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah pengetahuan masyarakat akan bank bukanlah yang menjadi inti dari permasalahan. Jawaban dari permasalahannya perlu dicari lagi pada pengetahuan sosial yang berkaitan dengan tingkat pendapatan maupun pendidikan masyarakat dalam hubungannya dengan kasus-kasus seperti Yayasan KAM yang kiranya membutuhkan waktu lama untuk mengatasinya. ☐ (DT/BM/LT)

Digitized by Google

Lagu Cengeng

BILA Menteri Penerangan bilang stop penayangan lagu cengeng, apa mau dikata, TVRI harus stop. Meskipun, terasa bagi kita semua betapa masih bingung (bak meraba-raba dalam gelap) rekan-rekan di media elektronik itu melaksanakan 'amanat' itu.

Menteri telah mengutarakan alasannya, bahwa lagu-lagu cengeng itu tidak sesuai dengan alam pembangunan, melemahkan semangat. Sepanjang 'larangan' itu berlaku di TVRI ataukah RRI, Menteri berhak dan tak melanggar peraturan apapun. Tapi tentu Menteri takkan melarangnya beredar dan digemari masyarakat. Karena, sejelek apapun suatu karya seni dianggap, secara moral ia tak boleh dipasung.

Almarhum Sukarno juga sependapat dengan Menteri Penerangan. Dulu Sukarno melarang lagu ngak-ngikngok dikumandangkan di RRI dan pun tak boleh ditayangkan di TVRI. Bahkan melarangnya total di masyarakat. Lagu ngak-ngik-ngok bertentangan dengan semangat revolusi. Sukarno sebenarnya sudah melakukan pemasungan, tapi apa mau dikata, waktu itu beliau sangat berkuasa.

Namun yang paling menentukan, tentu masyarakat sendiri. Ibarat makanan, ada yang senang bubur ada yang senang nasi ketan. Yang giginya kuat, bolehlah makan banyak-banyak yang serba keras.

Dokter

PROFESI kedokteran kembali menjadi sorotan, menyusul pemberitaan pers tentang cekcok dan adu fisik antara dua orang dokter karena bergunjing soal tarif. Menurut pers, keduanya terlibat perang dingin dan saling tuding mengenai tarif mahal yang tak sebanding dengan kualitas keahlian.

Maka, beberapa kalangan pendidikan tinggi kedokteran sampai kepada kesimpulan bahwa etika profesi kedokteran sedang luntur. Mereka menunjuk penyebabnya: uang.

Pasti sebagian terbesar kalangan dokter kita tetap setia kepada cita-cita dasar profesi. Tetapi adalah benar pula, sepanjang yang dialami masyarakat, tidak sedikit dokter yang memang tergelincir menyimpang dari cita-cita dasar itu. Cukup banyak keluhan masyarakat: mulai dari soal tarif yang dianggap kelewat komersial sampai kepada penanganan yang asal-asalan dan sikap-sikap yang tidak menyenangkan.

Memang dokter adalah manusia biasa juga. Tetapi, bagaimanapun di mata masyarakat sejak awal profesi kedokteran adalah profesi yang mulia. Tumpuan harapan dalam perjuangan seseorang mempertahankan hidupnya. Tumpuan harapan yang menyediakan pengabdiannya tanpa kenal waktu, tanpa membedakan derajat manusia dan tidak menomorsatukan pamrih pribadi.

Rupanya, seluruh gambaran ideal itu akan menjadi terlalu muluk dan akan berubah? Tergantung kepada para penyandang profesi itu untuk memilih arahnya sendiri. Apakah tetap seperti pada mulanya, ataukah merubahnya menjadi jasa komersial biasa. Masyarakat hanya dapat menyesuaikan diri dan lambat laun akan memberi 'perlakuan yang setimpal'.

Pemilihan Kepala Desa

SEJUMLAH media pers belakangan ini 'senang' memilih ekspose mengenai pemilihan kepala desa. Dan ternyata, itu cukup menarik perhatian banyak pembaca.

Pemilihan kepala desa merupakan ajang praktek demokrasi yang paling dekat di akar-akar masyarakat. Cukup menarik bahwa sistim pemilihannya punya kesamaan dengan pemilihan Presiden di Amerika Serikat — yang selama ini dianggap kampiun demokrasi di dunia. Yakni, pemilihan langsung oleh rakyat warga desa, dan biasanya meriah.

Secara ideal, inilah pelaksanaan nyata kehidupan demokrasi, yang harus dipelihara kelangsungannya. Hanya sayang memang, ternyata cukup banyak terungkap praktek tidak sehat dibalik pelaksanaannya. Pers mencatat antara lain: Praktek pungutan liar oleh oknum pejabat yang menangani proses pencalonan, praktek jual beli suara, praktek calon tunggal yang tak murni tapi berskenario, serta ekses finansial bagi para calon.

Kita mungkin perlu menengok lebih banyak ke bawah ke akar-akar dalam hal ini. Membantu terciptanya iklim yang sehat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini tanpa melakukan perusakan suasana demokratisnya. Pemerintah daerah misalnya dapat berperan dalam pengamanan pelaksanaan sejak awal: Mencegah praktek pungli oleh oknum dan praktek tidak sehat lainnya seperti yang dicatat oleh pers.

Digitized by Google

TIGA HARI DI JAWA TENGAH

Ketua DPP Golkar Ny. AS Moerpratomo dalam kunjungan kerjanya selama tiga hari baru-baru ini di Jawa Tengah, selain menghadiri dan memberikan pengarahan yang sekaligus menjadi Ketua Formatur dalam forum Musda IV Golkar Tingkat I Jawa Tengah, juga berkesempatan meresmikan Gedung Sekretariat DPD Golkar Jawa Tengah yang terletak di Jl. Kyai Saleh Semarang, diatas tanah seluas 270 m dengan biaya Rp 162 juta yang diperoleh secara swakelola.

Dalam kesempatan itu Ny. Moerpratomo sangat menghargai kepada para kader-kader Golkar setempat yang telah mempelopori pembangunan salah satu sarana tempat untuk perjuangan organisasinya yang dibangun dengan dana swakelola, hal ini menurut Moerpratomo perlu ditumbuh kembangkan dalam pembangunan di bidang-bidang lainnya. Hal mana akan dapat meringankan beban pemerintah yang memang sangat terbatas dananya dalam pembangunan sarana organisasi. Jika cara pembangunan swakelola ini dapat dikembangkan di bidang yang lain, menurutnya akan sangat membantu pemerintah dalam upayanya menumbuhkan perekonomian dalam Repelita V ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, ujarnya.

Ny. AS Moerpratomo selaku Menteri Negara Urusan Peranan Wanita berkesempatan pula mengadakan peninjauan ke Pondok Pesantren Putri "Aris" dan meninjau ketrampilan Bordir kelompok PKK Kecamatan Kaliwungu, usai peninjauan, Menteri melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Kendal untuk mengadakan pertemuan yang sekaligus memberi pengarahan kepada organisasi-organisasi wanita setempat, seperti Darmawanita, Darma Pertiwi, Kowani, BKOW, P2WKSS, PKK dan HWK di pendopo Kabupaten yang dihadiri tidak kurang dari 300 Ibu-ibu. Usai memberikan pengarahan Menteri UPW Ny. AS Moerpratomo diantar Bupati Kendal dan didampingi Ny. Sudono Yusuf menuju Kecamatan Sukorejo, dataran tinggi Kabupaten Kendal, 90 km arah barat Kota Semarang, untuk meninjau kegiatan klompencapir desa Sukorejo, Posyandu dan Kelompok ternak Cindelaras PKK Desa Sukorejo. Desa terbaik pada lomba desa Tingkat Propinsi Jawa Tengah 1988. ☐ (wt)

IN MEMORIAM ABUSAERI

Drs H Abusaeri meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Desa Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hari Minggu 11 September 1988 yang lalu.

Peristiwa itu terjadi, saat almarhum dalam perjalanan pulang dari Tegal menuju Jakarta dengan mengendarai mobil sedan, yang dikemudikan Salam, sopir pribadinya. Mobil itu tiba-tiba slip dan ditabrak sebuah truk dari arah yang berlawanan, sehingga almarhum meninggal dunia seketika. Sedang Salam mengalami luka-luka berat dan harus dirawat di Rumah Sakit Karawang.

Almarhum adalah anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan periode 1982-1987 dan 1987-sekarang, Ketua Kadin Jaya sejak 1985, Wakil Dewan Pembina Himpunan Pengusaha MKGR, Ketua II DPD Golkar DKI sekaligus sebagai aktivis di AMPI dan Angkatan Muda Jayakarta. Lahir di Tegal 50 tahun yang lalu, meninggalkan seorang istri dan empat orang putra.

Kepergian Abusaeri ini cukup mengagetkan kalangan anggota DPR/MPR-RI, Kadin dan lingkungan keluarga. Bahkan, tampak hadir di rumah duka di jalan Diponegoro adalah Menpera Ir. Siswono Yudohusodo, Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono SH, Ketua Bappenas Prof Dr Saleh Afiff, Ketua Umum Kadin Sukamdani S Gitosardjono, sejumlah anggota DPR dan masyarakat setempat.

Jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Kesadikan, Tegal, Jawa Tengah. ☐ (DT)

Digitized by Google

Prestise Karena Prestasi

Golkar, catatan 1983-1988

SAMPAI lima tahun yang lampau, orang lebih mengenal Sudharmono SH hanya sebagai seorang birokrat. Duduk dalam kabinet selaku Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono termasuk birokrat yang aktif dan efektif. Samasekali bukan seorang politisi. Akan tetapi suatu proses politik telah mengantarnya menjadi Ketua Umum dari organisasi politik terbesar di tanah air. Pada waktu dan proses yang sama tampil sejumlah tokoh lain dari latar belakang pengalaman, aksentuasi dan lingkungan (politik) yang berbeda, terpilih mendampinginya di Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. Beberapa dari 'perbedaan' itu di mata pengamat cukup kontras dan unik. Dan karena 'perbedaan' itu, dianggap menarik untuk diamati lebih lanjut.

Adalah karena mempunyai campuran yang lebih bervariasi dan lebih berwarna, maka kelahiran DPP hasil Munas III itu banyak diiringi analisa dan sejumlah pertanyaan. Bagaimana seorang birokrat akan mengemudikan suatu organisasi politik? Bisakah birokrat tipe administrator dan orang-orang muda yang dianggap berlatar belakang pengalaman 'radikal' saling menyesuaikan diri di satu panggung? Dan seperti apakah hasil akhir kerjasama antara birokrat dengan politisi praktis?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini lahir dari balik sejumlah asumsi tertentu. Bagi banyak orang, seorang birokrat — apalagi yang tergolong tidak banyak atau bahkan tidak pernah berbicara politik — cenderung kepada tipe administrator ketimbang tipe solidarity maker. Maka, seorang birokrat takkan banyak melakukan improvisasi politik, sementara politisi praktis akan lebih lincah dan lebih berolah gerak dan kata. Dalam pada itu pula, secara empiris menurut pengalaman politik sebelum ini, seorang tokoh yang duduk dalam pemerintahan sekian lamanya tidak mudah cocok dengan tokoh-tokoh muda apalagi yang berlatarbelakang perjuangan mahasiswa. Karena yang satu lebih mengutamakan stabilitas, sedang yang satunya lagi menempatkan stabilitas di urutan

DPP 1982-1988 tampil semacam formula baru.

kedua setelah dinamika. Selain itu, berbeda dengan politisi praktis yang lebih senior, tokoh-tokoh muda ex perjuangan mahasiswa yang terjun ke dunia politik lebih sulit tiba ke titik kompromi.

Kemenangan Strategis

DPP 1983-1988 memang lebih tampil sebagai semacam formula baru. Sebelum ini, posisi-posisi dalam organisasi politik yang bernama Golkar ini cenderung dianggap hanya cocok bagi para purnawirawan atau mantan eksekutif. Atau, bagi partikulir yang ingin meniti karir politik. Meskipun tidak persis begitu, tapi demikianlah kurang lebihnya. Sementara itu, tokoh-tokoh muda biasanya memulai karir politiknya di DPR. Maka, seperti yang digambarkan 'Far Eastern Economic Review' (Desember, 1983) sebelum Sudharmono SH menjadi Ketua Umum Golkar, posisi Ketua Umum bukanlah tempat yang terlalu menarik bagi tokoh-tokoh papan atas. Tetapi setelah Sudharmono bersedia memangku tugas itu, tiba-tiba disadari 'betapa penting' posisi itu ternyata. Dan kini, setelah lima tahun, di saat Golkar menyongsong Musyawarah Nasional yang keempat hal itu lebih terasa lagi. Antusiasme mengarus dengan kuat.

Agaknya, kehadiran Sudharmono SH yang juga adalah Menteri Sekretaris Negara, termasuk di antara faktor yang menambah bobot (dan prestise) penampilan Golkar. Dari segi tertentu, hal ini cukup menguntungkan, sebagaimana kehadiran generasi muda dalam prosentase memadai — yang memberi citra berlangsungnya regenerasi — juga dianggap melengkapi deretan plus point (yang kesemuanya tentu berlaku vice-versa). Sedikit banyak perubahan dalam bobot penampilan ini memberi pula keuntungan psikologis bagi laju keikutsertaan yang massal ketika Golkar segera setelah Munas III melaksanakan pendaftaran keanggotaan. Pada sisi lain, agaknya memang telah sejak lama grass of the root mencari kanal partisipasi bagi aspirasi politiknya sekaligus formalitas keikutsertaan itu dalam Golkar. Ini semua lalu jalin berjalin lagi menuju beberapa pencapaian dalam program konsoli-

Digitized by Google

dasi, untuk kemudian lebih meninggikan bobot kuantitatif maupun bobot kualitatifnya.

Program keanggotaan — yang didukung manajemen administrasi yang memadai — memberi hasil akhir tergambarnya wujud fisik Golkar secara nyata. Golkar memiliki anggota terdaftar sekitar 30 juta orang, dan 8 juta lebih dari jumlah tersebut berkualifikasi kader terdidik. Selain itu, rupanya masih ada 30 juta lebih simpatisan. Sehingga dalam pemilihan umum yang lalu Golkar bisa meraih 62.672.798 suara dan mencapai kemenangan yang strategis.

Angka 62 juta lebih tersebut — yang merupakan peningkatan dibanding hasil Pemilihan Umum 1982 — tidak datang begitu saja. Secara objektif, pertama-tama kemenangan datang dari para anggota Golkar sendiri. Anggota yang hampir 30 juta, telah mencapai hampir separuh dari suara yang terkumpul dalam pemilihan umum. Kemudian, program eka sapta — satu kader mengupayakan simpati 7 pemilih — agaknya cukup memberi andil.

Di luar itu, dengan sendirinya terdapat banyak faktor yang menunjang. Salah satu di antaranya yang penting adalah penggalangan konsisten yang dijalankan oleh Ketua Umum bersama para anggota DPP lainnya (Suatu pola yang dijalankan pula oleh para pimpinan Golkar di daerah tingkat II dan I). Selama hampir empat tahun penuh menjelang Pemilihan Umum 1987, Ketua Umum dan pimpinan Golkar lainnya mengunjungi propinsi demi propinsi, kabupaten demi kabupaten di seluruh Indonesia, bertemu dengan seluruh jajaran Golkar. Baik dalam rangka kaderisasi maupun untuk dialog langsung. Penataran kader, terutama kader penggerak teritorial desa, memang merupakan salah satu kegiatan menonjol pada pra Pemilu 1987. Ketua Umum juga mengunjungi jantung-jantung kelompok-kelompok 'aliran tradisional' dalam masyarakat melakukan dialog dan pendekatan. Sementara itu pusat-pusat 'diskusi' generasi muda dan kaum intelektual secara teratur didatangi oleh tokoh-tokoh muda Golkar seperti Sarwono, Akbar dan rekan-rekannya para Wakil Sekjen — David Napitupulu, AA Oka Mahendra SH, dan Drs Sudarmadji — serta fungsionaris lainnya.

Antara Tokoh

Memang tidaklah salah kalau dikatakan DPP periode 1983-1988 ini adalah kumpulan yang unik. Orang luar boleh saja menamakannya sebagai hasil dari sikap akomodatif dalam Munas III, tetapi kumpulan itu menjadi semacam blessing in disguise.

Seluruh jalur dan unsur terwakili, bahkan seluruh 'faksi'. Kelompok purnawirawan (Pepabri) terwakili melalui R. Soekardi, Korpri melalui AE Manihuruk. Terdapat pula tokoh-tokoh ormas eks Kino seperti RH Soegandhi, Oetojo Oesman SH, Drs Imam Soedarwo, Drs Gatot Soewagio. Dan dari kelompok spesifik, Ny. AS Murpratomo (wanita) dan KH Tarmudji (agama).

Akan tetapi barangkali, titik perhatian orang waktu itu (1983) dalam konteks perbedaan latar belakang yang membentuk kumpulan unik tersebut, lebih banyak tertuju kepada seorang tokoh muda, Ir Sarwono Kusumaatmadja yang terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Kemudian, Akbar Tanjung — yang beberapa tahun lalu menyelesaikan kuliahnya di UI sebagai seorang insinyur. Dan tentu saja, cukup banyak perhatian kepada tokoh-tokoh lain dalam scope yang lain, seperti David Napitupulu, tokoh perjuangan 1966 dan Ketua Umum pertama KNPI; Ir Siswono Judohusodo tokoh GMNI dari kelompok yang berbeda persepsi dengan Angkatan 1966, dan belakangan terjun jadi pengusaha; atau Tatto Pradjamanggala tokoh suatu organisasi pemuda yang banyak diapresiasikan secara berbeda-beda yakni Angkatan Muda Siliwangi.

Sarwono tidak mempunyai latar belakang sebagai birokrat seperti Sudharmono SH yang kemudian menjadi mitra kerjanya selama lima tahun dalam kepemimpinan Golkar. Sarwono berkecimpung dalam lingkungan perjuangan mahasiswa antara 1966 sampai 1971 — termasuk pers mahasiswa — sebelum terjun dalam karir politik praktis sebagai parlementarian sejak tahun 1971. Sebagai parlementarian, ia tampil vokal dan spesifik, meskipun ada saat kadang-kadang ia tidak bisa dimengerti. Beberapa senior di jajaran Keluarga Besar Golkar terutama yang duduk dalam eksekutif pernah mengkomplainnya: Kenapa ia 'mengkritik' padahal ia juga orang Golkar. Lalu ada saja pihak yang segera mengkaitkan hal itu dengan latar belakangnya yang oleh pers asing misalnya digambarkan sebagai kelompok muda yang radikal.

Akbar Tanjung juga mempunyai latar belakang lingkungan perjuangan mahasiswa. Seperti Sarwono, Akbar tergolong barisan perjuangan 1966 dalam menumbangkan Orde Lama. Tapi ia tidak dikategorikan radikal, walaupun ia berlatarbelakang lingkungan generasi muda Islam yang selama ini dikonotasikan radikal. Akbar pernah menjadi pimpinan HMI, yang dianggap moderat dan broad minded. Tipikal pembaharu dari lingkungan generasi muda Islam. Pernah menjadi Ketua Umum KNPI, sesudah David Napitupulu. Kemampuan persuasinya membuat ia diterima dengan 'gembira' di banyak kalangan.

Selain itu, yang juga menarik, adalah bahwa dalam DPP ini terdapat orang-orang yang di masa-masa sebelumnya tak terbayangkan akan ada dalam jantung Golkar. Tentu tak terbayangkan jauh sebelumnya bahwa dalam DPP akan duduk tokoh-tokoh yang katakanlah tadinya ada di tempat yang dianggap berseberangan, seperti eks NU atau eks GMNI sebagai misal. Tetapi merupakan fenomena bahwa tokoh yang di tahun 1966 pernah duduk dalam kepemimpinan GMNI yang ada pada barisan yang punya prinsip berbeda dengan Angkatan 1966 akhirnya bergabung di DPP, masuk melalui pintu Golkar yang memang terbuka. Begitu pula halnya dengan tokoh eks NU yang tadinya identik dengan barisan kelompok ideologi yang berdasarkan agama.

Kenapa 'setting' seperti itu ada, jawabannya harus dilihat kembali pada beberapa bagian dari latar belakang historis Golkar sendiri. Kelahiran Golkar di tahun 1964 dari mula memang dimaksudkan untuk mendobrak kebekuan kehidupan politik di bawah sistim Nasakom. Maka begitu pecah peristiwa G.30.S yang segera disusul oleh lahirnya Orde Baru, Golkar segera menjadi salah satu kekuatan pokok Orde Baru yang menyodorkan cita-cita pembaharuan politik. Cita-cita pembaharuan Golkar, membuat Golkar — masih pada masa awal Orde Baru — dipilih oleh banyak tokoh 1966 sebagai tempat menyalurkan aspirasi politiknya. Sehingga menjelang Pemilihan Umum 1971, dalam Golkar telah berkumpul sejumlah tokoh terkemuka perjuangan penumbangan Orde Lama, mulai dari Cosmas Batubara (KAMI) sampai Dr Midian Sirait dan Sulaeman Cakrawiguna SH (KASI). Konsep-konsep pembangunan politik yang kemudian muncul dari Golkar — yang dianggap produk dari kombinasi para purnawirawan ABRI dan unsur Orde Baru lainnya — menjadi salah satu pewarna yang kuat dalam Orde Baru. Dan Golkar menjadi identik dengan

Digitized by Google

Orde Baru.

Berkait dengan aspek historis, secara internal dalam Golkar memang pernah terdapat tahap-tahap cara memandang, lengkap dengan perangkat 'garis-garis batas'. Ada masa dimana garis 'Orde Baru atau bukan Orde Baru', katakanlah, berlaku de facto. Garis keras ini bisa tertuju kepada mereka yang berseberangan dalam perjuangan 1966, bisa juga berlaku kepada eks partai politik yang pernah menjadi peserta konstelasi Nasakom: PNI, NU dan sebagainya. Maka agaknya bisa difahami bila pada mulanya terdapat keengganan dan kecenderungan penolakan di tubuh Golkar terhadap datangnya berangsur-angsur beberapa kenyataan baru yang berupa kehadiran 'warga baru' di bawah pohon beringin. Tapi toh pada akhirnya, kenyataan ini diterima.

Suasana internal Golkar sebelum Munas III, memang dianggap sedikit lebih ketat. Sedikit banyak, orang mengaitkan hal dengan pengaruh almarhum Ali Murtopo salah seorang tokoh Orde Baru yang fenomenal. Ali Murtopo banyak mencipta kader tangguh dengan persepsi spesifik dan ketat. Ali Murtopo adalah tokoh pembaharu, tetapi ia percaya kepada perlunya ada garis-garis strategis, dan untuk itu ia cukup ketat.

Pada awal tampilnya Sudharmono dalam kepemimpinan Golkar, orang memberi konotasi yang bertentangan antara apa yang dianggap kelompok Ali Murtopo ini dengan kepemimpinan baru dalam Golkar. Sebelum era kepemimpinan Sudharmono dalam Golkar, peranan almarhum Ali Murtopo (meninggal 15 Mei 1984) memang sangat mewarnai Golongan Karya. Sejumlah 'kader' yang dianggap hasil tempaan Ali Murtopo turut serta dalam DPP 1983-1988. Timbul sangkaan, akan ada apa-apa terhadap mereka, sehingga pada mulanya sempat ada suasana kikuk. Tetapi dalam lima tahun relatif tak ada apa-apa yang penting terjadi dalam kaitan ini. Kader-kader tangguh yang tercipta dengan bimbingan almarhum, ternyata memperoleh peluang-peluang yang pantas. Sebagaimana pula mereka yang tidak dikategorikan berasal dari sana, memperoleh peluangnya sendiri secara pantas.

Prestise Karena Prestasi

Sementara para politisi belajar bekerja dengan birokrat, Sudharmono SH memperoleh pengalaman-pengalaman baru dengan politik praktis. Dalam organisasi politik sedikit banyak mekanisme tentunya berjalan dengan cara yang cukup berbeda dengan mekanisme dalam birokrasi. Ternyata Sudharmono bisa melakukan penyesuaian yang pantas dan menjadi lebih baik — dalam artian pelaksanaan tugas politik — dari tahun ke tahun. Beberapa pendahulunya di Golkar, berbicara dengan penuh warna-warni. Sudharmono tidak. Ia tampil lebih banyak mirip guru dalam 'mata pelajaran' tentang 'maksud dan tujuan program-program Golkar, dan tentang Pancasila dalam persepsi Golongan Karya'. Namun dalam dialog dengan para kader lapisan akar dalam kunjungan-kunjungan di daerah, ia jauh lebih 'hidup'. Latar belakangnya selaku Mensesneg dan salah satu pembantu dekat Presiden, membuatnya mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah. Ini menguntungkan, jajaran Golkar di daerah lebih mudah memahami berbagai persoalan yang sebenarnya.

Lalu apa yang bisa disimpulkan dari ini semua setelah waktu berlalu 5 tahun lamanya? Sejumlah pertanyaan terjawab dengan baik, tapi banyak asumsi awal di tahun 1983 menjadi tidak tepat. Namun satu hal dapat dikatakan, bahwa banyak hal yang dapat dicapai dengan baik dalam hampir lima tahun ini. Campuran unik dari tokoh-tokoh dalam kepemimpinan Golkar 1983-1988 ternyata memang banyak memberikan blessing in disguise.

Sebagai suatu organisasi politik, salah satu ukuran tentu adalah keberhasilan dalam pemilihan umum. Kemenangan dalam Pemilihan Umum 1987 lebih fenomenal. Sebagai kekuatan sospol yang berdiri di atas semua golongan, sesuai kehendak undang-undang, ABRI memberi perlakuan yang sama baik terhadap Golkar maupun kedua partai politik dalam Pemilihan Umum yang baru lalu. Perlakuan yang sama itu begitu nyata dan jelas, sehingga ketika justru Golkar berhasil meraih prosentase suara lebih tinggi dari pemilu sebelumnya tak dapat diisukan bahwa kemenangan tercapai karena 'bantuan ABRI'. Kemenangan ini menjadi lebih bermakna, dan terkait sebagai bukti bagi kemandirian Golkar. Tiga pemilu sebelumnya, masalah serupa senantiasa diisukan, sehingga Golkar seolah-olah sedikit terperangkap rasa kurang percaya terhadap potensi kemandiriannya. Betul, bahwa hasil Pemilihan Umum 1987 belum sepenuhnya bebas isu — kini isunya berubah menjadi bahwa kemenangan itu karena dukungan birokrasi. Akan tetapi ini tentu saja tidak benar, karena kesan itu timbul semata-mata karena penggeneralisasian dan ketidakjelian melihat kehadiran jajaran Golkar dari kalangan birokrat yang sebenarnya kehadiran sebagai perorangan.

Lebih dari sekedar kemenangan dalam pemilu, sesungguhnya terjadi banyak pencapaian yang berprestise. Belum terhitung terciptanya suasana psikologis yang menarik: rasa bangga sebagai warga Golkar, antusiasme melakukan berbagai kegiatan, suasana internal yang lebih dinamik, respek yang lebih besar kepada organisasi di tingkat pusat maupun di daerah dan sebagainya.

Selama lima tahun ini Golkar sebenarnya memang sedang menciptakan dirinya sebagai organisasi yang makin ideal dalam lingkup konsep dan wawasan Demokrasi Pancasila. Terlihat ada upaya nyata makin mendekatkan diri kepada bentuk dan cara berpolitik sebagaimana yang menjadi tuntutan undang-undang politik yang ada. Sekaligus, sebagai tanda konsistensi terhadap cita-cita Orde Baru. Langkah terbaru dalam rangkaian ini ialah peningkatan demokratisasi Golkar melalui mekanisme bottom up yang secara teoritis akan memberi hasil akhir lebih mengukuhkan kemandirian dan mengakarnya Golkar serta peningkatan kualitas. Dan adalah suatu perkembangan yang menarik, bahwa dalam mekanisme yang bottom up itu, lewat Musda-musda, ABRI ikut menyumbangkan sejumlah tokohnya yang masih segar untuk memperkaya jajaran kepemimpinan Golkar.

Golkar pun agaknya sedang menjadi kanal penghasil — yang produktif — kader untuk kepentingan nasional, sebagai bagian pembangunan politik. Termasuk dalam hal ini kader untuk pemerintahan. Sejumlah tokoh Golkar mendapat tanggungjawab baru yang lebih berat dalam pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Dan adalah menarik pula fenomena dalam Sidang Umum MPR 1988 yang lalu, dua tokoh pimpinan nasional datang dari Golkar. Ketua Dewan Pembina menjadi Presiden/Mandataris, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat menjadi Wakil Presiden. Ini sesuatu yang besar artinya.

Dari prestasi lahirlah prestise. Dan semestinya ini semua akan berlanjut dengan lebih baik lagi.□ Rum Aly

Digitized by Google

Musda Menggali Pemikiran Baru Yang Berjangkauan Jauh ke Depan

Ketua DPP Golkar Ny A. Sulasikin Moerpratomo, menegaskan, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar bukan sekedar kegiatan rutin untuk memenuhi ketentuan AD/ART Golkar, tapi lebih dari itu, merupakan forum untuk menggali pemikiran baru yang segar dan berjangkau jauh ke depan. Karena itu setiap organisasi kekuatan sosial politik sebagaimana digariskan dalam GBHN 1988, dituntut untuk meningkatkan kemampuan, kualitas dan kemandiriannya sehingga makin membangkitkan peranan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan politik. Penegasan ini disampaikan Moerpratomo dalam amanat pembukaan Musda IV Golkar Jawa Tengah, awal September lalu di Gedung APDN Srondol, Semarang.

Musda sekarang ini, lanjut Moerpratomo, diharap mampu merumuskan secara jelas dan tepat semangat, arah dan gerak kehidupan organisasi sebagai upaya pengamalan dari semua sila dalam Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. Karena itu menurutnya, Menteri Urusan Peranan Wanita dalam Kabinet Pembangunan V ini mengharapkan, Golkar sebagai modal dasar pembangunan harus mampu menggerakkan segenap lapisan masyarakat dan mengambil prakarsa dalam mensukseskan pelaksanaan Pelita V.

Golkar harus menyadari posisi strategisnya sebagai kekuatan sosial politik terbesar yang mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas pembangunan. "Golkar harus mampu memainkan peranannya sebagai pelopor pengamalan Pancasila," tegas Ketua DPP Golkar itu.

Kepeloporan Golkar dalam menegakkan kehidupan demokrasi yang dilandasi Pancasila dan UUD 45 menurutnya, menjadi dambaan rakyat. Untuk itu Golkar harus meningkatkan kemandiriannya sehingga makin membangkitkan kemampuan dan kualitas agar menggugah semangat partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan politik.

Golkar sebagai kekuatan sosial politik pengemban hakekat Orde Baru mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan mendewasakan kehidupan demokrasi. Demokrasi menurut pandangan Golkar, kata Ny. Moerpratomo, bukan saja menyangkut prosedur melainkan juga isinya baik di bidang politik maupun ekonomi.

Semakin Melembaga

Golkar memang bertekad melembagakan prosedur penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam UUD 45. Lebih dari itu keputusan-keputusan politik yang diambil sesuai dengan prosedur demokrasi haruslah benar-benar untuk kepentingan meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan rakyat.

Sebab demokrasi akan memberikan makna nyata bila harkat, martabat dan kesejahteraan rakyat meningkat. Dalam kaitan ini penting artinya partisipasi politik rakyat baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan yang muaranya pada hasil-hasil pembangunan itu harus dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata. Untuk itu pendidikan politik rakyat perlu terus-menerus dilaksanakan agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga dari suatu negara yang demokratis. Kesadaran politik rakyat tersebut perlu dibarengi dengan kemauan politik dari penguasa untuk menciptakan iklim

Pembukaan Musda IV Golkar Jawa Tengah.

Digitized by Google

politik yang semakin demokratis.

Karena itu Golkar diharapkan semakin mampu memainkan peranannya dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, baik dalam bentuk maupun isinya. Artinya proses atau prosedur-prosedur demokrasi harus semakin dilembagakan dalam kehidupan politik kita. Hal itu mengandung makna, semakin dimantapkan partisipasi politik rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Semua itu akan menjadi lebih bermakna apabila isi atau keputusan-keputusan politik yang diambil benar-benar aspiratif dan secara kualitatif meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia.

Menanggapi tema Musda yang secara padat dirumuskan "Sukses konsolidasi, Sukseskan Repelita V dan Sukseskan Pemilu 1992," Ny. AS Moerpratomo yang juga pembina wilayah Jawa Tengah itu mengatakan, tema tersebut menggambarkan adanya kesinambungan dan peningkatan perjuangan Golkar. Sebab, lanjutnya, di satu pihak Golkar harus setia pada sejarah kelahirannya tapi di lain pihak Golkar juga harus mampu secara dinamis menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang terus-menerus sejalan dengan kemajuan pembangunan yang membawa harapan dan keinginan baru dalam ruang lingkup dan intensitas yang semakin meningkat.

Untuk itu diperlukan keteguhan tekad, ketajaman pikiran dalam menangkap tema-tema zaman, denyut nadi kehidupan masyarakat, sehingga Golkar diharapkan selalu mampu memainkan peranannya sebagai kekuatan pembaharuan bangsa. "Golkar harus pandai-pandai belajar dari pengalaman masa lalu, menyimak kenyataan kehidupan dewasa ini serta berorientasi ke depan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa".

Dalam kesempatan itu Ketua DPP Golkar secara rinci mengetengahkan arti daripada tema Musda tersebut. Di bidang konsolidasi idiil, diharapkan agar seluruh anggota Golkar benar-benar mampu menjadi pembela dan pengamal Pancasila. Ini berarti anggota dan kader Golkar harus lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam tingkah laku sehari-hari baik dalam perilaku kehidupan berpolitik maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.

Di bidang konsolidasi wawasan dijelaskan, hendaknya dengan tegas dinyatakan bahwa Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang terbuka untuk segenap lapisan golongan dan generasi bangsa kita. Golkar merupakan pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai, sikap, perilaku dan cara berpikir dan bekerja yang menjangkau kepentingan nasional, jangan sampai tersisa pemikiran yang berorientasi pada kelompok primordial sempit yang merugikan kepentingan nasional. Selain itu Golkar harus terus-menerus mendewasakan dan mengembangkan kehidupan yang demokratis dimana prinsip-prinsip kebersamaan yang bertanggung jawab, dihormatinya hak-hak dan kewajiban warga negara serta terpenuhinya rasa keadilan merupakan bagian perjuangan Golkar yang sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman.

Di bidang konsolidasi organisasi, tidak ada alternatif lain bagi Golkar kecuali meningkatkan kemandirian, kualitas dan kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan politik, baik melaksanakan pendidikan politik untuk membentuk kader yang tangguh dan berkualitas maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Berbicara mengenai kaderisasi, Ny. Moerpratomo menilai, secara kuantitatif Golkar telah berhasil mencetak kader. "Jumlah besar saja memang belum memadai. Harus disertai dengan peningkatan kualitas dan pembinaan jenjang karier yang lebih jelas". Berkaitan dengan peningkatan kualitas kader ini menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada generasi muda dan mahasiswa, wanita dan kalangan profesi yang potensial. Kader-kader yang telah terseleksi dengan rapi dan mendapat kesempatan dalam kepemimpinan organisasi atau birokrasi hendaknya mampu menunjukkan prestasi. "Jangan hanya sekedar menjadi kader yang cepat puas sehingga tidak mampu melahirkan pemikiran baru yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa."

Mengenai sukses Repelita V menurut Ny. Moerpratomo, beberapa aspirasi yang menonjol yang sungguh-sungguh memerlukan penanganan secara konsepsional antara lain menyangkut penyediaan lapangan kerja, pendidikan, pembinaan generasi muda, penanganan pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor informal lainnya, penyediaan sarana pelayanan umum, penanganan kelompok marginal dan penanggulangan masalah sosial, haruslah mendapat perhatian yang serius.

Persuasif

Dalam kaitan itu ia mengingatkan, kita harus waspada apabila aspirasi masyarakat yang berkembang secara luas tidak tersalurkan, bukan tidak mungkin pada suatu saat dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial yang pada gilirannya membawa dampak terhadap stabilitas nasional. Karena itu Golkar hendaknya dapat menangkap aspirasi tersebut dan segera berpikir dan berbuat sesuai dengan kewenangannya sebagai kekuatan sosial politik.

Selanjutnya mengenai pemenangan Pemilu 1992 Ketua DPP Golkar ini menyarankan agar setiap kader Golkar bekerja lebih keras lagi, mengingat masalah dan tugas berat yang membentang di hadapan kita sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah jumlah pemilih yang bertambah besar dan akan terdiri sebagian besar dari generasi muda, yang tidak kurang dari 63 persen dari jumlah pemilih yang diperkirakan berjumlah 109 juta lebih.

Untuk itu, Golkar harus melakukan penggalangan dan pembinaan terhadap masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif dan menyentuh hati sanubari rakyat, sebab itu setiap kiprah perjuangan Golkar haruslah mampu merebut simpati rakyat. Jangan sampai ada diantara kader-kader Golkar mengecewakan rakyat, berusahalah, berlakulah yang terbaik untuk rakyat banyak, kata Ny. Moerpratomo mengingatkan.

Sementara itu dalam kesempatan acara tersebut turut memberikan sambutan Gubernur Jateng Ismail, Pjs Ketua DPD Golkar Jateng Drs H Soeparto dan Ketua Jalur A dan B. Musda berjalan cukup tertib, meriah dan lancar, terdiri dari para peserta sebanyak 355 orang, seperti DPD Tk II, peninjau, DPD Golkar Tk I, DPP Golkar dan FKP DPR.

Pada akhirnya Musda yang berlangsung selama 3 hari itu dapat menelorkan beberapa keputusan diantaranya program daerah DPD Golkar Jateng dan berhasil memilih komposisi kepengurusan Golkar yang terdiri 33 orang pengurus pleno, yang terdiri 1 ketua, 3 wakil ketua, 1 sekretaris, 3 wakil sekretaris, 1 bendahara, 2 wakil bendahara dan 11 ketua biro yang masing-masing dipimpin 2 orang. Drs H Soeparto, akhirnya terpilih Musda untuk memimpin Golkar Jawa Tengah periode 5 tahun mendatang.☐ (wt)

Digitized by Google

Pemilihan Pengurus Merupakan Bagian Yang Terberat Dan Peka

Memperhatikan penyelenggaraan Musda-Musda sekarang ini menurut penglihatan Ketua DPP Golkar Ny. AS Moerpratomo, pemilihan pengurus merupakan bagian yang terberat dan peka. Karena, menyangkut soal-soal politik psikologis, menyangkut seleksi dan suksesi kepemimpinan. Penilaian itu dikemukakan Ny. Moerpratomo dalam kesempatannya menghadiri Musda Golkar di beberapa daerah baru-baru ini.

Walaupun berat, kata Ketua DPP Golkar yang juga sebagai Ketua Formatur dalam Musda di tiga daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat ini, dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Karena, katanya lebih lanjut, Golkar telah memiliki kriteria obyektif dan tingginya semangat musyawarah untuk mufakat di antara kita, kader-kader Golkar.

Kriteria yang dimaksud adalah, kepemimpinan Golkar haruslah terdiri dari kader-kader Golkar yang kepercayaan dan kesetiaannya pada Pancasila sudah tidak diragukan lagi, memiliki integritas pribadi, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada organisasi serta mampu bekerjasama secara kolektif dalam mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa.

Selain itu, dalam rekrutmen kader juga menganut perpaduan antara sistim prestasi dan sistim karier, dengan memperhatikan unsur peremajaan.

Dengan sistim tersebut diharapkan, kepemimpinan Golkar akan dipegang oleh kader-kader Golkar yang mempunyai idealisme tinggi, integritas pribadi, berani mengambil keputusan yang tepat dan memiliki komitmen pada cita-cita perjuangan Golkar serta mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, Ketua DPP Golkar Ny Moerpratomo dalam pengarahannya dalam Musda di DKI Jakata, Jawa Tengah dan Jawa barat selalu menekankan, seleksi calon-calon pengurus DPD Golkar harus dipertimbangkan secara matang-matang, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, hendaknya benar-benar dilakukan secara obyektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka, bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok yang sempit, mengutamakan kepentingan bersama. "Agar kepentingan organisasi Golkar dipimpin oleh orang yang tepat, sehingga mampu semakin meningkatkan kemajuan Golkar di masa yang akan datang," ujarnya.

Bagi mereka yang mendapat kehormatan dan tanggung jawab untuk menduduki kepemimpinan, ia berpesan, hendaknya benar-benar mampu memberi kesegaran baru yang inovatif bagi kemajuan Golkar, bangsa dan negara. Sebab, menjadi pengurus organisasi, katanya, terlebih organisasi sosial politik, harus ada kesediaan untuk berkorban dan sanggup aktif dalam menjalankan organisasi, jadi pengurus disamping merupakan kehormatan sekaligus menuntut pengorbanan. "Jangan harap yang sebaliknya, jadi pengurus untuk mendapat imbalan".

Dengan demikian, kepemimpinan yang demikian itu menurut Ny. Moerpratomo, Golkar akan selalu mampu memainkan peranannya sebagai agen pembaharuan menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

Akhirnya, dengan memperhatikan saran dan petunjuk-petunjuk Ketua DPP Golkar tersebut, musda-musda di tiga daerah itu telah berjalan dengan lancar terutama dalam penyusunan kepengurusan. Masing-masing daerah telah dapat memutuskan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Biro-biro, yang berjumlah 33 orang. Kepengurusan di tiga daerah itu masing-masing dipimpin, DKI Jakarta H.Moch Basofi Sudirman, Jawa Tengah Drs.H. Soeparto, Jawa Barat Agus Muhyidin.□(wt)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III

JL. PERAK TIMUR 610 — SURABAYA — KODE POS 60165 A
TELP.W.B. 295201 S/D 295207
TGM : PERUMPELB.SBA.
TLX : 31387
TROMOL POS : 5103

DIREKSI PERUM PELABUHAN III
Beserta seluruh Staf dan Karyawan
Mengucapkan :

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
17 Agustus 1945 — 17 Agustus 1988

Digitized by Google

Tidak Ada Larangan Wapres Jadi Ketua Umum Golkar

Menjelang Munas Golkar Oktober mendatang, terasa semakin gencar pertanyaan di kalangan masyarakat yang mempersoalkan, "Apakah seorang Wakil Presiden bisa menjadi Ketua Umum Golkar?" Pertanyaan seperti ini pernah ramai terlontar ketika Sudharmono SH yang masih berfungsi sebagai Ketua Umum Golkar, terpilih menjadi Wakil Presiden dalam Sidang Umum MPR, Maret 1988 lalu.

Dalam kesempatan wawancara dengan Media Karya (baca MK edisi April 1988), pertanyaan serupa pernah dilontarkan kepada Sudharmono. Atas pertanyaan itu ia menjawab, "Sebagai Wakil Presiden saya memang dipilih oleh rakyat dan oleh karena itu berada di atas kepentingan semua anggota masyarakat. Tetapi jangan lupa seorang Wakil Presiden adalah anggota warga masyarakat yang juga mempunyai hak berorganisasi, berkumpul dan berserikat. Jadi sebagai Wakil Presiden, tentu saja kedudukan sebagai Ketua Umum Golkar, tidak hilang karenanya."

Di ambang Munas IV yang kian mendekat, bersamaan dengan ramainya bursa di luaran tentang siapa yang bakal dipilih menjadi Ketua Umum Golkar untuk periode 1988 – 1993, pers coba melontarkan lagi pertanyaan ini kepada Sudharmono.

Usai menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha, minggu pertama September, melaporkan tentang kunjungan kerjanya ke daerah Aceh dalam rangka pembukaan penataran pengawasan melekat bagi pejabat-pejabat eselon di daerah tersebut, para wartawan yang bertugas di kantor Presiden mengajukan pertanyaan, "Apakah seorang Wapres bisa dipilih menjadi Ketua Umum Golkar?" Jawab Sudharmono: "Tidak ada larangan Wapres menjadi Ketua Umum Golkar." "Artinya Bapak bersedia dipilih menjadi Ketua Umum Golkar lagi?" kejar wartawan. "Itu terserah Munas," tangkisnya.

Dengan Presiden di Bina Graha: Terserah Munas.

Para wartawan mungkin tergoda untuk mengajukan pertanyaan tersebut, karena beberapa hari sebelumnya, Wagub DKI Brigjen Basofi Sudirman, dipilih oleh Musda I Golkar DKI menjadi Ketua Golkar untuk wilayah ibu kota negara ini.

Menanggapi terpilihnya Basofi, Sudharmono mengatakan, "itu pertanda baik. Dia adalah generasi muda, kader ABRI yang baik, dan bagi Golkar tentu saja merupakan kader yang bagus. Bahkan tidak ada larangan untuk tetap menjadi Wakil Gubernur. Yang harus dilepas adalah keefektifannya di ABRI. Tapi Wakil Gubernur, boleh ABRI, boleh tidak."

Menurut ketentuan ABRI, seorang perwira yang masih aktif bila terjun memimpin sebuah organisasi di luar jajaran ABRI, maka dia harus pensiun. Maka menyusul terpilihnya sebagai Ketua DPD I Golkar DKI, Basofi kini resmi menjadi purnawirawan. Namun posisinya sebagai Wakil Gubernur, tetap sah.

Basofi bukan orang pertama yang dalam kedudukannya sebagai Wagub, juga menjadi Ketua Golkar. Sudharmono menunjuk Wagub Riau yang juga terpilih menjadi Ketua DPD I Golkar sebagai contoh yang lain. Basofi dan Wagub Riau, merupakan contoh bahwa jabatan Wakil Gubernur tidak kehilangan makna, apabila pejabatnya juga menjadi Ketua Golkar.

Untuk meluruskan kerancuan persepsi tentang perangkapan jabatan ini, Sudharmono kepada wartawan menegaskan, "hendaknya dipisahkan antara Basofi Sudirman sebagai pribadi dan Basofi Sudirman sebagai Wakil Gubernur. Golkar merasa mendapat kehormatan, karena ia (Basofi) sudah perwira tinggi ABRI, masih efektif, muda, potensinya besar, jabatannya Wakil Gubernur, mau jadi Ketua Golkar. Coba ....

Golkar adalah organisasi kader, yang keanggotaannya adalah perorangan. Dengan demikian jelas, kehadiran seseorang dalam organisasi ini dalam fungsi apapun, terbatas pada kapasitas pribadi. Dalam alur pikir seperti ini, kiranya betul apa yang dikatakan Sudharmono bahwa tidak ada larangan seorang Wapres dipilih menjadi Ketua Umum Golkar. Dan yang berhak memilih tentu saja Munas. □

(DT/LT)

Digitized by Google

Karyawan Golkar Masuk Astek

Mau masuk Astek? Semoga mimpi itu jadi kenyataan. Memang sudah lama karyawan Sekretariat DPP Golkar mendambakan jaminan hari tua dan ketenangan kerja. Pasalnya, sebagai karyawan di suatu organisasi yang nota bene tiap 5 tahun berubah kepengurusannya, ketenangan kerja yang menjamin masa depan, merupakan pertanyaan yang cukup mencemaskan.

Agaknya dengan kehadiran Astek ke Sekretariat Golkar ini akan menambah kegairahan dan ketenangan kerja. Mengapa tidak? "Jika terjadi kecelakaan kerja" Astek sudah ada.

Setiap orang yang bekerja dalam suatu organisasi dengan mendapatkan upah atau gaji pada hakekatnya dapat menjadi peserta Astek, seperti karyawan, pegawai, staf, direksi, pengurus, guru, dosen, dokter, juru rawat, sopir, kernet, montir dari suatu organisasi atau yayasan, koperasi, rumah sakit, sekolah, toko, bengkel, atau perusahaan. Wajib hukumnya bagi badan usaha yang mempekerjakan sedikit-dikitnya 25 tenaga kerja atau lebih, atau pembayaran jumlah upah/gaji sebulan Rp 1 juta, demikian dikemukakan Direktur Keuangan Perum Astek, Drs Achmad Djunaidi AK, beberapa waktu yang lalu di DPP Golkar, ketika berlangsung penandatanganan formulir pendaftaran Astek bagi karyawan Sekretariat DPP Golkar. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Sekjen DPP Golkar Drs Soedarmadji, Kepala Sekretariat Sudarsono SH, dan wakilnya Robert Puang Sunur.

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) adalah program pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi karyawan dari setiap badan usaha baik milik negara maupun milik swasta, ujar Djunaidi.

Bentuk perlindungan dan kesejahteraan yang dimaksud adalah, jika karyawan mengalami kecelakaan kerja sewaktu menjalankan pekerjaannya, baik di pabrik, di kantor atau sedang pergi/pulang kerja di jalan raya, ia akan mendapatkan bantuan yang diperlukan berupa. biaya pengobatan dokter atau perawatan rumah sakit. Tunjangan sebesar upah/gajinya, jika ia terpaksa untuk sementara waktu tidak bisa bekerja. Tunjangan cacad, serta peralatan yang diperlukan, misalnya kursi roda, tongkat/kruk, prosthese anggota badan. Tunjangan kematian dan biaya penguburan kepada ahli warisnya jika kecelakaan mengakibatkan kematian.

Jika karyawan meninggal dunia karena sebab di luar tugas pekerjaannya, ahli warisnya akan menerima santunan kematian.

Pada hari tua, umur 55 tahun, karyawan akan memperoleh seluruh tabungan yang berasal dari iurannya sendiri serta iuran perusahaannya ditambah bunganya, yang dipupuk selama masa kerjanya, jelas Djunaidi.

Menurut Kepala Sekretariat DPP Golkar Sudarsono SH, selain karyawan Sekretariat DPP Golkar, karyawan-karyawan sekretariat DPD Golkar seluruh Indonesia, direncanakan akan masuk Astek.☐ (WT)

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

MANGGALA PRATAMA

JALAN PEMUDA 720, PHONE: 4893517 - 4890260 - 4897616
TELEX : 49187 MBB IA, FAX : 4881893, P.O. BOX 23 JNR-JR
JAKARTA—INDONESIA

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
D A N
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar
Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka
Kesinambungan Pembangunan Nasional

Digitized by Google

Oleh : Taufik Hidayat, S.H.

Pembaharuan Perundang-undangan dan Permasalahannya

Empat puluh tiga tahun sudah kita merdeka. Hal itu mengandung arti 43 tahun kita berkesempatan untuk menata dan membangun sendiri seluruh aspek kehidupan bangsa menurut cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17-8-1945! Banyak kemajuan yang telah kita capai selama kurun Orde Baru, terutama karena kita melaksanakan pembangunan nasional secara berencana dan berkesinambungan.

Sebagai warga dari suatu negara yang berdasarkan atas hukum, tentu kita digelitik pertanyaan: sampai di mana pembangunan hukum dilaksanakan, khususnya pembaharuan di bidang perundang-undangan yang harus menjadi landasan segala kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara ini?

Rupanya para perancang konstitusi negara kita dulu sudah melihat jauh ke depan tentang kemungkinan kesulitan untuk mengadakan pembaharuan hukum, oleh karena itu dengan arif mereka mencantumkan dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, ketentuan yang berbunyi: "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Rumusan tersebut mengandung makna, bahwa di satu pihak peraturan perundang-undangan yang lama masih bisa dianggap sesuai sebelum diadakan peraturan baru, tapi di pihak lain ketentuan itu mendorong agar kita segera mengganti segala peraturan yang sudah tidak sesuai, dengan peraturan baru yang isinya dijiwai oleh semangat kemerdekaan, dan dinamika membangun bangsa.

Ternyata penglihatan jauh ke depan dari para perancang konstitusi benar-benar kita rasakan sekarang, di mana kita belum berhasil menganti seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Hindia Belanda, meskipun mungkin di luar perkiraan mereka akan sampai 43 tahun lamanya. Namun demikian arah dan kebijaksanaan pembangunan hukum telah berhasil diletakkan bangsa Indonesia dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang terumus sebagai: "Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang terkandung dalam masyarakat."

Permasalahannya sekarang tinggal bagaimana upaya kita agar seoptimal mungkin bisa melaksanakan amanat GBHN tersebut, apa permasalahan dan tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan dalam mempercepat pembaharuan perundang-undangan itu.

Tidak Sederhana

Pembaharuan perundang-undangan tidaklah sederhana seperti yang diperkirakan dan dalam kenyataannya dilaksanakan melalui pembentukan berbagai perangkat undang-undang. Sedangkan kelancaran perancangan, penyusunan serta pembentukan suatu undang-undang terkait berbagai aspek antara lain persepsi, konsepsi, materi serta ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyusunan undang-undang dan di dalamnya terlibat berbagai instansi pelaksana kekuasaan legislatif. Kelemahan pada salah satu aspek saja dari mata rantai proses tersebut, akan sangat berpengaruh pada kelancaran pembentukan suatu undang-undang.

Melihat pengalaman dalam penyusunan berbagai undang-undang, maka permasalahan pembaharuan perundang-undangan akan berkisar di sekitar: (1) *Prioritas.* Terdapat berbagai pemikiran mengenai materi hukum mana yang perlu diprioritaskan sebagai suatu RUU yang akan diajukan ke DPR. Secara garis besar pemikiran-pemikiran tersebut bisa digolongkan ke dalam 3 kelompok.

Kelompok 1, yang menghendaki diprioritaskannya pembentukan perangkat-perangkat hukum pokok (basic laws) yaitu hukum pokok yang menetapkan dan mengatur hak dan kewajiban, perilaku dan hubungan-hubungan serta hal-hal lain dalam kehidupan perdata, dagang, perdata internasional, pidana dan acara. Biasanya perangkat hukum pokok ini termuat sebagai *kodifikasi* dalam berbagai Kitab Undang-undang. Perangkat hukum pokok biasanay didampingi perangkat hukum sektoral (sectoral laws), yang mengikuti prinsip-prinsip hukum pokok dan mengatur secara khusus kehidupan sektoral seperti ekonomi, industri, pertanian dan lain sebagainya.

Kelompok 2, yang beranggapan bahwa di dalam hukum modern pembentukan undang-undang tidak lagi secara primer mengarah kepada kodifikasi, melainkan pada modifikasi, yaitu perubahan masyarakat. Pembentukan suatu undang-undang haruslah dalam rangka mengusahakan perubahan masyarakat, dan hukum harus berjalan di depan sedangkan kodifikasi berjalan di belakang, menunggu nilai-nilai mengendap baru kemudian dituangkan dalam kitab undang-undang dengan proses yang sangat lama.

Untuk itu prioritas pembentukan undang-undang dilandasi kebutuan konkrit dan dilakukan secara *partial,* seperti halnya pembentukan undang-undang tentang Hak Cipta tidak harus menunggu pembentukan kitab undang-undang tentang Intelectual Property Right yang terdiri dari beberapa buku.

Kelompok 3, yang berpendapat seyogyanya kita tidak membentuk "yuristenrects" dalam arti hukum yang canggih yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum yang universal sifatnya. Tetapi kita harus membentuk hukum yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan tingkat kecerdasan bangsa. Dengan demikian prioritas yang harus didahulukan adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa sehingga diperoleh hukum yang hidup dalam arti sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak tergantung semata-mata pada selera sesaat.

Berkembangnya ketiga pemikiran tersebut dalam negara demokrasi seperti negara kita adalah baik, karena, akan memperkaya pilihan apabila kita akan menetapkan alnternatif terbaik untuk mempercepat terwujudnya pembaharuan perundang-undangan menurut skala prioritas yang sudah disusun secara matang. Namun manakala pemikiran tersebut tumbuh dominan pada suatu instansi pelaksana kekuasaan legislatif, mungkin saja

Digitized by Google

dapat mengurangi obyektivitas serta laju kelancaran proses penyusunan suatu rancangan undang-undang.

(2) *Materi Rancangan Undang-undang*. Materi suatu rancangan undang-undang seringkali berkaitan dengan materi di bidang atau sektor lain di luar sektor materi yang diatur. Demikian juga ketentuan suatu rancangan undang-undang mungkin bisa berpengaruh kepada ketentuan perundang-undangan yang lain, bahkan bisa membuat tidak berlaku, apabila rancangan undang-undang tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang nanti.

Sebagai contoh pengaturan izin surat khabar ada kaitannya dengan masalah percetakan, penerbitan dan wartawan. Demikian juga berlakunya KUHAP akan mempengaruhi undang-undang tentang Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karena itu penelaahan dan penelitian lintas sektoral serta koordinasi dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dari pekerjaan penyusunan rancangan undang-undang, dan sulitnya pekerjaan ini sering menjadi hambatan dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang.

Disamping penelaahan dan koordinasi tersebut, maka suatu rancangan undang-undang yang baik harus juga dikonsultasikan dengan kalangan perguruan tinggi, apakah dari segi-segi ilmiah dan asas-asas hukumnya bisa dipertanggungjawabkan.

(3) *Hirarki Perundang-undangan*. Untuk mengurangi hambatan dalam pembaharuan perundang undangan, saat ini sudah sangat dirasakan perlunya penetapan hirarki perundang-undangan, agar terjamin kepastian hukum dari daya berlakunya suatu peraturan. Ketidakjelasan hirarki dalam peraturan perundang-undangan akan menyebabkan kerancuan pengaturan suatu masalah, yang mungkin suatu materi seharusnya diatur oleh undang-undang ternyata diatur oleh peraturan pemerintah atau bahkan hanya oleh keputusan menteri, demikian pula sebaliknya. Dan akan dirasakan lebih memprihatinkan apabila ada ketentuan undang-undang yang dianulir berlakunya hanya oleh Surat Edaran.

Dalam rangka pembaharuan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum, khususnya untuk mewujudkan adanya tertib perundang-undangan, maka hirarki perundang-undangan sebagai suatu kesepakatan nasional perlu segera ditentukan,

Mengadaptasikan kebutuhan pembangunan dan tuntutan antar instansi.

(4) *Pembakuan dan Keseragaman*. Masalah yang juga sering merupakan hambatan dalam penyusunan undang-undang adalah karena kita belum memiliki undang-undang tentang pokok-pokok penyusunan perundang-undangan, semacam *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* pada zaman Hindia Belanda dulu. Hambatan yang dirasakan adalah setiap kali dirancang atau dibahas suatu rancangan undang-undang, belum sampai kepada pembahasan materi, sudah terjadi perdebatan yang panjang mengenai hal-hal yang seharusnya secara baku mudah diselesaikan, antara lain menyangkut alasan pertimbangan, pencantuman dasar-dasar hukum, pola penyusunan konsiderans dan lain sebagainya. Yang saat ini sering dijadikan pedoman adalah Instruksi Presiden (INPRES) No 15/70, tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan pembaharuan perundang-undangan yang cepat dan memadai, dibentuknya undang-undang tersebut sudah sangat dirasakan.

(5) *Peraturan Pelaksana*. Suatu undang-undang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk mengatur masalah yang cukup mendesak dan undang-undang tersebut disusun atas dasar perencanaan yang matang melalui suatu program legislatif nasional. Oleh karena itu seyogyanya begitu undang-undang tersebut disahkan, apabila disyaratkan dalam ketentuannya memerlukan peraturan pelaksana, maka peraturan pelaksana tersebut segera dikeluarkan agar bisa segera efektif berlaku.

Kelambatan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan suatu undang-undang, bukan saja menghambat bahkan dapat menimbulkan kevakuman, artinya peraturan perundang-undangan yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku, sedangkan yang baru belum bisa efektif diterapkan. Hal tersebut tentu saja sangat tidak menguntungkan upaya pembaharuan perundang-undangan. Terhadap keadaan seperti itu pernah timbul pemikiran apakah tidak sebaiknya penyusunan suatu undang-undang hendaknya satu paket dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya.

Tiga Dimensi

Sambil menunggu upaya pembaharuan seluruh perundang-undangan, untuk menjamin tersedianya peraturan perundang-undangan yang harus menjadi landasan penyelenggaraan negara serta untuk memenuhi tuntutan pembangunan, rupanya Pemerintah mengambil langkah-langkah penanganan yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai dimensi dalam kerangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, yaitu:

— dimensi pemeliharaan, yang bertujuan mencegah timbulnya kekosongan hukum, dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lama disertai pesan kepada para pelaksananya untuk disertai pesan kepada para pelaksananya untuk

Digitized by Google

tidak semata-mata berpegang pada pasal-pasal yang tercantum tapi berpijak kepada situasi dan aspirasi masyarakat.

— dimensi pembaharuan, merupakan usaha yang dilakukan dengan mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

— dimensi penciptaan, merupakan dimensi dinamika dan kreativitas untuk mengadaptasikan kebutuhan pembangunan dan tuntutan masyarakat agar membentuk perundang-undangan yang sama sekali baru seperti Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Memasuki tahap tinggal landas Pelita VI nanti, seyogyanya pembaharuan perundang-undangan sebagai bagian daripada pembangunan dan pembinaan hukum nasional sudah dapat terselesaikan, sehingga dalam mengakhiri Pelita V nanti sudah benar-benar terwujud tatanan hukum nasional yang akan merupakan kerangka landasan hukum bagi kelanjutan usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Untuk itu dalam memasuki Pelita V permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi kelancaran pembaharuan perundang-undangan sudah harus terselesaikan.

Sebagai sumbangsih, pemikiran bagi penyelesaian permasalahan tersebut adalah persepsi dan konsepsi. Perlu segera diwujudkan keterpaduan dalam persepsi dan konsepsi mengenai penyusunan materi serta prioritas pengajuan rancangan undang-undang, dan tersusun sebagai satu program legislatif nasional yang harus ditaati bersama.

Proses dan kelembagaan. Perlu adanya penyederdahaan jenjang proses penyusunan rancangan undang-undang, sangat ideal apabila penanganan rancangan undang-undang terpusat dalam satu lembaga/instansi yang berfungsi sebagai law centre yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembakuan. Perlu segera dibentuk undang-undang tentang ketentuan umum penyusunan peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya juga mengatur pembakuan dan penyeragaman susunan serta hirarki perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang memungkinkan tiap undang-undang bisa segera dilaksanakan.

Legislatif drafter. Upaya mempercepat pembaharuan perundang-undangan tersebut harus pula ditunjang oleh persiapan tenaga teknis yang profesional yang akan membantu kelancaran penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pendidikan dan pencetakan legislatif drafter, legal drafter harus makin diperbanyak.

Berbagi beban. Tugas-tugas dan amanat untuk menyelesaikan pembaharuan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini adalah sangat berat, sebagaimana sejak awal telah dilihat secara arif oleh para penyusun konstitusi kita. Oleh karena itu sudah seyogyanya apabila tugas berat penyusunan rancangan undang-undang tersebut sebagian diserahkan kepada DPR sebagai pelaksanaan hak inisiatif.□

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
D A N
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

P.T. PERKEBUNAN XVII (PERSERO)

Jalan Mpu Tantular 27 (Atas)
Telp. (024) - 24151 – Kotak Pos 41 – Kawat "TUJUHBELAS" – Telex 22218
S E M A R A N G

BIDANG USAHA :
PABRIK KARUNG

- Pabrik Karung Rosella Jl. Ngagel Timur No. 37 Surabaya
- Pabrik Karung Delanggu Delanggu — Klaten
- Pabrik Karung Petjangaan Pecangaan — Jepara

PERKEBUNAN SERAT/BENIH

- Perkebunan Serat Jawa Tengah Delanggu — Klaten
- Perkebunan Serat Jawa Timur I Jl. Raya Janti Peterongan — Jombang
- Perkebunan serat Jawa Timur II Jl. A. Yani No. 16, Lumajang
- Daerah Tanaman Khusus Banjarbaru Banjarbaru — Kalimantan Selatan
- Perkebunan Benih Kendalrejo Talun — Blitar

PROYEK PIR KHUSUS II KARET

- Proyek PIR Khusus II Tabalong Kalimantan Selatan
- Proyek PIR Khusus II Mamuju Sulawesi Selatan

PERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN :

- Mencukupi kebutuhan karung goni kemasan gula produksi PTP Gula, Kopi, Coklat dan komoditi perkebunan lainnya seluruh Indonesia.
- Mencukupi kebutuhan karung plastik kemasan gula produksi PTP Gula seluruh Indonesia.
- Menyediakan lapangan kerja
- Mengelola Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA)
- Memproduksi bahan baku (serat) Karung, Pulp, Textile dll.
- Meningkatkan pendapatan petani
- Memanfaatkan Lahan marginal & bonorowo menjadi lahan produktip.
- Menyediakan lapangan kerja
- Swa sembada Serat Karung Rakyat
- Meningkatkan pendapatan petani peserta proyek US$ 1.500/KK/Th.
- Menyediakan lapangan kerja
- Melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan produktivitasnya.
- Meningkatkan produksi komoditi ekspor non migas khususnya karet
- Pembinaan Transmigrasi
- Pemerataan Pembangunan

Digitized by Google

M. Syafa'at Habib

Pertumbuhan Ekonomi & Pengembangan Profesionalisme Serta Makin Bertambahnya Wanita Dalam Angkatan Kerja

Tanggal 9 Maret 1776 dianggap oleh sejarah sebagai peristiwa besar, sebab pada hari itu terbit sebuah buku yang dikarang oleh Adam Smith, sebagai bapak ekonomi dunia yang berjudul: *An Inquiry Into Nature And Causes The Wealth Of Nations"* sebagai uraian ilmu ekonomi yang dianggap ilmiah.

Buku tersebut berisi teori sekaligus orientasi politik yang memperlihatkan penulisnya memiliki disiplin ilmiah yang tinggi dan menentang kekuasaan politik yang tidak terbatas di negerinya, ketajaman Adam Smith terlihat dalam pandangan terhadap kesejahteraan masyarakat yang terancam oleh kelalaian kegiatannya sendiri. Tujuan ekonomi Smith ialah menciptakan kesejahteraan material dan temporer dalam masyarakat, untuk itu Smith mengusulkan kebebasan politik dalam ekonomi pasar.

Karena tujuan ekonomi juga memupuk kekayaan berupa benda dan jasa yang nyata, maka Smith menekankan perlunya keseimbangan proporsional antara produksi dan jumlah penduduk . Agar kemakmuran tercapai, perlu kegiatan produksi yang dilakukan secara efisien. Untuk itulah perlu manusia mengutamakan *Memproduksi kekayaan"*. Maka digerakkanlah pasar bebas dengan kompetisi yang sehat untuk menggairahkan kegiatan perekonomian.

Jelas bahwa ekonomi mengarah pada pertumbuhan kesejahteraan, agar obyektif ini tercapai kegiatan industri yang dilakukan ekonomi perlu menekan ongkos produksi serendah-rendahnya. Gerakan penekanan ini dikenal kemudian dengan nama *"Efisiensi ekonomi"*. Gerakan ini bahkan kemudian ditingkatkan pada 2 aspek pokok yakni; a) pembagian kerja dalam proses produksi, dan b) profesionalisme serta spesialisasi dalam proses produksi tersebut.

Sejak itu gerakan efisiensi berkembang di seluruh dunia. Negara dan masyarakat perlu menyediakan dan memacu kemampuan manusia untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Salah satu cara, dan ini yang terbaik, ialah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejak abad 18 tersebut memperlihatkan keampuhannya, lebih-lebih setelah masuk abad 19 dan 20.

Kemajuan iptek yang mampu memberikan ekspansi ekonomi, baik di dalam produksi, distribusi maupun kegairahan konsumsi masyarakat. Kemampuan Iptek pulalah yang kemudian mudah diamati dalam bidang transportasi, telekomunikasi, media elektronika dan komputerisasi.

Tampak jelas perkembangan ekonomi diimbangi perkembangan Iptek, sehingga mekanisme perekonomian yang berfokus pada penawaran dan permintaan makin memperlihatkan keragaman yang menghebat. Mekanisme penawaran dan permintaan berperan penting dalam naik turunnya harga barang dan jasa. Akan tetapi karena di dalam pasar berlaku "Checked And Balanced" yang bisa menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekuasaan ekonomi maupun politik yang tidak wajar dalam masyarakat, maka sistem checked and balanced mampu menolak kekuasaan yang tidak terkontrol lagi.

Apabila diamati sejarah modern abad 20 ini pernah dunia mentolelir adanya kekuasaan diktator yang sangat merugikan kehidupan manusia, tetapi kekuasaan tersebut akhirnya hancur akibat perbuatan sendiri. Walaupun secara sporadis masih terlihat sisa kekuasaan demikian terjadi di berbagai bagian dunia, dunia manusia makin sadar akan perlunya pengembangan kebebasan.

Perimbangan sumber alam dan sumber daya manusia di satu pihak dengan keperluan yang terus meningkat di lain pihak sering terancam stabilitasnya. Keadaan ini bisa menimbulkan krisis ekonomi dan resesi ekonomi, baik yang bersifat regional, nasional maupun mondial. Oleh karena itu ekonomi perlu perencana-perencana yang tangguh, yang dilakukan oleh elite yang bertanggung jawab serta kompeten, yang mampu berpikir jauh ke depan. Sebab sekali para perencana salah, sulit akan diadakan koreksi karena di tangan mereka lah kekuasaan berada. Walaupun tujuan ekonomi menciptakan kesejahteraan berupa jasa dan benda sebanyak-banyaknya, namun segi moral

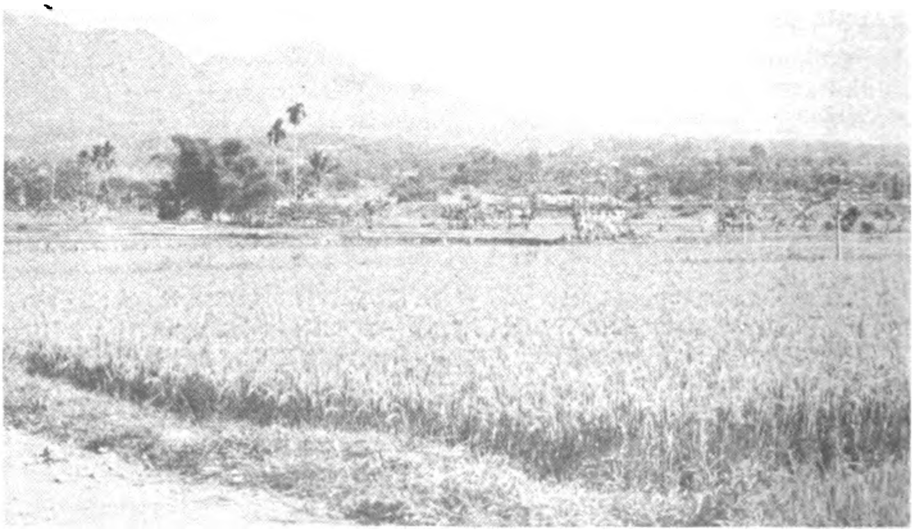

Perimbangan sumber alam dan sumber daya manusia.

Digitized by Google

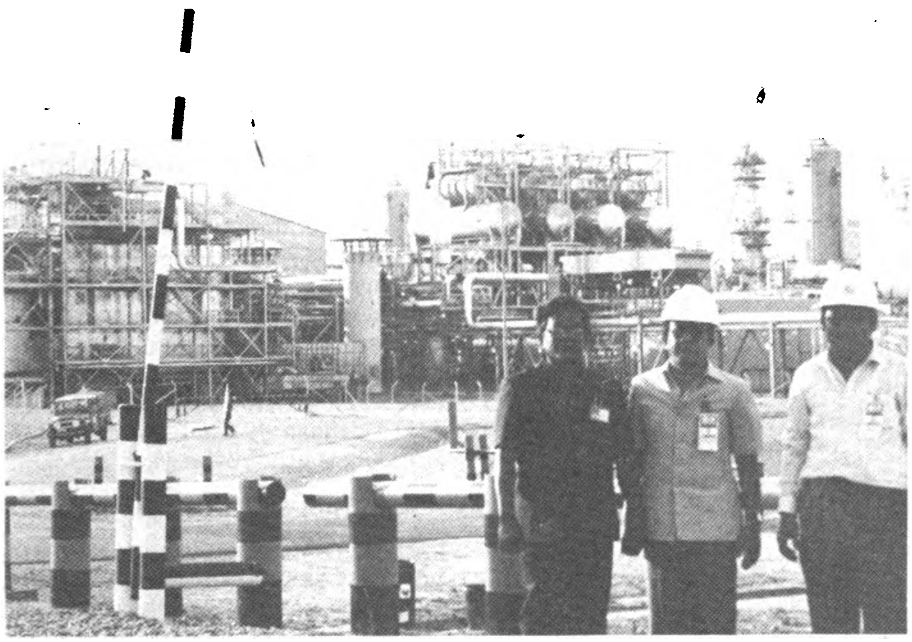

Sentral mekanisme sistim perekonomian terletak pada kepentingan individual.

oleh bapak ekonomi tersebut telah dikumandangkan, bahkan 20 tahun sebelum buku terkenalnya tentang ekonomi itu terbit. Buku moral ini berjudul *"Theory Of Moral Sentiments"*. Dalam buku ini Smith menekankan bahwa proses penyejahteraan masyarakat harus didasari oleh moralitas. Moralitas itu sendiri didasarkan kepada "kemampuan tertinggi seseorang untuk membayangkan dirinya di tempat orang lain."

Walaupun dalam beberapa hal pendapatannya sering berbeda dengan bukunya yang ke II, karena sentral mekanisme sistem perekonomian itu terletak pada kepentingan individual, tetapi sekurang-kurangnya Smith mengingatkan dipakainya moralitas dalam mengejar *self interest*. Oleh sebab itu Smith kemudian mengusulkan, agar tidak terlalu self interest, perlu checked & balanced dalam setiap tingkah laku penyejahteraan masyarakat, hal yang harus menjadi pendapat umum masyarakat.

Di sini tampak bahwa dalam mengejar pertumbuhan digunakan istilah kemanusiaan yang dalam buku tersebut dinamakan *"The Industry Of Mankind"* pengawas tertinggi ialah Tuhan Yang Maha Esa yang disebut oleh Smith sebagai *"The Invisible Hand"*. Oleh sebab itu Smith mengatakan yang tidak terlihat akan selalu campur tangan dan mengawasi kepentingan diri yang terbatas dengan kepentingan umum. Jelas Kiranya bahwa sumberdaya manusia/ketenagakerjaan sangat menentukan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan manusia.

Kiblat Pertumbuhan

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi perlu memanfaatkan intelegensia manusia untuk memproduksi benda dan jasa, meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Apabila di samping negara yang telah maju industrinya terdapat negara yang sedang mengejar kemajuan industri, maka yang terakhir bisa disebut sebagai negara berkembang, yang kebanyakan lahir sesudah Perang Dunia II. Karena arah perkembangan adalah modernisasi dan industri, kiblat kemajuan negara berkembang tersebut tertuju ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Negara berkembang yang umumnya masih miskin tidak hanya berkiblat, tetapi mereka pun melihat kesalahan kekuatan negeri-negeri industri yang lebih tua, terutama karena mereka justru melupakan proses historis negari-negeri miskin.

Sesudah Perang Dunia II memang terjadi perjanjian antara negara-negara sosialis dan liberal yang mempengaruhi Dunia Ketiga. Pola kehidupan negeri sosialis yang dipelopori Soviet dan liberal yang dipelopori Amerika Serikat banyak mempengaruhi Dunia Ketiga, yakni pola sosialisme ekonomi terencana di satu pihak dengan preferensi individual serta kekuatan modal usaha dalam pasar bebas di lain pihak.

Negara berkembang umumnya mengelaborasi pertanian dan kekayaan bahan mentahnya, selanjutnya menarik pelajaran investasi, teknologi dan bimbingan dari negara-negara maju. Dalam proses ini negara maju banyak yang salah mengerti tentang keinginan berkembang dari negeri yang sedang tumbuh, karena kepentingan nasional masing-masing negeri sangat berbeda; mereka mempunyai proses kesejahteraannya sendiri, pengalaman sendiri yang tidak mudah dipahami negeri adikuasa.

Konfrontasi negeri-negeri kapitalis liberal dengan sosialis serta usaha mereka memperoleh pengaruh di Dunia Ketiga sering mengorbankan negeri-negeri berkembang yang bersangkutan. Akibatnya Dunia Ketiga menjadi sasaran konflik, terorisme atau pilihan yang tidak mengenakkan berupa perang regional. Di sini lah kesulitan negeri miskin mencari kiblat kemajuan.

Banyak yang beranggapan keliru karena tidak memahami politik maupun kultur negeri berkembang yang sedang mencari stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Negeri maju sering hanya melihat dari segi material saja. Untuk itu mereka secara besar-besaran melakukan investasi dalam pabrik-pabrik transportasi industri dengan segala jenis teknologi. Tidak jarang mereka menjual senjata-senjata yang canggih yang secara tidak langsung bisa membuat keonaran karena tidak seimbangnya kekuatan regional.

Konflik nuklir yang terjadi antara negeri adikuasa ternyata bahayanya bukan pada konfrontasi langsung, tetapi justru pada dampak-dampak sampingan berupa ketegangan, kemungkinan konflik di Dunia Ketiga sendiri, terorisme, Pembajakan dan lain-lain, walaupun konflik nuklir tersebut akhir-akhir ini telah banyak mereda dengan adanya persetujuan Reagan dan Gorbachev.

Profesionalisme

Dekade awal setelah Perang Dunia ke II menunjukkan dengan jelas membanjirnya dua masalah, ialah pertambahan penduduk yang luar biasa dan pertumbuhan budaya ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia tidak hanya sebagai peserta tetapi sebagai pengolah alam yang tangguh. Dua masalah tersebut terutama di-

Digitized by Google

Meningkatkan kesejahteraan fisik keberadaan manusia.

sebabkan oleh membanjirnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya keahlian manusia yang sering dikenal dengan professionalisme.

Dalam ilmu ekonomi makro terdapat tiga kegiatan pokok ialah; a) kegiatan dunia usaha, b) kegiatan manajemen pemerintahan dan c) kegiatan rumah tangga yang menghasilkan tenaga kerja.

Tenaga kerja yang tampil dari rumah tangga, oleh jasa pendidikan dan pemeliharaan kesehatan yang makin baik, menawarkan kemampuan yang meningkat. Ketrampilan tersebut akhirnya mengelompokkan tenaga kerja pada professi tertentu dengan lapangan tugas yang khusus, mereka kaum professionalisme cepat merupakan golongan masyarakat yang tumbuh dengan karir mereka dari berbagai lapangan pekerjaan yang ada hingga ahli-ahli ilmu pengetahuan yang canggih. Namun dunia selalu disibukkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Di negeri maju seperti Swedia seorang menteri perburuhan harus mundur apabila angka penganggur di negara tersebut mencapai 2,5%. Di Dunia Ketiga, bahkan sering melanda negeri maju, tidak jarang terutama pada masa resesi ekonomi, jumlah penganggur menjadi *"double digit"*.

Tujuan kerja ialah meningkatkan kesejahteran fisik keberadaan manusia. Kerja memberikan kehormatan dan integritas dalam hidup serta pengembangan harga diri. Kerja mampu mengikat manusia dalam jaringan pelembagaan ekonomi, politik maupun sosial bagi kehidupan yang lebih baik serta prestise dalam hirarki masyarakat. Profesionalisme perlu dikembangkan sebagai pembentuk kualitas manusia, karena profesionalisme tidak hanya manifestasi kerja tetapi merupakan inti tertinggi kerja. Profesionalisme karenanya mampu memberikan prestise, kebebasan, penentuan diri sendiri serta pemahaman lingkungan dunia yang lebih baik.

Kualitas manusia profesional perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan prestasi kerja. Sosiolog Zawadski dan Lazarsfeld pernah mengatakan, bahwa orang yang mencari pekerjaan merupakan kerja yang paling jelek dan paling sulit, melelahkan dan tidak dibayar. Seorang penganggur biasanya putus asa, lelah dan sakit hati. Mereka memerlukan bantuan, terutama dari pemerintah, tetapi sering mendapat perlakuan yang kurang baik. Oleh sebab itu di negeri maju seperti Inggris diadakan asuransi agar penganggur jangan kelaparan. Pengangguran bisa menyebabkan kerapuhan fisik dan oleh karenanya butuh bantuan financial. Oleh sebab itu perlu dikembangkan gaya hidup yang mampu membantu mereka yang sulit atau tidak bekerja.

Pekerja Wanita

Betty Justice dan Renete Pore di dalam bukunya *"Toward The Second Decade The Impact Of The Women's Movement On American Institutions"*, menyebutkan, bahwa pandangan sejarah kaum materialis tentang kenyataan hidup menciptakan kesadaran, dan bukan sebaliknya. Kenyataan dunia maju memperlihatkan makin bertambahnya wanita dalam angkatan kerja dan pencari upah. Ini berarti wanita makin produktif dengan memanfaatkan pengalaman dan pendidikan yang ada.

Sedangkan Maryet Lee yang memperlihatkan kegiatan kerja wanita profesional menyimpulkan — seperti juga yang disimpulkan Nanci Reynold — bahwa profesi yang dilakukan wanita sekurang-kurangnya akan melibatkan syarat-syarat: (1) berpendidikan baik, (2) aktualisasi diri atau menjadikan diri siap menyelesaikan tujuan secara profesi, (3) kadar toleransi yang tinggi, karena emosi yang besar, (4) melibatkan unsur boleh dipercaya, (5) komunikator yang aktif dan (6) menjadi pelayan masyarakat yang baik.

Di negeri yang berkembang ternyata lapangan kerja bagi wanita terbuka lebar. Dalam kenyataannya wanita yang bekerja perlu memperhatikan empat dimensi yang ada pada dirinya yakni; (1) dimensi emosional, yakni mampu mengendalikan perasaan, (2) dimensi mental, yakni pemanfaatan kemampuan intelektual serta psikologis, (3) dimensi kejiwaan, yakni kemampuan rohaninya dan (4) dimensi fisik, yakni bekerja sesuai dengan kemampuan fisiknya.

Adelle F. Robertson, seorang pendidik terkenal dari Amerika, mengusulkan agar wanita tidak melupakan proses kehidupan yang vital, yakni terus meningkatkan pendidikan dirinya, agar sukses dalam hidupnya cepat tercapai, dengan cara; (a) mengetahui kekuatan diri sendiri menghadapi tantangan dunia, (b) menempuh pendidikan seumur hidup, (c) selalu memperbaharui diri dengan pendidikan maupun counseling, dan (d) mengembangkan diri, termasuk kecakapan, sikap dan kebiasaan serta pemahaman terhadap lingkungan.

Dengan angkatan kerja wanita yang berkwalitas tersebut dunia ke III akan mampu mangejar ketinggalan dari dunia yang lebih maju. □

Digitized by Google

Oleh: Joly Tamara

Undang-Undang Pendidikan Nasional Perangkat Tinggal Landas

Bangsa Indonesia pada era Orde Baru ini kembali mencatat sebuah prestasi penting dalam sistim perundang-undangan dengan akan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Sambil menanti dengan penuh harap sebelum diundangkannya, kita menyambut positif ajakan pemerintah kepada semua pihak agar memberikan kontribusi bermanfaat bagi terciptanya Undang-Undang tersebut. Sekarang RUU itu sedang dalam pembahasan DPR.

Amanat GBHN 1988

GBHN hasil Sidang Umum MPR Tahun 1988 secara gamblang menunjuk adanya kemauan politik bangsa Indonesia untuk menempatkan sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang amat strategis dalam rangka tinggal landas pembangunan nasional. Amanat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung-jawab atas pembangunan bangsa. Arah peningkatan kualitas manusia Indonesia secara konkrit menyangkut: keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung-jawab, cerdas dan terampil, mandiri, sehat jasmani maupun rohani, cinta akan tanah air, semangat kebangsaan yang tebal serta memiliki rasa kesetia-kawanan sosial.

Tugas pendidikan di dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut mencakup sekaligus dua sisi dari satu mata uang. Kedua sisi ini tak lain adalah dua hal pokok yang mengandung dimensi psikologis dan dimensi phisik. Dimensi psikologis bermuatkan aspek-aspek moral yang menggambarkan suatu kehidupan masyarakat yang religius, berpengetahuan, memahami etika politik dan etika sosial, beretos kerja, sehat rohaniah dan berpandangan hidup sesuai dengan ideologi negara. Sisi lainnya adalah tuntutan material manusia dalam proses pembangunan yang ditempatkan seimbang dan serasi dengan dimensi psikologis tadi. Tugas pendidikan pada sisi ini adalah membangun manusia Indonesia yang sehat jasmaniah, mampu menjawab kebutuhan sarana dan prasarana fisik, termasuk sandang, pangan dan papan.

Undang-Undang Pendidikan Nasional bagi bangsa kita merupakan panggilan sejarah, khususnya dalam rangka menjawab tuntutan UUD '45 sebagaimana tertuang dalam Bab XIII Pasal 31 yang menyatakan (1) Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam sejarah perjalanan bangsa kita, kenyataan ini dapat dikatakan sebagai upaya menyelesaikan salah satu hutang konstitusi. Namun tidak berarti hutang demikian karena kelalaian yang disengaja. Kita harus menyadari bahwa perkembangan kenegaraan kita tidak terpisahkan antara masa lalu, masa kini dan masa datang. Kehendak sejarahlah yang menentukan demikian adanya. Saat inilah dinilai sebagai momentum yang paling tepat Undang-Undang Pendidikan Nasional diwujudkan, setelah bangsa kita dapat mengatasi beberapa fase perjuangan yang panjang dalam sejarah republik ini.

Keberhasilan mengatur mekanisme ketatanegaraan dengan memantapkan sistim kehidupan demokrasi yang di dalamnya menelorkan ketetapan-ketetapan MPR, mencapai puncaknya pada penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi ini agaknya merupakan kunci yang membuka peluang bagi bangsa kita untuk segera memiliki Undang-Undang Pendidikan Nasional. Karena disadari, modal utama ke arah terciptanya Undang-Undang tersebut justru ada pada kriteria Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjiwai seluruh isi UUD '45, termasuk Pasal 31 tentang Pendidikan. Semangat dan pola operasionalnya akan dijabarkan dalam Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya kita berpaling sejenak ke belakang, mencatat usaha-usaha penjabaran Pasal 31 yang pernah dilakukan. Kita mulai dari sistim kenegaraan kita yang berbentuk RIS dan melahirkan UU No 14 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan yang diberlakukan hingga negara kita berbentuk Negara Kesatuan RI. Kemudian diikuti pula dengan UU No 22 Tahun 1961 khusus tentang Pendidikan Tinggi dan UU No 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional sampai pada penambahan dengan UU NO 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pendidikan Nasional Pancasila.

Harus diakui bahwa suasana kehidupan kenegaraan saat itu banyak mempengaruhi kelahiran dan keberhasilan Undang-Undang tersebut. Undang-undang yang pernah ada itu dianggap belum tuntas menjangkau kehendak Pasal 31 sehingga mengharuskan upaya maksimal menjabarkan lebih tegas, jelas, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk Undang-Undang Pendidikan Nasional yang benar-benar secita-cita dengan Pasal 31.

Pemerintah melalui Depdikbud di depan DPR pada kesempatan menyampaikan RUU Tentang Pendidikan Nasional juga telah memaparkan latar belakang proses penyusunan UU yang ada selama ini, lengkap dengan argumentasi tentang kekurangan kekurangan undang-undang serupa yang pernah ada di masa lalu. Mendikbud yang menjelaskan, pada Kabinet Pembangunan III telah dibentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN), disusul kemudian pada Kabinet Pembangunan IV yang berhasil menyusun Pokok-Pokok Sistim Pendidikan Nasional. Berbagai pertimbangan berdasarkan pengalaman selama itu ditambah dengan hasil kerja Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional kemudian hasilnya dirangkum menjadi RUU Pendidikan Nasional yang berisikan 60 Pasal, yang

Digitized by Google

saat ini sedang mengalami pembahasan mendalam di DPR.

Faktor-faktor Kunci Suatu Sistim

Undang-Undang Pendidikan Nasional yang akan dikeluarkan itu merupakan suatu sistim nasional yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Nasional secara terarah, teratur, menyeluruh dan terpadu. Di dalamnya sarat dengan berbagai misi dan tujuan pembangunan dalam arti multi dimensional. RUU itu menjadi semakin penting karena ia disodorkan pada saat kita memasuki momentum menciptakan kerangka landasan bagi tinggal landasnya pembangunan nasional.

Sudah barang tentu sebuah RUU memerlukan analisa dan pendekatan yang mengacu pada kesistiman yang kita anut. Juga harus memperhatikan beberapa faktor kunci yang menjadi bagian dari kerangka pokok sistim Undang-undang tersebut. Dalam rangka pendekatan kesistiman sebuah UU harus secara jelas membersitkan definisi, hakekat, ciri, sifat serta ruang lingkup pemberlakuannya.

Sistim Pendidikan Nasional dengan demikian menghimpun komponen-komponen yang dapat bekerjasama secara terpadu guna mencapai tujuannya. Antara satu komponen dengan komponen lainnya saling berkaitan dalam satu kesatuan yang bergerak bersama menuju ke sasaran UU itu sendiri.

Oleh karena itu Undang-Undang Pendidikan Nasional harus didasarkan atas konsep, analisa dan pendekatan sistim, agar penanganan masalah pendidikan dapat terlaksana secara sistimatik, dan rasional. RUU Pendidikan Nasional yang telah disampaikan, memang masih memerlukan pengkajian secara mendalam dan saksama baik oleh anggota dewan maupun oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk para pengelola pendidikan sendiri. Karena UU ini kelak akan mengikat semua kepentingan, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Tanggung Jawab Bersama

Adanya UU Pendidikan Nasional nanti tidak dapat diasumsikan sebagai maksud pemerintah untuk lebih banyak mengatur pengelolaan bidang pendidikan di negara kita. Dia harus dipahami sebaliknya. Artinya UU Pendidikan Nasional diharapkan semakin memberikan jaminan bagi semua pihak untuk berperan serta di bidang yang strategis ini. Termasuk juga di dalamnya memberikan perimbangan yang sebaik-baiknya antara tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil namun paling depan dalam pembentukan watak bangsa. Dari segi yuridis formal UU tersebut merupakan pengaturan seluruh sistim pendidikan nasional, akan tetapi dalam pembagian porsi tanggungjawab, kita harus bijaksana melihat bidang-bidang mana yang memang merupakan tanggungjawab pemerintah, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Akan semakin jelas apabila kita menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah proses budaya yang menyangkut harkat dan martabat manusia, sangat hakiki dan berlangsung terus menerus baik di tengah kehidupan unit terkecil keluarga maupun di tengah masyarakat.

UU mengikat semua kepentingan.

Pengaruh pendidikan pertama-tama meresap ke setiap individu, lalu dalam unit terkecil keluarga, kemudian membentuk kelompok masyarakat dan selanjutnya menggiring masyarakat keseluruhan kepada suasana kehidupan yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang dialami. Dengan demikian bidang ini haruslah dipikul secara bersama, merata, serasi, seimbang dan bertanggungjawab.

Arif

Beberapa masalah terungkap dari berbagai tanggapan masyarakat setelah pemerintah menyampaikan RUU Pendidikan Nasional beberapa waktu yang lalu. Mulai dari yang bersifat koreksi, saran usul dan kekhawatiran sampai kepada harapan-harapan. Pertama menyangkut kekhawatiran terhadap materi RUU yang cenderung sekuler. Kita dapat memahami kekhawatiran tersebut sepanjang didasari atas berbagai pengalaman yang terjadi di negara-negara maju di bidang pendidikan, ilmu dan teknologi tetapi produk manusianya cenderung individualistik, liberal bahkan atheis. Bahkan pada tiga dekade terakhir sebagai dekade yang menggambarkan kemajuan tingkat pengetahuan manusia muncul gerakan moralitas baru

Digitized by Google

(new morality), kaum *hippie*, pergaulan bebas sampai kepada paham ideologi dan fanatisme sempit akibat hilang keseimbangan antara pengetahuan dan keyakinan.

Di negara-negara berkembang pun timbul kecenderungan meningkatnya kenakalan remaja, suatu lapisan generasi yang justru tengah berada dalam suatu proses pendidikan. Semua permasalahan tersebut dianggap fenomena sosial dari pengaruh kemajuan dan lingkungan. Karena itu sistim pendidikan harus bercirikan *'homeostatik'* yaitu usaha-usaha pertahanan diri dari unsur negatif dengan tetap menjaga 'sifat biologik' sebagai sistim yang bisa menyerap nilai-nilai positif di sekitarnya.

Peran agama dalam hal ini sangat penting. Soalnya, adalah agar sistim Undang Undang Pendidikan Nasional ini sekaligus menjadi benteng yang kuat-kokoh dalam mengamankan Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup masyarakat dan berfungsi sebagai tuntunan pengamalan sila-sila dalam Pancasila secara utuh dan benar. Persoalan ini menjadi tidak sederhana sebab kita sama tahu bahwa pembangunan nasional, khususnya sektor pendidikan mengarah kepada terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, seimbang antara jasmani dan rohani, sepirituil maupun materiil. Dan di dalam keyakinan beragama, pendidikan merupakan bagian dari pengamalan iman. Kekhawatiran di atas akan ternetralisir manakala kita memahami keyakinan yang diberikan pemerintah bahwa UU Pendidikan Nasional benar-benar dijiwai oleh Pancasila yang pedoman operasionalnya berdasarkan GBHN 1988 tidak kurang lebih dalam arti prinsipil.

Sementara itu harapan lain dimunculkan agar sifat khas satuan pendidikan ikut mewarnai materi Undang-Undang tersebut. Kita tentu mengakui dan menghargai sepenuhnya peranan swasta di bidang pendidikan selama ini, khususnya lembaga keagamaan. Karena Undang-Undang ini harus mampu mengakomodir semua potensi dan aspirasi dalam keseluruhan subsistimnya, tapi harus tetap pada kerangka bhineka tunggal ika dan berproses secara demokratis. Harapan ini kita jawab bersama dengan menghormati nilai-nilai positif sifat khas yang ada melalui proses selektif akomodatif terhadap semua unsur yang dimiliki sifat khas tersebut. Dalam hal ini kita pertajam hakekat pelaksanaan pendidikan, yaitu mendorong ke arah penghayatan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lebih bersifat inspirasional ketimbang institusional semata dan membangun sistim pendidikan yang mengadung relevansi-relevansi kreatif terhadap semua dimensi pembangunan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam dengan tetap peka terhadap perkembangan dunia, ilmu, tehnologi dan dinamika yang hidup di tengah masyarakat.

Diundangkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional nanti mengandung konsekuensi penyelarasan semua kebijaksanaan pendidikan yang ditempuh selama ini. Memang jika melihat keseluruhan Rancangan UU Pendidikan yang sudah disampaikan pemerintah, diperlukan penjelasan-penjelasan pengertian yang benar-benar proporsional, termasuk segi istilah. Karena itu tidak kurang dari beberapa peraturan pemerintah akan segera menyusul setelah Undang-Undang ini disahkan.

Peraturan-peraturan pemerintah tersebut antara lain menyangkut satuan, jenis, jenjang sampai penggunaan gelar akademik. Isinya tentu bukan sekedar petunjuk pelaksanaan teknis semata-mata, tetapi penjabaran yang lebih konkrit dan mendudukkan pengertian sebenarnya seluruh tujuan dari sektor pendidikan ini. Kiranya penting juga memperhatikan faktor pengawasannya sebab apalah artinya sebuah sistem tanpa faktor ini. Di antaranya adalah masalah sanksi bagi segala akibat yang menghambat keseluruhan suasana proses pendidikan nasional kita.

Akhirnya hasil akhir dari adanya Undang-Undang Pendidikan Nasional akan menjadi perangkat strategis dalam mengisi kerangka tinggal landas bagi pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. □

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

PT MEDIA INTERAKSI UTAMA

HARIAN UMUM

SUARA PEMBARUAN

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"

D A N

"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Oleh : H. Abdulsalam Prawiranegara, SH.

Sebuah Upaya Pemberantasan Korupsi

Dalam garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan oleh wakil-wakil Rakyat kita telah tercantum komitmen yang bersifat nasional dalam upaya penanggulangan korupsi, yaitu yang berbunyi: ''Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa''.

Akan tetapi apa yang dimaksud dengan aparatur yang bersih dan berwibawa itu belum secara jelas dan terinci diuraikan. Oleh karena itu kriteria seseorang untuk dapat menduduki suatu jabatan dalam struktur kenegaraan dan pemerintahan belum juga secara jelas dapat dikaitkan dengan persyaratan tersebut. Karena itu sudah waktunya materi GBHN terutama yang menyangkut masalah aparatur negara dijabarkan lebih lanjut secara operational. Marilah kita mencoba menelaah lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan aparatur yang bersih dan berwibawa itu.

Pertama, yang dimaksud aparatur adalah organ atau alat yang berupa manusia atau orang yang diangkat oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk diberikan tugas dan tanggung jawab dalam suatu jabatan tertentu berdasarkan undang-undang; Misalnya: pengangkatan anggota ABRI, pegawai negeri, hakim, jaksa dan lain sebagainya.

Kemudian apa yang dimaksud dengan aparatur yang bersih itu! Menurut GBHN tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Yang dimaksudkan dengan manusia yang utuh adalah manusia yang sempurna keadaannya secara lahiriah dan batiniah berdasarkan Pancasila.

Jadi aparatur yang bersih itu berkaitan erat dengan manusia yang utuh terutama yang menyangkut kesempurnaan batiniah atau rohaniahnya.

Tegasnya, bersih dari perbuatan-perbuatan yang dilarang baik oleh norma hukum maupun norma-norma lainnya seperti norma agama, norma sosial, norma kesusilaan dan norma kepatuhan lainnya.

Sekarang pertanyaannya, sudahkah seluruh aparatur kita baik sebagai pejabat negara di tingkat pusat dan daerah sudah bersih dan berwibawa?

Diperlukan aparatur yang bersih.

Kita berani pastikan bahwa jawabannya masih belum sepenuhnya. Buktinya, masih adanya penyimpangan, penyelewengan, manipulasi dan korupsi.

Kemudian apa yang dimaksud dengan berwibawa itu?

Wibawa adalah suatu pancaran sinar dari pribadi seseorang yang dapat menyebabkan pihak lain menghormatinya secara ikhlas.

Jadi wibawa yang sebenarnya bukan timbul dari kekuasaan yang disandangnya, tetapi timbul dari pancaran jiwa seseorang yang patut dihormati serta disegani dan dipatuhi

Oleh karena itu masalah bersih dan berwibawa kalau dikaitkan dengan masalah kekuasaan aparatur, maka orang yang bersih belum tentu berwibawa dan sebaliknya orang yang berwibawa belum tentu bersih.

Adakah di negara kita figur yang dapat dijadikan teladan sebagai orang yang bersih dan berwibawa?

Jawabannya sudah barang tentu ada pada setiap hatinurani kita masing-masing.

Masalah Korupsi

Masalah tindak pidana korupsi atau biasa dinamakan kejahatan dari kalangan orang-orang pintar dan terpandang, sudah banyak dibahas surat kabar dan majalah atau media lainnya.

Ada yang bilang bahwa pemberantasan korupsi melalui saluran hukum sudah cukup, ada yang mengatakan masih belum cukup serta ada yang mengambil kesimpulan bahwa masalah korupsi berkaitan erat dengan masalah mental dan lain sebagainya.

Terlepas dari semua pendapat maupun pembahasan tersebut, maka korupsi dalam segala bentuk seperti pungli, manipulasi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta komisi atau tip (persen) dan lain-lainnya, harus segera diberantas secara konsepsional dan strategis. Mengapa? Karena wabah korupsi dalam segala bentuknya dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memerangi korupsi, tapi agaknya ada tiga hal pokok yang patut dilakukan untuk mendukung upaya itu yakni penyegaran aparatur; peningkatan kesejahteraan aparatur dan penegakan hukum secara jelas dan tegas tanpa pandang bulu.

Penyegaran aparatur, bisa diartikan penataan kembali terhadap fungsi serta jumlah aparatur yang sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang nyata di lapangan.

Peningkatan kesejahteraan aparatur terutama ditujukan kepada kebutuhan nyata dan pokok bagi setiap aparatur beserta keluarganya, seperti, pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan lainnya tidak termasuk dalam prioritas ini.

Penegakan hukum secara jelas dan tegas tanpa tidak pandang bulu mengandung arti kesamaan derajat di depan hukum bagi setiap warganegara Indonesia, mulai dari Presiden sampai dengan rakyat biasa (demokratisasi hukum).

Selain itu perlu diperhatikan pula tiga syarat pokok penegakan hukum yaitu, kondisi peraturan hukumnya; kondisi aparat penegak hukum dan kondisi kesadaran hukum rakyatnya.

Kalau diperhatikan, ketiga syarat itu saat ini sudah memadai tinggal tunggu komando dari yang paling atas, dan bukan dimulai dari bawah akan tetapi simultan atas-bawah dan bawah atas.

Memang kita akui bahwa untuk melaksanakan ketiga upaya pemberantasan korupsi tersebut di atas tidaklah mudah, akan tetapi juga tidak terlalu sulit apabila kita bertekad untuk memulainya. Yang penting adalah tindakan nyata untuk memulainya secara sungguh-sungguh serta kontisten dan tidak perlu ragu-ragu. □

Digitized by Google

A.R. Sutopo

Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Bebas Dan Aktif: Suatu Refleksi

Empat puluh tahun telah berlalu sejak Mohammad Hatta, sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI, memberikan keterangan pemerintah kepada Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Keterangan Pemerintah tentang politiknya yang disampaikan pada tanggal 2 September 1948 itu diberi judul *Mendayung Antara Dua Karang*. Bagian dari keterangan itu yang menyangkut kebijaksanaan hubungan luar negeri Indonesia kemudian dikenal sebagai landasan dianutnya asas politik luar negeri Indonesia bebas-aktif. Pada saat sekarang kita perlu secara sadar menengok ke belakang merenung sejenak politik luar negeri kita yang dilandasi asas-asas bebas dan aktif guna membangun wawasan kita dalam melangkah lebih lanjut dalam mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasional.

Ketika Bung Hatta menyampaikan keterangan pemerintah itu, Indonesia sedang menghadapi kenyataan yang makin nampak dalam lingkungan internasional yang mempunyai gema dalam politik nasional, yaitu berkembangnya konflik Timur-Barat. Hidupnya berbagai macam aliran politik mempengaruhi gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tentang situasi internasional dan pengaruhnya terhadap perjuangan dan kepentingan-kepentingan utama Indonesia. Menentukan sikap dalam menghadapi konflik Timur-Barat itu, adalah salah satu persoalan yang dikaitkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan usaha melawan kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia. Salah satu tuntutan, yang diajukan oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dikuasai oleh PKI, adalah memihak kepada salah satu pihak yaitu Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Alasan FDR adalah bahwa Uni Soviet merupakan pendukung dan pemimpin dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan dalam konteks konflik Timur-Barat, Amerika Serikat dipandang tulang punggung kubu Barat yang dianggap sebagai imperialis dan kolonialis.

Tetap Relevan

Menghadapi tekanan-tekanan FDR dan PKI itulah pula kemudian Bung Hatta menyampaikan keterangannya. Dan jawaban Bung Hatta adalah: ''Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.''. (Tekanan oleh panitia).

Itulah jawaban Pemerintah (Hatta) dalam menghadapi kendala politik luar negeri Indonesia, yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet, agar kita tetap menjadi subyek (yang berarti aktif) yang berhak menentukan sikap sendiri dan tujuan sendiri (yang berarti adanya prinsip bebas). Inilah kemudian yang menjadi asas politik luar negeri bebas-aktif yang dalam perjalanan waktu mendapatkan penegasan-penegasan Pemerintah, atau tafsiran-tafsiran dari berbagai kalangan.

Tetapi ternyata terdapat sesuatu yang membatasi pengertian *bebas* seperti itu, yaitu realitas dan kepentingan negara. Dalam kaitan ini pulalah Bung Hatta menyatakan ''Tiap-tiap orang di antara kita tentu mempunyai simpati terhadap golongan ini atau itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realiteit kepada kepentingan negara kita setiap waktu''. Jika diungkapkan secara lain, dalam menghadapi kendala lingkungan eksternal, pilihan kebijaksanaan adalah ''bebas'' memilih alternatif termasuk alternatif di luar ''ini atau itu'' sejauh hal itu sesuai dengan realitas yang ada dengan logika yang rasional. Dari sebab itu politik luar negeri yang dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip seperti itu bukanlah politik netral semata-mata, dan bukan harus berarti memelihara jarak yang sama terhadap pihak-pihak, terutama negara-negara besar, yang terlibat dalam konflik maupun kompetisi. Kepentingan sendiri, yaitu kepentingan negara, adalah unsur yang lebih menentukan dalam memilih kebijaksanaan tertentu dari waktu ke waktu.

Untuk itu Hatta juga menekankan pentingnya ''Perjuangan kita untuk diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama: Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri''. Karena itu ditegaskanpula bahwa perjuangan itu bukan berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional sebab ''tiap-tiap politik untuk mencapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional sendiri...'' Penglihatan (visi) Bung Hatta 40 tahun yang lalu itu hingga kini masih tetap relevan dalam percaturan hubungan internasional!

Kalau kita baca kembali *Mendayung Antara Dua Karang* khususnya yang berkaitan dengan politik luar negeri, akan tampak jelas kaitan antara konteks internasional dan konteks domestik Indonesia pada masa itu. Amanat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang anti penjajahan (kolonialisme) sebab penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tetapi Indonesia juga menghendaki persahabatan dengan semua negara dan berusaha mendapatkan bantuan yang menguntungkan kepentingannya dari pihak manapun. Dimensi ini tampak jelas pada tulisan Bung Hatta yang berjudul ''Indonesia's Foreign Policy'' dalam *Foreign Affairs* edisi April 1953. Dikatakan bahwa untuk mencapai suatu Indonesia yang berdaulat, bebas, adil dan sejahtera perlu sekali menjalin kerja sama dengan negara-negara lain.

Dalam tulisannya di *Foreing Affairs* itu Bung Hatta juga mengemukakan tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas dan aktif. Dikatakan bahwa tiga tujuan pertama politik luar negeri Indonesia adalah: (1) mempertahankan kemerdekaan rakyat dan menjaga keselamatan negara; (2) untuk mendapatkan dari luar negeri

Digitized by Google

barang-barang keperluan sehari-hari yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf penghidupan rakyat; dan (3) untuk mendapatkan perlengkapan pokok guna membangun kembali apa yang telah hancur atau rusak, dan modal bagi industrialisasi, pembangunan baru dan mekanisasi sebagian pertanian. Dikatakan bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia juga untuk menjalin hubungan bersahabat dengan negara-negara tetangga, untuk mengembangkan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, dan singkat kata, Indonesia ingin menempuh politik damai dan bersahabat dengan semua bangsa atas dasar saling menghormati dan tidak campur tangan dalam masalah domestik negara lain.

Kriteria Kepentingan Nasional

Empat puluh tahun sudah Indonesia melaksanakan politik luar negerinya yang dilandasi oleh asas bebas-aktif. Selama itu pula dalam ingatan kita tidak satu pun dari pemerintahan Indonesia yang pernah menyatakan meninggalkan asas politik luar negeri bebas-aktif. Selama jangka waktu itu pula kita telah mengikuti liku-liku pelaksanaan dan perkembangan politik luar negeri Indonesia atas dasar asas bebas aktif.

Prioritas tujuan, ruang lingkup kegiatan, kecenderungan arah, dan gaya pelaksanaannya dari waktu ke waktu selama itu pula terjadi perubahan-perubahan. Serangkaian tindakan dan kejadian mungkin dilihat sebagai mencerminkan terjadinya perubahan substansi dan prinsip dalam pelaksanaan. Pendek kata, selama kurun waktu itu kita melihat adanya kriteria tertentu yang dipergunakan oleh berbagai kalangan sehingga kesimpulan yang ditarik akan berbeda dengan kesimpulan kalau kriteria lainnya yang dipergunakan.

Sekedar contoh, kita seringkali mendengar bahwa dalam kurun waktu tertentu politik luar negeri Indonesia dianggap sebagai pro-Barat, misalnya selama pemerintahan Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo, dan dalam periode Orde Baru Indonesia dianggap lebih dekat dengan Barat. Dalam kurun waktu lain kita dianggap sebagai dekat dengan Uni Soviet (kabinet Ali Sastroamidjojo kedua dan ketika perjuangan akhir merebut kembali Irian Barat) yang kemudian beralih dekat dengan RRC. Pandangan demikian itu tampaknya dipengaruhi terutama oleh penggunaan kriteria hubungan dengan Timur dan barat. Atas dasar kriteria demikian itu tidak mengherankan kalau kemudian orang berbicara lebih mudah tentang penyelewengan dari asas bebas-aktif.

Akan lain halnya kalau kriteria yang dipergunakan untuk mengatakan bahwa terjadi atau tidaknya penyelewengan dari asas bebas-aktif dalam politik luar negeri Indonesia itu adalah kepentingan negara (nasional). Menurut kriteria ini yang dipermasalahkan bukan apakah kita dekat atau jauh dengan ini atau itu, tetapi apakah sifat hubungan tertentu dengan sesuatu pihak itu dilaksanakan menurut pertimbangan rasional demi kepentingan negara dengan mengingat realitas yang ada, dan dalam kurun waktu tertentu. Konsekuensinya, yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi kepentingan negara (nasional) dalam kurun waktu tertentu dalam lingkungan dan konstelasi internasional tertentu. Diskusi akan menjadi semakin panjang oleh karena itu kemudian menyangkut persepsi pembuat keputusan tentang apa yang menjadi kepentingan nasional dan bagaimana kemampuan untuk melaksanakannya serta ketepatan menilai konstelasi di lingkungan internasional. Tetapi bukan maksud dari tulisan singkat ini untuk melakukan suatu penilaian apakah selama empat puluh tahun pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif ini telah sempurna atau terjadi penyelewengan-penyelewengan.

Yang lebih penting untuk dibicarakan adalah relevansi keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Bung Hatta 40 tahun lalu itu bagi Indonesia dalam melanjutkan bahteranya mengarungi lautan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangannya untuk masa depan yang lebih baik. Sudah tentu ulasan pendek ini tidak dapat menjawab persoalan besar itu. Tetapi beberapa hal pokok dalam bentuk pertanyaan mungkin dapat sedikit memandu arah bahtera kita dalam mengarungi samudera percaturan bangsa-bangsa. Kalau 40 tahun yang lalu Bung Hatta dengan penuh optimisme berbicara tentang "Perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama: Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri" ketika kondisi negara kita masih demikian lemah, maka tidak ada alasan bagi kita sekarang untuk tidak seoptimis Bung Hatta.

Sejumlah Pertanyaan

Pertama, apa yang menjadi tujuan dan kepentingan luar negeri kita dewasa ini? Dalam GBHN 1988-1993 (Tap. MPR No. II/MPR/1988) dinyatakan, antara lain, tentang pelaksanaan politik luar negeri yang bebas-aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan di segala bidang, peningkatan citra Indonesia di arena internasional, peningkatan kerjasama internasional dan regional baik multilateral maupun bilateral dan partisipasi yang lebih aktif dalam berbagai forum internasional untuk turut serta memberikan sumbangan bagi terselenggaranya dunia yang lebih damai, adil dan sejahtera. Bagaimana prinsip-prinsip yang telah dituangkan dalam GBHN itu diterjemahkan ke dalam kebijaksanaan yang mencerminkan kepentingan negara (nasional) dan bidang-bidang apa saja yang perlu mendapat prioritas? Misalnya, kalau kepentingan nasional itu mendapat titik berat pada pembangunan di segala bidang, bidang-bidang apa saja yang tekait dalam hubungan luar negeri? Bagaimana itu akan dilaksanakan? Siapa saja yang perlu terlibat?

Kedua, lingkungan internasional seperti apa yang kita hadapi dewasa ini dan bagaimana antisipasi kita untuk masa depan? Kalau dahulu Bung Hatta menggambarkan kita mendayung bahtera di antara dua karang, perkembangan-perkembangan internasional yang terjadi dewasa ini sangat boleh jadi telah berubah. Jika terdapat karang (kendala), berapa banyak karang itu sekarang; jauh atau dekat dengan bahtera kita? Apakah kendala-kendala eksternal itu bersifat politik, militer, ekonomi, sosio-budaya dan perpaduan dari itu semua? Kendala mana saja yang secara rasional perlu segera dihadapi, dan bagaimana? Pada pokoknya ini menyangkut kemampuan kita menilai secara tepat dan rasional perkembangan internasional. Siapa dan apa yang dapat kita manfaatkan?

Ketiga, di mana tempat kita dalam percaturan internasional dewasa ini? Setelah lebih dari 43 tahun merdeka, dan terutama setelah melakukan usaha-usaha pembangunan sosial, ekonomi dan politik selama sekitar dua puluh tahun terakhir, posisi itu telah berubah dibandingkan ketika

Digitized by Google

kita masih lemah baik secara sosial, ekonomi maupun politik di dalam negeri pada permulaan kemerdekaan kita. Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang jauh lebih baik, persatuan nasional yang relatif telah tergalang, dan stabilitas dan keamanan nasional yang dinilai semakin teguh, apa artinya semua ini bagi kita dalam menempatkan diri di antara bangsa-bangsa! Sebagai negara kecil, menengah, atau besarkah kita, dan apa konsekuensinya dalam gelanggang internasional? Apakah modal yang kita memiliki itu cukup memadai untuk mendukung kepentingan-kepentingan kita? Apa kekurangan dan kelebihan kita?

Dan yang *keempat* adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara yang kita pergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan negara kita yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Kita seringkali mendengar tentang politik luar negeri kita yang *low profile* sementara beberapa kalangan menghendaki agar kita lebih *assertive* dalam melaksanakan politik luar negeri dan mengejar tujuan dan kepentingan kita di luar negeri atau yang terkait dengan luar negeri. Soal ini akan kembali ke dalam negeri kita sendiri. Bagaimana koordinasi kerja di antara pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan hubungan dan kebijaksanaan luar negeri dalam berbagai bidang (khususnya politik, keamanan, dan sosial-ekonomi)? Ini tidak hanya menyangkut kerja antar departemen saja tetapi juga di dalam lembaga dan departemen masing-masing.

Bagaimana kemampuan nyata pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk berbagai masalah internasional seperti perlucutan senjata, hukum laut, pembangunan internasional, konflik-konflik regional, pangan, kesehatan, kerjasama teknik antar negara, masalah-masalah bilateral, dan seterusnya? Cukupkah itu semua diserahkan kepada para birokrat saja atau perlukah kita melibatkan para ahli dalam berbagai masalah spesifik melalui koordinasi yang rapi? Siapa yang mengkoordinasi itu semua? Berkaitan dengan itu semua, berapa besar harga yang harus kita bayar? Pada akhirnya, *low profile* atau *assertive* dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah sekedar cara bagaimana kita membawa diri dalam lingkungan internasional.

Realistis-Pragmatis

Sekarang ini kita makin membutuhkan kejernihan pikiran dan kemampuan intelektual seperti yang dicontohkan oleh Bung Hatta dalam menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri kita. Kini makin menjadi nampak bahwa sebagian dari kepentingan nasional kita berada di luar yurisdiksi nasional kita. Tantangan terhadap kelangsungan hidup bangsa kita dewasa ini mungkin telah berbeda sifatnya daripada apa yang 40 tahun lalu kita hadapi. Tetapi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita dalam percaturan internasional tidak dapat diremehkan sebab politik luar negeri kita pada dasarnya bukan sekedar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Apakah kita ingin memperluas pasar ekspor nonmigas, mengimpor teknologi dan modal untuk mendorong industrialisasi, menjaga dan memperteguh kemerdekaan dan keselamatan nasional, meningkatkan citra di luar negeri, lebih aktif mengupayakan ketahanan regional Asia Tenggara, lebih berperanan dalam berbagai forum internasional, dan sebagainya, yang semuanya adalah demi kepentingan nasional kita, sebagian besar akan terpulang kepada kita sendiri. Bung Hatta telah memberikan visi dan insipirasinya kepada kita. Inilah tantangan kita dalam melaksanakan politik luar negeri yang berasas bebas-aktif dalam zaman ini: Realistis dalam merumuskan tujuan dan kepentingan nasional dan dalam menilai lingkungan eksternal kita, serta pragmatis dalam melaksanakannya.☐

I N S A

PERSATUAN PELAYARAN NIAGA INDONESIA

INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION
HEAD OFFICE: 10, JALAN TANAH ABANG TIGA JAKARTA — INDONESIA
TELP. : 370998 — 376694 — 375922 CABLE : DPPINSA JAKARTA
TELEX : 45248 INSABTGIA — 46428 INSANUSIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN PELAYARAN NIAGA INDONESIA
(D.P.P. I.N.S.A.)
BESERTA SEGENAP ANGGOTANYA

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
D A N
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

SEMOGA TERCAPAI CITA-CITA PERJOANGAN GOLKAR
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DI BAWAH PEMERINTAH ORDE BARU

Digitized by Google

DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN

P.T. PP. BERDIKARI

Jalan M. Ikhwan Ridwan Rais No. 7 Jakarta Pusat Telp. 361281-356021-359951-357880-371867 Telex 45421-46212 — BIDIK IA

&

SEMUA P.T. P.T. ANAK PERUSAHAAN
BESERTA
CABANG-CABANG/UNIT-UNIT
DI SELURUH INDONESIA
(BERDIKARI GROUP)

Dirgahayu Golongan Karya ke XXIV
20 Oktober 1988
dan
Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya ke-IV

P.T. P.T. ANAK PERUSAHAAN

BANK DUTA
Jln Kebon Sirih No 12 Jakarta
Telpon 3800900 901 (66 Saluran)
Telex 48308 47197 47493 BD JKT

P.T. UJUNG LIMA
Jln Yos Sudarso No 3 – 11 Jakarta Utara
Telpon 495520 495332 491934 491936
Telex 49391 UL JKT

P.T. WOTRACO
Jln Hayam Wuruk 103 104 Jakarta
Telpon 6295185 6297432 631337 6292508
6290065 6292213 6297539 6295291
Telex 41147 WTC

ASURANSI timur jauh
Jln Medan Merdeka Barat No 1 Jakarta
Telpon 375408 370266 375286 370074 370586
Telex 44202 44828 FAREAST IA

P.T. BERDIKARI UNITED LIVESTOCK
Gedung Perkantoran Liga Mas Indah
Jln Pasar Minggu (Samping Sate Pancoran)
Telpon 791125 791208 Jakarta Selatan
Telex 48507 BULI IA

P.T. KAPAS INDAH INDONESIA
Kantor Pusat Jln Halu Oleo No 87 Kendari
Telpon 21676
Telex 71472 KAPAS KDI
Perwakilan Jln M Ikhwan Ridwan Rais No 7 Jakarta Pusat

P.T. BERDIKARI SARI UTAMA FLOURS MILLS
Kantor Pusat Level 9 Kav 70-71
Jln Jend Sudirman
Telpon 5782321 5782320 Jakarta
Telex 46654 BSUF IA

P.T. BERDIKARI SULTRA
Jln Malik Raya No 7 Kendari
Telpon 21212

DISTRIBUTOR NASIONAL ALUMINIUM INGOT EX. P.T. INALUM ASAHAN

•

PABRIK PENGALENGAN NENAS DI JAMBI

P.T. PUSDIKARI SULAWESI
Jln Panakkukang III Blok E 19/1
Telpon 83670 Telex 71260
Ujung Pandang - Sulawesi Selatan

P.T. PUSDIKARI AGROTAMA
Kaloran Temanggung Jawa Tengah

P.T. PUSDIKARI RABAPORT
Jln Bajiminasa No 1 Ujung Pandang
Telpon 83204 83284
Telex 71562 BERDI IA
Facsimile 83227

PABRIK BATIK BERDIKARI DAN KERAJINAN TANGAN PALMERAH
Jln Masjid Pal VII Palmerah
Telpon 5482814 Jakarta Selatan

•

PERKEBUNAN NENAS DI TAPANULI UTARA.

Digitized by Google

Pekan Kebudayaan Aceh, Antara Tradisi Dan Semangat Perubahan

Masyarakat Aceh ternyata menyimpan begitu banyak harta budaya dalam kesehariannya hingga kini. Pekan Kebudayaan Aceh III yang dibuka oleh Wakil Presiden Sudharmono SH, di akhir bulan Agustus lalu, secara gamblang memamerkan kekayaan tersebut.

Ribuan penonton dan ratusan undangan yang hadir kala itu, dapat menyaksikan bukan saja banyaknya tarian yang dipertunjukkan, tetapi juga indahnya gerakan dan padatnya makna yang terselip di balik semua tarian tersebut. Dari Kodya Banda Aceh, dipertunjukkan tari Salem Hikmat, Ranub Lampuan, Genta, Merapati Sejudo Duo dan Tronu Blang. Kabupaten Aceh Tengah pun menggelarkan tari Seudati Singkat, Saman, Inem Manyak Tari dan Guwal. Sedangkan dari Kabupaten Aceh Besar dipertontonkan tari Likok Pulo, Ratoh Talo, Top Gapee dan Alee Bak Jock. Aceh Utara mengetengahkan tontonan lewat tari Alee tunjung, Poh Kipah, Munajad dan Limong Seurupa. Dan tari Geurimpeng, Gendrang, Biola Aceh serta Leubut dipersembahkan oleh Kabupaten Pidie.

Setiap kali menyaksikan sebuah pekan budaya, masalah yang menggugat adalah aspek pelestariannya di tengah pergulatan dengan sosok kebudayaan nasional serta pengaruh modernitas yang melekat pada komponen-komponen asing yang begitu deras memasuki wilayah nusantara dewasa ini. Dan agaknya orang selalu merasa tergoda untuk membicarakan sikap bangsa yang penuh dengan kekayaan budaya yang kita kategorikan sebagai "tradisional" dalam menghadapi budaya asing yang masuk bersamaan dengan arus teknologi dan ilmu pengetahuan. Manakah sikap kita terhadap ini semua?

Melestarikan kebudayaan tradisional.

Dalam pidato pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh III, Wakil Presiden Sudharmono telah menjawabnya. Kebudayaan, katanya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan insan. Kemajuan tanpa kebudayaan, akan membawa kehidupan terasa hambar "karena kehilangan maknanya yang lebih dalam."

Dalam hidup ini, lanjut Sudharmono, manusia tidak hanya membutuhkan sandang, pangan dan papan yang merupakan tuntutan-tuntutan primer. Manusia juga butuh keindahan. "Sebab dari situ terpantul mutu kehidupan sebagai insan yang berbudaya."

Lantas bila berbicara tentang peles-

Manusia membutuhkan keindahan.

Digitized by Google

tarian kebudayaan, bagaimana operasionalnya? Menurut Sudharmono, kebudayaan Aceh yang begitu indah merupakan asset kebudayaan nasional. Bila kebudayaan Aceh - termasuk kebudayaan dari mana pun juga di nusantara ini - perlu dilestarikan, maka konsekuensinya dia harus tumbuh dan berkembang. Artinya ada aspek dinamis dalam proses pelestarian itu sendiri.

Aspek dinamik dari kesadaran pelestarian ini penting, karena hal itu bisa menghindari kerancuan sikap upaya pelestarian itu sendiri. Sebab bisa jadi, tekad melestarikan kekayaan budaya dan tradisi menjebak orang menutup rapat-rapat arus perubahan dari luar. Budaya dan manusia pendukungnya dijadikan museum hidup yang haram terhadap sentuhan perubahan.

Menyadari kekeliruan ini maka Sudharmono mengingatkan kebudayaan Aceh harus membuka diri untuk

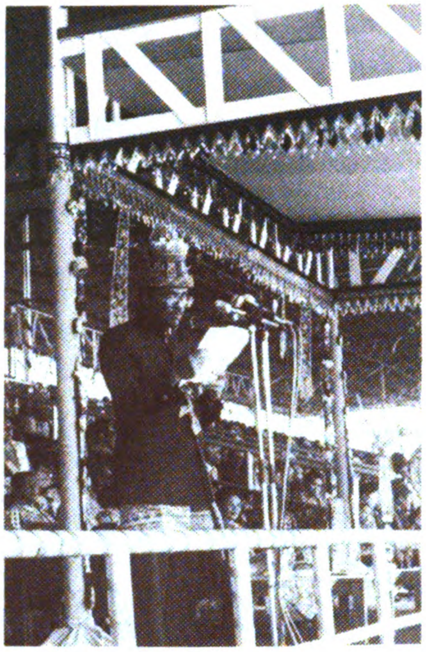

Prof. Dr. Ibrahim Hasan.

tukan sampai sejauh mana budaya yang terpantul dari sikap dan perilaku pendukungnya, mampu menjawab tantangan-tantangan jaman. Kualitas budaya yang responsif terhadap tantangan akan meningkatkan martabat manusia pendukungnya dalam pergaulan dengan bangsa lain di jagad ini.

Oleh karena itu Wapres mengingatkan, bila ada unsur-unsur tradisi dalam kebudayaan kita yang menghambat arus kemajuan, hendaknya tradisi semacam itu ditinggalkan. Dalam konteks pelestarian yang dinamik, kita memang berkewajiban memelihara tradisi. Tapi tradisi yang dijaga, tidak identik dengan memelihara kekunoan. Tradisi yang dipelihara adalah tradisi yang tidak kehilangan kharakter masa lampau dan yang responsif terhadap tantangan perubahan jaman. Inilah hakekat pelestarian kebudayaan sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa insani.

Kebudayaan Aceh harus membuka diri terhadap kebudayaan nasional.

mengikuti irama perkembangan kebudayaan nasional. Untuk itu, masyarakat Aceh sebagai pendukung subkultur daerah itu diminta agar meninggalkan cara berpikir yang tradisional menuju yang analitik, dari yang irasional ke rasional, dari yang generalis ke spesialis dan dari sikap santai ke efisien, berencana dan sadar waktu.

Manuver-manuver sikap budaya seperti ini, tentu disarankan Wapres dalam konteks perspektif ke depan. Mutu kebudayaan dan manusia pendukungnya di masa depan akan diten-

Digitized by Google

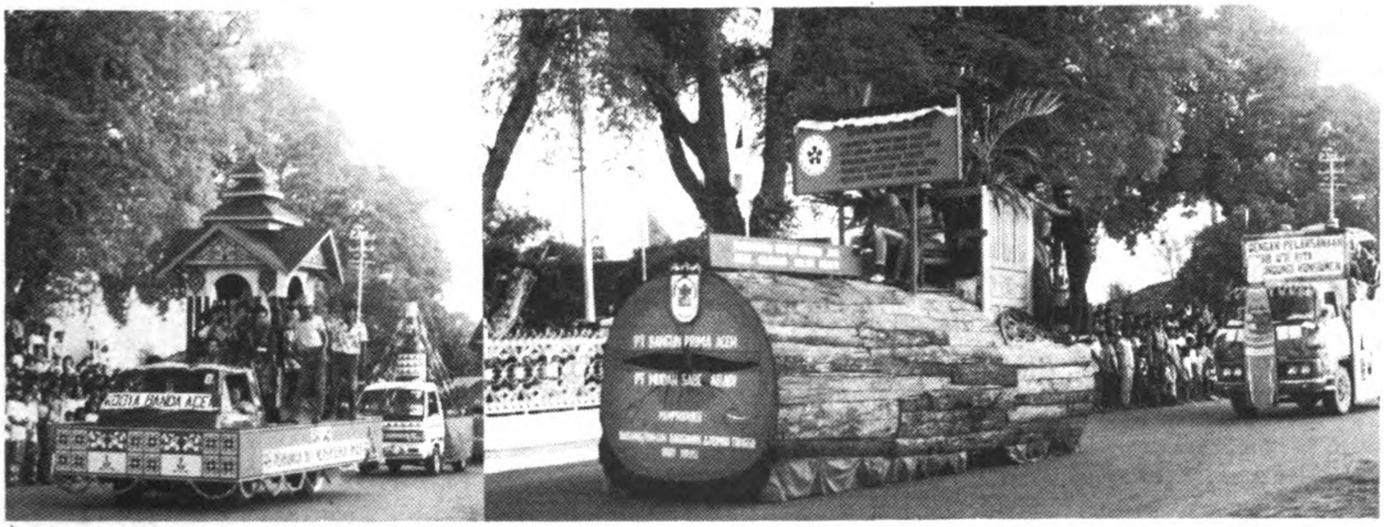

Kita perlu mengusahakan dan mampu menyerap kebudayaan modern.

Keduanya Diperlukan

Dalam pada itu, sebagai bangsa yang sedang membangun, kata Wapres, kita juga perlu mengusahakan dan mampu menyerap kebudayaan modern, khususnya budaya yang bercirikan ilmu dan teknologi yang diciptakan atas dasar dan menurut pola tata nilai modern yang diperlukan bagi pembangunan kita, tanpa harus meninggalkan kepribadian budaya kita sendiri.

Sekalipun antara kehidupan modern dengan kehidupan tradisi seakan-akan terdapat perbedaan-perbedaan tajam, antara lain bahwa kehidupan modern lebih rasional dan lebih dinamis, namun sebenarnya keduanya dapat dikembangkan secara terpadu dan memperkokoh kehidupan masyarakat yang bertekad mengejar kemajuan. Kebudayaan tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya atau dinikmati keindahannya oleh pendukungnya, dapat dikembangkan — dimodernisir — dengan nilai-nilai dari luar yang positif yang tidak bertolak belakang dengan budaya asli tradisi kita. Karena menurut keyakinan kita kebudayaan tradisi yang kita warisi dari nenek moyang kita tidak mungkin dihilangkan tanpa menghilangkan indentitas diri kita yang justru harus selalu dijaga dan dipertahankan. Sebaliknya kita tidak mungkin menolak sama sekali kebudayaan modern tanpa kita keluar dari kehidupan modern itu sendiri, yaitu suatu kehidupan yang lebih maju dan diharapkan lebih baik dari pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, tradisi dan modernisasi keduanya diperlukan. "Kita tidak boleh hanya ingin maju dan disebut modern dengan meninggalkan tradisi yang telah berakar dalam masyarakat. Sebaliknya kita tidak boleh terkungkung dalam tradisi dengan menolak kemajuan dan nilai-nilai baru oleh karena kita justru hidup dalam zaman kemajuan dengan nilai baru itu," ujar Sudharmono.

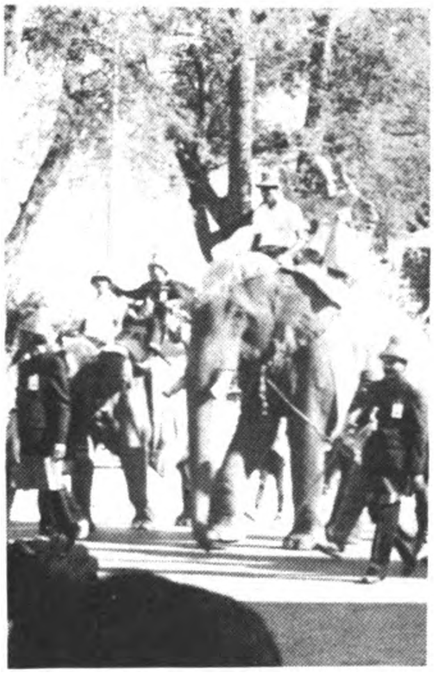

Memperkaya kebudayaan nasional.

Persoalan yang benar-benar harus mendapat perhatian ialah menentukan tradisi mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu disesuaikan, dan yang mana pula yang harus dihilangkan. Demikian pula nilai baru mana yang cocok dengan nilai budaya kita sendiri. Untuk itu semua, maka penilaian terhadap nilai-nilai itu perlu dilakukan, dan bagi kita bangsa Indonesia, tolok ukur yang harus dipakai adalah falsafah bangsa, yaitu Pancasila serta ajaran agama yang menjadi keyakinan umat penganutnya.

Dimensi daerah dan dimensi nasional pada kebudayaan bangsa Indonesia, juga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan apalagi dipertentangkan karena keduanya saling mengisi. Kebudayaan nasional itu pada dasarnya adalah kebudayaan daerah yang oleh seluruh bangsa Indonesia telah diterima menjadi miliknya. Banyak puncak-puncak kebudayaan daerah telah menjadi milik bangsa Indonesia karena kebudayaan daerah lah yang justru membentuk dan memperkaya kebudayaan nasional kita.

Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kebudayaan nasional akan mendesak kebudayaan daerah, atau sebaliknya, kebudayaan daerah akan menghambat proses pengembangan kebudayaan nasional.

Tidak diragukan lagi bahwa kebudayaan daerah adalah sumber yang sangat penting bagi pengembangan dan kemajuan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tidak dapat berkembang tanpa dukungan yang positif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah. Sebaliknya, kebudayaan daerah tidak dapat berkembang menjadi kebudayaan nasional tanpa menyesuaikannya dengan kemajuan yang sedang diupayakan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kedua macam kebudayaan itu, nasional dan daerah, saling berhubungan dan saling memperkokoh. Keduanya justru saling mengisi dan membentuk diri semakin teguh.

Pekan kebudayaan Aceh III yang baru lalu, dalam totalitas penggelarannya, agaknya berproses ke arah sana. □ (Wt/Lt)

Digitized by Google

Perhatian Terhadap Asmat Agar Tidak Meninabobokan

Wilayah Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke. Di sepanjang bentangan itu, hidup berbagai suku dengan corak subkultur yang beraneka ragam. Mereka tersebar di 13.000 pulau di nusantara ini.

Keanekaragaman kekayaan budaya, apakah itu berupa tari, lagu-lagu, seni ukir maupun lainnya, masih hidup subur di persada ini. Upaya untuk melestarikan warisan leluhur, tampaknya masih terus saja digalakkan, melibatkan unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

TVRI misalnya, secara rutin mentayangkan aneka macam kebudayaan dari berbagai daerah secara bergantian. Pers juga sering menulis panjang lebar tentang budaya daerah, baik yang berkembang pesat, maupun yang hampir tenggelam akibat ditinggal pewarisnya. Semua itu bertujuan untuk terus menghidupkan kembali budaya-budaya daerah yang menjadi aset nasional agar tidak larut dalam kemajuan jaman.

Belum lama ini di Jakarta, 24 sampai 31 Agustus, Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, sebuah lembaga nonprofit, kembali mencoba untuk mengangkat hasil karya budaya suku di pedalaman Irian Jaya itu, melalui pameran. Tentu, Yayasan yang dipimpin oleh M Kharis Suhud itu bermaksud tetap melestarikan budaya Asmat sebagai aset nasional.

Sebagaimana diketahui, suku Asmat merupakan salah satu suku terasing dari lebih kurang 120 suku yang ada di negeri ini. Orang Asmat menyimpan kebudayaan yang bernilai tinggi. Tidak mengherankan kalau karya-karya (terutama produk ukiran) Asmat, kini mulai diburu oleh para pencinta seni.

Suku Asmat menghuni pedalaman Irian Jaya yang nyaris belum tersentuh pengaruh luar. Sungai yang panjang dan lebar, pegunungan yang ganas dan terjal serta sulitnya sarana transportasi yang menjangkau wilayah Asmat, menyebabkan mereka terisolir. Faktor alam yang melingkungi Asmat, agaknya "melindungi" kelompok peradaban ini agar tetap "asli".

Dalam kondisi yang demikian, kebudayaan suku Asmat tidak terpengaruh oleh budaya lain. Dan bahkan telah berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Kesehariannya dalam berburu, menangkap ikan dan menantang alam, terpantul dalam karya-karya lukis mereka. Singkat kata anak-anak Asmat masih menyatu dengan alamnya.

Suku Asmat pedalaman Irian Jaya.

Selain itu hasil seni yang diukir oleh tangan-tangan trampil masyarakat tersebut membersitkan banyak makna. Sosok burung taon-taon misalnya bermakna kejantanan, dan kura-kura melambangkan kesuburan, sebab, kura-kura banyak telurnya. Dan, sekitar 60 garam ukiran yang dibuat oleh orang Asmat, bermakna sakral.

Memang, pada mulanya orang Asmat ini membuat patung untuk kepentingan ritual. Mereka menggunakan medium (alat) dunianya - dunia arwah nenek moyangnya. Itulah tradisi mereka.

Meninabobokan

Kemudian pada awal abad 20-an, pencinta seni di negara-negara yang sudah maju mencium keunggulan hasil karya primitip dari masyarakat Asmat ini. Mereka, para pecandu karya seni ini datang dengan caranya sendiri-sendiri menyusupi tempat yang masih serba gelap ini. Mereka membeli dan memboyong hasil karya yang mempunyai arti dan nilai tinggi itu ke negaranya. Karya seni berupa patung-patung kayu itu, kini telah banyak menghiasi rumah-rumah mereka. Konon, hasil karya dari penduduk yang hidup di pedalaman dan masih terisolir oleh kemajuan jaman ini, telah kondang di manca negara.

Kendati demikian, masyarakat Asmat masih saja terbelakang bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Anak-anak dari keluarga Asmat masih banyak yang belum mengenyam pendidikan dan angka kematian bayipun juga tinggi. Hal tersebut akibat dari kurangnya gizi serta perhatian terhadap kesehatan yang sangat rendah.

Barangkali itulah yang menjadi pangkal dari didirikannya Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, akhir 1987 lalu. Yaitu untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup suku Asmat yang masih terasing itu supaya tidak ketinggalan dengan saudara-saudaranya yang lain.

"Namun, bantuan yang diberikan kepada suku Asmat ini jangan sampai meninabobokan mereka, sehingga mereka terlena atau menjadikan mereka tergantung pada orang lain," kata Barnabas Suebu, Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya mengingatkan.□ **(BM)**

Digitized by Google

Kini dapat Anda peroleh Rumah Tipe Ciung

dalam kawasan Kota Satelit Baru

BINTARO JAYA

20%

Lebih Ringan

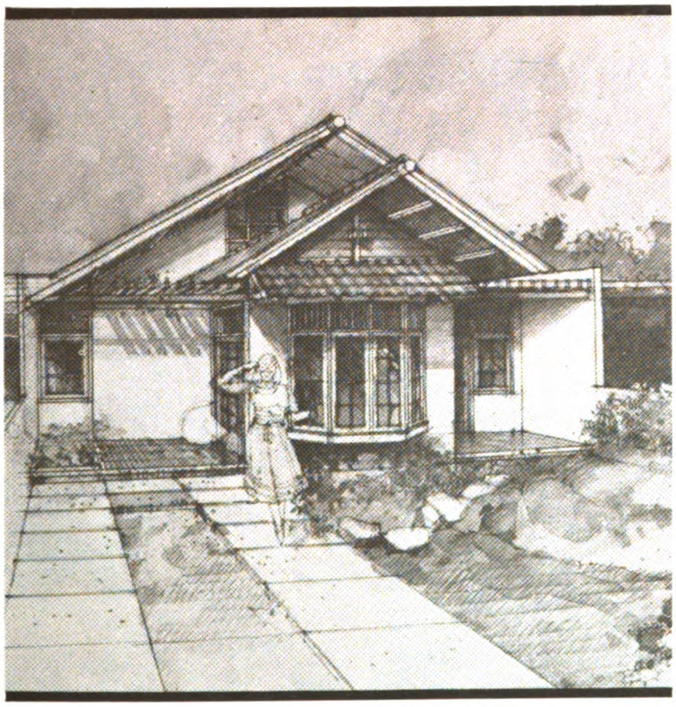

Berita gembira !

Rumah seharga Rp. 31.000.000,--
Kini dapat Anda peroleh hanya dengan harga Rp. 26.950.000,--
Sungguh menguntungkan, Anda dapat berhemat sampai Rp. 4 juta lebih.
Bergegaslah, ambillah kesempatan emas ini sekarang juga.

Tersedia tipe:

TIPE	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	HARGA
Cucur	90(6x15)m2	36 m2	Rp. 16.550.000,--
Ciung	120(8x15)m2	51 m2	Rp. 26.950.000,-
Cucak	135(9x15)m2	100 m2	Rp. 45.300.000,-
Camar	180(9x20)m2	112 m2	Rp. 54.400.000,-
Pelikan	250(10x25)m2	122 m2	Rp. 65.750.000,-
Cariama	300(12x25)m2	112,50 m2	Rp. 80.900.000,-

Dapat diangsur melalui KPR PAPAN SEJAHTERA, BANK PERKEMBANGAN ASIA, BANK NIAGA, BANK DUTA, BANK SUSILA BAKTI, BANK BALI.

hidup nyaman di alam segar
BINTARO JAYA
Developer Anggota REI No. 00.00001
P.T. PEMBANGUNAN JAYA
KANTOR TAMAN BINTARO JAYA, Gedung A, Lantai 2, Jl. Bintaro Raya
Jakarta-12330, Telp. 7396898, 7397674 ext. 237, 238, 239.

Digitized by Google

Titipkan Resiko Anda Kepada Kami

JENIS PERTANGGUNGAN :

- Asuransi **Kebakaran**
- Asuransi **Pengangkutan**
- Asuransi **Kecelakaan Diri**
- Asuransi **Kendaraan Bermotor**
- Asuransi **Rangka Kapal Laut**
- Asuransi **Penerbangan**
- Asuransi **Rekayasa** (Engineering)
- Asuransi **Sapi Perah**
- **APELMAS** (Asuransi Pelajar dan Mahasiswa)
- **ASKAK** (Asuransi Karyawan dan Keluarga)
- **Custom Bond**
- **Cash In Transit/Cash In Safe**

ASURANSI
timur jauh

Kantor Pusat :
KARYA GRAHA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta 10002
P.O. Box : 3709/Jakarta 10002
Telp : 375408 – 370266
Telex : 44202 – 44828 ATJ IA
Cable : FAREAST JAKARTA
Facsimile : 21 – 370586

Kantor Cabang :

Jakarta Selatan Jl. Tebah II/3. Kebayoran Baru Telp. 7203701-7203375-7203175-773853 **Medan** Jl. Guru Patimpus 1-J Telp. 523993 **Pekan Baru** Jl. Pelajar 165 Telp. 22268 **Padang** Jl. A. Yani 34 Telp. 26885 **Palembang** Jl. Kolonel Atmo 395 Telp 22218 **Bandar Lampung** Jl. Laksamana Malahayati 62 Telp 42636 **Bandung** Jl. Veteran 14 Telp. 431710–51380 **Cirebon** Jl Dr. Wahidin S. 17 Telp. 5455 **Semarang** Jl. Kepodang 21 Telp. 26468 **Surakarta** Jl. Slamet Riyadi 314 Telp 7513 **Surabaya** Jl. Perak Timur 356 Telp. 291769-291223-291751-291577 **Denpasar** Jl. Diponegoro 132 G Telp 26833 **Pontianak** Jl. Gajah Mada 265 A Telp 2944 **Banjarmasin** Jl. A. Yani 149 Telp. 2046 **Ujung Pandang** Jl. Nusantara 122 Telp 4115 **Pulau Batam** Jl. Simpang Tiga, Bukit Nagoya Telp. 58743

Digitized by Google

DS
611
.M48

No. 55 Oktober 1988

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

UNIV. OF MICH.
NOV 02 1988
Current Serials

MUNAS_IV GOLKAR

Digitized by Google

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

KELAPA GADING PERMAI

Semakin Lengkap Semakin Elite

Pilihan Terbaik di Lingkungan Terbaik.
Bila Anda ingin rumah tinggal di **kawasan pemukiman terbesar dan terbaik** di Jakarta Utara - Timur, kami sarankan pilih **Kelapa Gading Permai.**

PESANLAH DARI SEKARANG!
Kawasan eksklusif **BUKIT GADING VILLA:** konsep pemukiman baru di Kelapa Gading Permai.

Lingkungan terbaik, fasilitas menguntungkan:

- Air PAM DKI JAYA.
- Saluran telepon.
- Diamond Pasar Swalayan.
- Kelapa Gading Sports Club.
- 'Food Street' Blok M dengan aneka ragam makanan khas.
- Taman Hiburan Mandiri, Mini Velodrome, arena balap mobil Radio Control, Pusat onderdil dan variasi.

Fasilitas Baru:
- Jalan tembus ke By Pass Yos Sudarso, Sunter dan Kota segera siap.
- Sekolah **TK & SD Islam Al Azhar** Kelapa Gading. Filial Al Azhar Kemang.
- **Bursa Mobil Kelapa Gading,** merupakan pusat jual beli mobil yang terbesar di kawasan Utara Timur.

Dengan semua fasilitas ini, Kelapa Gading Permai telah menjelma menjadi kota satelit baru yang serba lengkap. Tempat tinggal paling menyenangkan dan menguntungkan.

Khusus dirancang untuk pemukiman elite
- Menciptakan kehidupan yang **aman,nyaman** dan tenteram.
- Suasana lingkungan asri, dengan paving, pepohonan rindang serta taman yang ditata apik.
- Terbagi menjadi 4 village yang dijaga penuh 24 jam.
- Setiap village mempunyai sistem pengawasan lingkungan tersendiri yang disebut 'VILLAGE COMMITTEE'.
- Perumahan bebas dari hiruk pikuk pedagang kaki lima maupun kegiatan bisnis rumahan.

Kami sediakan lahan dengan luas mulai dari 420 m2-1200 m2. Di Bukit Gading Villa, Anda bisa merancang sendiri rumah yang Anda sukai.

Keterangan lebih lengkap, silakan hubungi kantor pemasaran kami.

BUKIT GADING VILLA

P.T. SUMMARECON AGUNG
Jl. Perintis Kemerdekaan no. 42, Jakarta Timur
Tel. 489 2107 (5 saluran)

Kantor Pemasaran Proyek:
Jl. Kelapa Gading Boulevard, Blok LB I No. 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara

Fasilitas kredit PT PAPAN SEJAHTERA 15 tahun, **CITIBANK 2 - 10 tahun**

DSA 0050 A © MATARI INC

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Assegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio
Djonharro.
Rum Aly
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noenjathy
Robert Puang Sunur
Issidarto BA
Subyanto SP
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Setelah 24 Tahun

FOKUS

Golkar Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Pancasila yang Lebih Baik dan Lebih Maju.

LAPORAN UTAMA

Munas IV Golkar adalah momentum yang penting dan strategis. Dimana letak strategis dan pentingnya Munas itu? Ikutilah pendapat sejumlah tokoh.

LAPORAN KHUSUS

Bersamaan dengan Munas IV Golkar, organisasi ini memasuki usia yang ke 24. Sebuah tapak dalam perjalanan sejarah yang semakin mengantar Golkar ke jenjang kedewasaan. Tentu wajar bila sejumlah harapan bergantung padanya.

NASIONAL

Wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, telah meninggalkan duka yang dalam bagi bangsa Indonesia. Menko Kesra Soepardjo Roestam mengungkapkan rasa dukanya dalam bentuk In Memoriam yang walau singkat tapi menggugah. Dan juga pembahasan beberapa tokoh tentang tinggal landas.

ORGANISASI

Masih dalam rangka Munas, perangkat Golkar berupa departemen-departemen yang ada, coba melakukan evaluasi apa saja yang telah mereka lakukan selama lima tahun terakhir. Banyak yang mengukir sukses, tapi banyak juga yang belum puas.

KOMENTAR

SPEKTRUM

Porsi Politik dalam Pembangunan oleh Oka Mahendra.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

Ny. TS Darsoyo

Digitized by Google

Setelah 24 Tahun

Beberapa tahun terakhir cenderung terasa sebagai tahun-tahun yang amat sibuk bagi organisasi politik terbesar ini. Dan itu tak lain karena memang kegiatan di lingkungan Golkar — katakanlah sepanjang lima tahun terakhir — lebih sambung menyambung. Bahkan sering terasa agak mirip sebagai satu marathon panjang yang tak kenal henti. Tidak untuk mengecilkan arti periode-periode sebelumnya, tetapi merupakan kenyataan bahwa Munas III memang agaknya telah meletakkan sejumlah garis penugasan yang mau tak mau membuat Golkar periode 1983-1988 harus bekerja keras. Suatu keberuntungan pula bahwa DPP periode ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memang punya semangat kerja keras dan sistematik. Dan hal itu mendapat imbangan yang sepadan di daerah-daerah.

Kita tentu dapat mencatat rangkaian panjang tugas yang harus dijalankan Golkar periode ini sebagaimana yang diamanatkan Munas Golkar 1983. Untuk sebagian besar tugas itu adalah dalam rangka memenuhi tuntutan undang-undang, dan sebagian lainnya terkait dengan konsistensi sebagai organisasi politik dengan semangat pembaharuan.

Berturut-turut Golkar telah menjawab tuntutan undang-undang politik yang mensyarakatkan organisasi politik membentuk diri atas dasar keanggotaan perorangan — bukannya keanggotaan berdasarkan organisasi. Maka, sejak Munas, selama beberapa tahun Golkar melakukan pendaftaran keanggotaan tersebut. Tak berhenti kepada sekedar pendaftaran, Golkar sekaligus melaksanakan program kaderisasi bagi para anggotanya. Sepanjang lima tahun terakhir, Golkar juga bekerja keras memenuhi tuntutan dan harapan supaya Golkar makin mandiri, makin dewasa dan makin mengakar.

Seberapa baikkah Golkar telah menjawab segala tuntutan yang ada, baik yang menjadi kehendak undang-undang maupun yang berasal dari aspirasi yang ada?

Sepanjang apa yang menjadi tuntutan undang-undang politik, tanpa perlu melihat apakah kekuatan politik lainnya telah melakukan atau belum melakukannya, bisa dikatakan betapa Golkar telah memberi jawaban sebaik-baiknya. Sehingga, pada tahun 1987 Golkar tampil dalam Pemilihan Umum sebagai organisasi politik yang memenuhi persyaratan undang-undang dengan cukup optimal.

Dan seberapa jauh sudah Golkar makin mandiri, makin dewasa dan makin mengakar? Mungkin inilah permasalahan yang paling menarik untuk dicatat dan diamati lebih lanjut, termasuk dalam Munas IV mendatang.

Beberapa waktu setelah pemilihan umum, di dalam Golkar sendiri ada semacam dialog cukup hangat tentang kemandirian ini. Dengan semangat mawas diri, adalah sejumlah tokoh keluarga besar Golkar dari kalangan puncak sendiri yang seakan mempertanyakan tentang kemampuan Golkar untuk mandiri. Antara lain, ada pemaparan berikut ini : Bila dalam Pemilihan Umum 1971 dan 1977 Golkar masih lebih menampilkan Abri beserta keluarganya, maka dalam Pemilihan Umum 1982, peranan jalur Beringin, khususnya Korpri, lebih menonjol. Dan pada Pemilihan Umum 1987, jalur G (Golkar) lah yang lebih dikedepankan, namun Golkar belum dapat dikatakan mampu untuk berdiri sendiri. Karena, dalam Pemilihan Umum 1987 itu Golkar masih memerlukan bantuan birokrasi.

Inilah barangkali salah satu kelebihan yang kadang-kadang merupakan keuntungan Golkar. Sering tanpa diduga, kritik justru datang dari tokoh-tokoh atasnya, antara lain dari kalangan Dewan Pembina. Pernyataan yang mengandung pertanyaan tentang tingkat kemandirian Golkar tadi salah satu contoh kritik yang datang dari atas. Bahwa kritik yang sama juga dilontarkan oleh kalangan pengamat dari luar, hanyalah membuat permasalahannya menjadi lebih menarik.

Bahwa kritik — kalau bisa disebutkan demikian — pertama-tama justru datang dari dalam dan dari atas, telah membawa hikmah tersendiri ke dalam tubuh Golkar. Pada satu sisi, sikap untuk selalu mempertanyakan dan mencari kekurangan dalam diri, berfaedah untuk mencegah rasa puas diri. Barangkali bahkan lebih jauh mempunyai daya untuk menangkal suatu sindroma yang kerap menghinggapi para pemenang atau mereka yang unggul. Menang tanpa terkena sindroma, adalah penampilan kedewasaan. Pada sisi yang lain, tampillah hikmah dalam wujud suatu suasana dinamis yang sekaligus bisa menunjukkan sejauh mana sudah kadar demokratis ada dalam diri Golkar. Kendati pernyataan yang mempertanyakan tingkat kemandirian Golkar itu datang dari atas, arus bawah tidak serta merta menerimanya sebagai suatu pernyataan yang dengan sendirinya benar. Bahkan sebaliknya timbul kritik bahwa pandangan itu mengandung kekeliruan. Keliru, karena sedikit terperangkap kepada suasana pembagian jalur-jalur (A, B dan G) dalam Golkar dengan penafsiran yang agak kaku.

Dalam perjalanan menempuh kancah politik selama 24 tahun, Golkar memang mengalami tahap-tahap dalam proses keterpaduan dan keutuhan dirinya. Pada mulanya Golkar hanyalah suatu sekretariat bersama yang pernah mencapai angka 291 organisasi. Dengan pemurnian, sejumlah organisasi yang ternyata adalah organisasi payung dari partai politik yang ada waktu itu, angka itu ciut menjadi 201. Berikutnya, ada penyederhanaan, sehingga Golkar terbagi menjadi 7 Kelompok Induk Organisasi atau Kino-kino, sebelum pada akhirnya Golkar tiba pada penampilannya seperti saat ini yang tak mengenal pembedaan internal berdasarkan Kino-kino atau berdasarkan apapun. Istilah jalur, hanyalah dikenal dalam kaitan Keluarga Besar Golkar, yaitu bahwa Golkar menganggap Korpri serta Keluarga Besar Beringin, dan Pepabri beserta Keluarga Besar Abri, adalah teman seperjuangan yang terpercaya dari Golkar untuk menegakkan cita-cita Orde Baru. Penampilan perorangan dari kalangan dua jalur tersebut — kecuali anggota Abri aktif yang dibatasi undang-undang — dalam Golkar tidak bersifat eksklusif, melainkan sama dengan perorangan dari sumber-sumber lain di masyarakat. Tak lebih dan tak kurang. Maka, ketika perorangan yang berasal dari jalur-jalur tersebut ikut tampil dalam perjuangan memenangkan Golkar, mereka ada dalam kedudukan sebagai anggota Golkar. Apakah ada di antara mereka yang khilaf memanfaatkan kedudukannya dalam birokrasi, itu adalah soal tersendiri, yang pada waktunya memerlukan penanganan tersendiri pula dari Golkar. Sebab, pada hakekatnya, Golkar sendiri tidak menghendaki untuk menyandarkan diri kepada birokrasi dengan cara dan improvisasi yang salah kaprah seperti itu. Kemenangan Golkar yang lalu harus diakui banyak tertumpu kepada kenyataan telah lebih mengakarnya Golkar yang secara kuantitatif tercermin pada angka-angka hasil pendaftaran keanggotaan yang mencapai angka sekitar 30 juta. Dengan angka itu dan dengan peningkatan kualitatif dalam diri Golkar selama ini, wajar kalau kemudian diraih suara 62 juta lebih. Golkar bersandar kepada seluruh anggotanya sebagai perorangan yang bersatu padu sebagai suatu kekuatan, tidak kepada pengelompokan berdasarkan jalur.

Dengan sudut pandang seperti ini kemandirian Golkar bukanlah angan-angan, melainkan menjadi suatu hal yang akan makin nyata dari waktu ke waktu. Dalam usianya yang telah mencapai 24 tahun, dasar-dasar kemandirian pada hakekatnya telah diposisikan dengan baik. Mekanisme baru dari bawah ke atas yang telah diluncurkan sesudah Pemilihan Umum 1987, akan besar peranannya. Salah satu peranan yang nyata tak lain adalah memperkuat dasar-dasar kemandirian Golkar. Sepanjang kritik yang juga ada dalam hal kemandirian Golkar, disebutkan bahwa salah satu kelemahan Golkar adalah terlalu kuatnya arus dari atas dalam penentuan dan pengambilan-pengambilan keputusan. Tentu kritik ini dapat dibantah, tetapi jawaban yang terbaik yang dapat diberikan adalah pembuktian yang berupa keberhasilan peningkatan demokratisasi melalui mekanisasi baru yang telah dirintis dan dimulai. Dan, Musyawarah Nasional IV di bulan Oktober ini akan menjadi salah satu puncak pembuktian awal!☐

Digitized by Google

Golkar Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Pancasila yang Lebih Baik dan Lebih Maju

Bila kepada Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH, ditanya tentang apa tujuan mendahulukan penyelenggaraan Musda II dan I daripada Munas, maka jawabannya adalah, "karena Golkar ingin mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang lebih baik dan lebih maju".

Jawaban yang dikemukakan Sudharmono pada acara silaturahmi dengan seluruh pimpinan DPD Golkar Tingkat I seluruh Indonesia di Jakarta awal bulan ini, agaknya menyimpulkan secara pas hasil kerja dan prestasi Golkar selama kurun lima tahun terakhir. Golkar memang meraih banyak hal dalam kurun ini. Program Tri Sukses yang mencakup Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita IV, Sukses Pemilu 1987 dan Sidang Umum Maret 1988, telah dilaksanakan dengan baik. Dalam Pemilu 1987, Golkar bahkan meraih 73 persen suara pemilih, melampaui target. Dan Pelita IV walaupun dihimpit oleh kondisi perekonomian dunia yang masih dilanda resesi, namun pertumbuhan ekonomi yang ratarata 3,2 persen, masih di atas pertumbuhan penduduk.

Ini tentu sederetan prestasi yang sudah diraih Golkar selama periode 1983-1988. Prestasi-prestasi tersebut tentu dijiwai oleh tekad Golkar memenuhi cita-cita bangsa mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Jalan ke arah sana, memang masih jauh dan rumit. Namun salah satu kondisi untuk mencapai cita-cita bangsa itu ialah mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang lebih baik dan lebih maju. Dan Golkar periode 1983-1988 di bawah pimpinan Sudharmono SH, yang kini mendapat kepercayaan rakyat menjadi Wakil Presiden, telah melakukan itu.

Dihadapan para pimpinan DPD Golkar Tingkat I seluruh Indonesia itu, Sudharmono mengatakan, terselenggaranya musda-musda dengan lancar dan sukses, adalah prestasi besar. Keputusan Golkar untuk mendahulukan pelaksanaan musda daripada munas, merupakan wujud kepeloporan Golkar dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang lebih baik dan lebih maju. Dan kepada para pimpinan Golkar Tingkat I yang baru mendapat kepercayaan memimpin Golkar untuk kurun lima tahun mendatang, Sudharmono berpesan agar terus melanjutkan upaya mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan maju itu.

Sudharmono SH

Sesuai dengan hakekat demokrasi dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka Golkar juga ingin mencerminkan itu dalam kehidupan organisasinya. Para anggota sebagai pemegang kedaulatan organisasi harus tercermin dalam Musyawarah Nasional.

Terdorong oleh keinginan semua pimpinan Golkar 1983-1988, maka disepakati untuk melaksanakan mekanisme kedaulatan organisasi yang berproses dari bawah ke atas. "Prinsip ini ingin kita kembangkan menjadi tradisi dalam Golkar," ujarnya. Peserta Munas yang akan memilih DPP Golkar 1988-1993, adalah mereka yang sudah mendapat mandat baru hasil Musda I dan II. "Suasana seperti inilah yang akan mewarnai keberhasilan Munas IV nanti."

Menurut AD/ART dan sesuai dengan keputusan DPP, peserta Munas kali ini adalah 3 orang dari DPD II, 5 dari setiap DPD I, anggota DPP Dewan Pembina, tokoh-tokoh perorangan dari pusat maupun daerah yang berjumlah sekitar 350. Jadi diperkirakan Munas ini akan dihadiri oleh sekitar 1700 peserta.

Dan dalam silaturahmi yang juga dihadiri oleh pimpinan jalur A, Jenderal Try Sutrisno dan pimpinan jalur B, Rudini, malam itu, Sudharmono menegaskan pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk mengatur peserta Munas nanti ke arah tertentu. "Bukan itu," katanya menegaskan. Pertemuan tersebut adalah kewajiban DPP masa bhakti sekarang ini untuk mengupayakan agar Munas nanti berjalan lancar menurut mekanisme yang disepakati bersama, demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Menjadi pemimpin Golkar baik di tingkat II, I maupun pusat, menurut Sudharmono adalah tugas yang berat tapi mulia. Untuk bisa melaksanakan tugas tersebut, tidak boleh ada motivasi lain, kecuali pengabdian dan kerja keras. "Bukan untuk menjadi orang besar atau orang kaya, sama sekali tidak," tegasnya. Pengurus Golkar nanti adalah mereka yang memenuhi kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela) yang sangat ketat itu. "Memenuhi kriteria itu adalah kebanggaan sekaligus beban berat," katanya.

Dengan berpegang teguh pada kriteria itu, Sudharmono yakin, nama baik dan kejayaan Golkar akan tetap terpelihara dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional.

Melanjutkan

Kepada para pimpinan Golkar Tingkat I seluruh Indonesia malam itu, Sudharmono berpesan agar melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh kepengurusan Golkar masa bhakti 1983-1988.

Mengenai program Golkar periode 1983-1988 yang dikenal dengan Tri Sukses, walaupun sangat berat, tetapi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Konsolidasi kita sukseskan, Pelita IV kita sukseskan, dan Pemilu 1987 serta Sidang Umum 1988 kita sukseskan," ujarnya. Sukses ini tentu

Digitized by Google

saja berkat dukungan seluruh keluarga besar Golkar sampai ke desa-desa. Tanpa dukungan dan partisipasi semua anggota keluarga besar Golkar, sukses itu tak mungkin kita capai. Hasil pemilu 1982 nanti, adalah bukti yang tidak terbantah, apakah Golkar periode 1988-1983, berprestasi atau tidak.

Kalau kita berpikir lebih arif maka sukses Pemilu 1987 dimana Golkar mampu meraih 73 persen suara, karena pembangunan dimana Golkar berperan serta, berhasil dengan baik. Orang bisa saja mengatakan sasaran pertumbuhan rata-rata 5 persen setahun dalam Pelita IV tidak tercapai. Tapi di tengah suasana perekonomian dunia yang tidak menguntungkan selama ini, kita masih mampu mencatat pertumbuhan 3,2 persen. Bahwa dalam kondisi perekonomian yang demikian jelek, kita masih mampu mencapai pertumbuhan (ekonomi) lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk, ini adalah prestasi yang tidak boleh dianggap remeh. Prestasi yang kita raih di tengah situasi perekonomian dunia yang demikian buruk itu, tentu karena konsolidasi kita yang berhasil. Karena itu apapun program yang akan diputuskan dalam Munas mendatang, langkah konsolidasi perlu dilanjutkan.

Untuk itu, kekompakan dari kepemimpinan DPD harus terus dipelihara dan ditumbuhkan. Kepengurusan yang kompak dan utuh, akan mempermudah upaya konsolidasi. Ini sesuai dengan hakekat kepengurusan Golkar yang sifatnya kolektif dan bersemangat keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan. Hal ini bisa dikembangkan lewat komunikasi yang efektif melalui mekanisme formal yang ada, maupun lewat hubungan-hubungan manusiawi yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Hal-hal seperti ini akan semakin mendorong dinamika pertumbuhan organisasi dalam mengembangkan demokrasi Pancasila.

Pesan lainnya, adalah agar pengurus Golkar mendatang melaksanakan sebaik dan setertib mungkin mekanisme organisasi yang sudah ditetapkan. Di dalam Golkar ada mekanisme tiga jalur, untuk membahas masalah-masalah yang penting dan rumit. Dengan tokoh-tokoh di daerah baik yang menduduki posisi supra maupun infra struktur, agar dipelihara hubungan baik. Sifat hubungan tiga jalur, adalah horisontal, bukan vertikal. DPD I hanya mempunyai hubungan vertikal ke atas dengan DPP dan ke bawah dengan DPD II. Demikian pula hubungan dengan FKP sebagai lembaga pelaksana Golkar di legislatif agar terus ditingkatkan lewat mekanisme yang sudah ada.

Pesan berikutnya, adalah lanjutkan dan tingkatkan pembinaan anggota dan kader yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar dimana-mana, baik kader teritorial maupun kader fungsional. Secara nasional kader Golkar kini hampir mencapai 10 juta orang dan anggota lebih dari 25 juta. Secara kuantitatif sangat menggembirakan, tetapi kualitasnya perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Ini tentu menjadi tantangan bagi pengurus Golkar periode mendatang.

Apabila konsolidasi semacam ini dilaksanakan oleh setiap anggota pengurus DPD Tingkat I, kita yakin Pelita V akan dapat sukses, baik melalui kader-kader kita sendiri, maupun melalui lembaga-lembaga dimana tokoh-tokoh Gokar berkecimpung. Dan apabila kita dapat sukseskan Pelita V maka prestasi pemilu 1987 bukan saja dapat dipertahankan pada pemilu 1992, tapi mungkin bisa lebih baik lagi.

Akhirnya Sudharmono menekankan, dengan selesainya Musda-musda dan terpilihnya pimpinan-pimpinan DPD Tingkat II dan I, perhatian sekarang harus dicurahkan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi untuk mensukseskan pembangunan yang akan datang yang kondisinya masih tetap berat meskipun kita sudah mempunyai pengalaman bagaimana mengatasi dan dapat survive dalam pembangunan Pelita IV. Namun dalam menghadapi Pelita V dalam rangka mewujudkan landasan yang kokoh kuat untuk tinggal landas, kondisinya masih tetap berat. Kondisi ini dapat kita lampaui dengan baik, apabila kita semua bekerja keras.

Golkar sebagai pendukung kekuatan Orde Baru, kekuatan pembangunan dan kekuatan pembaharu, diharap dapat berperanan lebih besar lagi. Baik di dalam menjamin kemantapan stabilitas nasional maupun di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi agar dapat kita ratakan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Kepada para Ketua DPD TK I masa bhakti 1983-1988, yang kini telah menyerahkan kepemimpinan mereka kepada pengurus baru, Sudharmono menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, prestasi, dan hasil karya yang telah diberikan dalam kurun lima tahun ini. Dan atas nama pribadi serta atas nama DPP Golkar masa bhakti 1983-1988, Sudharmono mohon maaf sekiranya di dalam kepemimpinan 5 tahun ini ada hal-hal yang tidak berkenan. "Apabila ada, itu semata-mata terjadi karena saya juga mengemban tugas Golkar, mengemban tugas Munas tahun 1983 yang lalu, bukan karena hal-hal yang lain," pintanya.

Kepada para Ketua Golkar DPD Tingkat I yang kini tidak lagi menjadi pengurus, Sudharmono mengatakan bahwa perjalanan mereka masih dapat dimanfaatkan untuk perjuangan bersama di masa mendatang.

DPP Golkar katanya, tidak dapat memberikan apa-apa sebagai balas jasa kepada teman-teman yang telah mengabdi kepada Golkar selama kurun 1983-1988.

Kalau malam itu ada kesempatan memberikan secarik penghargaan dan sekedar tanda kenangan, hal itu adalah manifestasi hubungan kepemimpinan yang terjalin erat selama ini. "Kita tetap berjuang bersama dan kita kembangkan terus kesetiakawanan kita. Seperti Bhakti kita yang ketiga Warga Golkar adalah pembina persatuan dan kesatuan Bangsa yang berwatak setia kawan. Marilah kita bina terus kesetiakawanan ini di manapun kita berada," ujarnya.

Dengan Pers

Ketua Umum DPP Golkar juga mengadakan silaturahmi dengan para pimpinan redaksi media cetak maupun elektronik di Jakarta, untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas kerjasama yang telah terbina selama ini antara pers dan Golkar. Suka-duka dan prestasi Golkar selama lima tahun terakhir dalam banyak hal tidak bisa terlepas dari peranan pers yang ikut berperan aktif dalam memasyarakatkan program-program Golkar.

Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan akrab itu, Ketua Umum tidak merinci tugas-tugas Golkar yang telah dilakukan selama lima tahun ini, karena bila hal itu dilakukan maka memakan waktu yang tidak sedikit. Hanya dikatakan bahwa tugas-tugas Golkar yang berat itu, dilakukan sebagai bagian dari tugas pembangunan bangsa.

Secara singkat Sudharmono mengungkapkan beberapa hal penting saja yang telah dilakukan Golkar masa bhakti 1983-1988. Menurutnya, selama lima tahun terakhir, Golkar melakukan penyegaran dan pembaruan baik di dalam dirinya (organisasi) maupun

Digitized by Google

ke luar, dalam rangka meningkatkan pengabdian demi sukses Pelita IV. Di bidang politik menurutnya Golkar berupaya merealisasikan konsep pembangunan politik berdasarkan Pancasila dengan penyesuaian konsep struktur organisasi politik yang berintikan kader-kader perorangan, serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial kemasyarakatan dalam praktek-praktek berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Dalam bidang keanggotaan, Golkar mencatat prestasi yang membesarkan hati. Dalam lima tahun terakhir, Golkar mencatat 25 juta anggota di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hampir 10 juta telah ikut aktif di dalam latihan kader. Ini membuktikan bahwa memperkuat organisasi melalui para kader memperoleh sambutan dari rakyat.

Dengan memiliki kader sebanyak itu, Golkar dapat lebih efektif mendidik para kadernya tentang upaya memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan memasyarakatkan Pancasila dan UUD '45.

Dengan demikian Golkar bisa secara langsung memberikan sumbangan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang politik. Dan melalui kader-kadernya, Golkar bisa menggerakkan partisipasi masyarakat agar ikut dalam proses pembangunan yang program-programnya sudah jelas, seperti yang tercantum dalam Repelita dan GBHN.

Di lapangan, kader-kader Golkar menggerakkan partisipasi, sementara di lembaga legislatif, Golkar berperan serta sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan stabilitas nasional dan stabilitas politik melalui produk-produk legislatif seperti undang-undang dan sebagainya.

Bahwa Golkar dalam pemilu 1987 bisa menghasilkan 73 persen suara pemilih, hal itu merupakan bukti bahwa Golkar semakin mendapat kepercayaan rakyat untuk memprakarsai pembangunan bangsa. Dengan kemenangan pemilu, Golkar ingin memantapkan konsep-konsepnya, sehingga pembangunan nasional bisa berjalan lebih mantap.

Sementara itu juga Golkar mengembangkan mekanisme penggantian pimpinan lima tahunan sekali lewat Munas dan Musda. Untuk lebih memantapkan demokratisasi dalam dirinya, maka Golkar mempelopori mekanisme kedaulatan organisasi dari bawah ke atas. Artinya munas diadakan setelah musda-musda baik tingkat I maupun II rampung.

Dan pada kesempatan itu tidak lupa kepada pers Golkar meminta maaf bila dalam lima tahun terakhir terkadang ada hubungan yang kurang memuaskan. "Pers mungkin menuding kita ini tertutup dan sebagainya, dan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan," ujar Sudharmono.

Menjawab pertanyaan tentang sistim formatur dalam Munas, Sudharmono menjawab bahwa sistim ini sudah menjadi tradisi Golkar sejak Munas 1973. Formatur nanti terdiri dari 7 orang, dengan komposisi 3 orang dari unsur DPP dan 4 orang dari daerah. Sedangkan unsur DPP yang tiga orang itu dibagi lagi ke dalam 1 orang dari unsur Dewan Pembina, dan dua orang dari DPP lama. Ketujuh orang formatur itu sepenuhnya ditentukan oleh peserta Munas.

Formatur dalam menyusun personalia DPP mengikuti struktur yang coba dibakukan sejak 1983, yaitu 1 Ketua Umum, 8 Ketua, 1 Sekretaris Jenderal, 4 Wakil Sekretaris Jenderal, 1 Bendahara dan 2 Wakil Bendahara serta 14 departemen yang masing-masing diketuai oleh dua orang. Jadi semuanya berjumlah 45 orang.

Dan ketika ditanya bagaimana kira-kira komposisi personalia DPP hasil munas mendatang, Sudharmono menjawab, "itu tergantung Munas nanti". □ (LT)

ASSOSIASI PERSERO NIAGA
SEKRETARIAT: JL. KRAMAT RAYA NO. 94-96
JAKARTA PUSAT
TELEPON: 346071-79 PESAWAT: 398

P.T. (PERSERO) Bhanda Ghara Reksa
Jl Kali Besar Timur No. 5 – 7 Jakarta-Kota Telpon: 673742-673743-673744-673745
Kawat: BHANGGA. Kotak Pos: 751 Jkt Kegiatan2: Pergudangan dalam negeri.

PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
Kantor Pusat: Jalan Raya Cakung Cilincing Tanjung Priok – Jakarta
CABLE ADDRESS :
Telex : 49227/49370 ppc la
P O BOX : 47/TPK JAKUT
BANKERS : BANK EXIM - BBD CABANG TG. PRIOK
OPERATION DEPARTMENT
PHONE 493208 (10 lines) CAKUNG
491237 TANJUNG PRIOK

Karya Nusantara
P.T. (Persero) Karya Nusantara
Kantor Pusat : Jalan Veteran III/9 Jakarta
Telepon 361981 343211 388841 367874
Kegiatan-kegiatan
• Perdagangan Umum • Percetakan Offset/Letter Press
• Pengolahan Kertas • Penerbitan
• Pengolahan Coklat

P.T. DHARMA NIAGA (Ltd)
IMPORT – EXPORT – DISTRIBUTORS –
INSTALLATION – AFTER SALES SERVICE
JL ABDUL MUIS NO. 6, 8, 10, JAKARTA P.O. BOX 2028
PHONE: 377827-347577-347884-347885-347831-381484-381973-341974- 348878-368734-377615-368407-377881-368882-368735-347825
• CABLE ADDRESS: DHARMA NIAGA • TELEX. 01 – 44312.

P.T. MEGA ELTRA
KANTOR PUSAT:
Jalan Menteng Raya No. 25-27, Telepon 352531 (4 saluran) 372713-377257, telex 44380 MEGA IA
Postbag. 109/Jkt. Alamat kawat: MEGA ELTRA
Jakarta.
Bidang Usaha:
• Impor dan Distribusi • Eksport
• Penyalur • Engineering & Contracting.
• After sales serfice Peralatan

P.T. KERTA NIAGA (Ltd.)
IMPOR – EKSPOR – PERDAGANGAN LOKAL
KANTOR PUSAT JALAN KALI BESAR TIMUR 8 - 9
JAKARTA BARAT
Telpon 679311 (4 saluran) Kawat Umum – Kertaniaga
Telex 42718. Import – Kertanim
Kotak Pos 1252 Jakarta Barat Export – Kertanex

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. SARINAH
Alamat Jln M.H. Thamrin 11 Jakarta Alamat Kawat: DEPSTORE JAKARTA Bidang Usaha: Distribusi, Pertokoan/Perdagangan Eceran Perawaan Perkantoran
Kotak Pos 315 JAKARTA Telephone 323008 Telex 45141

P.T. PANTJA NIAGA (Ltd).
HEAD OFFICE C T C BUILDING 94/96
KRAMAT RAYA JAKARTA
CABLE Centrad Jakarta
TELEX 011 4208 4311
PHONES 46071 s/d 46079
BANKERS Bni 1946 BDN
Bank Bumi Daya
Bank Rakyat Indonesia
BIDANG USAHA Distributor Ekspor & Impor

P.T. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)
Jl Let. Jen. S. Parman 102 Grogol, Jakarta Barat
P.O. Box 2377 Tel: 596111 (4 lines)
Telex: 46723 SUCOF JKT. Cable: SUCOFINDO
Bidang Usaha: OUR VARIOUS SERVICES
• Cargo Superintendence & Inspection
• Warehousing & Forwarding
• Fumigation & Industrial Hygiene
• Industrial & Marine Engineering
• Analytical Laboratory & Exploration
• Geotechnical
• Sucofindo – Redwood Petroleum & Petrochemical
• Technical Consultancy
• Appraisal.

P.T. TJIPTA NIAGA PERUSAHAAN PERSEROAN.
KANTOR PUSAT Jl Kali Besar Timur IV 1 JAKARTA
Telepon No 673923, 673614, 678888, 677192, 673448
Telex No 42747
Cabang-cabang di seluruh Indonesia
KEGIATAN DISTRIBUTOR Ekspor-Impor-Distribusi-Perdagangan Antar Pulau
Semen Gresik-Cibinong-Nusantara dan Padang
Obat-obatan dan KREMKO Santan Kelapa Murni
KEAGENAN Importir terdaftar/Distributor Tunggal
VALVOLINE Motor Oil USA

Digitized by Google

Munas IV Golongan Karya Mempertegas Komitmen Sejarah

Munas IV Golkar sebagai forum pemegang kedaulatan tertinggi organisasi, akhirnya tiba. Sekitar 1700 peserta — 75 persen berasal dari daerah —, berkumpul di Jakarta untuk menyelenggarakan peristiwa organisasi yang telah lama dinanti-nantikan itu. Para pengamat bahkan jauh-jauh hari telah bersuara lantang bahwa Munas IV Golkar kali ini, penting dan strategis!

Dan setelah menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 10 September lalu, Dewan Pimpinan Harian DPP Golkar yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH memberitahu pers bahwa Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, akan membuka munas ini. Tempatnya: Balai Sidang Senayan, Jakarta.

Musyawarah Nasional sebagai forum kedaulatan tertinggi organisasi dilaksanakan dengan patuh oleh Golkar dalam kurun dua dasawarsa terakhir. Ini adalah indikasi bahwa prinsip-prinsip demokrasi dijunjung tinggi dalam eksistensi Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik.

Jauh-jauh hari perhatian masyarakat seakan tersedot ke peristiwa yang berlangsung dari 20 hingga 25 Oktober 1988 ini. Banyak yang menyuarakan pendapat mereka tentang Golkar. Suara-suara itu ada yang genit, ada yang ganas dan ada pula yang menyejukkan. Tapi semuanya bermuara pada satu harapan fundamental, yaitu keinginan agar Golkar berkembang menjadi organisasi sosial politik yang mencintai dan dicintai rakyat.

Bagi Golkar, suara-suara itu merupakan masukan yang sangat berharga dalam Munas kali ini. Dengan demikian Munas IV Golkar yang akan menghasilkan DPP baru dan program baru mampu merangkul suara dan keinginan masyarakat itu. Validitas sebuah organisasi sosial politik memang tergantung pada sejauh mana ada jalinan kemutlakan relevansi perjuangannya dengan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami mengapa para pengamat menganggap Munas IV Golkar kali ini penting dan strategis. Penting karena Munas ini selain menghasilkan DPP baru, juga akan melahirkan program-program baru sebagai cermin ketajaman persepsi dan antisipasi terhadap masalah-masalah bangsa yang akan terjadi di kemudian hari.

Strategis, karena Munas ini berlangsung pada kurun dimana bangsa ini akan merampungkan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Sebagaimana diketahui sebentar lagi (April 1989), kita akan memasuki Pelita V yang merupakan tahap akhir dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Periode Pelita V demikian strategisnya, karena dalam kurun ini, sesuai dengan strategi pembangunan bangsa, kita akan mempersiapkan kerangka tinggal landas agar bangsa

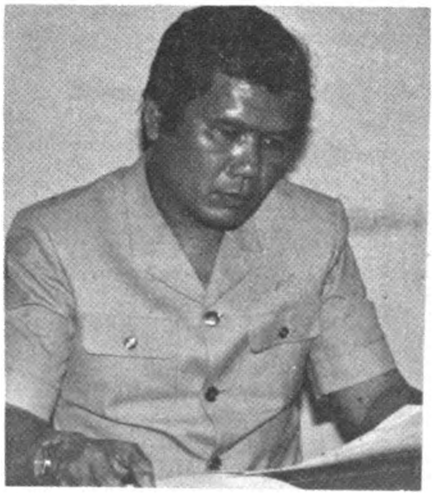

Albert Hasibuan

ini mampu lepas landas pada Pelita VI. Dan tidak kalah strategisnya adalah kenyataan bahwa Munas IV Golkar kali ini terjadi dalam era dimana regenerasi dari angkatan 45 kepada generasi penerus memasuki tahap akhir.

"Produk-produk Munas IV Golkar kali ini harus mencerminkan itu semua," ujar Albert Hasibuan dari Departemen Cendekiawan DPP Golkar. Dan dalam pengamatan Theo L Sambuaga, anggota DPR dari FKP, sejumlah strategis di atas, bukan slogan kosong belaka. "Kalau kita berbicara tentang tinggal landas, disana tersimpul tekad untuk menghilangkan semua gejala yang menghambat terwujudnya tinggal landas itu, di segala bidang. Tekad seperti ini tentu tidak sekedar slogan, tetapi kesadaran sebuah bangsa yang ingin maju," ujarnya.

Dan menurut Theo pula, Munas kali ini harus mencatat produk-produk strategis yang menggambarkan bahwa Golkar siap membawa masyarakat bangsa ini menuju abad 21. "Untuk itu program-program Golkar nanti harus *sounding*."

Sepakat dengan sejumlah tantangan strategis di atas, Widjanarko Puspoyo MA, Sekjen AMPI, melihat bahwa Munas kali ini justru menjadi forum lintas komunikasi untuk mempersatukan semua warga Golkar dalam target dan wawasan yang sama. "Dengan wawasan yang sama tentang target yang sama pula, maka warga Golkar akan mengikat diri pada komitmen organisasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa," katanya. "Makna ini tetap aktual."

Sedangkan Cosmas Batubara, salah

Theo L Sambuaga

satu anggota Dewan Pembina Golkar, menganggap wajar bila para pengamat, pemerduli dan pelaksana politik, mencurahkan perhatiannya pada Munas IV Golkar kali ini, "karena yang bermunas itu adalah Golkar, organisasi sosial politik terbesar yang

Digitized by Google

selalu memenangkan pemilu dari tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987 yang lalu. "Orang tentu ingin melihat sepak terjang Golkar yang telah mendapat kepercayaan rakyat yang demikian besar itu," ujarnya.

Ketajaman Program

Munas Golkar memang sebuah peristiwa organisasi. Tetapi peristiwa ini menjadi begitu penting karena dalam Munas tersebut sejumlah kepentingan bangsa terpantul. Dia tercermin dalam program politik, ekonomi, sosial budaya dan berbagai sektor kehidupan lainnya. "Untuk itu program Golkar nanti dianggap sebagai sentral nilai strategis munas kali ini," ujar Albert Hasibuan.

Banyak memang masalah dalam kehidupan bangsa ini yang harus diperhatikan Golkar dalam programnya nanti. Ketajaman dalam program-program Golkar untuk lima tahun mendatang akan menentukan sampai sejauh mana Golkar mempunyai visi dan persepsi yang jitu terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. "Munas kali ini berada dalam ujian itu," kata Albert.

Sebagai seorang yang menekuni masalah-masalah hukum dan keadilan, Albert melihat bahwa program-program Golkar ke depan agar lebih memperhatikan masalah keadilan. Dan salah satu jalan untuk menjawab permasalahan keadilan ialah bagaimana program Golkar di bidang ketenagakerjaan nanti. Program di bidang ekonomi harus mendorong terciptanya kesempatan kerja bagi jutaan pencari kerja yang kini antri dan akan terus bertambah.

Widjanarko Puspoyo

Program yang memantulkan aspek hukum dan keadilan juga diharapkan oleh Hakim Simamora SH, Koordinator Pelaksana Harian Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum. Sebab, katanya akibat dari konsekuensi pembangunan yang dilakukan sekarang ini, kegiatan-kegiatan hukum yang akan datang akan semakin menonjol. Sebagaimana diketahui, bahwa kebutuhan akan sandang, pangan dan papan dirasakan sudah terpenuhi. Maka dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan hukum nantinya juga akan berkembang dan orang akan menuntut hak-haknya.

Selain itu, kata Hakim, agar Golkar memperhatikan pendidikan kader-kader hukum dikalangan mahasiswa. "Golkar misalnya dapat memprakarsai agar para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) membantu para lurah, dan masyarakat dalam rangka kesadaran hukum dan keadilan. Misalnya saja, mahasiswa yang diterjunkan dalam KKN tersebut dapat memberikan contoh bagaimana caranya mengurus sertifikat tanah dari pertama sampai selesai.

Cosmas Batubara

Dan Cosmas Batubara pun melihat betapa pentingnya sektor tenaga kerja ini agar diperhatikan dalam program-program Golkar nanti. Permasalahan kita memang belum terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan kesempatan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja. "Dalam GBHN 1988 pun masalah ini dicantumkan sebagai tantangan utama pembangunan," ujarnya.

Golkar yang berdoktrin karya dan kekaryaan, tentu sangat memahami bahwa karya atau pekerjaan merupakan hal yang sangat kodrati dalam eksistensi seorang manusia. Karena seperti kata Albert, bila manusia mendapatkan pekerjaan yang wajar, maka sebagian persoalan keadilan, terjawab. "Prinsip egalitarian dalam rangka keadilan agar diwujudkan lebih nyata dalam program masa depan," katanya.

Agar masalah ketenagakerjaan ini bisa terjawab, maka persoalannya adalah bagaimana menciptakan program yang mampu memobilisir pertumbuhan ekonomi di masa depan. Untuk itu salah satu cara yang perlu diperhatikan ialah bagaimana mengembangkan koperasi secara lebih padu dan riil. Karena koperasi adalah aktivitas perekonomian di desa, maka di sektor itu bisa diukur sampai seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang ada. Agar masyarakat lebih partisipatif, maka salah satu kebutuhannya adalah keadilan. "Karena bila selera-selera keadilan tertangani secara baik, maka orang akan mudah dirangsang untuk dinamis dan mengembangkan prakarsa," ujarnya.

Irsyad Sudiro

Program Golkar untuk lima tahun mendatang, memang bisa dirinci secara detil ke dalam berbagai sektor maupun teknik operasional. Namun di mata HM Irsyad Sudiro, Sekjen MKGR, apapun program Golkar nanti, hendaknya mencerminkan upaya terwujudnya iklim yang baik untuk memantapkan stabilitas nasional, menumbuhkan rasa percaya diri, menggugah etos kerja dan memelihara

Digitized by Google

kerukunan nasional dan hubungan luar negeri yang mantap. "Dalam GBHN sebenarnya termuat masalah-masalah apa yang menjadi persoalan utama bangsa di masa depan. "Tergantung apakah Golkar cukup tajam atau tidak untuk merumuskannya secara lebih rinci dan operasional dalam programnya nanti," katanya.

Kebutuhan untuk memahami GBHN ini juga terungkap dari Cosmas. Kader-kader Golkar, katanya, harus memahami betul apa tujuan Pelita maupun pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam GBHN. Tapi Theo agaknya ingin lebih general. Menurutnya, program Golkar di bidang apapun harus mencerminkan sensitivitas organisasi ini terhadap kebutuhan bangsa di masa depan. Tanpa sensitivitas seperti itu, menurutnya, maka Golkar bisa saja terjerumus pada program-program yang kehilangan relevansi dengan kebutuhan aktual jamannya.

Golkar sebagai organisasi kader telah memiliki sekitar 32 juta kader di seluruh pelosok tanah air. Namun menurutnya, untuk menjawab tantangan di masa depan, pendekatan terhadap kader dan pengkaderan tidak lagi hanya berbobot kuantitatif, tetapi kualitatif. Sebab hanya dengan kader-kader yang bermutu, Golkar mampu menampilkan diri sebagai organisasi yang terpercaya dan didukung oleh rakyat. Bobot kader dan pengkaderan ini penting, karena nasib organisasi di masa depan berada di tangan mereka, demikian Theo.

Memahami Secara Utuh

Golkar memang menarik untuk diamati. Seperti kata Irsyad Sudiro, sebagai kekuatan sosial politik terbesar, Golkar selalu dan akan menarik untuk diperhatikan. Baginya, kalau para pengamat, pemerduli dan pelaku politik ingin memperhatikan Golkar, wajar saja karena di Golkar, "ada seribu satu macam potensi yang bisa menjanjikan seribu satu macam manfaat efektif."

Tetapi bagi Cosmas, perhatian terhadap Golkar oleh para pengamat dan pemerduli serta pelaku politik, terkadang bias, hanya karena mereka tidak memahami Golkar secara utuh. "Untuk mengetahui apa dan bagaimana Golkar, orang harus melihat organisasi ini secara komplit," ujarnya.

Golkar lahir dengan misi melakukan koreksi terhadap sistim dan praktek politik yang keliru di masa lampau (Orde Lama). Oleh karena itu Golkar menginginkan suatu sistim politik yang berfungsi dengan baik. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan berupa perombakan struktur politik dengan menyederhanakan jumlah partai yang ada waktu itu. Dari sistim banyak partai, disederhanakan menjadi 9 partai dan kemudian disederhanakan lagi menjadi tiga partai saja hingga sekarang.

Pada awal-awal tahun 1966, Soeharto sebagai pemimpin nasional selalu mencanangkan bahwa kita perlu memetik pelajaran dari sejarah terutama dalam periode 1950-1965, dimana sistim banyak partai ternyata telah menghadirkan perang tanding ideologi yang tidak berkesudahan. Untuk itu dirasa perlu diadakan perombakan infra struktur politik berupa penyederhanaan partai, sehingga kita lebih memantapkan ideologi Pancasila. Ini berarti

PERUM PERUMNAS

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN
MENGHATURKAN

DIRGAHAYU 24 TAHUN GOLONGAN KARYA
20 OKTOBER 1988

SELAMAT MUSYAWARAH NASIONAL KE IV
GOLONGAN KARYA

Digitized by Google

harus ada tekad dari semua pendukung Orde Baru untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara bagi semua kekuatan sosial politik yang ada.

Buah dari konsistensi Orde Baru untuk memperbaharui sistim politik ialah kesepakatan dari semua kekuatan sosial politik Orde Baru, termasuk ABRI, untuk menerima Pancasila sebagai ideologi dan satu-satunya asas bagi organisasi sosial kemasyarakatan. Ini adalah konsensus nasional yang penting sekali.

Dan Golkar sendiri pun ikut dalam proses pembaharuan itu. Sekber Golkar yang menghimpun 280 organisasi yang semuanya berorientasi karya dan kekaryaan, dirasa kurang efisien dengan jumlah sebanyak itu. Golkar kemudian merampingkan diri dengan hanya 7 kino, dan akhirnya menjadi satu: yaitu Golkar seperti sekarang.

Semua ex kino menghimpun diri dalam organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi menjadi onderbouw Golkar, tetapi hanya memelihara hubungan aspiratif saja dengan Golkar. Untuk menjamin hal ini maka telah diadakan UU yang mengaturnya, yaitu UU tentang Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Agar hal ini terlaksana, maka partai politik ditetapkan sebagai organisasi kader perorangan.

Cosmas mengungkapkan bahwa dari sekian banyak pembicaraannya dengan Pak Harto, tertangkap bahwa maksud perombakan struktur politik itu bertujuan lebih mendekatkan perjalanan bangsa ini dengan cita-cita yang dituju, yaitu masyarakat adil makmur. Pengelompokan partai-partai politik menjadi tiga saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia, diarahkan untuk merealisir cita-cita bangsa tersebut.

Dalam keseluruhan proses pembaharuan politik itu, Golkar tampil di front paling depan sebagai pelopor. Karena langkah dan kepeloporan Golkar ini sesuai dengan cita-cita dan aspirasi masyarakat, maka dapat dimengerti mengapa Golkar selalu memenangkan pemilu selama kurun Orde Baru (empat kali pemilu berturut-turut).

Dalam posisi sebagai pemenang pemilu, yang berarti Golkar mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin proses bernegara dan berbangsa, maka tentu saja Munas Golkar yang akan menghasilkan kepemimpinan organisasi yang baru serta program-program baru, menarik untuk diamati. Hanya Cosmas meminta, mengamati Munas Golkar tidak boleh terperosok pada persaingan calon-calon yang bakal menjadi Ketua Umum Golkar, tetapi mengikutinya secara utuh. Artinya sejarah perjuangan dan kelahiran Golkar pun perlu dipahami. "Hanya dengan keutuhan pengamatan seperti itu, orang tidak salah kaprah dalam menganalisa Munas," ujarnya.

Orang akan memperoleh gambaran yang jernih tentang Golkar bila tidak mengamati organisasi ini sepotong-sepotong. "Tidak boleh hanya menganalisa dari sisi persaingan nama-nama untuk jabatan ketua umum, atau hanya melihat programnya saja," ujar Cosmas. Menempatkan Golkar dalam totalitas perjalanan sejarah, khususnya Orde Baru, orang akan lebih kena dalam melontarkan kritik maupun pujian.

Memahami Golkar secara utuh, juga terpantul dari pemikiran Irsyad Sudiro. Apapun wujud dan gerak langkah Golkar, dia harus dipahami dari sisi kepentingan bangsa dan negara. Golkar dan Munas mungkin menjanjikan seribu satu manfaat efektif. Tetapi janji seperti ini, tidak lantas menjerumuskan para pengamat, pemerduli dan pelaku politik untuk memanfaatkannya secara tidak proporsional.

Penting dan strategisnya Munas, harus ditempatkan dalam konteks perjuangan Golkar demi cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Dalam konteks itulah seluruh arti dan makna Munas hendaknya ditempatkan.

Regenerasi

Munas Golkar kali ini berlangsung dalam kurun dimana generasi pejuang 45 yang kita cintai ini, akan memasuki tahap-tahap akhir merampungkan tugas historis mereka. "Wajar bila orang ingin melihat bagaimana proses generasi itu tercermin dalam hasil Munas," ujar Theo. Dan menurutnya, regenerasi seakan alot dalam praktek, karena generasi pembebas yaitu Angkatan 45 ingin memperoleh jaminan sebelum turun panggung, bahwa perjalanan bangsa Indonesia ke depan di tangan generasi penerus, tetap berada pada jalur yang benar. "Harapan seperti ini dalam banyak hal diletakkan di pundak Golkar," ujarnya.

Bila jaminan ini ada, maka Angkatan 45 mungkin akan bisa tidur nyenyak. Karena bagaimana pun majunya Indonesia nanti di abad 21, dia akan tetap menampilkan wajah Indonesia.

Widjanarko Puspoyo memberi catatan khusus terhadap regenerasi ini. Regenerasi menurutnya adalah soal pengalihan dan pemahaman nilai-nilai kepada kaum muda yang akan menampuk kepemimpinan bangsa. Pengalihan dengan demikian menyangkut tiga hal pokok, yaitu nilai-nilai yang dialihkan, alat pengalihan dan pihak yang menerima apa yang dialihkan. Saat ini, demikian Widjan, nilai-nilai yang akan dialihkan bukan merupakan persoalan utama lagi. Sebab setelah Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sudah selayaknya kita tidak lagi sibuk dengan berbagai ideologi yang dianut oleh ormas maupun orpol. "Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terealisasi," ujarnya.

Di kala kita melihat upaya merealisasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, maka kita sampai pada alat pengalihan. Sebab suatu sikap atau pandangan ataupun wawasan tidak pernah terlepas dari persoalan bagaimana nilai tadi dapat berfungsi, dan alat apa yang tepat digunakan sehingga prinsip, fungsi dan instrumen dapat terangkai utuh.

Golkar diharap dapat menjamah dan mewarnai beberapa ratus ormas yang hingga kini masih belum tersentuh sepenuhnya. "Sentuhan ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan ormas sebagai alat untuk pengalihan nilai-nilai," ujarnya.

Ini perlu dilakukan agar penerima nilai dapat sepenuhnya memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam kerangka nilai tadi. Karena persoalan itulah maka faktor-faktor yang mempersatukan dan mengutuhkan warga Golkar menjadi penting dan tidak mungkin diabaikan.

Di sini juga diperlukan alat ukur, untuk mengetahui apakah konsolidasi tahap pertama dalam kerangka regenerasi telah berlangsung dengan baik. Karena yang dinilai adalah hal-hal yang bersifat kualitatif, maka alat ukur yang digunakan juga inter subyektif. Duduknya sejumlah orang muda dalam Kabinet Pembangunan V dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (Golkar) tingkat I dan II dapat diartikan bahwa konsolidasi berlingkup regenerasi begitu menggembirakan. Namun konsolidasi tak bisa berhenti di situ, karena konsolidasi tahap kedua perlu dilakukan demi tu-

Digitized by Google

juan organisasi yang identik dengan tujuan nasional.

Regenerasi dalam konteks fisik, adalah peristiwa alamiah yang tidak bisa dihalangi oleh siapa pun. Itu sudah menjadi kesadaran umum. Bahwa yang tua akan digantikan oleh yang muda adalah hal yang sangat kodrati dalam eksistensi insani. Yang menjadi persoalan kita memang regenerasi dalam konteks pewarisan nilai dan persepsi.

Menurut Cosmas, orang mungkin tidak sabar karena melihat bahwa dalam tubuh kepemimpinan ABRI, alih tugas dan tanggungjawab dari generasi 45 kepada generasi penerus telah berjalan tuntas. "Menjelang Munas, orang ingin melihat apakah regenerasi yang sudah tuntas dalam ABRI itu, terpantul juga dalam Golkar?"

Keinginan seperti ini bisa keliru. Menurut Cosmas yang mengaku dibesarkan Golkar, mengamati Golkar tidak boleh sepotong-sepotong. Golkar adalahorganisasiyang tidak menganut kepemimpinan individual, tapi kolektif. "Dengan demikian mengamati regenerasi dalam tubuh Golkar, tidak boleh hanya mengukurnya dari sisi usia Ketua Umum-nya atau Sekjennya," kata Cosmas. "Yang lebih esensial mungkin adalah menempatkan analisis dan penilaian tentang regenerasi dalam tubuh Golkar dari konteks visi dan program."

Bagaimana pun juga, berbicara tentang regenerasi, orang akan melihat pencerminan dalam struktur usia. Dan bagi Rudini, Menteri Dalam Negeri, regenerasi adalah hal yang wajar saja. Usia, kepintaran dan pengalaman adalah faktor-faktor yang penting dalam proses alih generasi itu sendiri. "Kepintaran bisa dipelajari, tapi pengalaman tidak. Artinya kita harus menghargai bahwa pengalaman adalah hal yang spesifik dan mahal. Karena itu dia harus mendapat prioritas dalam proses alih generasi," ujarnya.

Maksud Rudini tentu saja ialah, jika dalam proses alih generasi terdapat banyak orang pintar dan juga banyak yang berpengalaman, maka yang berpengalaman lah yang harus diutamakan. Karena yang berpengalaman lebih luas adalah (pada umumnya) mereka yang lebih tua, maka dia mengharapkan kepemimpinan Golkar hasil Munas nanti memadukan secara pas antara yang tua dan yang muda. "Kalau masih ada dari Angkatan 45 yang cocok untuk memimpin Golkar, sebaiknya kesempatan itu diberikan kepada mereka," katanya. Tapi dia juga berpesan, agar yang muda dapat menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, "maka berilah mereka kesempatan."

Try Sutrisno

Rudini

Regenerasi memang persoalan bangsa. Tetapi menurut Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno, alangkah kelirunya bila kita terpancing untuk membesar-besarkan arti dan kesempatan regenerasi itu sendiri. Manusia Indonesia, tua maupun muda, adalah asset bangsa. "Regenerasi mengandung makna, bagaimana kita menggunakan asset bangsa itu secara wajar atau tidak," katanya. Dan dalam konteks Golkar, regenerasi berarti menggunakan secara kompak kader-kader yang ada baik yang senior maupun yang yunior untuk menjawab tantangan Golkar.

Jadi ukuran regenerasi menurut Pangab adalah pada dimensi kualitatif pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dalam Golkar. "Kalau ukurannya adalah kuantitatif, bisa saja akan menimbulkan susutnya bobot kekompakan dalam keluarga besar Golkar sendiri," ujarnya.

Pokoknya menurut Pangab, regenerasi harus kita tempatkan dalam tata nilai bangsa Indonesia. Kita menghormati yang tua, mencintai yang muda. Premis-premis nilai seperti ini hendaknya juga secara arif kita tempatkan dalam rangka regenerasi itu tadi.

Tanpa terlalu merisaukan dikhotomi tua-muda dalam proses alih generasi, Irsyad Sudiro berpendapat, regenerasi dalam kepemimpinan Golkar artinya menampilkan tokoh-tokoh yang terbaik. Tidak perduli dia itu tua atau muda. Karena Golkar sendiri sebenarnya telah mempunyai konsep yang matang dalam hal ini, yaitu prinsip penyegaran dan kesinambungan. Pengalaman dan kearifan yang tua adalah harga yang sangat mahal untuk diabaikan begitu saja. Sementara vitalitas kaum muda adalah modal yang sangat berharga untuk dikesampingkan tanpa makna. "Dua-duanya harus dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Baik yang tua maupun yang muda harus memiliki kearifan untuk mengetahui, kapan ia berangkat, bagaimana ia berjalan, kemana harus pergi, apa yang ia cari, siapa teman di jalan, bagaimana mengatasi rintangan, dimana letak tujuan dan akhirnya tahu kapan ia kembali dan kapan ia berhenti. "Bila semua berpedoman pada kearifan seperti ini, maka regenerasi tidak perlu diributkan, karena dia akan berjalan mulus dan bijak," kata Irsyad Sudiro.

Kemandirian dan Keluarga Besar

Golkar lahir dan dibesarkan dalam semangat kolektif. Dia adalah pengemban cita-cita Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekuen. Tentu dalam perjalanan mewujudkan komitmen eksistensinya, Golkar berjuang dalam semangat kebersamaan, melibatkan semua unsur yang menjadi pilar kekuatannya. Maju atau mun-

Digitized by Google

durnya dukungan rakyat terhadap Golkar sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif hubungan antara komponen-komponen yang menjadi cikal bakal Golkar itu sendiri.

Golkar, ABRI dan birokrasi, adalah pilar-pilar yang menopang eksistensi perjuangan organisasi sosial politik ini. Ketiganya adalah fundamen yang kokoh. Golkar berdiri di atas fundamen itu.

Maka tatkala kepada Cosmas Batubara ditanya tentang hakekat kemandirian Golkar, untuk menjawab suara-suara yang menilai bahwa Golkar tidak mandiri karena terlalu bergantung kepada ABRI dan birokrasi, Cosmas seakan tak percaya, kalau masih ada saja yang mempersoalkan kemandirian Golkar dalam konteks ketergantungan. Untuk itu dia berharap agar memahami Golkar jangan sepotong-sepotong, tapi harus secara utuh dan komplit.

ABRI dan birokrasi adalah kekuatan yang melahirkan Golkar. Dengan demikian, kemandirian Golkar jangan dipersoalkan dalam konteks tergantung atau tidak Golkar kepada ABRI dan Birokrasi. Golkar dalam eksistensinya harus memelihara keserasian hubungan dengan pilar-pilarnya itu.

Golkar mengetahui bahwa birokrasi mengurus kepentingan nasional. Dan birokrasi mengetahui bahwa mereka bukan hanya mengurus Golkar. "Jadi harus ada distingsi yang jelas bila berbicara tentang kemandirian Golkar ini," ujar Cosmas. Menurutnya, sebagai Menteri Tenaga Kerja dia tahu persis kapan bertindak sebagai menteri yang mengurusi kepentingan rakyat banyak, dan kapan bertindak sebagai orang Golkar. Distingsi seperti ini juga diperlihatkan secara pas oleh Presiden Soeharto. Ketika menyampaikan pidato dalam Munas III Golkar tahun 1983, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina, Pak Harto membawa sendiri naskah pidatonya naik mimbar. Padahal bila menyampaikan pidato kenegaraan sebagai Presiden Indonesia, naskah pidatonya biasanya dibawa oleh ajudan atau asisten yang ditugaskan untuk itu.

Dalam konteks kehidupan politik, bila seseorang terpilih menjadi gubernur atau menteri atau presiden, maka peristiwa itu adalah buah dari proses kaderisasi. "Dengan demikian jelas, dalam pribadi seorang menteri atau gubernur, tersimpan dimensi sebagai seorang yang dibesarkan oleh organisasi. Jadi alangkah naifnya jika seorang menteri yang terpilih karena

Hakim Simamora

proses kaderisasi sebuah organisasi sosial politik, lantas disuruh berpisah dengan organisasinya hanya karena alasan kemandirian," ujar Cosmas.

Dengan distingsi seperti ini, maka Mendagri Rudini menjawab tidak betul kalau pemerintah hanya memperhatikan Golkar. Bahwa banyak orang dari kalangan pemerintah mengidentifikasi dirinya ke dalam Golkar, hal itu adalah sikap dan pilihan pribadi, karena program dan perjuangan Golkar sesuai dengan aspirasinya.

Kendati demikian, karena masyarakat telah menyoroti masalah kemandirian ini, maka menurut Albert Hasibuan, Munas Golkar kali ini harus mendefinisi secara tepat hubungan antara ketiga pilar dalam Golkar tersebut. "Agar masalah-masalah yang bersifat intern organisasi tidak terlalu menyita perhatian, karena masih ada hal yang jauh lebih besar dari persoalan kemandirian itu," katanya.

Dan bagi Albert, masalah kemandirian Golkar harus ditempatkan dalam konteks kemandirian konsepsi, sebagai refleksi dari fungsi Golkar sebagai organisasi sosial politik. Konsepsi yang mandiri adalah buah pemikiran yang mengarah kepada kepentingan rakyat secara operasional. Kemandirian dengan demikian berintikan faktor dinamika untuk pengembangan Golkar baik dari aspek organisasi maupun dari aspek politik ideal. "Jadi kemandirian dalam arti memisahkan Golkar dari ABRI dan birokrasi, adalah konsepsi yang naif. Karena Golkar adalah kristalisasi komponen ABRI dan birokrasi. Itu adalah kebenaran historis," ujarnya.

Jadi persoalan yang penting untuk menjawab masalah kemandirian ini, menurut Albert adalah bagaimana Golkar sebagai kekuatan sosial politik menjadi wahana yang pas untuk menyalurkan hak dan naluri politik ABRI maupun anggota birokrasi. Munas kali ini diharap mampu mendefinisi hal itu secara tepat.

Dalam semangat keluarga besar dan kepemimpinan kolektif, maka keikutsertaan ABRI maupun birokrasi dalam kepemimpinan Golkar, harus dilihat sebagai hal yang positif. Yang penting keinginan keikutsertaan itu harus mendorong terciptanya kehidupan yang semakin demokratis. "Jadi ukurannya harus lah pada pengembangan demokrasi," kata Albert.

Untuk memberi bobot kehidupan demokrasi yang lebih berakar maka Munas kali ini diselenggarakan setelah Musda I dan II usai. Mekanisme demokrasi yang *buttom-up* ini dimaksudkan agar kepemimpinan Golkar nanti benar-benar memancarkan dukungan yang menggema sampai ke bawah. Golkar ingin mempelopori kehidupan demokrasi yang lebih baik dan maju.

Munas IV Golkar sebentar lagi akan diselenggarakan. Banyak yang menggantungkan harapannya pada Munas kali ini. Dia memang diselenggarakan pada kurun yang penting dan strategis. Dan untuk itu tidak mengherankan bila panitia penyelenggara membentuk tim sebanyak lebih dari 300 orang. Wartawan yang mendaftarkan diri untuk meliput Munas ini mencapai 200 orang! Mereka berasal dari media cetak maupun elektronik di dalam maupun luar negeri. Animo pers yang luar biasa!

Dan dalam rangka memperteguh semangat keluarga besar dan kepemimpinan kolektif itu, maka pimpinan ketiga jalur (A, B dan G) bersilaturahmi dengan para Ketua DPD Golkar Tingkat I se-Indonesia di Jakarta pada awal bulan ini. Disana terlihat Sudharmono, Try Sutrisno dan Rudini bersanding mesra. Keakraban seperti itulah yang telah membawa Golkar tampil sebagai kekuatan yang dekat dengan rakyat, sehingga selalu memenangkan pemilu selama kurun Orde Baru.

Munas akan mengambil sejumlah keputusan penting. Setiap kali ia diselenggarakan, Golkar sebenarnya memperteguh komitmennya pada sejarah, yaitu Golkar yang demokratis dan memperjuangkan secara murni dan konsekuen tegaknya Pancasila dan UUD 1945. Dia seperti harapan Theo, harus terselenggara dalam semangat dan wawasan kebangsaan. Selamat bermunas! □

Pemadu: Laurens Tato

Wawancara: LT, BM, DT, WT

Digitized by Google

Sikap Dasar dan Kemandirian Golkar

Sebagai organisasi sosial politik yang besar dan berpengaruh, Golkar memang telah melakukan banyak hal dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat selama 24 tahun kurun eksistensinya. Bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 20, Golkar akan merayakan HUT ke-24 sekaligus memulai Munas IV.

Dua peristiwa ini, HUT dan Munas, memang menarik untuk diteropong. Sebuah ulang tahun bagi organisasi sosial politik selalu bermakna progresif, artinya dia melangkah makin matang dan dewasa. Sebuah Munas adalah merupakan forum tertinggi organisasi yang antara lain akan memilih pimpinan baru serta menetapkan program Golkar untuk masa lima tahun mendatang. Peristiwa organisasi yang menandakan bahwa Golkar tetap setia melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam dirinya.

Program Golkar ke depan itulah yang mendapat sorotan khusus Menteri Penerangan Harmoko dalam wawancara dengan *Media Karya* belum lama ini. Menurut Harmoko, program Golkar untuk lima tahun mendatang, hendaknya berpegang pada doktrin dan ikrar yang telah menjadi sikap dasar Golkar sendiri.

Sikap dasar itu antara lain adalah mengamankan, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila agar tetap lestari sesuai dengan amanat UUD 1945, tetap mempertahankan tegak dan utuhnya negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu adalah melaksanakan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pengemban hakekat Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Tidak kalah pentingnya adalah sikap dasar Golkar sebagai organisasi yang berorientasi pada karya dan kekaryaan yang dalam memperjuangkan pembaharuan dan pembangunan bagi kepentingan rakyat, Golkar hendaknya melaksanakannya dengan semangat demokrasi dan kekeluargaan serta mengemban fungsi kepeloporan.

Harmoko juga mengharapkan agar dalam program-program Golkar nanti ciri kebersamaan dan kekeluargaan harus terus dipelihara guna menggalang partisipasi rakyat yang menjadi

Harmoko

sumber aspirasi Golkar itu sendiri. "Sebab dukungan yang tanpa didasari kebersamaan dan kekeluargaan tidak bisa mencapai sasaran optimal," ujar Harmoko.

Semangat kekeluargaan dan kebersamaan ini pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi rakyat. Dengan demikian akan tumbuh dinamika dari bawah yang sangat dibutuhkan bagi suksesnya pembangunan. Bila suasana ini terpelihara secara baik, maka menurut Harmoko akan menumbuhkan apa yang disebut sebagai ethos kerja yang dapat menunjang pembangunan. Ethos kerja pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas, yaitu hal yang sangat penting bagi bangsa kita dalam memasuki Pelita V yang merupakan masa pemantapan kerangka tinggal landas menyongsong proses tinggal landas Pelita VI yang akan datang.

Seperti diketahui dalam Pelita V untuk memantapkan kerangka tinggal landas diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% setahun. Tingkat pertumbuhan penduduk yang kini 2,1%, harus ditekan menjadi 1,9%. Hal-hal inilah yang harus kita gugah agar masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan. Kesemuanya ini diharapkan tercermin dalam program-program Golkar mendatang.

Di bidang politik, Harmoko menganggap penting program Golkar yang menekankan perwujudan demokrasi Pancasila, berfungsinya lembaga-lembaga tinggi negara serta efektifnya peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik. "Kita tahu persis, ABRI sebagai unsur kekuatan sosial politik merupakan salah satu sikap dasar Golkar," ujarnya.

Untuk itu dalam programnya nanti, Harmoko berharap agar Golkar lebih memantapkan peranan dan dwi fungsi ABRI sebagai kekuatan nasional untuk mengembangkan kehidupan konstitusi serta menjamin tegaknya negara hukum dalam semangat demokrasi Pancasila.

Golkar memantapkan Dwi Fungsi ABRI.

Digitized by Google

Jangan memecah hubungan.

Secara Utuh

Harmoko juga menganggap penting agar Golkar tetap memelihara dan memantapkan terjalinnya keterpaduan hubungan segenap kekuatan dan potensi dalam lingkungan Golkar, sehingga semakin berakar dan berkualitas serta mampu melaksanakan tanggung jawab dalam mengemban peranannya untuk mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

Walaupun dalam keluarga besar Golkar terdapat tiga komponen yang disebut jalur A, B, dan G, namun Golkar pada dasarnya adalah organisasi kader. "Perkembangan Golkar memang harus mengarah ke sana," ujar Harmoko.

Dalam kehidupan Golkar sebagai organisasi hubungan antara ketiga jalur ini menurutnya, tidak ada masalah. Dalam hal pentingnya memahami secara utuh hubungan antara ketiga jalur tersebut ia meminta agar bertitik tolak pada pedoman Anggaran Dasar Golkar itu sendiri.

Ketika masalah kemandirian Golkar pernah diperbincangkan secara terbuka, masyarakat dan para analis politik mengkaitkan eksistensi Golkar dalam kerangka hubungan ketiga jalur tersebut. Bagi Harmoko, kemandirian Golkar tidak bisa hanya dilihat dari sudut hubungan ketiga jalur itu, tetapi harus diteropong dari segi bagaimana Golkar mengembangkan konsep dalam rangka mencapai sasaran organisasi. "Karena cikal bakal kelahiran Golkar adalah ketiga jalur tersebut, maka ketiganya tidak bisa dipisahkan," ujar Harmoko.

Oleh karena itu dalam penglihatan Harmoko, Golkar telah mandiri sejak kelahirannya. Dia menegaskan lagi bahwa kemandirian Golkar harus dilihat dari sisi pengembangan konsepsi. "Kalau kemandirian mau diartikan sebagai pemisahan antara ketiga jalur dalam Golkar, itu bisa repot," ujarnya. Justru melalui ketiga jalur itulah yang membuat kokohnya kemandirian Golkar.

Kemandirian Golkar harus dipahami dari sisi pengembangan konsep, maka hubungan Golkar dengan ABRI pun tidak ada masalah. Sejak semula Golkar telah mempunyai sikap dasar yang mendukung dwi fungsi ABRI. "Jangan sampai ada orang yang mau memecah belah hubungan ini". Golkar sejak semula mempunyai komitmen yang kokoh untuk mendukung dwi fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang justru diarahkan untuk lebih mampu mengembangkan peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan nasional, untuk memperkuat tegaknya hukum, demokrasi dan kehidupan konstitusional. "Sikap dan pendirian Golkar tidak bisa dipisahkan dari pengertian tersebut," katanya.

Harmoko juga menganggap penting peningkatan kualitas kader Golkar di masa mendatang. Hal ini ia kaitkan dengan sejumlah masalah yang bakal dihadapi dikemudian hari. "Untuk itu kader-kader Golkar nanti harus mampu menjadi juru bicara di mana saja mereka berada dan di manapun mereka ditugaskan". Sejalan dengan itu maka kader Golkar yang merupakan kader Pancasila harus memahami apa hakekat dan tujuan Golkar.

Walaupun konsolidasi idiil, wawasan dan organisasi selama ini dijalankan sudah memadai, namun Harmoko berharap agar program-program tersebut lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang. Dengan konsolidasi idiil yang terus menerus, maka kader-kader Golkar dapat mengamalkan Pancasila dalam perilaku secara nyata untuk mendukung gerak pembangunan. "Konsolidasi idiil ini tidak boleh kendor agar kita mampu menangkal paham-paham atau ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya. Untuk itu memasyarakatkan P-4 merupakan keharusan bagi Golkar.

Tentang konsolidasi wawasan, Harmoko mengharapkan agar program Golkar nanti harus lebih meningkatkan penghayatan terhadap wawasan nusantara. Penghayatan ini jangan sampai mandeg, karena keutuhan negara kesatuan RI, dalam banyak hal tergantung pada penghayatan kita terhadap wawasan nusantara itu.

Sedangkan tentang konsolidasi organisasi, Harmoko mengharapkan agar Golkar dalam lima tahun mendatang mengarahkan programnya pada kegiatan-kegiatan yang menjamin mekanisme organisasi bagi tercapainya program kerja Golkar sendiri. Bila memakai proyeksi lima tahun mendatang, maka penduduk Indonesia yang kini berusia tiga belas tahun, akan mempunyai hak pilih pada Pemilu 1992 yang akan datang. Oleh karena itu program Golkar harus menyentuh kelompok usia tersebut dan generasi muda pada umumnya. "Untuk mempertahankan kemenangan 73,17% dalam Pemilu 1987 adalah bukan pekerjaan yang ringan," kata Harmoko. Oleh karena itu meningkatkan bobot kader sebagai juru bicara yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Golkar, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. ☐ **(LT/BM)**

Digitized by Google

Golkar dan Sejumlah Harapan

Sebentar lagi, tepatnya 20 Oktober 1988, Golkar akan berulang tahun ke 24. Usia yang merambat ini, makin membawa Golkar ke anak tangga kedewasaan. Sebagai organisasi sosial politik terbesar dan berpengaruh, orang tentu menggantungkan sejumlah harapan pada Golkar yang juga akan ber-Munas sebentar lagi.

Agung Laksono (Ketua Umum AMPI) "Lebih Merakyat"

Tidak dapat dipungkiri bahwa Golkar dilahirkan dari kandungan ABRI dan birokrasi. Namun jangan kemudian gaya Golkar selanjutnya seperti birokrat, kesan semacam ini muncul di masyarakat, harus dijawab oleh perilaku Golkar ke depannya, terutama perilaku dalam berkomunikasi sesama warga Golkar. Hal semacam inipun telah mendapatkan tanggapan dari Golkar secara positif dengan dimulainya musda-musda dari tingkat dua terlebih dulu, ini berarti lanjut Agung, suasana demokrasi tercermin. Langkah tadi adalah suatu permulaan yang sehat dan sangat baik, dalam berbagai soal Golkar harus senantiasa meneladani, karena betapapun Golkar sebagai kekuatan sospol terbesar yang lahir sebagai identifikasi dari Orde Baru harus tetap mencerminkan pembaruan dalam berbagai bidang. Dimulai dari pemikiran tersebut menurut Agung, arus dari bawah ke atas adalah sumbangsih nyata dalam mewujudkan demokrasi yang sebenarnya yang akhirnya akan menciptakan iklim sehat dalam pertumbuhan di berbagai bidang.

Suasana seperti itupun menurut Agung Laksono, mantan Ketua Umum HIPMI, akan menciptakan iklim ekonomi yang baik. Karena dalam berbagai hal gelombang demokrasi sudah tiba saatnya sebagai suatu kebutuhan dasar dalam meningkatkan segala macam pertumbuhan bagi bangsa seperti Indonesia yang sedang membangun, dan melalui Munas rasanya program serta harapan-harapan ini dapat diketengahkan sebagai bahan kajian yang penting untuk dipikirkan.

Suasana yang tak berimbang tidak akan menciptakan iklim perekonomian yang baik. Prasyarat pertama adalah justifikasi di bidang pembangunan ekonomi baik pemerintah ataupun swasta, dikembangkan secara stabil, karena kultur kita menghendaki secara simultan. Aspek-aspek sosial politik/budaya berjalan bersama seiring sejalan. Ia mengharapkan di masa depan Golkar memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kadernya yang kreatif, berprestasi dan berkreasi. Dengan demikian suasana dialogis akan lebih terlihat, karena semua kader merasa diberi peran dan dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing.

Dengan terjadinya komunikasi yang baik dan terbuka, demokratis, program juga akan mampu dilaksanakan dengan baik. Program Golkar melalui Munas nanti adalah berbicara dua puluh lima tahun yang akan datang, program pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Beberapa pengertian sindiran yang disebut ''sowan'' yang mengandung konotasi sinisme, sebetulnya dapat diganti dengan pengertian, suasana konsultasi nonformal yang perlu dipertahankan. Karena konsultasi semacam itu adalah suatu bentuk komunikasi dalam rangka menimba pengalaman orang lain, juga dalam rangka mendapatkan masukan yang berharga. Melalui Munas Agung yakin Golkar yang akan tampil lebih dicintai rakyat karena Golkar lebih merakyat, dalam menjawab tantangan pembangunan.

Agung Laksono

Moh. Hatta BBA Kurangi cara-cara berfikir primordial

Mantan bendahara umum DPP KNPI, anggota DPR.RI periode 1988-1993 ini berpendapat, Munas adalah tradisi positif yang telah dikembangkan Golkar sebagai salah satu wujud konkrit dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Kali ini lebih bermakna karena Munas telah diawali oleh musda-musda tingkat dua dan satu, dari bawah ke atas.

Iklim semacam ini hendaknya dapat segera diserap oleh semua pihak yang merasa warga Golkar, baik secara perorangan atau secara organisasi. Arus baru dari bawah ke atas sangat membuka kesempatan bagi setiap kader Golkar untuk secara lebih aktif dan kreatif berperan di bidangnya dalam melanjutkan cita-cita perjuangan Golkar. Sehubungan dengan itu ada hal yang lebih penting lagi adalah Munas kali ini pasti mempunyai dimensi ganda, selain program akan ditelurkan, kepemimpinan akan dilahirkan, namun dimasa-masa yang akan datang akan dihadapi sejumlah tantangan yang cukup berat.

Moh. Hatta

Karena itu Munas kali ini menjadi sangat berarti dan penting sebagai inspirasi melanjutkan perjuangan. Karena semua persoalan bangsa tidak dapat ditangani sepotong-sepotong, harus

Digitized by Google

secara bersama-sama, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Lebih jauh Hatta mengatakan, periode era tinggal landas terutama dalam masalah kepemimpinan akan ikut berperan, untuk itulah kepemimpinan dalam segala sektor dan melalui Munas Golkar kali ini benar-benar harus dilatarbelakangi oleh kualitas manusianya.

Harapan rakyat atau warga Golkar menurutnya, kepemimpinan yang akan datang lebih dapat menjadi pendorong dan penggerak dari apa yang telah dihasilkan Tri Sukses I. Untuk itu menurut Hatta dibutuhkan kearifan, kebijakan, ketulusan, dan sedikit demi sedikit hindari cara-cara berfikir primordial, justru harus dimulai dari generasi mudanya.

Melalui Munas akan lahir para pemimpin yang rela berkorban, mengandung arti luas, mampu bekerja sama dengan semua pihak, tidak memandang siapa dan dari mana dan itulah kira-kira yang diharapkan oleh semua pihak.

Agus Muchyidin,
(Ketua DPD I Golkar Jawa Barat)

Lebih kritis dan dialogis

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita fahami bersama bahwa Munas sebagai lembaga tertinggi organisasi akan menetapkan keputusan-keputus-

Agus Muchyidin

an yang akan menjadi pegangan dan pedoman organisasi untuk masa lima tahun mendatang, dalam hal ini untuk kurun waktu 1988-1993. Oleh karena itu Munas IV, sebagaimana Munas-munas sebelumnya memiliki arti yang penting sekali.

Keputusan yang akan ditetapkan Munas, yang akan menjadi dasar langkah-langkah organisasi lima tahun mendatang antara lain:

Menetapkan Program Umum Golkar 1988-1993, yang berisi program-program yang harus dilaksanakan dan sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh DPP Golkar periode 1988-1993.

Menetapkan susunan dan personalia DPP Golkar periode 1988-1993, yang akan mengemban tugas untuk melaksanakan keputusan-keputusan Munas.

Menetapkan keputusan-keputusan politik lain yang dianggap penting oleh Munas untuk lima tahun mendatang.

Mengingat arti penting Munas IV Golkar sekarang, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang semakin komplek, saya mempunyai harapan-harapan tertentu, antara lain:

Golkar, sebagai organiasi kekuatan politik yang selama empat kali Pemilu telah mendapat kepercayaan rakyat yang sangat besar, diharapkan dapat menyelenggarakan Munasnya, yang dapat mencerminkan perkembangan Demokrasi Pancasila dan dapat menetapkan keputusan-keputusan yang searah dan sejalan dengan program perkembangan bangsa dan negara. Dalam hal ini, Golkar sebagai organisasi sosial politik, harus memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakatnya, sehingga mampu melahirkan program-program yang bukan saja mencerminkan aspirasi masyarakat dan program-program daerah tetapi juga dapat menunjang program pembangunan nasional dalam rangka menyongsong proses tinggal landas pembangunan.

Munas IV, diharapkan dapat memilih kader-kader Golkar yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela untuk mendapat kepercayaan melaksanakan amanat Munas IV. Oleh karena itu tekanannya sudah barang tentu harus berorientasi pada kesanggupan kader untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan dan secara konsisten harus mampu menjalankan kebijaksanaan politik yang telah ditetapkan oleh Munas.

Karena sifat programnya yang harus mampu menunjang suksesnya pembangunan nasional yang multi dimensi, maka DPP Golkar yang akan datang, sebagai suatu kepemimpinan yang bersifat kolektif harus berintikan kader-kader Pancasilais yang secara profesional memiliki potensi teknokratis, intelektual dan idiolog.

Harapan-harapan ini lahir mengingat berbagai variabel yang sangat berpengaruh pada dinamika pembangunan dalam Pelita V, terutama yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan politik, antara lain:

Perubahan struktur demografi menjelang lima tahun mendatang. Generasi Pasca Revolusi 1945 akan merupakan generasi penerus pembangunan yang memiliki aspirasi nilai yang sejalan dengan perkembangan zamannya.

Perkembangan ekonomi dan komunikasi yang semakin terbuka, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pergeseran sistim nilai yang bukan saja cepat tapi juga mungkin mendasar.

Perubahan-perubahan sosial lainnya sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan nasional di seluruh bidang kehidupan.

Variabel-variabel tersebut perlu mendapat perhatian kita dalam memilih kader-kader yang akan mendapat kepercayaan untuk menjalankan program-program organisasi. Sehingga kepengurusan DPP Golkar yang akan datang secara kolektif merupakan suatu kepengurusan yang mantap dan siap tanggap terhadap perkembangan yang dihadapinya.

Farida Chadaria,
Pengurus DPP AMPI

Banyak generasi muda yang telah siap

Siapapun tidak boleh melupakan proses sejarah kelahiran Golkar yang sebentar lagi akan genap dua puluh empat tahun. Sebagai suatu organisasi

Farida Chadaria

yang baru berusia 24 tahun bagi Farida, sudah sangat luar biasa pertumbuhannya karena keberadaannya telah mengakar dan diterima oleh masyarakat, dengan bukti-bukti nyata, dari pemilu ke pemilu selalu meraih keme-

Digitized by Google

nangan. Tapi bagi suatu perjalanan dalam kurun waktu dua puluh empat tahun masih perlu meningkatkan kedewasaannya, kemandiriannya dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Untuk itulah saatnya kini menurut Farida, Golkar harus mau menerima koreksi baik dari luar ataupun dari dalam untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, sehingga misalnya jadi selalu merasa benar. Koreksi atau katakanlah kritik itu sesuatu yang baik, bahkan lebih baik dari hanya sekedar harapan.

Tentu setelah Golkar diterima oleh masyarakat, kan harus juga diimbangi dengan bobot, kualitasnya, sehingga tidak dikesankan Golkar belum mampu bicara sendiri, sekalipun memang kelahiran Golkar adalah kehendak sejarah dan dalam hal ini ABRI sangat berperan. Tapi Golkar sebagai salah satu kekuatan sospol hendaknya tidak segan-segan untuk menata kedalam, sehingga suasana yang terlihat diluar adalah sama dengan suasana yang sebenarnya.

Golkar lahir, karena dikehendaki oleh keadaan, keadaan itu kini telah baik dan Golkar sebagai sisi lain dari Orde Baru atau katakanlah pernyataan dari Orde Baru itu sendiri harus selalu mengupayakan setiap tindakan dan konsepnya senantiasa melihat kedepan, samping dan kebelakang sebagai rangkaian referensi yang tak terputus.

Perangkat menuju bobot dan kemandirian, antara lain, Golkar harus berani meneruskan tindakan kongkrit, yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Saya lihat, itu sudah mulai difikirkan oleh Golkar bahkan dalam hal ini karena pemerintahan kita ini sebenarnya pemerintahan Golkar, dengan tampilnya tokoh-tokoh muda Golkar duduk dalam legislatif dan duduk sebagai pemimpin Departemen, terasa ada suasana yang baru dan segar dalam mengaktualisasikan pengertian berdaya guna serta menindak aparat yang tidak benar dalam menjalankan fungsinya.

Nampaknya bobot generasi muda dipertaruhkan, untuk itu memang ada baiknya selain ada kesinambungan generasi muda yang berkualitas di bidangnya masing-masing mendapat kepercayaan untuk berperan secara langsung, melalui Munas nanti duduk dalam kepengurusan DPP Golkar periode 1988-1993.

Artinya generasi muda yang mampu menyerap aspirasi masa depan, mempunyai sikap dan sudah tentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hendaknya Munas nanti melahirkan keputusan-keputusan yang demokratis bukan malah sebaliknya, serta jangan hanya dianggap forum Munas ini sebagai kegiatan rutinitas belaka, maka datanglah ke Munas dengan suatu konsep bukan hanya sekedar sebagai pelengkap.

Munas selain akan melahirkan program-program organisasi, kepemimpinan, tapi bagi generasi muda, ini adalah suatu forum yang sangat mahal dalam memandang masa depan bangsa kita yang sebagian besar akan ditentukan oleh Golkar. Kepada generasi yang telah siap, kenapa tidak pantas dan mampu mendapat kepercayaan.

Agus Toepoe
Ketua Umum GM GAKARI

Tantangan Tahun 2000

Munas diharapkan mampu melahirkan konsepsi lima tahunan, untuk menyongsong tahun dua ribu. Rekomendasi Munas akan menentukan masa depan kehidupan bangsa, dalam mewarnai kehidupan demokrasi yang

Agus Toepoe

berdasarkan Pancasila. Menurut Agus Toepoe, manusia Indonesia masa depan, terlebih generasi mudanya tidak datang dalam kancah perjuangan melamar, tanpa bekal yang memadai, ia harus berbuat dulu sebanyak-banyaknya, pasti kemudian akan dinilai sejauh mana yang telah diperbuat. Karena iklim kita semakin hari semakin sehat dan demokratis, yang hanya datang tanpa mempunyai integritas pasti akan tertinggal, selain kini adalah arus informasi teknologi modern segala sesuatu harus profesional juga setiap orang dituntut untuk kreatif.

Bagi Agus Toepoe, berjuang, berbakti kepada Nusa dan Bangsa ada banyak cara dan jalan, untuk itulah bagi orang muda yang terpenting selain meningkatkan diri secara terus menerus, juga jangan jadi penganggur-penganggur elit, karena tahun dua ribu butuh orang-orang muda intelektual yang mampu bekerja dengan aktif, kreatif, serta jangan lupa kritis. Mudah-mudahan melalui Munas Golkar ini akan tampil pemimpin-pemimpin yang kita harapkan semua, untuk kelangsungan cita-cita perjuangan Golkar yang juga adalah cita-cita perjuangan bangsa.

Sabar Martin Sirait

Agar lebih efektif dan efisien

Untuk menyampaikan harapan-harapan melalui Munas Golkar rasanya tidak tepat bila tidak menoleh

Martin Sirait

kembali kepada perjalanan sejarah perjuangan bangsa. Memang Golkar lahir setelah itu, tapi tidak dapat dilepaskan kelahirannya dan keberadaannya dengan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

Sejak Proklamasi Tujuh Belas Delapan Empat Lima, hingga awal tahun lima puluhan sampai pada awal tahun 1960-an, iklim dan gema kemerdekaan yang sekaligus kebebasan, sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia umumnya, khususnya kebebasan berfikir dan bertindak para pimpinan dan para tokoh yang ikut terlibat secara phisik dan secara politik pada waktu itu.

Kegembiraan dan kebebasan di alam kemerdekaan tersebut mempunyai dua pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan bertanah air; pengaruh pertama yaitu

Digitized by Google

EXCLUSIVE SETS

M 95-490
J U M B O

Citra exclusive tampil dalam bentuk televisi Grundig Jumbo 38 inch.

• Super Full Flat Square Picture Tube • Multi System • Color Transient Improvement (CTI) • Digital Hi-Tech Tuning • Surround Sound • HiFi Stereo • Digital Controlled Multi Function Display • Monolith Eye Protecting Contrast Filter • Dua Bahasa/Bilingual dengan sistim Zweiton Stereo, paling tepat untuk SST • Tele Video Text • Monitor System • Infra Red Remote Control Telepilot 660 • Video Console Rack • Dapat dihubungkan dengan semua Video, Komputer dan Parabola • Garansi 2 tahun termasuk spare-parts.

GRUNDIG

a step ahead into the future

ARFITA APG/5049

Sole Agent :

PT Asia Permai Electronics, Jl. Hayam Wuruk 2 G-H , Jakarta Pusat.
Tel.: 363261 (3 lines)-374819-374723. P.O. Box : 584/JAK. Telex : 45922 AMID IA.

Digitized by Google

BANK BNI

Babak baru Bank Negara Indonesia 1946

Empat puluh dua tahun silam, kami lahir dalam kancah perjuangan. Membangun perekonomian bangsa sejak awal masa kemerdekaan. Ternyata, perjuangan tak sia-sia. Perjalanan sejarah mencatat karya dan prestasi BNI sebagai bank yang berhasil dalam mengabdi dan membangun perekonomian bangsa.

Kini, kami masuki babak baru dalam perjuangan. Untuk menjadikan BNI sebagai bank utama yang lebih tanggap terhadap tuntutan pasar serta mampu mempersembahkan kualitas layanan yang lebih baik kepada nasabah.

Dan mulai 5 Juli 1988, dengan resmi BNI mempergunakan lambang baru "Bahtera Berlayar", seperti yang Anda lihat pada iklan ini.

Dengan jiwa bahari, jiwa kejuangan nenek moyang yang kami warisi, kami siap mengarungi samudera tantangan usaha-niaga antarbangsa.

BANK BNI

Swadharma Bhakti Nagara

Digitized by Google

"Adanya persatuan keluar, berupa, lahirnya Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Sedangkan pengaruh kedua yaitu "terjadinya persaingan internal dalam mengelola dan mengisi kemerdekaan". Pengaruh pertama tidak terlalu banyak menimbulkan permasalahan, walaupun bekas penjajah dan sekutu-sekutunya berusaha kembali dan meneruskan politik pecah belahnya, namun dengan gelora nikmatnya kemerdekaan, persatuan dan kesatuan malah menambah kokohnya persatuan keluar. Pengaruh kedua ternyata membuka suatu arena baru secara internal, hal ini dikarenakan segala perangkat kenegaraan dan prasyarat-prasyarat pemerintahan dan lain-lain belum ditata pada waktu itu.

Kepemimpinan Nasional hanya bermodalkan suatu "Semangat dan Tekad" untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, karena semua sektor kehidupan belum terkonsolidasi.

Dan secara khusus kami punya harapan agar kader Golkar yang bekerja menjadi Pegawai Negeri/Para Pamong menjadi teladan dan pelayan dinamis pembangunan dengan menanggalkan sikap pejabat penguasa. Mengapa hal ini perlu secara khusus kami garis bawahi adalah karena ± 3 juta kader Golkar yang bekerja menjadi Pegawai Negeri/Pamong adalah kader yang paling berpendidikan, kader yang paling terorganisir dan kader yang terdepan mendapat tugas pelayanan dan pengaturan dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Dan agar kader Golkar ini bisa mengemban tugas yang mulia tersebut, Golkar secara organisatoris harus bekerja lebih keras lagi agar karir dan tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri ini secara berencana dan berpola ditingkatkan dan diperbaiki untuk memacu produktivitas kerja dan produktivitas pelayanan bagi masyarakat dan bagi pembangunan nasional.

Dan kepada Kader Golkar yang ada di Ormas, para Politisi Murni agar membudayakan Budaya Produktif dalam membahas masalah-masalah nasional serta meninggalkan Budaya Mumpung dan Budaya Seremoni. Agar lebih *"efektif dan efisien"* berkonsensus dalam pengambilan keputusan serta meninggalkan budya perpecahan. Dengan demikian Golkar sebagai kekuatan Sosial Politik bukan saja melembaga tetapi juga membudaya, yaitu dengan memiliki "Tradisi Politik Panutan" yang akan membuat Golkar makin "Berakar, Kokoh, Kuat, Mandiri dan Jaya".☐ **Rendy.MS**

Segenap Pimpinan & Karyawan
TEATER IMAX KEONG EMAS

Mengucapkan

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA XXIV, 20 Oktober 1988"
Dan
SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL IV GOLONGAN KARYA

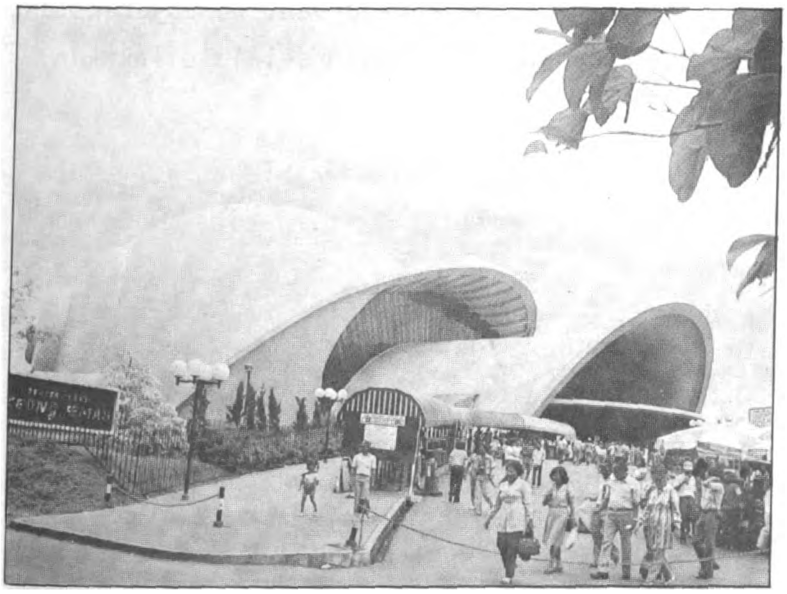

TEATER IMAX
Keong Emas
Taman Mini Indonesia Indah

Saksikanlah pertunjukkan film dengan teknology mutakhir tentang Tanah Air Indonesia melalui film Indonesia Indah dan Anak-Anak Indonesia. Film tersebut dipertunjukkan tiap hari kecuali hari Selasa dan Kamis yang menyajikan film Import **"The Dream is Alive"** dan **"Speed"**.
Untuk mengetahui jam pertunjukkan dan film yang dipertunjukkan juga untuk booking hubungi telp. 8401021 & 8401036.
Rombongan 50 orang ke atas diberikan discount.

Digitized by Google

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

IN MEMORIAM

WAFATNYA SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah meninggalkan kita, dipanggil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Innalillahi Wa Inailaihi Roji'un. Bangsa dan Rakyat Indonesia telah kehilangan salah seorang putera terbaiknya. Kita menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya, yang betapa beratnya kita kehilangan almarhum, kita mengikhlaskannya karena ini merupakan kehendak dan ketentuan Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Sri Sultan adalah seorang Raja, tetapi Republiken, pejuang yang gigih dan konsekuen, besar sekali pengabdiannya kepada Republik Indonesia sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kharisma, watak dan pribadi yang kuat, dan teguh pendirian, memberikan peranan penting dalam percaturan politik selanjutnya. Beliau adalah tokoh nasional yang mendapat perhatian di dalam sejarah nasional dan disegani di dunia internasional, seorang tokoh yang mencintai dan dicintai rakyatnya, selalu tampil sederhana, pendiam tapi tegas membela prinsip, selalu akrab dengan lingkungan bawah.
Sifat-sifat kejoangannya menonjol, tekun, gigih, jujur dan terbuka. Peranan apapun yang dilakukan baik dibidang kenegaraan, kemasyarakatan, keolahragaan, kepramukaan, kebudayaan dan lain-lain selalu dilakukan dengan penuh dedikasi dan penuh rasa tanggung jawab.

Kita semua yang ditinggalkan semoga dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa rakhmat dan hidayatNya, agar dapat meneruskan cita-cita Almarhum, dan mencontoh suri tauladannya.

Jakarta, 9 Oktober 1988.
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SOEPARDJO ROESTAM

Digitized by Google

ABRI Berulang Tahun dan Memetik Hikmah Perjalanan Sejarah

Tanggal 5 Oktober 1988 lalu ABRI merayakan hari jadinya yang ke 43. Peringatan hari jadi dilaksanakan dalam suatu upacara kebesaran militer yang sederhana, dan khidmat di parkir timur Senayan, Jakarta. Acara peringatan itu dihadiri oleh Presiden beserta Nyonya, Ibu Tien Soeharto, dan Wakil Presiden beserta Nyonya, Ibu EN Sudharmono.

Dalam amanatnya pada upacara peringatan itu, Presiden Soeharto mengajak seluruh jajaran ABRI untuk mengenang kembali perjalanan sejarah bangsa pada masa lampau dan sekaligus memetik pelajaran darinya sehingga dapat dipetik suatu hikmah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa menjadi makin kokoh dan kuat.

Agar pengalaman sejarah memberikan makna positif, dan bukan sebaliknya, memberikan beban yang berkepanjangan, Presiden mengajak seluruh jajaran ABRI pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, agar memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah."Dengan mengatakan yang benar adalah benar, kita akan dapat terus melanjutkannya dengan penuh keyakinan. Dengan mengatakan yang salah adalah salah, kita akan dapat menghindarkan kesalahan yang sama dengan penuh kesadaran," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, sejarah menunjukkan bahwa dengan berpegang teguh kepada Sapta Marga, dan dengan kesetiaan yang bulat kepada Pancasila dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, ABRI berhasil menumpas pemberontakan G.30.S./PKI bersama kekuatan-kekuatan Pancasila pada tahun 1965. Karena sadar akan tanggung jawab sejarahnya bagi kebahagiaan dan ketenteraman rakyat Indonesia di masa datang, ABRI mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk merenungkan ulang seluruh pengalaman sejarah sebelum tahun 1966 dan mengoreksinya. "Inilah latar belakang lahirnya Orde Baru yang sejak semula diperjuangkan secara demokratis dan konstitusional," kata Presiden.

Ditegaskan oleh Kepala Negara, bangsa Indonesia telah bertekad agar tragedi nasional yang berpuncak pada pemberontakan G.30.S./PKI di tahun 1965 merupakan pengalaman pahit yang terakhir dan tidak akan terulang kembali sepanjang zaman. Tekad ini harus dipertebal lagi setiap kali memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Kebulatan tekad itu hendaknya diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Sesuai dengan semangat Sapta Marga yang diucapkan dan diyakini, seorang anggota ABRI harus siap bahwa hidup dan matinya demi Pancasila, demikian penegasan Presiden di hadapan 7.000 prajurit peserta upacara yang berbaris rapi.

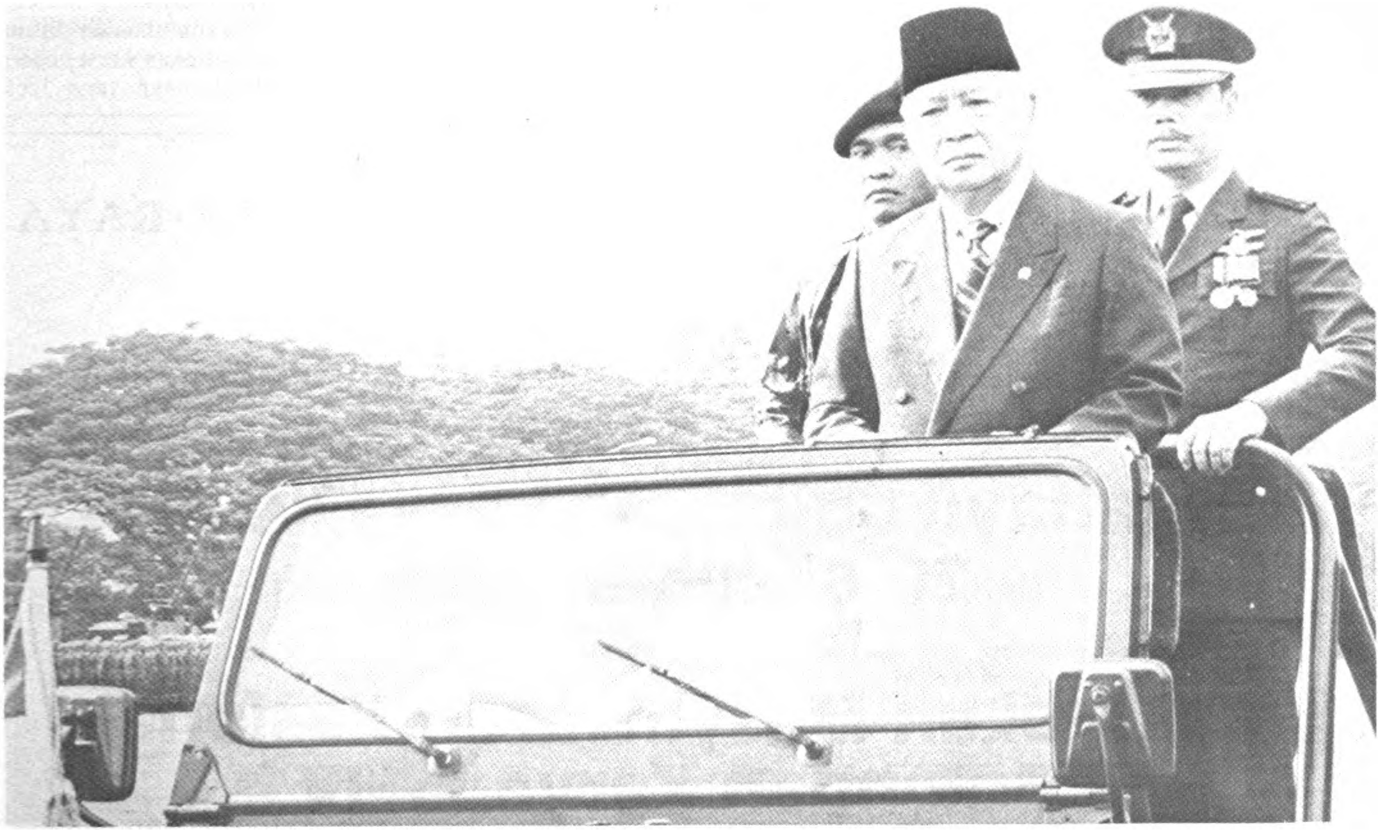

ABRI dan masyarakat harus berani mengatakan yang benar.

Digitized by Google

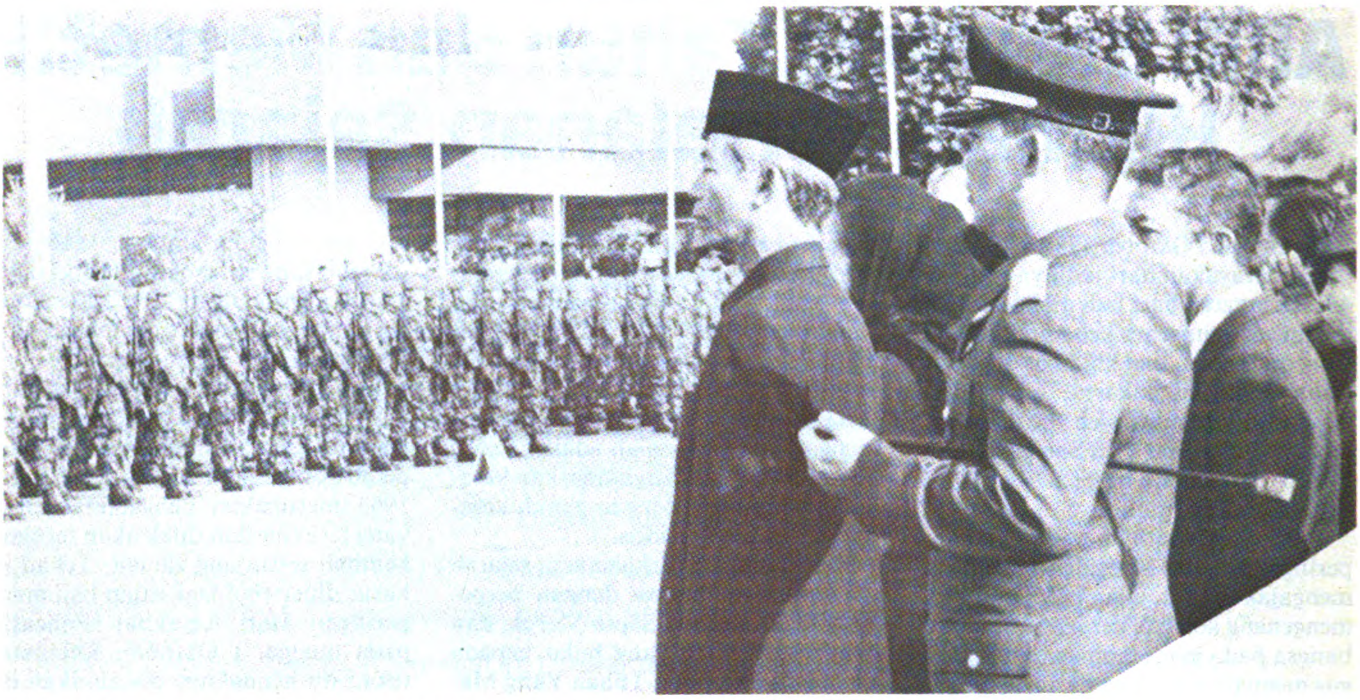

Menjaga dan meningkatkan kewaspadaan tanpa saling curiga.

Tingkatkan Kewaspadaan

Dalam rangkaian peringatan HUT ABRI itu, Panglima ABRI Jendral Try Sutrisno dalam pidato yang disiarkan melalui TVRI dan RRI pada malam hari sebelumnya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus berupaya menjaga dan meningkatkan kewaspadaan tanpa sikap saling curiga. Diingatkannya, kekuatan-kekuatan anti-Pancasila akan selalu berusaha secara konseptual mempengaruhi pola pikir dan pola tindak bangsa Indonesia demi keuntungan mereka. Seluruh rakyat Indonesia diminta Pangab agar terus memelihara persatuan dengan meletakkan tiap permasalahan pada lingkup kepentingan nasional atau kepentingan seluruh bangsa dan negara. ''Semua pihak hendaknya dapat mengendalikan diri dalam kearifan untuk tidak melakukan pemikiran, perbuatan dan tutur kata yang dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan nasional,'' katanya.

Pangab juga mengajak seluruh rakyat agar berusaha melakukan yang terbaik bagi lingkungan masing-masing dengan landasan rasa bangga serta sadar akan masa depan yang lebih baik. Masing-masing warga masyarakat diminta untuk berusaha semaksimal mungkin mewujudkan disiplin nasional yang menjadi pilar utama bagi terwujudnya efisiensi, produktivitas dan stabilitas nasional. Disiplin nasional ini dapat dimulai dan ditumbuhkan dari lingkungan kecil seperti keluarga, di lingkungan yang lebih

KOPERASI SUPIR TAKSI JAKARTA RAYA
(KOSTI JAYA)
BADAN HUKUM NO 1684/B H /I
KOSTI JAYA
SEKRETARIAT : JL. BULUTANGKIS 303 SENAYAN JAKARTA 10270
MENGUCAPKAN :
Dirgahayu Golongan Karya ke XXIV
20 Oktober 1988
dan
Sukseskan Musyawarah Nasional
Golongan Karya ke-IV

Digitized by Google

besar hingga lingkup nasional.

Tentang ABRI, Pangab yang juga Ketua Bakorstanas mengatakan bahwa ABRI bukan hanya sekedar perwujudan hasrat keprajuritan bangsa Indonesia, tetapi lebih dari itu, yaitu perwujudan hasrat keprajuritan pejuang, yaitu keprajuritan yang dilandasi oleh patriotisme, rasa tanggungjawab, berani menghadapi tantangan, dan tabah menghadapi kesulitan dengan penuh percaya diri. Keberadaan ABRI dalam kondisi seperti sekarang tidak mungkin tercapai tanpa peran serta seluruh masyarakat. Karena itu bagi ABRI, kegembiraan dalam menyambut HUT tidak semata-mata dibuai oleh rasa kebanggaan tetapi juga tetap diimbangi dengan kesadaran untuk mawas diri.

Alih Generasi

Menurut Panglima, hari ABRI ke 43 ini ditandai dengan fase yang penting dalam perjalanan sejarah pertumbuhan ABRI, yaitu fase alih generasi secara tuntas. "Semua personil ABRI di setiap tingkatan mulai dari eselon terbawah hingga paling atas sudah terdiri dari generasi penerus yang sedang melanjutkan estafet perjuangan dari generasi-generasi pendahulunya," kata Jendral.

Berkaitan dengan HUT ABRI ke 43 itu, Panglima mengeluarkan lima perintah harian antara lain: tingkatkan terus pemantapan kesetiaan dan penghayatan dan pengamalan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945, tingkatkan kepribadian sebagai prajurit, tingkatkan usaha mewujudkan disiplin dan produktivitas nasional, tingkatkan kemampuan profesionalisme, dan laksanakan segenap kebijakan dan instruksi pimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Fungsi dan peran ABRI sebelumnya telah dijelaskan oleh Panglima ABRI dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di kediamannya. Atas pertanyaan, ia mengatakan bahwa sebagai kekuatan sosial politik, ABRI akan senantiasa mendorong kemandirian dan perkembangan segenap lembaga kemasyarakatan termasuk organisasi kekuatan sosial politik. Semua pihak diharapkan agar menyadari bahwa kemandirian akan terwujud apabila individu maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan itu memiliki disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya.

Dalam sistim politik nasional, ABRI merupakan subsistim yang kedudukannya sejajar dengan kekuatan sosial politik yang lain. Untuk itu ABRI selalu bekerjasama dengan kekuatan sosial politik yang lain atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan.

Menyinggung masalah pembangunan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, Try Sutrisno mengakui kemajuan teknologi dewasa ini tidak dapat begitu saja diabaikan. Peralatan canggih bukan satu-satunya prasyarat keberhasilan, namun ABRI secara bertahap dan berlanjut mempersiapkan personelnya untuk mengoperasikan sistim senjata berkadar teknologi tinggi. "Titik berat pembangunan saat ini adalah mengkonkretkan kekuatan ABRI yang relatif kecil, tapi peka dan tanggap menghadapi perkembangan lingkungan. Kekuatan ini memiliki kecepatan reaksi yang tinggi dan mampu dikerahkan ke suatu sasaran dalam waktu singkat," katanya. Kemampuan kekuatan ini tidak saja untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri, tetapi juga ancaman dari luar.

Peringatan HUT ABRI yang berlangsung di Senayan itu ditandai pula dengan defile militer yang melibatkan 7.000 personel dari ketiga angkatan, Polri, resimen mahasiswa dan hansip. Acara itu dimeriahkan dengan pertunjukan perkelahian sangkur oleh satuan Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I Kostrad yang melibatkan 500 prajurit, yang dipimpin oleh Sertu Eko Muntoro. Selain itu di udara diadakan atraksi terbang lintas yang dilakukan oleh 12 pesawat tempur dan latih/tempur TNI AU dari jenis F-5 Tiger, A-4 Sky Hawk, dan HS Hawk. Komandan upacara parade dan defile adalah Kolonel Inf Haris Sudarno, Komandan Korem di Surabaya.☐ (SGT)

GOLONGAN KARYA

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
DAN
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
DAERAH TINGKAT I DKI JAKARTA

Ketua, | Sekretaris,

MOCH. BASOFI | Drs.H.A. LATIEF MUSTAFA
NPAG: 09030146137 | NPAG: 09020000002

SEKRETARIAT: JL. PEGANGSAAN BARAT NO. 4 TELP. 358792-343811-343812 JAKARTA — PUSAT

Digitized by Google

Menjemput Era Tinggal Landas Dengan Semangat "Total Football"

Tinggal satu Pelita lagi, Indonesia akan memasuki era yang dinamakan tinggal landas. Tepatnya masa yang dinanti-nantikan itu adalah pada Pelita VI nanti. Tidak mengherankan apabila memasuki Pelita V (yang dimulai April 1989 mendatang), gema tinggal landas semakin nyaring.

Untuk menyongsong tinggal landas, maka Pelita V yang segera menjelang nanti dianggap sebagai kurun waktu yang sangat strategis, karena dia bakal memvonis, apakah kita bakal tinggal landas atau tidak. Vonis itu tentu tergantung dari sejumlah syarat yang dipenuhi atau tidak oleh pembangunan itu sendiri.

Agar bangsa ini tinggal landas, maka dalam Pelita V pemerintah bertekad mewujudkan sejumlah prakondisi untuk terciptanya kerangka yang kokoh bagi masyarakat yang akan lepas landas. Prakondisi itu terpantul pada beberapa tekad pencapaian kuantitatip Pelita V, seperti pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen setahun angka pertumbuhan penduduk yang harus dapat ditekan menjadi 1,9 persen, GNP yang harus terus naik serta syarat-syarat yang lainnya. Pokoknya seperti sebuah pesawat yang akan tinggal landas, ia membutuhkan akselerasi dan mobilisasi yang luar biasa.

Namun, perkembangan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan seperti turunnya harga minyak di pasaran internasional, gejolak kurs dan kecenderungan proteksionesme di negara-negara maju telah menjadi faktor penghambat yang cukup serius. Walaupun berat, agaknya kita tidak dapat menunda-nunda lagi. Target tinggal landas dalam Pelita VI tidak bergeser.

Oleh karena itu Prof Sarbini, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia menganggap sangat berat rintangan yang harus dilalui untuk memasuki era tinggal landas nanti. Dari sekian syarat yang diketengahkan untuk bisa lepas landas, syarat klasik: "kerja keras" mendapat penekanan istimewa.

Sarat itu adalah, pertama, diperlukannya pemerintah yang bersih, industri ekspor yang kuat, sehingga dapat menghasilkan devisa mendekati 50 milyar dollar AS per tahun. Industri manufaktur juga harus kuat, agar mampu menampung jumlah tenaga kerja antara 20-25 persen dari seluruh angkatan kerja. Untuk itu industri pedesaan yang merupakan bagian integral dari industri manufaktur harus digalakkan. Selain itu harus ada kesiapan kelembagaan yang mampu menampung dinamika perubahan di bidang sosial, politik dan kebudayaan.

Tanpa mengabaikan konsep takeoff-nya Rostow, Sarbini mengemukakan, beberapa indikator untuk mengukur apakah sebuah masyarakat itu sudah lepas landas atau belum. Pertama, tingkat investasi meningkat 10 persen atau lebih dari pendapatan nasional (GNP). Kedua, laju pertumbuhan suatu atau beberapa cabang industri sektor manufaktur agak tinggi. Ketiga, timbulnya secara cepat kerangka politik, sosial dan institusi yang dapat menampung dan mengembangkan denyut dinamika sektor internasional sebagai akibat dari lepas landas itu sendiri.

Beberapa Sudah

Syarat tinggal landas yang dikemukakan Sarbini memang cukup berat. Namun menurut pengamatan Dr Priyono Tjiptoherianto, dosen pada Fakultas Ekonomi UI yang merangkap staf ahli Menteri Perdagangan ini, dalam beberapa sektor, Indonesia sebenarnya sudah lepas landas. Sedangkan Tony Agus Ardie, Wakil Ketua Kadin, secara gamblang menunjuk bahwa beberapa industri kecil dan menengah kita yang sudah tinggal landas, seperti PT Krakatau Steel, PT PAL di Surabaya dan IPTN di Bandung.

Agaknya Dewi Motik Pramono Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sependapat dengan Tony maupun Tjipto Herianto. "Walaupun secara nasional kita belum memiliki perusahaan-perusahaan yang pantas disebut tinggal landas, namun beberapa perusahaan sebenarnya sudah memenuhi kriteria tinggal landas itu," katanya tanpa merinci. Lebih lanjut Tony menunjuk bahwa umumnya perusahaan yang belum tinggal landas adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bernaung di bawah koperasi. Kenyataan ini mendorong upaya ekstra agar perusahaan yang kebetulan bernaung di bawah koperasi itu bisa lepas landas nanti. "Walaupun dalam rangka mendorong perusahaan kecil lepas landas telah dilakukan kebijaksanaan keterkaitan, namun pro-

Pri yono Tjiptoherianto

Tony Agus Ardie

Digitized by Google

Dewi Motik Pramono

gram ini masih membutuhkan penanganan yang lebih matang dan berkesinambungan.

Di negara-negara yang kini tergolong sebagai kelompok industri baru (Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong) menurut Tony, peranan perbankan sangat penting dalam mendorong mereka lepas landas. "Sayangnya di Indonesia keterlibatan perbankan dalam program keterkaitan belum seperti yang diharapkan," kata Tony. Di Indonesia yang aktif melakukan pembinaan terhadap perusahaan kecil (walaupun belum semua) adalah perusahaan-perusahaan swasta yang besar-besar, termasuk BUMN," ujarnya.

Sedangkan masalah keterkaitan ini di Indonesia sudah dilakukan oleh sebagian kecil perusahaan baik swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT Krakatau Steel misalnya telah mulai membantu mencarikan pasar ekspor emping mlinjo petani di Banten Jawa Barat. Perusahaan minyak PT Indokor Indonesia, ikut membina pengusaha karet dan tambak udang milik rakyat di Banten, Jawa Barat.

Untuk mengembangkan sektor ekonomi lemah ini dunia perbankkan mempunyai peranan penting. Namun, Tony menunjuk peristiwa kredit macet yang sempat menggonjang likuiditas bank belum lama ini, merupakan satu sebab mengapa perbankkan tidak terlalu berani dalam membina usaha kecil dan menengah. Namun, agar bank tidak ragu-ragu memberikan kredit barang kali perlu diubah polanya. Bank tidak perlu langsung memberikan kredit kepada pengusaha lemah, tetapi melalui perusahaan besar dan menengah yang sudah profesional. Perusahaan-perusahaan tersebut itulah yang bertanggung jawab terhadap bank bila terjadi kredit maceta.

"Jadi strategi ini saya kira sudah harus ditempuh oleh pemerintah, dan Kadin dapat diminta melaksanakannya" ujarnya.

Industri kecil perlu mendapat prioritas, karena sektor ini akan sangat membantu terbinanya landasan ekspor nonmigas yang kuat. Bila industri sudah kompetitif di pasar ekspor, maka kerangka tinggal landas kita akan semakin kokoh, kata pengusaha ini.

Sementara itu, Dewi Motik Pramono, melihat perlunya pemerintah memberi rangsangan agar industri kecil bertumbuh sehat dan kuat. Misalnya saja keringanan pajak dan syarat kredit banknya. "Kalau ada rangsangan, perusahaan-perusahaan besar akan bersaing mendapatkan anak angkat karena akan memperoleh fasilitas," kata pengusaha muda ini.

Sedangkan bagi Priyono Tjiptoherianto, tanpa mengabaikan persaratan teknis, sumber daya manusia adalah faktor penunjang utama untuk tinggal landas. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam butir 21 tentang arah dan tujuan pembangunan jangka panjang dan bab 3 butir 1 tentang sumber daya manusia, sebenarnya telah memuat segala persyaratan kualitatif untuk tinggal landas" ujarnya.

J Susanto

Namun untuk mengoperasionalkan GBHN ini, Priyono berpendapat perlunya dibentuk suatu tim yang beranggotakan orang-orang yang mengerti GBHN dengan baik dan punya andil dalam menyusun Repelita. Team ini sekali dalam 2,5 tahun melakukan review, apakah pelaksanaan dari GBHN itu melenceng atau tidak.

Telah banyak syarat teknis kuantitatif yang diyakini orang sebagai prasyarat mujarab untuk tinggal landas. Tapi bagi J Susanto, pengamat masalah pengembangan sumber daya manusia, semua pencapaian kuantitatif itu sulit terlaksana apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia ia anggap sebagai syarat terpokok dalam menjemput era tinggal landas nanti. Bila penduduk suatu bangsa sudah mencapai kualitas yang memadai, maka jumlah (penduduk) tidak lagi menjadi beban, tetapi aset. "Terus terang penduduk Indonesia yang 170 juta dewasa ini masih merupakan beban ketimbang aset," ujar pengamat ini.

Priyono Tjiptoherianto coba menggambarkan kerumitan di bidang tenaga kerja untuk memperkuat keyakinannya bahwa betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia itu. Timpangnya penyediaan lapangan kerja dan jumlah penganggur yang terus membengkak dari tahun ke tahun sebenarnya membersitkan bahwa pencari kerja kita tidak memenuhi syarat baik untuk mengisi pekerjaan yang ada maupun untuk menciptakan pekerjaan sendiri.

Berbicara tentang tinggal landas, orang memang akan tergoda untuk bertanya, "apakah kita mampu tinggal landas pada Pelita VI nanti?". Priyono menjawab bisa "asal ada keterpaduan." Kalau dalam dunia sepak bola dikenal istilah total football dimana 10 pemainnya bisa melakukan penyerangan bersama-sama dan bertahan bersama-sama pula, maka kira-kira begitulah upaya yang harus dilakukan sejak sekarang di berbagai sektor agar kita bisa tinggal landas. □

(BM/LT)

Digitized by Google

Membangun dengan Kerendahan Hati Demi Masa Depan Itu Sendiri

Rostow, si profesor Amerika yang terkenal dengan konsep take off memang merepotkan para perencana pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Menurut profesor yang pernah menjadi konsultan World Bank ini, sebuah masyarakat yang disebut tinggal landas, ditandai oleh beberapa gejala, antara lain tingkat pertumbuhan yang tinggi, laju investasi yang melambung produksi massal produk-produk industri manufaktur dan export oriented.

Bagi negara-negara sedang berkembang, periode take off merupakan tekad yang selalu aktual dalam setiap derap pembangunan. Rostow memang terkadang dikutuk karena syarat tinggal landas yang diyakininya mungkin terlalu berat bagi sejumlah negara berkembang. Padahal kebanyakan negara berkembang telah memobilisir segala daya dan upaya untuk sukses pembangunan.

Tanpa mengurangi syarat-syarat Rostow, Bambang Warih Koesoema, pengamat masalah-masalah sosial ekonomi menunjuk sejumlah kondisi tinggal landas yang justru berada di luar teritorial ekonomi, seperti masalah partisipasi, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin baik rakyat maupun para pemimpinnya. "Untuk bisa tinggal landas diperlukan semangat kepeloporan," ujarnya.

Sebentar lagi pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama akan memasuki tahap akhir (Pelita V). Dalam rangka menciptakan kerangka tinggal landas untuk menyongsong abad baru (abad 21) dimana diharapkan bangsa ini telah tinggal landas, maka diperlukan program-program yang mampu memperhitungkan segala perubahan dan tantangan pembangunan di masa depan.

Untuk itu perlu persiapan mental, tekad dan semangat kepeloporan dalam kurun waktu lima tahun mendatang ini dalam upaya Bangsa Indonesia memasuki Era Pembangunan Jangka Panjang Kedua agar dapat memelihara serta mempertajam cita rasa keadilan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak, memperkuat karsa kita dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila serta berhasil memupuk dan mengembangkan etos ker-

Bambang Warih Kusumah

ja produktif sebagai perwujudan dasar pemikiran tentang karya dan kekaryaan yang memiliki relevansi kreatif pada zaman baru ini.

Kerendahan Hati

Dalam menyongsong era tinggal landas, komitmen politik terhadap Generasi Muda Indonesia yang merupakan bagian terbesar dan tak terpisahkan dengan Masa Depan itu sendiri, perlu diperbarui. Mereka, Generasi Muda Indonesia, adalah ahli waris yang syah masa depan negeri ini, sudah sepatutnya komitment politik tersebut lahir dari proses interaksi positif serta intens dalam suasana silih asah, silih asih dan silih asuh dengan mereka. "Komitment Politik Golongan Karya pada generasi muda Indonesia berintikan kerendahan hati pada masa depan itu sendiri, pada Generasi yang hidup di kemudian hari," ujarnya. Semangat "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tut wuri handayani" adalah sekaligus warisan nilai dan janji Golongan Karya terhadap generasi muda Indonesia.

Banyak hal yang harus diupayakan dalam Pelita V nanti agar kita bisa menciptakan kerangka tinggal landas. Bambang menunjuk beberapa hal penting itu yang antara lain Pola dan struktur dari kerangka landasan Demokrasi Politik berdasarkan Pancasila, berhasil tumbuh makin mantap dan tertata sehingga secara integral dicapai usaha-usaha menciptakan pola maupun struktur bagi kerangka landasan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kemasyarakatan.

Dalam upaya memantapkan pola dan struktur demokrasi Ekonomi itu, perlu dibangun konsensus-konsensus, yang bersifat prinsipal struktural maupun operasional, untuk menata dan mendinamisir Kekuatan-kekuatan Ekonomi Nasional secara fungsional dan saling terkait, menjauhkan struktur yang disfungsional atau merusak, berdasarkan atas pemahaman yang setepat-tepatnya atas amanat pasal 33 UUD 1945, serta didukung oleh kemampuan kreatif mencari dan menciptakan serta memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan positif di dalam tatanan Ekonomi Dunia, sehingga dapat mewujudkan Indonesia jadi suatu negara Industri Baru.

Dalam upaya memberikan landasan yang kuat bagi kerangka landasan Demokrasi Sosial Kemasyarakatan, serta terkait pula dengan usaha mendukung pertumbuhan Demokrasi Politik maupun Demokrasi Ekonomi, maka Pembangunan Hukum di Indonesia menjadi penting. Ketetapan menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan penjabarannya di dalam terwujudnya satu sistim hukum Nasional berdasarkan Pancasila itu. Dengan demikian bidang Hukum bukanlah sekedar suatu bidang sektoral, namun hukum menjadi melekat di dalam berbagai sektor dan bidang pembangunan nasional. Dengan ini maka hukum akan pula merupakan bagian dan realisasi dari kebudayaan nasional.

Sejalan dengan sukses pemantapan kerangka landasan demokrasi sosial kemasyarakatan, pembangunan di bidang ideologi menjadi semakin penting bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara kita. Namun Pembangunan ideologi nasional itu hendaknya terjalin dengan pembangunan kebudayaan, sehingga pembangunan ideologi dilaksanakan atas dasar pendekatan kultural yang kreatif, dinamis, terbuka supaya dengan demikian mampu mengembangkan motivasi,

Digitized by Google

membangun cara berpikir, membuka cakrawala, memperbarui wawas pandang, maupun menghadapi masalah-masalah dan mengajak masyarakat membaca keadaan alam dan zaman yang merupakan kancah perjuangan kebangsaan. Atas dasar ini maka Pembangunan Ideologi itu selalu ditujukan pula kepada usaha menciptakan persatuan dan kesatuan kebangsaan yang segar dan kreatif.

Kemutlakan Relevansi

Kemutlakan relevansi pendidikan di dalam menjawab tantangan di masa depan menjadi semakin penting sebagai wahana pembangunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu sekali diwujudkan pula satu sistim pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Sistim ini harus mengandung di dalamnya relevansi kreatif bagi pembangunan ideologi, politik, ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan maupun pertahanan keamanan. Untuk membangun kualitas sumber daya manusia di dalam konteks pertumbuhan demokrasi, perlu pula dikembangkan sistim yang mendukung diversifikasi secara tertata dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, perkembangan dunia, dinamik masyarakat, di dalam pola wawasan Nusantara serta dengan memperhatikan sifat Bhinneka Tunggal Ika.

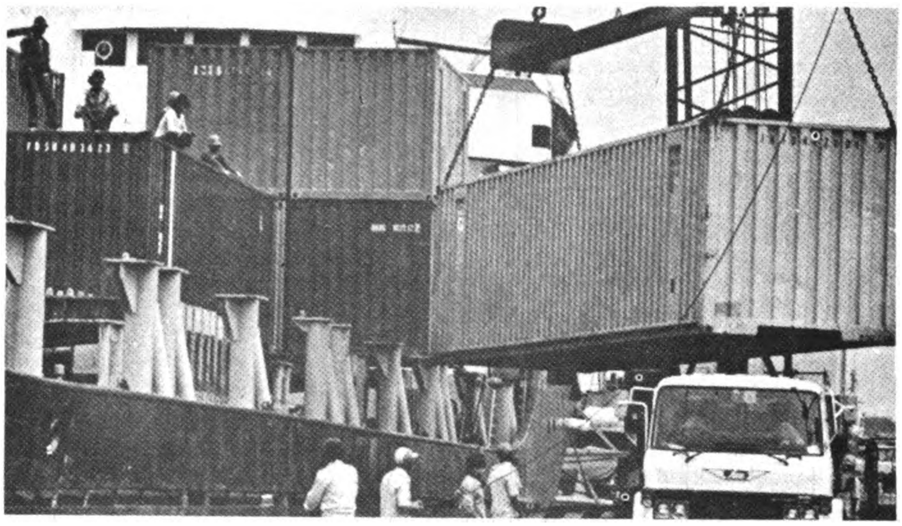

Memantapkan pola dan struktur demokrasi ekonomi

Jajaran pendidikan yang berwawasan kemajuan dan berwawasan kebudayaan perlu dibangun secara mantap sebagai salah satu bagian dari ketahanan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang berwatak, menghayati Pancasila secara kreatif serta dinamis, produktif, efektif serta memiliki semangat kesahajaan. Salah satu jaminan yang dapat menjadi pemacu dari upaya membangun sumber daya manusia sebagai kekuasaan

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

barata indonesia
P.T. (PERSERO)

KANTOR PUSAT : Jl. Ngagel No. 109, Surabaya 60264 Telp. (031) 69075 Tlx. 34321 barata ia Fax. 031.69079
KANTOR PEMASARAN/JAKARTA : Jl. Kapt. P. Tendean No. 12 — 14A, Jakarta 12790 Telp. (021) 7995708 Tlx. 47316 barata ia Fax. 021.7992600

MENGUCAPKAN :

DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV
20 OKTOBER 1988
DAN
SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL
GOLONGAN KARYA KE IV

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

Digitized by Google

demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi kebudayaan yang berdasarkan Pancasila itu adalah dibangkitkan dan dilaksanakan gerakan disiplin nasional.

Pembangunan Nasional di samping tujuan utamanya meraih kesejahteraan dan kemakmuran material bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui usaha pengelolaan serta pemanfaatan sumber alam yang kita miliki baik di darat maupun di udara, yang berupa tanah, air, mineral, flora, fauna termasuk plasma nutfah dan lain-lain, pelaksanaan pembangunan nasional tersebut juga sekaligus menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terutama generasi mendatang. Dengan kesadaran yang berinti pandang "Bahwa Sumber Alam dan Lingkungan hidup yang mensejahterakan kita hari ini sebetulnya merupakan pinjaman yang harus kita kembalikan dalam keadaan utuh dan lebih baik kepada generasi yang akan datang"; Maka seluruh rakyat Indonesia harus mengamati secara cermat dan waspada akan akibat-akibat negatif pelaksanaan pembangunan yang merusak sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta mampu menemukan jalan keluar penyelamatannya.

Berbagai kondisi tersebut, akan menjadi tumpuan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua.

Golkar, katanya, harus mulai melakukan persiapan-persiapan dalam bentuk kaji ulang (introspeksi) terhadap peranan yang telah diperankannya selama pembangunan Nasional 25 tahun pertama.

Suatu usaha memandang ke belakang secara jujur dan terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat akan peranannya selama ini akan membuat Golongan Karya semakin dewasa, arif dan bijaksana, rendah hati terhadap masa depan, serta percaya diri akan dapat memainkan peran yang lebih baik, lebih demokratis, lebih adil, lebih dihargai dan dicintai rakyat dan lebih berprestasi pada Era Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Untuk bisa menyongsong era tinggal landas nanti, Bambang berharap agar Golkar mampu melihat dan memahami kecenderungan di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan dan iptek baik pada tingkat internasional, regional maupun nasional serta mengamati secara seksama kecenderungan dan perkembangan dinamika masyarakat; Tendensi-tendensi tersebut harus bisa disimpulkan sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai arah perkembangan di masa datang serta mengkomunikasikannya secara effektif pada seluruh jajaran organisasi dan Kader-kader Golongan Karya.

Mengidentifikasikan secara cermat tantangan dan krisis yang akan timbul dan dihadapi oleh bangsa ini pada masa Era Pembangunan Jangka Panjang berikutnya, serta menyusun rumusan jawabannya dan mempersiapkan secara komprehensif kader-kadernya agar mampu mengatasi, menjawab serta berhasil keluar dari kesulitan yang menghadang.

Meningkatkan penguasaan Ilmu pengetahuan dan Tehnologi (Iptek) bagi rakyat khususnya kader Pembangunan nasional agar didapatkan peningkatan mutu dan kontribusinya bagi Pembangunan Nasional.

Mempertegas Komitment politiknya dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, serta memelihara semangat kerakyatan dan solidaritas sosial.

Memasyarakatkan Etos kerja produktif sebagai perwujudan dasar pemikiran karya dan kekaryaan pada seluruh rakyat Indonesia khususnya Kader-kader pembangunan Nasional Golongan karya dalam rangka meningkatkan peranan negeri ini di tengah-tengah persaingan bangsa-bangsa di dunia.☐(LT)

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL PENUNJANG PELITA (Y.3P)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MALANGKUÇEÇWARA

d/h STKM / ABM

Status : Disamakan SK. Menteri No. : 0365/0/1986
Jurusan : Manajemen - Program Studi Manajemen Keuangan
Disamakan SK. Menteri No. : 0638/0/1987
Jurusan : Akuntansi

Mengucapkan :

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988

d a n

Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Kereta Api Membangun Citra Pelayanan yang Gesit, Cepat, Tepat, Nyaman dan Andal

Kata-kata yang menghiasi judul di atas, merupakan motto bagi semua perusahaan jasa angkutan, termasuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Agar motto seperti ini terwujud dalam operasi perusahaan, diperlukan antisipasi yang gesit dan cekatan terhadap kecenderungan-kecenderungan minimal untuk masa lima tahun ke depan.

Antisipasi yang gesit menjadi perhatian utama PJKA.

Antisipasi yang gesit dan cekatan ini lah yang menjadi perhatian utama Dirut PJKA, Ir Soeharso, dalam rangka mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Tentu untuk merealisir ini diperlukan alat, yaitu Corporate Plan. Dan menurut Soeharso yang baru 1,5 tahun menjadi orang nomor 1 di PJKA, Corporate Plan PJKA untuk jangka 5 tahun mendatang, telah rampung pada awal tahun ini. Sebuah Corporate Plan menurutnya, selain berisi antisipasi kebutuhan masyarakat konsumen di masa mendatang, juga memuat langkah dan strategi yang menjamin kelangsungan perusahaan (PJKA) itu sendiri.

PJKA menempuh beberapa strategi pokok.

Dalam Corporate Plan yang belum lama rampung itu, setelah diadakan analisis yang cermat tentang kesempatan dan hambatan, maka ditetapkan beberapa sasaran pokok. Sedangkan untuk mencapai sasaran maka menurut Soeharso, PJKA menempuh beberapa strategi pokok, yaitu konsolidasi, modernisasi serta mekanisasi peralatan dan alat kerja serta pengembangan usaha.

Lewat konsolidasi, PJKA bermaksud dapat membenahi dan memperkuat diri dengan menghilangkan atau paling sedikit mengurangi inefisiensi di segala bidang, baik pemasaran, operasi, organisasi maupun sumber daya manusia serta keuangan. Sedangkan lewat strategi modernisasi dan mekanisasi peralatan kerja, PJKA bermaksud meningkatkan kualitas produk jasa angkutan kereta api sehingga cepat, tepat, nyaman dan andal. Dengan langkah ini, Soeharso berharap produk jasa kereta api akan semakin kompetitif. Dan lewat strategi pengembangan usaha, PJKA bermaksud untuk menekuni segmen pelayanan yang menguntungkan karena PJKA kuat di segmen itu.

Organisasi Dinamis

Untuk menunjang sasaran-sasaran Corporate Plan, maka menurut Soeharso, PJKA telah melaksanakan program-program kerja di beberapa bidang. Di bidang organisasi Soeharso menginginkan agar PJKA berkembang menjadi organisasi yang dinamis. Untuk itu diadakan analisis jabatan, yang katanya, ''ada ribuan jenis jabatan di PJKA sekarang.'' Kalau analisis jabatan ini dapat dituntaskan, maka PJKA

Digitized by Google

Meningkatkan ketrampilan lewat pengendalian terpadu dan gugus kendali mutu.

sebagai organisasi yang dinamis dapat tercapai.

Dia juga menghendaki agar struktur organisasi PJKA lebih responsif terhadap lingkungannya. Dengan demikian struktur organisasi wilayah PJKA tidak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan lingkungan wilayah masing-masing. Sebagai contoh, untuk PJKA wilayah Sumatera Barat yang hanya melayani angkutan batubara dan semen, maka organisasinya harus diarahkan untuk menghadapi itu.

Dalam melaksanakan program di bidang sumber daya manusia, satu kelemahan yang cukup mencolok di lingkungan PJKA ialah adanya komposisi personil yang 81 persen berpendidikan SLTP ke bawah. Komposisi seperti ini menurut Soeharso, menyebabkan PJKA sulit menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Selain itu kesejahteraan yang rendah mempengaruhi motivasi kerja orang-orang PJKA.

Untuk mengatasi ini, menurutnya, akan dibenahi sistim penerimaan pegawai baru PJKA dengan memprioritaskan calon yang berpendidikan SLTA ke atas. Dengan menempuh program mekanisasi dan modernisasi maka jumlah personil mau tidak mau akan susut. Dengan demikian secara bertahap tingkat kesejahteraan pegawai bisa diperbaiki.

Sampai sekarang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai PJKA, langkah yang telah ditempuh adalah antara lain memperbaiki emolumen-emolumen yang dikaitkan dengan prestasi kerja, seperti premi kilometer bagi awak kereta api. Juga sedang diupayakan asuransi kecelakaan, perbaikan tempat menginap dan sebagainya.

Dalam rangka mengatasi kelemahan di bidang sumber daya manusia, maka program yang ditempuh adalah meningkatkan ketrampilan lewat Pengendalian Mutu Terpadu dan Gugus Kendali Mutu yang mulai dilaksanakan sejak 1987. "Cara ini ternyata tidak saja mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, tetapi secara tidak langsung memacu motivasi kerja," katanya.

Di bidang operasi, Soeharso mengakui beberapa kelemahan seperti sarana yang umumnya sudah tua; kekurangan sarana khususnya kereta penumpang; prasarana yang usang dan teknologi rendan serta adanya operasi KA yang

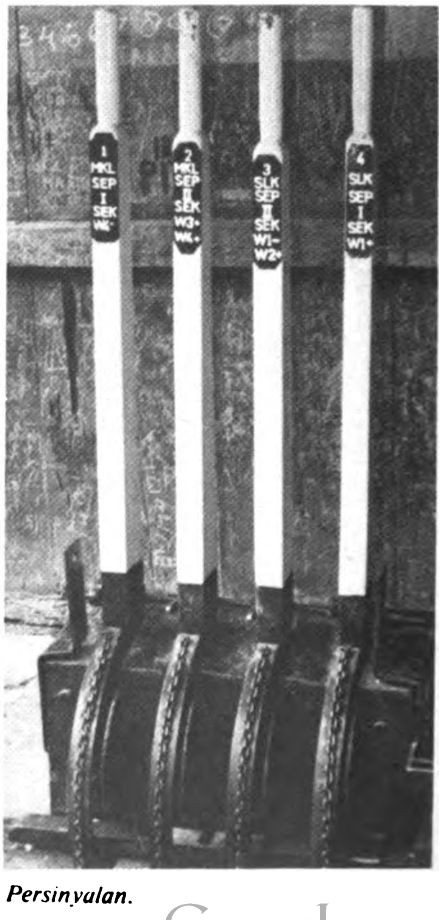

Persinyalan.

Digitized by Google

Kualitas manusia menentukan suatu keberhasilan atau tidak.

tidak menutup biaya bahkan tidak bisa menutup ongkos bahan bakar sekalipun. Hal-hal seperti ini menyebabkan kualitas dan kuantitas produk PJKA banyak yang tidak sesuai lagi dengan selera konsumen, karena kecepatan KA menjadi rendah, keandalan kurang dan kenyamanan terusik.

Untuk itu menurut Soeharso, program kerja PJKA di bidang yang satu ini ialah mengurangi operasi KA yang merugi. Untuk mengurangi kelambatan diadakan penambahan stasiun (posblok) baru di tempat-tempat dimana kapasitas petak jalan sudah dilampaui. Hal ini berkaitan dengan upaya penambahan frekuensi KA sesuai dengan strategi pengembangan usaha. Selain itu juga diadakan mekanisasi dan standardisasi alat dan peralatan kerja setiap kali ada kesempatan. "Hanya karena upaya ini memerlukan biaya yang besar, maka pelaksanaannya biasanya terkait dengan bantuan luar negeri," ujar Soeharso.

Di bidang pemasaran, kelemahan yang diakui oleh Soeharso adalah kurangnya agresivitas PJKA memasarkan diri. Salah satu sebab adalah kurang mantapnya organisasi. Untuk itu dalam struktur organisasi PJKA yang baru, dibentuk Direktur Pemasaran. Sementara itu pembentukan struktur organisasi wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kharakter lingkungan, pun sedang berjalan. Untuk menarik minat penumpang, maka sasaran perbaikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan, karena menambah jumlah sarana masih memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Sedangkan di bidang angkutan barang, PJKA selain memperbaik kualitas pelayanan juga meningkatkan kuantitas yang lebih beragam, seperti pelayanan kereta api blok. PJKA juga tengah berupaya mengasuransikan barang angkutan kereta api dengan pihak perusahaan asuransi. Selama ini hanya angkutan peti kemas saja yang sudah diasuransi. Dan masih dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan terhadap angkutan barang, PJKA memberi kesempatan kepada swasta untuk memiliki sarananya sendiri.

Di bidang keuangan, PJKA mengasuransikan aset-asetnya untuk menangkal kecelakaan baik yang disebabkan oleh kecelakaan maupun bencana alam. Juga diupayakan agar sistim perbankan menjangkau sampai stasiun-stasiun kereta api yang letaknya terpencil sekalipun. Pinjaman bank untuk keperluan investasi juga ditingkatkan.

People Oriented

Soeharso yang dilantik menjadi Dirut PJKA 19 Desember 1987 itu mengatakan bahwa kesulitan yang dialami PJKA bukan saja ada tetapi banyak. Kesulitan terpokok menurutnya, ialah PJKA sebagai produsen jasa angkutan belum optimal memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang cepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Sementara itu gambaran di masa dekat ini mengisyaratkan bahwa peningkatan produk jasa kereta api masih tetap lamban.

Namun gambaran kesulitan ini tidak perlu mengurangi semangat kerja PJKA untuk terus memperbaiki diri dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan. Corporate Plan PJKA yang rampung di awal tahun ini merupakan cermin dari tekad PJKA sekarang untuk membangun organisasi yang dinamis dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen. Motto PJKA yang gesit, cepat, tepat, nyaman dan andal tetap menjadi motivator.

Untuk merealisir citra pelayanan seperti ini, Soeharso mengatakan dia menganut kepemimpinan yang bukan hanya *job oriented* tetapi juga *people oriented.* Kualitas manusia memang akhirnya yang paling menentukan sebuah sistim akan berhasil atau tidak. "Saya yakin *man behind the gun* lebih menentukan. Buktinya pengendalian Mutu Terpadu yang lebih berorientasi ke *people,* ternyata berhasil," kata Soeharso. Selain itu seorang pemimpin tidak perlu keras, tetapi tegas. "Asas kepemimpinan seperti ini pasti diperoleh mereka yang pernah mengikuti penataran P4," katanya lagi.

Dengan menganut pola kepemimpinan seperti ini, Soeharso berharap bisa membawa PJKA memenuhi tuntutan konsumen yang banyak dan terus berubah, termasuk menegakkan disiplin di kalangan PJKA sendiri. Kasus-kasus kecelakaan kereta api dalam banyak hal disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Manusia yang lalai tentu tidak memiliki disiplin yang tegar.

Sedangkan untuk menegakkan disiplin, faktor yang terpenting adalah keteladanan, terutama dari pihak atasan itu sendiri. Dengan menganut kepemimpinan yang bukan hanya berorientasi kepada *job* tetapi juga kepada *people,* mudah-mudahan bisa menjawab kerumitan-kerumitan yang ada di lingkungan PJKA dalam rangka membawa perusahaan ini sesuai dengan tekad membangun citra pelayanan yang gesit, nyaman, cepat, tepat dan andal. □

Digitized by Google

Departemen Penbitmassmed

Keberadaan Media Organisasi, Penting

Tanpa terasa masa bhakti DPP Golkar periode 1983-1988 berakhir sudah. Kurun waktu lima tahun yang penuh kegairahan berorganisasi, rasanya perlu dipertahankan untuk masa waktu lima tahun berikutnya. Suasana keakraban penuh disiplin, rasa tanggungjawab serta keterlibatan aktif anggota pengurus dari tingkat pusat sampai daerah-daerah yang dibangun dalam periode kepengurusan DPP Golkar 1983-1988 telah mengantar Golongan Karya pada suatu tingkat tertentu dalam perjalanan sejarah organisasi sosial politik terbesar ini.

Dalam kurun kepengurusan periode 1983-1988 yang dikenal dengan program *Tri Sukses* (pertama)nya itu, membuka lembaran baru sejarah Golongan Karya sebagai organisasi sosial politik semasa Orde Baru yang menerapkan sistim stelsel aktif. Ini merupakan langkah lanjut di dalam upaya menjadikan Golkar mandiri tidak hanya secara administratif tetapi secara utuh; baik administratif maupun secara phisik. Sehingga keraguan tentang kemandirian Golkar mulai sirna ketika melihat hasil yang dicapai dalam pemilihan umum 1987 lalu.

Sukses konsolidasi organisasi, sukses Pelita IV dan sukses pemilu 1987 ebagai *Tri Sukses I* telah berhasil dengan cukup memuaskan. Tidak hanya bagi Golongan Karya tetapi juga bagi kepentingan nasional bangsa, jika Tri Sukses itu dilihat dalam kepentingan nasional bangsa. Dengan begitu, sukses konsolidasi tidak semata-mata untuk kepentingan organisasi Golongan Karya tetapi diabdikan bagi kepentingan nasional bangsa.

Sukses Pelita IV sangat penting bagi kesinambungan pembangunan nasional. Sedangkan sukses Pemilu 1987 bukan hanya karena Golkar menang tetapi kemenangan Orde Baru, kemenangan Pancasila dalam mengatur lalu lintas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah arti penting Tri Sukses I secara nasional.

Peranan Komunikasi dan Informasi

Dalam kehidupan moderen, komunikasi dan informasi memegang peranan sangat penting bagi manusia. Melalui komunikasi lahir interaksi sosial, yang kemudian menghasilkan informasi tentang kehidupan dan keseharian hidup.

Anang Adenansi

Dalam organisasi, Departemen Penerangan lah yang berfungsi sebagai komunikator dan informator. Departemen Penerangan merupakan elemen penting dalam organisasi, karena melalui departemen ini lah program dan doktrin organisasi dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi. Departemen ini pula yang menyampaikan informasi tentang pelbagai kegiatan organisasi agar diketahui oleh tidak hanya anggota tetapi terutama para kader organisasi.

Pemahaman tentang unsur-unsur penting dalam organisasi akan mengantar kita untuk melihat apa saja yang telah dilakukan Departemen Penerangan, Penerbitan dan Mass Media DPP Golkar masa bhakti 1983-1988. Tanpa pemahaman itu, akan sulit untuk melihat secara khusus peranan Departemen Penerangan, Penerbitan dan Mass Media selama masa bhakti 1983-1988 ini.

Kegiatan Penbitmassmed

Selama masa bhakti 1983-1988, Departemen Penerangan, Penerbitan dan Mass Media (Penbitmassmed) telah melakukan berbagai kegiatan baik yang berkala maupun yang bersifat tetap. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Rapat Kerja Nasional antara Departemen Penbitmassmed dengan seluruh jajaran Biro Penbitmassmed Tingkat I pada bulan Agustus 1984.

Pada bulan Desember 1986 telah dibentuk Satgas Massmed sebagai upaya membina hubungan dan kerjasama dengan pers nasional dalam rangka pembinaan kader fungsional yang bertujuan memasyarakatkan program

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting

Digitized by Google

dan doktrin Golongan Karya melalui Mass Media (cetak maupun elektronika).

Sementara itu, sejak tanggal 11 Maret 1984 Departemen Penbitmassmed telah menerbitkan sebuah majalah bulanan yang diberi nama: **Media Karya** dan pada bulan Januari 1985 menyusul diterbitkannya Surat Kabar Kader **Tri Sukses**. Dua media resmi ini, telah menempatkan diri sebagai alat komunikasi DPP Golkar dengan para kadernya di segala tingkatan.

Media Karya, adalah majalah yang memuat konsep-konsep serta pikiran para intelektual dan cendekiawan Golongan Karya tentang masalah-masalah nasional bangsa terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan nasional di segala bidang. Majalah ini tidak hanya diterima sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para kader Golongan Karya tetapi telah menjadi referensi (untuk masalah-masalah tertentu) bagi para intelektual terutama yang bergerak di bidang akademis maupun para praktisi yang berada dalam masyarakat.

Kendati belum dapat disejajarkan dengan majalah-majalah lainnya yang telah ada jauh sebelum Media Karya lahir, tetapi satu hal yang patut diakui adalah Media Karya telah turut diperhitungkan sebagai salah satu majalah umum yang punya bobot. Karenanya Departemen Penbitmassmed selalu berupaya meningkatkan mutu majalah kader ini lebih baik lagi daripada sekarang.

Sementara, Surat Khabar Kader Tri Sukses sejak terbit, memang ditujukan bagi peningkatan pengetahuan para kader yang ada di seluruh pedesaan tanah air.

Tri Sukses merupakan media komunikasi langsung antara DPP Golkar dengan para kader yang tersebar di seluruh pedesaan di pelosok tanah air, sebaiknya juga sebagai media komunikasi antar para kader itu sendiri.

Dengan uraian di atas, nampak jelas betapa pentingnya kedua media komunikasi yang diterbitkan oleh Departemen Penbitmassmed DPP Golkar periode 1983-1988 ini. Oleh karena itu, jika hendak meningkatkan arus informasi dan komunikasi antara pusat dengan para kader yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka kedua media ini harus terus terbit, siapa pun pengurus DPP Golkar nantinya.

Untuk masa mendatang, peranan Departemen Penbitmassmed harus lebih ditingkatkan lagi melalui suatu pemberian otonomi yang lebih luas dalam menangani masalah-masalah penerangan dan penerbitan serta mass media. Selama periode lalu, Departemen ini lebih banyak melaksanakan fungsi penerangan serta pembinaan mass media. Fungsi penerbitan, tidak terlalu nampak karena masalah ini ditangani oleh berbagai bidang.

Karenanya untuk lima tahun mendatang, hendaknya Departemen ini diberi otoritas yang besar sesuai dengan namanya sebagai penyampai informasi, komunikator (melalui penerbitan-penerbitan khusus organisasi) serta sebagai pembina kader fungsional di bidang media massa.

Dengan begitu maka peranan dan fungsi Departemen ini tidak hanya sekedar sebagai pelaksana teknis tetapi juga memiliki otoritas untuk turut merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerangan, penerbitan dan mass media.

Inilah hal yang perlu dipikirkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi tugas Departemen Penerangan, Penerbitan dan Mass Media DPP Gokar di masa mendatang. Tidak hanya periode 1988-1993 tetapi untuk seterusnya.□

DEWAN PIMPINAN PUSAT
MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH
المجلس الأعلى للدعوة الاسلامية الاندونيسية
Mengucapkan :
"Selamat Hari Ulang Tahun Ke XXIV Golongan Karya"
dan
"Semoga Sukses Dalam Musyawarah Nasional Ke IV"

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Senantiasa Menyertai Perjuangan Golkar Dalam Mencapai Cita-cita untuk mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan

Digitized by Google

Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Kartu Anggota Belum Mampu Mengejar Jumlah Pendaftar

Sebagai salah satu perangkat dari DPP Golkar, Departemen Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) selama lima tahun ini telah banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah pengembangan organisasi.

Dari tugas yang diprogramkan, departemen ini lebih menitik beratkan pada masalah-masalah konsolidasi, khususnya konsolidasi kaderisasi, kelembagaan dan konsolidasi keanggotaan.

Seperti dikatakan Yacob Tobing, Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, dalam menjalankan tugas seperti yang diamanatkan dalam Munas Golkar 1983, telah dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Terutama dalam hal materi dan waktunya.

Secara pribadi Yacob merasa bangga, melihat departemennya yang cukup sibuk dengan aneka kegiatan yang sangat bermanfaat bagi organisasi (Golkar) dan dapat menempatkan Departemen OKK ini cukup sentral dalam 5 tahun ini.

Menurut Yacob, apa yang dikerjakan Departemen OKK ini adalah semata-mata untuk membangun organisasi Golkar. Dan meletakkan dasar-dasar rekrutmen politik dan karier politik yang terukur. Menyinggung tentang kegiatan karakterdes, raker dan lainnya menurut Yacob, setidak-tidaknya apa yang dinamakan lingkungan politik Golkar itu sudah semakin diketahui, siapa kader, siapa yang memang berprestasi, siapa yang benar-benar potensial tanpa pretensi. Inilah suatu ukuran dalam penampilan, atau usaha untuk menampilkan seseorang. Dan dapat dikatakan itulah usaha Departemen OKK dalam membantu pimpinan di dalam rekrutmen kader.

Meskipun telah banyak hasil yang sudah dicapai dari Departemen OKK ini, namun Yacob menilai pekerjaan ini masih merupakan titik awal yang belum selesai. Misalnya, sekarang ini jumlah anggota Golkar sudah mencapai 32 juta orang. Sedangkan yang sudah mempunyai Kartu Anggota Golkar (KAG) sebanyak 26 juta orang.

Jacob Tobing

"Persoalan kita adalah bukan mereka yang mempunyai KAG. Tetapi kartu anggota Golkar yang dicetak itu masih belum dapat mengejar jumlah orang yang mendaftar," ujar Yacob.

Dari segi politik, jumlah anggota 32 juta orang itu, merangkul berbagai aspirasi yang hidup, dinamis dan menyegarkan kehidupan politik kita sendiri. Yacob mengharapkan kedatangan mereka di Golkar itu dapat bermanfaat bagi Golkar. Dan yang lebih umum, kata Yacob, kehadiran mereka di Golkar itu diharapkan dapat ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belum Selesai

Demikian juga dengan jumlah kader yang 8 juta dan satu juta diantaranya adalah kader fungsional itu, dinilai Yacob merupakan yang paling besar di dunia dan mengesankan. Namun masih ada yang perlu untuk dikerjakan. Misalnya, kader-kader yang ditata itu masih di tingkat bawah, sedangkan di tingkat yang lebih tinggi masih belum. Kemudian hubungan antara kader serta mekanisme yang lainnya masih belum sempurna.

Kemudian dari segi kualitas, mereka itu masih minim. Paling tidak jaringan dari organisasi itu sudah menyentuh pada mereka (kader) dan dasar-dasar tentang kehidupan sudah ada pada mereka. Kalaupun mereka dalam pendidikan yang selama tiga hari itu lupa, paling tidak mereka itu sudah ada dalam jaringan organisasi yang mampu memberikan suntikan berupa informasi dan yang lain sebagainya.

Selain itu, mereka itu setidak-tidaknya mampu memberikan umpan balik bagi organisasi. Dan persoalan sekarang ini adalah bagaimana kita menggerakkan, tidak hanya menyuluh. Dan setidaknya pula hal ini merupakan upaya untuk menggerakkan kehidupan politik kita sehari-hari. "Ini pun belum selesai," ujar Yacob.

Kemudian untuk ke depan, kita harus dapat meneruskan misalnya tentang konsolidasi organisasi, dan ideologi. Dalam rangka konsolidasi yang demikian, struktur itu harus diwujudkan dengan langkah-langkah dan pembenahan lebih lanjut dari masalah kaderisasi, rekrutmen dan keorganisasian. "Jadi harus kongkrit dalam mengisi kaderisasi, tidak hanya berupa konsep-konsep," ujarnya.

Selama lima tahun ini Departemen OKK, selain mencatat sejumlah sukses, juga menghadapi sejumlah kendala, baik fisik maupun nonfisik. Kendala fisik, menyangkut luasnya wilayah Indonesia, dan kendala nonfisik adalah yang menyangkut dana.

Namun demikian kaderisasi adalah program besar yang tidak dapat dilakukan dan didekati dengan cara konvensional saja, tetapi juga dengan cara kejuangan. Mencari uang ini adalah tugas bersama. Yang kita perlukan adalah kesadaran, karena masalah ini merupakan kepentingan bersama tidak hanya untuk Golkar saja.

Misalnya saja tentang kaderisasi. Masalah ini tidak saja penting bagi hubungannya dengan negara, tapi juga berguna bagi diri sendiri. Dan dalam aspek kejuangan ini untuk menghadapi masalah finansial ini, tidak dapat disamakan dengan program-program fisik pembangunan.

Kemudian masalah keterbatasan tenaga-tenaga pelaksana juga merupakan kendala tersendiri. Oleh karena itu masalah pendaftaran keanggotaan dan kaderisasi, tidak hanya dapat diatasi dengan cara formal. Tapi perlu kejuangan dan gotong royong. □ **(BM)**

Digitized by Google

Berkat HONDA Panen melimpah

Pompa Air serbaguna HONDA paling disukai karena telah teruji ketangguhannya, disamping sparepart - nya terjamin.
Daya hisap lebih kuat, pemakaian bahan bakar irit, berkat penerapan teknologi maju HONDA.
Sangat cocok untuk meningkatkan produktivitas disektor pertanian, perikanan dan sebagainya.

Pompa Air Honda yang dapat menggunakan **bahan bakar minyak tanah** memudahkan pengoperasian di daerah-daerah terpencil.

Pilihlah yang sesuai, kapasitas 3,5 PK yaitu type WB 20 & WBK 20, maupun 5 PK yaitu type WB 30 & WBK 30.

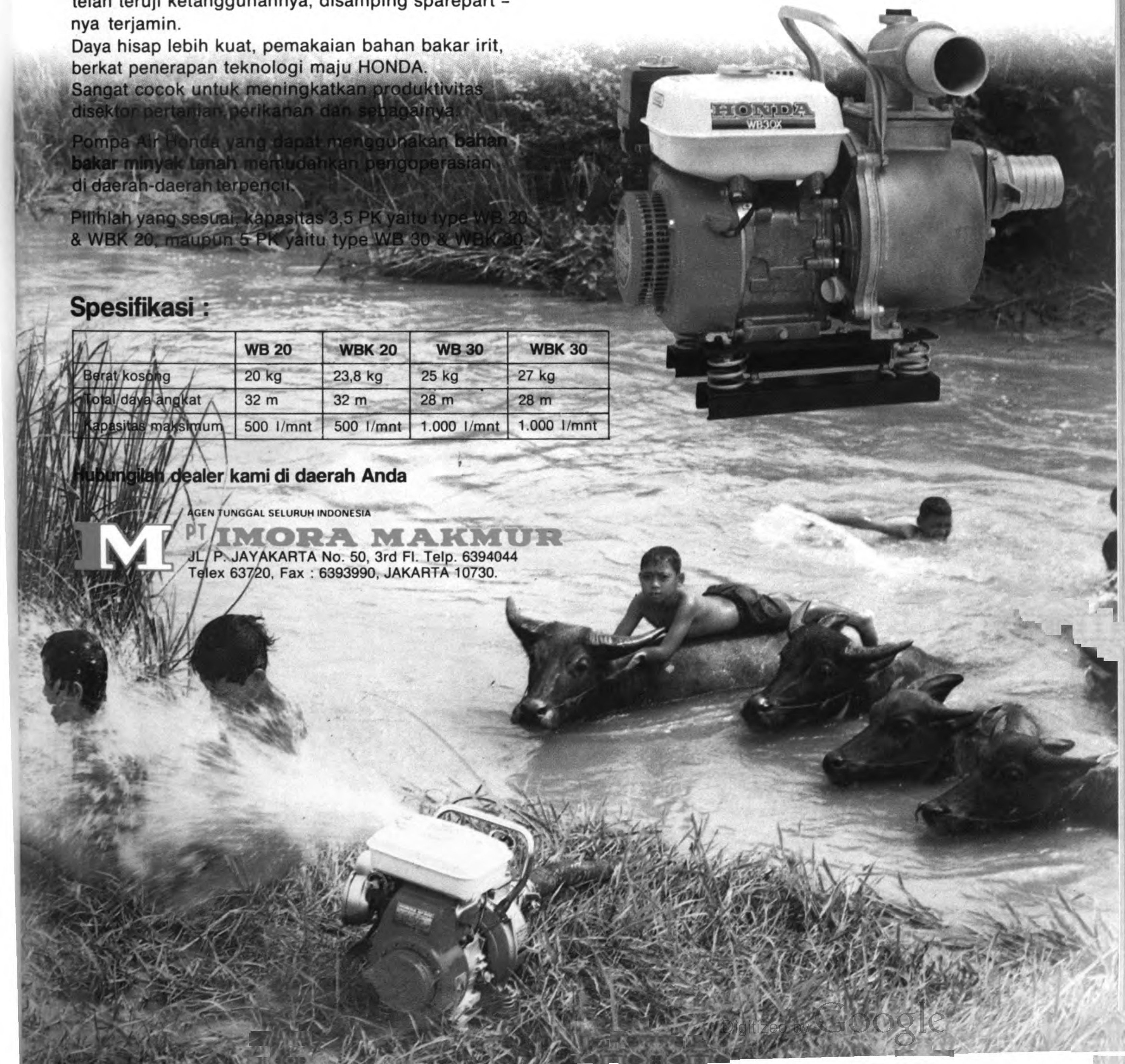

Spesifikasi :

	WB 20	WBK 20	WB 30	WBK 30
Berat kosong	20 kg	23,8 kg	25 kg	27 kg
Total daya angkat	32 m	32 m	28 m	28 m
Kapasitas maksimum	500 l/mnt	500 l/mnt	1.000 l/mnt	1.000 l/mnt

Hubungilah dealer kami di daerah Anda

AGEN TUNGGAL SELURUH INDONESIA
M PT. IMORA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA No. 50, 3rd Fl. Telp. 6394044
Telex 63720, Fax : 6393990, JAKARTA 10730.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Dirgahayu Golongan Karya ke XXIV
20 Oktober 1988
dan
Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya ke-IV

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk Mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

A.N. P.T. INDOKOR INDONESIA

TONY AGUS ARDIE

FIVE PILLARS OFFICE PARK
Jl. Letjen. M.T. Haryono 58, Jakarta, Indonesia
P.O. Box : 2083 Jkt. 10001
Telex : 47153 Barindo IA, Phone : 791108.

Digitized by Google

Departemen Wanita

Sudah Banyak Yang Dilakukan Walau Belum Maksimal

Enny Busyiri

Sri Rejeki

Departemen Wanita sebagai salah satu perangkat organisasi (DPP Golkar) yang ditugaskan untuk menangani peningkatan peranan wanita mencakupi tugas dan kegiatan yang cukup luas. Departemen ini dalam menunjang program kegiatan Golkar telah banyak yang sudah dilakukan. Dan dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya, Departemen Wanita tetap berpegang kepada tiga hal, yaitu hasil Munas Golkar ke-III tahun 1983, Surat Keputusan Golkar No 003/DPP/Golkar/II/1983 tentang tata kerja DPP Golkar dan hasil-hasil Rakernas Departemen Wanita Golongan Karya ke-I tahun 1985.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional di lapangan, Departemen Wanita memanfaatkan dan mendayagunakan kader-kader wanita Golkar yang berada di orsosmasinal, orsinalmas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama baik yang duduk di lembaga pemerintahan (Eksekutip, Legislatip dan Yudikatip).

Mengenai program kerja yang disusun, Departemen Wanita tetap berpedoman kepada tiga hal tersebut khususnya Munas III Golkar tahun 1983 yang menghasilkan "Tri Sukses Golkar yaitu Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita IV dan Sukses Pemilu 1987". Enny Busyiri dan Sri Sejeki yang memimpin departemen ini mengakui belum semua tugas dan programnya rampung. Namun, pekerjaan yang dihasilkan dalam kepengurusan dari Departemen Wanita ini juga cukup banyak.

Misalnya saja, dalam ikut menyukseskan Pelita IV, Departemen Wanita menyertakan kader-kadernya dalam pendidikan dan latihan tentang teknik bercocok tanam, memberi bekal berupa pengetahuan tentang tanaman produktif yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian DKI Jakarta.

Mengadakan kunjungan ke daerah-daerah pedesaan guna memberi motivasi kepada para petani dan keluarganya. Maksudnya, guna memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan petani, wanita khususnya agar dapat memperoleh pendapatan yang memadai dan mandiri. Dan selama tiga tahun ini telah terbentuk sekitar 5.000 kelompok tani wanita yang tersebar di seluruh tanah air.

Mengikutsertakan beberapa sarjana pertanian wanita dalam beberapa proyek Departemen Pertanian. Misalnya mengadakan penelitian untuk peningkatan integrasi peranan wanita di sektor perkebunan, perikanan, kehutanan dan tanaman pangan. Kemudian juga bersama dengan orsinalmas memberikan bantuan modal guna untuk dapat meningkatkan ketrampilan teknis mutu dan disain produksi dan sekaligus mengusahakan pemasarannya melalui badan usaha yang dikelola oleh kaum wanita.

Mengadakan konsultasi dengan pejabat Departemen Perdagangan dan Koperasi dalam rangka memperjuangkan kemudahan-kemudahan bagi golongan ekonomi lemah. Selain itu juga Departemen Wanita melaksanakan program yang menyentuh bidang kepariwisataan. Sebab, kata Enny Busyiri, bidang ini mempunyai prospek yang bagus dalam meningkatkan ekspor nonmigas.

Kemudian di bidang Sukses Pemilu 1987, Departemen Wanita selama dua tahun mengadakan inventarisasi kondisi kepengurusan dan keanggotaan wanita Golkar yang berada langsung dalam jajaran organisasi (biro dan bagian wanita) baik yang berada di orsosmasinal, orsinalmas, wiraswasta dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Sedangkan kegiatan lain dalam ikut menyukseskan program Golkar, khususnya menyangkut sukses di bidang Pemilu, Departemen Wanita juga dalam setiap kesempatan mengadakan pendekatan dan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dari pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu juga memperjuangkan terpilihnya kader-kader Golkar untuk menjadi unsur penentu kebijaksanaan pada orsinalmas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewarnai aspirasi program Golkar pada organisasi yang bersangkutan. Juga berupaya agar sebanyak mungkin kader wanita Golkar dan tokoh-tokoh pendukung untuk masuk dalam daftar calon anggota DPR dan DPRD, sekaligus menjadi juru kampanye.

Berkesinambungan

Kemudian, Departemen Wanita dalam menarik simpati massa lebih menitikberatkan pada Himpunan Wanita Karya (HWK) untuk dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, dalam melaksanakan proyek/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak melalui program PKK (Pendi-

Digitized by Google

Agar meneruskan program kepengurusan sebelumnya

dikan Kesejahteraan Keluarga), maupun program-program internasional.

Sedangkan untuk ikut berperan dalam menyukseskan Sukses Konsolidasi, langkah pertama yang dilakukan oleh Departemen Wanita adalah menjabarkan dan menyebarluaskan hasil-hasil Munas Ke-III kepada seluruh komponen organisasi wanita. Secara horisontal, yaitu melalui kader-kader Golkar di orsosmasinal dan orsinalmas baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sedangkan secara vertikal, Departemen Wanita melakukan tugas dengan memberi petunjuk pelaksanaan kepada seluruh biro wanita baik di DPD Tingkat I maupun di DPD Tingkat II seluruh Indonesia.

Langkah berikutnya adalah memberikan materi penataran karakterdes dan karsinal baik yang bersifat nasional maupun regional di beberapa daerah tingkat II dan bahkan wilayah kota. Kemudian juga mengadakan inventarisasi, membina dan mendayagunakan kader-kader wanita Golkar yang ada di semua kepengurusan organisasi kemasyarakatan maupun di lembaga pemerintahan.

Kegiatan-kegiatan Departemen Wanita Periode 1983-1988 dalam ikut menyukseskan program Golkar, khususnya Tri Sukses Golkar, selain yang tercatat di atas masih banyak lagi yang lainnya. Diakui oleh Enny Busyiri dan Sri Rejeki, Ketua Departemen Wanita ini, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan departemennya masih membentur sejumlah hambatan. Namun, katanya, hambatan tersebut justru memacu semangat untuk terus maju.

Diakui pula bahwa pencapaian departemen ini selama masa bhakti 1983-1988 masih bersifat kuantitatif. ''Jadi kualitas yang kita inginkan masih belum seperti yang kita harapkan,'' ujar keduanya.

Meskipun demikian, kedua ketua Departemen Wanita ini mengharapkan kepada siapa saja yang nantinya duduk dalam kepengurusan di Departemen Wanita DPP Golkar untuk periode mendatang agar meneruskan program-program kepengurusan sebelumnya. Sebab, kalau memulai dengan program-program baru, selain memakan waktu, hasil yang dicapai belum tentu maksimal. Maksudnya, agar program-program yang disusun oleh kepengurusan 1983-1988 dapat berkesinambungan dan semakin mewujudkan hasil konkrit. □ **(BM)**

Direksi beserta seluruh staff

PT HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL

WISATA INTERNATIONAL BUILDING JALAN M H THAMRIN, JAKARTA 10230
KOTAK POS 3409 JKT. □ TELPON 320107 □ ALAMAT KAWAT PTHIICOR JAKARTA
NOMOR TELEX 61274 HQHII-IA □ FAX (62) (021) 326175

Mengucapkan

"Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988"

d a n

"Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Departemen Tani dan Nelayan

Program Yang Menyentuh Pedesaan

Departemen Tani dan Nelayan, salah satu perangkat yang ada di DPP Golkar, dalam program kerjanya lebih menitik beratkan kepada kader-kader Golkar yang ada di pedesaan, yang jauh dari keramaian kota.

Untuk menggarap kader-kader tersebut, Departemen Tani dan Nelayan menggunakan berbagai cara. Laporan ini memang tidak menurunkan seluruh kegiatan yang pernah dilakukan, tapi hanya beberapa saja dari sekian banyak prakarsa yang telah diambil selama 5 tahun terakhir.

Departemen ini dalam menggarap para tani dan nelayan menempuh cara-cara yang cukup praktis. Misalnya saja, menggunakan media yang sudah ada dan diterbitkan oleh DPP Golkar. *Media Karya* dan *Tri Sukses*. Dalam media ini, Departemen Tani dan Nelayan menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan para tani dan nelayan, seperti cara beternak bekicot, bagaimana membudidayakan ikan dan yang lainnya.

Selain itu departemen ini juga melakukan simulasi tentang problem-problem pertanian. Pada masa prakampanye, melalui kunjungan Ketua Umum maupun kunjungan para fungsionaris yang resmi atau tidak resmi, kepada para petani diberi bantuan berupa buku tentang pertanian, bantuan pupuk, bibit dan yang lainnya.

Sedangkan di tingkat pusat, dilakukan sarasehan tingkat nasional, yang berkaitan dengan masalah tani dan nelayan. Misalnya saja sarasehan tentang peternakan dilakukan di Bogor, tentang tani dan nelayan di Jepara, Muara Angke, Gresik dan beberapa tempat lainnya.

Ir Tati Sumiarno, Ketua Departemen Tani dan Nelayan mengatakan, program kerja yang dilakukan dari departemen ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor nonmigas yang sekaligus meningkatkan taraf hidup para tani dan nelayan itu sendiri.

Peran Karakterdes

Tema-tema pembangunan yang menjadi program pokok departemen ini selama prakampanye pemilu 1987 telah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Kesadaran dan teknik bertani di kalangan petani dan nelayan

Tati Sumiarno

secara perlahan-lahan membaik. Namun menurut Tati, buah yang paling nikmat dari upaya departemen ini ialah dicantumkannya kata peternak dalam GBHN 1988.

Walaupun demikian, ketua departemen ini masih risau melihat kualitas kehidupan para tani dan nelayan yang menghuni sebagian besar wilayah republik ini. Dari 170 juta penduduk Indonesia, lebih dari 80 persen mendiami wilayah pedesaan. Merekalah para tani dan nelayan itu.

Bila tingkat pendapatan serta teknik produksinya ditingkatkan, maka dapat dibayangkan berapa besar potensi komoditi nonmigas yang bisa disumbangkan dari sektor ini. Departemen Tani dan Nelayan DPP Golkar dalam program-program kerjanya selama ini memang menjurus ke peningkatan kualitas kelompok ini. "Walaupun masih banyak kekurangan, namun fakta bahwa 90 persen petani, nelayan dan peternak memilih Golkar merupakan bukti bahwa program-program Golkar menyentuh kepentingan mereka," ujar Tati.

Dengan menggunakan jalur organisasi, kualitas tani dan nelayan bisa ditingkatkan di kemudian hari. Tati melihat jalur karakterdes adalah potensi organiasi yang bisa dimanfaatkan sebagai front terdepan dalam pembinaan dan peningkatan kadar kualitas tani dan nelayan. Untuk itu para karakterdes yang tersebar di semua desa di Indonesia itu dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai tentang masalah-masalah pertanian, sehingga mampu menjadi motivator pembangunan pedesaan pada umumnya maupun petani dan nelayan pada khususnya. "Pentingnya, cita-cita kita adalah bagaimana menciptakan para karakterdes itu menjadi pelopor-pelopor pembangunan di desanya," ujar sarjana tamatan ITB ini.

Problem mendasar para tani dan nelayan serta peternak selama ini ialah buntunya akses mereka ke pasar. Terkadang mereka tidak mengetahui kemana hasil pertanian dijual. Dan kalau ada pasar, terkadang mereka dikungkung oleh sistim pasar dan harga yang tidak mendukung.

Agar bisa keluar dari kepelikan ini, Tati mendukung usaha keterkaitan, dimana pengusaha-pengusaha besar dan menengah menjadi "bapak angkat" bagi usaha-usaha kecil di pedesaan. Pengusaha besar dan menengah memberikan supervisi tentang mutu dan teknik produksi yang disyaratkan pasar, sekaligus berfungsisebagai penyalur produksi barang-barang petani ke pasar atau konsumen. "Dengan cara ini saya yakin tani, nelayan dan peternak akan mampu menyumbang devisa dari sektor nonmigas," ujarnya.

Penghayatan terhadap desa sekarang ini tidak lagi berbobot politik. Artinya desa tidak lagi dijadikan ajang pertarungan atau konflik politik. Persaingan untuk merebut simpati masyarakat desa lebih berwujud kompetisi profesional dalam karya dan kekaryaan. Dan Golkar punya aset untuk itu, yakni para karakterdes.

Dan kalau para karakterdes ini bisa menjadi motivator pembangunan di desa, maka hasil yang dicapai akan sangat besar manfaatnya. Para karakterdes akan mengukir prestasi diri, meningkatkan ekonomi pedesaan, meningkatkan aktivitas perekonomian nasional serta memperluas lapangan kerja.

Sejumlah kendala seperti lemahnya penguasaan ilmu dan teknologi serta masih sedikitnya aparat di desa yang memahami pembangunan pedesaan, memang masih merupakan hambatan yang serius. "Tapi kader-kader Golkar tidak boleh berpangku tangan dalam upaya membangun masyarakat desa. Dan sejumlah prakarsa telah kita mulai! □ (BM)

Digitized by Google

Departemen Pengabdian Masyarakat

Memotivisir Semangat Pengabdian

Pengabdian adalah kata yang bermakna luas dan mulia. Eksistensi manusia dalam dimensi bermasyarakat sebenarnya menjunjung etos ini. Bobot pengabdian malah lebih dituntut pada insan-insan yang bergabung dalam sebuah organisasi yang berkarakter sosial-politik.

Sadar akan makna sebuah pengabdian, maka ketika DPP Golkar periode 1983-1988 dilantik lima tahun yang lalu, maka dirasa perlu membentuk Departemen Pengabdian Masyarakat melengkapi departemen-departemen lainnya.

Dengan demikian, seperti kata Hatta Mustafa yang bersama Nugraha Besoes ditugaskan memimpin departemen ini, lingkup kegiatan departemen tersebut sangat luas. "Program dan aktivitasnya menjangkau masyarakat secara nasional," ujar Noegraha.

Secara harafiah, mungkin mudah dipahami apa yang dimaksudkan dengan pengabdian masyarakat itu. Namun yang paling sulit, demikian Nugraha, adalah bagaimana aplikasinya. Jadi bila ingin berbicara tentang pengabdian masyarakat secara tepat, maka ruang lingkupnya tidak terbatas.

Pengabdian masyarakat dengan demikian melingkupi aktivitas yang sangat luas dengan sasaran demi masyarakat itu sendiri. "Hampir setiap segmen kehidupan, pengabdian masyarakat diperlukan," ujar Nugraha.

Oleh karena itu Departemen Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengemban misi pengabdian Golkar, bekerjasama dengan departemen-departemen lain dalam rangka pengabdian tersebut. "Kita tidak bisa jalan sendiri,"a ujar Hatta Mustafa yang kini dipercaya menjadi Ketua DPD Golkar Tingkat I Sumatera Selatan.

Wujud dari pengabdian masyarakat pun beraneka ragam. Departemen ini memprakarsai pelayanan masyarakat dari KB hingga khitanan. Dari kebersihan lingkungan sampai bhakti sosial. Dan masih banyak lagi kegiatan pengabdian masyarakat oleh kader-kader Golkar di daerah yang seolah tidak mencuat karena memang kurang diekspos oleh pers. "Maklum pers hanya memberitakan pengabdian masyarakat, kalau aktivitas itu dibuka oleh ketua umum atau gubernur," ujar Hatta.

Hatta Mustafa

Nugraha Besoes

Contoh pengabdian di atas, menurut Nugraha, hanya sebuah titik dari timbunan kegiatan pengabdian masyarakat yang begitu luas dan kompleks. "Jadi jangan menilai pengabdian masyarakat hanya dari segi khitanan, pelayanan kesehatan atau kebersihan lingkungan saja," tukasnya lagi.

Bila hanya melihat ukuran itu, maka orang mungkin akan menilai Departemen Pengabdian Masyarakat belum melakukan apa-apa. Agar penilaian jangan sampai rancu, maka Nugraha merasa perlu menekankan satu hal paling penting dari program departemen tersebut, ialah bagaimana menggerakkan semangat pengabdian masyarakat dari kelompok masyarakat itu sendiri. Peran sebagai motivator itulah yang menjadi keharusan Departemen Pengabdian Masyarakat.

Dalam rangka ini, maka salah satu bentuk prakarsa yang diambil ialah mengadakan penyuluhan sampai ke tingkat desa, agar tumbuh kesadaran untuk memprakarsai kegiatan-kegiatan pengabdian sosial di lingkungan masing-masing. Kalau rakyat di desa, setelah mendapat penyuluhan dari seorang kader Golkar, sadar akan tanggungjawab sosialnya maka tugas pengabdian sebenarnya telah terlaksana dengan baik.

Dan bagi Departemen Pengabdian Masyarakat, selain menggerakkan kesadaran, juga mengantisipasi wujud-wujud pengabdian yang diperlukan. "Jangan sampai sebuah bencana alam hampir hilang dari ingatan masyarakat, baru diadakan santunan," kata Nugraha. Tanpa mengurangi iktikad santunan seperti ini, tetapi uluran tangan seperti itu membuktikan bahwa dari segi antisipasi, kita kurang cekatan. Kalau negara kita ini kita akui rawan cuaca, maka kesiagaan pengabdian masyarakat harus mengantisipasi bahaya laten itu, seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Memang sangat luas sektor yang harus digeluti oleh Departemen Pengabdian Masyarakat ini. Menyadari hal itu, maka dalam operasinya departemen ini menggalakkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal. Dengan biro-biro pengabdian masyarakat di tingkat I maupun II disadarkan akan tugas dan tanggungjawab pengabdian ini. Selain itu dengan departemen teknis diadakan kerjasama untuk mengantisipasi masalah-masalah yang membutuhkan kerja pengabdian.

Departemen ini menurut Hatta, juga bekerjasama dengan Departemen Sosial untuk mendidik tenaga-tenaga pekerja sosial yang diterjunkan ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan dan penerangan.

Belum Puas

Suatu masa bhakti, apalagi dengan lingkup pengabdian yang begitu luas, memang jarang menghasilkan prestasi yang memuaskan. Hatta maupun Nugraha yang ditanya, "Apakah puas dengan prestasi yang dicapai oleh departemennya?" hanya menjawab,

Digitized by Google

"terus terang kami belum puas." "Kita ingin mencapai hasil yang lebih maksimal, tetapi kita harus jujur, masih banyak kendala yang menghambat."

Untuk itu di waktu mendatang, departemen ini diharapkan agar lebih meningkatkan semangat pengabdiannya, baik lewat kerjasama dan koordinasi dengan jajaran Golkar di daerah-daerah maupun dengan aparatur pemerintah setempat.

Tentu kalau Hatta merasa belum puas dengan prestasi yang dianggapnya belum maksimal itu, tidak berarti departemennya tidak melakukan apa-apa. Seperti diakuinya sendiri, banyak sekali kegiatan pengabdian masyarakat yang dikoordinir departemen ini yang tidak terekspos secara nasional sehingga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Padahal di daerah-daerah kader-kader Golkar tidak tinggal diam. Mereka selalu responsif terhadap kebutuhan pelayanan dari masyarakatnya.

Kurangnya ekspos media massa mungkin disebabkan anggapan media massa itu sendiri bahwa pengabdian masyarakat dalam beberapa wujudnya tidak spektakuler. "Maklum pers hanya suka kepada peristiwa-peristiwa yang besar-besar dan formal," tutur Hatta.

Tanpa mengurangi apresiasi pers terhadap aktivitas pengabdian masyarakat, menurut Nugraha, esensi sebuah pengabdian adalah rasa berbagi derita dengan orang lain atau yang lebih dikenal dengan istilah kesetiakawanan sosial. Kesadaran ini walaupun belum mencapai tahap yang diinginkan tapi sudah mulai tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Dan bagi Golkar, setiap kali ada kebutuhan pengabdian sosial harus berada di sana.

Sebuah departemen yang tidak lain adalah perangkat organisasi, dalam tugasnya membutuhkan sarana dan prasarana. Dia membutuhkan manusia pelaksana dan dana yang menunjang. Dana dan manusia pelaksana inilah yang menjadi keluhan klasik bagi setiap organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun bagi Nugraha, dana memang penting. Tetapi tanpa semangat pengabdian, dana bisa saja tidak mempunyai fungsi pengabdian apa-apa. "Semangat pengabdian inilah yang terus dimotivisir pada setiap kader Golkar, sehingga setiap kali ada kebutuhan pengabdian masyarakat, mereka selalu hadir," ujarnya.

Namun demikian, Hatta maupun Nugraha mengalami kesulitan intern terutama yang menyangkut tugas dan wewenang Korwil (koordinator wilayah). Sebuah kebutuhan pengabdian sosial yang harus ditangani oleh Departemen Pengabdian Masyarakat, kadang-kadang terhambat hanya karena pembagian korwil ini.

Sebagai contoh, sebuah pengabdian masyarakat yang diperlukan di Irian Jaya, terkadang tidak terlayani oleh Hatta misalnya, karena dia kebetulan menjadi korwil untuk Sumbagsel. Hal-hal inilah yang diharap mendapat perhatian untuk DPP Golkar mendatang. Walaupun Nugraha mengatakan bahwa pengabdian adalah kerja setiap kader Golkar dan departemen apa pun, namun masalah pembagian korwil ini diakui pula agak lebih disempurnakan fungsi dan peranannya. □

(LT/BM)

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

ramako GROUP

OFFICE :
Jalan Empu Sendok No. 12 Jakarta 12110
Telephone: 586219 - 588008 - 588009 Telex : 47452 RAMAKO IA

STUDIO :
Jalan Empu Sendok No. 12 Jakarta 12110

Mengucapkan:

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV
20 Oktober 1988
dan
Sukseskan Musyawarah Nasional
Golongan Karya Ke IV

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

RAMAKO FM 106.15 Stereo - MUSTANG FM 100.55 Stereo - RAMAKO BATAM FM 101,6 Stereo - ARISTIARA AM 738

Digitized by Google

Departemen Seni Budaya

Menggarap Potensi Budayawan, Seniman dan Artis

Landasan kerja Departemen Seni Budaya DPP Golkar masa bakti 1983-1988 adalah sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Musyawarah Nasional ke III GOLKAR kepada DPP Golkar yaitu untuk mengemban dan melaksanakan program umum Golongan Karya seperti dimaksud dalam Keputusan Munas III Golkar Nomor : VI/Munas III/Golkar/1983. Pelaksanaannya perlu dijabarkan dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program Umum.

Sebagaimana diketahui rencana pelaksanaan program umum Golkar masa bakti Tahun 1983-1988 telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : KEP-010/DPP/Golkar/12/1983 tertanggal 12 Desember 1983. Dalam rencana pelaksanaan program umum ini digariskan pokok-pokok kegiatan dalam Lima Tahun (1983-1988), sedang perincian kegiatan setiap tahun dibuat oleh masing-masing Departemen DPP Golkar, antara lain perincian kegiatan Departemen Seni Budaya DPP Golkar.

Pokok kegiatan Departemen Seni Budaya adalah: (a) Konsolidasi Organisasi; (b) Bidang Seni; (c) Bidang Budaya; (d) Bidang Pembauran Bangsa, dan (e) Pemenangan Pemilu.

Di dalam kenyataannya kegiatan bidang pembauran bangsa telah dimasukkan dalam kegiatan yang ditangani oleh Bidang Kerokhanian.

Dalam melaksanakan kegiatan perlu diketengahkan bahwa sejarah telah memberikan bukti nyata kepada kita, baik dalam Sejarah Indonesia Purba maupun dalam Sejarah Indonesia Modern, bahwa para seniman/budayawan telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan, perkembangan dan perjuangan bangsa kita. Peranan seniman/artis dalam kampanye Pemilu 1971, 1977, dan 1982 untuk memenangkan Golkar sungguh tidak kecil. Seniman/artis telah membuktikan dirinya sebagai alat komunikasi dan hiburan yang ampuh bagi Golkar.

Perlu diketengahkan bahwa untuk menggalang dan memobilisir para

Drs Waskito

seniman/budayawan adalah tugas yang tidak ringan dan memerlukan pendekatan yang khusus sifatnya dibandingkan dengan profesi lainnya. Pendekatan secara birokrasi, apalagi pendekatan dengan sistem komando tidak akan berhasil. Pendekatan yang cocok adalah pendekatan secara persuasif dan edukatif serta pendekatan secara manusiawi.

Pada umumnya para seniman/budayawan kurang tertarik pada masalah-masalah yang berada di luar profesinya, seperti soal-soal kemasyarakatan dan politik. Hal mana terbukti bahwa untuk menggalang dan memobilisir para seniman/budayawan diperlukan waktu yang cukup panjang.

Secara strategis para seniman/budayawan yang efektif dikaitkan dengan usaha pemenangan Pemilu adalah yang profesinya sebagai penyanyi, pelawak, pemusik dan pencipta lagu serta yang berkecimpung dalam kesenian tradisional.

Kebijaksanaan Pelaksanaan

Mengingat waktu yang tersisa menjelang Pemilu 1987 maka pokok kegiatan yang mendapat prioritas untuk ditangani dan digarap oleh Departemen Seni Budaya adalah seniman budayawan yang mempunyai profesi penyanyi, pelawak, pemusik dan para pencipta lagu, tanpa mengabaikan seniman/budayawan lainnya. Para seniman/artis tersebut telah ikut serta secara aktif dalam kegiatan Golkar

Para seniman secara aktif ikut dalam kegiatan Golkar

Digitized by Google

sejak Tahun 1984 dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 1985 dengan adanya "Kebulatan Tekad seniman/artis di Jakarta" untuk: (a) Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan Golkar dan (b) Berpartisipasi aktif untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu 1987. Kebulatan tekad ini kemudian bergema dan berkumandang ke daerah-daerah lainnya.

Kebulatan tekad di Jakarta yang diikuti oleh seniman/artis di daerah lain menjadi asset yang sangat berharga untuk perjuangan selanjutnya. Usaha penggalangan para seniman/budayawan lainnya tetap diteruskan dalam rangka sukses konsolidasi dan sukses Pemilu 1987.

Asset Golkar ini kemudian dikonsolidir dan dimantapkan dengan penyelenggaraan penataran kader fungsional seniman budayawan yang diselenggarakan oleh seniman/artis secara mandiri dan swadaya dengan bimbingan DPP Golkar.

Disamping itu, para seniman/artis Golkar telah menyusun sejumlah kaset rekaman di dalam rangka: (a) Memberikan hiburan kepada rakyat; (b) Meningkatkan semangat juang Kader-kader Golkar dan (c) Memenangkan Golkar dalam Pemilu 1987. Usaha tersebut di atas dibarengi dengan penugasan seniman/artis ke daerah-daerah, baik menyertai kunjungan Bapak Ketua Umum DPP Golkar maupun penugasan oleh DPP Golkar.

Pada akhirnya kita semua mengetahui bahwa usaha Golkar untuk memenangkan Pemilu 1987, berkat usaha dan kerja keras dari seluruh jajaran Golkar beserta seluruh kader-kader Golkar, telah berhasil gemilang dengan meraih suara secara nasional sebesar 73 persen.

Disadari sepenuhnya bahwa pokok kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Program Umum Golkar masa bakti 1983-1988, sebagian belum sempat digarap secara intensif mengingat keterbatasan waktu serta prioritas yang ditetapkan.

Oleh karena itu untuk kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu 1988-1993, pokok-pokok kegiatan Departemen Seni Budaya yang belum sempat digarap secara intensif, perlu dilanjutkan dalam rangka sukses Konsolidasi. Disamping itu pokok kegiatan yang telah digarap dalam kurun waktu 1983-1988 perlu ditingkatkan penggarapannya, baik dalam rangka sukses konsolidasi maupun sukses Pemilu 1992.□

"Dirgahayu Golongan Karya
Ke XXIV 20 Oktober 1988" dan
"Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV"
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai
Segenap Anggota Golongan Karya

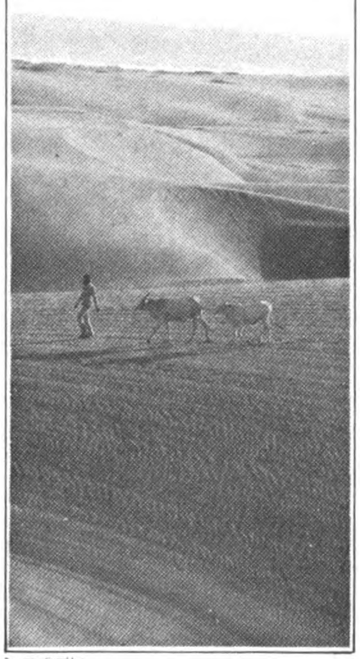
Parangtritis, Central Java

Be With Us
With Sahid
Hospitality
A Warm
And Homely
Atmosphere

For direct confirmations
of your reservations at any
of seven luxurious hotels

Jakarta
021 - 581220, 587031

Yogyakarta
0274 - 87078, 3697

Solo
0271 - 6356, 7022

Solo
0271 - 5889

Kuta - Bali
0361 - 51278

Ujung Pandang
0411 - 7055

Manado
0431 - 52222

SAHID GROUP HOTELS
INDONESIA

SAHID JAYA Jakarta • SAHID GARDEN Yogyakarta • KUSUMA SAHID PRINCE Solo •
SAHID SALA Solo • SAHID BALI SEASIDE COTTAGE Kuta • MAKASSAR CITY Ujung Pandang • KAWANUA CITY Manado •
Head Office : CORPORATE MARKETING JAKARTA 021-583167.

Digitized by Google

Departemen Pemuda

Membina, Menggalang dan Mengembangkan

Pada waktu DPP Golkar periode 1983-1988 dilantik pada bulan Oktober lima tahun yang lalu, dalam program umum Golkar waktu itu dicantumkan beberapa hal mengenai bidang kepemudaan. Antara lain ditetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan bangsa, maka Golkar perlu berperan untuk menciptakan iklim yang sehat yang memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggungjawab guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam pembangunan di dalam kesinambungan cita-cita perjuangan bangsa.

Selain itu dalam program umum Golkar tersebut juga dicantumkan bahwa sejalan dengan usaha-usaha pengembangan generasi muda sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikembangkan suasana yang lebih memungkinkan tumbuhnya prakarsa, daya cipta, kebersamaan, kesetiakawanan, kepercayaan terhadap diri sendiri. Hal-hal seperti ini merupakan prasyarat

Aulia Rachman

untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan.

Golkar juga mempunyai program yang mendorong pengembangan wadah-wadah pembinaan, seperti karang taruna, organisasi olah raga dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan sebagai sarana pengembangan kreativitas. Singkat kata Golkar pada waktu itu melihat bahwa tantangan yang dihadapi bangsa akan semakin besar dan kompleks, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda yang terpadu dan sistimatis.

Program umum Golkar di bidang kepemudaan tersebut dalam pelaksanaannya sebenarnya menyangkut tiga aspek utama, yaitu konsolidasi, pembinaan dan pengembangan serta penggalangan.

Upaya konsolidasi menyangkut koordinasi dan komunikasi dengan unsur-unsur pemuda, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam organisasi profesi/fungsional, khususnya berorientasi pada karya dan kekaryaan, terutama dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) agar terwujudnya kesatuan pandangan gerak dan langkah. Selain itu juga mengadakan pertemuan teknis dengan biro-biro DPD Golkar tingkat I dan II.

Sedangkan dalam upaya pembinaan dan pengembangan sasarannya adalah membina kelompok-kelompok mahasiswa/pelajar yang tergabung dalam organisasi belajar, olah raga dan seni budaya dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan dinamika pemuda. Sasaran lain adalah menciptakan dan memelihara kehidupan kampus yang

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

APNATEL

Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi

Indonesian Telecommunications Association

Bank Bumi Daya Plaza – Lt. 24 Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"

D A N

"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

sehat melalui kader-kader Golkar yang ada di perguruan tinggi. Melaksanakan kursus-kursus ketrampilan, widya wisata melalui kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta agar generasi muda terutama yang putus sekolah menjadi potensi yang produktif. Memasyarakatkan P4 di kalangan generasi muda, serta menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium tentang masalah-masalah yang aktual dan relevan dengan kepentingan pemuda.

Upaya penggalangan diarahkan pada tindakan persuasif agar segenap potensi kepemudaan mendukung Golkar dalam usaha memenangkan pemilu 1987.

Inilah langkah-langkah spesifik yang ditempuh oleh Departemen Pemuda DPP Golkar periode 1983-1988.

Tentu saja dalam menerjemahkan program umum Golkar khususnya yang menyangkut bidang kepemudaan, maka upaya konsolidasi, pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam semangat Tri Sukses Golkar yang menyangkut Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita IV dan Sukses Pemilu 1987. Atau dengan kata lain, dari perspektif organisasi, semua program yang dijalankan oleh Departemen Pemuda mengarah pada sasaran Tri Sukses itu.

Kompleks dan Luas

Untuk menunjang sukses pertama (sukses konsolidasi), maka kegiatan yang dilakukan antara lain, mengadakan sarasehan kebudayaan antara organisasi-organisasi kepemudaan yang berada dalam lingkungan Golkar. Menciptakan forum dialogis dengan organisasi seperti KNPI, AMPI, FKPPI dan organisasi-organisasi profesi dan fungsional di kalangan pemuda.

Selain itu juga menciptakan forum komunikasi antara generasi muda sipil dan generasi muda ABRI di luar jalur pendidikan, serta mewujudkan AMPI sebagai organisasi pemuda yang bernaung di bawah panji Golkar. Kader-kader AMPI dengan demikian diharap mampu menjadi penggerak perjuangan Golkar di kalangan organisasi profesi/fungsional serta kemasyarakatan.

Untuk mensukseskan Sukses Kedua (Sukses Pelita IV), maka langkah yang ditempuh adalah mengembangkan sistim-sistim pembinaan yang mendorong kreativitas dan merangsang dinamika dan menghindari pengekangan. Memantapkan nilai-nlai dasar yang menyangkut perkembangan bangsa di bidang mental, spiritual keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ideologi Pancasila, pelaksanaan P4 serta menyebarluaskan keberadaan Golkar di kalangan pemuda.

Pada dasarnya dalam rangka sukses Pelita IV, langkah yang ditempuh di bidang kepemudaan ini ialah bagaimana mengupayakan agar mereka menjadi kekuatan yang tidak saja potensial tetapi produktif untuk mendorong gerak pembangunan.

Sedangkan untuk menunjang Sukses Ketiga, maka Departemen Pemuda berupaya agar secara persuasif menggalang segenap potensi kepemudaan di Indonesia agar mendukung Golkar dalam memenangkan Pemilu 1987. Untuk ini, salah satu cara adalah mengadakan diskusi, sarasehan, festival musik dan olah raga dan sebagainya.

Salah satu aspek penting yang diperjuangkan oleh Departemen Pemuda adalah bagaimana menciptakan lapisan generasi muda yang meyakini dan menghayati perjuangan Golkar secara vertikal dari pusat sampai ke desa dan secara horizontal di seluruh Indonesia. Dengan demikian kader-kader muda Golkar akan menjadi pendorong gerak dan dinamika pembangunan bangsanya di seluruh tanah air.

Masalah kepemudaan begitu kompleks dan luas. Pembinaan, penggalangan dan konsolidasi harus lah merupakan upaya nasional yang dilakukan secara terus-menerus. Departemen Pemuda Golkar dalam kurun lima tahun terakhir telah mencoba memberi sumbangan pemikiran dan prakarsa untuk menangani masalah yang demikian luas dan rumit itu.

Tentu banyak kendala yang masih mengganjal. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa banyak juga kemajuan yang dicapai di bidang kehidupan generasi muda, terutama dalam aspek persepsi mereka tentang perjuangan Golkar.□

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

STATUS DISAMAKAN : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
STATUS DIAKUI : Fakultas Pertanian – Fakultas Hukum – Fakultas Ekonomi – Fakultas Tarbiyah
STATUS TERDAFTAR : Fakultas Teknik – Fakultas Psikologi – Fakultas Syariah – Fakultas Peternakan

Kampus I : Jalan Bandung No. 1 Telepon 51253 Malang
Kampus II : Jalan Bendungan Sutami 188 A Telepon 51149 Malang

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

Mengucapkan :

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988

dan

Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Departemen Kerohanian

Dari Ketaqwaan Sampai Pembauran

Departemen Kerohanian masa bhakti 1983-1988 telah melakukan banyak kegiatan yang tidak mungkin dirinci secara detil dalam kolom ini. Tetapi beberapa hal yang menjadi perhatian utama departemen ini agaknya layak diketengahkan untuk melengkapi informasi bagi pembaca *Media Karya.*

Salah satu hal yang menjadi perhatian pokok Departemen Kerohanian ialah bagaimana membina kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak cukup dengan anjuran dan himbauan saja untuk membina kehidupan ber-agama & kehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Upaya memperkuat ketaqwaan dan keimanan adalah usaha yang terus-menerus. Bukti tentang terbinanya kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diukur oleh amal perbuatan para penganut dan penghayatnya.

Selama ini amal sosial kemanusiaan dari warga Golongan Karya telah berjalan tanpa hambatan yang berat, hambatan psikologis agamis nampak sirna, bergotong-royong dalam hal kegiatan bersama semakin erat, nampak pada kegiatna ulang tahun Golkar semua warga bersama-sama beramal berbuat kebajikan. Pada peringatan hari-hari besar keagamaan khususnya agama Islam kerja sama antar warga yang diorganisir oleh ormas-ormas berjalan lancar dengan kordinator DPP Golkar.

Pertemuan kordinasi selalu diadakan baik dalam hal merencanakan suatu kegiatan ataupun informasi tentang kegiatan Golkar umpamanya pada waktu akan memulai kaderisasi fungsional pemuka agama Islam. Juga diskusi-diskusi umpamanya diskusi masalah haji untuk memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya urusan haji, yang melibatkan pejabat dari Departemen Agama.

Hari-hari korban hewan, setiap tahun diadakan dan dilaksanakan ormas-ormas yang nampaknya baik jumlah korban maupun sasaran penerima korban semakin bertambah, kebersamaan dalam hal beramal antar ormas makin terjalin kuat, bahkan olah raga baik khusus ataupun gerak jalan selalu mereka mengikutinya.

KH Sakti Qodratullah

Dengan usaha-usaha tersebut di atas pembinaan kehidupan beragama & kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilaksanakan.

Tahun-tahun terakhir ini tidak lagi terdengar tentang SARA, kerukunan antar umat beragama dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin mantap. Khabar-khabar yang meresahkan semakin langka. Di masa mendatang hendaknya kerja sama dan kebersamaan, dan gotong-royong senantiasa harus ditingkatkan.

Penataran P4

Sebagian besar unsur pimpinan ormas dari tingkat pusat sampai ke pedesaan, telah mengikuti penataran P4 bahkan di dalam kelompok stimulasi P4 pun mereka senantiasa mengikutinya.

Ormas-ormas nampaknya tidak sepenuhnya mampu mengadakan sendiri penataran P4. Lain halnya dengan karakterdes, anggota dari ormas pun dapat mengikuti karakterdes, dan jumlah mereka cukup banyak, dan memang dari Departemen Kerohanian selalu menganjurkan agar pada kesempatan penataran karakterdes agar mereka mengikutinya, bahkan laporan rutin kepada DPD sesuai tingkatannya sangat dianjurkan.

Sebagai kontrol perlu nantinya ormas-ormas melaksanakan sendiri penataran P4 walaupun hanya berupa stimulasi. Kepada mereka telah dianjurkan agar berkonsultasi dengan BP7 setempat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Sampai saat ini sebagian besar surat-surat masuk ke Dep. Kerohanian adalah surat-surat permohonan bantuan, baik untuk mesjid maupun madrasah, baik bantuan biaya maupun buku-buku agama, kitab suci Al Qur'an tidak terhitung jumlahnya yang telah disalurkan kepada ormas-ormas bahkan ada yang disalurkan lewat DPD-DPD I, kebutuhan akan kitab Qur'an itu semakin besar jumlahnya, apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama Islam yang besar.

Andaikan tersedia berjuta buku Qur'an rasanya tetap tidak memadai, padahal jumlah Al Qur'an yang dicetak dan dibagikan oleh Departemen Agama pun tidak banyak, apalagi pada saat menjelang Pemilu baru lalu, Al Qur'an dengan jumlah besar telah dibagikan belum terhitung surat Yasin bahkan dari Sekretariat Dewan Pembina Golkar pun banyak sekali yang dibagikan.

Telah beratus orang yang berangkat naik haji setiap tahun atas kordinasi sekretariat Dewan Pembina tersebut. Bantuan-bantuan kerap kali diberikan oleh Ketua Umum DPP Golkar pada setiap kunjungan kerja ke berbagai daerah, baik bantuan untuk mesjid mushola, ataupun madrasah bahkan gereja, belum lagi Banpres yang pelaksanaannya melalui Pemda setempat. Dengan adanya bantuan nyata tersebut warga Golongan Karya yang memperhatikan sarana keagamaan, besar sekali saham mereka dalam memenangkan pemilu 1987 yang lalu.

Sarana Organisasi

Yang telah melaksanakan Mubes, Munas, dan yang sejenisnya adalah MDI, GUPPI, Satkar Ulama, Al Hidayah, Mataul Anwar, PPTI, GUBSI dan lain-lain. Dalam hal fungsionaris pusat dari Golkar, selalu turun langsung untuk bantuan baik di dalam penyusunan program maupun susunan pengurus ormas yang bersangkutan.

Selain yang telah disebutkan di atas

Digitized by Google

Membina kehidupan beragama, menjadi perhatian utama

masih juga terdapat kader pemuka agama yang duduk dalam kepemimpinan MUI, Dewan Mesjid, dan kelompok-kelompok lain misalnya tarikat, belum terhitung mereka yang menamakan dirinya pimpinan ormas walau sifatnya ormas lokal atau regional, umpamanya hanya ada di tingkat propinsi saja, misalnya; Halwatiah di Sulsel, Idrisiah di Tasikmalaya, Sahadataen di Panuragan Cirebon, dan masih terdapat di beberapa daerah lainnya.

Dalam hal ini kordinasi hanya melalui tokoh-tokoh saja karena itu seyogyanya kalau kelak masih ada Departemen Kerohanian sebagai mana sekarang, perlu sekali ditambah tenaga kadernya bukan tenaga administrasinya.

Kelemahan yang ada pada mereka ialah, mereka banyak yang masih belum memiliki gedung kerja atau kantor pusat kegiatan administrasi, belum jelas sumber dana yang memberi kelancaran kepada organisasi, kalau hanya mengharapkan bantuan Pemda, nampak sukar karena Pemda pun tidak tersedia dana pasti untuk ormas-ormas. Masalah ini sebaiknya diperjelas dan harus ada petunjuk teknis yang jelas pula.

Bimbingan sampai saat ini yang dapat diberikan baru pada anjuran konsolidasi, intern dan extern, khususnya masalah keanggotaan, seharusnya mereka memiliki daftar anggota lengkap sebagai catatan resmi tentang kekayaan keanggotaan. Berpedoman kepada UU No. 8/1985, ormas adalah mandiri bukan lagi bernaung di bawah orpol, sedangkan Golkar sendiri keanggotaannya perorangan jadinya anggota kader. Disinilah letak kesukaran pembinaan yang bersifat bimbingan, oleh karenanya bimbingan bersifat perorangan kepada kader Golkar yang berkedudukan sebagai pimpinan ormas.

Bimbingan kepada kader Golkar sebagai pimpinan ormas senantiasa diadakan terutama dalam hal menjalin kebersamaan beramal sesekali diberikan juga teknik memimpin ormas alakadar agar mereka faham benar arti hubungannya antara ormas dengan Golkar.

Ikatan lama dimana ormas bernaung dibawah panji Golkar nampak masih ada jelas peran politiknya harus tetap dipertahankan yaitu peran politik Golkar terhadap ormas, namun yang jelas tidak dapat terbuka, baik berdasarkan UU orpol Golkar maupun UU keormasan. Inilah letak kesukaran yang ada, yang membutuhkan semacam modus baru untuk mempererat hubungan ormas dengan Golkar.

Menjaga kesucian tempat ibadah, telah berjalan sebagai mana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi, karena kader Golkar yang kebetulan sebagai pengurus dewan mesjid, dapat berusaha dengan baik untuk memelihara tempat ibadah, kalau toh orang lain menggunakannya sebagai sarana pembinaan politik, jelas bukan tempat ibadahnya, akan tetapi forumnya diisi dengan yang salah.

Mengingat masih ada oknum yang mengail di air bening atau malah ekstrimnya mengeruhkan suasana, sangat penting dijalin kerja sama antara da'i, dengan sarananya umpamanya kerja sama antara majlis ta'lim dengan da'i, hal demikian kini ada kemudahan, organisasi da'i dan majlis ta'lim telah ada tidak sukar untuk dipertemukan.

Namun sebagai mana disebutkan di atas ada oknum yang mengail di air jernih demi keuntungan perorangan atau pribadi, tentu saja mempersatukan da'i dengan majlis ta'lim akan memakan waktu, akan tetapi bukan hal mustahil dapat dipersatukan.

Pembauran bangsa

Semula, sebagaimana tertulis di dalam program Golkar dan siapa serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk itu, sudah jelas. Rekan dari Departemen Seni Budaya, di dalam perjalanan kerja meminta kepada Departemen Kerohanian untuk juga menangani program pembauran bangsa, tentu suatu kehormatan bagi Dep. Kerohanian. Namun kesukarannya adalah sejak semula Dep. Kerohanian tidak memprogramkan hal itu, dilihat dari kenyataan tentang upaya pembauran bangsa ini telah banyak berhasil, sebutan nonpri umpamanya, lama kelamaan sirna sendiri setelah semua warga Indonesia ini berkelindan dalam kegiatan di masyarakat apakah kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial umumnya.

Suatu contoh, ada sebuah organisasi yang namanya Persatuan Tionghoa Islam disingkat PITI (konon kini sudah berbah pula nama organisasi ini), dipimpin oleh sdr. Satibi Darwis ex sekertaris Menko Kesra, yang dahulunya dipimpin oleh sdr. Isa Idris. Di dalam organisasi tersebut jelas anggotanya hanya warga Indonesia bermata sipit (maaf) namun di dalam kegiatannya sampai saat ini masih berjalan bahkan seorang tokohnya yaitu bernama Yunus Yahya menjadi anggota pengurus M.U.I.

Baik agama ataupun budaya adalah sarana yang dapat diandalkan untuk pembauran bangsa ini disamping lapangan kerja dan profesi kesehatan dan perdagangan. Satu waktu keperluan untuk menangani pembauran bangsa ini menjadi penting dan konsepsional agar aparat pelaksana dapat bertugas dengan sebaik-baiknya.□

Digitized by Google

Departemen Tenagakerja

Ketenagakerjaan Memang Sulit Tapi Harus Berani Memulai

Bertolak dari keadaan dalam Pelita IV maka Pertumbuhan angkatan kerja kita selama Pelita IV itu bertambah dengan 9,3 juta, daya serapnya hanya 6,1 juta, sehingga pada akhir Pelita IV kita masih memiliki jumlah penganggur sekitar, 3,2 juta. Sekalipun akhir-akhir ini ditampilkan angka-angka yang lebih optimistis, namun itupun tak mengubah esensi pokok dari masalah perluasan kesempatan kerja. Disamping itu masalah lain yang cukup penting ialah yang menyangkut peningkatan kualitas tenaga kerja, perbaikan syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja, maupun masalah yang menyangkut hubungan antara para pekerja dengan pengusaha yang sesuai dengan semangat hubungan industrial pancasila (HIP).

Menghadapi masalah-masalah tersebut, selama Pelita IV ini DPP GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik telah berdaya upaya untuk ikut menanggulanginya. Di bidang perluasan kesempatan kerja kita telah berupaya untuk mempengaruhi pendapat umum melalui berbagai kesempatan, seperti seminar, diskusi maupun Penataran baik di depan forum pekerja, pengusaha maupun lewat FKP dalam ujud saran-saran kepada pemerintah. Di samping itu berbagai pemikiran juga diajukan kepada pemerintah tentang perlunya efektivitas bursa tenaga kerja, tentang perlunya peningkatan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan peningkatan serta perbaikan mutu tenaga kerja yang dikirim keluar negeri, peningkatan pembinaan program sektor informal, dan lain sebagainya.

Di bidang peningkatan kualitas tenaga kerja, GOLKAR lewat kader-kadernya telah melaksanakan pendidikan, baik pendidikan kader profesi maupun kader-kader politik yang sampai tahun 1987 tercatat 150 kader Politik di tingkat Pusat dan 2.600 di tingkat daerah. Hal ini akan ditingkatkan lebih luas lagi setelah DPP GOLKAR berhasil mengadakan Diklat Kader Fungsional Tenaga Kerja. Pendidikan profesi ketenagakerjaan mencakup acara-acara meningkatkan kerjasama tripartit di pusat dan daerah, cara-cara mengadakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), menangani perselisihan perburuhan, hubungan Industrial Pancasila dan sebagainya.

Soekarno D

Dan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) yang kini berjumlah sekitar 150 buah di seluruh Indonesia perlu lebih diefektifkan. Kendala kurangnya biaya untuk ini perlu di atasi dengan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta. Berbagai prasarana di berbagai forum dilakukan, dengan topik "Partisipasi Kaum Pekerja dalam Peningkatan Produktivitas" dilakukan di Hotel Indonesia di hadapan 90 Pengusaha. "Peraturan-perundangan di Indonesia" disampaikan dihadapan 100 pekerja di Hotel Kartika Plaza. Demikian pula topik-topik seperti: "Peningkatan Produktivitas Kerja dalam Masa Resesi dan "Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial", diadakan di Hotel Kartika Chandra yang dihadiri 80 pengusaha. Demikian pula topik "Syarat-syarat Kerja dan jaminan Sosial" di Hotel Sabang.

Di bidang perbaikan syarat-syarat kerja, upaya yang dilakukan oleh DPP GOLKAR secara langsung maupun tidak langsung antara lain ialah, memberi pengarahan/pedoman kepada kader-kader Golkar di bidang profesi tenaga kerja tentang perlunya penentuan upah yang berorientasi pada tingkat produktivitas dan kebutuhan hidup pekerja melalui musyawarah. Masalah peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dalam era industrialisasi itu kini perlu ditingkatkan. Ini semua bisa dimasukkan sebagai materi yang dibuat melalui kesepakatan antara pengusaha dan Serikat Pekerja (KKB).

Konsep Hubungan Industrial Pancasila yang lahir tahun 1974 yang kini telah dikokohkan oleh GBHN perlu dipelopori pelaksanaannya. Kader-kader Golkar diinstruksikan aktif dalam lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan HIP tersebut, seperti Lembaga Tripartit Nasional maupun Daerah, aktif dalam pembuatan KKB yang kini telah mencapai sekitar 4500 perjanjian, aktif dalam panitia-panitia Perselisihan Perburuhan tingkat pusat maupun daerah. Demikian pula mereka harus aktif dalam berbagai panitia dan dewan seperti Dewan Penelitian Pengupahan di pusat maupun di daerah, Dewan Produktivitas Nasional, Dewan Pendidikan dan Latihan Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Nasional, Daerah maupun di tingkat perusahaan. Kesemuanya itu adalah dalam rangka pemantapan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

Downstream

Dalam kerangka pelaksanaan program kaderisasi, maka pada bulan Juni 1988 telah dilaksanakan Diklat Kader Fungsinal Pekerja tingkat Pusat yang dihadiri oleh 290 orang, yang sesudah Munas Golkar yang ke IV nanti akan diteruskan ke daerah-daerah. Diskusi dalam Diklat Karsinal Pekerja tingkat Pusat tersebut mencakup 3 (tiga) dimensi ketenagakerjaan, ialah dimensi sebelum masa bekerja, selama masa bekerja dan sesudah meninggalkan pekerjaan. Dimensi pertama menyangkut perluasan kesempatan kerja, yang kedua me-

Digitized by Google

nyangkut Hubungan Industrial Pancasila dan yang ketiga menyangkut Jaminan Sosial termasuk masalah pensiun. Kesimpulan dan saran dari diskusi tersebut telah disampaikan ke DPP Golkar dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Masalah-masalah ketenagakerjaan dalam Pelita V yang akan datang tidak lebih ringan daripada dalam Pelita IV. Ekonomi dunia yang belum stabil mempengaruhi keadaan di Indonesia termasuk harga minyak. Sedangkan masalah tenaga kerja adalah sekadar merupakan *"downstream"* daripada masalah-masalah ekonomi yang merupakan *"uptsream"*-nya. Di mana masalah ekonomi kurang mantap, maka masalah ketenagakerjaan-pun akan terpengaruh. Jumlah angkatan kerja kita dalam Pelita V jelas semakin besar. Untuk menciptakan kesempatan kerja, diperlukan investasi yang lebih besar. Dalam hal penanaman modal kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Semoga ini berhasil. Jika tidak, akan mempengaruhi sempitnya perluasan kesempatan kerja. Banyaknya pengangguran bukan saja akan mempengaruhi masalah sosial ekonomi, tetapi bisa juga menjalar ke masalah keamanan, bahkan bisa juga ke masalah politik. Ini semua harus kita sadari dan tanggulangi sejak sekarang. Sedang selama Pelita IV ini harus kita akui bahwa tingkat upah rata-rata di Indonesia termasuk terendah di ASEAN.

Masalah tingkat upah menyangkut tingkat pendapatan dan tingkat hidup, sekaligus menyangkut kwalitas hidup, tingkat pendidikan dan latihan. Angkatan kerja kita selama Pelita IV yang sekitar 82% terdiri dari tamatan Sekolah Dasar ke bawah telah berbicara sendiri mengenai mutu tenaga kerja kita. Hal ini menyangkut pula tingkat produktivitas nasional kita, dan pada gilirannya menyangkut tingkat upah dan pendapatan kaum pekerja. Ini semua perlu difikirkan penanggulangannya dalam Pelita ke V yang akan datang. Kini daya tarik investasi di Indonesia antara lain karena faktor tenaga kerja yang murah. Dilihat dari sudut peningkatan kesejahteraan kaum pekerja ini sangat menyedihkan. Dalam Pelita V yang akan datang kita harus dapat mengubah daya tarik itu dari tenaga kerja yang murah, menjadi tenaga kerja yang produktif efisien. Ini merupakan tantangan nasional di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia termasuk mutu tenaga kerja kita.

Kita melihat ke Bursa Tenaga kerja. Dari angka-angka dalam bursa ini kita bisa melihat bahwa sekitar 10% dari yang mendaftarkan bisa disalurkan. Sekitar 90% dari padanya tidak mendapat pekerjaan. Ironisnya, masih banyak perusahaan yang menginginkan pekerja untuk keahlian tertentu tidak mendapatkannya. Ini berarti bahwa mutu dan jumlah angkatan kerja kita kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Ini antara lain disebabkan karena kita hingga kini belum memiliki perencanaan tenaga kerja yang terpadu, sekalipun dalam dua tiga GBHN yang lalu sudah tercantum.

GBHN tahun 1988 lebih menegaskan lagi perlunya ada perencanaan tenaga kerja yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka menyusun rencana ketenagakerjaan yang bersifat nasional. Sudah saatnya dalam Repelita V yang akan datang masalah perencanaan tenaga kerja yang terpadu, menyeluruh dan yang bersifat nasional itu dicantumkan di dalamnya. Membuat dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja semacam itu tidak mudah, tetapi toh harus dimulai. Jika rencana yang bersifat nasional sekaligus terlalu sulit, dapat dimulai secara regional atau propinsi. Sebanyak 300 klasifikasi jabatan yang sekarang ada dapat dipakai sebagai acuan. Dengan pola yang uniform seluruh regional atau propinsi bertindak sebagai pelaksanaannya. Pendekatan empiris dan mikro bisa dilakukan, yaitu mulai dari bawah. Kalau hal itu bisa dilakukan, maka seluruh data bisa diangkat ke tingkat nasional. Dengan demikian seluruh Lembaga Pendidikan dan Latihan ada data acuan kemana mereka menerima dan menghasilkan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis keahlian yang diperlukan untuk setahun atau lima tahun mendatang. Memang sulit, tetapi harus berani memulai. □

IKIP

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG
(INSTITUTE OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION)
Jalan Surabaya 6 Malang-65114-Telepon 51312, 51921

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"

D A N

"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Departemen Luar Negeri

Analisa, Studi dan Pendalaman Dalam Menghadapi Masa Depan

Bidang Hubungan Luar Negeri merupakan salah satu program umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1983-1988. Pokok-pokok kegiatan di bidang Hubungan Luar Negeri ini dilaksanakan oleh Departemen Hubungan Luar Negeri, berpedoman pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor: Kep-010/DPP/GOLKAR/12/1983 tentang Rencana Pelaksanaan Program Umum Golongan Karya Masa Bhakti 1983-1988.

Perhatian dan tanggung jawab Departemen Hubungan Luar Negeri periode 1983-1988 pada dasarnya meliputi berbagai bidang dan masalah luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak terhadap Indonesia. Karena luasnya masalah-masalah internasional, Departemen Hubungan Luar Negeri membatasi diri pada masalah-masalah yang secara langsung menyangkut kepentingan Indonesia, seperti masalah Timor Timur, hubungan bilateral Indonesia dengan berbagai negara, dan pemikiran-pemikiran politik luar negeri Indonesia sendiri dalam menghadapi masa depan; masalah regional baik yang langsung maupun tidak langsung melibatkan Indonesia dan kepentingan-kepentingannya seperti kerjasama regional ASEAN, masalah Kampuchea, dan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah; dan masalah-masalah global yang berpengaruh terhadap berbagai negara, seperti soal komoditi strategis dan perkembangan teknologi baru, hak-hak asasi manusia, dan hak-hak pemilikan intelektual.

Kebijaksanaan Dasar

Dalam melaksanakan program-program kegiatan Departemen Hubungan Luar Negeri DPP menempuh beberapa langkah dan cara, yang dipandang dapat sekaligus meliput berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Analisa, yang merupakan penilaian terhadap perkembangan regional dan internasional yang berpengaruh terhadap Indonesia; (2) Studi dan Pendalaman,

Jusuf Wanandi

yang merupakan usaha memahami berbagai masalah regional dan internasional baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sebagai masukan untuk disumbangkan kepada pemerintah dan masyarakat; (3) Publikasi dan Informasi, yang mencakup penyebarluasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Hubungan Luar Negeri dan penulisan di media massa tentang masalah-masalah internasional untuk merangsang masyarakat luas memahami masalah-masalah yang dihadapi Indonesia maupun dunia internasional; (4) Kerjasama dengan berbagai lembaga, yang sifatnya adalah untuk mencapai dan mendukung maksud-maksud seperti tertuang dalam butir (1), (2) dan (3); dan (5) Kaderisasi, yang sifatnya adalah untuk mendidik dan membina tenaga-tenaga muda memahami masalah-masalah luar negeri Indonesia dan masalah-masalah internasional pada umumnya.

Departemen Hublu berupaya memberikan sumbangan positif

Oleh sebab itu langkah-langkah dan cara yang ditempuh oleh Departemen Hubungan Luar Negeri untuk menampung kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya meliputi tiga hal:

(1) Pada tanggal 14 Februari 1985 membentuk Kelompok Kerja Departemen Hubungan Luar Negeri, beranggotakan 36 orang dari berbagai kalangan, untuk secara sistematis melakukan penjabaran kegiatan Program Umum Golkar di bidang hubungan luar negeri dan juga diharapkan dapat menjadi "motor" dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Departemen.

(2) Menyelenggarakan seminar-seminar, diskusi-diskusi, dan penulisan-penulisan tentang berbagai masalah luar negeri Indonesia dan masalah-masalah internasional.

(3) Kerjasama dengan berbagai pihak baik sebagai narasumber dalam memahami berbagai masalah luar negeri maupun sebagai pendukung kegiatan.

Kegiatan-kegiatan Pokok

Secara umum kegiatan-kegiatan yang mencakup Analisa, Studi dan Pendalaman, Seminar dan Diskusi merupakan kegiatan yang paling menonjol selama periode 1983-1988. Kegiatan-kegiatan ini telah menjadi kegiatan rutin dari Departemen Hubungan Luar Negeri sejak bulan Februari 1985. Terbentuknya Kelompok Kerja Departemen Hubungan Luar Negeri memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dan secara demikian sekaligus diharapkan terjadinya proses kaderisasi anggota-anggota dan tenaga muda serta simpatisan Golongan Karya dalam bidang hubungan luar negeri.

Digitized by Google

Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam bidang ini dapat dibagi ke dalam bentuk diskusi dan diskusi panel. Untuk diskusi panel pada umumnya pembicara memberikan makalah dan bahan-bahan tertulis, sedangkan dalam diskusi-diskusi pada umumnya disertai dengan makalah. Kegiatan-kegiatan diskusi ini diselenggarakan atas dasar kepentingan yang bersifat aktual dan relevan.

Sejak bulan Februari 1985 hingga bulan Agustus 1988 telah diselenggarakan 24 kali seminar dan diskusi. Berbagai pembicara yang terdiri dari tokoh-tokoh pemerintahan, masyarakat, pengamat/peneliti masalah-masalah internasional, politik, ekonomi, dan akademisi telah menyumbangkan pandangannya. Selain dihadiri oleh anggota Kelompok Kerja sendiri, seminar-seminar dan diskusi-diskusi umumnya dihadiri oleh berbagai kalangan. Tetapi terdapat pula diskusi-diskusi yang hanya dihadiri oleh anggota Kelompok Kerja saja, yang sifatnya terutama untuk pendalaman atas sesuatu masalah.

Guna melancarkan kegiatan-kegiatannya, Departemen Hubungan Luar Negeri melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintahan maupun swasta, terutama lembaga-lembaga yang mempunyai kaitan dengan perumusan kebijakan politik luar negeri maupun lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan penelitian masalah-masalah luar negeri dan internasional. Untuk sekedar menyebut beberapa, kerjasama dijalin dengan Departemen Luar Negeri, CSIS dan ISAFIS.

Usaha lainnya yang dilakukan oleh Departemen Hubungan Luar Negeri adalah mengajak masyarakat luas untuk lebih menyadari masalah-masalah luar negeri Indonesia dan memahami beberapa masalah internasional khususnya yang mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia. Hal ini dilakukan karena makin disadari bahwa sebagian dari kepentingan-kepentingan Indonesia juga berada di luar batas-batas wilayah nasional sehingga usaha memahami lingkungan eksternal merupakan salah satu kewajiban yang tidak terelakkan.

Departemen Hubungan Luar Negeri menempuh dua cara untuk mencapai maksud-maksud tersebut: (1) Mengundang para pimpinan redaksi atau para wartawan beberapa surat kabar dan majalah serta TVRI untuk mengikuti, meliput seminar-seminar, diskusi-diskusi panel dan diskusi-diskusi yang diselenggarakan dan kemudian mewartakannya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Hubungan Luar Negeri DPP Golongan Karya dapat tersebar dan diketahui oleh masyarakat luas.

(2) Bekerjasama dengan *Media Karya* untuk memuat tulisan-tulisan/analisa-analisa masalah-masalah luar negeri dan internasional yang dikoordinasi oleh Kelompok Kerja Hubungan Luar Negeri. Sekitar 35 topik masalah internasional telah dimuat dalam *Media Karya*.

Harapan

Departemen Hubungan Luar Negeri DPP Golongan Karya melalui Kelompok Kerjanya telah berupaya memberi sumbangan positif terutama berupa pemikiran-pemikiran mengenai berbagai masalah hubungan luar negeri bagi kalangan pemerintah dan masyarakat. Lingkungan Golongan Karya sendiri diharapkan dapat tetap memiliki perspektif yang memadai tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi internasional pada umumnya.

Departemen Hubungan Luar Negeri bermaksud memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, termasuk dengan kalangan Universitas di berbagai daerah untuk lebih "memasyarakatkan" masalah-masalah luar negeri dan internasional. Tetapi untuk itu kiranya masih diperlukan waktu dan perencanaan yang lebih matang karena hingga kini Departemen Hubungan Luar Negeri belum dapat melakukannya.

Kelompok Kerja mengharapkan agar di masa mendatang, kegiatan-kegiatan beserta hasil-hasil yang dirintis dan dicapai ataupun yang belum terlaksana selama ini dapat dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan oleh Kelompok Kerja periode selanjutnya. Dengan demikian, Kelompok Kerja Departemen Hubungan Luar Negeri tetap turut aktif memantapkan peranan Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik dalam menyumbangkan pemikiran mengenai masalah-masalah hubungan luar negeri dan internasional yang aktual dan relevan.□

Pimpinan/Direksi dan Segenap Karyawan
dalam wadah
Badan Kerjasama Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur
PD Aneka Pangan — PD Sarana Bangunan — PD Aneka Kimia
PD Aneka Jasa & Permesinan — PD Aneka Usaha

Mengucapkan:

"Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988"
d a n
"Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Golkar Tingkat I Seluruh Indonesia Periode 1988-1993

Sampai dengan akhir September, sesuai jadwal yang ditetapkan DPP Golkar, telah rampung pelaksanaan musda Golkar Tingkat I seluruh Indonesia. Untuk memperoleh data yang lengkap tentang personalia pimpinan Golkar Tingkat I seluruh Indonesia masa bakti 1988-1993, *Media Karya* menurunkan lengkap daftar personalia tersebut disertai biro-bironya. Semoga bermanfaat.

Daerah Istimewa Aceh: (1) Drs. Abdoellah Moeda, Ketua; (2) Drs. H. Asnawi Husin, Wakil Ketua; (3) Abdullah Masry, Wakil Ketua; (4) HT Darwin, Wakil Ketua; (5) Drs. TA Hamid, MAB, Sekretaris; (6) Drs. Anwar Zeats, Wakil Sekretaris; (7) Mawardi Ismail, SH, Wakil Sekretaris; (8) Drs Muchtar Achmadi, Wakil Sekretaris; (9) Drs. H. Syamsunan Mahmud, Bendahara; (10) HM Noer Nekmat, Wakil Bendahara; (11) Ny. Rohani A. Madjid Ibrahim, Wakil Bendahara.

(12) Ir HA Muluk, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) H Ibrahim Kaoy, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Ali Sulaiman SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) A. Hamid. M, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. H. Mochtar Jalal, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Shabirin Moesa, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) T. Syarief Alamuddin, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Syamsul Kahar, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Hasbi Yakob, SH, MS, Ketua Biro Pemuda; (21) Ir. T. Zainal Arifin Panglima Polem, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. HM. Noer Gaybita, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) H. Zainuddin Hamid, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. Djalaluddin Hasan, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. HM. Noer Yoesoef, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ny. H. Armiati Hasbi, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Ny. Cut Cayarani Bitai, Ketua Biro Wanita; (28)Drs. Azhari Basyar, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. M. Husin A. Wahab, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Dr. Dayan Dawood, MA, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) dr. Ibnu Chatab Ubit, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. M Nur Husin, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ir. Zaini Rahman, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Sumatera Utara: (1) Mudyono, Ketua; (2) H. Pandapotan Nasution, Wakil Ketua; (3) H. Burhanuddin Napitupulu, Wakil Ketua; (4) Drs. Tumpak Manurung, Wakil Ketua; (5) Drs. Agusman Sutan Basa, Sekretaris; (6) Drs. Edward Simanjuntak, Wakil Sekretaris; (7) H. Zainuddin Tandjung, Wakil Sekretaris; (8) dr. T. Syaifuddin S, Wakil Sekretaris; (9) Drs. HM Junus Harahap, Bendahara; (10) Drs. Ihutan Ritonga, Wakil Bendahara; (11) Drs. Eswin Setiawan, Wakil Bendahara.

(12) Mansen Purba, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. R. Amrul, SmHK, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Alfian Andri, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Nurdin Lubis, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. FJ. Pinem, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) dr. Dimpos H. Sibuea, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) M. Yazid, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) HA. Wahab Nasution, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) drg. A. Wahab Sugiharto, Ketua Biro Pemuda; (21) Mahmuddin Lubis SS.AM, Ketua Biro Pemuda.

(22) Drs. Jusuf Pehulisa Sitepu, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. MPH. Tobing, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) T. Ferdinand Simangunsong, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Makmur Azis, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Hj. Aslah Izin Purba, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Risnawaty Dartatik Damanik, Ketua Biro Wanita; (28)Drs. HM. Shaleh Harahap, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Sotuho M. Dachi, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Prof. Drs. Pamimpin Siagian, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) dr. Ruslani D. DTPH, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. Asli Baroes, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Sumatera Barat: (1) Prof. Djamil Bakar, Ketua; (2) Hamri Ramli, Wakil Ketua; (3) Drs. Masri MS, Wakil Ketua; (4) Drs. Bagindo Leter, Wakil Ketua; (5) SM. Taufik Taib, SH, Sekretaris; (6) Ir. Hasan Basri Nasution, Wakil Sekretaris; (7) Azmalzun BSc, Wakil Sekretaris; (8) Ir. Suwatri, Wakil Sekretaris; (9) Drs. Syarip Ali, Bendahara; (10) Marizal Umar, Wakil Bendahara; (11) Ir. Surya Hadiputra, Wakil Bendahara.

(12) Drs. Suaib Karsono, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Sofyan Karim, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Ahmad Husen Datok Pintu Basah, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Ir. Muchlis Rifai, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Anas Syafei, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Dr. Aswin Abdullah, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Kamardi Rais Datok B Limoli, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Anas Lubuk, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Yonda Bahrum Jakar, Ketua Biro Pemuda; (21) Irwan Anas Malik, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. Noor Irawan, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Sofian Tamar, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Darwis Jalil, SH, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) H. Marah Sofian Ramelan, SH, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Pudji Susilo, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Tati Basirudin, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. H. Agus-lir Nar, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. H. Yusran Ilyas, Ketua Biro Ke-

Digitized by Google

Bank kami bukan
sekedar memberi pelayanan,
tapi juga ......

KEUNTUNGAN

Cobalah tempatkan dana Anda pada :

- Rekg. Giro
- Tabanas/Taska
- Deposito Berjangka
  dan
- Sertifikat Deposito
  Bank Dagang Negara

BANK DAGANG NEGARA

Kantor Pusat : Jl.M.H. Thamrin No. 5 Jakarta
Telepon : 321707 dan 3800.800, Tromol Pos : 338 Jkt, alamat Kawat : Stacopus.
Telex : 61628 bdnuln ia, 61632 bdnudn ia, 61622 bdnkp ia.
Fax : (021) 323.618

Digitized by Google

Direksi & Segenap Karyawan

DMK P.T. DHISA MANUNGGAL KARYA

PENYALUR ASBES GELOMBANG
PRODUKSI

PT Eternit Gresik

PT. ATRISCO MUTIARA ASBESTOS CEMENT INDUSTRI
PENGADAAN KONTRUKSI KERANGKA BAJA
KHUSUS SD. INPRES

USAHA:

PERDAGANGAN JASA

1. Jasa Biro Tehnik Umum, Perencana, Pelaksana Pembangunan, Real Estate, Pengangkutan barang, Instalatir.

PERDAGANGAN UMUM

2. Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Bahan Bangunan, Alat Tehnik, Listrik elektronika, Mebelair.

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988"

D A N

"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL KE IV" GOLONGAN KARYA

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

Digitized by Google

rokhanian; (30) Dr. Sabarudin Abas, MPH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Asnan Rachman, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. Syofian Marsudin, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. Muhamad Zein P, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Riau: (1) Ir. H. Firdaus Malik, Ketua; (2) Drs. Darwis Riga, Wakil Ketua; (3) KH. Abdul Kadir MZ, Wakil Ketua; (4) H. Asrul Harun, Wakil Ketua; (5) Drs. H. Ismed Harunsyah, Sekretaris; (6) Elidar Chaidir, SH, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Ruspan Amad, Wakil Sekretaris; (8) Drs. Ruskin Nar, Wakil Sekretaris; (9) Hape Siregar, Bendahara; (10) Drs. Darmansyah, Wakil Bendahara; (11) Drs. Kusnan Kusen, Wakil Bendahara.

(12) Drs. HM. Zen Roy, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) H. Jupri Hasan Basri, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. ML. Turuan, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Maryadi, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. H. Arifin DF, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Dra. Tatik Armoy, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. Asparaini Rozak, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Riza Liyanti, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Herman Abdullah, Ketua Biro Pemuda; (21) Drs. Hendro Ekwarso, Ketua Biro Pemuda.

(22) Drs. HA. Pane, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. Muhar Efendi, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) H. Sukur Insan, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Burhan Yunus, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ros Nani Yar, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Roktini Tarbarini, Ketua Biro Wanita; (28) H. Abdul Jafar Usman, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. HE. Dahman Yunan, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Anwar Saleh, MPH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Raja Adenan Daud, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Prof. Drs. Suwardi MS, Marsudin, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) H. Backri K. BA, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Jambi: (1) Ismail B.H. Daud, Ketua; (2) Drs. H. Abdul Rachman Sayuti, Wakil Ketua; (3) Dra. Hj. Yuniwati Maskun Sofyan, Wakil Ketua; (4) Toni Efendi Manaf, SH, Wakil Ketua; (5) Drs. Mochyan Tambase, Sekretaris; (6) H. Fachrul Rahman, SH, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Ahmad Abdullah, Wakil Sekretaris; (8) Ir. T. Isbandi, Wakil Sekretaris; (9) Asnawi Nasution, Bendahara; (10) Drs. Machmudin ADN, Wakil Bendahara; (11) Suhaemi, Wakil Bendahara.

(12) Drs. A. Karip Abas, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Ir. Sarman, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Hendrik Hasan, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Jalil, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. H. Umarudin, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Baharudin Kasim, SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. M. Noor Hamzah, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drs. Amri Amir, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Anis Bafadal, SH, Ketua Biro Pemuda; (21) Fahrudin Rozi, SH, Ketua Biro Pemuda.

(22) Suyanto, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Imron Abdullah, BA, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Masnis Ayo BSc, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Syaiful Bachkri Arpan, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Hj. Siti Rubiah Ashari, Ketua Biro Wanita; (27) Nn. Halimah Usman, SH, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. Jufri Alidrus, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. Solaiman Abdullah, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Ruslan Baharudin, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) H. Himsar Siregar SKM, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. H. Murtejo Sulaksono, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. H. Malian Ahmad, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Bengkulu: (1) Drs. HA. Razie Jachya, Ketua; (2) Hamzah Syamsuddin, Wakil Ketua; (3) Achmad Rusli SH, Wakil Ketua; (4) Drs. Hudzaifah Ismail, Wakil Ketua; (5) Drs. Adjis Ahmad, Sekretaris; (6) Mardi Jusuf BSc, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Musiardanis MSc, Wakil Sekretaris; (8) Amran Marzuki SH, Wakil Sekretaris; (9) Drs. Salman Rupni, Bendahara; (10) Drs. Saliman Gimin, Wakil Bendahara; (11) Ny. Salmah Maulana, Wakil Bendahara.

(12) Har Bastian, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Umar SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) A. Aziz Wahab, BA, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Mardiansyah, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Zainuddin Yasul, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Rofi'i, BSc, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. Cairuddin, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Darmawi Hasan BA, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Zainuddin Manan, SME, Ketua Biro Pemuda; (21) Zenithar Nawawi, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. Mangsuri Thaib, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Drs. Basyirin Ali, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. Rifai Fattah, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Amanah Nasrun, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Asmarani Djangdjaya, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Nini Kharani, Ketua Biro Wanita; (28) Baharuddin, DJ, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. Alwi Hasbullah, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. M. Sabri Mahrib, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) R. Partomo Rahim, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. Aliminsky, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ir. Syarifuddin Cholik, MSc, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Sumatera Selatan: (1) Hatta Mustafa, SH, Ketua; (2) Drs. H. Alhadi Haq, Wakil Ketua; (3) Drs. H. Noviarman Kailani, Wakil Ketua; (4) Dra. Zamroh Satar, Wakil Ketua; (5) Karsidi, SH, Sekretaris; (6) Ir. Wasista B. Utoyo, Wakil Sekretaris; (7) M. Sani Indawan, SH, Wakil Sekretaris; (8) Hafni, AS, Wakil Sekretaris; (9) Syaiful, MD, Bendahara; (10) MH. Ritonga, Wakil Bendahara; (11) Ir. Ucok Hidayat, Wakil Bendahara.

Digitized by Google

(12) Drs. Zamzami Ahmad, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) HM. Amin Masa, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) H. Rokian Cik Ubir, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Ir. Helman Effendy, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Hasan Ibrahim, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Ir. Iskandar Syabirin, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Ramli Sutanegara, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drs. Rusli Rahman, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Ir. Achmad Syafriar, Ketua Biro Pemuda; (21) Hersan Tambuh Semendawai, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. Rusdi C. Tamimi, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) A. Aziz Majid, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) A. Hamid Toeah, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Kahar Muzakkir, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Triyati Ibrahim Somad, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. H. Ina Kireina Soemarsono, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. H. Azom Romli, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. Amir Haromain, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Ayimil Gani, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Amir Hamzah, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. H. Lipurnaim, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Dr. Agus Prawiraprapta, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Lampung: (1) HI. K. Sutomo, Ketua; (2) Hairifasyah, SH, Wakil Ketua; (3) HI. Djafar Amid, Wakil Ketua; (4) Ny. Hj. Utiah Helmi, SH, Wakil Ketua; (5) Drs. Sudarsono, Sekretaris; (6) Effendi Hasan SE, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Eddy Sutrisno MSc, Wakil Sekretaris; (8) HI. Muhaimin Kohar, Wakil Sekretaris; (9) Drs. HI. M. Syarifuddin, Bendahara; (10) Arifin Jayanegara SH, Wakil Bendahara; (11) Nazaruddin Indrawan, Wakil Bendahara.

(12) Zulkarnain, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) HI. Fachruddin Machdum, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Guritno, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Dailami Zain, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Syajono HS, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Kadarsyah Irsa, SE, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Eko Wahono BA, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Martubi Makki, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Iskandar Saleh, SE, Ketua Biro Pemuda; (21) Toni Eka Chandra, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. GN. Sudarmedi, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) M. Fuad Muaddin Yusuf SH, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Tarmizi S Raya, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Indra Zainal Abidin PA, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Ida Zaini, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Ny. Kurniati Sugianto, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. HI. Musa Sueb MA, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. HI. Aswan Yaman, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Syarifuddin Effendi SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Dra. Ermawati Cik Aman, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. Rachmat Abdullah, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ibnu Hajar, SE, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

DKI Jakarta: (1) M. Basofi, Ketua; (2) Djoko Suwindi, SH, Wakil Ketua; (3) Drs. FMT. Rajagukguk, Wakil Ketua; (4) Dra. Ny. H. Erna Suparman, Wakil Ketua; (5) Drs. HM. Latief Mustafa, Sekretaris; (6) Fathomy Azaari, SH, Wakil Sekretaris; (7) Dr. Atje Mulyadi, Wakil Sekretaris; (8) Watty Amir, Wakil Sekretaris; (9) Ir. Fauzi Bowo, Bendahara; (10) Drs. Lutfi Ismail, Wakil Bendahara; (11) H. Azhar Muhamad, Wakil Bendahara.

(12) HMU. Djajanto, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Ade Surapriatna, BSc, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Dr. FX. Subagyo, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Ir. Arie P. Bintana, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Ruhut Sitompul, SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Amier Ary Armas, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. Chosin Husnin, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Banjar Marpaung, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Ir. Sugeng Supriatna, Ketua Biro Pemuda; (21) H. Susanto, Ketua Biro Pemuda.

(22) Amin Djayasaputra, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) H. Yan Winatasasmita, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. Fauzi Ibrahim, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Riswan H. Nasution, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Tati Darwin, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. H. Anna Sentot, Ketua Biro Wanita; (28) H. Syukur Yakub, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Ny. Dra. Mariyam Achmad, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Nitra Arsyad, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Dr. Sony L. Tobing, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. Slamet Limbong, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ny. Ir. Ami Suharti Yussuryana, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Jawa Barat: (1) H. Agus Muhyidin, Ketua; (2) Ir. H. Arifin Yusuf, Wakil Ketua; (3) Ir. H. Lili Asdjudiredja, Wakil Ketua; (4) Yana Sutiyana, Wakil Ketua; (5) Dra. Ny. Nike Kuryana, Sekretaris; (6) Drs. Eldie Suwandie, Wakil Sekretaris; (7) Dada Rosada SH, Wakil Sekretaris; (8) Drs. H. Enum Hadisumitra, Wakil Sekretaris; (9) Drs. H. Rachmat Iskandar, Bendahara; (10) Ny. Tuty Hayati Mustafa, Wakil Bendahara; (11) Drs. Wasma Prayitno, Wakil Bendahara.

(12) H. Azis Sungkono, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) H. Hardisusilo, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) HM. Tanjung, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) H. Dedi Syarifudin Taher, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) HR. Taman Sastradikarna, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs H Azhari, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) HSA Yusacc, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Chumasno Dipo, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Upa Sapari, Ketua Biro Pemuda; (21) Ir. Hendro Trisulo, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. Awal Kusumah, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. Sulaeman Pinatabrata, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Rachmat Amir, Ketua Biro

Digitized by Google

Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Sy. Alamsah, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Usman Mukmin, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Atty Andjar Rachman SH, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. H. Usman Effendi, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. KH. Olih Komarudin, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. H. Engking Soewarman Hasan, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) H. Adjan Sudjana, SE, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Dra H Redjaningrum, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drg. Avip Saefullah, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Jawa Tengah: (1) Drs. H. Suparto, Ketua; (2) Ir. Sukorahardjo, Wakil Ketua; (3) Oetoyo Mardi, Ba, Wakil Ketua; (4) DR. Maladi, SH, Wakil Ketua; (5) Acak Suwangsa, Sekretaris; (6) I. Sumartoyo, SH, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Wahyono, Wakil Sekretaris; (8) Bambang Moerwanto, SH, Wakil Sekretaris; (9) Achmad Iskandar, Bendahara; (10) Ny. Amin Sudibyo, SH, Wakil Bendahara; (11) Sundoro, BA, Wakil Bendahara.

(12) Drs. Winarno Suryohadisubroto, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Muhamad Nasrun, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Udang Sudarsono, BA, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) I. Made Pande, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Hartoyo, BA, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Ny. Soewarno Djoyomardowo, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Ismawan DS, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Bambang Sadono, SH, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Dra. Ny. Kristin Sumarni Laksono, Ketua Biro Pemuda; (21) H. Khaeroni BcHk, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. Gatot Adji Soetopo, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ny. Sutarti Swasono, SH, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Tambah Sudio, BA, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Soekarno Djayus, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Sih Waluyo, BA, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Pramono, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. H. Achmad Darodji, Ketua Biro Kerokhanian; (29) KH. Muhamad Fatoni, BA, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Ir. Sudjadi, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. AT. Soegito, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. Bambang Sumantri, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ir. Suwanto Waluyono, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

D.I. Yogyakarta: (1) KGPH. H. Mangkubumi SH, Ketua; (2) Soedarno S, Wakil Ketua; (3) Drs Pariata Westra, SH, Wakil Ketua; (4) Drs. H Arifin Ilyas, Wakil Ketua; (5) Sudarno, Sekretaris; (6) Drs. Khaeruddin, Wakil Sekretaris; (7) Sukarno, Wakil Sekretaris; (8) Drs Mangaraja Hutauruk, Wakil Sekretaris; (9) Adi Sutrisno, Bendahara; (10) Ny. Wardhono, Wakil Bendahara; (11) Bambang Wicaksono, BE, Wakil Bendahara.

(12) Drs. R Subroto, SU, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Anwar Widjianto, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Ir Gatot Murdjito, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Bambang Nugroho, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Syawal Hardjoprayitno, BA, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Sapto Adi Handriyantoro, BE, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) R. Sutadi, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drg. Ircham Machfud, SU, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) GBPH. Joyokusumo, Ketua Biro Pemuda; (21) Herry Surwantyo, BE, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. Yulianto, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. Ayitsih Sayekti, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. Sudardi, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Ir. Rumintarto, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Djoko Mardagung, Ketua Biro Wani-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
BADAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
PARKIR
(BP-2 PARKIR)
Mengucapkan:
Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988
d a n
Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV
Semoga tercapai Cita-cita Perjuangan Golkar demi Kesinambungan
Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

ta; (27) Ny. Sulistyo, Ketua Biro Wanita; (28) Drs Nasruddin Harahap, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Dr. R. Judo Wibowopurwowidagdo, MA, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Prof. Dr. Soebronto Prodjo Harjono, MSc, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Suyanto, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. Busron Masduki, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. L. Setya Rohadi, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Jawa Timur: (1) Moch. Said, Ketua; (2) Hasril Harun, Wakil Ketua; (3) HA. Hudan Dardiri, Wakil Ketua; (4) Drs. Bambang Koes Bandono, Wakil Ketua; (5) Drs. Widarto, Sekretaris; (6) Drs. Ali Warno, Wakil Sekretaris; (7) Mochamad, BA, Wakil Sekretaris; (8) Drs Ec. Haribowo Soekotjo, Wakil Sekretaris; (9) Arief Santoso, SH, Bendahara; (10) Ny. Indrawati Tarmudji, Wakil Bendahara; (11) Ir. Soeharjono, Wakil Bendahara.

(12) Indra Prajitno, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Soentoro Hoediasmoro, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Anton Prijatno, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Soekarwo, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Didik Soekardi Adi Pranoto, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Lambertus Wajong, BSc, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Moch. Binsyech Abu Yani, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Dahlan Iskan, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. HRB. Muhd. Rofik Kusumodilogo, SH, Ketua Biro Pemuda; (21) R. Soedarman, Ketua Biro Pemuda.

(22) HM. Koesnan, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. CM. Hariwardjono, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. Med Ismoe Handoko, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Aruman, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Budi Darma, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Ny. Soemarmi Mamooh Suryaningprang, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. Bisri Affandi, MA, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. M. Sahlan, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Naya Sudjana, MA, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Soebjakto, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. Harjono Sigit, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Dr. Komang Wiarsa Sardjana, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Bali: (1) I Dewa Gde Oka, Ketua; (2) Ida Bagus Suandha Wisnawa, SH, Wakil Ketua; (3) Anak Agung Ngurah Manik Parasara, Wakil Ketua; (4) Drs. Gede Mastera, Wakil Ketua; (5) I Nyoman Sugiri, SH, Sekretaris; (6) Drs. Redha Gunawan, Wakil Sekretaris; (7) I Gusti Putu Wijaya SH, Wakil Sekretaris; (8) I Wayan Suambara, SH, Wakil Sekretaris; (9) I Wayan Waya, SH, Bendahara; (10) I Gusti Ayu Djanawati, SH, Wakil Bendahara; (11) Ketut Upadana, SH, Wakil Bendahara.

(12) Drs. Ida Bagus Gunadha, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Ida Bagus Pangjaya, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Tjokorda Ngurah Mayun Samirana, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Putu Kusuma Negara, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) I Ketut Mertha, SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs. Nyoman Wistha Darmada, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. Ketut Wiratha Sindhu, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Ny. IAS Wirati Diwangkara, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) I Gusti Ngurah Oka Darmawan, SH, Ketua Biro Pemuda; (21) Drs. AA Arka Hardiana, Ketua Biro Pemuda.

(22) Drs. Nyoman Budhiarta, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Drs. Made Suardi Wiryasutha, BBA, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) I Gusti Agung Ngurah Bagus, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) I Wayan Suweta, SmHk, Ke-

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PGRI SURABAYA
Status Terdaftar SK Mendikbud 070/0/85
Jl. Ngagel Dadi III B — 37 Surabava Telp. 60097

MENGUCAPKAN :
DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV 20 OKTOBER 1988

DAN

SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

tua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Tisnawati Karna, SH, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Noer Asmoro Soetjipto, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. Nengah Sudarma, Ketua Biro Kerokhanian; (29) H. Roichan Muklis, Ketua Biro Kerokhanian; (30) DR. I Made Bandem, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Ir. Bagus Ketut Lodji, MS, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) I Dewa Gede Atmadja, SH, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) I Ketut Rai Setiabudhi, SH. MS, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Nusa Tenggara Barat: (1) Lukman SR, Ketua; (2) Drs. H. Lalu Mudjitahid, Wakil Ketua; (3) Drs. Lalu Serinata, Wakil Ketua; (4) Drs. Machfud Achmad, Wakil Ketua; (5) Drs. M. Nur AK, Sekretaris; (6) Drs. Wahyono, Wakil Sekretaris; (7) Drs. M. Yusuf Abuhuraerah, Wakil Sekretaris; (8) Lalu Kasmawi, SH, Wakil Sekretaris; (9) Drs. H. Umar Yusuf, Bendahara; (10) H. Djalaluddin Gahraf, Wakil Bendahara; (11) Dra. Ny. H. Nurjanah Mahsun, Wakil Bendahara.

(12) HA. Amin, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. H. Iskandar, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) I Gde Kusmayadi, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) HM Thohri AM, BA, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Mansyur Ismail, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs. Bernardus Sore, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Chairul Makmursyah, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Lalu Moh. Syamsir, SH, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. M. Natsir Ipapy, Ketua Biro Pemuda; (21) Lale Suryatni Marzuki, Ketua Biro Pemuda.

(22) Lalu Gde Suparman, BA, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) I Wayan Kalianget Mona, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. Suroyo BBA, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) A. CH. Suherno, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ny. HS Paryono, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Sudarnoto, Ketua Biro Wanita; (28) H. Achmad Usman, Ketua Biro Kerokhanian; (29) H. Ma'shum Achmad AM, BA, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Umar Siradz, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. M. Ainul Asikin, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) H. Lalu Said Ruhpina, SH, MS, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ir. Abdullah MT, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Nusa Tenggara Timur: (1) Jan Jos Botha, Ketua; (2) TH. Djami, SH, Wakil Ketua; (3) Firmus W. Wangge, Wakil Ketua; (4) Umbu Dapasapu, SH, Wakil Ketua; (5) P.L. Gasperz, Sekretaris; (6) Felix Jos Pullu, SH, Wakil Sekretaris; (7) Rasyid Kiah, Wakil Sekretaris; (8) Drs. Acry Deo Datus, Wakil Sekretaris; (9) Ir. E. Saudale, Bendahara; (10) Stanis Tefa, SH, Wakil Bendahara; (11) Ny. Rambu Mina Kapita Djukatana, Wakil Bendahara.

(12) MHJ. Pelt, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Umbu Makam Bombu, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Ir. John Manafe, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Fr.X. Siola, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Domi Djemaun, SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs. Daniel Adoe, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. Fabi Latu Batara, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Quido Taboy, BA, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. Alo Bone, Ketua Biro Pemuda; (21) Ir Eston Foenay, Ketua Biro Pemuda.

(22) Raymundus Lema, BSc, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ali Abdullah, BA, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Drs. PB. Keraf, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Pieter Gontani, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Sherley Tobe, BA, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. M. Marunduri, Ketua Biro Wanita; (28) J.ST. Jusuf, STH, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Mathias Sarumaha, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs M Taopan, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) dr. Agus Berek, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. Adhi Dharmawan, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. Dedu Ngara, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Kalimantan Barat: (1) H. Soedjiman, Ketua; (2) Drs. H. Jimmi Mohamad Ibrahim, Wakil Ketua; (3) RA. Rachmad Sahudin, BSc, Wakil Ketua; (4) Drs. Koestarto, Wakil Ketua; (5) Drs. Djawari, Sekretaris; (6) R. Sarwono WHD, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Willem Amat, BA, Wakil Sekretaris; (8) M. Husny Thamrin, SH, Wakil Sekretaris; (9) Drs. Eka Kawirayu, Bendahara; (10) Drs. R. Juris Mening, Wakil Bendahara; (11) Drs. H. Syofyan Janir, Wakil Bendahara.

(12) Drs. ML. Goye, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Ponimin, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) T. Arsen Rickson, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Hendry Jurnawan, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Gusti Syamsumin, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Tabrani Hadi, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. M. Syarif Kasim, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Bey Yakob, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. Rusman Namsuri, Ketua Biro Pemuda; (21) Drs. M. Ikot Rinding, Ketua Biro Pemuda.

(22) Demetrius Kistoro, SH, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ali Achmad Hidrus, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Tribowo Kuntjoro Soebiandono, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) P. Widjaja Tandra, SH, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ny. Anna Noeraini Soekartono, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Julita N. Iman Kalis, Ketua Biro Wanita; (28) H.Sy. Muh. Assyahab, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Paulus Nyerom Kanoh, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Ir. Sakunto, MA, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Syamsudin Djahmat, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Prof. Dr. Hendro Suroyo Sudagung, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. Hanafi H. Kadir, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Kalimantan Tengah: (1) H. Soeshandoko, Ketua; (2) Manase

Digitized by Google

Pahu, Wakil Ketua; (3) Drs. H. Dwiter Mangkusari, Wakil Ketua; (4) Ny. Pantjar Dewel Gawei, Wakil Ketua; (5) Ir. Imam M. Muhardio, Sekretaris; (6) Drs. GM. Afhanie, Wakil Sekretaris; (7) Drs. Oka Swastika, Wakil Sekretaris; (8) Liwan Toemon, SH, Wakil Sekretaris; (9) R. Atu Narang, SE, Bendahara; (10) Dra. Ny. Hosiana Lobo Elbaar, Wakil Bendahara; (11) Ir. RB Wijono, Wakil Bendahara.

(12) H. Syahminin Kaderi, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Belman Nyangkal, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. Dinus Biem, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) WCW Hengstz, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Budi Siswanto, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs. HM. Husni, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) A. Manan Rachman, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Abdul Madjid, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Ir. B. Saptanoesa Wenthe, Ketua Biro Pemuda; (21) Ir. H. Sjahrani Sjahrin, Ketua Biro Pemuda.

(22) Jan Hadrianus Ratih, BSc, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Simal Penyang, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Soeleman Silam, BA, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Leon Kenan Aji, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Ida Datikah Sjachjar, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Erly Lane Upen Liwin, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. HM. Saleh Harun, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Pdt. Prapatriotis H Oedoy, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Wahidin M. Usop, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Hendro Susetyo, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Prof. Dra. Ny. Saulina Pandjaitan, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) HM Dirdja Mambang, BA, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Kalimantan Selatan: (1) HM. Ismail Abdullah, Ketua; (2) Drs. H. GT. Hasan Aman, Wakil Ketua; (3) H. Husni Thamrin, SH, Wakil Ketua; (4) M. Arsyad, Wakil Ketua; (5) Husein, Sekretaris; (6) Ny. H. Asma Amran, SH, Wakil Sekretaris; (7) Anang Jamhuri, BBA, Wakil Sekretaris; (8) Drs. Firdaus Mansyori, Wakil Sekretaris; (9) H. Taufik Effendie, Bendahara; (10) Ny. HS. Rusmilawati Zain, Wakil Bendahara; (11) H. Anang Yusnie, Wakil Bendahara.

(12) Drs. M. Thamrin Asan, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) HM. Ardansyah, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. H. Abdullah Sani, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. M. Arifin, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Aspul Fansuri, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) M. Bahriar Hanafy, SH (Toto), Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. HJ. Jok Mentaya, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drs. H. Wachudi Talkum, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. Syarifuddin Ilmi, Ketua Biro Pemuda; (21) Ahmadi Noor Supit, Ketua Biro Pemuda.

(22) Syakhrani Saberan, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) H. Yusri Kaderi, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) HM. Husni, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Addy Chairuddin, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Mellyani Syari Musaffa, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Isye Suhartati Obar Sobari, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. HM. Asywadie Syukur LC, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. H. Tarmidzi Amri, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Dr. HM. Hanafiah, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Bu-

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV
20 Oktober 1988
d a n
Sukseskan Musyawarah Nasional
Golongan Karya Ke IV

Semoga tercapai cita-cita dan Perjuangan Golkar
Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru.

Pengurus KORPRI Unit Bank Indonesia
Sekretariat: Jln. Kebon Sirih no. 78 Tlp. 374108 Pes. 340
JAKARTA.

Digitized by Google

daya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Hamdani KS, BA, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) DR.Ir.H. Ali Hasymi.MS,MA, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Rosita Saifuddin, SH, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Kalimantan Timur: (1) H. Eddy Suchaedi, BA, Ketua; (2) H. Syarifuddin Gairach, Wakil Ketua; (3) H. Saleh Nafsi, SH, Wakil Ketua; (4) Adam Marwatief, SH, Wakil Ketua; (5) Zimmi Nata, BA, Sekretaris; (6) Drs. Abdussamad, Wakil Sekretaris; (7) Drs. HS. Alwy AS, Wakil Sekretaris; (8) Drs. Mulyadi SJ.P, Wakil Sekretaris; (9) Achmad Ridjani, BA, Bendahara; (10) Drs. HM. Rusli, Wakil Bendahara; (11) Ny. H. Qoniah Qodim Asyhari, BA, Wakil Bendahara.

(12) Nur Aliansyah, BA, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Pilipus Gaing, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. Achmad Syarifuddin, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. H. Syahrir Basran, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Chairuddin, BA, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Acmad Hanan, SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) HM. Saleh Djaya, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Imdaad Hamid, SE, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. Akhmad Husni Juhri, Ketua Biro Pemuda; (21) Drs. M. Umriyansjah, Ketua Biro Pemuda.

(22) Darsono KM, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Drs. H. Anwar Soetoen, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) HA. Rafioel Rifaddin, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Andas P. Tanri, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) H. Dayang Arhariah Ishak, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Siti Rohani Asyhari, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. HA. Tarmidzi Ismail, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Dra. Ny. Siti Muriah, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Ir. E. Komariah Kuncoro, MA.C.Ed, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Ir. Soegiyono Toegiman, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) DR.Ir. Riyanto, MSc, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) DR. Ir. Risman Situmeang, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Sulawesi Utara: (1) Kol.Kav. (Purn) FPD Lengkey, Ketua; (2) Prof. Drs. RS. Tangkudung, Wakil Ketua; (3) Hi. Achmad. Hs. Pakaya, Wakil Ketua; (4) Drs. JDP. Takaendengan, Wakil Ketua; (5) Dra. Ny. S. Meweng-kang-Nangoy, Sekretaris; (6) Drs. Hi. M.F. Manoppo, Wakil Sekretaris; (7) Dr. Allan. S. Umboh, Wakil Sekretaris; (8) Drs. Ishak Pulukadang, Wakil Sekretaris; (9) Drs. R.V. Pepah, Bendahara; (10) Drs. Lona G. Lengkong, Wakil Bendahara; (11) Roy. SP. Sumampouw, Wakil Bendahara.

(12) Ir. JL. Palenewen, MSc, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. H. Watuseke, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. Wempie Frederik, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Joseph. TH. Pati, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) D. Aling, SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Ir. RH. Syamsoeri, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Drs. TH. A. Musa, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) JA. Tangkulung, BA, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. Boy. M. Kasenda, Ketua Biro Pemuda; (21) Ir. Ferdinan Tairas, Ketua Biro Pemuda.

(22) Drs. RA. Pakasi, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. Oman. R. Rimporok, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Dr. Ismail Akaseh, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Boy. EL. Rondonuwu, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ny. H. Alitu - Pakaya, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. JC. Langi - Pepah, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. Hi. MH. Utiah, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Pdt. Tonny Kaunang. STh, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Dr. RA. Sumual, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Ny. L. Mokoginta - Gaib, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Ir. Lucky Sondakh, M.Ec, Ph.D, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) MG. Naingolan, SH, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA - HUT KE XXIV 20 OKTOBER 1988"
DAN
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai segenap anggota Golkar untuk mencapai cita-cita dan perjuangan Golkar dalam rangka kesinambungan Pembangunan Nasional.

PERSERO P.T. WASKITA KARYA

Kantor Pusat : Jalan Hang Tuah Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta 12120
Tlp. 7397545 & 772828 Tlx. 47198 WKPS IA Fax. 772828 PO Box. 163/KBY. B

Digitized by Google

Sulawesi Tengah: (1) Azwar Syam, Ketua; (2) Arif Patanga, SH, Wakil Ketua; (3) H. Ardjan Lembah, SH, Wakil Ketua; (4) Muhidin Moh. Said, Wakil Ketua; (5) Drs. Abd. Karim Hanggi, Sekretaris; (6) dr. Wicaksono, Wakil Sekretaris; (7) HG. Posundu, Wakil Sekretaris; (8) dr. Hengky Sunusi, Wakil Sekretaris; (9) Drs. Umar Yasin, Bendahara; (10) Isman Ayub, Wakil Bendahara; (11) Dra.H. Ny. Zunoko Abdullah, Wakil Bendahara.

(12) Drs. H. Firman Maranua, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Belluano, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. Abd. Muin P, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) H. Ali Hamid, SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Datlin Tamalagi, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs.H. Anwar Ponulele, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) H. Mochtar Labalado, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drs.MA. Said, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Syahbuddin Mustafa, SE, Ketua Biro Pemuda; (21) Boy Tambing, Ketua Biro Pemuda.

(22) Drs. Sukarti Kaleleng, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Sutrisno Sembiring, BA, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Murad Husain, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) H. Syahril Djalali, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ny. Naumona Rumampuk Pelima, Ketua Biro Wanita; (27) dr.H.Ny. Akib Baramuli, Ketua Biro Wanita; (28) H. Abdillah Aldjufri, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Marcel Rarum, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Bustamin Nongci, SH, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Abd. Rachman Azis, SE, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. Sofyan Abulebu, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Alimuddin Abd. Rauf, SE, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Sulawesi Selatan: (1) H. Alim Bachrie, Ketua; (2) H. Hasan Samana, Wakil Ketua; (3) Drs. H. Eddy Baramuli, Wakil Ketua; (4) Drs.H.Abd. Rachman K, Wakil Ketua; (5) Drs.H. Iskandar Mandji, Sekretaris; (6) Drs. H. Mekka Hayade, Wakil Sekretaris; (7) Drs.A. Syafiuddin Makka, Wakil Sekretaris; (8) Drs.H. Idris Makkasau, Wakil Sekretaris; (9) H. Andi Gazaling, Bendahara; (10) Dr. Nurdin Mappewali, Wakil Bendahara; (11) Dr. Hermin Mattalatta, Wakil Bendahara.

(12) H.M. Kasim DM., Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) A. Altin Noer, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Drs. Arifin Noor, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Akib Fatta, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Abd Karim, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs.A.J. Lonto, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Rahman Arge, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Udin Palisuri, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Dr.A. Mappadjantji, Ketua Biro Pemuda; (21) Dra. Syuhada Husain, Ketua Biro Pemuda.

(22) H. Nurdin Saleh Agung, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. Syamsul Bachri Siradjuddin, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Ir.T. Susilo Harahap, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Ibnu Munsir, Ketua Biro Tenaga Ker-

BANK UMUM NASIONAL
Membangun hari ini, esok dan masa depan

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV
20 Oktober 1988
d a n
Sukseskan Musyawarah Nasional
Golongan Karya Ke IV

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar
demi Kesinambungan Pembangunan Nasional
di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

ja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Dra. Ny. Murtini Suharto, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. A. Nini Lantara, Ketua Biro Wanita; (28) Dr.H. Umar Sjihab, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. Iskandar Idi, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Dr.T.R. Andi Lolo, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Ambas Syam, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Prof.Dr. Basri Hasanuddin, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. Madjid Sallatu, MA, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Sulawesi Tenggara: (1) Madjid Joenoes, Ketua; (2) Drs. La Aowu, Wakil Ketua; (3) Andrey Djufri, SH, Wakil Ketua; (4) H.A. Karim Aburaera, SH, Wakil Ketua; (5) H.M. Ichlas Mappilawa, Sm.Hk, Sekretaris; (6) Drs. Yokoyama, Wakil Sekretaris; (7) Mulyadi Supangat, Wakil Sekretaris; (8) Dra. Nurhayati H, Wakil Sekretaris; (9) Drs. H. Hamsuddin S, Bendahara; (10) H. Lamarundu, Wakil Bendahara; (11) H. Soeharno, Wakil Bendahara.

(12) Amir Pidani, Sm.HK, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Hidayatullah, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Andi Minteng Agu, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Ardin Sarewo, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Abubakar Siddiq, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs.M. Amir Manab, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) La Ode Kadiroen, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drs. Basrin Suprayogi, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Ir. Mahmud Hamundu, MSc, Ketua Biro Pemuda; (21) Drs. H. Edyson Dayoh, Ketua Biro Pemuda.

(22) M. Saleh Umarella, SH, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) H.M. Thayeb Dioe, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Siswoyo Yudhokuncoro, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Tommy F.A. Yusuf, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny.H. Siti Zubaedah Amir Sayitno, Ketua Biro Wanita; (27) Dra. Ny. Wa Ode Mustari Rauf, Ketua Biro Wanita; (28) Drs.H.M. Lawelle, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Armyn A. Rere, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Prof.Drs. La Ode Siradjuddin Djarudju, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Fikri Joenoes, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. M. Gazali, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) dr. Renvill, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Maluku: (1) L.B. Carolus, BA, Ketua; (2) R.M.S. Latuconsina, SH, Wakil Ketua; (3) Drs. S.J. Oratmangun, Wakil Ketua; (4) F. Sinanu, Wakil Ketua; (5) Drs. G.J. Manuputty, Sekretaris; (6) Drs. J.R. Sahetapy, Wakil Sekretaris; (7) Ir. Z. Umasangadji, Wakil Sekretaris; (8) Dra. Ien Z. Rery, Wakil Sekretaris; (9) Abdul Kahar, SH, Bendahara; (10) R.S. Sangadji, SH, Wakil Bendahara; (11) Drs. Z. Matulessy, Wakil Bendahara.

(12) Drs. F. Thapary, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Drs. Suyatno S. Kusuma, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) M.H. Syaranamual, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Drs. Syamsir Andili, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Juc Pattiasina, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) dr. I. Umarella, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Ir. Larry Ch. Samson, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) J.J. H. Apituley, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Drs. Hengky J. Manuhuttu, Ketua Biro Pemuda; (21) Drs. Nico Far-Far, Ketua Biro Pemuda.

(22) Ir. J.E. Louhenapessy, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Drs. Ismail Risahondua, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Hengky Noya, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Aziz Abide, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. F.E. Kailola, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. P. Titaley, SH, Ketua Biro Wanita; (28) Drs. H. Marasabessy Bc.Hk, Ketua Biro Kerokhanian; (29) Drs. I.A. Saimima, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. Hi. S.Y. Tuharea, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Tolly Gomies, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian

Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku

Mengucapkan:

"Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988"

d a n

"Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV"

Semoga tercapai Cita-cta dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Masyarakat; (32) Drs. A.G. Salampessy, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Ir. D.Pasurnay, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Irian Jaya: (1) Djasman Wongsoatmodjo, Ketua; (2) Drs. Yaap Sallosa, Wakil Ketua; (3) Garsito, Wakil Ketua; (4) Drs. Laban Samori, Wakil Ketua; (5) Drs. Simon P. Morin, Sekretaris; (6) John Kabey, BA, Wakil Sekretaris; (7) AG. Subadi, SH, Wakil Sekretaris; (8) Hedi Suyanto BA, Wakil Sekretaris; (9) Drs. Ikik Sisworo, Bendahara; (10) H. Madjid Mas, Wakil Bendahara; (11) Ny. Ani Suryani Saleh, Wakil Bendahara.

(12) Rabani, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Sancoko SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) John Wanane SH, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Suruan, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. FX. Leo Renyaan, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) M.D. Lewar SH, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) H. Moch Nuh Hatumena, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Luther John BA, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Hengky Wonatorey, Ketua Biro Pemuda; (21) Freddy Toam Smith, Ketua Biro Pemuda.

(22) Drs. Sony Liputobonay, MSc, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Drs. Sumarto, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Louis Kambuaya, SH, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Drs. Stev Buiney, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Wanggober, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Lengkey, Ketua Biro Wanita; (28) Ruben F.H. Weahau Smith, Ketua Biro Kerokhanian; (29) H. Amiruddin Sabir, BA, Ketua Biro Kerokhanian; (30) Drs. M. Arifandi, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Drs. Herman Monim, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. Mickael Manufandu, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. H. Mailangkey, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

Timor Timur: (1) Raimundo Jose De A.Sarmento, Ketua; (2) Manuel Viegas Carrascalao, Wakil Ketua; (3) Johanes Soewardijo, Wakil Ketua; (4) Francisco Deodato Osorio Soares, Wakil Ketua; (5) Abel Dos Santos Fatima, Sekretaris; (6) Paul Jusuf Amalo, BA, Wakil Sekretaris; (7) Domingos Policarpo Dos Reis, SE, Wakil Sekretaris; (8) H. Sagimun Saripin, Wakil Sekretaris; (9) Marcell Bole, SH, Bendahara; (10) Dra. Filomena M. Das Dores C.L. Oliveira, Wakil Bendahara; (11) Alex Sumampouw, Wakil Bendahara.

(12) Victor Pandin, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (13) Sebastiao Dias Ximenes, SH, Ketua Biro Pemenangan Pemilu; (14) Tito Dos Santos Baptista, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (15) Daniel Joao Baptista, Ketua Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi; (16) Drs. Felixberto Amaral, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (17) Drs. Thomas Ribeiro, Ketua Biro Pendidikan dan Kursus-kursus; (18) Arnaldo Ribeiro Moniz, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (19) Drs. Constantino Soares, Ketua Biro Penerangan, Penerbitan, dan Mass Media; (20) Marcal Almaida, Ketua Biro Pemuda; (21) Francisco Kalbuadi, Ketua Biro Pemuda.

(22) Joao Da Costa R.P. Freitas, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (23) Ir. Blasius Lema, Ketua Biro Tani dan Nelayan; (24) Francisco Sena Barreto, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (25) Tarciso Dos Reis Amaral SH, Ketua Biro Tenaga Kerja, Koperasi, dan Wiraswasta; (26) Ny. Margarida Soares Mariano, Ketua Biro Wanita; (27) Ny. Maria Theresia Hartati, Ketua Biro Wanita; (28) Andre Avelino De Sousa, Ketua Biro Kerokhanian; (29) H. Umar Balafif, Ketua Biro Kerokhanian; (30) dr. Alex Un Us Finit, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (31) Francisco Do Nascimento, Ketua Biro Cendekiawan, Seni Budaya, dan Pengabdian Masyarakat; (32) Drs. Marcus Djadur, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam; (33) Drs. N. Arwan, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Alam.

P.T. INDUSTRI SANDANG II
(PERSERO)

Kantor Pusat: Jln. Jend.A. Yani 124 Surabaya — Telepon: 816116 — 816626 — 816634 — Telex: 33176 — 33259 ISDSBY IA.

Mengucapkan:

"Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988"

dan

"Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV"

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

Dr Subagyo Partodihardjo

Golkar yang Simpatik Lewat Karya Bhakti

Golongan Karya sebagai pilar utama pembangunan Politik Orde Baru dituntut untuk semakin canggih dalam menjalankan peranannya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Kecanggihan itu, selain harus tercermin dari kemantapan, kelincahan dan keluwesannya menanggapi dan menanggulangi masalah-masalah politik, juga harus terjelma dari kemampuannya untuk membentuk publik opini dan menarik simpati rakyat.

Pelbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi sospol dalam menarik simpati rakyat. Ada program "simpatik" yang dilakukan hanya pada saat-saat mendekati perlunya dukungan suara rakyat. Cara menarik simpati seperti itu sebenarnya tidak etis. Kebaikan yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan langsung berupa dukungan suara seperti itu berarti kebaikan semu. Program yang benar-benar mampu menumbuhkan simpati di masa mendatang adalah program yang benar-benar dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan rakyat, tanpa dikaitkan langsung dengan kepentingan Pemilu.

Sebagai Organisasi Sosial Politik, Golkar mempunyai keterbatasan ruang gerak untuk melakukan pelbagai kegiatan dalam pelbagai kesempatan. Di lain pihak, simpati rakyat perlu senantiasa ditumbuhkembangkan setiap saat, perlu dipelihara sepanjang waktu. Untuk itulah Golkar perlu mencari upaya, untuk senantiasa mampu menampilkan citranya sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang besar dan merakyat.

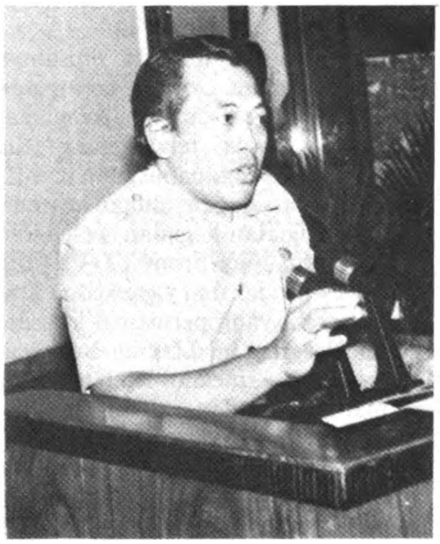

Di dalam struktur organisasi Golkar, upaya menarik simpati itu menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Pengabdian Masyarakat di tingkat pusat; untuk tingkat DPD I, Biro Cendekiawan Seni Budaya dan Pengabdian Masyarakat, sedangkan untuk DPD Golkar tingkat II Bagian Kerohanian, Cendekiawan Seni Budaya dan Pengabdian Masyarakat.

Lahirnya Undang Undang No 8 Tahun 1988 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mempertegas kedudukan dan hubungan antara ormas dengan organisasi sospol, sedikit banyak mempengaruhi Golkar dalam melaksanakan operasi simpatinya, sebab di masa lalu, ormas pendukung yang oleh undang-undang dinyatakan independen itu, sering melakukan operasi simpati untuk kepentingan Golkar. Namun demikian, masalah kecil itu tentu dapat diatasi melalui pelbagai program dan pendekatan.

Salah satu cara yang dicoba sebagai pilot project oleh beberapa eksponen Golkar pusat adalah dengan membentuk Lembaga Pengabdian Masyarakat, yang diberi nama *Karya Bhakti*. Bentuk hukum yang dipilih untuk mengelola program itu adalah *Yayasan*.

Yayasan Karya Bhakti di dalam Anggaran Dasarnya dengan jelas

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

P.T. Zeppin (PERSERO)

General Contractor & Importer
Jl. P. Jayakarta No.9 JAKARTA

Mengucapkan :

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV 20 Oktober 1988

d a n

Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar demi Kesinambungan Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru

Digitized by Google

mengikatkan dirinya dalam gerak juang Golongan Karya. Program kerja disusun dengan melihat kebutuhan dan tuntutan rakyat, serta kemampuan yang ada pada yayasan. Prioritas program harus sesuai dan sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan GBHN. Dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program bersama Pemerintah (Daerah), maka kader Golkar di jalur B maupun Pemerintah akan dapat banyak membantu kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Dituntut Dedikasi

Walaupun telah dikerjakan program-program di bidang sosial budaya dan pendidikan, program prioritas dari yayasan Karya Bhakti dalam pilot project ini adalah program kesehatan. Program kesehatan yang dilaksanakan oleh Karya Bhakti terdiri dari 2 bentuk pendekatan. (1) Program yang dilaksanakan secara insidentil, situasional dan (2) program yang dilaksanakan secara permanen konsepsional.

Program insidentil adalah program yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesaat namun mendesak, karena adanya suatu kejadian; misalnya bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit dan sebagainya.

Program pengabdian masyarakat DPP Golkar serupa itu yang telah dilaksanakan oleh Karya Bhakti misalnya bencana Galunggung, banjir bandang di Lahat, bencana gunung Dieng, tanah longsor Padang Panjang, gempa bumi Tarutung, banjir di Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan, Bandung Selatan, Jakarta, kebakaran, wabah dan meledaknya gudang mesiu di Jakarta, dan lain-lain.

Pada saat-saat tertentu, misalnya hari ulang tahun Golkar, peringatan hari-hari nasional dan hari keagamaan, Karya Bhakti telah sering pula mengadakan pengobatan cuma-cuma, khitanan massal, penyuluhan kesehatan dan kegiatan-kegiatan kesehatan preventif maupun promotif.

Bentuk pendekatan yang kedua adalah program yang permanen konsepsional. Program ini dilaksanakan secara profesional, melalui lembaga yang permanen berbadan hukum, dan melalui perencanaan yang lebih seksama; misalnya Rumah Sakit, Balai Kesehatan Masyarakat atau Poliklinik. Di daerah-daerah kumuh pinggiran Jakarta, atas bimbingan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yayasan Karya Bhakti telah memiliki dan mengelola 65 buah Balai Kesehatan. Di Cidahu Kuningan, Jawa Barat, atas bimbingan Kakanwil Jawa Barat dan Rumah Sakit (kusta) Sitanala Tangerang, telah merintis Balai Pemberantasan Kusta. Di Bogor, atas bimbingan Kakanwil Depkes Jawa Barat dan Walikotamadya Bogor, didirikan sebuah Rumah Sakit tipe C di atas tanah seluas 5 hektar.

Lembaga pengabdian masyarakat yang dikelola oleh Karya Bhakti sejauh mungkin melibatkan tokoh-tokoh formal maupun nonformal, tenaga pengabdi masyarakat baik medis, para medis maupun nonmedis, kader-kader Golkar dari jalur A, B, maupun G. Di dalam lembaga seperti inilah dapat dipadu segenap potensi, keinginan dan cita-cita yang dimiliki oleh keluarga besar Golkar, sehingga menjelma menjadi kekuatan riil yang mampu mewujudkan karya nyata profesional dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak.

Dengan pengelolaan yang baik, manajemen terbuka, motivasi juang dan kebersamaan, maka daya dan dana lambat laun akan datang mengalir dari bermacam kalangan Keluarga Besar Golkar. Untuk menangani lembaga dan program seperti ini memang dituntut dedikasi, loyalitas, kapabilitas dan integritas (personality) yang memadai.

Pilot project yang dimulai pada tanggal 30 Oktober 1983 ini, beberapa hari lagi genap berumur 5 tahun. Dalam umurnya yang 5 tahun itu Karya Bhakti telah mempersembahkan karya nyata di bidang pendidikan sebuah STM Perindustrian, sebuah Lembaga Pendidikan Komunikasi massa 5 kali seminar, 3 kali loka karya, 3 kali penataran, 7 kali diskusi ilmiah, 19 kali khitanan massal, 124 kali pengobatan cuma-cuma, mengelola 65 buah Balai Kesehatan Masyarakat, Balai Pemberantasan Kusta, dan sebuah Rumah Sakit tipe C yang cukup representatif.□

Digitized by Google

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GOLONGAN KARYA

Atas nama pimpinan dan segenap Keluarga Besar Golongan Karya, Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya menyatakan dukacita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya:

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Mantan Wapres RI

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

(Dalam usia 76 Tahun)

Semoga arwah almarhum mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara Indonesia. Kepada segenap keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan kekuatan lahir dan bathin.

Kita bangsa Indonesia yang ditinggalkan, semoga dapat meneruskan perjuangan almarhum serta mengambil keteladanan yang diberikan dalam pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa.

Jakarta, 3 Oktober 1988

Dewan Pimpinan Pusat
Golongan Karya

Sudharmono, SH
Ketua Umum

Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Sekretaris Jendral

Digitized by Google

Agraria

Termasuk salah satu yang paling banyak disorot di antara instansi pemerintah, adalah dinas Agraria. Bahkan, sorotan itu seakan-akan begitu kronisnya, sehingga lama-lama terasa 'rutin'. Dan para penyampai kritik pun sepertinya jadi letih sendiri. Betapa tidak, demikian yang disimpulkan kalangan masyarakat, dikritik dan diprotes pun tak ada gunanya.

Akan tetapi, belum lama ini, mendadak ada semacam 'kejutan'. Tak lain ketika Menteri Dalam Negeri — yang juga membawahi Direktorat Jenderal Agraria dan perangkat-perangkatnya — melontarkan istilah 'bandit-bandit tanah'. Menteri berkata, ada bandit-bandit tanah yang mengganggu ketertiban administrasi pertanahan. Dan bandit-bandit tanah itu mampu menciptakan sertifikat ganda. Sedang mengenai Hari Agraria 24 September, Menteri menyatakan tidak setuju acara seremonial, "sementara pelayanannya gombal". Tentang mutu pelayanan ini, sebelum ini juga pernah ada sentilan dari Menpan.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri rupanya telah membangkitkan semangat mawas diri di kalangan Agraria. Sejumlah pejabat Agraria angkat bicara dengan nada kritik ke dalam. Seorang Kepala Direktorat di daerah misalnya, dengan keras memperingatkan agar Pegawai Negeri di jajaran Agraria jangan merangkap jadi calo tanah. Boleh pilih, mau jadi pegawai negeri atau mau jadi calo tanah, demikian alternatif yang diberikan. Selain itu, ada pula himbauan kepada masyarakat untuk tidak memojokkan atau menjerumuskan para petugas Agraria.

Agaknya, tak banyak lagi yang perlu ditambahkan disini, karena cetusan Menteri dan kritik intern dari para pejabat Agraria itu sendiri, sudah cukup memadai. Kita semua, rupanya, sudah tahu sama tahu, apa yang terjadi. Memang, cukup banyak petugas Agraria yang tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, namun sebaliknya tak perlu ditutup-tutupi adanya kebobrokan. Tak perlu pula menyalahkan masyarakat sebagai penyebab kebobrokan, sebab justru masyarakat dalam hal ini adalah dalam posisi 'korban'.

Setelah kritik keras diambil alih oleh Menteri dan para pejabat Agraria sendiri, persoalannya tinggallah bagaimana tindak lanjutnya. Masyarakat akan berpegang kepada janji Menteri Dalam Negeri: "Tidak ada pejabat yang kebal dan akan saya buktikan".

Masalah Agraria ini dalam beberapa hal punya kemiripan dengan masalah di lingkungan Bea Cukai beberapa tahun yang lalu. Dan pemerintah telah membuktikan sanggup bertindak tegas waktu itu, instansi itu sempat di 'grounded', 'turun mesin'! [ ]

Telepon

Dan ini, satu lagi: Perumtel. BUMN ini agaknya sedang mengalami gebrakan Menparpostel — yang murah senyum tapi rupanya keras dan tegas juga. Pertama-tama, ada penyegaran direksi. Berikutnya, sejumlah mutasi dan penindakan. Dalam pada itu, proses pengusutan pidana khusus — yang melibatkan antara lain tersangka dari kalangan mantan direksi — yang sempat 'beku', kembali ditangani oleh pihak kejaksanaan.

Gebrakan-gebrakan itu mulai menunjukkan hikmahnya. Keterbukaan Perumtel kini lebih tampil Baru tahu, ternyata di Jakarta misalnya terdapat beberapa wilayah yang punya satuan sambungan telepon yang belum terjual. Sampai belasan ribu. Ternyata kesan selama ini bahwa SST adalah barang langka — sehingga diperebutkan dengan harga tinggi melalui percaloan — untuk sebagian ternyata tidak benar. PT Inti yang tadinya disisihkan dalam penjualan telpon mobil, sehingga sempat terasa ada aroma monopoli, kini bisa memasarkan kembali produknya dengan harga yang lebih murah. Yang belum dipermasalahkan lebih lanjut adalah telpon dengan sistim user's credit yang kontroversial.

Sebenarnya, seperti halnya terhadap Agraria, Perumtel pun termasuk dalam daftar sorotan utama masyarakat selama ini. Mulai dari soal permintaan sambungan telpon sampai dengan masalah klaim pulsa. Tetapi, Perumtel, khususnya dalam masalah telpon, bertahun-tahun mampu menunjukkan 'ketangguhan'nya membela diri. Segala macam kritik dan protes atau klaim mampu dengan tangkas ditangkis. Dan boleh dikata, masyarakat tidak pernah menang melawan jurus-jurus Perumtel. Kalau ada yang mengatakan ada percaloan, dengan mudah dibalik: Mana buktinya? Kalau ada klaim pulsa, dijawab: Menurut data komputer kami....

Tapi kini rupanya ada angin baru melanda badan usaha milik negara ini. Kalau gebrakan yang sekarang konsisten, bisa diharapkan banyak perbaikan yang mengesankan dalam tahun-tahun mendatang ini. [ ]

Soal Sisa-sisa G30S/PKI

Disekitar hari kita memperingati Kesaktian Pancasila 1 Oktober, ada beberapa hal mengenai sisa-sisa G30S/PKI yang dapat kita catat, antara lain yang berkaitan dengan kehidupan pers.

Pertama, ada pernyataan Dewan Pers tentang bersih lingkungan di kalangan pers. Dan tak lama sesudah itu, ada suratkabar terkemuka di ibukota menurunkan tajuk yang dinilai Departemen Penerangan mengungkapkan pokok-pokok pikiran yang mengabarkan keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S 1965. Kedua, beberapa instansi pemerintah belakangan ini melakukan serangkaian penindakan terhadap pegawai yang berindikasi terlibat G30S/PKI dan atau 'tidak bersih lingkungan', termasuk Departemen Penerangan.

Peristiwa G30S/PKI telah berlalu 23 tahun lamanya. Hampir 23 tahun pula PKI telah dibubarkan, yakni sejak 12 Maret 1966.

Dengan waktu yang telah berlalu sebanyak itu, barangkali bisa timbul pertanyaan, kenapa baru sekarang ada penindakan, khususnya bagi mereka yang selama ini ada dalam jajaran birokrasi kita. Apakah baru ketahuan? Apakah sebenarnya telah lama ketahuan, tetapi baru sekarang ditindak? Kedua pertanyaan ini, perlu jawaban dan penjelasan-penjelasan lebih jauh.

Seandainya, baru sekarang ketahuan, tentu perlu dipelajari kenapa mereka bisa 'bersembunyi' begitu lama, siapa tahu mereka punya cara dan metode tersendiri. Lalu, apakah selama periode terselubung itu, mereka tidak melakukan apa-apa yang membahayakan birokrasi? Tegasnya perlu diperiksa kembali konduite mereka dalam jangka waktu tersebut. Dan seandainya sudah lama ketahuan, tapi baru sekarang ditindak, perlu diberikan penjelasan kenapa begitu. Selain itu, tentunya dengan belajar dari pengalaman yang lampau — kadang-kadang tuduhan terlibat PKI hanyalah fitnah karena iri hati — jangan sampai terjadi ada orang yang ditindak tanpa bukti yang kuat.

Dalam pada itu, tentang bersih lingkungan di kalangan pers, dapat dianggap sebagai sesuatu yang memang relevan. Ini mengingat fungsi dan peranan pers yang cukup strategis dalam kehidupan bangsa. Kendati peristiwa G30S/PKI telah terjadi 23 tahun yang lalu, tak ada salahnya memang untuk selalu saling mengingatkan tentang bahaya laten PKI.

Dan kenapa Departemen Penerangan memberi peringatan keras terhadap Harian Merdeka, pun bisa difahami. Apalagi, harian tersebut telah melakukan hal serupa, lebih dari satu kali. Tentunya, ada sesuatu yang tidak sederhana dalam tubuh pengelola harian tersebut, sehingga kasus menyerempet seperti itu bisa terjadi berkali-kali. Tetapi diharapkan, Departemen Penerangan lebih mengutamakan pembinaan dan tidak sampai represif — membatalkan SIUPP. Dalam hal ini sangat diharapkan, Harian yang dipimpin oleh seorang mantan Menteri Penerangan itu, bisa membenahi sendiri masalahnya secara internal agar dapat melanjutkan eksistensinya yang sudah puluhan tahun dalam jajaran pers nasional. [ ]

Digitized by Google

Oleh: AA Oka Mahendra SH

Porsi Politik dalam Pembangunan Nasional

Bangsa Indonesia telah bertekad untuk meletakkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, pembangunan di bidang lainnya tidak boleh diabaikan. Malahan GBHN menegaskan bahwa pembangunan bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain harus makin ditingkatkan sepadan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi.

Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila merupakan pembangunan serba muka, mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu negara berkedaulatan rakyat, maka pembangunan politik merupakan bagian integral yang sangat penting bagi suksesnya pembangunan nasional. Patut pula diakui bahwa pembangunan politik merupakan bagian yang paling sulit dari pembangunan bangsa. Oleh karena itu Golkar dalam masa bakti 1983-1988 memberikan perhatian yang serius kepada pembangunan politik dalam rangka memantapkan stabilitas politik dan pelaksanaan mekanisme Demokrasi Pancasila.

Dalam Program Umum Golkar ditegaskan salah satu sikap dasar Golkar ialah: "Melanjutkan pembangunan politik untuk lebih mewujudkan Demokrasi Pancasila yang didukung oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik serta ABRI sebagai kekuatan sosial dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas."

Bagi Golkar pembangunan di bidang politik adalah usaha agar kehidupan politik dan ketata negaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 benar-benar melembaga, menjadi sistim yang mantap, mapan dan tidak gampang tergoyahkan. Dalam kurun waktu pelaksanaan Repelita IV diharapkan terwujudnya kerangka landasan di bidang politik yaitu bahwa setiap warga negara telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung semakin mantap berdasarkan konstitusi, demokrasi dan hukum.

Kebijaksanaan pembangunan di bidang politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. Memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila berarti memantapkan asas kedaulatan rakyat yang norma-norma pokoknya telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan landasan filosofisnya terkandung dalam Pancasila.

Kebijaksanaan pembangunan di bidang politik dengan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan mekanisme politik fungsional, berhasil guna dan berdaya guna yang bersumber serta memancarkan nilai-nilai luhur Pancasila demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan di bidang sosial politik dengan demikian ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan di bidang politik selama masa bakti 1983-1988 telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pengembangan Demokrasi Pancasila dan penyelenggaraan kehidupan bernegara secara konstitusional terus dimantapkan.

Sementara itu organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas sehingga semakin mampu mengembangkan diri secara sehat dan dinamis serta mampu memainkan peranannya sebagai kekuatan pembangunan.

Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah membuat kehidupan politik kita diliputi suasana musyawarah, suasana dialog untuk mengusahakan kesamaan dan kesatuan sikap dari pandangan yang berbeda-beda. Semua pihak saling tenggang rasa, semakin mampu mengendalikan diri, karena menyadari tanggung jawabnya bagi kepentingan seluruh bangsa.

Golkar berkeyakinan bahwa diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan akan memperlancar dan meningkatkan kemampuan Bangsa untuk mewujudkan dan mengembangkan Demokrasi Pancasila dengan pengamalannya secara jujur, murni dan konsekuen.

Suasana Pancasila

Pancasila yang digali dari bumi dan kepribadian bangsa Indonesia adalah ideologi nasional yang menjadi milik kita bersama dan harus dijadikan pedoman sikap hidup sehari-hari manusia Indonesia agar suasana serba Pancasila terasa dimana-mana, membimbing dan memberi arah kehidupan kita semua dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila harus kreatif dan dinamis sehingga Pancasila mampu memberi jawaban terhadap perkembangan masyarakat yang makin maju. Sebab Pancasila adalah ideologi yang terbuka yang memberi kesempatan kepada kita semua untuk terus menerus mengembangkannya melalui konsensus-konsensus nasional.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara telah memberikan dasar yang semakin kokoh bagi kesatuan dan persatuan bangsa dengan tetap mengakui, menghormati dan memberi ruang yang kreatif bagi kemajemukan bangsa kita. Dengan demikian kita telah berhasil memberi arti yang dinamis pada semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dalam hubungan ini sangat penting artinya sikap politik

Digitized by Google

Golkar sebagaimana dikemukakan dalam Pernyataan Politik hasil Rapim Paripurna III tanggal 20 Oktober 1987 yang menegaskan antara lain:

"Dalam rangka memberikan isi sebaik-baiknya dan mengembangkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang akan memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, memperkokoh persatuan dan kesatuan atas dasar wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan Indonesia serta untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat, Golkar bertekad mengajak semua pihak, khususnya organisasi-organisasi sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan agar mengamalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas sebaik-baiknya dengan menumbuhkan suasana kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada hakekatnya merupakan perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang diamalkan secara kreatif dan dinamis serta mampu mengatasi faham-faham primordial".

Tantangan di bidang politik setelah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat operasional dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks, dan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional yang demokratis dan terbuka memungkinkan pelaksanaan pengamalannya secara dinamis dan kreatif sejalan dengan dinamika kehidupan berbangsa, serta mampu menangkal ideologi lain yang bertentangan.

Tantangan tersebut dijawab dengan kepeloporan Golkar menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas Golkar dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar Golkar. Dan keseluruhan jiwa, semangat dan gerak perjuangan Golkar adalah merupakan pengamalan Pancasila. Sebab Golkar lahir, tumbuh, dan berkembang untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Golkar lahir dan tumbuh untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Golkar lahir dan tumbuh untuk ikut menggerakkan pembangunan bangsa dan negara melalui karya-karya nyata. Karena itu lah Golkar berkeyakinan bahwa kebesaran Golkar di masa datang dan keberhasilan Golkar dalam ikut memikul tanggung jawab bersama dalam pembangunan bangsa dan negara terletak pada kesetiaan Golkar kepada Pancasila, kepada sejarah kelahiran dan pertumbuhannya sendiri.

Pencantuman Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Anggaran Dasar Golkar di samping memenuhi amanat GBHN adalah juga sebagai penegasan kembali tekad Golkar untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, karena Pancasila merupakan dorongan utama kelahiran Golkar dan untuk Pancasila Golkar berjuang.

Bagi Golkar Pancasila adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Pancasila terbukti kuat menjadi dasar negara, karena Pancasila adalah jiwa bangsa kita, pandangan hidup bangsa kita dan ideologi nasional sekaligus. Jika dahulu perjuangan bangsa kita berkisar pada usaha mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila, maka sejak MPR menetapkan Ketetapan MPR nomor II/MPR/1978 maka perjuangan itu kita tingkatkan dengan gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Pelaksanaan penataran P4 yang makin meluas telah pula memberi arah yang melegakan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Golkar menyadari bahwa penghayatan dan pengamalan Pancasila sangat penting agar Pancasila terwujud dalam semua segi kehidupan. Oleh karena itulah Golkar bertekad agar gerakan untuk terus-menerus mendalami dan menghayati dan mengamalkan Pancasila harus merupakan gerakan masyarakat, gerakan dari semua lapisan, semua golongan, semua kekuatan dan semua generasi bangsa kita.

Gerakan ini mempunyai jangkauan strategis jangka panjang yaitu meletakkan landasan yang sehat bagi pembaharuan kehidupan politik sebab dengan demikian orientasi organisasi kekuatan sosial politik tidak lagi pada ideologi golongan atau ikatan-ikatan yang bersifat primordial lainnya, tetapi berorientasi pada pembangunan masyarakat Pancasila, atau dengan kata lain organisasi kekuatan sosial politik harus membawa aspirasi dan harus menjadi perancang pembangunan yang berdasarkan Pancasila. Sebagai konsekuensinya lebih lanjut adalah terlaksananya keterbukaan bagi organisasi kekuatan sosial politik.

Penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan bagian yang sangat strategis dalam usaha kita meletakkan landasan yang kokoh di bidang politik menjelang tinggal landas dalam Repelita VI nanti.

Penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada hakekatnya adalah mempertegas, menyatukan sikap dan langkah kita mengenai Pancasila yang telah dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka semua organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, semua lapisan, golongan dan kekuatan dalam masyarakat kita, yang berada dalam satu barisan Pancasila, memiliki kesempatan, kebebasan dan tanggung jawab serta semboyan yang sama dalam perjuangan bangsa bersama membangun masyarakat Pancasila.

Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik memang lahir untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kekuatan bangsa kita yang dengan jujur dan konsekuen mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu Golkar sebagai kekuatan sosial politik terbesar dewasa ini akan tetap menjadi pelopor dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila.

Tekad kepeloporan politik Golkar dalam pengamalan Pancasila didorong oleh inspirasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu sikap yang konsisten dan setia pada Pancasila dan UUD 1945.

Kiprah, perjuangan Golkar dalam kancah kehidupan politik senantiasa mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga dengan demikian Golkar benar-benar menampilkan dirinya sebagai pengemban hakekat Orde Baru, membuktikan kepeloporannya mengajak seluruh kekuatan sosial politik dan seluruh potensi nasional kita untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dan terbukti sikap tersebut telah menyelamatkan kelanjutan kehidupan bangsa dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesetiaan Orde Baru terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang selalu disertai upaya pembaharuan politik secara demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum telah berhasil menunjukkan kemajuan melalui pelaksanaan program pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat Pancasila. □

Digitized by Google

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial

Jalan Taman Lawang 2 • Telp. 330579 - 334709 - 334754 • Jakarta — Indonesia

PT. PANCA BHAKTI NUSA

Jl. Pecenongan No. 87
Jakarta - Pusat
Telepon : 343690 s/d 99

P.T. SAHABAT SUKSES

Jln. Raya Jatinegara Barat 54 E, Blok B-16, 18, 19, 20, 21.
Telp. 8197865-8190323-8194742-8198340-8198343
Jakarta Timur, Indonesia

MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA XXIV 20 OKTOBER 1988"
D A N
"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA IV"

Terima Kasih sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada anda, atas segala kasih sayang dan tulus yang anda tumpahkan kepada sesama manusia yang kekurangan/menderita; dan kepada usaha-usaha pembinaan bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas budi baik anda dan senantiasa menumbuhkan pada diri kita rasa persaudaraan dan kasih sayang sesama manusia.

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial
Menghimpun sumbangan anda melalui TSSB dan KSOB serta menyalurkan kepada yang membutuhkan bantuan.

Digitized by Google

INDONESIA

DESTINATION OF ENDLESS DIVERSITY

Indonesia – a treasure chest of sights and experiences waiting to be tapped. From the snow-capped peaks of Irian Jaya to the dark rainforests of Kalimantan and Sumatera; from the majesty of Java's towering volcanoes to the magic of coral gardens under the seas; from the refinement of Bali's music and dances and the spell of its shadow plays, to the Toraja death feast – Indonesia offers you more than you could savor in a lifetime. All inside the boundaries of a single country.

Come and join the growing numbers of visitors who have stayed with us, for days or months or even years, to collect memories to treasure.

Dial the world through Indosat

DIRECTORATE GENERAL OF TOURISM

Jalan Kramat Raya 81 Jakarta, Indonesia.
Phone : 359001 Mail : P.O. Box 409
Telex : 45625 INTOUR IA
Cable : INTO-JKT

TOURIST PROMOTION OFFICES OVERSEAS

EUROPE
Wiesenhuttenplatz 26 D-6000 Frankfurt/Main 1
Phone (0611)-233677/233678
Telex 04189186 itpo d
Telegram INDOTOUR Frankfurt

NORTH AMERICA
3457 Wilshire Blvd Los Angeles, CA 90010
Phone (213) 3872078 Telex 1812192
Cable INDOTOURLAX

JAPAN
Asia Trans Co 2nd Floor Sankaido Building
1-9-13 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Phone 5853588, 5821331 ext 15-16
Telex : 02422068 ITPO JKJ
Cable ASTRAJUG TOKYO, JAPAN

ASEAN
10 Collyer Quay, No. 1203 Ocean Building
Singapore 0104
Phone : 5342837 Telex RS 35731 INTOUR
Cable INDOTOUR SINGAPORE

INDOSAT
The World-wide communications and information Company

21 Jln. Merdeka Barat
Jakarta 10110 Indonesia
Phone : 62-21-376 338/363 346
TELEX : 46134 INDSAT IA

Digitized by Google

No. 56 Nopember 1988

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

ERA WAHONO - WITOELAR

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Anono Poernomo.
Subandrio
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noenjathy.
Robert Puang Sunur
Issidarto BA
Subyanto SP
Untung Djumadi
H Mesri Pasaribu

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahlyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan "Media Karya" sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Catatan Setelah Munas

FOKUS

Sebagai Ketua Dewan Pembina Pak Harto berpesan kepada keluarga besar GOLKAR: Perteguh Komitmen Terhadap Pancasila.

LAPORAN UTAMA

Munas IV GOLKAR yang berakhir 25 Oktober lalu telah menghasilkan kepengurusan baru dalam organisasi GOLKAR, dengan pasangan Wahono-Witoelar. Pasangan yang menggantikan duet Sudharmono-Sarwono ini, belum banyak menjanjikan apa-apa, selain tekad untuk tetap menjadikan GOLKAR organisasi yang terpercaya, kendati tantangan lima tahun ke depan tidak ringan. Juga terbaca penegasan Ketua Jalur A Jenderal Try Sutrisno bahwa ABRI Selalu Berada di Dalam dan Bersama GOLKAR. Sementara Ketua Jalur B, Rudini mengingatkan bahwa Rakyat Semakin Menuntut Peranserta.

NASIONAL

Peristiwa 10 November di Surabaya, ternyata masih merupakan nostalgia yang sulit dilupakan bagi sejumlah pelakunya. Mereka mengadakan peringatan peristiwa bersejarah itu dengan Nostalgia ala Surabaya. Pesan dan Harapan Kepada Kaum Muda dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda.

KOMENTAR

ORGANISASI

Pertanggungjawaban DPP GOLKAR periode 1983-1988; Penyerahan Inventaris GOLKAR; Program Umum GOLKAR periode 1988-1993, serta serangkaian kegiatan dalam rangka HUT GOLKAR ke 24 yang diisi dengan Amal Bhakti Sosial.

SPEKTRUM

Jangkauan Gugatan Ganti Rugi dalam Proses Peradilan Perdata dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Peningkatan Ekspor.

SENI & BUDAYA

Nyai Blorong oleh Maria Sugiharto

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

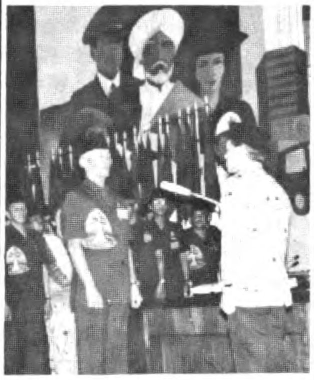

Digitized by Google

Catatan Setelah Munas IV

Musyawarah Nasional IV Golongan Karya baru saja usai. Seperti halnya dengan Munas-munas yang terdahulu. Munas kali ini pun dapat dikatakan berakhir dengan baik. Ini tak lain karena kendatipun bukannya sama sekali tak ada permasalahan, mekanisme internal organisasi politik ini — dengan ciri khas yang tak dimiliki oleh organisasi politik lainnya — agaknya tetap bekerja dengan baik.

Tentu banyak hasil penting dicapai Munas IV ini. Tetapi yang terutama menjadi pusat perhatian tak lain adalah susunan Dewan Pimpinan Pusat yang baru. Tampil tokoh puncak yang jauh sebelum ini tak ada dalam perkiraan, bahkan di lingkungan Keluarga Besar Golongan Karya sendiri. Hampir dua pertiga personalia DPP baru adalah wajah baru pula — dalam arti tidak duduk dalam kepengurusan DPP periode sebelumnya. Malahan, beberapa di antaranya memang betul-betul tergolong masih baru dalam kancah kegiatan Golongan Karya, diukur dengan kriteria waktu (masa kegiatan di lingkungan organisasi) yang dikonsensuskan sebelum ini.

Secara umum, personalia DPP hasil Munas — melalui formatur yang dipilih untuk tugas menyusun komposisi DPP baru tersebut — dianggap memadai. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah tokoh yang diterima dengan baik (bahkan secara bulat) oleh Munas. Dan penentuan yang relatif mudah dan lancar ini, banyak 'ditopang' oleh kenyataan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal masa bakti sebelumnya telah menyatakan tak bersedia untuk dipilih kembali. Keduanya memberikan alasan yang berkaitan dengan tugas baru dalam pemerintahan. Peserta Munas, menerima perkembangan baru yang cukup berbeda dengan perkiraan umum yang ada jauh sebelum ini, dengan pengertian yang cukup. Khususnya mengenai figur ex Ketua Umum. Meskipun, dibalik ini sebenarnya di lapisan akar-akar rumput organisasi ini, bukannya tak ada aspirasi mengenai kesinambungan kepemimpinan beliau. Suatu aspirasi yang wajar. Bukan karena sesuatu yang beraroma paternalistik, melainkan karena secara objektif sepanjang lima tahun yang lampau organisasi ini terangkat pamor dan peranannya secara lebih berarti.

Ketidaksinambungan ini sebenarnya bisa cukup mengecewakan. Tetapi untunglah bahwa figur pengganti, sebagai Ketua Umum baru, adalah tokoh dengan reputasi tertentu yang cukup memadai. Namun tak terhindarkan bahwa beliau akan memikul beban tidak ringan dalam melanjutkan prestasi (berkecepatan tinggi) yang berprestise dari pendahulunya. Hal yang kurang lebih serupa berlaku bagi Sekretaris Jenderal yang baru. Tokoh-tokoh lain yang mendampingi juga dikategorikan memadai, sekalipun secara kualitatif belum optimum. Kendati dinilai cukup memadai, toh ada sejumlah reaksi terhadap beberapa personalia. Akan tetapi jelas, komplain yang ada tidaklah ditujukan kepada pribadi-pribadi bersangkutan, melainkan kepada apa yang dianggap inkonsistensi keluarga besar organisasi ini terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan sendiri. Namun, sepanjang Munas telah memutuskan, pastilah keputusan itu harus dijunjung tinggi.

Hal lain yang penting dari Munas IV ini ialah bahwa Munas kali ini menjadi ajang percobaan mengukuhkan mekanisme bottom up dalam rangka peningkatan demokratisasi internal Golongan Karya. Apakah yang berhasil dicapai dalam hal ini? Ada yang dicapai. Tapi bagaimanapun juga pembangunan politik tidaklah dilengkapi lampu Aladin. Adalah langka bahwa sesuatu terjadi dan tercapai seketika begitu mudahnya. Apalagi yang bernama proses demokratisasi. Proses demokratisasi memerlukan topangan kuat dari kualitas persepsi dan kesiapan mental dari para pelaku dan pelaksana serta para peserta demokrasi itu sendiri. Seorang tokoh jalur dalam keluarga besar ini misalnya sempat melontarkan nada kecewa terhadap kadar demokratis selama berlangsungnya Munas. Tokoh lainnya mengatakan adanya ketersendatan. Itu yang tercatat pada permukaan. Belum penilaian di bawah permukaan. Tidak sedikit kekecewaan dilontarkan di bawah permukaan — tak berani dinyatakan terbuka. Bagaimanapun agaknya cara berpolitik bisa berkonotasi ganda. Ada yang ingin menjalankannya dengan kaidah-kaidah yang ideal: jernih, bersih dan jujur. Tapi ada pula — betapapun sedikitnya — yang masih terjerat kepada nilai-nilai yang sebaliknya, sehingga satu dua kali senjata intrik dianggap perlu disiapkan di bawah meja dan sewaktu-waktu diluncurkan. Namun, yah, memang tak ada yang betul-betul sempurna di muka bumi ini.

Namun, terlepas dari segala komentar yang ada — di atas maupun di bawah permukaan — secara objektif Munas IV Golongan Karya telah berjalan baik, selesai dengan selamat. Setidaknya Munas telah berhasil menyusun barisan kepemimpinan yang dapat dianggap memadai dan dengan sendirinya diharapkan mampu melanjutkan tugas lapisan kepemimpinan yang digantikan. Karena dalam organisasi politik terbesar ini, satu era kepemimpinan dengan era kepemimpinan lainnya dianggap satu kesatuan proses, tidak berdiri sendiri. Satu kesinambungan. Dan Golongan Karya jauh lebih beruntung dibanding dengan kekuatan sosial politik lainnya. Menurut pengalaman di masa-masa yang lampau, Golongan Karya selalu memperoleh tokoh-tokoh pimpinan yang dari satu era ke era yang lain masing-masing punya kelebihan dan kecemerlangan tersendiri. Maka, Golongan Karya, secara teratur mengalami kemajuan dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Rupanya, karena dulu Golongan Karya dimulai dengan niat dan cara yang baik, maka ia berjalan dengan baik pula. Semoga begitu seterusnya.... □

Digitized by Google

Mantapkan Komitmen Terhadap Pancasila

Untuk kedua kalinya, Dewan Pembina menyampaikan laporan di depan Musyawarah Nasional Golongan Karya sebagai forum tertinggi organisasi, yaitu yang pertama pada Munas III tahun 1983 dan yang kedua pada Munas IV, 20-25 Oktober yang lalu. Laporan Dewan Pembina disampaikan berkenaan dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Munas.

Dewan Pembina telah mengupayakan pelaksanaan tugas

Munas III Golongan Karya tahun 1983 lalu, memberikan tugas kepada Dewan Pembina untuk memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha organisasi. Munas III juga memberikan empat macam wewenang kepada Dewan Pembina yaitu untuk membatalkan kebijaksanaan/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, bilamana dinilai menyimpang dari ketentuan-ketentuan organisasi; membekukan sementara, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam keadaan mendesak dan mengancam kelangsungan hidup organisasi; mengundang Munas Luar Biasa sebagai tindak lanjut pembekuan; serta menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Golongan Karya. Tugas yang diamanatkan oleh Munas III kepada Dewan Pembina, memang teramat penting, dan wewenang yang diberikan juga begitu besar.

Dalam perjalanan selama lima tahun ini, Dewan Pembina telah mengupayakan pelaksanaan tugas tersebut sebatas kemampuan yang ada. Adapun mengenai wewenang yang diberikan, Dewan Pembina hanya menggunakan wewenang untuk menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat. "Wewenang-wewenang lainnya tidak pernah digunakan karena memang tidak terdapat kebutuhan atau kondisi yang memerlukan penggunaannya," ujar Ketua Dewan Pembina, Pak Harto, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua Presidium Harian Dewan Pembina, M. Panggabean.

Munas III tahun 1983 mengamanatkan berbagai tugas atau program yang pada pokoknya tercakup dalam tiga hal yaitu menyukseskan konsolidasi, menyukseskan pelaksanaan Repelita IV dan menyukseskan Pemilihan Umum 1987. Ketiga hal tersebutlah yang kemudian kita kenal sebagai Tri Sukses Golkar.

Untuk melaksanakan amanat dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan Munas III, maka Dewan Pembina menempuh berbagai kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Secara teratur dan berkesinambungan, Dewan Pembina memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, baik pada kegiatan-kegiatan formal seperti Rapat Pimpinan Paripurna tahunan, maupun kesempatan-kesempatan lainnya. Pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat tersebut mencakup tugas-tugas pokok yang telah diamanatkan oleh Munas III.

Memantapkan Komitmen

Mengenai konsolidasi idiil, Dewan Pembina memberikan pengarahan tentang perlunya GOLKAR terus-menerus memantapkan komitmennya terhadap Pancasila, melalui kepeloporan dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi dan paham yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila.

Menyangkut konsolidasi wawasan, Dewan Pembina memberikan petunjuk tentang perlunya memantapkan Wawasan Kebangsaan dalam tubuh Golongan Karya, yang tercermin dalam pola pikir dan pola kerja yang berjangkauan kepentingan nasional dan berwatak nasional. Sejalan dengan itu, Golongan Karya sebagai organisasi perjuangan supaya senantiasa dapat menumbuhkan jati dirinya melalui karya-karya nyata sebagai pengamalan Pancasila di segala bidang.

Dalam kaitan dengan konsolidasi organisasi, Dewan Pembina memberikan saran dan nasehat menyangkut hal-hal kelembagaan, keanggotaan

Digitized by Google

dan kekaderan.

Sebagai organisasi yang besar, GOLKAR tentu perlu mengembangkan pola kerja yang sistematis dan konsepsional, agar GOLKAR tidak hanya besar dalam jumlah anggota dan pendukungnya, tapi juga besar dalam arti mutu kerja dan karya-karyanya. Untuk itu dimantapkan pula sifat kepemimpinan organisasi kekuatan sosial politik yang kolektif, komunikatif, akomodatif dan demokratis. Keanggotaan Golkar yang bersifat perorangan dengan stelsel aktif juga perlu ditingkatkan.

Sementara itu, dilaksanakan pula pembentukan kader yang menjangkau seluas mungkin kalangan, disertai pengembangan dan pembinaan kader di segala bidang. Dengan demikian, GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik sungguh-sungguh mempunyai basis yang kuat dan strategis.

Mengenai tugas menyukseskan Repelita IV, Dewan Pembina telah memberikan petunjuk, pengarahan, pertimbangan, saran dan nasehat yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan GOLKAR untuk mendukung pemecahan masalah-masalah tersebut. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR telah pula mengembangkan hal-hal tersebut, antara lain melalui Rapat-rapat Pimpinan Paripurna Tahunan, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik. Pernyataan-pernyataan politik tersebut merupakan pokok-pokok pendirian GOLKAR tentang berbagai masalah, baik untuk dipedomani oleh seluruh jajaran GOLKAR dalam bidangnya masing-masing, maupun sebagai suatu pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat kita.

Dalam melaksanakan Repelita IV, bangsa kita menghadapi berbagai masalah berat dan besar, akan tetapi dengan dukungan GOLKAR maka optimisme, kepercayaan dan partisipasi rakyat tetap dapat dipelihara dan dikembangkan dalam rangka menghadapi berbagai masalah yang besar dan berat itu.

Mengenai tugas memenangkan Pemilu 1987, Dewan Pembina menyampaikan konsep strategi pemenangan Pemilu 1987 kepada Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR. Konsep strategi itu pada intinya menekankan perlunya memantapkan kekompakan seluruh keluarga besar GOLKAR, memelihara dan mengembangkan suasana yang menguntungkan bagi pembangunan

Tugas yang diamanatkan Munas III pada Dewan Pembina amat penting

nasional, serta mengembangkan peranan atau kiprah kader-kader GOLKAR di segala bidang.

Dalam konsep strategi pemenangan Pemilu 1987, termasuk pula penyuksesan Sidang Umum MPR 1988, dipersiapkan pula segala sesuatunya yang berkaitan dengan itu seperti RANTAP-RANTAP yang akan diperjuangkan dan sebagainya. Untuk menunaikan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka dipakai suatu mekanisme kerja yang baik antara Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, yang berlangsung pula antara Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat dengan Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR.

Berbagai pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat itu telah dijabarkan dan dikembangkan dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR. Oleh karena itu, Dewan Pembina memandang bahwa tidak perlu turun tangan secara operasional. Kalau dalam Pemilu 1982, Dewan Pembina dengan Team Sukses-nya turun secara operasional, maka tidak demikian halnya dalam Pemilu 1987; dalam Pemilu 1987, nampak Dewan Pimpinan GOLKAR sebagai ujung tombaknya, yang didukung oleh 2 jalur keluarga besar GOLKAR (Jalur A dan B) secara proporsional dan fungsional.

Kekompakan keluarga besar GOLKAR dapat dimantapkan dalam arti luas dan mendalam, yang mana merupakan faktor penting dan menentukan dalam upaya menyukseskan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Munas III. Kekompakan tersebut ternyata dapat terbina di semua tingkat kepengurusan organisasi, dalam melakukan berbagai kegiatan dan upaya yang dipandang perlu.

Arah konsolidasi semakin nyata dan semakin nyata pula bentuk-bentuknya yang tentu perlu terus-menerus dikembangkan ke masa datang. Hasil-hasil yang telah dicapai, merupakan modal penting untuk melangkah ke masa depan. Kaderisasi yang sistematis dan konsepsional, telah dapat diletakkan dasar-dasarnya dengan cukup mantap, untuk dikembangkan lebih lanjut secara kualitatif. Kaderisasi seperti itu mempunyai jangkauan strategis bagi kelangsungan perjuangan dan peranan politik GOLKAR, dalam kerangka, perjuangan bangsa secara keseluruhan, untuk mencapai cita-cita dan tujuan luhurnya.

Dalam upaya menyukseskan Repelita IV, peranan dan dukungan GOLKAR juga terlihat jelas, baik melalui kerja keras dan karya para kader di segala bidang, maupun melalui upaya untuk memelihara optimisme, kepercayaan dan partisipasi rakyat pada umumnya. Peranan dan dukungan tersebut mempunyai arti yang besar, dalam upaya bangsa kita untuk melaksanakan Repelita IV dengan berbagai masalahnya yang besar dan berat.

Tugas menyukseskan Pemilu 1987 telah pula berjalan dengan sebaik-baiknya. Secara kuantitatif, kepercayaan yang diberikan rakyat kepada GOLKAR adalah yang terbesar sepan-

Digitized by Google

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya
Dan Seluruh Staf Media Karya

Menyampaikan Dukacita yang sedalam-dalamnya
Atas Meninggalnya Wartawan Media Karya **Rendy Sugiyat (34)**

Dalam Kecelakaan Lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Bekasi
Pada Tanggal 20 Oktober Yang Lalu
Semoga Arwahnya Diterima di Sisi Tuhan Yang Maha Kuasa

Telah Meninggal Dunia Anak Kami Tercinta
Rendy Mohamad Sugiyat

Dalam Usia 34 Tahun Karena Kecelakaan Lalulintas
Di Jalan Tol Bekasi Pada tanggal 20 Oktober 1988.
Kami Seluruh Keluarga Yang Ditinggalkan Menghaturkan Terimakasih
Atas Semua Bantuan Moril Maupun Materil, Terutama Kepada :

1. **Bapak Wakil Presiden RI Sudharmono SH**
2. **Bapak Menpan Ir Sarwono Kusumaatmadja**
3. **Bapak Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH**
4. **Bapak Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono SH**

Serta Semua Pihak Yang Telah membantu Pada Saat Kecelakaan
Sampai dengan Penguburan Di Tegal Pada Tanggal 21 Oktober Lalu.
Semoga Jasa Baik Yang Telah Diberikan Kepada Kami, Diberkati Oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa

Kami Yang Berdukacita
Keluarga Besar Mohamad Sugiyat, Tegal

Digitized by Google

jang sejarah pemilu-pemilu pada masa Orde Baru. Secara kualitatif, kegiatan-kegiatan GOLKAR untuk meraih kemenangan itu berlangsung dengan pola-pola yang lebih menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila. Hal itu merupakan pencerminan dari semakin dewasa dan semakin matangnya GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik. Kegiatan-kegiatan GOLKAR untuk memenangkan Pemilu 1987 mengandung dinamika baru, yang membawa dinamika baru pula dalam keseluruhan kegiatan pemilihan umum 1987 itu.

Dalam Sidang Umum MPR 1988 juga terlihat dinamika yang menyegarkan, yang dapat ditangani GOLKAR secara baik, dengan semangat dan mekanisme Demokrasi Pancasila yang semakin matang dan dewasa pula.

Tantangan

Dewan Pembina, menyampaikan pandangan mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta kebijakan yang perlu diambil untuk menghadapi dan mengatasinya.

Pertama, mewujudnyatakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Melalui wakil-wakilnya di MPR, rakyat telah menetapkan dan mengamanatkan bahwa pembangunan nasional adalah merupakan pengamalan Pancasila. Dalam lima tahun mendatang ini maka penjabaran yang lebih luas dan mendalam dari pernyataan bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, perlu lebih terungkap dan lebih nyata perwujudannya.

Pernyataan tersebut memberikan kewajiban dan tanggungjawab yang lebih besar bagi GOLKAR, dalam rangka turut serta memberi corak bagi keseluruhan gerak pembangunan nasional. Kemampuan untuk mewujudnyatakan pernyataan tersebut, akan mempengaruhi taraf kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Pancasila itu sendiri. Hal ini merupakan tantangan besar dan sekaligus tugas berat bagi seluruh jajaran GOLKAR dalam kepeloporannya untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Khususnya dalam pembangunan politik, maka kita harus mampu melakukan operasionalisasi Pancasila dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku kehidupan politik, sehingga terwujud kultur politik nasional yang kita inginkan.

Perwujudan kultur politik nasional berdasarkan Pancasila itu sangat diperlukan ke masa depan, sehingga pembangunan politik pada aspek struktural dan fungsional yang telah berlangsung selama ini, benar-benar memiliki kemampuan mendasar dan strategis untuk terus berkembang secara optimal ke masa depan, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika kehidupan nasional. Kultur politik nasional berdasarkan Pancasila akan memberikan kemampuan mendasar dan strategis dalam upaya kita mengembangkan sistim politik nasional, yang di satu sisi mampu menjamin integrasi nasional yang kokoh dan di sisi lain mampu mendorong berkembangnya demokrasi yang sehat.

Kedua, Repelita V merupakan kelanjutan, peningkatan, pendalaman, dan perluasan dari segala hasil pembangunan yang telah dicapai hingga sekarang ini. Pembangunan adalah perubahan menuju kemajuan, sehingga penyegaran dan pembaharuan perlu dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut hendaknya lebih dihayati oleh seluruh jajaran Golongan Karya.

Ke dalam, Golongan Karya perlu melakukan penyegaran-penyegaran yang terencana dan teratur, baik yang bersifat institusional berupa pola dan mekanisme kerja, yang menyangkut personil berupa kepengurusan, keanggotaan, kekaderan, maupun yang menyangkut konsepsi-konsepsi berupa pemikiran dan gagasan yang mampu menghadapi tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional kita.

Ke luar, Golongan Karya perlu melakukan upaya-upaya yang mampu memelihara pandangan masyarakat tentang posisi dan peranan Golongan Karya sebagai kekuatan pembaharuan bangsa, yang konsisten dan mengandung dinamika serta kesegaran yang senantiasa berkembang semakin matang dan dewasa.

Ketiga, Repelita V nanti merupakan tahap penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama, yang sekaligus merupakan ancang-ancang memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua. Kerangka landasan yang berhasil diwujudkan pada Repelita IV, akan dimantapkan pada Repelita V, sehingga kita benar-benar dapat memasuki proses tinggal landas yang akan diawali pada Repelita VI nanti. Hal itu berarti bahwa pada lima tahun mendatang kita harus semakin mampu menangani secara lebih mendasar tentang masalah-masalah penting dan pelik, sehingga kita dapat memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua dengan mantap.

Di antara berbagai masalah penting dan pelik itu, adalah perihal lapangan kerja dan kesempatan kerja, pelayanan umum yang lebih baik serta masalah-masalah yang menyangkut keadilan hukum. Perihal lapangan kerja dan kesempatan kerja ini, merupakan masalah besar yang kita hadapi lima tahun mendatang ini. Kesadaran, prakarsa dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat perlu dibangkitkan dan digerakkan untuk turut serta menangani masalah tersebut.

Perihal pelayanan umum yang lebih baik, semakin didambakan oleh masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Pelayanan umum yang baik, terutama hal-hal praktis yang sehari-hari dirasakan dan menyentuh kepentingan masyarakat, semakin didambakan oleh rakyat kita.

Keadilan hukum semakin dituntut oleh masyarakat yang telah semakin menyadari bahwa kemakmuran dan keadilan, hendaknya dapat berkembang maju secara selaras, serasi dan seimbang, dalam satu napas. GOLKAR perlu berperan secara lebih luas dan mendalam, untuk turut serta mendukung pemecahan masalah-masalah tersebut. GOLKAR hendaknya dapat memberi motivasi pengabdian yang lebih kuat, bagi para kader yang berkarya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Keempat, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Perihal kualitas ini, merupakan penekanan tersendiri dalam perjalanan bangsa kita lima tahun mendatang ini, guna menyongsong Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua. Bagi GOLKAR, itu berarti bahwa kualitas organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang didukung oleh kualitas kader-kadernya, perlu mendapat perhatian tersendiri.

Kualitas sebagai organisasi kekuatan sosial politik, terutama perlu dikaitkan dengan fungsi-fungsi pokok yang diembannya yaitu: menghimpun aspirasi dan kepentingan masyarakat serta memperjuangkannya menjadi kebijakan dan program; mengembangkan kader-kader kepemimpinan yang berbobot dan berkarakter baik dalam tubuh sendiri maupun untuk masyarakat luas, bangsa dan negara; serta melakukan pendidikan dan komunikasi politik agar rakyat mampu melibatkan diri dan berpartisipasi secara sadar, sukarela dan berbobot dalam perjuangan bangsa melalui pembangun-

Digitized by Google

Golkar perlu membangun pola kerja yang sistimatis

an. Secara khusus perlu diperhatikan upaya peningkatan kualitas dari para kader GOLKAR, yang selama ini telah dibentuk dan diperankan di semua bidang dan menjangkau kalangan yang luas.

Peningkatan kualitas kader ini, di samping melalui berbagai pendidikan dan latihan, juga yang tidak kurang pentingnya, adalah dengan pembinaan dan pengembangan peranan serta karier para kader tersebut, sesuai dengan bidang karyanya masing-masing, termasuk yang bergerak atau berkiprah dalam lembaga-lembaga swadaya dan gerakan kemasyarakatan.

Keberhasilan kita melaksanakan kaderisasi yang bermutu, mempunyai pengaruh dan kaitan erat dengan keberhasilan melakukan regenerasi di segala bidang dan tingkatan, baik di dalam tubuh GOLKAR maupun secara umum dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang sedang dan akan terus berlangsung. Generasi pembebas akan merampungkan tugas pengabdiannya, untuk dilanjutkan oleh generasi penerus. Hal itu semua membutuhkan adanya kaderisasi yang baik dan bermutu.

Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia merupakan sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang akan datang. Sehubungan dengan itu, GOLKAR perlu menyusun konsepsi-konsepsi sebagai sumbangan pikiran, bagi perumusan rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kekuatan bangsa kita. Dalam kaitan itu, perlu perhatian tersendiri terhadap masalah pembangunan kelembagaan. Pembangunan kelembagaan ini mempunyai arti strategis. Orang boleh berganti, pelaku boleh datang dan pergi, akan tetapi missi dan konsepsi perjuangan yang melekat dengan kelembagaan yang kita bangun itu, haruslah terjamin kesinambungannya dalam dinamika kehidupan nasional.

Kelima, pentingnya pengembangan partisipasi dan bangkitnya semua potensi pembangunan dalam tubuh bangsa kita. Dalam hal ini, GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik dapat memberikan sumbangan yang besar. Sebagai organisasi dengan kader-kader yang tersebar di semua bidang dan kegiatan, maka GOLKAR dapat berbuat banyak dalam pengembangan partisipasi tersebut. Dalam kaitan itu maka perlu perhatian khusus terhadap peranan kader-kader GOLKAR yang berkarya dan berkiprah di lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tumbuh berdasar swakarsa dan swadaya masyarakat itu sendiri.

Kader-kader GOLKAR dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah dalam mendukung keseluruhan pembangunan nasional. Bersamaan dengan pengembangan partisipasi, kita menyadari perlunya peningkatan dan pemantapan disiplin nasional yang semakin dirasakan kebutuhannya dalam melanjutkan pembangunan nasional. GOLKAR perlu mengambil langkah-langkah dalam rangka turut serta meningkatkan dan memantapkan disiplin nasional itu. Peningkatan dan pemantapan disiplin nasional ini merupakan salah satu upaya penting yang perlu kita sukseskan dalam lima tahun mendatang ini, melalui kerja keras dan ketekunan.

Keenam, pentingnya sikap realistik yang dipadukan dengan idealisme. Sebagai suatu organisasi perjuangan, GOLKAR harus tetap memiliki idealisme yang merupakan motivasi kuat dan teguh dalam melaksanakan berbagai tugas perjuangan, menghadapi berbagai tantangan ke masa depan. Organisasi kekuatan sosial politik yang kehilangan idealisme, akan mengalami krisis peranan, posisi dan eksistensi karena terjebak dalam konservatisme dan stagnasi. Oleh sebab itu, upaya untuk memelihara idealisme perjuangan GOLKAR jangan sampai terlupakan.

Bersamaan dengan itu, disadari pentingnya sikap realistik dalam menghadapi berbagai kondisi obyektif, permasalahan dan tantangan, serta kenyataan akan kemampuan dan kendala-kendala yang ada. Sikap realistik yang dipadukan dengan idealisme itu akan membuat diri kita memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang ada, dalam segala keterbatasan yang melingkupi kita sekarang ini, tanpa kehilangan daya dorong atau motivasi untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dan lebih baik di masa depan. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita berupaya mencari peluang dan terobosan-terobosan, justru karena kita memiliki idealisme.

Pemilu 1992

Tantangan-tantangan yang dikemukakan tadi memang besar dan berat. Itu semua akan mampu kita hadapi, bilamana kerjasama dan kekompakan seluruh keluarga besar GOLKAR dapat tetap terjalin dengan sebak-baiknya, semakin mantap dan matang dari waktu ke waktu. Dalam kaitan itu, maka kedewasaan dan kematangan organisasi secara keseluruhan, kualitas dan peranan kader di semua bidang, perlu kita tingkatkan.

Dengan demikian, GOLKAR akan berjalan lebih mantap lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya ke masa depan, termasuk memenangkan Pe-

Digitized by Google

milu 1992. Pemenangan Pemilu 1992 sangat dibutuhkan, sebagai legitimasi demokratis, bagi peranan sosial politik GOLKAR untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Khususnya dalam rangka pemenangan Pemilu 1992, Ketua Dewan Pembina menyarankan kepada DPP GOLKAR untuk memperhatikan beberapa hal: *Pertama,* perlu penyegaran yang terus menerus berkenaan dengan ide-ide yang relevan dengan kepentingan rakyat, dan masa depan perjuangan bangsa dan *kedua,* pemantapan sistim dan pola kerja organisasi, termasuk kerjasama dan kebersamaan seluruh Keluarga Besar GOLKAR, yang mampu mengaktifkan kader-kader GOLKAR di semua tingkatan dan bidang karya.

Ketiga, peningkatan kualitas kader-kader GOLKAR, baik itu kualitas diri maupun kualitas karya pengabdiannya, di tengah-tengah masyarakat. Peningkatan kualitas kader-kader GOLKAR merupakan bagian dari peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas itu, perlu diberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan suatu faktor menentukan, dalam perpacuan kemajuan bangsa-bangsa dewasa ini, dan terlebih lagi dimasa depan.

Keempat, perhatian tersendiri terhadap kaum muda, baik pria maupun wanita, yang masih dibangku pendidikan maupun yang sudah bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, yang di daerah perkotaan maupun pedesaan, karena merekalah kelompok pemilih terbesar pada Pemilihan Umum tahun 1992 yang akan datang.

Kita semua paham, bahwa kekuatan suatu gerakan sosial politik sesungguhnya terletak pada ide-idenya yang relevan dengan kepentingan rakyat dan memberi harapan akan masa depan yang lebih baik, organisasi yang teratur dan mantap, kepemimpinan yang handal dalam mempersatukan dan menggerakkan potensi-potensi yang ada, serta kader-kader yang bermutu dan dipercaya oleh rakyat.

Yang terakhir tapi tidak kurang pentingnya adalah masalah pengadaan dana perjuangan. Untuk itu kita telah memiliki suatu Yayasan bernama "Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti" ("DAKAB"), yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola sumbangan dari para kader, anggota dan simpatisan GOLKAR. Prosedur pengeluaran dana tersebut adalah dengan permohonan dari DPP Golongan Karya kepada Dewan Pembina, yang kemudian diteruskan kepada pengurus yayasan. Dana tersebut merupakan dana abadi bagi kepentingan Keluarga Besar Golongan Karya, untuk meneruskan perjuangan dan pengabdiannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.□

YAYASAN PRASETIYA MULYA
INSTITUT MANAJEMEN PRASETIYA MULYA

Keluarga Besar

YAYASAN PRASETIYA MULYA bersama
INSTITUT MANAJEMEN PRASETIYA MULYA

mengucapkan :

SELAMAT KEPADA DEWAN PIMPINAN PUSAT
GOLONGAN KARYA MASA BAKTI 1988-1993

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi serta memberikan petunjukNya dalam mengemban tugas demi untuk kepentingan nusa dan bangsa.

Amin.

YAYASAN PRASETIYA MULYA
Institut Manajemen Prasetiya Mulya
Jln. Jagorawi Cilandak, Jakarta 12430
Telp. 7697143, 7697192, 7697255, 7697257, 7500461, 7500462, 7500463

Digitized by Google

GOLKAR Era Wahono-Witoelar

Musyawarah Nasional IV Golongan Karya, forum pemegang kedaulatan tertinggi organisasi, yang dilangsungkan di Jakarta, 20-25 Oktober lalu telah berakhir sukses. Pimpinan baru GOLKAR untuk periode 1988-1993 terbentuk, program umum organisasi untuk lima tahun mendatang berhasil dirumuskan, dan pernyataan politik juga dikumandangkan. Bersamaan dengan itu DPP periode 1983-1988, menyuguhkan pertanggungjawaban yang rinci dalam sebuah buku besar lengkap dengan anak lampiran yang oleh Munas disetujui secara aklamasi.

Sekitar 1000 peserta, 75 persen berasal dari daerah, memadati ruang sidang Balai Sidang Senayan, ketika Presiden Soeharto membuka Munas GOLKAR yang lama dinanti-nantikan, 20 Oktober malam lalu. Jauh-jauh hari para pengamat, politisi dan pemerduli politik sudah bersuara lantang tentang harapan dan kritik mereka terhadap organisasi sosial politik terbesar ini, yang bagi GOLKAR sendiri semuanya bermanfaat sebagai masukan untuk memperbaiki diri.

Kritik, harapan dan pujian yang menggema selama masa pra Munas semuanya terakomodasi dalam sejumlah produk Munas itu sendiri. Keinginan regenerasi misalnya, tersimpul baik dalam komposisi DPP baru yang berjumlah 45 orang itu. Disana tercermin aspek regenerasi mutu dan asas kesinambungan yang selama ini selalu menjadi perhatian GOLKAR dalam setiap policy organisasi, khususnya yang menyangkut personil.

Suara-suara yang menginginkan agar GOLKAR lebih terbuka, dijawab secara jitu dalam sidang-sidang Munas. Sidang-sidang komisi yang membahas masalah intern organisasi, dinyatakan terbuka untuk pers. Ini untuk pertama kali dalam sejarah Munas forum seperti itu boleh dinikmati pers dan pengamat maupun peninjau. "Hanya sayang keterbukaan yang dikembangkan selama Munas GOLKAR, tidak dimanfaatkan oleh pers sebaik-baiknya." ujar Zulharmans Ketua Departemen Penerangan, Penerbitan dan Massmedia. "Pers terlalu disibukkan oleh bursa ketua umum dan sekjen," katanya. Padahal ada sejumlah hal penting dalam Munas yang seyogyanya menjadi fokus perhatian pers juga.

Dan tentang sejumlah keprihatinan sosial ekonomi, seperti kesenjangan sosial, masalah keadilan serta membengkaknya angkatan kerja yang harus disediakan lapangan kerja, dijawab GOLKAR dalam pernyataan politik maupun program umum-nya. (Baca pernyataan politik dan program umum pada halaman lain majalah ini).

Tatkala membuka Munas pada tanggal 20 Oktober malam, Presiden Soeharto mengingatkan bahwa di bidang ideologi, tidak ada ideologi lain yang cocok dengan budaya bangsa Indonesia, kecuali Pancasila. Oleh karena itu kepada GOLKAR diminta agar terus memperkuat komitmennya terhadap Pancasila yang dalam sejarah eksistensinya, telah menjadi sikap dasar GOLKAR sendiri.

Dan dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina GOLKAR, Soeharto pun mengingatkan sejumlah tantangan di masa depan, di samping mencatat beberapa keberhasilan selama ini. (Lihat pertanggungjawaban Dewan Pembina pada rubrik *Fokus).*

Zulharmans

Munas telah menonjolkan sejumlah aspek baik yang bersifat intern organisasi, maupun yang mengacu pada kepentingan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Penyempurnaan beberapa diktum dalam AD/ART mencerminkan bahwa GOLKAR selalu siap agar tetap menjaga relevansi eksistensinya dengan tantangan yang selalu berubah. Program umum dan pernyataan politik mencerminkan betapa GOLKAR menjaga relevansi keberadaannya dengan tuntutan masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks itulah sebenarnya Munas dilaksanakan. Dalam wawancara dengan pers menjelang berlangsungnya Munas, Ketua Umum GOLKAR periode 1983-1988, Sudharmono SH, menjelaskan bahwa Munas GOLKAR sebenarnya miniatur dari pelaksanaan demokrasi kita. Dengan demikian dalam Munas GOLKAR terpantul sejumlah kepentingan nasional, walaupun ihwal Munas itu sendiri adalah peristiwa organisasi. Peng-

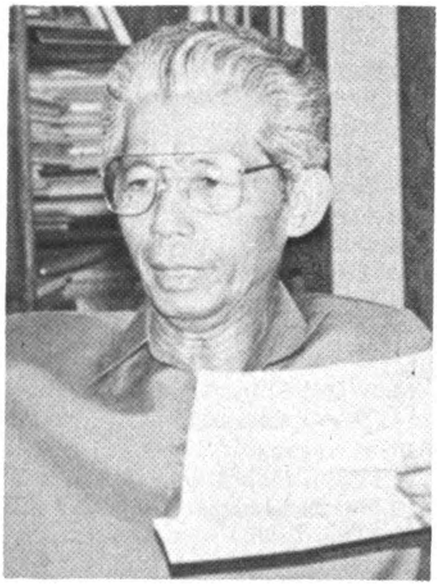

Sudharmono, SH

Digitized by Google

kaderan misalnya yang dalam era Sudharmono-Sarwono mencapai 32 juta orang, tidak hanya dimaksudkan untuk memperbesar jumlah jajaran anggota GOLKAR, tetapi diarahkan untuk menjadi kader-kader bangsa. Untuk itu kader-kader GOLKAR yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, baik karakterdes maupun kader-kader fungsional, dibekali dengan sejumlah wawasan yang mengacu pada kepentingan nasional.

Namun bagaimana pun juga, siapa ketua umum dan sekjen serta komposisi DPP yang bakal dihasilkan Munas, tetap saja menyedot perhatian utama. Karena, dalam memperjuangkan kepentingan nasional, unsur manusia yang memimpin GOLKAR juga penting. Sebuah program yang brilian, akan mubazir kalau tidak didukung oleh manusia pelaksana yang cekatan.

Jauh sebelum Munas berlangsung, pers berspekulasi tentang siapa yang bakal menjadi ketua umum GOLKAR periode lima tahun mendatang. Entah bersumber dari mana, pers menyodorkan sejumlah nama yang potensial

Wahono

untuk jabatan itu. Maka nama-nama seperti Rudini (Mendagri), Soesilo Sudarman (Menparpostel), Azwar Anas (Menhub), Sudomo (Menko Polkam), Soepardjo Roestam (Menko Kesra) dan Sudharmono sendiri disebut-sebut meramaikan bursa. Pernyataan Sudharmono bahwa tidak ada larangan Wakil Presiden menjadi Ketua Umum GOLKAR, semakin meramaikan spekulasi terhadap para calon untuk jabatan tertinggi di GOLKAR ini.

Namun ketika menyampaikan pertanggungjawaban DPP masa bhakti 1983-1988 di hadapan Munas Sudharmono menyatakan tidak bersedia dipilih menjadi Ketua Umum GOLKAR lagi, karena harus berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai Wakil Presiden yang sangat berat, baru terjawab spekulasi yang dikembangkan pers, walaupun DPD I GOLKAR Sumatera Selatan misalnya, masih menghendaki Sudharmono tetap menduduki jabatan Ketua Umum GOLKAR untuk periode lima tahun mendatang.

Munas akhirnya sepakat memilih Letjen (pur) Wahono, mantan Gubernur Jawa Timur yang kini ditunjuk Presiden Soeharto sebagai Irjenbang, menjadi Ketua Umum DPP GOLKAR masa bhakti 1988-1993. Dia didampingi Sekjen Ir. Rachmat Witoelar, empat wakil sekjen, delapan ketua,

Komposisi dan Susunan Personalia DPP GOLKAR Masa Bhakti 1988-1993

1. Ketua Umum	**: Wahono**	**22. Departemen Pemuda**	**: Ir Didiet Haryadi**
2. Ketua	**: AE Manihuruk**		**: Drs Slamet Effendi Yusuf**
3. Ketua	**: HM Tarmoedji**	**23. Departemen Tani dan Nelayan**	**: Ir Sartojo**
4. Ketua	**: Oetojo Oesman**		**: Ir Sujoto Hardjosutowo**
5. Ketua	**: Drs Imam Soedarwo**	**24. Departemen Tenaga Kerja**	**: Marzuki Achmad, SH**
6. Ketua	**: Drs Waskito**		**: Postdam Hutasoit**
7. Ketua	**: Ny Siti Aminah Sugandhi**	**25. Departemen Wanita**	**: Sri Rejeki SH**
8. Ketua	**: Sugeng Widjaya**		**: Ny Gunariah K Mochdie**
9. Ketua	**: Jacob Tobing MPA**	**26. Departemen Kerohanian**	**: H Umar Mansyur**
10. Sekjen	**: Ir Rachmat Witoelar**		**: H Kafrawi MA**
11. Wakil Sekjen	**: Ir Usman Hassan**	**27. Departemen Cendekiawan & Hublu**	**: Aulia Rachman SH**
12. Wakil Sekjen	**: Andi Mochtar SH**		**: Djoko Sudjatmiko**
13. Wakil Sekjen	**: dr Suhadi**	**28. Departemen Seni dan Budaya**	**: Drs Irsyad Sudiro**
14. Wakil Sekjen	**: Drs Freddy Latumahina**		**: Erwan Sukardja, SH**
15. Bendahara	**: Eric Samola SH**	**29. Departemen Koperasi dan Wiraswasta**	**: Baramuli SH**
16. Wakil Bendahara	**: Ny TS Darsoyo**		**: Ir Iman Taufik**
17. Wakil Bendahara	**: Ponco Sutowo**	**30. Departemen Pengabdian Masyarakat**	**: Ny Ir Tati Sumiarno**
18. Departemen Pemenangan Pemilu	**: Anang Adenansi**		**: Drs Agung Laksono**
	: Moh. Barir SH	**31. Departemen PPLH, E & SA**	**: Dr Haryanto Dhanutirto**
19. Departemen OKK	**: Anton Prayitno**		**: Dr Alfian.**
	: Mohamad Hatta BBA		
20. Departemen Pendidikan	**: Basyuni Suryaatmadaja**		
	: Thomas Suyatno		
21. Departemen Penbitmassmed	**: Zulharmans Said**		
	: Agus Tagor		

Digitized by Google

satu bendahara, dua wakil bendahara dan 14 departemen yang masing-masing dipimpin oleh dua ketua. Jumlah seluruh anggota DPP: 45 orang.

Tidak ada penambahan jumlah departemen dalam komposisi sekarang ini. Departemen Cendekiawan dan Departemen Hubungan Luar Negeri yang sebelum ini berdiri sendiri-sendiri, dilebur menjadi Departemen Cendekiawan dan Hubungan Luar Negeri. Sementara departemen baru adalah Departemen Penelitian, Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Alam. (Baca komposisi DPP GOLKAR masa bhakti 1988-1993).

Sebelum pimpinan GOLKAR sekarang diumumkan, yang tidak kalah menarik perhatian adalah komposisi formatur. Tapi setelah diadakan musyawarah dan mufakat, maka Harmoko sebagai pimpinan Munas, setelah DPP lama demisioner pada tanggal 20 Oktober, mempersilahkan setiap unsur menyampaikan nama-nama disepakati untuk menjadi formatur. Maka dari unsur Dewan Pembina, terpilih Prof. Dr. Awaloedin Djamin MPA, dari unsur DPP lama: AE Manihuruk dan NY. AS. Moerpratomo, sedangkan dari unsur daerah terpilih Basoefi Sudirman (DKI Jakarta) Drs. Abdoellah Moeda (Aceh), H. Alim Bachrie (Sulsel) dan Lukman SR (NTB). Setelah berunding singkat di atas podium, para formatur memilih Awaloedin Djamin sebagai ketua, Basoefi Sudirman, sekretaris dan lainnya sebagai anggota.

Melanjutkan Tri Sukses

Tatkala dilantik lima tahun lalu, Sudharmono menyimpulkan seluruh rangkaian kegiatan organisasi dalam dua kata kunci: Tri Sukses. Agaknya Tri Sukses ini pun menjadi program DPP GOLKAR di bawah Wahono-Witoelar. Adapun Tri Sukses menyangkut tiga sukses utama, yaitu Sukses konsolidasi yang meliputi konsolidasi wawasan, konsolidasi organisasi dan konsolidasi idiil. Dua sukses lainnya adalah Sukses Pelita V dan Sukses Pemilu 1992.

Dalam laporan pertanggungjawaban DPP periode 1983-1988, Sudharmono secara panjang lebar menguraikan apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencapai ketiga sukses itu. Memang masih banyak kekurangan, tetapi prestasi mengesankan pun ada. Salah satu yang paling menonjol adalah kemenangan GOLKAR dalam pemilu 1987 yang mencapai 73 persen

Rachmat Witoelar

suara pemilih. "Kalau untuk meraih kemenangan sebanyak itu terasa berat, maka mempertahankan kemenangan tersebut adalah lebih berat lagi," kata Sudharmono dalam acara serah terima di kantor DPP GOLKAR, Slipi.

Mempertahankan kemenangan yang demikian besar itulah yang menjadi tantangan terberat GOLKAR dalam kurun lima tahun mendatang. Oleh karena itu maka ketika DPP baru menghadap Ketua Dewan Pembina, Soeharto, di Bina Graha pertengahan November lalu, Pak Harto secara khusus mengingatkan DPP sekarang akan pentingnya pembinaan generasi muda, terutama kelompok umur 13 tahun yang dalam waktu lima tahun mendatang mempunyai hak pilih.

Inilah tantangan terberat GOLKAR lima tahun mendatang. Dalam kesempatan jumpa pers, Senin 3 November lalu, Sekjen Rachmat Witoelar mengakui betapa beratnya tantangan itu. "Namun dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Insya Allah, kita akan dapat mengatasinya," ujar Rachmat. Kebersamaan yang dimaksud Rachmat tentu adalah kekompakan semua unsur yang menjadi pilar GOLKAR selama ini, yaitu yang dikenal dengan kekuatan tiga jalur.

Mengenai langkah-langkah lanjut sebagai penjabaran program umum GOLKAR memang belum rampung dibahas, tetapi menurut Rachmat, tetapi program, mekanisme dan hal-hal lain yang telah dirintis oleh DPP periode 1984-1988 akan dilanjutkan sejauh mungkin, sambil mengadakan perbaikan-perbaikan disana-sini sejauh hal itu diperlukan.

Hanya untuk lebih memacu efisiensi organisasi, Rachmat berjanji akan memadukan potensi dalam semangat yang lebih profesional. Maka sebagai langkah awal, diadakan pembagian tugas dan wewenang para ketua.

Ketua, AE Manihuruk diserahi tugas menangani masalah di bidang politik, membawahi Departemen Penerangan, Penerbitan dan Massmedia, dibantu oleh bendahara, Eric Samola SH.

Ketua, H Tarmoedji, diserahi tugas menangani masalah di bidang kerohanian dan membawahi Departemen Kerohanian dibantu Wakil Bendahara, Ponco Sutowo.

Ketua, Oetojo Oesman SH, diserahi tugas menangani masalah-masalah di bidang hukum dan umum, dan membawahi Departemen Cendekiawan dan Hublu serta Departemen Penelitian, Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Alam dibantu oleh Wakil Sekjen, Andi Mochtar SH.

Ketua, Drs Imam Soedarwo diserahi tugas menangani masalah-masalah di bidang ekonomi dan membawahi Departemen Tani dan Nelayan dan Departemen Koperasi dan Wiraswasta dibantu oleh Wakil Sekjen, Usman Hassan.

Ketua, Drs Waskito diserahi tugas menangani masalah-masalah sosial budaya dan membawahi Departemen Pendidikan dan Departemen Seni Budaya dibantu oleh Wakil Sekjen, Freddy Latumahina.

Ketua. Ny. Siti Aminah Sugandhi ditugasi menangani masalah-masalah sosial dan membawahi Departemen Wanita dan Departemen Pengabdian Masyarakat dibantu oleh Wakil Bendahara Ny. TS Darsoyo. Sedangkan Ketua, Sugeng Wijaya diserahi menangani masalah-masalah hankam dan membawahi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pemuda dibantu oleh Sekjen Rachmat Witoelar.

Dan Ketua, Drs. Jacob Tobing MPA diserahi tugas menangani masalah-masalah organisasi, kaderisasi dan keanggotaan dan pemenangan pemilu dan membawahi Departemen OKK dan Pemenangan Pemilu dibantu Wakil Sekjen dr. Suhadi.

Pembagian bidang tugas seperti ini dimaksudkan agar terjalin koordinasi yang efektif antar bidang sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti diharap sinkron.

Menjaga Kehormatan.

Tugas DPP sekarang memang dirasa berat. Selain meningkatkan kualitas kader yang berjumlah 32 juta

Digitized by Google

orang, tantangan bangsa menjelang era tinggal landas pun tidak sedikit. Program umum dan pernyataan politik yang menjadi perjuangan GOLKAR ke depan, tidak otomatis diraih dengan mudah. Pemilu 1992 adalah ujian berat sejumlah tekad kita.

Maka tatkala menyampaikan pidato pada penutupan Munas yang baru lalu ketua umum terpilih, Wahono, tidak ingin berjanji macam-macam, kecuali menjaga kehormatan berupa kepercayaan Munas yang telah diberikan kepadanya. Ini adalah sebuah tekad besar yang terungkap dalam nada kerendahan hati.

Wahono menyadari bahwa kita sekarang tidak berada pada jaman kegemilangan ekonomi. Dia justru naik ke pentas politik pada saat bangsa ini menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor internasional. Namun Wahono merasa beruntung karena dia mewarisi sebuah organisasi yang memiliki landasan kokoh. Tentu saja atas fakta ini, ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya patut dialamatkan kepada Sudharmono SH yang dalam era kepemimpinannya telah membuat GOLKAR tampil sebagai organisasi yang solid.

Kesulitan dan tantangan yang dihadapi GOLKAR di masa mendatang, tidak membuat DPP sekarang kecut. Walaupun tidak berjanji macam-macam - kebiasaan dalam kultur ketimuran -, namun sebuah tekad sebenarnya begitu membara dalam diri para anggota DPP sekarang ini. Tekad itu tercermin dalam kalimat Wahono: "Kita tidak sedang berada dalam kurun waktu kegemilangan dan tidak sedang bergelimang dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti di waktu-waktu yang lalu. Namun kami bukan lah anak-anak bangsa yang rapuh. Kami bukanlah anak bangsa yang berhati kecil, juga bukan anak bangsa yang cengeng. Kami dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang tangguh, kokoh dan menghayati dengan pasti nilai-nilai kejuangan dari bangsa yang tidak pernah menyerah, bangsa yang teruji dan terbukti dalam sejarah, selalu berhasil mengatasi krisis sebesar apapun yang menghadangnya."

Bila tekad ini begitu membara dalam dada semua anggota DPP sekarang maka, kesulitan sebesar apapun akan bisa diatasi. Bersama dengan janji keterbukaan dan kekompakan serta kerja keras semua unsur dalam keluarga besar GOLKAR, agaknya tidak ada kesulitan yang tidak mampu

Wahono, belum banyak menjanjikan apa-apa

diatasi.

GOLKAR memang telah menampilkan sebuah sosok yang kokoh. Ini adalah modal yang baik bagi kepengurusan Wahono-Witoelar. Kekokohan GOLKAR sebagai organisasi, sangat menonjol pada era Sudharmono-Sarwono, demikian pengakuan Ekie Syahrudin, aktivis Angkatan 66. "Mengumpulkan 32 juta kader selama 5 tahun dan memenangkan 73 persen suara pemilih dalam pemilu 1987, adalah prestasi fantastis GOLKAR di bawah Pak Dhar," kata Ekie.

Ekie Syahrudin

Ini semua tentu warisan prestasi yang sekaligus menjadi tantangan. DPP sekarang tentu sangat bergembira, karena pada saat serah terima kepengurusan GOLKAR periode 1983-1988 kepada DPP 1988-1993, Sudharmono sendiri berjanji tidak akan berlaku sebagai "orang luar" setelah habis masa jabatan sebagai Ketua Umum GOLKAR. Komitmen ini terasa melegakan. Ini adalah contoh yang harus diikuti oleh para kader yang karena berbagai keterbatasan, tidak sempat mengabdi bagi GOLKAR lewat jalur kepengurusan DPP kali ini. "Sebagai kader GOLKAR tidak seharusnya merasa "di luar pagar" bila tidak masuk dalam kepengurusan DPP," ujar Sarwono, mantan Sekjen GOLKAR.

Era Wahono-Witoelar memang masih panjang. Mengukur prestasi sebuah kepengurusan yang masih menjejakkan kaki di garis start, terlalu dini untuk dilakukan. Tapi tekad dan semangat kebersamaan dalam suasana keterbukaan dalam rangka memimpin GOLKAR lima tahun mendatang, merupakan modal awal yang baik. Selamat bekerja!.☐ (LT/BM/DT/WT/SB)

Digitized by Google

Try Sutrisno

Jalur A Selalu Berada di Dalam dan Bersama GOLKAR

Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal TNI Try Sutrisno, selaku Ketua Jalur A dalam Munas IV GOLKAR yang baru lalu menegaskan bahwa sejarah pertumbuhan GOLKAR telah mencatat bahwa jalur A selalu berada di dalam dan bersama-sama dengan dinamika gerak maju Golongan Karya. Penegasan ini merupakan yang kedua kalinya dilontarkan oleh jenderal berbintang empat ini, karena sebelumnya, yaitu pada tanggal 2 dan 3 Oktober dalam kesempatan silaturahmi dengan para Ketua DPD I GOLKAR seluruh Indonesia periode 1988-1993 yang berkumpul di Jakarta, penegasan serupa pun digarisbawahinya.

Selama ini, demikian Try, segenap unsur jalur A selalu berusaha mengajak seluruh komponen Keluarga Besar Golongan Karya untuk mengutamakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan di dalam menghadapi setiap permasalahan baik ke dalam maupun ke luar. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan tersebut diharap akan terwujud kesetiakawanan yang mantap.

Dari tema Munas IV GOLKAR yang berbunyi: "Dengan Semangat Persatuan dan Kesatuan Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita V dan Sukses Pemilu 1992 dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila," Try menyimpulkan bahwa GOLKAR telah menyiapkan konsepsi bagi dirinya dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. "Tema ini bila direnungkan baik-baik, sungguh sempurna," ujarnya.

Namun demikian ia mengingatkan, tema tersebut sebenarnya menghadirkan di depan kita tugas bersama yang tidak kecil. Adalah tugas yang besar dan mulia bila GOLKAR mampu membawa seluruh rakyat melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. GOLKAR akan mampu mewujudkan tugas yang besar dan mulia itu, bila dilandasi oleh semangat kejuangan yang tinggi dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

"Saya yakin dengan jawaban itu, karena hal tersebut merupakan hikmah dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik dalam merebut maupun mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan dan pengamalan Pancasila, bila dilandasi oleh semangat kejuangan yang tinggi dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan, maka tujuan pembangunan nasional akan bisa kita capai secara bertahap," ujarnya.

Sadar bahwa tugas yang kita hadapi itu cukup berat, maka seyogyanya seluruh komponen Keluarga Besar Golongan Karya menyatukan diri dalam

Jalur A mengajak Golkar mengutamakan keselamatan

Digitized by Google

tekad untuk mempersiapkan perangkat organisasi GOLKAR yang benar-benar matang dan handal. Matang dalam menyusun program, dan handal dalam melaksanakan program-program tersebut. Dia berharap Munas hendaknya arif dalam menyusun program sehingga benar-benar menjabarkan amanat penderitaan rakyat yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Selain itu, dia berharap agar Munas bijaksana dalam memilih dan menetapkan kader-kader yang akan menjalankan roda organisasi sesuai dengan program yang ditetapkan. Dengan demikian segenap anggota Golongan Karya serta seluruh rakyat percaya bahwa tugas pembangunan diletakkan kepada pimpinan yang baik dan handal. Susunan DPP Golkar 1988-1993 pun hendaknya benar-benar dapat menjamin peningkatan kemantapan organisasi dan konsistensinya dalam mendukung perjuangan Orde Baru.

Tujuh Butir

Pada kesempatan itu, Try Sutrisno mengingatkan tujuh butir masalah yang ia sebut sebagai himbauan kepada para fungsionaris GOLKAR serta semua yang ber-Munas, agar dipahami, dalam rangka menyukseskan perjuangan GOLKAR.

Pertama, sebagai kekuatan sosial politik, GOLKAR hendaknya dapat memelihara dan memantapkan terus persatuan dan kesatuan nasional yang dijiwai oleh nilai luhur Pancasila serta dapat melindungi kepentingan rakyat dan tumpah darah Indonesia.

Kedua, Diharapkan pula agar Golongan Karya sesuai dengan fungsinya dapat berperan sebagai penampung kehendak dan hasrat serta penyalur aspirasi rakyat serta pula dapat menjadi sarana mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, adil dan makmur.

Ketiga, Golongan Karya sebagai salah satu modal dasar pembangunan hendaknya mampu menunjukkan dirinya sebagai kekuatan pembangunan yang tangguh dan berdisiplin serta menjadi pelopor dan pembaharu dalam setiap kegiatan pembangunan.

Keempat, bagi anggota/kader Golongan Karya agar berlomba-lomba melaksanakan hal-hal yang baik dan suci, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela.

Kelima, kepada para fungsionaris Golongan Karya, diharap agar bersungguh-sungguh dalam pembinaan para kader sehingga dapat terjamin kesinambungan dan konsistensi tekad perjuangan Orde Baru dalam diri setiap kader.

Keenam, seluruh kader GOLKAR, hendaknya mampu berperan sebagai agen pembangunan, khususnya dalam memantapkan kehidupan sistim politik demokrasi Pancasila.

Ketujuh, seluruh keluarga besar GOLKAR supaya terus meningkatkan kewaspadaan terhadap segala macam faham atau ide yang bertentangan dengan Pancasila, agar tidak masuk ke dalam tubuh organisasi pada umumnya, dan kader-kader GOLKAR pada khususnya.

Memahami hal tersebut di atas, Pangab menggarisbawahi bahwa kaderisasi Golongan Karya menjadi faktor yang sangat menentukan, apakah GOLKAR mampu atau tidak menjawab tantangan yang dipercayakan rakyat kepadanya.

Jalur A mencatat bahwa program kaderisasi GOLKAR dalam lima tahun terakhir telah dilakukan dengan intensif. Golongan Karya tentu bangga dengan jumlah kader yang ia miliki dewasa ini. Prestasi itu patut dihargai. Namun bila dihadapkan dengan tantangan di masa depan, belum dapat dikatakan memadai. Oleh karena itu sudah saatnya kader GOLKAR yang begitu banyak itu, ditingkatkan mutu agar mampu dan siap menghadapi era tinggal landas pembangunan nanti.

Peranan organisasi kekuatan sosial politik pada dasarnya lebih ditentukan oleh kekuatan kualitas kader yang dimilikinya. Dalam hal ini jalur A menghendaki kader Golongan Karya agar merupakan kader yang memiliki riwayat hidup dan latar belakang kehidupan yang secara ideologis politis tidak sedikit pun diragukan kesetiaannya terhadap Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, jalur A menghendaki agar kader GOLKAR merupakan warga negara Indonesia yang potensial dan dengan kesadaran dalam pengabdiannya menyumbangkan potensinya itu untuk kemajuan negara dan bangsa melalui Golongan Karya.

Dengan demikian pembentukan kader-kader GOLKAR, hendaknya benar-benar merupakan upaya secara sungguh-sungguh dalam suatu sistim yang mantap dan terencana sehingga hasilnya akan memiliki kekuatan pribadi yang kokoh dan tidak sedikitpun diragukan mental ideologinya. Serta berwibawa dan cakap dalam profesinya.

Dalam lima tahun terakhir ini GOLKAR telah mampu berkembang dengan pesat dan mantap serta telah mampu melaksanakan peran yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya dengan baik. Jalur A tentu saja merasa hormat dan berterima kasih tentang hal ini, terutama kepada segenap fungsionaris dan pengurus DPP periode 1983-1988.

Namun kita semua harus tetap sadar, walaupun GOLKAR telah mampu melaksanakan perannya dengan baik selama ini, akan tetapi di hadapan kita masih terbentang tantangan dan permasalahan-permasalahan baru yang selama ini belum dapat terselesaikan dengan baik, bahkan akan berkembang semakin berat.

Oleh karena itu jalur A berharap agar figur personalia DPP periode 1988-1993, khususnya figur Ketua Umum sebagai motor penggerak organisasi haruslah seorang kader yang mampu menjabarkan secara lebih mendasar keberhasilan GOLKAR selama ini sehingga secara vertikal dapat menyentuh individu rakyat Indonesia yang paling bawah dan secara horisontal mampu menjangkau pengalaman teknis yang luas mengenai berbagai bidang profesi.

Mengingat semakin mendesaknya masalah pemerataan pembangunan untuk dapat lebih diwujudkan, perspektif horisontal dan vertikal ini sangat perlu disamping kriteria-kriteria pokok lainnya, di antaranya adalah figur Ketua Umum benar-benar merupakan tokoh merakyat, jujur dan dapat merasakan denyut nadi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Keputusan DPP GOLKAR untuk melaksanakan konsolidasi melalui Munas IV yang didahului oleh Musda Tingkat II dan I benar-benar menunjukkan sikap dan tekad nyata GOLKAR, untuk lebih mendemokratisasikan Golongan Karya menurut tatanan dan budaya bangsa Indonesia.

Kiranya tekad tersebut tetap akan dapat tercermin dalam Munas IV, dimana seluruh komponen Keluarga Besar Golongan Karya mampu menunjukkan kehendak kader secara lebih nyata, sebagai kehendak seluruh kader GOLKAR yang juga merupakan kehendak sebagian besar rakyat Indonesia yang memberikan kepercayaannya kepada GOLKAR. Dengan demikian seluruh aspirasi rakyat terwadahi dan mendapat penyaluran yang baik dalam keputusan-keputusan Munas.☐

Digitized by Google

Rakyat Semakin Sadar Akan Peransertanya

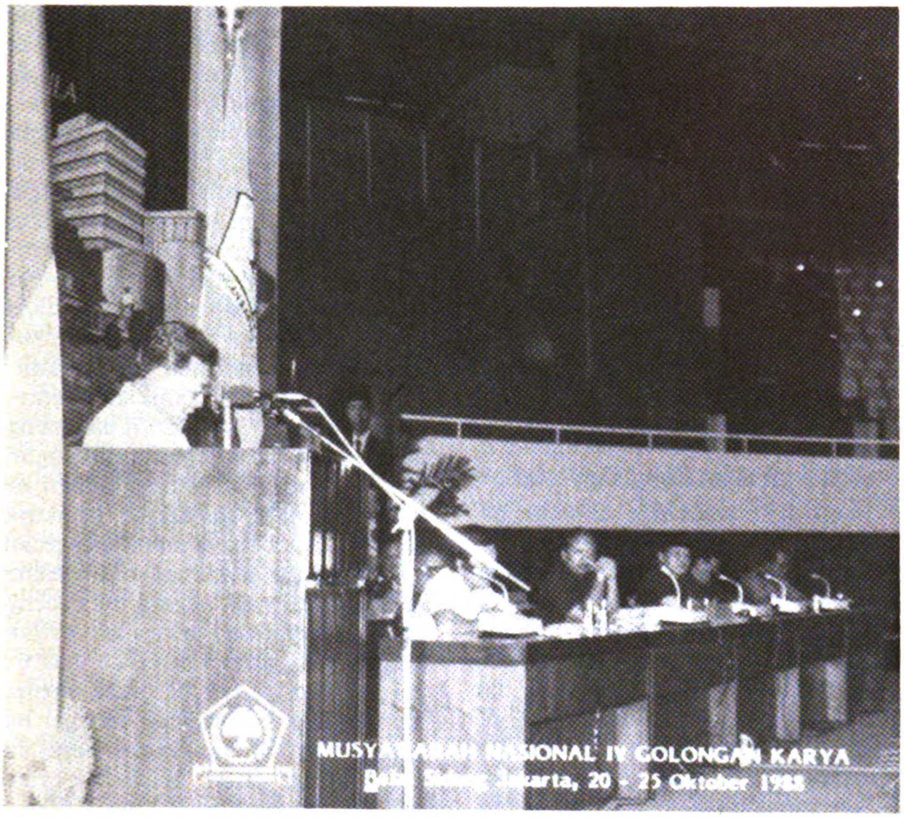

Keberadaan Golkar tidak lepas dari pembangunan nasional.

Keberadaan Golongan Karya sebagai organisasi kekuatan sosial politik tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya yang menyangkut pembangunan bidang politik. Pembangunan politik itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses konvergensi potensi kebangsaan, yang setelah mengawali proses membangsa sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, berhasil menegara yang mewadahi masyarakat kebangsaan itu di dalam negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Sekalipun mengalami berbagai kendala yang menghambatnya, namun proses konvergensi itu berlangsung terus, dan semakin intensif setelah Orde Baru. Proses konvergensi potensi nasional ini akan berlanjut sesuai dengan tekad Orde Baru, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Sampai pada tahap sekarang ini, yaitu menjelang tahun terakhir pelaksanaan Repelita IV berlalu, konvergensi itu telah mencapai integrasi di berbagai segi. Integrasi wilayah negara kebangsaan telah terwujud mencapai keutuhan wilayah Nusantara sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia yang berbhinneka telah menyatu di dalam wujud integrasi bangsa yaitu ketunggal ikaan yang bersatu padu. Pancasila yang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar negara, telah dapat menjadi dasar integrasi nilai bagi pola sikap dan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sampai pada akhir Repelita IV ini, telah dapat diciptakan kerangka landasan yang kokoh bagi penataan kehidupan bangsa di bidang politik sehingga potensi kebangsaan dapat terhimpun untuk melaksanakan pembangunan nasional yang lebih terarah, sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Demikian ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini, selaku Ketua Jalur B, dalam sambutannya pada Munas IV GOLKAR yang baru lalu.

Dalam penataan demikian itu partai-partai politik dan Golongan Karya merupakan modal dasar pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arahan konstitusional itu memberikan gambaran mengenai watak dan corak kehidupan politik dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu bahwa keanekaragaman sikap dan pendapat yang memang dihargai di dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila itu, merupakan kekayaan bangsa untuk disumbangkan bagi kepentingan nasional dengan sikap gotong royong dalam suasana kekeluargaan untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan yang utuh dalam kehidupan bangsa. Demikian luasnya ruang gerak yang tersedia bagi keanekaragaman yang dapat disumbangkan dalam wadah integrasi nilai Pancasila itu, sehingga kelanjutan proses konvergensi akan menciptakan meningkatkan ketahanan nasional dalam suasana stabilitas nasional yang dinamis, memungkinkan pengembangan kreativitas yang diabdikan pada peningkatan kemajuan bangsa, dan oleh sebab itu tidak perlu dikhawatirkan kecenderungannya ke arah keadaan monolitik yang beku. Jelas, bahwa keleluasaan dalam berdaya cipta dan melaksanakan pembaharuan itu, perlu selalu diacukan kembali kepada tolok ukur

Digitized by Google

yang menjadi Pola Dasar bagi Pembangunan Nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila, yang telah menjadi konsensus utama nasional, dan ternyata telah mampu menciptakan integrasi nasional dan stabilitas nasional.

Oleh sebab itulah, di dalam melaksanakan fungsi dan peranan demokratisnya, maka organisasi-organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai-partai politik dan Golongan Karya, dalam menyusun dan melaksanakan program-programnya perlu senantiasa setiap kali mengacukan kembali pada tolok ukur yang menjadi Pola Dasar pembangunan nasional tersebut. Bahkan Golongan Karya, yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang terbesar dan mempunyai jumlah anggota yang terbesar di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, perlu semakin memantapkan diri untuk dapat menjadi penyangga utama yang handal dalam berlangsungnya proses konvergensi potensi kebangsaan itu, yang tidak saja tampak nyata dari sikap politik dan program-programnya, tetapi juga dari perilaku para anggota, pimpinan dan kader-kadernya yang akan terus melanjutkan fungsi dan peranan Golongan Karya dalam kancah pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan memahami fungsi dan peranan seperti itu, maka keberadaan organisasi kekuatan sosial politik dalam Negara Republik Indonesia perlu saling membantu, saling melengkapi dalam kerjasama yang sebaik-baiknya, bukan sebagai "lawan politik" yang berusaha saling mengalahkan dan menghancurkan, namun justru saling mengemong agar dapat melaksanakan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya, karena semuanya itu merupakan bagian dari potensi kebangsaan yang tidak selayaknya dipisahkan dari kegiatan pembangunan nasional yang memerlukan partisipasi seluruh warganegara, tanpa kecuali, karena hasil-hasil yang akan diperoleh juga sepenuhnya diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian diharapkan, bahwa perwujudan demokrasi Pancasila tidak hanya berupaya menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara hak demokrasi dan kewajiban demokrasi, tetapi digenapi dengan tanggung jawab demokrasi yang perlu dilakukan oleh setiap pelaku politik, karena semua unsur kekuatan bangsa di bidang politik merupakan sarana bagi pencapaian tujuan nasional.

Pembaharuan Fundamental

Pembangunan politik yang kita laksanakan sampai sekarang ini telah berhasil mengadakan pembaharuan-pembaharuan politik yang fundamental, yaitu mengadakan perubahan dari sikap politik di jaman penjajahan yang serba tunduk kepada penjajah dan penuh kecenderungan sikap yang divergent, menjadi sikap baru sebagai bangsa merdeka yang menyadari hak, kewajiban dan tanggungjawab demokrasi dalam suasana yang cenderung bersifat konvergensi. Pembaharuan sikap politik bangsa demikian itu merupakan tanggapan yang tepat terhadap sejarah bangsa di masa lampau, yang dengan sikap politik lama, telah membawa malapetaka bagi kehidupan bangsa.

Pembangunan politik itu, di pihak lain menimbulkan kesadaran masyarakat yang makin besar peran sertanya dalam kehidupan politik. Sikap yang semakin rasional semakin nyata mewarnai sikap dan perilaku politik sebagian besar warganegara Indonesia. Ungkapan-ungkapan yang bernada rasional dan pragmatik semakin jelas terdengar, dan ada kalanya melantunkan nuansa skeptis, namun dengan penuh rasa tanggungjawab, diikuti dengan pemikiran-pemikiran positif yang berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan bersama oleh unsur-unsur potensi nasional yang terkait.

Kecenderungan demikian menunjukkan gelagat yang positif dan menggembirakan, karena hasil pembangunan politik itu tidak menghasilkan keberanian menyampaikan pendapat yang biasanya hanya untuk mengecam kekeliruan dan kekurangan penyelenggara pemerintah negara dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara, tetapi justru berusaha memahami setiap kekurangan sebagai hal yang wajar, namun dengan berusaha menemukan jalan keluarnya yang rasional dan pragmatik pula. Kedewasaan sikap politik demikian menunjukkan kematangan yang semakin ranum,

pertani

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN PT. PERTANI (PERSERO) PUSAT

Mengucapkan

"DIRGAHAYU KE-24 GOLKAR DAN SUKSESKAN MUNAS KE IV GOLKAR"

Kantor Pusat
Jl. Pertani No. 1—6 Durentiga, Kalibata
PO Box 247 KBY Jakarta Selatan
Telp. 7993108 (5 saluran)
Telex 47249 PERTAN IA

Digitized by Google

yang akan sangat diperlukan dalam proses tinggal landasnya pembangunan nasional di masa-masa mendatang. Setiap organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan perlu menyadari gelagat perkembangan demikian itu, agar dapat untuk semakin memberikan pembinaan yang tepat, sehingga proses pendewasaan dan pematangan selanjutnya tetap berada dalam acuan tolok ukur nilai Pancasila serta integrasi kebangsaan yang tumbuh dari padanya.

Proses pematangan dan pendewasaan demikian itu akan sangat ditentukan oleh pengkaderan organisasi kekuatan sosial politik kita. Pengkaderan bukanlah semata-mata hanya untuk menghimpun kekuatan suara Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum dalam rangka memperoleh kemenangan, tetapi perlu diarahkan untuk lebih mematangkan warga organisasi dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam pembangunan nasional yang meliputi segala bidang kehidupan bangsa. Hal itu berarti, bahwa kematangan kader adalah peningkatan kualitas, kemandirian dan kemampuannya dalam menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program untuk melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan bidang kegiatannya.

Oleh sebab itu kader bukanlah sekedar penghimpun massa, pembakar emosi massa di dalam masa kampanye Pemilihan Umum untuk memperoleh pendukung suara sebanyak-banyaknya, tetapi mereka seharusnya sebagai pemikir dan pelaksana yang dengan tekun dapat dijadikan teladan dalam melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya. Ini dapat mendorong peningkatan kualitas manusia anggota dan pendukung sesuatu organisasi kekuatan politik, agar semakin besar kemampuannya yang dapat disumbangkan kepada pembangunan nasional, atas dasar prakarsa dengan kekuatan sendiri, dan tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang mengintegrasikan segenap potensi kebangsaan dalam mencapai tujuan nasional.

Rudini menilai bahwa Tri Sukses yang dicanangkan di dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya telah dapat tercapai sebagaimana diharapkan, sampai selesainya Sidang Umum MPR 1988 yang lalu, sampai berakhirnya pelaksanaan Repelita IV pada tanggal 31 Maret 1989 yang akan datang. Konsolidasi organiasi telah berhasil baik. Pemilihan Umum Tahun 1987 telah menunjukkan hasil baik bagi Golongan Karya, antara lain dengan peningkatan suara yang diperoleh, demikian pula Sidang Umum MPR 1988 yang menghasilkan keputusan-keputusan selaras dengan aspirasi rakyat yang dibawakan Golongan Karya. Sekalipun tidak sedikit kendala yang dihadapi, Repelita IV dapat membawa kemajuan bagi kehidupan bangsa.

Keberhasilan Tri Sukses itu membawa konsekuensi yang lebih berat kepada Golongan Karya, untuk menanggapi kurun waktu lima tahun mendatang, yang akan melandasi pembangunan nasional dalam kurun waktu berikutnya. Sekalipun masalah-masalah mendasar di bidang politik telah dapat diselesaikan dengan menciptakan kerangka landasan itu tidak tergoyahkan lagi. Sementara itu masih cukup banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan, agar tinggal landas pembangunan nasional yang diharapkan akan dapat berawal dalam kurun waktu Repelita VI, dapat didukung oleh situasi kemasyarakatan yang benar-benar siap untuk itu, terutama sekali yang menyangkut kualitas manusia, dan lapangan kerja yang dihadapkan pada kelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia yang akan datang sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan jamannya, yaitu industri yang semakin maju ditunjang dengan sektor pertanian yang mengimbanginya. Namun hendaknya kita tidak terpana hanya pada segi-segi jasmaniah itu. Upaya pendidikan ke arah itu perlu disertai pendidikan dan pembinaan mental ideologis, agar Pancasila sebagai acuan integrasi kebangsaan tetap dapat dikembangkan sebagai nilai dasar yang menyemangati sikap dan perilaku generasi-generasi yang akan datang. Program-program Golongan Karya hendaknya dapat memberikan arahan bagi pemecahan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan dan perekonomian tersebut, yang memungkinkan terciptanya landasan yang memadai bagi berlangsungnya proses tinggal landas pembangunan.

Sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang besar, Golongan Karya perlu semakin mengembangkan suasana yang komunikatif dan akomodatif. Dengan sikap komunikatif itu, Golongan Karya semakin bersikap terbuka untuk saling berkomunikasi, saling asah, saling asuh dan saling asih, sehingga mampu menghimpun keanekaragaman pikiran yang dapat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional yang dihadapi. Dengan mengembangkan sikap akomodatif, Golongan Karya akan semakin mampu mewadahi aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga Golongan Karya mempunyai akar dalam masyarakat, dilengkapi dengan rasa cinta dan turut memiliki yang mendalam dari segenap warganya serta segenap pendukungnya.

Rudini berharap, agar Golongan Karya dapat menentukan langkah-langkah yang tepat bagi peningkatan pengabdiannya dalam pembangunan nasional di masa-masa mendatang. Tatanan kehidupan infrastruktur politik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, serta dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam ketentuan Undang-undang tersebut dibedakan fungsi antara Organisasi kekuatan Sosial Politik dengan Organisasi Kemasyarakatan, namun kedua-duanya saling mengisi sehingga dapat menyatupadukan seluruh potensi unsur infrastruktur politik untuk memberikan peran sertanya yang efektip dan produktip bagi suksesnya pembangunan.

Dalam hubungan inilah Munas hendaknya dapat mencapai keputusan penyempurnaan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut serta dapat memberikan pedoman konstitusional bagi organisasi untuk dapat tumbuh sehat, dinamis, demokratis, berkualitas, berkemampuan dan berkemandirian.

Figur Ketua Umum berikut anggota pengurus Dewan Pimpinan Pusat lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan dinamika kehidupan Organisasi, terealisasinya program-program organisasi dan bahkan citra organisasi di dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai modal dasar pembangunan nasional. "Saya yakin Musyawarah Nasional Golongan Karya menyadari hal ini dan mampu menyelesaikan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepada seluruh warga Golongan Karya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya," ujar Rudini. □

Digitized by Google

Pernyataan Politik Musyawarah Nasional IV Golongan Karya

Peserta Musyawarah Nasional IV telah melakukan telaah dan kajian dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia **Bapak SOEHARTO,** Laporan Dewan Pembina Golongan Karya, Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, sambutan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sambutan Menteri Dalam Negeri serta pendapat, usul dan saran maupun seluruh bahan yang disampaikan selama Musyawarah Nasional IV Golongan Karya di Jakarta tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 1988.

Keseluruhan isi dan jiwa sambutan, usul, pendapat dan saran tersebut mencerminkan hasrat, harapan, cita-cita serta tekad Golongan Karya untuk memantapkan hakekat kehadirannya sebagai penyelamat, pengawal dan pengamal Pancasila dan UUD 1945 dalam melanjutkan peranan dan fungsi di tengah-tengah kehidupan politik nasional, serta demi terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan kesadaran penuh terhadap getaran hati nurani rakyat serta memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta perkembangan dunia internasional, **GOLKAR** dengan ini menyampaikan Pernyataan Politik sebagai berikut:

1. Sadar dan yakin bahwa berhasilnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila bergantung pada keikutsertaan rakyat, yang diiringi dengan sikap mental, semangat serta disiplin para penyelenggara negara dan semua kekuatan kemasyarakatan, GOLKAR menyerukan kepada segenap potensi bangsa untuk bersama-sama membulatkan tekad memikul tanggung jawab dan mengambil peranan aktif dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2. Menyadari peranan dan kedudukannya sebagai pelopor dalam pembangunan dan pembaruan, GOLKAR menegaskan kembali keterikatannya untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, mengambil tanggung jawab untuk menjadi pelopor dan pendorong tercapainya sasaran guna memparipurnakan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan Repelita V, dan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua.

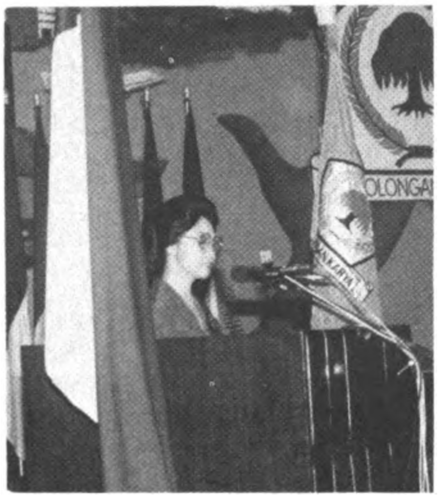

Ny Nafsiah Mboi dalam pembacaan pernyataan politik

3. Melalui usaha panjang tanpa mengenal lelah, patut kita syukuri keberhasilan bangsa Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang fundamental, yaitu penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Kesepakatan tersebut merupakan landasan kokoh bagi terwujudnya stabilitas nasional yang dinamis, pemantapan wawasan kebangsaan, yaitu Wawasan Nusantara, penuntasan integrasi nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kesepakatan tersebut juga sekaligus merupakan tonggak sejarah bagi usaha kita dalam mengukuhkan perwujudan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, negara yang melindungi segenap bangsa, dan negara yang mampu mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa negara, melalui segala peraturan perundang-undangan dan seluruh produk hukumnya harus memperlakukan secara sama semua warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, status sosial, serta asal usul. Pembudayaan kesepakatan tersebut merupakan tantangan lebih lanjut. Karena itu GOLKAR bertekad meningkatkan apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dengan melanjutkan usaha pembaruan politik secara konsisten dan sungguh-sungguh dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila.

4. Pelaksanaan pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang maju, modern dan demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dipandang perlu mengadakan pemantapan konsepsi masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan, yakni masyarakat yang teguh bertumpu kepada nilai-nilai dasar Pancasila serta mampu berkembang selaras dengan dinamika sosial dan gerak Pembangunan Nasional. GOLKAR bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat Pancasila sebagai bagian dari tugas dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

5. GOLKAR berkeyakinan bahwa sistim politik nasional yang berakar pada gagasan negara kekeluargaan merupakan pilihan yang paling tepat dalam masyarakat bangsa yang majemuk. Karena itu, GOLKAR bertekad terus bekerja keras dengan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan politik nasional yang integralistik dengan selalu sadar terhadap lingkungan perkembangan bangsa,

Digitized by Google

Digitized by Google

sesuai dengan perubahan-perubahan kemasyarakatan dalam arti seluas-luasnya. Dalam rangka itu, GOLKAR menolak setiap pandangan yang mengarah kepada bangunan politik yang monolitik maupun yang terkotak-kotak, dan menonjolkan kepentingan golongan, serta penyelewengan konsepsional terhadap konsepsi kenegaraan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesemuanya itu adalah untuk mengukuhkan sifat bangsa kita yang bhinneka tunggal ika.

6. Belajar dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, GOLKAR bertekad untuk meningkatkan kewaspadaan nasional, khususnya terhadap sisa-sisa G30S/PKI, subversi dan unsur ekstrim lainnya dalam rangka mencegah dan menangkal setiap kegiatan untuk mengubah serta menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, GOLKAR terus memantapkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan menolak setiap gagasan yang bersumber dari ajaran komunisme/marxisme-leninisme, konsepsi ala Nasakom, liberalisme maupun ideologi asing lainnya, serta terus melaksanakan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata.

7. GOLKAR terus memantapkan wujud kehidupan politik, dengan mendorong perkembangan organisasi-organisasi sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan agar makin dewasa, makin mandiri, dan berakar sehingga kehadiran organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan sekaligus ikut memantapkan sistim politik nasional di masa yang akan datang. Kemandirian organisasi-organisasi tersebut akan mendorong tingkat partisipasi politik rakyat yang didasari oleh kualitas kesadaran politik yang makin rasional dan dewasa. Kondisi tersebut akan mampu memantapkan proses demokratisasi pada semua aspek kehidupan bangsa.

8. GOLKAR bertekad melanjutkan upaya pengembangan generasi muda melalui kaderisasi dengan tujuan melestarikan keberadaan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, melalui pembangunan yang berkesinambungan. Sejalan dengan itu proses regenerasi di semua bidang kehidupan bangsa perlu dilaksanakan sehingga prestasi yang telah dicapai oleh generasi pendahulu, dapat dilanjutkan, disempurnakan serta dikembangkan, demi terwujudnya kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam masyarakatan yang modern, maju dan demokratis.

9. GOLKAR melalui para kader dan fungsionarisnya mendukung tekad Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang, komersialisasi jabatan, korupsi, pemborosan, dan tindakan tercela lainnya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian GOLKAR terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, ABRI, anggota veteran pejuang RI, pensiunan, dan masyarakat pada umumnya dengan sebaik-baiknya.

10. GOLKAR mendukung usaha pemerintah dalam mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum, sehingga hukum mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, dan menimbulkan kegairahan, kreativitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, GOLKAR terus berusaha untuk mendorong pelaksanaan pembaruan hukum untuk mewujudkan sistim hukum nasional berdasarkan Pancasila dan kesadaran hukum masyarakat.

11. GOLKAR menyadari bahwa keberadaan bangsa dan negara Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat internasional. Dalam rangka menegakkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun kultural, GOLKAR mendorong peningkatan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif yang dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan kepada kepentingan nasional. Selain itu GOLKAR turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, secara dinamis dan kreatif dengan makin memantapkan peranan Indonesia di berbagai fora pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non Blok, Organisasi Konperensi Islam, ASEAN, Inter Parliamentary Union, AIPO, dan lain-lain.

Melalui kader-kadernya di Pemerintahan GOLKAR mendorong upaya peningkatan dan perluasan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera.

Menciptakan kondisi yang lebih seimbang dan kerjasama saling menguntungkan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang merupakan prasyarat bagi penciptaan ketertiban dunia tersebut. Dalam hubungan itu, peningkatan kerjasama antara sesama negara berkembang, demikian pula pemantapan kerjasama dalam berbagai wadah regional dan sub-regional di pelbagai kawasan dunia merupakan dua perkembangan penting yang perlu didorong terus. Menyerukan kepada negara-negara maju agar menghindarkan diri dari setiap usaha yang bersifat proteksionistik dalam berbagai bentuknya.

12. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa tingginya tingkat saling ketergantungan di satu pihak dan persaingan keras antar bangsa di lain pihak, telah menjadi salah satu ciri dalam pergaulan masyarakat internasional dewasa ini. Sehubungan dengan itu, bangsa Indonesia perlu memainkan peran yang lebih besar sebagai bagian yang terhormat dan bertanggung jawab dalam masyarakat internasional. Bangsa Indonesia secara lebih bersungguh-sungguh perlu mengembangkan semangat keterbukaan, aktif dalam usaha menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta makin meningkatkan daya saing bangsa melalui perencanaan pembangunan nasional yang terpadu pada setiap bidang kehidupan.

13. Perjalanan pembangunan ekonomi sejak Orde Baru hingga sekarang telah mencatat pertumbuhan yang memadai dan membawa pengaruh positif pada berbagai sektor kehidupan Bangsa. Kendatipun demikian usaha untuk mewujudkan bentuk yang lebih kokoh dari perekonomian Indonesia, keterkaitan antarsektor dan antarbagian masih perlu dipacu sehingga kemajuan yang terjadi di tiap sektor dan bagiannya dapat dikonsolidasi dan diarahkan menjadi kekuatan Nasional yang terpadu. Hal tersebut merupakan langkah yang diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi internasional dan sekaligus menciptakan pertumbuhan masing-masing sektor dan bagiannya, sehingga dapat menarik maju potensi ekonomi yang lebih kecil menjadi satu rangkaian mata rantai kegiatan ekonomi yang saling menghidupi dan merupakan salah satu wujud dari usaha pemerataan. Oleh

Digitized by Google

karena itu diperlukan langkah-langkah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melaksanakan pembangunan.

14. Struktur ekonomi yang seimbang yang ingin dicapai pada Pola Pembangunan 25 Tahun Pertama ini diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi pada rencana pembangunan jangka panjang selanjutnya. Karena itu, GOLKAR sependapat bahwa Pola Pembangunan 25 Tahun Kedua merupakan kelanjutan dari Pola Pembangunan 25 Tahun Pertama yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan umum yang lebih maju dan kecerdasan bangsa yang makin meningkat.

Menyadari bahwa di masa mendatang tantangan yang dihadapi semakin berat, yakni antara lain berupa kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja dan penerimaan negara yang terbatas, sementara persaingan internasional yang semakin ketat terutama dalam pasar dan teknologi, GOLKAR memandang perlu untuk menggerakkan seluruh potensi ekonomi nasional, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Potensi ini dapat digerakkan bila kita tetap meletakkan Demokrasi Ekonomi sebagai asas pembangunan ekonomi nasional. Dalam asas ini terkandung bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target pembangunan ekonomi, akan tetapi keadilan sosial dan partisipasi potensi ekonomi masyarakat secara seimbang tetap harus diindahkan. Dalam hubungan ini harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

GOLKAR juga berpendapat bahwa dalam rencana pembangunan ekonomi jangka panjang yang kedua nanti faktor nonekonomi yang menunjang harus mendapat perhatian khusus. Faktor ini adalah pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan mutu keluarga antara lain dengan Keluarga Berencana.

15. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, GOLKAR melalui kader-kadernya dalam pemerintahan bertekad memberikan perhatian khusus pada pembangunan daerah yang tertinggal, daerah dan kepulauan terpencil dan daerah perbatasan. Selanjutnya berusaha mendorong berkembangnya kerjasama antara kota dengan daerah pedesaan sekitarnya dan antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu wilayah agar dapat tumbuh bersama secara serasi dan seimbang. Dalam hubungan ini GOLKAR memandang perlu segera direalisasikan pemekaran wilayah pada beberapa daerah tertentu.

16. GOLKAR mencatat adanya peningkatan peranan sektor masyarakat untuk ikut menjalankan roda perekonomian dan pembangunan. Hal itu merupakan salah satu ciri dari kondisi tinggal landas yang sedang kita persiapkan. Dengan demikian usaha untuk mendorong lebih lanjut pertumbuhan otoaktivitas masyarakat harus terus ditingkatkan. Dalam hubungan ini, deregulasi, debirokratisasi dan segala usaha lainnya untuk mencapai efisiensi dan mengikis ekonomi biaya tinggi harus dilanjutkan dan dipercepat untuk mencapai daya saing internasional, sehingga pada gilirannya juga berarti membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

17. GOLKAR dengan gembira mencatat keberhasilan program swasembada pangan khususnya beras. Dalam kurun waktu yang akan datang program swasembada pangan khususnya beras akan menghadapi tantangan berat. Karena itu diperlukan usaha-usaha kreatif untuk dapat mengamankan program swasembada pangan tersebut selain harus terus-menerus diupayakan agar diversifikasi pangan dapat meningkat karena sumbangan yang diberikan akan sangat besar artinya bagi Ketahanan Nasional.

Sementara itu usaha-usaha kreatif juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam program swasembada tersebut, yaitu para petani.

18. Perkembangan ekspor nonmigas merupakan hal yang menggembirakan dan perlu didorong terus dengan lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat guna memperbaiki posisi neraca pembayaran dan memperluas lapangan kerja. Sekalipun demikian, GOLKAR menyadari bahwa ditinjau dari sudut penerimaan dana dalam negeri, minyak dan gas bumi masih tetap dominan peranannya terutama di dalam APBN. Sehubungan dengan itu, di samping usaha untuk memperbaiki harga minyak bumi dan pengamanan pangsa pasar di pasaran internasional, diperlukan peningkatan usaha perbaikan iklim eksplorasi pencarian sumur baru, diversifikasi dan efisiensi penggunaan energi di dalam negeri, antara lain guna mengamankan volume minyak bumi yang diekspor.

19. GOLKAR menyerukan agar pemerintah Indonesia lebih gigih berjuang bersama-sama negara penghasil minyak lainnya untuk memperbaiki harga minyak bumi di pasaran internasional. Selanjutnya GOLKAR menyerukan agar negara-negara anggota OPEC tidak tenggelam dalam egoisme dengan menghindarkan diri dari pertentangan dan persaingan yang kurang sehat, sebaliknya mereka diminta agar berpegang teguh pada keputusan bersama yang telah diambilnya mengenai kuota dan harga patokan.

20. Sudah merupakan kenyataan bahwa akhir-akhir ini beberapa mata uang utama di dunia menguat nilai tukarnya terhadap dollar AS. Sebagai negara debitur, Indonesia telah menerima akibat langsung, yaitu pembengkakan kewajiban cicilan dan bunga hutang. Keadaan ini dirasakan sangat berat bagi Indonesia khususnya dan negara berkembang pada umumnya. Oleh karena itu, GOLKAR meminta kepada Pemerintah untuk berusaha sekuat tenaga agar akibat menguatnya mata uang dunia utama tersebut tidak sampai menghambat pembangunan selanjutnya. Disamping itu GOLKAR menyerukan agar Pemerintah merumuskan dan segera mengambil langkah-langkah untuk mengadakan pembicaraan dengan negara-negara kreditor guna meminimalisasikan beban tambahan hutang luar negeri.

21. GOLKAR menyadari bahwa perluasan lapangan kerja dan peningkatan mutu kerja merupakan tantangan besar dan mendesak yang menghadang perjalanan pembangunan dalam waktu mendatang. Pemecahan masalah tersebut tidak cukup diatasi dengan mengandalkan daya serap sektor modern yang harus menghadapi tantangannya sendiri antara lain peningkatan efisiensi dan produktivitas. Oleh karenanya diperlukan usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber daya potensial bangsa menjadi sumber daya nyata, serta mendorong terciptanya iklim perekonomian yang menguntungkan untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, kelautan serta sumber-sumber daya potensial lainnya. Iklim yang sama diperlukan bagi tumbuhnya sektor tradisional yang merupakan sebagian besar kegiatan golongan ekonomi lemah serta mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar.

GOLKAR akan secara aktif terus berusaha membina dan membantu golongan ekonomi lemah dengan cara mendorong lembaga-lembaga keuang-

Digitized by Google

an untuk meningkatkan peranan lebih besar dalam membantu permodalan dan menunjang pemasaran hasil produksinya. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan terus sikap yang positip bagi keberadaan sektor informal tersebut, dan untuk itu perlu diberi landasan hukum yang kuat untuk pembinaan pengusaha ekonomi lemah, termasuk koordinasi pembinaan sektor informal.

22. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Menyadari situasi dan posisi yang demikian, GOLKAR akan meningkatkan partisipasinya dalam membina koperasi dengan tujuan agar ia tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan tangguh. Selain itu, GOLKAR berusaha meningkatkan peranan dan usaha koperasi di berbagai sektor, mendorong serta mengembangkan kerjasama antar sesama koperasi dan antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan swasta.

23. GOLKAR menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan hidup merupakan masalah yang kait mengait dengan pembangunan. Sifat interdependensi yang terdapat dalam lingkungan hidup sulit diperlakukan sebagai sektor yang terisolasi dengan dunianya sendiri. Karena itu, GOLKAR mengajak masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan hidup guna diarahkan kepada usaha mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara semua unsur secara terus-menerus.

24. GOLKAR mengajak semua pihak untuk meningkatkan semangat kesetiakawanan, kejuangan, dan kebersamaan serta terus menegakkan prinsip hidup sederhana dalam rangka mempertinggi rasa tanggung jawab guna mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, GOLKAR mendorong dan mendukung setiap upaya untuk mencegah segala bentuk tindakan yang melahirkan ketidakadilan serta rasa ketidakamanan masyarakat.

25. Menyadari cepatnya perkembangan peradaban masyarakat dunia dewasa ini, GOLKAR ikut mendorong dan melaksanakan usaha-usaha yang terencana bagi perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempertinggi kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, maupun memperkokoh Ketahanan Nasional.

26. Sejak semula dan dengan taat asas, GOLKAR berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya yang bukan saja ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, intelektualitas, dan menambah keterampilan, melainkan lebih dari itu, pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dari usaha besar kaderisasi bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus merupakan upaya terpadu untuk membentuk manusia pengamal Pancasila yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin.

Sebagai bangsa yang majemuk, pendidikan harus merupakan bagian penting dari usaha untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, menebalkan rasa sebagai bangsa yang satu, mengukuhkan sifat bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Hal tersebut akan dapat dicapai dengan menciptakan suatu sistim pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.

MUNAS IV GOLKAR mencatat dengan gembira bahwa pada saat ini sedang dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Dalam hubungan ini, GOLKAR berharap agar undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan hukum dan kerangka struktural yang kokoh bagi tercapainya amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

27. GOLKAR menyadari sungguh-sungguh pentingnya peranan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia maupun sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan moral dan spiritual masyarakat Bangsa. Karena perlu terus dijamin iklim yang baik bagi kebebasan tiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

28. Menyadari tantangan yang dihadapi Bangsa dan Negara di masa kini dan mendatang, GOLKAR bertekad bersama-sama seluruh bangsa Indonesia untuk meningkatkan disiplin nasional yang dijiwai oleh ketaatan yang ikhlas terhadap kaidah, norma dan cita-cita nasional.

29. GOLKAR menyadari bahwa peran serta dan tanggung jawab wanita sangat menentukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, GOLKAR akan berperan lebih aktif lagi menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dalam meningkatkan peranan wanita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu GOLKAR mendorong wanita Indonesia untuk lebih berperan positif dalam menjalani fungsi dan peranannya sebagai pembentuk dan pendidik generasi muda yang merupakan tunas-tunas bangsa.

30. Sebagai modal dasar Pembangunan Nasional, ABRI adalah unsur penting yang merupakan stabilisator dan dinamisator bagi kehidupan nasional dalam rangka menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara, mengamankan, mengamalkan, serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam mendorong dan menyegarkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, GOLKAR bertekad untuk mengamankan dan mengembangkan kesepakatan Nasional mengenai peranan dwifungsi ABRI dalam kehidupan Nasional dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu GOLKAR turut mendukung kebijaksanaan pembangunan pertahanan keamanan yang ditujukan pada perwujudan daya tangkal yang tangguh, melalui pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan serta pendayagunaan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta secara terpadu dan terarah, sehingga terbina kekuatan pertahanan rakyat semesta berintikan ABRI yang efektif dan efisien yang didukung oleh kemampuan nasional yang nyata.

MUNAS IV GOLKAR menyampaikan Pernyataan Politik ini kepada seluruh lapisan masyarakat Bangsa Indonesia dengan penuh kesungguhan, dan dengan penuh rasa tanggung jawab memperjuangkan serta berusaha mewujudkan dengan tekad, kerja keras, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada cita-cita kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

GOLKAR mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersama-sama GOLKAR secara terus menerus mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita nasional melalui segala daya, upaya serta semangat pengorbanan yang tinggi.□

Digitized by Google

Nostalgia 10 November ala Surabaya

Bunyi sirene dan deru mesin pesawat Dakota yang terbang rendah di atas gedung gubernuran, cukup mendebarkan jantung warga masyarakat Surabaya. Ini membuat ribuan warga masyarakat Surabaya yang berkumpul di jalan Pahlawan tidak sempat beranjak dari tempatnya dan kepala menunduk berdoa selama 60 detik. Sedangkan di daerah lain yang masih wilayah Surabaya, terdengar pidato Bung Tomo yang membakar semangat para pejuang untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan sekutu dari berbagai sektor. Tidak ketinggalan pula pekik nasional Merdeka! Merdeka! Merdeka! bersahutan dari ribuan masyarakat itu. Yang sama sekali tidak menampakkan ketakutan atau lari menyelamatkan diri. Mereka tetap tenang, sabar dan tabah menghadapi suasana yang sedemikian rupa ini meskipun mesin pesawat Dakota dan bunyi sirene itu masih mendengung di udara bebas sekitar pukul 19.30 WIB.

Suasana yang mirip perang ini merupakan rekaman ulang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, sebagai peringatan Hari Pahlawan. Tidak mengherankan bila masyarakat yang hadir dalam acara 'Malam Nostalgia 10 November' mengenakan pakaian ala pejuang. Termasuk Walikota Surabaya dr. Poernomo Kasidi hadir malam itu dengan atribut warna abu-abu, lencana merah putih dan lengkap dengan samurai di pinggangnya ketika berjalan beriringan dengan Gubernur Jawa Timur H. Soelarso, Dr. Roeslan Abdulgani dan Jono Sewojo.

"Saya tidak menyangka bisa hidup sampai tahun 1988 bila teringat peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, pelucutan senjata tentara Jepang dan pertempuran melawan pasukan sekutu," tegas Jono Sewojo pelaku 10 Nopember 1945 dan mantan komandan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

Kemudian Dr. Roeslan Abdulgani yang menyambung acara ini dengan dialek Suroboyoan menceritakan, dulu ada seorang tokoh ludruk bernama Cak Durasim. Dia terkenal dengan kidungnya yang selalu berbau sindiran terhadap Jepang. Salah satu kidung Cak Durasim itu adalah *pagupon omahe doro, melu nipon tambah sengsoro*. Yang artinya, pagupon rumahnya merpati, ikut Nipon tambah sengsara. Akibat kidungnya itu Cak Durasim berurusan dengan pihak Jepang dan ditahan di penjara kompetai. "Namun, sekarang Cak Sidik — pelawak yang menghibur kita semua dalam acara 'Malam Nostalgia 10 Nopember' ini tidak akan mengalami nasib seperti Cak Durasim di jaman Jepang," ujar Roeslan berseloroh.

Selain itu Roeslan Abdulgani yang akrab dipanggil Cak Roes menilai,

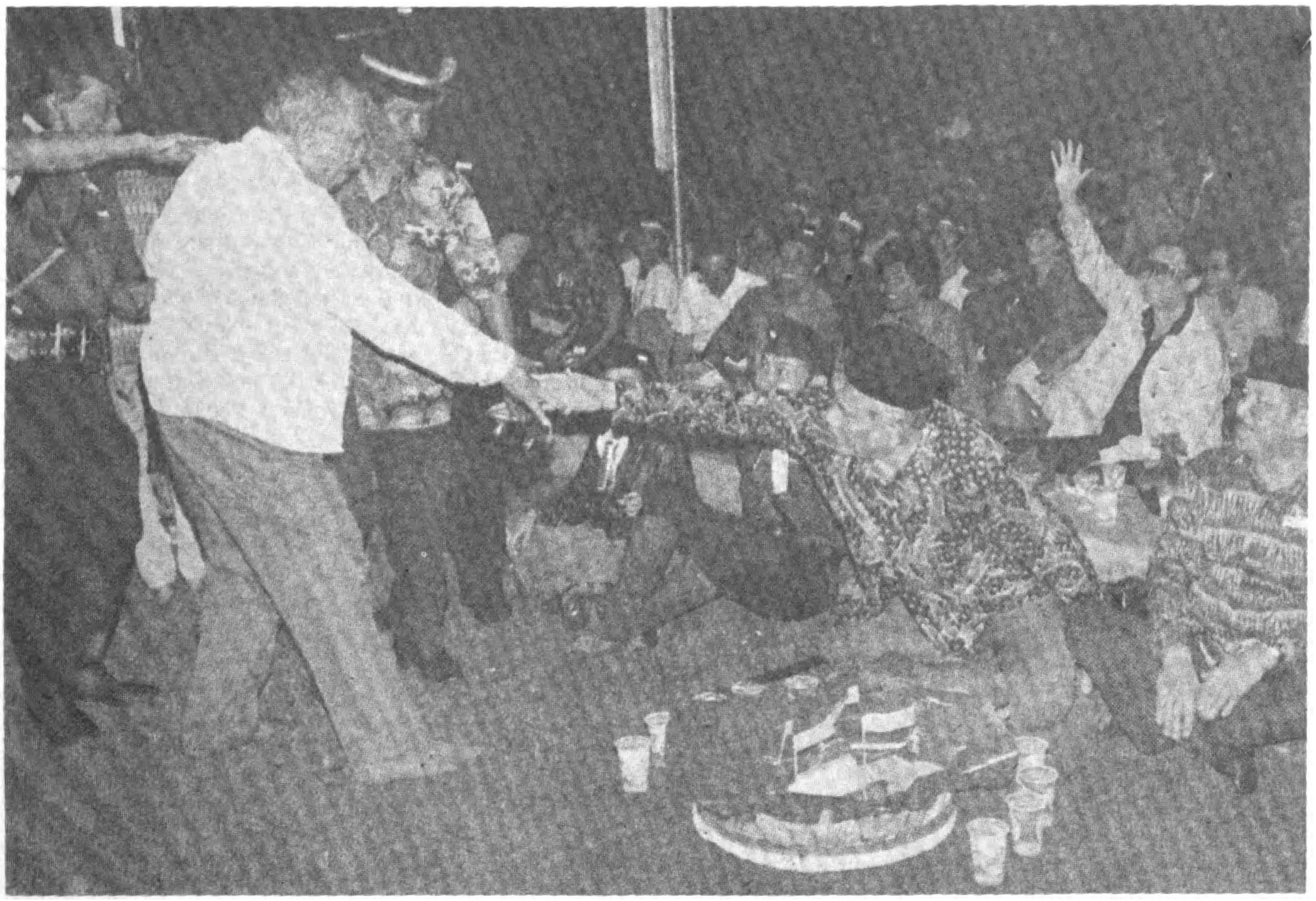

Malam nostalgia 10 November

Digitized by Google

Jiwa besar pahlawan berjuang tanpa pamrih

jiwa peristiwa 10 November 1945 di Surabaya masih tetap valid dan relevan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Karena jiwa peristiwa ini berpegang kuat pada nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, yaitu cinta tanah air dan cinta berbangsa. Bila ada penilaian bahwa masyarakat sekarang krisis sikap patriotisme dan nasionalisme, maka penilaian itu tidak valid karena tidak ilmiah. Sedangkan sikap individualistis dan konsumeristis hanya ada terbatas pada sebagian lingkungan masyarakat elite, sebab masyarakat yang demikian ini sedang melewati garis alienasi dan mereka merasa asing di kalangan bangsanya sendiri. Ini bukan berarti sikap patriotisme dan nasionalisme di masyarakat menjadi luntur. Sikap ini bagi masyarakat biasa yang tinggal di daerah masih kuat. Begitupun dengan masyarakat yang berada di kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan kota lainnya, tidak semuanya mengalami krisis sikap tersebut.

Sikap hidup yang konsumeristis tinggi merupakan sumber frustrasi sebagian masyarakat. Sikap ini menimbulkan kecemburuan sosial yang berkepanjangan. TVRI yang masih menonjolkan materi siaran yang berkharakter mewah dan glamour, juga dianggapnya sebagai faktor yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial tersebut. "Karenanya, salah satu cara penyembuhan terhadap sikap yang sedemikian rupa ini adalah harus dilakukan mulai dari atas. Yang atas harus berani memberi contoh sebagai panutan." katanya.

Upaya memperingati dan mengenang jasa pahlawan ini ternyata telah menggugah Ny. Sumiarto adik kandung Bung Tomo. Ia begitu mendengar pidato Bung Tomo langsung menangis dan teringat semangat juang Bung Tomo ketika masih hidup untuk membakar daya juang arek-arek Suroboyo mengusir pasukan sekutu di Surabaya. Apalagi ia, katanya, adalah satu-satunya saudara yang mampu menghidupi keluarga. Untuk itu, Ny. Sumiarto atas nama keluarga memohon kepada seluruh eks lasykar BPRI (Badan Pemberontak Rakyat Indonesia) dan orang-orang yang kenal dekat dengan Bung Tomo, agar sudi memaafkan kesalahan yang mungkin semasa hidupnya pernah melukai dan menyakiti hati. Bahkan, pada kesempatan ini telah dijadikan momentum bagi eks lasykar BPRI untuk mengembalikan nama baik Bung Tomo. Janji ini menurut R. Soebiantoro eks pucuk pimpinan BPRI sebagai tanggung jawab moral kepada generasi muda, agar arti nilai-nilai perjuangan Bung Tomo dapat dipahami dan dihayati secara seksama.

Bintang Mahaputra

Lain halnya dengan pendapat Menteri Sosial Prof.Dr. Haryati Soebadio, peringatan hari Pahlawan 10 November bukan upacara atau tata cara untuk mengkultuskan para pahlawan. Justru diperingati karena kesadaran bangsa tentang semangat juang dan jiwa besar para pahlawan yang rela berkorban tanpa pamrih. Sehingga saat ini seluruh bangsa Indonesia dapat menikmati kehidupan di alam kemerdekaan di negara yang berdaulat. Sehubungan dengan itu, semangat juang tersebut perlu dikembangkan untuk pembangunan disegala bidang supaya kebodohan kemiskinan serta segala keterbelakangan di wilayah Indonesia ini dapat dilenyapkan.

Oleh karena itu, dalam upacara kenegaraan Presiden Soeharto menganugerahkan tanda kehormatan Pahlawan Kemerdekaan Nasional dan Bintang Mahaputra Adipura kepada Pangeran Sambernyowo, yang diterimakan kepada kerabat Mangkunegaran GRA Sitti Nurul Kamarul Ngasarati Kusumowardhani dan Suryo Suyarso. Kepala Negara juga menyerahkan plaket kepahlawanan untuk Pahlawan Nasional Sultan Agung Anyokrokusumo kepada Wagub DIY Sri Pakualam VIII serta plaket kepahlawanan untuk Pahlawan Nasional Untung Suropati kepada Gubernur Jawa Timur Soelarso, yang masing-masing mewakili keluarga pahlawan nasional tersebut.

"Kiranya yang kita peringati dan hormati adalah nilai kepahlawanan, yaitu jiwa besar, semangat perjuangan dan berani berkorban tanpa pamrih. Sehingga kebesaran jiwa dan kobaran semangat itulah yang patut diteladani serta perlu diwariskan kepada generasi muda, agar mampu mengisi kemerdekaan yang telah diraih," kata Mensos.□ (DT)

Digitized by Google

Digitized by Google

Suara, Pesan dan Harapan tentang Generasi Muda

Generasi muda pendahulu adalah generasi yang besar. Besar karena perjuangannya, pengabdiannya dan cita-citanya seperti yang tersirat dalam sejarah Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928 sampai Indonesia Merdeka 1945. Selain sebagai pencipta generasi bangsanya, mereka tercatat selalu tampil dalam setiap tonggak sejarah bangsa Indonesia, menjadi pelopor yang mempertaruhkan jiwa dan raga bagi nusa dan bangsa sebagai perwujudan tanggungjawab sejarah.

Hal ini disampaikan Presiden Soeharto pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-60 lalu. Kepala Negara mengatakan Sumpah Pemuda akan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia yang singkat itu mengandung tekad persatuan Indonesia sekaligus telah menyadarkan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini untuk menjadi satu bangsa Indonsia yang bersatu padu, kendatipun kita memang berbeda suku, adat istiadat, budaya, bahasa daerah serta agama. Kita tetap saling menghormati perbedaan-perbedaan di antara kita itu. Bahkan, perbedaan itu kita rasakan sebagai kekayaan bangsa kita yang sangat indah. Tapi di atas segalanya itu, kita merasa dan berketepatan hati untuk menjadi satu bangsa Indonesia seperti yang ditegaskan tekad itu dalam lambang negara kita — Bhinneka Tunggal Ika.

Semangat persatuan dan kesadaran itu membuat bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia, yang sekaligus menghantarkan dan menjadikan bangsa Indoensia sebagai bangsa yang bebas serta merdeka. Sedangkan dalam zaman pembangunan sekarang ini, menurut Kepala Negara, bangsa Indonesia juga mengharapkan lahirnya pelopor-pelopor pembangunan terutama dari generasi muda yang mau berjuang demi kesejahteraan dan kejayaan negara untuk meneruskan tradisi perjuangan kaum muda Indonesia. Karena kehadiran pemuda sebagai pelopor yang tangguh dalam pembangunan bangsa sangat penting artinya. Pembangunan bangsa itu juga merupakan pembangunan serta perjuangan besar untuk mewujudkan masyarakat kita menjadi masyarakat Pancasila. Ini berarti bahwa Pancasila bukan hanya sekedar cita-cita, yang ingin kita capai melainkan juga merupakan norma-norma yang harus kita pegang teguh dalam usaha mencapai cita-cita itu. "Sebab Pancasila adalah cita-cita, sikap dan amal kita sekaligus."

"Membangun masyarakat bukan pekerjaan yang sekali jadi. Membangun masyarakat Pancasila merupakan proses yang berlangsung terus dalam setiap tahap proses pembangunan. Sedangkan pelaksanaan Pancasila dalam semua segi kehidupan kita, makin nyata dan makin terasa. Cita-cita ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah serta keadilan sosial harus terwujud dalam kehidupan bangsa kita yang sedang membangun dan bergerak maju," kata Presiden.

Pendidikan Politik

Sementara itu berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda diselenggarakan seminar sehari di gedung Graha Pemuda, Jakarta dengan tema 'Generasi Muda dan Pembangunan Politik'. Menteri Dalam Negeri, Rudini, yang tampil sebagai pembicara mengatakan, bahwa ada kemungkinan bentuk dari pelaksanaan pendidikan politik selama ini tidak sesuai lagi dengan kondisi masa datang. Dengan demikian perlu pemikiran dan gagasan yang mempunyai pandangan jauh ke depan tanpa menutup kemungkinan adanya terobosan-terobosan baru. Hanya saja satu hal yang harus dipertahankan, adalah setiap insan Indonesia harus merasakan dan meyakini dirinya sebagai warga negara yang Pancasilais. Dan jika setiap insan Indonesia ini sudah menghayati dan memahami benar-benar hak serta kewajibannya, maka tidak mengherankan akan dapat menumbuhkan sekaligus mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dengan menciptakan kondisi yang menunjang stabilitas politik dan stabilitas nasional.

Untuk itu, upaya pendidikan politik yang menjadi kewajiban kita harus diartikan bukan menjadi kewajiban pembina politik semata-mata. Namun, juga kewajiban organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat di kalangan masyarakat.

Oleh karenanya, Dr. Alfian Ketua Lembaga Kebudayaan dan Riset Nasional LIPI selaku pembahas makalah Rudini, menilai pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Alasannya, dalam diri generasi muda banyak terkandung kemurnian dinamika, kreativitas dan sifat kritis. Tapi harus diakui mereka masih kurang pengalaman. Kenyataan kondisi generasi muda ini memungkinkan mereka menjadi, misalnya beban masyarakat dan penghambat pembangunan. Dari segi positif mereka merupakan kekuatan moral untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang diperlukan dalam pembangunan.

"Apakah yang dapat dilakukan generasi muda dalam menyukseskan pembangunan politik, dan terobosan apa yang dapat mereka perankan untuk mempercepat proses pembangunan sambil menjaga jangan ada halangan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan?" tanya Alfian. "Kerangka tentang itu sudah ada, tinggal mengisi agar berguna bagi pembangunan," ujarnya menjawab.

Kata kunci pembangunan politik di masa mendatang adalah peningkatan kualitas demokrasi. Pertama-tama perlu peningkatan budaya politik demokrasi. Sebagai landasannya, kita sudah menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas. Tapi ini bukan berarti tidak hanya sampai di situ saja, melainkan perlu adanya peningkatan budaya politik demokrasi antara lain seperti nilai-nilai keterbukaan dan disiplin sosial yang perlu sama-sama dikembangkan sebagai nilai demokrasi.

Kedua, adalah perlu peningkatan kualitas partisipasi politik dan kontrol sosial. Walaupun sudah ada partisipasi itu, tapi di sana-sini masih tampak belum memadai. Namun, partisipasi politik masyarakat sekarang ini agaknya lebih mudah ditingkatkan karena masyarakat sudah semakin rasional. Ketiga, perlu peningkatan kualitas mekanisme demokrasi; keempat perlunya peningkatan fungsionalisasi dari lembaga-lembaga politik; kelima, peningkatan kualitas pemimpin-pe-

Digitized by Google

mimpin politik dan keenam, bangsa kita memerlukan pembangunan pemikiran.

Alfian coba membandingkan kualitas pemimpin politik sekarang dengan era kepemimpinan Bung Hatta dan lain-lainnya. Salah satu letak perbedaannya terletak pada mekanisme demokrasi, yaitu bagaimana kita melaksanakan seleksi pemimpin. Ini terkait dan mempunyai rangkaian dengan pendidikan politik. Karena proses seleksi yang belum berjalan baik, maka sering timbul pemimpin-pemimpin yang tidak dikenal sehingga merisaukan masyarakat. "Kalau orientasi generasi muda ingin menduduki jabatan tertentu, tapi merasa masih kurang, supaya cepat-cepat mengisi kekurangan tersebut. Terus terang dalam kondisi yang sedemikian rupa orientasi generasi muda masih banyak oportunistis dan tidak mengisi diri cepat-cepat, sehingga dapat membahayakan bangsa," ujarnya.

Mo Limo

Dalam kesempatan yang sama pembicara Harsudiyono Hartas mengakui, para pemuda dan generasi muda umumnya memiliki peranan yang sangat menentukan bagi kehidupan serta masa depan bangsa dan negara. Sehingga generasi muda harus mampu mengembangkan dirinya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial agar memiliki jatidiri yang bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Karenanya, setiap generasi muda perlu dilandasi Mo Limo (5-M) sebagai pegangan. Mo Limo itu adalah pertama, *manembah* dalam arti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua *maguru* dalam pengertian belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, ketiga *makaryo* yaitu berbuat dan bekerja, keempat *makarti* yang artinya berbudi pekerti baik dan bekerja berlandaskan atau berdasarkan budi pekerti yang luhur serta kelima *madep mantep* yang artinya yakin dan percaya akan kebenaran.

"Pendidikan politik sangat penting bagi generasi muda, agar kita dapat membawa masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik," katanya.

Sedangkan Menpora Ir. Akbar Tanjung menganggap Hari Sumpah Pemuda ini suatu momentum bersejarah, yang merupakan pilar pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, hal ini sebagai titik pijak generasi muda dalam menghadapi tugas yang dipercayakan pada masa datang. Sehingga bagi generasi muda yang berpijak pada peranan dan tradisi sejarah perjuangan pemuda di masa lalu, adalah pelopor. Baik sebagai pengembangan wawasan kebangsaan maupun kesatuan persatuan. Juga pemuda perlu dan dapat melanjutkan peranan sejarah untuk melaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan membangun manusia seutuhnya. Ini membuktikan, dimensi manusia menempati kedudukan terpenting serta akan mewarnai dan mengarahkan proses pembangunan.

Kesejahteraan manusia sudah seharusnya dirancang sejak sekarang dalam bentuk perencanaan sumber daya alam. Tapi kita akan menghadapi tantangan di masa mendatang dengan adanya perencanaan itu, terutama menyangkut generasi muda. Setiap tahun jumlah pertambahan penduduk begitu besar seperti deret ukur dan mengakibatkan pertambahan angkatan kerja yang memerlukan kesempatan kerja serta lapangan kerja. Padahal lapangan kerja sangat terbatas. Sementara angkatan kerja yang ada, keterampilannya, keahliannya, pendidikannya serta kualitasnya di bawah rata-rata yang dibutuhkan. Tentunya, keadaan tenaga-tenaga kerja yang seperti ini akan menyebabkan timbulnya suatu persoalan baru bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia secara keseluruhan.☐ (DT)

PT. DHARHALIM ADITAMA
(Furinaka Furniture & Prima Damar Jatiagung Greep)
Hotel Wisata International 3th Floor Jl. M.H. Thamrin Jakarta Indonesia
Telp.: 320408 ext. 328-436 Telex. 61787 WISATA IA
Facsimile: (021) 324597 HWI.

Mengucapkan :

Selamat

atas terpilihnya

Bapak Let.Jend.TNI (Pur) Wahono

sebagai Ketua Umum

Bapak Ir. Rachmat Witoelar

sebagai Sekretaris Jenderal
Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Semoga perjuangan Golongan Karya dalam mengembangkan budaya politik Demokrasi Pancasila dapat terlaksana secara lebih mantap.

Digitized by Google

PUNGLI

Di awal Nopember ini pers mengutip lagi suatu pernyataan mawas diri yang cukup keras dari Menteri Dalam Negeri. Kalau sebelum ini, Menteri berbicara soal bandit tanah, maka kali ini menteri angkat bicara soal pungli atau 'pungutan liar'.

Pers mengutip ucapan berikut ini: "Tidak masuk akal kalau kita tidak dapat menertibkan pungutan-pungutan liar di lingkungan jajaran kita. Dan tidak bermoral kalau aparat pemerintah yang seharusnya memberi petunjuk baik, justru memungli kelompok-kelompok pencari nafkah yang telah berhasil menciptakan lapangan kerja...."

Yah, pungli memang belum terberantas. Maaf, kalau ini dikatakan: Pungli masih ada di mana-mana. Masih dilakukan oleh sejumlah oknum Polantas (denda damai di tempat), dilakukan oleh oknum Agraria,dilakukan oleh oknum jaksa, oknum perumtel, Oknum-oknum di pemerintah daerah (dari urusan sampah sampai urusan KTP dan loket-loket perijinan), oknum-oknum panitia tender, dan sebagainya.... Masyarakat punya daftar lebih panjang lagi. Masuk akal kalau masyarakat skeptis dalam hal ini.

Apa soal sekarang? Masyarakat hanya menunggu, kapan ini semua — yang merupakan pembusukan dari dalam — akan berakhir?

ISU BABI

Pada tingkat kondisi masyarakat kita sekarang, yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, adalah jelas bahwa mengaitkan hewan yang bernama Babi dengan makanan adalah rawan. Dalam pembicaraan sepintas sekalipun. Dari mula, ini mestinya kita pahami betul.

Dan memang setelah seorang ilmuwan bergelar Doktor, mengadakan survai yang tidak begitu mendalam mengenai sejumlah produk makanan yang dikait-kaitkan dengan hewan berkaki pendek itu, bermulalah keheboh-an itu. Suatu media intern perguruan tinggi memuat hasil survai tersebut lengkap dengan daftar produk yang disurvai. Lalu media pers umum mengutipnya secara kurang akurat — tidak ada check dan recheck yang serius — heboh pun meluas dengan segala dampaknya. Salah satu akibat adalah terancamnya ratusan bahkan ribuan karyawan pabrik — yang memproduk bahan makanan dan minuman yang diisukan mengandung bahan babi — mengalami PHK, karena kelangsungan pabrik itu sendiri terancam tamat karena kemerosotan penjualan yang drastis. Bahkan menurut Menko Polkam, kalau ada yang menungganggi salah-salah bisa menyebabkan pembakaran pabrik dan kerusuhan semacamnya.

Belakangan ternyata baik survai maupun isu dan pemberitaan tersebut tidak mengandung kebenaran yang cukup. Sementara ceroboh dan sembarangan saja, ada kesan seperti keisengan belaka.

Apapun dalihnya tidak boleh tidak ilmuwan yang bersangkutan dan pers yang ceroboh dalam pemberitaan lah yang harus dianggap sebagai yang pertama-tama harus memikul tanggungjawab moral dalam kasus ini. Bahkan bisa saja dalam hal tanggungjawab hukum. Seorang ilmuwan punya integritas ilmiah. Dan dalam kasus ini, ilmuwan yang bersangkutan dapat kita katakan telah tampil dengan bobot yang tidak pantas. Media pers pun punya tanggungjawab moral. Dan dalam kasus ini, beberapa pers telah ceroboh dan tidak menampilkan bobot tanggungjawab yang pantas.

Suatu pelajaran baru untuk semua.

SOAL SOEKARNO

Berbulan-bulan lamanya, belakangan ini kembali masalah Soekarno menjadi pokok pembicaraan yang hangat dengan aroma kontroversial. Dan kontroversi mengenai Soekarno, bukan hanya sekali. Hal serupa telah tercatat terjadi beberapa kali di masa Orde Baru ini.

Cukup menarik lontaran-lontaran pendapat mengenai Soekarno yang datang dari berbagai arah. Mulai dari yang lugas dan logis, sampai kepada yang emosional dan tak logis. Kalau pelontar pendapat mempunyai isi kepala yang rumit dan kusut, maka lontaran pendapatnya pun tampil rumit dan kusut.

Puncak dari segala pernyataan mengenai bekas Presiden pertama Republik Indonesia itu, datang dari Presiden Soeharto. Yaitu berupa penegasan yang cukup jelas bahwa kejatuhan Soekarno adalah konstitusional, sebagai hasil akhir dari perbedaan pendapat almarhum dengan MPRS.

Tampaknya, penegasan Presiden Soeharto, sekaligus memberi efek meredakan polemik kontroversial yang ada. Biasanya memang, dengan kharisma yang dimiliki jika pak Harto angkat bicara, pembicaraan pun menjadi final. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu.

Akan tetapi, terlepas dari itu, agaknya masalah Soekarno bagaimanapun harus tuntas. Diperlukan penyusunan suatu catatan sejaran yang objektif — yang disusun para ahli yang kompeten — memaparkan dengan gamblang posisi sejarah almarhum. Suatu catatan yang dapat memperlihatkan apa saja peranan dan jasa beliau dan sebaliknya apa kekeliruan beliau sehingga MPRS tiba kepada keputusan untuk mencabut mandat yang pernah diberikan kepada beliau. Biarlah fakta yang berbicara. Dan masyarakat, terutama generasi baru, bebas untuk memberi penilaian dan memberi tempat yang tepat dalam persepsi sejarah masing-masing.

Digitized by Google

PERTANGGUNGJAWABAN DPP GOLKAR MASA BHAKTI 1983-1988

Sudharmono, ketika memberikan laporan pertanggungjawaban

Tanggal 25 Oktober 1983, lima tahun yang lalu, seluruh keluarga besar GOLKAR dimanapun berada diliputi oleh rasa syukur yang amat dalam serta suasana kegembiraan yang melegakan, karena pada saat itu keluarga besar GOLKAR telah mampu melaksanakan tugas besarnya, menyuarakan kedaulatannya melalui keputusan-keputusan Munas Ketiga GOLKAR yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober s/d 25 Oktober 1983.

Sesungguhnya Munas Ketiga GOLKAR telah menghasilkan keputusan-keputusan yang amat prinsipil dan mempunyai jangkauan yang luas dan menyeluruh yang bukan saja menyangkut kepentingan GOLKAR, tetapi terutama bertekad untuk meningkatkan pengabdiannya kepada negara dan bangsa.

Keputusan-keputusan penting itu antara lain adalah: 1. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban organisasi sosial politik sesuai dengan konsepsi penyederhanaan dan pendayagunaan orsospol agar dapat berperan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan nasional.

Seperti telah kita fahami semua, konsepsi yang digariskan oleh Orde Baru adalah orsospol yang berdasarkan anggota perorangan dan kader, tidak boleh lagi beranggotakan organisasi massa.

Konsepsi ini bahkan telah dituangkan sebagai hukum dalam Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya sejak tahun 1975 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1985.

2. Ditetapkannya program perjuangan GOLKAR 1983-1988 yang amat luas dan menyeluruh, yang meliputi program konsolidasi ke dalam maupun program peningkatan pengabdian GOLKAR demi kepentingan negara dan bangsa.

3. Dikeluarkannya Pernyataan Politik Golongan Karya yang mengandung kebulatan tekad Golkar dalam meningkatkan partisipasinya dalam turut mengatasi berbagai masalah mendesak yang dihadapi oleh negara dan bangsa serta dalam turut menyukseskan pelaksanaan Pelita ke IV untuk mewujudkan kerangka landasan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4. Terbentuknya kepemimpinan Golkar dengan komposisi dan perorangan yang dinilai dan diharapkan dapat mencerminkan kemampuan kepemimpinan Keluarga Besar Golkar dalam menyongsong tugas-tugas besar dan berat sebagai hasil Munas ke 3 tersebut.

Digitized by Google

Berat tugas yang diberikan pada pimpinan baru

Kiranya telah dapat dibayangkan betapa berat tugas dan tanggung jawab GOLKAR dalam menghadapi masa 5 tahun ke depan, yang sedang terus melaksanakan konsolidasi nasional, tantangan-tantangan berat yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelita ke IV serta menghadapi masa-masa regenerasi yang tidak mungkin ditunda-tunda lagi.

Maka di samping suasana penuh kesyukuran dan kegembiraan itu disadari sepenuhnya betapa berat beban tugas serta tanggungjawab yang dilimpahkan kepada kepemimpinan GOLKAR yang baru oleh Munas ke-3 itu.

Hal ini tercermin dari pidato sambutan Ketua Umum DPP Golkar pada saat pelantikan/peresmian DPP yang baru, yang antara lain sebagai berikut: "Saya menyadari betapa berat tugas yang mulia saat ini terpikul di atas pundak saya dan 44 teman-teman lainnya anggota DPP dan dengan disertai kepercayaan yang begitu besar dan tulus dari seluruh jajaran Golkar untuk melaksanakan semua putusan Munas sebaik-baiknya. Adalah menjadi keyakinan saya, bahwa tugas pengabdian yang kita emban itu betapapun beratnya, akan dapat dilaksanakan dengan sukses apabila seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat dapat berjalan serempak erat bergandengan tangan, bahu membahu dengan semangat tinggi. Lebih dari itu tugas yang berat itu akan terasa ringan apabila seluruh barisan besar jajaran Golkar dapat berjalan terpadu dengan semangat yang tetap tinggi...." kata Sudharmono SH dalam pidato pertanggungjawaban DPP GOLKAR masa bakti 1983-1988.

Sesuai ketentuan Bab II pasal 2 Anggaran Dasar GOLKAR maka kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional. Selanjutnya, Bab II pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar GOLKAR menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional. Kewajiban organisasi ini kami laksanakan dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati. DPP telah mempersiapkan berbagai dokumen secermat dan selengkap mungkin sehingga Musyawarah Nasional mendapatkan bahan yang memadai untuk melaksanakan penilaian terhadap hasil kerja DPP dalam mengemban amanat Musyawarah Nasional terdahulu serta penilaian mengenai pelaksanaan tugas serta wewenang yang dimuat dalam berbagai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Tiada Hari Tanpa Kerja

Menyadari betapa luas dan berat, namun teramat luhurnya tugas yang diemban, serta menyadari pula bahwa tugas-tugas yang diamanatkan oleh Musyawarah Nasional ke 3 itu tidak hanya bermanfaat bagi Golkar namun juga mempunyai manfaat serta menyangkut kepentingan nasional, maka DPP membulatkan tekad untuk bekerja keras dan penuh tanggung jawab. Dengan bersemboyan "tiada hari tanpa kerja" kita melaksanakan tugas-tugas itu dengan penuh kesungguhan, DPP tidak membuang-buang waktu sedikitpun, dan langsung menekuni tugas-tugasnya segera setelah terpilih sebagai Dewan Pimpinan

Digitized by Google

Pusat oleh Musyawarah Nasional ke 3 tahun 1983.

Pertama-tama, DPP menyusun Tata Kerja intern DPP Golkar, yang setelah melalui pembahasan yang mendalam kemudian ditetapkanlah peraturan pada tanggal 14 Nopember 1983. Di dalam menyusun Tata Kerja tersebut, DPP berpatokan sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, serta pada Keputusan Munas III Golkar tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Pembagian tugas dilakukan untuk memenuhi kaidah-kaidah organisasi yang lazim, bukan untuk dilaksanakan dengan kaku, namun untuk diterapkan secara luwes.

Asas keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam mewujudkan kolektivitas kepemimpinan organisasi kami junjung tinggi. Proses pengambilan keputusan disusun dan dilaksanakan supaya keterlibatan seluruh anggota di satu pihak terjamin serta di pihak lain terjamin pula tercapainya keputusan secara cepat dan tepat. Suasana keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan kami kembangkan sebaik-baiknya. DPP sadar sepenuhnya bahwa keberhasilan tugas yang diembannya, amat tergantung dari suasana yang diciptakan, ialah suasana kesatuan, keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan. DPP pun sadar bahwa tanggung jawab DPP adalah juga tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh anggota DPP dan bahkan tanggung jawab seluruh jajaran Golkar.

Selanjutnya DPP berupaya menyelami hakekat dari Program Umum Golkar serta mencari pendekatan yang memungkinkan terlaksananya pelaksanaan Program Umum secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini disimak pendapat serta saran dari berbagai pihak, terutama saran serta pertimbangan Bapak Presiden yang diamanatkan kepada Musyawarah Nasional III dalam acara Pembukaan pada tanggal 20 Oktober 1983. Program umum itu bersifat komprehensif, serta memuat semua hal yang harus dikerjakan oleh Golkar dalam kurun waktu 5 tahun dan merupakan jabaran dari tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan-tujuan Golkar seperti termuat dalam Anggaran Dasar Golkar. Tujuan dan tugas pokok Golkar adalah bersifat luas dan banyak segi. Oleh sebab itu pelaksanaan tugas pokok dalam mencapai tujuan-tujuan Golkar tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang singkat. Pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Golkar tersebut dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Berdasarkan pokok pikiran ini maka Munas III Golkar yang berlangsung di Jakarta pada bulan Oktober 1983 telah menetapkan Program Umum Golkar yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran Golkar dalam masa 5 tahun, yaitu masa 1983-1988.

Setelah mengadakan pembahasan secara mendalam, maka DPP berkesimpulan bahwa Program Umum Golongan Karya dapat dirangkum dalam Tri Sukses Golkar, yang merupakan kesatuan bulat yang tidak dapat dipisahkan antara sukses yang satu dengan sukses yang lain karena memang berkaitan erat.

Tri Sukses meliputi: sukses pertama yaitu Sukses Konsolidasi baik konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan maupun konsolidasi organisasi. Secara umum yang dimaksud dengan konsolidasi adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu, yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri lebih lanjut dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Bapak Presiden dalam sambutannya membuka Munas III Golkar memberikan pengertian-pengertian berikut mengenai konsolidasi.

Konsolidasi idiil berarti memperkokoh kesetiaan Golkar secara tuntas dan tak tergoyahkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengharuskan Golkar untuk menyusun program-program dalam ikut memberi arti nyata dan terasa oleh masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam pembangunan dan mengembangkan terus Demokrasi Pancasila.

Konsolidasi wawasan berarti bahwa Golkar harus dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai, sikap, cara berpikir dan cara bekerja yang menjangkau kepentingan nasional. Kesadaran diri dan kemandirian Golkar memang penting, namun jangan sampai tergelincir ke dalam semangat kelompok yang sempit dan melupakan kepentingan nasional Golkar perlu membuka diri lebar-lebar agar semua lapisan, golongan dan generasi bangsa kita dapat mempercayakan dan menitipkan aspirasi dan keinginannya kepada Golkar. Sebagai kekuatan sosial politik, Golkar perlu mengembangkan suasana demokrasi ke luar dan ke dalam. Hanya dengan semangat demokratis ke dalam, Golkar akan dapat ikut menumbuhkan dan mendewasakan suasana demokrasi ke luar.

Konsolidasi organisasi, khususnya kaderisasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab Golkar sebagai kekuatan sosial politik, dan diarahkan untuk menyiapkan kader-kader pimpinan agar jika tiba saatnya mereka mampu dan matang memikul tanggung jawab menjadi pemimpin-pemimpin bangsanya, yang setia dan teguh berpijak pada cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Konsolidasi dalam pengertian dan semangat yang demikian luas itulah yang selama ini kita usahakan pelaksanaannya.

Sukses kedua yaitu Sukses Pelita IV, yang berarti bahwa Golongan Karya sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang mendapat kepercayaan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, sebagai pengemban hakekat Orde Baru serta sebagai pendukung utama Pemerintah berupaya turut serta secara aktif dalam pelaksanaan Repelita IV sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Di samping itu, Repelita IV adalah program nasional yang didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR sehingga kita semua terikat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut. Oleh sebab itu dalam Program Umum Golkar digariskan upaya untuk mensukseskan Pelita IV di semua bidang kehidupan.

Sukses ketiga, ialah Sukses Pemilu 87 dan Sidang Umum MPR 88, yang meliputi upaya Golkar untuk memenangkan Pemilu 87 demi menjamin tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk dapat menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Bagi Golkar sebagai kekuatan sosial politik, Sukses Pemilu mempunyai arti tersendiri karena mencerminkan derajat kepercayaan rakyat baik terhadap Golkar maupun terhadap Pemerintahan Orde Baru.

Sebagai pelaksanaan program Umum GOLKAR, maka selanjutnya DPP GOLKAR menetapkan Rencana Pelaksanaan program Umum GOLKAR masabakti1983-1988 pada tanggal 12 Desember 1983. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksana-

Digitized by Google

kan secara kolektif oleh DPP GOLKAR setelah dimusyawarahkan dalam diskusi-diskusi dan dalam rapat-rapat untuk kemudian diputuskan. Pelaksanaan keputusan dilakukan secara kolektif pula dengan mengingat pembagian tugas yang telah ditentukan. Perlu kiranya diketengahkan di sini bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan program, DPP GOLKAR mendapat petunjuk-petunjuk dari Dewan Pembina GOLKAR, baik yang diberikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pembina maupun yang diberikan Presidium Harian Dewan Pembina. Semua petunjuk digunakan oleh DPP GOLKAR sebaik-baiknya sebagai pegangan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Perlu juga kiranya saya kemukakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut segenap jajaran Golkar mulai dari tingkat pusat sampai dengan di daerah-daerah mendapat bantuan yang sangat berharga dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan serta Dewan Penasehat dan dari segenap unsur Keluarga Besar Golongan Karya.

Di samping itu perlu dilaporkan bahwa pelaksanaan Program Umum GOLKAR mendapat bantuan yang besar dari kader-kader GOLKAR dari berbagai lapisan masyarakat yang diberikan dengan penuh kesukarelaan baik bantuan moril maupun materiil. DPP GOLKAR amat terkesan dengan semangat kesetiakawanan yang demikian tinggi, yang telah diperlihatkan oleh segenap jajaran, unsur maupun lapisan Keluarga Besar Golongan Karya yang telah mencurahkan tenaga, pikiran maupun berbagai kemampuan untuk menunjang tugas-tugas yang dipikul.

Program Umum Golkar yang dirangkum dalam Tri Sukses mencakup sekian banyak kegiatan yang terlalu luas untuk disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Seperti yang dikemukakan terdahulu, laporan ini dilengkapi dengan berbagai dokumen untuk memungkinkan Sidang Musyawarah Nasional memberikan penilaiannya. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat dilihat dalam Lampiran Pertanggungjawaban DPP GOLKAR. Berbagai anak lampiran disertakan pula, memuat semua keputusan, petunjuk-petunjuk serta tabulasi data mengenai semua hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban DPP di hadapan Sidang Musyawarah Nasional.

Seperti yang dinyatakan di muka, sukses konsolidasi terdiri dari konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan dan konsolidasi organisasi yang merupakan satu kesatuan bulat dan saling berkaitan, yang antaranya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Dengan konsolidasi idiil maka yang dimaksudkan adalah mempertahankan dan memperkuat hasil-hasil perjuangan di bidang ideologi yang telah dicapai mempertebal keyakinan kita serta terus-menerus melaksanakan upaya pemahaman ideologi, yang tidak lain adalah ideologi nasional Pancasila Pemantapan ideologi nasional Pancasila adalah proses perjuangan yang panjang, dimana GOLKAR sejak awal berdirinya tidak dapat dipisahkan daripadanya.

Sejak pembentukannya GOLKAR telah menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas GOLKAR. Sejarah perjuangan GOLKAR besama-sama dengan ABRI dan kekuatan-kekuatan Pancasilais lainnya selamanya diisi oleh upaya-upaya politik untuk mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila. Perjuangan yang gigih dan tidak kenal lelah ini, telah membuahkan hasilnya. Pertama-tama dapat kita lihat kembali bahwa setelah ABRI bersama-sama kekuatan Pancasilais Bangsa ini berhasil menggagalkan pemberontakan G.30.S/PKI dan kemudian Orde Baru lahir dengan tekad yang bulat untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekwen. Tekad tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah nyata di bidang politik, yaitu antara lain melaksanakan pembaharuan struktur politik baik di bidang kelembagaan negara maupun yang menyangkut infrastruktur politik, dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila sebaik-baiknya.

Pada Sidang Umum MPR 1978, Golkar bersama-sama ABRI dan kekuatan sosial politik Pancasilais lainnya, sukses memperjuangkan diterimanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai Ketetapan MPR, diikuti dengan kegiatan-kegiatan penataran P4 baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri, dimana GOLKAR juga turut serta memasyarakatkan P4 itu bagi anggota-anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Pada Sidang Umum MPR tahun 1983, maka dicapai kesepakatan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diikuti oleh penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana Pancasila telah menjadi asas satu-satunya baik untuk organsiasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan.

Dengan adanya Ketetapan MPR dan Undang-undang seperti tersebut di atas, maka kedudukan formal Pancasila telah menjadi makin kuat atau dengan perkataan lain Pancasila telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pada itu Sidang Umum MPR tahun 1983 juga telah menegaskan bahwa pembangunan nasional yang kita laksanakan haruslah merupakan pengamalan Pancasila itu sendiri.

Dengan ketegasan-ketegasan formal tersebut belumlah berarti bahwa tugas kita dalam mengamankan dan mengamalkan Pancasila sudah selesai. Segenap jajaran GOLKAR perlu menyadari bahwa bahaya terhadap Pancasila belum lenyap. Kewaspadaan jajaran GOLKAR harus senantiasa ditingkatan. Golkar tidak juga boleh puas hanya dengan memiliki Pancasila, karena yang terpenting adalah terus menerus menumbuhkan kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan Pancasil dalam kenyataan hidup sehari-hari, sekaligus juga terus menerus mendalami, mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila sehingga dengan demikian pengamalan Pancasila menjadi dorongan dari dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian apapun yang dilakukan oleh seluruh jajaran GOLKAR pada umumnya, dan DPP GOLKAR pada khususnya, mencerminkan komitmen yang tegas pada Pancasila. Tidak satupun kebijakan DPP GOLKAR yang terlepas dari konsolidasi idiil.

Pernyataan-pernyataan Politik GOLKAR yang dikeluarkan setiap tahun melalui Rapim atau Rakernas jelas berisi kebulatan tekad dan komitmen GOLKAR untuk mengamalkan dan memasyarakatkan ideologi Pancasila. Langkah memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila jelas tampak dalam materi bahan-bahan kaderisasi yang melalui pengarahan-pengarahan dan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para pimpinan dan fungsionaris GOLKAR dengan para kader dan calon kader di seluruh Indonesia.

Digitized by Google

METROPOLITAN GROUP

HOTEL ★★★★
HORISON

HORISON IS THE ONLY RESORT HOTEL IN JAKARTA

The most beautiful hotel on the shore of Jakarta Bay, dedicated to giving the best of service and happiness for each an every day of your stay.

Jalan Pantai Indah
TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
Tel. 680008 (38 lines) Telex 42824 HORIZ JKT
P.O. Box 3340/JKT – 10002
Jakarta – Indonesia

P.T.
Kartika Chandra

Experience Indonesia's gentle and sincere hospitality in Jakarta's most fully-equipped entertainment hotel.

Kartika Chandra is your business and relaxation address in Jakarta.

JALAN JENDERAL GATOT SOEBROTO
JAKARTA, INDONESIA

PULAU AYER

Pearl of
The Thousand Islands
in the bay of Jakarta....

The polished pearl among the jewels of the Thousands Islands for both vacationers and leisure travellers to enjoy. Take full advantage of the amenities of airconditioned floating cottages. Enjoy the fun and pleasures of staying in complete privacy that only the Pulau Ayer cottages provide.

P.T. SAROTAMA PRIMA PERKASA
JL. IR. H. JUANDA III/6, JAKARTA - 10120
PHONE : 342031-370708,
TELEX 45578 ASTEN IA

P.T. PONDOK KURING BANDUNG

P.T. PONDOK KURING
BANDUNG INN

Because of our dedicated service, Bandung Inn is a landmark in the whole of Bandung, the West Java city always remembered as "Paris of Java".

Bandung Inn, with beautiful, cosy room and winning amenities, gives a charmingly breezy touch, whether you're on business or vacation.

JL. MASKUMAMBANG NO. 8
TURANGGA, BANDUNG
PHONES : 411461 – 411462.

4 HOTELS WHERE YOU FIND GENUINE INDONESIAN AND ORIENTAL HOSPITALITY

Digitized by Google

Perjuangan kader-kader GOLKAR di forum legislatif baik yang menyangkut penyiapan perundang-undangan maupun yang menyangkut fungsi kontrol terhadap Pemerintah terutama dan pertama-tama juga dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kader-kader GOLKAR yang dipercayai untuk duduk di eksekutif dengan sendirinya dituntut untuk mampu melaksanakan dan mewujudkan pembangunan nasional ini sebagai pengamalan Pancasila. Pokoknya, seluruh kegiatan GOLKAR dan kader-kadernya dimanapun ia berada dengan sendirinya harus mencerminkan konsolidasi idiil tersebut.

Bagi GOLKAR, maka wawasan kita adalah wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional. Pokok-pokok pengertian wawasan Nusantara telah dirumuskan secara padat oleh rakyat Indonesia melalui Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa Nusantara Indonesia adalah satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan politik dan satu kesatuan hankam.

GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik, pelopor persatuan dan kesatuan bangsa secara terus menerus berusaha agar Wawasan Nusantara terwujud dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat.

Wawasan Nusantara adalah pegangan bagi bangsa Indonesia — dimana GOLKAR merupakan bagian dan turut bertangungjawab — dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pedoman untuk mewujudkan Wawasan Nusantara digariskan dalam Anggaran Dasar GOLKAR pasal 3 ayat (2) dimana ditegaskan dengan jelas, bahwa GOLKAR merupakan wadah berhimpunnya kader-kader bangsa pengemban, pengamal dan pembela Pancasila yang berorientasi pada program pembangunan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, asal usul, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu GOLKAR dalam bidang keanggotaan senantiasa menganut prinsip keanggotaan yang terbuka dalam arti bahwa setiap warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi dapat diterima menjadi anggota. Dalam memilih anggota Dewan Pimpinan di pusat maupun daerah serta dalam menetapkan calon-calon bagi badan-badan perwakilan GOLKAR hanya mendasarkan pertimbangannya pada sayarat yang obyektif yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas terhadap organisasi dan tidak tercela di samping persyaratan umum yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dengan demikian GOLKAR sejak awal berdirinya tidak menilai seseorang dari segi asal usul, keturunan, suku, agama yang dipeluk dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayati.

Wawasan Nusantara adalah landasan yang tepat untuk makin meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional yang telah terbukti merupakan modal kekuatan bangsa. Menyadari arti pentingnya kesatuan dan persatuan nasional yang berdasarkan Wawasan Nusantara ini, maka Rapat Pimpinan GOLKAR I tahun 1984 menetapkan Pedoman Sikap GOLKAR dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pedoman sikap tersebut harus menjadi pegangan dan penentu sikap dan perbuatan bagi setiap kader dan anggota GOLKAR, dimanapun ia bertuas dan berada. Dengan demikian konsolidasi idiil serta konsolidasi wawasan dapat dilihat sebagai upaya agar supaya nilai-nilai kepancasilaan melekat dalam tiap kebijakan organisasi, dalam tiap keputusan yang diambil dan dalam tingkah laku politik yang kita tampilkan dan bahkan terwujud dalam perbuatan nyata sehari-hari dalam masyarakat, yang dipelopori oleh anggota dan kader GOLKAR. Oleh karena itu tiap langkah kebijakan DPP GOLKAR mengandung di dalamnya konsolidasi idiil serta juga konsolidasi wawasan sekaligus.

Konsolidasi organisasi dalam 5 tahun ini telah dilaksanakan secara prinsipiil dengan langkah-langkah pembaharuan. Penyelengaraan Musyawarah-musyawarah daerah, pendaftaran keanggotaan serta langkah-langkah kaderisasi secara nasional, konsolidasi sistim dan mekanisme hubungan kerja ke dalam organisasi baik secara vertikal maupun horizontal serta penetapan berbagai atribut organisasi seperti Hymne dan Mars GOLKAR serta penetapan lembaga Pinisepuh GOLKAR dalam rangka memperkokoh keberadaan GOLKAR dalam negara dan masyarakat Indonesia adalah langkah-langkah penting konsolidasi yang berhasil dilakukan dalam masa 5 tahun terakhir ini.

Segera sesudah Musyawarah Nasional ke 3 tahun 1983 maka DPP GOLKAR mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah daerah, sesuai dengan tradisi organisasi yang berlaku sejak Musyawarah nasional pertama tahun 1973. Musyawarah-musyawarah daerah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh DPP GOLKAR dan ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 1983, dengan bertemakan Tri Sukses, Pelaksanaan Musyawarah Daerah adalah berjenjang ke bawah, mulai dari tingkat I dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah tingkat II, serta dimulai pada akhir tahun 1983.

Pada umumnya musyawarah-musyawarah berjalan lancar dan mencerminkan komposisi dengan ciri-ciri berikut: — terdapat perpaduan yang baik antara keharusan untuk menjaga kontinuitas di satu pihak dengan penyegaran di pihak lain; — tercermin adanya komposisi yang serasi ditinjau dari kebersamaan unsur-unsur keluarga besar Golongan Karya; — terdapat peningkatan peranan generasi muda dan wanita.

Dengan hasil-hasil Musda tersebut sebagai langkah konsolidasi organisasi di daerah-daerah telah memperlihatkan kemampuan Dewan Pimpinan Daerah baik tingkat I maupun tingkat II dalam melaksanakan Program Umum Golongan Karya, dengan dukungan dan bimbingan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat serta peran serta dan partisipasi dari seluruh unsur-unsur keluarga besar GOLKAR, yang telah menunjukkan kekompakan, kebersamaan dan semangat yang tinggi.

Pendaftaran Anggota

Langkah konsolidasi yang amat penting dan strategis sifatnya adalah pelaksanaan pendaftaran kembali dan pendaftaran baru anggota GOLKAR dalam Program Umum Golkar antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka konsolidasi organisasi perlu dimantapkan keanggotaan Golkar serta perlu ditingkatkan pembinaan administrasi keanggotaan. Di samping itu perlu kiranya diingat bahwa Musyawarah Nasional ketiga telah merubah ketentuan keanggotaan dalam Anggaran Dasar Golkar, ialah bahwa keanggotaan Golkar adalah perorangan, aktif dan kader, dan tidak lagi beranggotakan organisasi seperti ketentuan Anggaran Dasar sebelumnya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Digitized by Google

Dengan ketentuan ini, keanggotaan mempunyai arti amat penting dalam kehidupan organisasi sosial politik yang demokratis seperti Golkar. Kedaulatan berada di tangan anggota, dan anggota adalah pula sumber kekuatan organisasi. Dengan sistim ini — ialah yang disebutkan sistim kader — keberhasilan organisasi terutama akan didasarkan pada hasil kerja dan kegiatan para anggota dan kadernya.

Karena itu maka penyusunan ketentuan mengenai keanggotaan serta pendaftaran anggota mempunyai arti yang amat penting, terlebih-lebih mengingat pula adanya ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan kekuatan sosial politik memelihara daftar anggota.

Ketentuan mengenai keanggotaan GOLKAR disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GOLKAR serta merupakan pencerminan Wawasan Nusantara yaitu bahwa keanggotaan GOLKAR terbuka bagi setiap warga negara dewasa yang memenuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan organisasi tanpa membedakan latar belakang ras, suku, asal usul, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ketentuan keanggotaan diatur dalam Keputusan DPP GOLKAR No. KEP.005/DPP/GOLKAR/11/1983 tanggal 29 Nopember 1983, disusul dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 1984.

Dalam melaksanakan pendaftaran keanggotaan ini dianut pengertian bahwa mereka yang diketahui telah aktif berjuang di barisan GOLKAR sekurang-kurangnya sejak Pemilu 1982 sebenarnya sudah menjadi anggota GOLKAR, sehingga bagi mereka berlaku proses pendaftaran kembali. Sedangkan bagi lainnya yang ingin menjadi anggota GOLKAR, mereka harus mendaftarkan dirinya untuk menajdi anggota GOLKAR pada DPD Tk.II untuk diproses dan disaring untuk diterima menjadi anggota Golkar dalam waktu 1 tahun sebagai calon anggota GOLKAR.

Pendaftaran anggota GOLKAR mendapat sambutan luar biasa besarnya, bahkan di luar dugaan semula. Sejak dimulai pada tanggal 1 Januari 1984 sampai dengan pencatatan terakhir bulan Juni 1988 di seluruh Indonesia terdapat 32,416.188 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota.

Dari jumlah tersebut yang telah diproses dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota GOLKAR sebanyak ± 26 juta orang. Mereka ini telah menyatakan ikrar untuk setia pada Golkar dan telah memiliki Kartu Anggota GOLKAR (KAG). Disamping itu bagi setiap anggota GOLKAR diusahakan memiliki buku saku GOLKAR yang berisi hal-hal dasar mengenai kegolkaran yang patut diketahui oleh setiap anggota.

Pemeliharaan administrasi keanggotaan yang sedemikian besar merupakan masalah tersendiri, dan merupakan tugas kepengurusan GOLKAR yang akan datang untuk menyempurnakannya.

Kegiatan konsolidasi organisasi penting yang lain adalah gerakan kaderisasi. Di dalam Program Umum GOLKAR antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka konsolidasi organisasi maka GOLKAR perlu meningkatkan kemampuan anggota GOLKAR sebagai kader Pancasila, kader pembangunan dan kader organisasi yang berdedikasi dan mampu berorganisasi, serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya Program Umum menggariskan agar GOLKAR mengadakan pendidikan kader agar GOLKAR dapat terwujud sebagai organisasi kader yang tangguh dan berakar di tengah-tengah rakyat dan untuk lebih mewujudkan pengorganisasian rakyat atas dasar karya dan kekaryaan. Program Umum GOLKAR menggariskan pula agar disusun serta dilaksanakan pendidikan dan pembinaan kader secara terencana. Di samping itu, Munas III GOLKAR memberi perhatian khusus pada kaderisasi yang telah disinggung tersendiri dalam Memorandum Musyawarah Nasional III Golongan Karya.

Arti kader bagi GOLKAR penting karena GOLKAR hanya dapat hidup, berkembang dan berakar dalam masyarakat apabila mempunyai kader yang sadar, ulet dan militan dan dapat diandalkan sebagai tulang punggung dan motor penggerak organisasi. Sejak awal berdirinya, GOLKAR telah mempunyai kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi GOLKAR dan masyarakat. Potensi yang ada tersebut, ditambah dengan potensi baru yang muncul, harus disusun dalam bentuk pengorganisasian yang lebih teratur.

Menyadari pentingnya kedudukan dan peranan kader dalam rangka usaha makin mendewasakan, makin memandirikan dan makin mengakarkan Golkar di dalam masyarakat maka dengan keputusan DPP GOLKAR No.: KEP 048/DPP/GOLKAR/5/1984 tanggal 5 Mei 1984, telah ditetapkan Rencana Induk Kaderisasi Golkar sebagai pedoman bagi Dewan Pimpinan dalam semua tingkat untuk melaksanakan kaderisasi Golkar. Keterangan yang lebih terinci mengenai program kaderisasi terdapat dalam Lampiran pertanggungjawaban, sedangkan teks lengkap dari Rencana Induk Kaderisasi terdapat pada anak lampiran IX.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa untuk fase dewasa ini, kita baru mampu mengadakan pendidikan dan latihan kaderisasi dalam bentuknya yang sederhana. Namun demikian telah cukup memberikan bekal yang terarah untuk meningkatkan kemampuannya sebagai kader yang lebih berbobot.

Dua Tipe Kader

Terdapat dua tipe kader dilihat dari segi penugasannya yaitu kader teritorial, yang terikat pada daerah tertentu serta kader fungsional yang terikat pada bidang karya tertentu.

Dalam rangka realisasi Rencana Induk Kaderisasi, maka telah ditetapkan keputusan DPP GOLKAR Nomor KEP-051/DPP/GOLKAR/10/1984 pada tanggal 9 Juni 1984 tentang Pembinaan Kader Penggerak Teritorial Tingkat Desa, disingkat KARAKTERDES, yang mengatur kegiatan pembinaan yang meliputi pembentukan, pendidikan dan latihan, penjenjangan, penugasan pengakhiran tugas dan pengadministrasian.

Sebagai rincian lebih lanjut, telah dikeluarkan pula Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembinaan Karakterdes GOLKAR.

Masalah pokok yang mutlak perlu adalah penyiapan bahan-bahan pendidikan dan latihan bagi kader. Karena tanpa bahan-bahan yang jelas dan terarah, kaderisasi tidak akan berjalan efektif; terlebih-lebih karena kaderisasi itu bukan saja harus menjadi kader organisasi, melainkan harus pertama-tama menjadi kader bangsa yang Pancasilais dan kader persatuan dan kader penggerak pembangunan.

Syukur alhamdulillah berkat kerja keras dan ketekunan tokoh-tokoh GOLKAR yang dibentuk dalam kelompok-kelompok kerja dapatlah dihasilkan pada waktunya bahan-bahan pendidikan kader yang memadai yang terbagi dalam 4 kelompok bahan yaitu: Kelompok A yang mengenai ke-

Digitized by Google

Pancasilaan yang meliputi P4, UUD 45, GBHN dan pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah; kelompok B, mengenai ke-Golkaran yang meliputi AD/ART, sejarah GOLKAR, doktrin dan ikrar GOLKAR serta pokok-pokok kebijaksanaan GOLKAR; bahan kelompok C yang mengenai kepemimpinan yang meliputi sejarah perjuangan bangsa, asas-asas kepemimpinan, tata cara pengambilan keputusan dan lain-lain, serta bahan kelompok D yaitu mengenai kekhususan keadaan daerah yang dipersiapkan oleh DPD yang bersangkutan. Bahan-bahan tersebut telah diperbanyak meliputi lebih dari 600.000 set yang cukup bagi jumlah penatar-penatar sampai ke desa-desa.

Masalah penting lainnya yang harus disiapkan adalah tenaga penatar yang cukup yang harus menjangkau 70.000 desa. Untuk itu telah dilaksanakan penataran penatar secara berjenjang dimulai dengan tenaga-tenaga penatar di tingkat pusat, pentar tingkat I dan penatar tingkat II.

Melalui tenaga-tenaga penatar yang telah dibekali dengan bahan-bahan di atas, karakterdes telah dilengkapi dengan pengetahuan dasar baik sebagai warganegara yang baik, maupun sebagai kader yang tahu mengenai tugasnya, sehingga mereka berada dalam posisi yang cukup, baik untuk meningkatkan pertisipasinya dalam menggerakkan masyarakat dalam pensuksesan Repelita IV, maupun dalam berpartisipasi dalam melaksanakan program-program organisasi, khususnya dalam pemenangan Pemilu. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kaderisasi secara lengkap mencerminkan langkah nyata untuk mensukseskan pelaksanaan Tri Sukses.

Sambutan dan partisipasi seluruh jajaran GOLKAR terhadap program kaderisasi, khususnya pembinaan karakterdes amatlah mengesankan. Sejak dimulainya penyelenggaraan program Pembinaan Karakterdes pada tanggal 2 Juli 1984 dengan diadakannya penjelasan tingkat pusat sampai dengan bulan Juli 1988, telah tercatat di seluruh Indonesia sejumlah 8.280.728 orang Karakterdes, sesuai dengan proyeksi yang dipersiapkan bahwa jumlah Karakterdes diharapkan dapat menjangkau 5% jumlah penduduk atau sekitar 8 juta orang.

Dengan prinsip bahwa GOLKAR adalah organisasi kader dimana seluruh anggota GOLKAR harus ditingkatkan kemampuannya menjadi kader, maka gerakan kaderisasi ini perlu dilanjutkan dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada anggota GOLKAR yang berjumlah 26 juta orang, sedangkan kepada sejumlah 8 juta orang kader yang sekarang telah ada juga perlu terus dibina dan ditingkatkan kualitasnya. Kiranya hal ini menjadi tugas dan menuntut perhatian kita semua di bawah pimpinan dari Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR masa bakti 1988-1993.

Selain kader teritorial, maka seperti dikemukakan Rencana Induk Kaderisasi menentukan juga jenis kader fungsional yaitu kader yang terikat pada bidang kerja tertentu. Berbeda dengan Karakterdes yang diarahkan pada pembinaan wilayah, maka kader fungsional atau disingkat Karsinal diarahkan pada pembinaan lingkungan seprofesi.

Seperti halnya dengan Karakterdes, maka Kader fungsional pun dibentuk melalui pendidikan dan latihan dengan materi sama dengan pendidikan dan latihan Karakterdes, kecuali pada bahan Type D, dimana bahan yang disusun adalah hal-hal yang menyangkut karakteristik profesi dan fungsional yang bersangkutan. Kader fungsional yang ditetapkan sampai saat ini meliputi kader fungsional pemuda, pemuka agama Islam, wanita, pendidik, seniman, pengusaha dan pekerja.

Pendidikan dan latihan dilaksanakan berjenjang mulai dari pusat sampai ke daerah, dan menurut catatan terakhir di seluruh Indonesia dewasa ini terdapat jumlah kader fungsional sebagai berikut :

Pemuda	320.507
Pemuka Agama	77.135
Wanita	181.745
Pendidik	331.640
Jumlah	911.027

sedangkan jumlah kader fungsional seniman, pengusaha dan pekerja belum tercatat secara selengkapnya, karena baru dapat diselenggarakan di tingkat pusat.

Seperti telah disinggung tadi, maka untuk pembinaan selanjutnya dari kader-kader tersebut agar meningkat bobot kekaderannya, memerlukan perhatian khusus. Untuk itu DPP telah mengambil langkah-langkah permulaan yang dilaksanakan pada post Pemilu 1987, ialah dengan meningkatkan penyelenggaraan diskusi-diskusi di antara kader secara berkala, dengan tema bahasan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu telah ditetapkan adanya kelompok-kelompok diskusi tetap yang beranggotakan 10-20 orang Karakterdes di bawah pimpinan Komisaris Desa.

Selanjutnya, peningkatan kualitas Karakterdes, akan dilakukan melalui pembentukan koordinator Karakterdes, sesuai dengan Keputusan DPP GOLKAR Nomor KEP-196/DPP/GOLKAR/11/87 tentang Pembentukan Koordinator dan Peningkatan Kualitas Karakterdes. Untuk dapat mengadakan pemantauan serta evaluasi yang sebaik-baiknya mengenai jalannya pembinaan kader, diperlukan adanya suatu badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan menurut tingkatannya. Hal ini adalah untuk menjamin pembinaan kader secara berdaya guna, berhasil guna dan berkesinambungan. Dewasa ini Badan tersebut telah ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tingkat I dan tingkat II (BAPEKAPUS dan BAPEKADA), namun masih perlu ditingkatkan berfungsinya.

Selanjutnya tentang pelaksanaan Keputusan Munas III GOLKAR mengenai pemberian penghargaan kepada para Pinisepuh GOLKAR. Keputusan Munas III di atas dilandasi kehendak untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh senior GOLKAR, karena perkembangan organisasi yang tercapai sampai tahapnya dewasa ini adalah karena jasa-jasa, kewibawaan dan pengabdian dari para pejuang dan tokoh-tokoh Golkar yang merupakan Pinisepuh GOLKAR.

Untuk melaksanakan petunjuk Munas III di atas, ditetapkan pokok-pokok ketentuan mengenai Pinisepuh GOLKAR dan telah dibentuk Badan Pertimbangan Pinisepuh GOLKAR dengan tugas memberikan usul-usul mengenai calon-calon Pinisepuh yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan kepada Ketua Dewan Pembina. Badan tersebut selama ini telah berfungsi dan berdasarkan usul Badan tersebut telah ditetapkan 33 orang tokoh Pinisepuh GOLKAR. Di samping ketentuan-ketentuan mengenai Pinisepuh Pusat juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Sesepuh Pusat juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Sesepuh Daerah. Namun hingga kini belum ada laporan mengenai pelaksanaan dari penetapan Pinisepuh Daerah tersebut oleh GOLKAR tingkat daerah.

Perlu dilaporkan juga bahwa

Digitized by Google

DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN PERTAMINA

menyampaikan

Dirgahayu Golongan Karya ke XXIV
20 Oktober 1988
dan
Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya ke-IV

Semoga tercapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar
demi kesinambungan pembangunan Nasional
Dibawah Pemerintahan Orde Baru.

Digitized by Google

Hymne dan Mars GOLKAR yang telah lama ditunggu, telah selesai ditetapkan dan sekarang sudah memasyarakat secara luas, dan diperdengarkan pada upacara-upacara organisasi di seluruh tanah air. Pemilihan syair dan lagu untuk Hymne dan Mars GOLKAR dilakukan melalui sayembara yang diikuti oleh pencipta-pencipta lagu yang ternama dan dipilih oleh Dewan Juri yang terdiri dari para ahli. Hadirnya Hymne dan Mars GOLKAR mempunyai arti yang positif dalam mempertebal keyakinan pada cita-cita dan perjuangan GOLKAR, dan telah melengkapi identitas dan atribut GOLKAR.

Konsolidasi organisasi adalah kegiatan yang tidak henti-hentinya dan dilaksanakan dengan secara maksimal dengan mengikutsertakan seluruh jajaran GOLKAR. Dalam rangka ini, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setiap tahun bertepatan dengan penyelenggaraan HUT GOLKAR telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional maupun Rapat Pimpinan Paripurna. Di dalam Rapim atau Rakernas itulah diadakan evaluasi mengenai pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan digariskan pula langkah-langkah perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program dimasa berikutnya. Dengan demikian maka keputusan-keputusan DPP GOLKAR yang strategis sifatnya selalu didasarkan pada hasil Rapim, sehingga pelaksanaannya di daerah-daerah dapat dilakukan lebih mantap. Di samping itu melalui komunikasi langsung dua arah antara pusat dan daerah secara teratur, di mana hadir tokoh-tokoh pimpinan dari seluruh keluarga besar GOLKAR, maka dapat terjalin kekompakan dan kebersamaan sikap dan langkah dari seluruh jajaran GOLKAR dari pusat sampai daerah, sehingga dengan demikian pelaksanaan setiap kebijakasanaan dan program yang digariskan dapat efektif dan efisien.

Di samping Rapim maka Departemen-departemen dari DPP GOLKAR menyelenggarakan pula Rapat-rapat Kerja Nasional dengan mengikutsertakan Biro-biro di daerah serta tokoh-tokoh GOLKAR dari berbagai kalangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan di bidang Departemen masing-masing dan dalam rangka kordinasi teknis di bidang masing-masing seperti pemuda, wanita pemuka agama, koperasi dan wiraswasta, penerangan dan penerbitan, cendekiawan, seni-budaya dan seterusnya.

Keterlibatan jajaran GOLKAR diusahakan seluas mungkin untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di GOLKAR serta untuk menjalin kebersamaan dan rasa kekeluargaan antara sesama warga GOLKAR.

Kader-kader GOLKAR baik yang ada di Pemerintahan maupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lazim dikenal sebagai Fungsionaris GOLKAR, berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan GOLKAR mulai dari gerakan pendaftaran anggota, gerakan kaderisasi sampai pada gerakan kampanye menghadapi Pemilu. Kesemuanya dilakukan dengan kesadaran tinggi dan dengan kesukarelaan. Hal ini semua menunjang suksesnya tugas-tugas yang diemban oleh DPP Golkar.

Kegiatan-kegiatan komunikasi memegang peranan penting pula baik dalam rangka konsolidasi organisasi maupun dalam rangka memperkenalkan Golkar kepada masyarakat. Dalam rangka ini, Ketua Umum maupun rekan-rekan DPP GOLKAR lainnya telah melaksanakan kunjungan-kunjungan dan temu muka di daerah-daerah secara teratur maupun setiap kali kesempatan memungkinkan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, GOLKAR bangga dan terkesan menyaksikan semangat dan kiprahnya jajaran GOLKAR dalam melaksanakan program-program GOLKAR dan melaksanakan pembangunan di seluruh 27 propinsi dan sebagian besar Daerah Tk. II, bahkan di desa-desa.

Disamping komunikasi melalui kunjungan-kunjungan itu, maka komunikasi melalui media massa juga ditingkatkan frekuensi maupun daya jangkaunya. Media Karya, majalah bulanan Golkar yang sudah terbit sejak Dewan Pimpinan Pusat yang lalu, telah dapat ditingkatkan sehingga tiap bulan dapat terbit dengan oplag antara 18.000 sampai dengan 25.000. Di samping itu DPP juga menerbitkan media komunikasi bulanan dalam skala yang lebih luas, untuk melayani para kader Golkar yang berada terbesar di pelosok Tanah Air, ialah penerbitan bulanan TRISUKSES dengan oplag antara 350.000 sampai dengan 500.000 per bulan. Media cetak yang amat besar artinya ini masih perlu ditingkatkan kualitas maupun jumlahnya di masa-masa mendatang.

Sukses Pelita IV

Seperti telah dinyatakan dalam bagian lain dari laporan ini, GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik terbesar, sebagai pengemban hakekat Orde Baru dan sebagai pendukung utama pemerintah wajib mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang dilaksanakan berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara itu, Bapak Presiden telah menetapkan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV yang selanjutnya dijabarkan dalam REPELITA IV. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Program Umum GOLKAR, maka GOLKAR berpartisipasi mensukseskan Pelita IV di semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian pada masalah-masalah yang dirasakan mendesak seperti aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyat dengan memasyarakatkan Pancasila/P4 dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan delapan jalur pemerataan, meningkatkan pengawasan baik langsung oleh kader-kader GOLKAR maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa, dan lain-lain.

Pertama-tama perlu ditegaskan lagi, bahwa langkah kaderisasi yang dilakukan oleh GOLKAR tidaklah semata-mata untuk membentuk kader-kader organisasi, melainkan juga pertama-tama menjadi kader Pancasilais pemersatu bangsa, memberikan pendidikan politik agar menjadi warganegara yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik, yang itu merupakan salah satu kerangka landasan di bidang politik agar kita siap melaksanakan tinggal landas nanti. Kemudian di bidang sosial politik, GOLKAR berupaya mengembangkan dan memelihara stabilitas politik yang dinamis sebagai salah satu syarat mutlak berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Untuk itu, sesuai dengan amanat GBHN, perlu diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, maka kesepakatan yang dicapai dalam Sidang Umum MPR 1983 bahwa Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan

Digitized by Google

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus diwujudkan secara hukum. Untuk itu GOLKAR melalui kader-kadernya di FKP DPR-RI berjuang di lembaga legislatif. Perjuangan ini terwujudkan dengan terjadinya penyempurnaan terhadap Undang-undang no. 5 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sehingga menjadi Undang-undang no. 3 tahun 1985, serta disyahkannya Undang-undang no. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini semua memperkuat kedudukan Pancasila dari segi hukum formal, dan tentunya merupakan perkembangan yang penting. Namun demikian belum berarti bahwa pengamalan ideologi Pancasila dalam hidup sehari-hari telah sepenuhnya terwujud. GOLKAR harus terus-menerus melaksanakan konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan dan konsolidasi organisasi serta berupaya untuk mengakarkan nilai-nilai kepancasilaan dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai satu-satunya asas secara nyata dalam kehidupan politik khususnya dan seluruh kehidupan pada umumnya.

Salah satu upaya yang penting dalam hal ini adalah di bidang pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan menjadikan P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai bahan utama kaderisasi maka Golkar selain melakukan upaya konsolidasi, telah juga mengupayakan pemasyarakatan P4 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjangkau sekitar 10 juta kader, ditambah dengan sekitar 16 juta anggota GOLKAR lainnya (yang belum menjadi kader) tetapi diwajibkan menyatakan ikrar GOLKAR "Pancabhakti" yang mengandung janji dan tekad setiap anggota untuk mengemban dan mengamalkan Pancasila serta setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. GOLKAR telah turut serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan politik.

Pemasyarakatan Pancasila sebagai satu-satunya asas maupun pemasyarakatan P4 menyatu dalam tiap langkah dan tiap kebijaksanaan GOLKAR baik melalui pelaksanaan tugas di bidang legislatif oleh FKP DPR maupun melalui upaya-upaya komunikasi baik komunikasi tatap muka maupun melalui berbagai media massa seperti yang telah saya uraikan dimuka. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pelayanan hukum mendapat perhatian besar dari DPP GOLKAR, dengan sumbangan pemikiran dalam rangka pemantapan sarana dan prasarana hukum, penyusunan program legislatif serta upaya-upaya penyuluhan dan pelayanan hukum secara sistimatis dan meluas.

Secara umum kebijaksanaan DPP GOLKAR dalam mensukseskan Repelita IV, selain upaya di bidang sosial politik seperti diuraikan di atas adalah menciptakan iklim persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kader-kader GOLKAR dari semua lapisan baik pemuda, wanita, pengusaha, pekerja, tani dan nelayan, pendidik, pemuka agama dan lain-lain agar memperlihatkan prestasinya baik melalui GOLKAR, maupun melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan berbagai karya nyata. Dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, DPP GOLKAR menggarisbawahi pentingnya membina suasana yang memungkinkan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamalkan sebaik-baiknya ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dalam mengembangkan tugas bersama membangun negara dan bangsa.

Dengan demikian DPP GOLKAR aktif membantu pembangunan sarana-sarana keagamaan maupun lembaga-lembaga pendidikan agama. Pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, di antara sesama penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di antara umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapat perhatian terus menerus, dengan menggiatkan berbagai usaha komunikasi serta dengan menciptakan kegiatan bersama, dengan tidak membedakan latar belakang agama dan kepercayaan dari kader-kader GOLKAR.

Dalam pelaksanaan karya nyata dipelbagai bidang, terutama di sektor ekonomi-sosial, DPP Golkar memberikan dorongan serta kesempatan bagi kader-kader Golkar untuk berkarya nyata dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak seperti kesehatan, pendidikan, koperasi, pertanian, industri dan kerajinan rakyat, sektor informal, kependudukan, KB, perikanan, seni budaya, serta untuk berkarya nyata dalam bidang sosial untuk membantu mereka yang memerlukan uluran tangan.

Ini semua dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsepsi pembangunan Golkar, yalah pembangunan yang meliputi bidang materiil maupun spiritual yang seimbang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila.

Sukseskan Pemilu

Pemilihan Umum adalah mata rantai yang penting dalam siklus kepemimpinan nasional, sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila khususnya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan hari depan bangsa. Pemenangan Pemilu tahu 1987 merupakan jaminan mantapnya stabilitas nasional, meningkatnya gerak pembangunan dan kesinambungan kepemimpinan nasional. Bagi GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik, pemenangan pemilu mempunyai arti tersendiri serta merupakan ukuran prestasi atau keberhasilan GOLKAR dalam pelaksanaan Program Umumnya. Disadari, bahwa pemenangan Pemilu tidaklah hanya berarti GOLKAR harus menarik suara sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus terwujud dalam suasana yang bergairah dan adil sesuai peraturan hukum yang berlaku. Karena itu mensukseskan Pemilu tahun 1987 jelas tidaklah ringan terlebih jika diperhatikan berbagai faktor ialah antara lain faktor bahwa GOLKAR telah memenangkan tiga kali Pemilu berturut-turut.

Dengan sendirinya mempertahankan kemenangan tidaklah mudah. Dalam hubungan ini perlu pula diingat bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, tidak dimungkinkan lagi GOLKAR memperoleh kursi di Perwakilan Rakyat melalui pengangkatan. Selanjutnya Pemilihan Umum '87 dilaksanakan dalam keadaan ekonomi yang penuh keprihatinan serta diikuti oleh 15,5 juta pemilih baru generasi muda yang banyak di antaranya masih menghadapi masalah-masalah yang sukar dipecahkan, antara lain kesempatan kerja dan kesempatan pendidikan lanjutan. Kesemuanya ini tidak mengendorkan komitmen GOLKAR untuk mensukseskan Pemilu dalam kerangka pensuksesan pembangunan nasional, sehingga ditetapkanlah tema kampanye Pemilu "Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila".

Menyadari arti pentingnya Pemilu dan beratnya tugas yang dihadapi DPP GOLKAR menyiapkan diri jauh-jauh hari. Dalam pengertian umum,

Digitized by Google

maka setiap langkah yang dilakukan oleh DPP GOLKAR dalam rangka konsolidasi dan mensukseskan Pelita IV adalah juga langkah persiapan pemenangan Pemilu. Namun secara khusus, langkah-langkah ke arah pemenangan Pemilu disusun sejak ditetapkannya Rencana Perkiraan Keadaan pada tanggal 31 Juli 1985, disusul dengan penyusunan perkiraan keadaan di daerah-daerah oleh masing-masing Dewan Pimpinan Daerah.

Kemudian disusun Rencana Operasi Pemenangan Pemilu 1987 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 1985, dan dengan menyadari bahwa sebagian terbesar pemilih berada di pedesaan maka dikeluarkan pula Petunjuk Operasional Pemenangan Pemilu 1987 pada Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan juga pada tanggal 10 Oktober 1985, yang intinya adalah menegaskan tiap karakterdes untuk menggalang 7 orang calon pemilih melalui operasi eka sapta untuk mencapai sasaran pemenangan pemilihan umum yang ditetapkan. Sasarannya adalah minimal mencapai jumlah kursi yang proporsional sama dengan jumlah yang dicapai dalam Pemilu '83. Dengan ditiadakannya pengangkatan bagi anggota lembaga perwakilan dari golongan karya non ABRI serta dengan penambahan jumlah kursi di DPR dari 460 menjadi 500 kursi, maka secara proporsional dalam Pemilihan Umum '87 GOLKAR menetapkan sasaran sebagai 283 kursi di DPR-RI.

Disamping penggalangan teritorial melalui Operasi Ekasapta yang merupakan sistim penggalangan yang utama, maka disusun juga Penggalangan Fungsional melalui kader-kader fungsional dan Penggalangan Umum melalui mass media cetak, elektronika maupun tradisional, serta melalui kegiatan di bidang seni budaya, olahraga dan bakti sosial yang kesemuanya disusul dalam petunjuk-petunjuknya masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenangan Pemilu 1987, maka disusun Badan Pengendali Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah. Pengisian kelembagaan Pemilihan Umum yaitu jabatan-jabatan di Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Panitia Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara berlangsung sangat lancar di seluruh Indonesia.

Salah satu tugas yang berat karena rumit dan peka dalam rangka pemilihan umum adalah penyusunan daftar calon anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Justru karena berat dan pekanya masalah ini, maka DPP GOLKAR menggariskan persyaratan bakal calon serta mekanisme penentuan bakal calon sedemikian rupa sehingga obyektivitas penentuan calon dapat semaksimal mungkin tercapai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan organisasi. Tatacara penentuan calon ditetapkan melalui Keputusan DPP GOLKAR Nomor: KEP-114/DPP/GOLKAR/3/1986 dan ternyata telah dilaksanakan sebaik-baiknya baik di Pusat maupun Daerah, dengan melalui konsultasi dengan jalur-jalur keluarga besar Golongan Karya.

Persiapan-persiapan pensuksesan Pemilu '87 dilengkapi pula dengan persiapan kampanye Pemilu, meliputi penjabaran tema pemilu, penataran juru kampanye yang terdiri dari para tokoh-tokoh dan calon Golkar di lembaga-lembaga perwakilan. Perlu pula dikemukakan bahwa semangat dan dukungan para kader, anggota dan simpatisan GOLKAR dalam rangka mensukseskan kampanye pemenangan Pemilu ini amatlah luar biasa. Bantuan dan dukungan logistik yang diperlukan untuk mensukseskan kampanye sangatlah mengesankan dan berlangsung di seluruh dearah di tanah air ini.

Pemilihan Umum ternyata telah sukses dengan kemenangan di tangan GOLKAR melebihi sasaran yang ditetapkan. Sasaran untuk perolehan kursi DPR-RI sebanyak 283, ternyata dicapai 299, Dari segi persentase suara, Golkar meraih 73,17%, sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah 68%. Kemenangan GOLKAR ini mempunyai arti yang lebih mengesankan karena untuk pertama kali GOLKAR mencapai suara mayoritas meliputi seluruh propinsi, termasuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Juga hampir di seluruh Daerah Tingkat II. Hal ini membuktikan kepercayaan rakyat yang makin besar dan makin merata kepada Golongan Karya. Hal ini merupakan hasil kerja keras, kekompakan langkah serta dukungan sepenuhnya dari seluruh jajaran keluarga besar Golongan Karya, baik di tingkat Pusat, di Daerah-daerah sampai di Desa-desa. Seperti telah disinggung tadi, terlampauinya sasaran yang ditetapkan itu merata secara nasional, dan hanya satu atau dua daerah tertentu perolehan suara lebih kecil dari apa yang dicapai dalam Pemilu '82, karena perolehannya waktu itu sudah cukup tinggi.

Hasil Pemilu yang gemilang itu sekali-kali tidak boleh membuat kita lengah dan puas diri, malahan sebaliknya harus mendorong kita meningkatkan kerja keras dan pengabdian kita guna mewujudkan harapan rakyat yang dipercayakan kepada GOLKAR dengan mensukseskan pembangunan serta mulai mempersiapkan diri guna mensukseskan Pemilu tahun 1992 nanti. Karena itu dengan telah suksesnya Pemilu 1987, maka DPP GOLKAR disamping segera mengambil langkah-langkah persiapan untuk mensukseskan Sidang Umum MPR tahun 1988, juga segera mengadakan evaluasi dan introspeksi akan hasil-hasil Pemilu itu sendiri, yang telah baik harus kita pelihara dan kita lanjutkan dan yang masih terdapat kelemahan perlu segera diadakan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Hal ini terlebih-lebih perlu disadari oleh kita semua, karena kita akan tetap menghadapi masa-masa yang sulit dan berat, terutama dalam mempertahankan posisi GOLKAR dalam Pemilu tahun 1992 nanti.

Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, antara lain adalah peningkatan kualitas fungsionaris GOLKAR di tingkat Kecamatan dan desa dan kualitas kader-kader GOLKAR pada umumnya. Oleh karena itu dalam rangka memulai dan melanjutkan konsolidasi secara terus menerus, telah ditetapkan langkah-langkah nyata, antara lain berupa penyegaran komisaris, penetapan koordinator karakterdes yang dewasa ini ini sedang dalam pelaksanaan yang harus berjalan berlanjut.

Seperti disinggung di muka, maka sebagai tindak lanjut hasil Pemilu 1987 GOLKAR segera melakukan hal-hal yang perlu untuk mensukseskan Sidang Umum MPR 1988. Suksesnya Sidang Umum MPR haruslah berarti peningkatan dan kesinambungan pembangunan nasional serta kesinambungan kepemimpinan nasional di tangah Orde Baru. Dalam rangka persiapan itu, DPP GOLKAR telah menyusun pokok-pokok pikiran GOLKAR untuk bahan GBHN, untuk diperjuangkan dalam Sidang Umum MPR melalui Badan pekerja MPR. Seperti kita ketahui baik Sidang Badan Pekerja MPR maupun Sidang Umum MPR telah berjalan dengan sukses, dengan ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan

Digitized by Google

Negara serta ketetapan lainnya, dan dengan dipercayakannya kembali jabatan Presiden/Mandataris MPR kepada Bapak Soeharto, Ketua Dewan Pembina kita, serta terpilihnya Ketua Umum GOLKAR sebagai Wakil Presiden.

Sebagai langkah kegiatan DPP GOLKAR masa bhakti 1983-1988 yang terakhir adalah persiapan penyelenggaraan Munas ke-4 yang bertepatan dengan acara-acara HUT GOLKAR ke-24 yang telah diresmikan pembukaannya oleh Bapak Presiden, 20 Oktober malam.

Namun bagi GOLKAR sebagai kekuatan pembaharu dan pengembang kehidupan Demokrasi Pancasila, dalam menegakkan kedaulatan organisasinya yang berada di tangan anggota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Munas, menjelang terlaksananya Munas ini diliputi oleh pemikiran-pemikiran baru, bagaimana GOLKAR mampu mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih dinamis ke dalam tubuhnya sendiri. Terlebih-lebih karena GOLKAR yang telah makin dewasa, makin mandiri dan makin berakar di tengah-tengah masyarakat dengan jutaan anggota dan kadernya. Pemikiran ini dikembangkan dan pada akhirnya melalui Rapim GOLKAR tahun 1987 telah diputuskan mekanisme baru menjelang penyelenggaraan Munas ke-4 ini ialah dengan menyelenggarakan Musyawarah-musyawarah Daerah Tingkat II, dan kemudian setelah selesainya Musda-Musda Tingkat II itu, diselenggarakan Musda-Musda Tingkat I.

Dengan mendahulukan penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah Daerah itu diharapkan dapat disalurkan aspirasi anggota dan kader GOLKAR yang berada di akar-akar rakyat di Desa dan Kecamatan, melalui DPD-II, kemudian melalui DPD-I, yang kemudian akan berpuncak dan bermuara pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional pada saat ini.

Seperti telah disinggung tadi, karena masalah ini menyangkut perubahan suatu tradisi yang berlangsung mulai tahun 1973, maka keputusan untuk mendahulukan Musyawarah Daerah sebagai langkah awal untuk penyelenggaraan Munas dilakukan melalui Rapim GOLKAR III pada bulan Oktober 1987. Untuk penyelenggaraan Musyawarah Daerah DPP GOLKAR menetapkan petunjuk pelaksanaannya pada tanggal 23 Nopember 1987, dengan tema "Sukseskan Konsolidasi, Sukseskan Pelita V dan Sukseskan Pemilu 1992". Sehubungan dengan pentingnya penyaluran aspirasi dari anggota dan kader GOLKAR dari bawah ke atas, maka DPP GOLKAR memberikan perhatian khusus untuk memperbesar partisipasi Komisaris-komisaris GOLKAR dalam Musyawarah Daerah. Penyelenggaraan Musda dengan cara baru ini juga membawa perubahan dalam cara penyusunan program umum GOLKAR yang akan ditetapkan dalam Munas nanti. Dengan ditempuhnya proses yang baru ini, maka program daerah akan menjadi bahan pula bagi penyusunan program Umum.

Musyawarah-musyawarah Daerah menjelang Musyawarah Nasional ini berjalan lancar dan hasilnya menampakkan bahwa ternyata GOLKAR di Daerah-daerah juga telah makin meningkat kemampuannya dan menunjukkan makin kedewasaan, kemandiriannya untuk menentukan dan memperjuangkan kepentingan rakyat di daerahnya yang diwakilinya. Disamping itu juga telah mampu menunjukkan makin mantapnya persatuan dan kekompakan keluarga besar golongan karya. Hasil-hasil dari Musda-musda tersebut menunjukkan meningkatnya kematangan politik serta makin berkembangnya kehidupan demokrasi di seluruh jajaran GOLKAR di Daerah-daerah, disamping akan menjamin kesinambungan serta kaderisasi dalam memperjuangkan tujuan dan cita-cita Golkar yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun mengenai persiapan Munas ke 4 ini DPP GOLKAR telah berusaha menyiapkan sebaik-baiknya dengan jauh-jauh hari membentuk Panitia Munas yang meliputi penyelenggaraannya maupun materi Munas. Berbagai bahan telah disiapkan oleh berbagai kelompok kerja baik yang menyangkut jadwal acara dan tata tertib Munas yang tadi telah kita terima dan kita sahkan, maupun yang mengenai penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mengenai program umum GOLKAR untuk masa bakti lima tahun mendatang dan rancangan pernyataan politik GOLKAR. Rancangan-rancangan tersebut merupakan bahan sumbangan pikiran dari DPP GOLKAR masa bakti 1983-1988 untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas. Bahkan demi kelancaran pembahasan dalam komisi-komisi maupun dalam sidang pleno Munas ini, bahan-bahan tersebut telah disampaikan terlebih dahulu kepada DPD-DPD Tingkat I untuk memungkinkan pembahasan oleh pimpinan GOLKAR di dareah-daerah bersama-sama dengan kader-kadernya.

Keuangan

Dalam laporan pertanggungjawaban DPP ini kiranya tidak lengkap, kalau tidak dilaporkan pula keadaan keuangan dan inventaris DPP GOLKAR dewasa ini.

Masalah keuangan bagi suatu organisasi seperti GOLKAR adalah penting, walaupun sebagai organsiasi perjuangan GOLKAR tidak mendasarkan kegiatannya pada tersedianya dana semata. Dalam Anggaran Dasar GOLKAR ditentukan bahwa keuangan GOLKAR didapat dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah. Sehubungan dengan ketentuan mengenai iuran di atas, DPP GOLKAR melalui keputusannya nomor: KEP-006/DPP/GOLKAR/11/1983 telah menetapkan jumlah iuran bagi setiap anggota GOLKAR sebanyak Rp 100,- per bulan, dengan perimbangan 75% bagi DPD II, 20% bagi DPD I dan 5% bagi DPP. Pada umumnya sampai saat ini penarikan iuran belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sumber dana DPP GOLKAR selama ini terdiri dari sumbangan-sumbangan, baik dari pemerintah yang menyediakan anggaran bagi setiap kekuatan sosial politik dalam jumlah yang sama, maupun dari sumbangan-sumbangan anggota, kader-kader dan simpatisan GOLKAR, baik yang disalurkan melalui Dewan Pembina maupun lewat DPP GOLKAR.

Kita sungguh bersyukur dan amat berterima kasih kepada Bapak Soeharto, Ketua Dewan Pembina kita yang atas prakarsa beliau telah mendirikan sebuah Yayasan — Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti — yang telah menampung bantuan dan sumbangan para anggota, kader dan simpatisan GOLKAR yang mampu. Dana yang dihimpun itu ternyata berjumlah cukup besar, sehingga dari bunganya saja telah dapat membantu GOLKAR Pusat, GOLKAR Daerah Tingkat I maupun Tingkat II setiap bulan untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi. Di samping itu pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pendaftaran anggota (mencetak kartu anggota), untuk gerakan kaderisasi seperti pencetakan bahan-bahan pendidikan dan latihan kader, Yayasan DAKAB telah memberikan pembeayaan yang tidak kecil. Demikian juga

Digitized by Google

untuk pencetakan masalah dan media komunikasi lainnya serta pengeluaran-pengeluaran operasional lainnya yang dianggap perlu.

Dalam pada itu DPP GOLKAR 1983-1983 juga telah menerima sumbangan dan bantuan dari para anggota, kader dan simpatisannya baik berupa dana maupun barang-barang yang bermanfaat seperti jam dan ball point yang telah terkenal itu, kendaraan dan alat kantor yang kesemuanya sangat berguna bagi pelaksanaan tugas DPP. Menjelang pelaksanaan kampanye yang lalu DPP GOLKAR juga telah menyelenggarakan pengumpulan dana dari para anggota, usahawan dan dermawan yang hasilnya cukup membesarkan hati. Dari hasil sumbangan itu setelah digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan kampanye baik di tingkat pusat maupun daerah ternyata masih terdapat sisa, DPP GOLKAR telah mengambil kebijaksanaan agar sisa dana tersebut dapat dijadikan modal dana abadi yang dapat mendukung kegiatan organisasi baik di pusat maupun daerah. Sisa dana yang masih ada pada DPP GOLKAR 1983-1988 tentu akan dilimpahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR yang akan datang, yang jumlahnya cukup memadai.

Seperti telah dinyatakan tadi, maka terhimpunnya dana yang amat menunjang kegiatan-kegiatan GOLKAR adalah berkat bantuan serta partisipasi dari para anggota, kader dan simpatisan GOLKAR yang telah memperlihatkan semangat kesetiakawanan yang tinggi demi suksesnya perjoangan GOLKAR. DPP GOLKAR berterima kasih dan amat menghargai partisipasi ini. Rincian laporan keuangan yang telah diverifikasi oleh team verifikasi yang dibentuk DPP dilaporkan tersendiri.

Mengenai masalah inventaris organisasi, dalam rangka mendorong terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan inventaris organisasi, maka DPP GOLKAR telah mengeluarkan petunjuk kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah agar melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan harta kekayaan GOLKAR dengan tertib dan sesuai dengan asas-asas administrasi yang lazim, agar supaya inventaris dan harta kekayaan GOLKAR benar-benar digunakan untuk kepentingan organisasi dan tidak untuk kepentingan perorangan. Daftar inventaris DPP GOLKAR dilaporkan secara lengkap dalam laporan tersendiri.

Secara padat kiranya dapat disimpulkan bahwa melalui pelaksanaan Program Umum GOLKAR selama 5 tahun ini GOLKAR telah mampu membangun sistem dan mekanisme untuk mengembangkan jalannya organisasi dari tingkat pusat sampai daerah dalam rangka memantapkan konsolidasi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan GOLKAR.

Melalui kaderisasi, GOLKAR telah pula berupaya membangun sumber daya manusia yaitu para anggota Golkar sehingga mempunyai kesadaran politik yang makin meningkat, bukan hanya sebagai anggota GOLKAR, namun lebih dari itu, kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kemantapan sistem pengorganisasian disertai dengan kesadaran politik warga GOLKAR, diharapkan akan meningkatkan taraf kedewasaan serta kemandirian GOLKAR serta menjadikan GOLKAR makin berakar di tengah-tengah masyarakat.

GOLKAR yang telah makin dewasa adalah GOLKAR yang mampu berfikir dan bersikap mengutamakan pengabdian demi kepentingan organisasi, negara dan rakyat, di atas kepentingan pribadi dan golongannya sendiri.

GOLKAR yang makin mandiri adalah GOLKAR yang mampu menyiapkan kebijaksanaan, program dan menggerakkan organisasi untuk melaksanakan program tersebut atas prakarsa dan atas kemampuannya sendiri, bukan yang ditentukan oleh atau tergantung pada pihak lain.

GOLKAR yang makin berakar di tengah-tengah rakyat adalah GOLKAR yang memiliki kader-kader dan anggota yang ada di setiap pelosok tanah air dan di setiap lingkungan kerja yang siap berpartisipasi dalam mensukseskan program organisasi maupun pembangunan nasional.

Kondisi GOLKAR yang makin dewasa, makin mandiri dan makin berakar di tengah-tengah rakyat adalah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, dimana dalam Pelita IV bangsa kita dituntut untuk menciptakan kerangka landasan di segala bidang termasuk dalam bidang pembangunan politik. Dengan demikian apa yang dilakukan GOLKAR adalah bagian dari pembangunan politik nasional yang bermanfaat bukan saja untuk GOLKAR sendiri namun juga untuk bangsa dan negara seluruhnya.

Tersusunnya kerangka landasan di bidang politik merupakan sumbangan besar bagi proses pembangunan nasional, jika kita menyadari bahwa pembangunan politik adalah sulit bahkan mungkin yang tersulit, seperti ditegaskan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Tersusunnya kerangka landasan di bidang politik memungkinkan kita untuk mencurahkan seluruh perhatian untuk membangun masa depan bangsa, tanpa perlu khawatir akan terjadinya gejolak dan perubahan besar di bidang politik yang menurut pengalaman sejarah Indonesia merdeka telah menimbulkan masalah-masalah besar baik di bidang sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Terciptanya kerangka landasan di bidang politik menciptakan kondisi bagi pembangunan politik pada tingkatan selanjutnya dalam Pelita V yaitu pemantapan kerangka landasan yang berarti peningkatan kualitas kehidupan politik berdasarkan Pancasila, yaitu kehidupan politik yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum dan stabilitas nasional yang dinamis.

Perkembangan yang dilukiskan di atas adalah penting, karena bangsa kita di masa datang menghadapi berbagai tantangan zaman yang berat, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Tantangan dari luar hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia dalam berbagai bentuk yang pada dasarnya disebabkan oleh pesatnya kemajuan di bidang ilmu dan teknologi yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya perubahan struktural dan gejolak di bidang ekonomi yang amat merugikan negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang sedang giat giatnya membangun, pemikiran-pemikiran baru di bidang ideologi dan politik di negara-negara Blok Timur dan barat serta perkembangan situasi keamanan diberbagai kawasan dunia yang kesemuanya memerlukan sikap-sikap waspada dan sekaligus terbuka dari bangsa Indonesia untuk mengamankan dan mempertahankan kepentingan nasional kita.

Tantangan dari dalam muncul dalam berbagai bentuk pula, yang pada dasarnya disebabkan oleh meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat sejalan dengan meningkatnya kemajuan di pelbagai bidang kehidupan di satu sisi, dan masih banyaknya masalah yang belum terselesaikan di sisi lain.

Peningkatan tuntutan dan harapan ini, menonjolkan masalah-masalah pembangunan yang bersifat kualitatif seperti peningkatan kehidupan de-

Digitized by Google

Sudharmono berjanji tidak akan dapat melepaskan ikatan bathin.

mokrasi, pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih adil, penegakkan hukum, peningkatan kualitas pendidikan serta lebih meratanya kesempatan menikmati pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi.

Pada saat yang sama kita juga menyaksikan hadirnya generasi baru Indonesia yang dibesarkan dalam alam pembangunan dan dengan demikian memiliki pola pikir dan orientasi yang tidak selalu sama dengan pola pikir dan orientasi generasi sebelumnya. Di samping besarnya potensi sumber daya manusia yang dijanjikan oleh generasi baru ini, mereka juga memerlukan pembinaan kesadaran sejarah dan kesadaran politik agar mereka sangguh meneruskan perjuangan bangsa dalam garis-garis yang telah dirintis oleh generasi pendahulunya.

Penciptaan kerangka landasan di bidang politik penting artinya karena tantangan zaman seperti diuraikan tadi, dapat menciptakan berbagai masalah besar di masa datang, jika pada saat yang sama kerangka landasan politik kita belum siap. Kerangka landasan di bidang politik perlu tersusun dan kemudian dimantapkan, agar perubahan-perubahan pesat yang pasti terjadi dapat kita arahkan dan manfaatkan sehingga menghadirkan berbagai kemungkinan dan harapan bagi terbinanya masa depan bangsa yang lebih cerah ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Dalam menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang berat di masa-masa mendatang, maka GOLKAR harus tanggap dan siap memberikan pengabdian dan peran sertanya, baik dengan konsepsi-konsepsinya yang konstruktif maupun dengan karya-karya nyata yang diperlukan bagi suksesnya perjuangan bangsanya.

Dalam rangka inilah diharapkan Munas ke 4 ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang memungkinkan peningkatan peran serta Golkar di bawah kepemimpinan GOLKAR yang baru nanti.

Mengenai kepemimpinan GOLKAR yang akan dihasilkan oleh Munas ini, Sudharmono berkeyakinan bahwa Munas ini melalui team formaturnya akan dengan arif bijaksana menetapkan kepemimpinan yang akan mampu melaksanakan tugas-tugas berat memimpin GOLKAR dan membawa GOLKAR semakin berakar dan dicintai rakyat, karena GOLKAR mampu berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat dan membawa rakyat meningkatkan taraf hdup dan kesejahteraannya.

Keyakinan itu dilandasi oleh kenyataan bahwa GOLKAR dengan tingkat kedewasaannya yang sekarang ini telah memiliki banyak kader-kader pimpinan yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas besar bangsanya.

Dalam kesempatan itu Sudharmono menegaskan bahwa tidak menyediakan diri untuk dipilih kembali sebagai Ketua Umum GOLKAR, karena ingin memusatkan perhatian pada tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan sebagai Wakil Presiden, untuk membantu tugas-tugas Bapak Presiden sebaik-baiknya yang ia nilai akan amat berat.

Tapi sebagai seorang yang turut melahirkan GOLKAR dan langsung turut mengelola dan membesarkan GOLKAR, ia berjanji tidak akan dapat melepaskan ikatan batin, hati dan pikiran dari perjalanan GOLKAR di masa-masa yang akan datang. Karenanya dalam kedudukan apapun akan tetap bersama dan setia kawan dengan Pimpinan-pimpinan GOLKAR yang akan datang serta dengan senang hati memberikan bantuan sekiranya diperlukan.

Disadari bahwa sukses yang dicapai GOLKAR dalam masa 5 tahun terakhir ini adalah sukses bersama baik seluruh jajaran kader-kader GOLKAR maupun semua jalur keluarga besar Golongan Karya. Perlu digarisbawahi bahwa kunci sukses GOLKAR terletak pada kebersamaan serta kekompakan ketiga jalur keluarga besar tersebut. Dengan demikian atas nama DPP Golkar mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh keluarga besar Golongan Karya. Demikian juga penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina, Ketua Presidium Dewan Pembina dan seluruh anggota Dewan Pembina, yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tak terhingga nilainya serta dalam tiap kesempatan selalu memberikan saran serta nasehat dan petunjuknya yang memperlancar dan memperingan pelaksanaan tugas DPP GOLKAR.

Demikian juga kepada semua Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Penasehat serta seluruh anggota Dewan Pertimbangan dan anggota Dewan Penasehat, disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam mendampingi Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada para Fungsionaris GOLKAR, para Pinisepuh serta tokoh-tokoh GOLKAR yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas jasa-jasanya yang berupa apapun yang diberikan kepada GOLKAR selama ini.

Kalau Golkar dewasa ini dapat dikatakan meraih sukses, maka sukses itu jelas hasil karya bersama serta berkat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Namun juga disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan itu bukannya tanpa kekurangan dan kekecewaan, karena organisasi kita ini memang dikelola oleh manusia-manusia yang memiliki kekurangan-kekurangan.

"Atas itu saya lah sebagai Ketua Umum DPP Golkar selama 5 tahun ini yang bertanggungjawab, bukan pihak lain. Dan atas itu semua saya mengharapkan pengertian dan maaf," ujar Sudharmono.□

Digitized by Google

Penyerahan Inventaris GOLKAR

Keberhasilan DPP GOLKAR periode 1983-1988, bukan hanya pada bidang politik seperti sukses konsolidasi, sukses Pemilu 1987, sukses Sidang Umum MPR dan sukses beberapa unsur fungsionaris DPP GOLKAR menduduki posisi menteri dan wakil presiden. Tapi sukses di sisi lain pun perlu digarisbawahi sebagai bentuk keberhasilan DPP GOLKAR yang lalu, yaitu berhasil menginventarisir kekayaan sebesar Rp. 9.408.779.037,07. Kekayaan ini terdiri dari deposito berjangka di Bank Duta Ekonomi, Bank Bumi Daya cabang Mangga Besar dan Duta Merlin Jakarta sebesar Rp 6:667.500.000, surat perjanjian tanda pinjaman dana tanpa bunga kepada 22 yayasan yang diasuh DPD-DPD tingkat I GOLKAR sebesar Rp 2,725 milyar dan saldo giro bank sebesar Rp 16,279 juta lebih. Di samping itu, inventaris kekayaan juga berbentuk nota pembelian saham pemilikan Harian Umum Pelita, nota inventaris kantor DPP GOLKAR, Koperasi Karya Kita, majalah bulanan Media Karya dan tabloid Tri Sukses.

Semua kekayaan ini diserahterimakan dari Bendahara DPP GOLKAR periode 1983-1988 Zarlons Zaghlul, SH, kepada Bendahara DPP GOLKAR periode 1988-1993 Eric Samola, SH, di Aula DPP GOLKAR Slipi, Jakarta.

"Serah terima kekayaan ini merupakan penuntasan tugas dan tanggung jawab DPP GOLKAR lama. Ini perlu dipertanggungjawabkan karena kekayaan ini dari, oleh dan untuk seluruh keluarga besar GOLKAR," tegas Ketua Umum DPP GOLKAR periode 1983-1988 Sudharmono, SH.

Tugas yang diemban DPP GOLKAR baru diakui tidak kalah berat dibandingkan DPP GOLKAR sebelumnya. Dalam masa lima tahun mendatang, tentunya tuntutan rakyat makin meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan nasional. Untuk itu, tugas DPP GOLKAR baru supaya tetap melanjutkan program DPP GOLKAR lama yaitu Tri Sukses — sukses konsolidasi, sukses Pelita V dan sukses Pemilu 1992.

Kualitas Kader

Karenanya, DPP GOLKAR baru harus meningkatkan perhatiannya untuk membina serta meningkatkan kualitas kader-kader GOLKAR yang sudah ada. Sedangkan DPP GOLKAR sebelumnya baru mencetak kader-kader dan belum sempat mengadakan pembinaan sekaligus peningkatan kualitas kadernya. Sementara komposisi DPP GOLKAR 1988-1993 yang baru dibentuk sebagai hasil Munas IV GOLKAR telah mencerminkan peremajaan. Dari jumlah pengurus pleno DPP sebanyak 45 orang, 18 orang di antaranya adalah orang lama dan di jajaran pimpinan harian yang berjumlah 17 orang, 12 orang di antaranya pun adalah orang lama. Kenyataan ini merupakan kesinambungan dan peningkatan gerak GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik terbesar. Dengan demikian, semoga GOLKAR dalam kepemimpinan Wahono akan makin menjadi besar dan jaya. Bagi kita yang sudah mantan, kata Sudharmono, jangan merasa berdiri di luar pagar dan malahan GOLKAR harus tetap kita yakini menjadi wahana pengabdian untuk mensejahterakan rakyat. Kita harus terus melanjutkan perjuangan GOLKAR sehingga tugas yang tidak ringan itu yakin dapat dilaksanakan DPP GOLKAR baru, dengan mendapat dukungan penuh dari seluruh kader GOLKAR yang ada agar tugas yang diembannya dapat dirasakan lebih ringan.

Tugas Pengurus baru Golkar tidak kalah berat dengan yang lalu

Sementara itu Ketua Umum DPP GOLKAR periode 1988-1993 Letjen (purn) Wahono menilai, memang tantangan GOLKAR makin besar di masa mendatang. Untuk menghadapi tantangan itu, ia mengharapkan seluruh jajaran GOLKAR bekerja keras, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. DPP GOLKAR periode lalu telah meninggalkan landasan yang kuat. "Seluruh jajaran GOLKAR agar merapatkan barisan dalam menatap masa depan dengan penuh optimisme dan tawakal dalam mengatasi berbagai rintangan sebagai tindak lanjut perjuangan GOLKAR," sambungnya.

Dalam kesempatan ini pula Wahono menyerahkan cinderamata sebuah lukisan 'Banteng' kepada Sudharmono dan Ny. Wahono memberikan sebuah tempayan kepada Ny. EN Sudharmono.□ (DT)

Digitized by Google

Program Umum GOLKAR 1988-1993

1. Pengertian

a. Program Umum ini merupakan pokok-pokok program Golongan Karya (GOLKAR) di segala bidang yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional IV, dalam masa bakti 1988-1993, untuk mencapai tujuan GOLKAR sebagai pengemban hakekat Orde Baru, dalam rangka berperan serta mewujudkan tujuan Nasional sebagai tersebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Program Umum ini dituangkan dalam bentuk garis-garis besar yang merupakan pedoman dan memberikan arah yang mengikat bagi seluruh jajaran GOLKAR.

c. Pokok-pokok program ini merupakan kelanjutan, peningkatan pembaruan dan penyempurnaan dari Program Umum GOLKAR 1983-1988.

2. Maksud dan Tujuan

a. Program Umum ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran-sasaran dan langkah-langkah perjuangan dalam lima tahun mendatang, untuk meningkatkan konsolidasi dan dalam rangka tanggung jawab dan keikutsertaan GOLKAR sebagai pengemban hakekat Orde Baru untuk melaksanakan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

b. Program Umum ini bertujuan menjadi pedoman bagi segenap jajaran GOLKAR dalam melaksanakan konsolidasi dan dalam ikut melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana diamatkan oleh GBHN 1988.

3. Landasan

Program Umum ini disusun dengan berlandaskan kepada: a. Landasan idiil: Pancasila; b. Landasan konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945; c. Landasan Operasional: GBHN 1988 dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya dan d. Landasan organisatoris: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Doktrin, dan Ikrar GOLKAR.

4. Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup dari Program Umum ini meliputi Tri Sukses GOLKAR, yakni: (1). Sukses konsolidasi, (2). Sukses Pembangunan Lima Tahun Kelima (PELITA V) dan (3). Sukses Pemilihan Umum (PEMILU) 1992.

b. Program Umum ini, juga mengandung tanggungjawab dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik dalam rangka lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila dan pengabdian kepada rakyat.

c. Keseluruhan Program Umum ini mempunyi semangat untuk menjawab tantangan dan sekaligus memenuhi tanggung jawab dan peranan GOLKAR dalam menghadapi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua.

Tujuan Golongan Karya

Tujuan GOLKAR adalah, 1. Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

Sikap Dasar

Dalam melaksanakan Program Umum ini, GOLKAR senantiasa berpegang teguh pada sikap dasarnya, yaitu: 1. Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup Bangsa, dasar Negara dan ideologi Nasional, serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Melaksanakan tanggungjawab dan peranan GOLKAR sebagai pengemban hakekat Orde Baru dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Melaksanakan tanggung jawab dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan, guna mengemban tugas kepeloporan dalam melaksanakan pembaruan dan pembangunan disegala bidang serta senantiasa memperjuangkan gagasan-gagasannya dalam semangat demokrasi dan kekeluargaan untuk kepentingan rakyat.

5. Memantapkan kebersamaan dengan rakyat sebagai sumber aspirasi perjuangan GOLKAR dan kekuatan GOLKAR, serta menggerakkan partisipasi rakyat yang tumbuh dari bawah secara luas dan kreatif, menumbuhkan etos kerja produktif bagi penyuksesan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan guna, menggalang dukungan masyarakat.

6. Melanjutkan pembangunan politik untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila yang didukung oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik serta ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dalam hubungan ini makin diperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa serta kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum.

7. Mendukung lebih mantapnya pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI sebagai salah satu kekuatan Bangsa dalam rangka memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum guna mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

8. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, GOLKAR semakin memantapkan diri sebagai organisasi

Digitized by Google

kekuatan sosial politik yang terbuka.

9. Memelihara dan memantapkan kebersamaan dan keterpaduan hubungan segenap potensi dalam jajaran GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang lebih mandiri, dewasa, mengakar, dan berkualitas sehingga semakin mampu melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat yang diperkirakan akan dihadapi, oleh karenanya perlu diperhatikan dalam menentukan gerak langkah pada kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Faktor Pendukung

a. Telah dikukuhkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga merupakan landasan yang kuat untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa dan lebih memantapkan pelaksanaan Wawasan Nusantara.

b. Mantapnya stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang merupakan prasyarat bagi terlaksananya program GOLKAR, serta suksesnya Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang merupakan landasan yang mantap untuk memasuki proses tinggal landas.

c. Hasil-hasil pembangunan yang telah dirasakan oleh rakyat banyak semakin meningkatkan kesadaran dikalangan masyarakat, tentang pentingnya melanjutkan, meningkatkan, memperdalam, dan memperluas pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

d. Semakin meningkatnya kerukunan hidup di antara sesama ummat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di antara semua ummat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan landasan yang kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

e. Suksesnya Sidang Umum MPR Tahun 1988 membuktikan semakin mantapnya kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum.

f. Keberhasilan konsolidasi GOLKAR menjadi modal yang sangat bermanfaat untuk lebih mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan GOLKAR di dalam masyarakat.

g. Kemenangan GOLKAR dalam setiap Pemilu terutama dalam Pemilu 1987 membuktikan semakin meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap GOLKAR.

2. Faktor Penghambat

a. Pertambangan jumlah penduduk yang relatif besar dan penyebarannya yang belum merata serta sebagian belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, mempengaruhi pelakanaan pembangunan.

b. Pertambahan angkatan kerja yang belum seimbang dengan penyediaan lapangan kerja mengakibatkan pengangguran yang dapat menimbulkan kerawanan sosial yang merupakan tantangan utama bagi Pembangunan Nasional.

c. Masih adanya kesenjangan sosial yang menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

d. Masih adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak mendukung usaha menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

e. Masih lemahnya disiplin Nasional dan sifat etos kerja dikalangan Aparatur Negara dan masyarakat.

f. Situasi perekonomian dunia yang tidak menentu mengganggu pelaksanaan pembangunan.

g. Masih adanya bahaya laten komunis dan sisa-sisa G 30 S/PKI serta golongan ekstrim lainnya, merupakan ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas Nasional.

h. Belum memadainya sarana dan prasarana ekonomi diberbagai daerah di penjuru tanah air.

Sasaran Pokok

1. Pencapaian tujuan GOLKAR dilakukan melalui pelaksanaan Program Umum secara bersungguh-sungguh dengan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, baik sasaran ke dalam maupun sasaran ke luar.

2. Sasaran ke dalam adalah: a. Mantapnya GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan dalam mengemban tugas pembaharuan dan pembangunan bagi kepentingan rakyat.

b. Mantapnya GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang semakin dewasa, mandiri, mengakar, berkualitas, dan demokratis sehingga lebih tanggap dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan pemantapan perwujudan Demokrasi Pancasila.

c. Meningkatnya kemampuan dan peranan kader yang setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan d. Meningkatnya peranan semua perangkat Organisasi di semua tingkatan.

3. Sasaran ke luar adalah: a. Tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Suksesnya Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila khususnya pada Repelita V untuk memantapkan landasan yang kokoh guna memasuki proses tinggal landas.

c. Kemenangan GOLKAR pada Pemilu 1992 dan suksesnya Sidang Umum MPR 1993 serta d. Gairahnya semangat partisipasi aktif rakyat dalam Pembangunan Nasional.

4. Sasaran sebagaimana dimaksud di atas diusahakan untuk dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang terencana, terarah, terkordinasi, dan terus menerus, yang dirangkum dalam Tri Sukses, yaitu: a. Sukses Konsolidasi. b. Sukses Pelita V. c. Sukses Pemilu 1992.

Sukses Konsolidasi

1. Konsolidasi adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah, dan terpadu yang dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri untuk maju lebih lanjut dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2. Konsolidasi meliputi: a. Konsolidasi Idiil. b. Konsolidasi Wawasan. c. Konsolidasi Organisasi.

3. Konsolidasi Idiil

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang Konsolidasi Idiil antara lain adalah: a. Memperkokoh kesetiaan GOLKAR secara tuntas dan tak tergoyahkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi, paham dan

Digitized by Google

pola pikir yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila.

c. Meningkatkan usaha pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), baik melalui penataran, pendidikan, keteladanan dan latihan kader, maupun upaya-upaya pendidikan politik lainnya.

4. Konsolidasi Wawasan

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang Konsolidasi Wawasan antara lain adalah : a. Memantapkan, penghayatan dan pengamalan Wawasan Nusantara dikalangan anggota GOLKAR.

b. Memelopori pemasyarakatan Wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan c. Memantapkan penghayatan dan pengamalan hakekat karya dan kekaryaan disegenap bidang kegiatan.

5. Konsolidasi Organisasi

a. Konsolidasi Organisasi meliputi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan, kaderisasi, kelembagaan, penggalian dan pendayagunaan dana, hubungan dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional, serta penerangan, penerbitan dan media masa.

b. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan adalah: (1). Memantapkan keanggotaan GOLKAR yang bersifat perorangan, dan menganut stelsel aktif. (2). Memantapkan pembinaan administrasi keanggotaan. (3). Melakukan komunikasi timbal balik untuk meningkatkan kebersamaan dan kesetiakawanan di antara seluruh anggota dan antara anggota dengan pimpinan dan kader yang berkarya diberbagai lapangan pekerjaan.

c. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang kaderisasi adalah: (1). Meneruskan dan meningkatkan usaha pendidikan dan latihan kader sebagai penggerak inti organisasi baik jumlah, jenis maupun kualitasnya.

(2). Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kader, sehingga lebih memiliki kematangan penampilan, kedalaman pengetahuan, kegigihan perjuangan dan kemampuan berprestasi.

(3). Menyempurnakan dan meningkatkan mekanisme pembinaan dan pengembangan serta pendayagunaan kader secara melembaga dan teratur, antara lain mencakup perencana, penjenjangan karier sesuai prestasi, dedikasi dan loyalitasnya.

(4). Meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat antara lain generasi muda, wanita, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, pendidik, Cendekiawan, pengusaha, pemuka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya, sebagai sumber kader bagi GOLKAR.

(5). Mendorong dan mendukung kegiatan kader GOLKAR yang berkecimpung dalam organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan Lembaga Swadaya Kemasyarakatan agar dapat berprestasi dan berkarya nyata dalam berbagai bidang profesi dan pengabdian masyarakat.

(6). Menampilkan kader-kader yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada cita-cita GOLKAR, mempunyai integritas dan berkemampuan memimpin organisasi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang kelembagaan adalah: (1). Meningkatkan pendayagunaan kepengurusan GOLKAR disetiap tingkat sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi. (2). Mengefektifkan pembagian tugas dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan administrasi organisasi. (3). Menyelenggarakan mekanisme kerja kepengurusan secara musyawarah/Mufakat sesuai dengan prinsip kepemimpinan kolektif, kekeluargaan dan penuh keterbukaan dalam suasana demokratis. (4). Mewadahi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kader GOLKAR secara tetap, dengan membentuk Lembaga/Badan dan Kelompok Kerja yang dianggap perlu. (5). Meningkatkan pendayagunaan Badan Pengelola Kader disetiap tingkatan Dewan Pimpinan GOLKAR.

e. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang penggalian dan pendayagunaan dana, adalah: (1). Melakukan pemungutan iuran anggota secara lebih intensif dan tertib. (2). Peningkatan usaha penggalian dana dari sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat. (3). Peningkatan pengadministrasian dan pengelolaan kekayaan organisasi dan pendayagunaan dana secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

f. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional, adalah: (1). Mengatur dan meningkatkan mekanisme hubungan kerjasama dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dalam rangka pelaksanaan program, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2). Mengatur dan meningkatkan mekanisme hubungan kerjasama dengan berbagai lingkungan yang potensial seperti cendekiawan, budayawan, media massa, pemuka agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh-tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.

g. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang penerangan, penerbitan, dan media massa, adalah: (1). Melanjutkan dan meningkatkan usaha-usaha penerangan dan penerbitan sebagai media informasi, motivasi dan untuk menambah pengetahuan serta ketrampilan dalam berbagai bidang profesi/fungsional dan sebagai sarana komunikasi timbal balik antara GOLKAR dengan anggota-anggotanya dan masyarakat. (2). Memberi penerangan mengenai pemikiran/gagasan, kebijaksanaan dan program serta kegiatan-kegiatan GOLKAR untuk lebih meningkatkan pemahaman dan tanggapan positip masyarakat kepada GOLKAR. (3). Meningkatkan pendayagunaan sarana komunikasi sosial lainnya sebagai media bagi organisasi untuk menyebar luaskan kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan kepada jajaran GOLKAR dan masyarakat luas, serta sebagai sarana penuangan dan penyaluran aspirasi serta pengembangan inspirasi kader. (4). Meningkatkan hubungan dan kerjasama yang lebih efektif dengan kalangan media massa, dalam rangka lebih meningkatkan opini masyarakat terhadap GOLKAR dan sekaligus dapat membantu dalam pelaksanaan Program GOLKAR.

Sukses Pelita V

1. GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang mendapat kepercayaan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia dan sebagai pengemban hakekat Orde Baru serta sebagai pendukung utama Pemerintah berupaya untuk turut serta secara aktif dalam pelaksanaan Repelita V sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

2. Pokok-pokok program untuk menyukseskan Pelita V yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, meliputi bidang-bidang: a. Sosial politik; b. Sosial ekonomi; c. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya dan d. Per-

Digitized by Google

tahanan keamanan.

3. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang sosial politik, adalah: a. Melanjutkan dan meningkatkan usaha agar pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi semakin nyata dan mantap melalui penataran P-4, pendidikan dan latihan kader, dan lain-lain.

b. Meningkatkan peranan GOLKAR dalam pembangunan politik, guna memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila dengan meningkatkan kualitas kehidupan politik, agar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan semakin mampu melaksanakan peranan dan fungsinya dalam mengisi Pembangunan Nasional.

c. Meningkatkan pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga makin mampu mengembangkan partisipasi politik yang tumbuh dari bawah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa.

d. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama serta dialog yang terbuka dengan kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna lebih memantapkan sistem politik Nasional.

e. Memantapkan fungsi dan meningkatkan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang dewasa, mandiri dan berakar serta berkualitas dalam menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara demokratis.

f. Turut berusaha menciptakan iklim yang lebih mendorong dan meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila dan kesinambungan Pembangunan Nasional.

g. Meningkatkan upaya agar tercipta aparatur negara yang berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan berwibawa, sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, dengan turut menyukseskan pengembangan sistem dan langkah pengawasan secara konsepsional dan operasional. Sejalan dengan itu turut mengusahakan agar masyarakat dan dunia usaha ikut membantu tercipta dan terbinanya pelaksanaan tugas-tugas aparatur negara yang bersih, berwibawa, berdayaguna dan berhasilguna.

h. Memelopori tegaknya disiplin nasional di kalangan masyarakat dan terus berupaya agar aparatur negara lebih berperanan sebagai pelopor pelaksanaan disiplin nasional serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif.

i. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, ABRI dan pensiunan, sesuai dengan kemampuan negara.

j. Berupaya untuk lebih terciptanya kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga hukum mampu menjadi pengayom masyarakat tanpa kecuali, memberi rasa aman, menimbulkan kegairahan kreatifitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan upaya pembaruan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

k. Mengusahakan pemerataan komunikasi dan informasi dengan mengembangkan suasana yang makin terbuka, pemerataan akses terhadap sarana dan jalur komunikasi, peningkatan informasi pembangunan yang tepat dan lengkap, serta peningkatan komunikasi dua arah yang dinamis, sehingga dapat lebih mendorong peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan disegala bidang.

l. Memantapkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan Nasional dengan lebih meningkatkan peranan Indonesia dalam mempererat persahabatan, kerjasama dan dalam memecahkan masalah internasional maupun regional yang saling menguntungkan melalui forum multilateral maupun bilateral dibidang sosial politik, ekonomi, ilmu dan teknologi, kebudayaan, dan lain-lain dalam rangka menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang sosial ekonomi, adalah: a. Memperjuangkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelaksanaan Delapan jalur Pemerataan.

b. Berpartisipasi aktif mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara lain dengan mendukung upaya peningkatan pengerahan dan pemanfaatan sumber dana dan daya yang terarah dan tepat baik yang berasal dari dalam negeri seperti dari pajak, devisa eksport dan penerimaan bukan pajak lainnya, serta meningkatkan peranan pasar modal, maupun pemanfaatan dana luar negeri.

c. Meningkatkan upaya memelihara dan lebih memperkokoh stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis, khususnya, dibidang ekonomi, untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh, sebagai prasyarat mantapnya kondisi untuk tinggal landas.

d. Senantiasa berusaha agar tumbuh dan berkembangnya inisiatip, kreatifitas dan swadaya masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, melakukan pilihan-pilihan kegiatan ekonomi yang mempunyai dampak nilai tambah yang tinggi, daya saing yang kuat dan kesempatan pemasaran yang lebih luas serta mempunyai berbagai keunggulan komparatif lainnya dengan menggunakan teknologi yang tepat dan memanfaatkan kemampuan sumber daya alam dengan tetap memelihara kelestariannya dan keseimbangan lingkungan hidup yang dapat menciptakan alternatif lapangan kerja baru serta kesempatan usaha.

e. Terus berusaha meningkatkan kegairahan pembangunan disegala bidang yang menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang optimal serta meningkatkan perlindungan kesempatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

f. Mendorong perbaikan dan peningkatan penghasilan serta kesejahteraan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat terisolir, seperti petani, buruh tani, peternak, nelayan, transmigran, penduduk daerah perbatasan, suku terasing dan sebagainya. Mendorong peningkatan kemampuan serta kesempatan usaha pengusaha sektor golongan ekonomi lemah, termasuk sektor informal, tradisional dan pengrajin, agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi Nasional, dengan memperjuangkan agar Badan-badan usaha nasional dan lembaga-lembaga keuangan baik Bank dan non Bank dapat meningkatkan peranannya yang lebih besar membantu permodalan dan menunjang produksi serta pemasaran hasil-hasilnya.

g. Mendorong kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta berdasarkan semangat kekeluargaan sesuai dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.

Digitized by Google

h. Terus mendorong diupayakan memasyarakat koperasi melalui kegiatan-kegiatan motivasi dan penyuluhan agar koperasi membudaya, mengakar dikalangan rakyat dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

i. Mendorong upaya pencegahan praktek monopoli dan sejenisnya yang merugikan masyarakat dengan terus mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang benar-benar berasas kekeluargaan, mencerminkan usaha bersama untuk kesejahteraan rakyat, sebagai perwujudan dari Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

j. Berupaya menciptakan iklim yang mendorong peningkatan kegiatan yang saling keterkaitan dan saling mengisi dalam meningkatkan produksi dan jasa secara efektif dan efisien antara sektor di bidang ekonomi, mulai dari kegiatan yang paling hulu sampai dengan yang paling hilir, dalam rangka penciptaan keseimbangan struktur perekonomian nasional.

k. Meningkatkan terus usaha penyederhanaan peraturan yang menyangkut dunia usaha, termasuk perijinan, melalui deregulasi dan debirokratisasi, serta melanjutkan upaya untuk menjamin kepastian usaha, dalam rangka menggairahkan perekonomian masyarakat untuk menunjang perekonomian nasional.

l. Terus berusaha mendorong agar produksi dan penyediaan bahan kebutuhan pokok rakyat serta kebutuhan penting lainnya, mencukupi dan terus meningkat dan menjamin penyebarannya secara merata, tepat waktu, harga yang layak, dalam rangka mencapai swasembada pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

m. Mendorong usaha peningkatan penerimaan devisa negara melalui peningkatan jumlah arus wisatawan asing dan ekspor barang-barang non migas, dengan usaha penyediaan fasilitas pariwisata yang cukup dan memadai serta upaya promosi yang terarah dan tepat dan dengan cara memperluas diversifikasi barang-barang hasil-hasil industri, peningkatan mutu dan efisiensi, kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, ketepatan informasi pasar dan promosi serta upaya penggalangan dana, daya, dan kerjasama dalam rangka menerobos pasar luar negeri.

n. Memberikan perhatian khusus terhadap usaha peningkatan pembangunan daerah yang relatif tertinggal, daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat terpencil dalam rangka perwujudan hakekat pembangunan dan integrasi nasional. Untuk itu maka pola pembangunan wilayah secara terpadu dan pemekaran wilayah harus semakin ditingkatkan melalui kerjasama antar kota, antar kota dan daerah pedesaan, antar daerah dalam satu wilayah, dan antar wilayah sebagai bagian dari pada pembangunan nasional. Sejalan dengan itu terus diupayakan berbagai usaha pembangunan daerah pedesaan lebih meningkat dalam rangka menumbuhkan kegairahan dan ketahanan perekonomian masyarakat desa, serta meningkatkan keswadayaan dan kemandiriannya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan, sebagai basis Pembangunan Nasional.

o. Memperjuangkan agar setiap langkah dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan senantiasa mengindahkan pentingnya memelihara fungsi, mutu, keseimbangan dan kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup demi menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Turut menjaga supaya lingkungan hidup dipelihara dan dikelola sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kegairahan hidup bagi masyarakat banyak serta manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan bagi generasi masa depan.

p. Mengupayakan agar sumber alam maritim dimanfaatkan seoptimal mungkin baik isi kandungannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maupun dukungannya terhadap kegiatan pembangunan lainnya, terutama sebagai prasarana angkutan laut. Untuk itu perlu didorong agar penelitian dan perencanaan yang cermat dan tepat serta terpadu, diikuti dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab.

q. Mendorong pengembangan pola tata ruang masing-masing wilayah yang menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, hutan dan sumber alam lainnya dalam suatu tata lingkungan yang dinamis sehingga tercipta suatu pola yang terpadu yang dijadikan patokan dalam pengelolaan Pembangunan Nasional. Sejalan dengan itu dan untuk lebih optimalnya pemanfaatan tanah sebagai sumber alam dan faktor produksi maka perlu ditingkatkan pula usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah serta mencegah pemilikan tanah oleh perorangan secara berlebihan.

r. Ikut berupaya lebih meningkatkan keterpaduan dan peningkatan kordinasi pembangunan diperbagai sektor/bidang terutama pembangunan yang lintas sektoral seperti Perdagangan, Transmigrasi, Pembangunan Daerah, Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, dan sebagainya, dalam rangka serba keterkaitan, keserasian dan keseimbangan pembangunan dalam bidang yang saling mendukung dengan hasilguna yang lebih besar.

5. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya, adalah: a. Melanjutkan pembinaan suasana yang memungkinkan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamalkan sebaik-baiknya ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dalam membangun negara, bangsa dan masyarakat selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam kaitan ini terus dimantapkan kerukunan antara sesama umat beragama, antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar lebih memperkokoh solidaritas sosial serta lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan Bangsa, dalam rangka Wawasan Nusantara.

b. Mendorong agar pembangunan mental spiritual/kultural sebagai aspek yang mendorong dinamika pembangunan selalu berjalan serasi dan seimbang dengan pembangunan fisik material, dan upaya mencapai sasaran yang bersifat kualitatif selalu sepadan dengan pencapaian yang bersifat kuantitatif, untuk mewujudkan perikehidupan yang serba seimbang, serasi, selaras, sesuai dengan asas Pembangunan Nasional.

c. Berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya dalam segala aspek kehidupan sehingga selalu menjadi penunjang Pembangunan Nasional.

d. Memperjuangkan dan turut berperan aktif dalam upaya pengembangan kualitas manusia agar mampu menghadapi tantangan pembangunan dan permasalahan masa kini dan masa depan, antara lain dengan mendorong pendidikan dan latihan yang lebih relevan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan kemajuan jaman. Penerapan teknologi, haruslah dengan sangat memperhatikan tingkat ke-

Digitized by Google

majuan dan kemampuan rakyat, dan hal itu berkaitan dengan peningkatan semua perangkat kualitas manusia, termasuk kualitas diri pribadi antara lain pengetahuan, keterampilan dan budaya berpikir kritis, disiplin, terbuka serta bertanggung jawab, kesadaran berkarya dengan etos kerja produktif, kesadaran bermasyarakat, serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

e. Memperjuangkan dan beperan aktif dalam membangun masyarakat, dengan menciptakan suasana dan dinamika kemasyarakatan yang mampu mengatasi kendala perubahan sosial budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan tuntutan pembangunan, sehingga setiap manusia Indonesia menjadi sumber daya, modal dan penggerak pembangunan.

f. Mendorong tersusunnya sistem pendidikan nasional yang mampu membentuk manusia pengamal Pancasila yang berkualitas, yaitu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, memiliki etos kerja keras, tangguh, bertangung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani, berjiwa pengabdian, berprestasi produktif dalam rangka mewujudkan manusia pembangunan.

g. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan sarana pendidikan agar terjangkau oleh masyarakat, yang merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah.

h. Mendorong terus upaya agar tumbuh dan berkembang ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian serta tumbuhnya sikap mental yang menghargai dan memanfaatkan hasil-hasilnya sebagai faktor dan unsur yang sangat mendasar dalam menunjang pembangunan disegala bidang.

i. Mendorong kebijaksanaan pembangunan kebudayaan yang bersifat luas untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi kebudayaan nasional Indonesia, yang merupakan kerangka acuan pemikiran nasional, mampu mendukung pembangunan dan menumbuhkan budaya pembangunan disegala bidang, mendukung kekokohan persatuan dan kesatuan Bangsa serta kehidupan demokrasi.

j. Mengusahakan terciptanya iklim yang menunjang tumbuh dan berkembangnya kreativitas masyarakat, sebagai salah satu aspek penting dari pembangunan sosial budaya yang mendorong kepada kemungkinan adanya terobosan baru dari masyarakat, peningkatan kegiatan penciptaan dan penemuan disegala bidang.

k. Senantiasa berupaya untuk tumbuh dan berkembangnya suasana dan nilai-nilai sosial budaya yang positif dan produktif di kalangan masyarakat seperti tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, disiplin nasional, sikap mandiri, produktif, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, berwawasan masa depan, kerja keras, jujur, hemat, sederhana dan sebagainya. Sejalan dengan itu ditingkatkan pula upaya untuk mencegah dan mengurangi timbul dan berkembangnya, nilai-nilai dan tatanan sosial budaya yang tidak mendukung kepada pembangunan seperti mentalitas konsumtif yang berlebihan, apatisme, ketergantungan, sifat untung-untungan dan berbagai ekses negatif lainnya dari pembangunan.

l. Berperan serta meningkatkan usaha dalam rangka pengadaan berbagai kebutuhan sosial masyarakat, seperti sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat, Keluarga Berencana, perumahan rakyat, pelayanan sosial dan sarana pelayanan umum lainnya.

m. Berperan secara aktif menunjang kebijaksanaan dan program peningkatan peranan wanita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu terus diupayakan agar wanita semakin meningkat kualitasnya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan agar lebih berperan positif dalam fungsi dan peranannya membentuk dan mendidik Generasi Muda/tunas-tunas Bangsa.

n. Berperan secara aktif dalam usaha pengembangan potensi generasi muda sebagai subyek dalam segala bidang pembangunan, dengan memperhatikan aspek psikologis dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kesinambungan cita-cita perjuangan Bangsa. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan usaha, untuk memantapkan kesiapan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan generasi muda sebagai generasi penerus dalam memenuhi proses alih generasi dalam rangka kesinambungan Pembangunan Nasional dan menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

o. Meningkatkan usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memelihara susana kebersamaan dan solidaritas sosial dengan rakyat.

6. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang pertahanan keamanan, adalah: a. Mendukung upaya mewujudkan kekuatan Hankamnas, yang mampu menjaga keutuhan Nasional, terpeliharanya keamanan serta terjaminnya stabilitas Nasional yang mampu menampung dinamika perkembangan Bangsa.

b. Memperjuangkan perwujudan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tangguh secara fisik dan mental yang melaksanakan Dwi Fungsi ABRI, senantiasa manunggal dengan rakyat, serta berperan sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan Nasional yang dikembangkan untuk memperkokoh kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum.

c. Mendukung terciptanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu mengamankan negara terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri.

d. Berupaya menyadarkan rakyat untuk mutlak perlunya ditingkatkan kewaspadaan Nasional secara terus menerus, baik terhadap bahaya laten komunis maupun ekstrim lainnya yang merupakan ancaman terhadap Bangsa dan Negara. Peningkatan kewaspadaan Nasional. Dikalangan masyarakat, juga perlu dalam mengamati dan menangkal berbagai gejala baru sebagai akibat perubahan penampilan dari komunis internasional dan paham fundamentalis lainnya di luar negeri, yang secara tidak sadar akan dapat berpengaruh di dalam negeri.

e. Mendukung terlaksananya pembinaan wilayah pada umumnya dan pembinaan teritorial pada khususnya agar tercipta ketahanan nasional yang maksimal dan efektif melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan guna tercapainya Tujuan Nasional.

Sukses Pemilu 1992

1. GOLKAR berusaha memenangkan kembali Pemilu 1992 untuk: a. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Meningkatkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa sesuai dengan Wawasan Nusantara. c. Meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional secara bertahap dan terus-menerus dalam rangka usaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Re-

Digitized by Google

publik Indonesia. d. Meningkatkan dan memelihara Stabilitas Nasional yang dinamis serta makin memantapkan kepemimpinan Nasional di tangan Orde Baru sebagai syarat mutlak untuk berhasilnya Pembangunan Nasional untuk kepentingan rakyat banyak.

2. Dalam usaha memenangkan Pemilu 1992 perlu disusun perencanaan dan diambil langkah-langkah dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dan berbagai kenyataan yang ada seperti jumlah penduduk, jumlah dan komposisi pemilih dengan memberikan perhatian khusus kepada generasi muda, wanita, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu perlu pula dipertimbangkan faktor tuntutan masyarakat yang semakin berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan keadaan perekonomian Indonesia belum sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula masalah ketenagakerjaan belum dapat ditanggulangi sebagaimana mestinya.

3. Dalam rangka usaha memenangkan Pemilu 1992 yang akan datang, maka usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sedini mungkin, antara lain adalah: a. Membuat perkiraan keadaan sedini mungkin, sehingga dengan demikian dapat diketahui kemungkinan situasi yang akan berkembang dan dapat ditetapkan langkah-langkah yang diperlukan. b. Melaksanakan konsolidasi organisasi secara terarah dan terpadu terutama konsolidasi anggota dan kader agar mereka dapat melakukan tugas sebaik-baiknya. c. Melakukan penggalangan secara intensif, baik Penggalangan Teritorial, maupun Penggalangan Fungsional dan Penggalangan Umum. d. Menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat dan terus-menerus, sehingga rakyat merasa bahwa GOLKAR adalah wadah perjuangan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. e. Tetap memelihara dan meningkatkan kordinasi di kalangan Keluarga Besar GOLKAR.

4. GOLKAR berusaha menyukseskan Sidang Umum MPR 1993.

Penutup

1. Pelaksanaan Program Umum ini menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisasi, anggota, kader serta segenap keluarga besar GOLKAR baik di pusat maupun di daerah.

2. Dewan Pimpinan Pusat menetapkan penjabaran Program Umum ini dalam bentuk program pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang bersifat mengikat.

3. Keberhasilan dalam melaksanakan Program Umum ini tergantung pada partisipasi, sikap mental, ketaatan, semangat dan disiplin seluruh warga GOLKAR untuk berperan sesuai potensi, kemampuan dan tugas masing-masing, dalam suasana kerjasama dan kebersamaan yang berkualitas dan demokratis, dilandasi kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan perjuangan Bangsa.

4. Mengingat bahwa Repelita V merupakan jembatan yang akan membawa Bangsa ketahap proses lepas landas pada pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua, GOLKAR perlu mengadakan usaha menyusun pemikiran mengenai Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Rekomendasi

Komisi B - MUNAS IV GOLKAR yang berlangsung dari tanggal 20 s/d 25 Oktober 1988 di Balai Sidang Jakarta, yang membahas Rancangan Program Umum GOLKAR Periode 1988-1993, setelah mendengarkan pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat Paripurna MUNAS, Pleno Komisi, dan diskusi dan Team Perumus yang dibentuk oleh Komisi B, selain telah menyepakati Program Umum GOLKAR 1988/1993 juga memutuskan adanya *Rekomendasi* pada DPP GOLKAR periode 1988-1993, tentang hal-hal sebagai berikut: 1. Pengertian **Kemandirian GOLKAR.** 2. Tentang **Monopoli** yang merugikan masyarakat. 3. Tentang **Kaderisasi** khususnya berkenaan dengan peningkatan mutu kader. 4. Tentang **Pembangunan Daerah**, yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan pemekaran wilayah.

Kemandirian Golkar

1. Disarankan kepada DPP GOLKAR 1988/1993 untuk merumuskan

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH MENGUCAPKAN :

"DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXIV TANGGAL 20 - OKTOBER 1988"

dan

"SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA KE IV"

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN
DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

K e t u a, — **Sekretaris,**

T A R U N A , SH.
NPAG : 12010000007.

Ir. SOEHARSOJO.
NPAG : 12010010666

Digitized by Google

dan menetapkan pengertian dari kemandirian GOLKAR.

2. Dalam merumuskan dan menetapkan Pengertian Kemandirian GOLKAR tersebut, agar mempertimbangkan segala aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk aspek sejarah kelahiran GOLKAR, perkembangan, dan hasil-hasil yang dicapai GOLKAR selama ini, proses pendewasaan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik, serta tantangan masa depan yang dihadapi.

3. Agar pengertian kemandirian GOLKAR tersebut segera disampaikan pada DPD-I dan DPD-II GOLKAR seluruh Indonesia, dan dimasyarakatkan di kalangan Warga dan keluarga Besar GOLKAR.

Monopoli

1. Meminta dan memberi wewenang kepada DPP GOLKAR Periode 1988/1993 untuk mempersiapkan konsepsi dan program khusus, berkenaan dengan pencegahan adanya praktek monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Konsepsi dan program tersebut untuk diperjuangkan kepada Pemerintah, agar adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan dalam menata Perekonomian Nasional dalam rangka Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

3. Agar DPP GOLKAR 1988 - 1993 mempersiapkan langkah-langkah lanjutan sebagai akibat kebijaksanaan Pemerintah tersebut, dalam rangka lebih meningkatkan peranserta warga GOLKAR dalam Pembangunan Nasional.

Kaderisasi

1. Meminta kepada DPP GOLKAR 1988-1993 agar dapat meneruskan dan meningkatkan usaha Kaderisasi baik jumlah, jangkauan maupun jenis dan mutu Kader.

2. Dalam rangka peningkatan mutu Kader agar memperhatikan faktor tingkatan/dan jenjang pengkaderan, materi (kurikulum) pendidikan Kader, lokasi keberadaan Kader dan jenis serta bidang profesi dan fungsi Kader di tengah-tengah masyarakat.

3. Peningkatan mutu Kader agar lebih diarahkan kepada: a. Membentuk Kader Organisasi sebagai calon-calon pemimpin organisasi baik di dalam GOLKAR, dilingkungan organisasi kemasyarakatan maupun dilingkungan eksekutif dan legislatif.

b. Membentuk dan meningkatkan mutu Kader Fungsional dan Profesional para Kader GOLKAR di bidang usaha dan lingkungan kerjanya masing-masing.

Pembangunan Daerah

1. Menyarankan kepada DPP GOLKAR 1988-1993 agar mempersiapkan konsepsi, program, dan usul/saran kepada Pemerintah untuk lebih meningkatkan upaya pembangunan Daerah dan pemerataan wilayah, termasuk dalam hal ini pemekaran wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan ke segenap Wilayah Tanah Air.

2. Dalam rangka pemerataan pembangunan agar DPP GOLKAR 1988-1993 memberikan perhatian khusus kepada peningkatan pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur dan di daerah-daerah perbatasan.

3. Dalam rangka pemekaran wilayah DPP GOLKAR 1988-1993 perlu memberikan perhatian lebih serius kepada adanya kenyataan dan kebutuhan beberapa daerah untuk memekarkan wilayahnya agar dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan Nasional di daerah yang bersangkutan.□

Dirgahayu Golongan Karya Ke XXIV
20 Oktober 1988

d a n

Sukseskan Musyawarah Nasional Golongan Karya Ke IV

Semoga tercapai cita-cita dan Perjuangan Golkar Demi Pembangunan Nasional di bawah Pemerintahan Orde Baru.

Pengurus KORPRI Unit Bank Indonesia

Sekretariat: Jln. Kebon Sirih no. 78 Tlp. 374108 Pes. 340

JAKARTA.

Digitized by Google

Beramal Melalui Bhakti Sosial

Sudah merupakan tradisi bagi GOLKAR setiap tahun, pada bulan kelahirannya, Oktober, diadakan serangkaian kegiatan bhakti sosial. Memperingati HUT ke-24 GOLKAR tahun ini, yang bertepatan dengan Munas IV GOLKAR, kegiatan bhakti sosial dilakukan secara intensif, koordinatif dan lebih semarak. Tidak kurang dari 50 kegiatan dilaksanakan. Yakni bhakti sosial operasi mata buta katarak, lomba karya tulis, penyuluhan demam berdarah, pengobatan cuma-cuma, peresmian BAKEMAS di beberapa kecamatan, penataran bagi para penjual jamu gendong, pameran kerajinan, pasar murah, malam hiburan kesenian artis safari GOLKAR, ceramah pembinaan masa depan anak, lomba kebersihan sekolah, pertandingan sepakbola, bola voli, santunan sosial kepada nelayan, pelayanan air bersih, pertandingan tenis lapangan, pemeriksaan jantung, ceramah kesehatan wanita, pameran seni kaligrafi, sarasehan remaja/pelajar, khitanan massal, lomba mini maraton massal, sarasehan umum, lomba lukis, donor darah, lomba paduan suara, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, pagelaran wayang kulit semalam suntuk dan lain-lain.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut ialah, untuk lebih meningkatkan dan memantapkan konsolidasi organisasi, meningkatkan semangat juang dan pengabdian GOLKAR dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Mempertebal "rasa memiliki" di kalangan anggota dan simpatisan GOLKAR terhadap Golongan Karya sebagai modal dasar dan potensi efektif bangsa, yang selama ini telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang produktif di dalam pembangunan nasional. Meningkatkan kesiapan seluruh jajaran GOLKAR dan meningkatkan mekanisme organisasi, dalam menghadapi tantangan dan tugas-tugas nasional. Dan untuk lebih menunjukan keberadaan dan peranan GOLKAR di tengah-tengah bangsa yang sedang membangun. Lebih dari itu sasaran jangka panjang bhakti sosial tersebut merupakan pendekatan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan program GOLKAR untuk meraih kemenangan pemilu 1992 yang akan datang.

Air bersih buat masyarakat Cilincing

Operasi Buta Katarak

Kegiatan bhakti sosial operasi mata buta katarak secara gratis dalam

Sarwono Kusumaatmadja, periksakan jantung dalam acara HUT Golkar

Digitized by Google

Pasar murah di DPP Golkar

rangka HUT GOLKAR kali ini merupakan yang pertama kali diadakan. Kegiatan ini mendatangkan kebahagiaan yang tak ternilai bagi sekitar 15 orang penderita. Pelaksanaan operasi tersebut berlangsung di dalam mobil unit operasi katarak di halaman RS Karya Bhakti, Bogor, pada hari Sabtu, 1 Oktober 1988.

Para penderita buta katarak tersebut dioperasi oleh beberapa dokter spesialis mata anggota Perdamai (Perhimpunan Dokter Ahli Mata Indonesia), Jakarta, yang dipimpin oleh dr Istiantoro.

Dalam kesempatan itu dr Istiantoro menjelaskan bahwa penduduk Indonesia yang mengidap penyakit mata sesuai penelitian Departemen Kesehatan tahun 1983, sekitar 1,2 persen dari penduduk Indonesia. Sekitar 0,6 persen dari penderita penyakit mata itu adalah penderita penyakit katarak. Penyakit tersebut timbul akibat kekurangan vitamin A.

Menurutnya, penderita penyakit katarak di Indonesia pada umumnya dari kaum tidak mampu, yang tersebar di berbagai pelosok. Para penderita itu sendiri terbesar adalah warga berusia di atas 40 tahun. Pada umumnya penderita penyakit katarak di desa pelosok tidak mau mengobati penyakitnya tersebut, karena tidak mampu dan kurangnya pengetahuan. Padahal kalau dibiarkan penyakitnya itu makin lama makin menjadi parah.

Sebab itu, Dr Istiantoro menghimbau agar penderita penyakit katarak lekas-lekas berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit. Penyakit itu mudah disembuhkan dengan operasi.

Anak-anak ikut memeriahkan HUT Golkar

Digitized by Google

Sedangkan pengoperasian mata tersebut tidak menimbulkan rasa sakit, karena tidak dilakukan pembedahan di bagian mata, melainkan hanya mengelupas selaput luar mata saja. Dalam tempo 90 menit operasi sudah bisa rampung. Setelah operasi dan istirahat beberapa jam saja penglihatan yang bersangkutan normal kembali, ujarnya.

Dikatakan bahwa biaya pengobatan penyakit katarak di rumah sakit bisa mencapai Rp.650.000,- lebih.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Golkar AE Manihuruk, Sekjen (mantan) Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Bidang Bhakti Sosial DPP Golkar Ir Tati Sumiarno, yang sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan unit rawat darurat tahap IV Rumah Sakit Karya Bhakti.

Penjual jamu gendong diberi penataran

Pengobatan Gratis

Kegiatan pengobatan cuma-cuma ini sudah merupakan salah satu acara rutin bagi GOLKAR setiap tahun dalam menyongsong hari kelahiran 20 Oktober. Pengobatan cuma cuma ini dilakukan di berbagai kelurahan di wilayah Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara dan Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini juga diresmikan beberapa Balai Kesehatan Rakyat (BKR) antara lain di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, BKR di Kelurahan Kebon Jeruk, BKR Kelurahan Susukan Jakarta Timur, BKR Kelurahan Pademangan Jakarta Utara, dan BKR Kelurahan Kebon Baru Jakarta Selatan.

Ny. Busyiri yang mewakili DPP GOLKAR dalam meresmikan Balai Kesehatan Rakyat di Kelurahan Duri Kosambi Jakarta Barat, mengharapkan agar BKR tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga setempat dalam usaha memelihara kesehatan demi peningkatan taraf hidup mereka. Kegiatan ini diharapkan pula dapat makin membudayakan klinik swadaya masyarakat.

Ceramah tentang pembinaan masa depan anak mendapat perhatian penuh oleh sebagian besar ibu-ibu yang memenuhi Aula Kantor DPP GOLKAR. Penceramahnya adalah Menteri P dan K Prof Dr Fuad Hasan, Drs Fauzia Aswin dari Fakultas Psikologi UI, dan Let Kol Dr Tubagus Erwin.

Prof Dr Fuad Hasan menyatakan, keluarga adalah istitusi pembentukan dasar-dasar pertama watak dan kepribadian anak.

Oleh karena itu menurut Fuad, fungsi kebersamaan dalam keluarga tidak pernah dapat diambil alih sepenuhnya oleh wujud-wujud kebersamaan lainnya. Bagi anak tiada lingkungan seaman atau senyaman keluarga. Akan tetapi keluarga tidak tertutup dan kedap pengaruh lingkungan yang lebih luas lagi yaitu masyarakat. Sedangkan dalam masyarakat luas juga tampil tuntutan-tuntutan normatif dan konformistik.

Khitanan & Jamu Gendong

Bertempat di Lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Kramat Tunggak, Jakarta Utara Dr Mismadi, salah satu dari 20 dokter yang memberikan pengobatan cuma-cuma di lokasi itu, memberikan penyuluhan kesehatan di hadapan sekitar 500 orang WTS mengenai seluk-beluk penyakit kelamin dan cara mengatasinya. Dalam ceramahnya dr Mismadi memperlihatkan slide berbagai penyakit kelamin, seperti, keputihan dan raja singa, (siphilis) yang banyak diderita orang-orang yang sering berganti-ganti "pacar". Oleh karena itu ia menyarankan agar mereka selalu memeriksakan kesehatannya ke dokter.

Sebelum ceramah dimulai Ketua DPP GOLKAR Oetoyo Oesman SH, menyerahkan 2 buah mesin jahit, peralatan sulaman dan 200 helai mukena.

Pada kesempatan lain di Aula DPP Golkar Slipi, Jakarta diselenggarakan Khitanan massal yang diikuti sekitar 250 anak dari berbagai wilayah di DKI, yang melibatkan sekitar 90 dokter. Bersamaan dengan itu juga dilak-

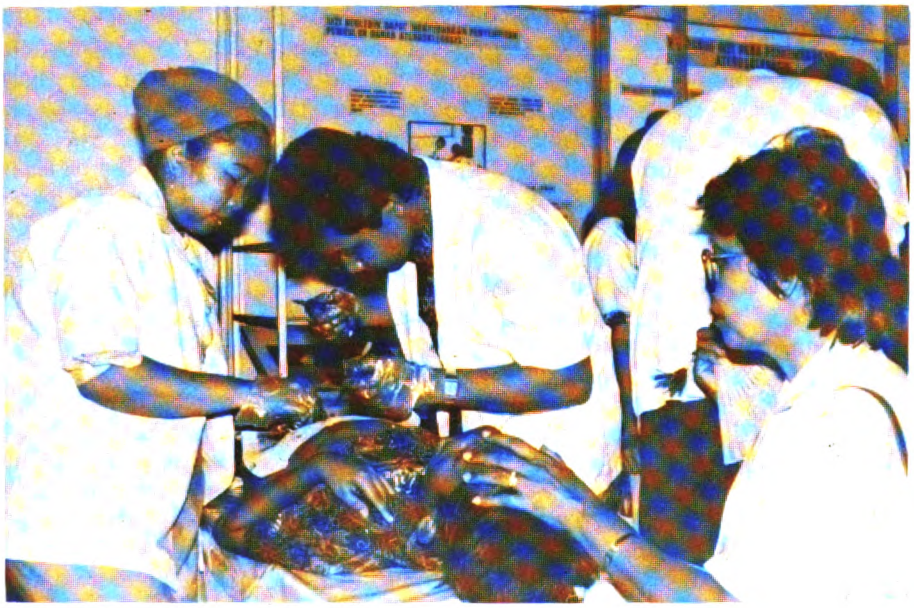

Sunatan massal

Digitized by Google

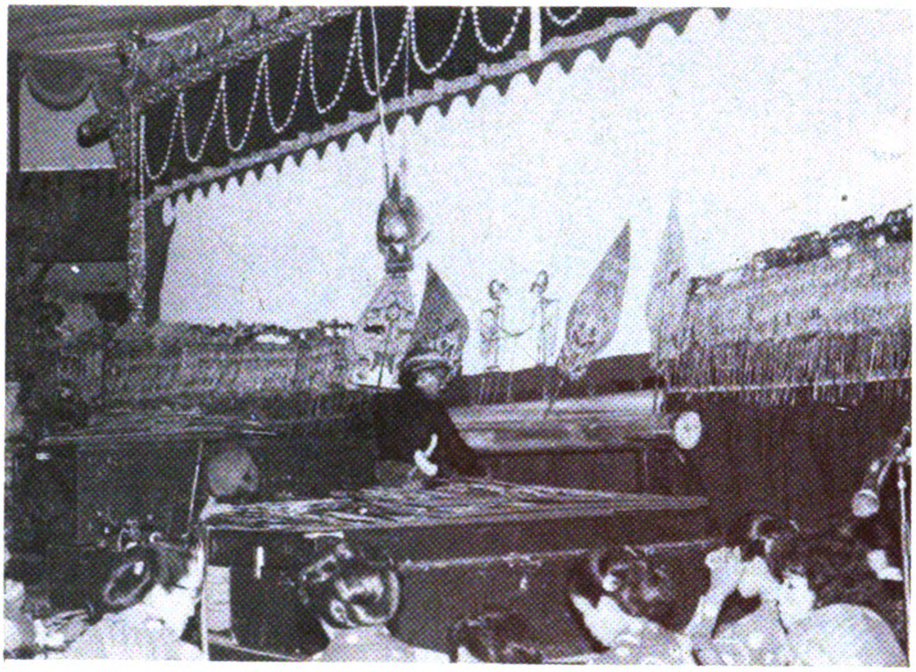

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk

sanakan khitanan massal sebanyak 100 anak di halaman kantor BAKN.

Di gedung DPP Golkar di hari yang sama juga diselenggarakan penataran kepada 125 penjual jamu gendong dari berbagai wilayah DKI Jakarta. Penataran ini diselenggarakan Yayasan Karya Bhakti GOLKAR bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional pimpinan Ny Mooryati Soedibyo.

Hiburan Massal

Puluhan artis tenar ibukota yang tergabung dalam Artis Safari terjun di lima wilayah DKI Jakarta menghibur masyarakat secara cuma-cuma. Acara yang satu ini paling banyak memperoleh sambutan dari warga masyarakat Ibukota, terutama bagi mereka yang berjiwa muda. Acara yang diselenggarakan di Jakarta Timur dan Jakarta Barat misalnya yang masing-masing mengambil tempat di lapangan parkir Pacuan Kuda Pulo Mas dan di Terminal Bus Kalideres nyaris tak mampu menampung pengunjung yang ingin melihat secara langsung para artis kesayangannya, seperti Jamal Mirdad, Herlina Effendi, Richie Ricardo, Muksin Alatas, Dian Pisesa, Lidia Natalia, Nola Tilaar, Betharia Sonata dll, serta lawak kwartet Tomtam, D'Bodor dan Jayakarta Group.

Turut menghibur masyarakat pada kesempatan itu juga Ketua DPD GOLKAR Tk I DKI Basofi Sudirman yang mengalunkan lagu "Aku tak ingin sendiri dan turut bergoyang di atas panggung bersama Artis Helen Saparingga dan para pengurus GOLKAR DKI lainnya. Dan sebagai puncak malam hiburan masyarakat adalah di Balai Sidang, bersamaan dengan resepsi HUT ke-24 GOLKAR dengan menampilkan 130 artis yang dihadiri pula oleh Presiden. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Viyogo Admodarminto tampil di Pantai Pasir Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara, bukan menyanyi, tapi membawa air sejuk buat masyarakat Kec Cilincing dan sekitarnya, yaitu dengan meresmikan penggunaan Proyek Air Minum (PAM) dan memberikan santunan bagi warga nelayan di sana.

Olah Raga & Jantung Sehat

Dalam rangka HUT GOLKAR ke-24 juga dilakukan kegiatan olahraga seperti lari marathon mini massal dan lomba gerak jalan yang diikuti oleh berbagai kelompok umur. Lomba berawal dari lapangan Monas dan berakhir di Stadion Utama Senayan.

Kegiatan olahraga yang lain yang banyak menarik minat penonton adalah Sepak Bola, yang diikuti sebanyak 8 kesebelasan di antaranya kesebelasan paguyuban lawak.

Pertandingan sepak bola HUT GOLKAR itu memperebutkan piala-piala Ketua Harian Dewan Pembina Golkar M Panggabean, untuk juara I, juara ke II memperebutkan piala Ketua Umum DPP GOLKAR Sudharmono, juara III memperebutkan piala Ketua Umum KONI Pusat Surono, sedangkan pemain yang dikategorikan pemain simpatik memperoleh piala dari Menpen Harmoko. Tidak kalah menarik adalah olahraga tenis lapangan yang diikuti perorangan dari kalangan pejabat-pejabat yang mengambil tempat di lapangan Tenis Hotel Hilton. Menarik karena pasangan Wahono dan Rachmat Witoelar keluar sebagai juaranya. Dan pasangan inilah yang akhirnya terpilih dalam Munas GOLKAR sebagai Ketua Umum dan Sekjen.

Wayang Kulit

Sebagai penutup dari rangkaian bhakti sosial dalam rangka memperingati HUT GOLKAR dan Syukuran atas suksesnya MUNAS IV GOLKAR tahun ini adalah, pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk, dengan mengambil cerita "Gatutkoco Winisudo" yang diselenggarakan tepat pada akhir bulan Oktober, bertempat di halaman markas besar DPP GOLKAR, Slipi, Jakarta.

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang tenar dewasa ini, Ki Mantep Sudarsono, yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan Ketua Umum DPP GOLKAR periode 1988-1993 tersebut didahului dengan penyerahan anak wayang Gatutkoco dari WapresSudharmonokepada dalang Ki Mantep Sudarsono. Dan dalam kesempatan tersebut Ki Dalang menyerahkan kenang-kenangan anak wayang Bima kepada Wahono dan wayang Gatutkoco kepada Wapres Sudharmono.

Pentas wayang kulit itu mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat ibukota, (sekitar 5000 orang) yang memadati halaman kantor DPP.

Cerita yang dipaparkan dalam lakon Gatutkoco Winisudo tersebut dimulai dengan rebutan senjata Kuntojoyondanu antara Arjuno dengan Basukarno untuk memotong pusar Gatutkoco yang baru lahir. Bayi Gatutkoco setelah dapat dipotong pusarnya dibawa ke Kahyangan, untuk mengatasi kemelut yang terjadi di sana. Sebelum mengemban tugas suci menghalau raja angkara murka Kolopracono dan Patih Sekipu, bayi Gatutkoco terlebih dahulu digembleng di Kawah Candradimuka dan akhirnya menjadi sakti mandraguna. Di dalam mengemban tugas sucinya itu Gatutkoco dapat mengatasi kemelut yang terjadi di Kahyangan dengan membunuh Kalapracono dan Sekipu. Dan untuk melanjutkan tugas sucinya itu Gatutkoco diwisuda (diangkat/dinobatkan) menjadi raja (ratu) di Pringgondani. □ wt

Digitized by Google

Oleh Prof Soehardjo Ss SH

JANGKAUAN GUGATAN GANTI RUGI, DALAM PROSES PERADILAN PERDATA

Tulisan ini berkeinginan menanggapi beberapa kasus gugatan ganti rugi dalam proses peradilan perdata. Sengaja dipilih istilah "menanggapi", karena untuk dapat membahas dan meneliti kasus-kasus yang bersangkutan secara mendalam, datanya tidak tersedia. Tanggapan hanya dilakukan terhadap kasus yang dapat diperoleh dari bahan pemberitaan yang ditemukan baik dalam beberapa harian maupun majalah. Cara ini sengaja ditempuh karena yang dimaksud dengan tulisan ini semata-mata menyajikan jalan pikiran untuk merangsang diskusi lebih lanjut, yang pasti akan tetap ada manfaatnya.

Yang diulas hanya tiga kasus, ialah: (1) Kasus gugatan ganti rugi oleh kuasa pengacara terkenal Adnan Buyung Nasution terhadap Menteri Kehakiman yang telah mengeluarkan putusan larangan praktek bagi pengacara itu dalam batas waktu tertentu bagi yang bersangkutan. (2) Kasus gugatan ganti rugi yang diajukan oleh seorang pengacara kepada perusahaan rokok kretek Bentoel dan atau Pemerintah, dengan dalih bahwa rokok yang dihasilkan perusahaan tersebut merugikan kesehatan masyarakat. (3) Kasus gugatan ganti rugi oleh seorang tokoh anggota Partai Politik di Indonesia, karena dikeluarkan dari Partai tersebut, dan gugat balik tergugat terhadap penggugat.

Karena dalam ketiga kasus di atas gugatan ganti rugi diajukan kepada hakim perdata, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, boleh diambil kesimpulan, bahwa gugatan itu menyangkut kepentingan dalam hubungan hukum perdata, ialah masuk perkara perdata yang diliputi oleh norma-norma hukum perdata, yang masuk kompetensi hakim perdata. Apakah memang demikian duduk permasalahannya, marilah kita lihat kasus-kasus di atas satu demi satu.

Kriteria Perkara Perdata

Kita dapat membaca dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 50, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi yang disebut dalam pasal 51 diberi tugas dan wewenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Apa yang dimaksud dengan perkara perdata, undang-undangnya sendiri tidak memberikan penjelasan, mungkin karena dianggap cukup jelas. Terpaksalah kita melacak dari sejarah peraturan perundang-undangan dan penafsirannya. Sebagai titik awal dapat kita temukan pasal 2 R.O. (Rechterlijke Organisatie), yaitu undang-undang tentang organisasi kekuasaan kehakiman pada zaman Hindia Belanda. Bunyinya adalah: *"De kenisneming en beslissing van alle geschillen over eigendom op daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorderingen op burgerlijke rechten... zijn bij uitsluiting opgedragen aan de rechterlijke macht"*. Dalam bahasa Indonesia kira-kira, "perihal mengadili dan memutuskan segala sengketa tentang hak milik dan hak-hak lain yang timbul karena itu, tentang utang-piutang atau hak-hak perdata... semata-mata ditugaskan kepada kekuasaan pengadilan".

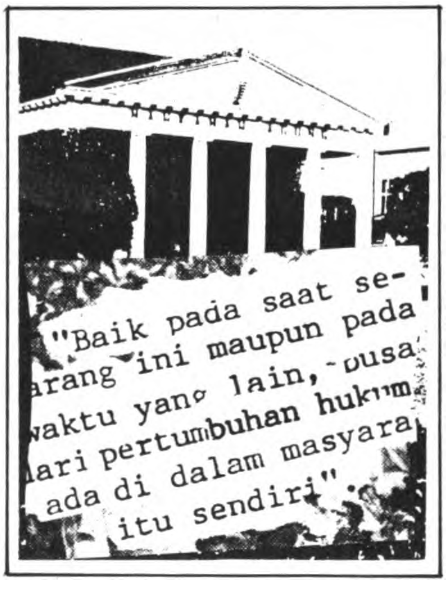

Di dalam praktek penerapan pasal 2 R.O. ini ditafsirkan secara luas, tidak hanya diperlukan adanya dasar perselisihan (fundamentum petendi), tetapi cukup apabila penggugat di dalam gugatannya minta pada pengadilan supaya dilindungi hak-haknya. Jadi dalam formulasi surat gugatan cukup dicantumkan pokok perselisihan saja (objectum litis). Dalam gugatan ganti rugi sering digunakan pasal yang sangat terkenal, ialah pasal 1365 KUHperdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka diwajibkan kepada siapa yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk memberikan ganti rugi.

Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dalam sejarah peradilan, hakim menafsirkan secara luas, ialah perbuatan yang melanggar norma hukum tertulis dan tidak tertulis. Pelanggaran terhadap norma hukum yang tertulis ialah yang berupa: pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang, dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku sendiri.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang tidak tertulis, ialah perbuatan yang bertentangan dengan kecermatan (zorgvuldigheid) yang selayaknya dilakukan dalam hubungan hidup

Digitized by Google

kemasyarakatan terhadap orang, atau benda orang lain dan juga yang bertentangan dengan sopan santun. Jelas bahwa ketentuan ini merupakan norma hukum perdata.

Tetapi dalam sejarah peradilan, oleh hakim perdata, ketentuan ini diberikan makna jangkauan yang sangat luas, tidak hanya dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hubungan hukum perdata, melainkan juga dapat dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Jadi menerobos lingkungan hukum publik.

Tuntutan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUH-Perdata dapat dikabulkan, apabila dipenuhi syarat-syarat: (a) Hakim perdata berwenang mengadili gugatan yang bersangkutan; (b) Perbuatan yang digugat itu bersifat melawan hukum; (c) Kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan tergugat, atau setidak-tidaknya risiko perbuatan tersebut harus dapat dibebankan kepada tergugat. (d) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan orang yang bersalah dengan kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut. (e) Harus nyata-nyata ada kerugian yang diderita.

Dalam hal ada persangkaan yang cukup kuat bahwa telah dilakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan ganti rugi.

Buyung vs Menkeh

Kasus ini sangat menarik dan melibatkan tokoh-tokoh pengacara yang mempunyai reputasi nasional. Menteri Kehakiman digugat karena telah mengeluarkan surat keputusan melarang Adnan Buyung Nasution untuk menjalankan praktek sebagai pengacara dalam batas waktu tertentu. Gugatan tersebut adalah gugatan ex Pasal 1365 KUH-Perdata. Menteri Kehakiman dengan keputusannya itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada dasar kewenangan untuk mengeluarkan keputusan itu. Dan perbuatan itu jelas merugikan pihak yang terkena, ialah penggugat.

Gugatan ganti rugi itu diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan ini tepat. Apakah perbuatan Menteri Kehakiman tersebut merupakan perbuatan perdata dan tunduk pada norma hukum perdata? Jelas tidak. Keputusan Menteri tersebut bergerak dalam ruang lingkup kewenangannya sebagai pejabat, jadi masuk Hukum Administrasi Negara. Tetapi dengan penafsiran yang luas oleh hakim mengenai gugatan ganti rugi ex Pasal 1365 KUH-Perdata, tindakan Menteri tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Pengadilan telah memberikan putusan tidak mengabulkan gugatan ini, karena berpendapat bahwa keputusan Menteri Kehakiman itu adalah sah menurut hukum dan telah diambil di dalam batas kewenangannya. Jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Apakah penggugat tidak mengerti, bahwa Menteri Kehakiman dalam kasus ini ada kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang bersangkutan? Hal inilah yang menyebabkan perkara itu menjadi menarik.

Dalam ulasan ini akan dicoba merekonstruksi permasalahannya. Menteri Kehakiman mendasarkan keputusannya itu pada Pasal 36 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris". Penjelasan pasal tersebut mengatakan, bahwa pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris adalah tanggung jawab pemerintah. Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para penasihat hukum dan notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian penasihat hukum dan notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing. Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang penasihat hukum atau seorang notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, organisasi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.

Dengan demikian dasar hukum keputusan Menteri Kehakiman itu sudah ada. Mungkin yang menjadi masalah ialah apakah ketentuan dalam pasal ini memerlukan peraturan pelaksanaan atau tidak. Peraturan pelaksanaan atas pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sekiranya belum ada. Apakah memang diharuskan? Pasal 36 di atas tidak mengharuskan hal ini. Bagaimanapun dalam kasus ini, hakim telah menjatuhkan keputusannya, gugatan tidak dikabulkan. Apakah ada usaha penggugat untuk mengajukan banding dan kasasi, tidak ada pemberitaan tentang hal ini.

Tetapi bagaimanapun, ini merupakan kasus yang sangat baik untuk mendapat kepastian hukum, yang akan bermanfaat tidak saja bagi masyarakat tetapi juga untuk pemerintah sendiri.

Gugatan ganti rugi yang lain, diajukan oleh seorang pengacara, Tambunan SH yang mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa rakyat/ masyarakat terhadap pengusaha rokok Bentoel dan atau Pemerintah. Konstruksi yang mungkin dalam gugatan tersebut adalah bahwa pengusaha rokok tersebut melakukan perbuatan

Menyelenggarakan tugas-tugas yang menyangkut peradilan.

Digitized by Google

melawan hukum, demikian Pemerintah yang telah memberikan izin kepada perusahaan tersebut juga melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan pengusaha rokok dengan menghasilkan rokok kretek dan dikonsumsi oleh masyarakat, menimbulkan kerugian terhadap kesehatan rakyat, dan dengan demikian harus membayar ganti rugi.

Gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada konstruksi tersebut merupakan gugatan yang mengada-ada dan di luar jangkauan pasal 1365 KUH-Perdata. Memang terhadap usaha untuk memproduksi rokok ada dilema yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Di satu fihak menghisap rokok jelas merugikan kesehatan seseorang, tetapi banyak juga orang yang tidak bisa meninggalkan rokok. Di lain fihak menutup pabrik rokok akan mengakibatkan sekian banyak karyawan pabrik harus diputus hubungan kerjakan. Di samping itu pemerintah akan kehilangan pendapatan dari cukai rokok dan tembakau yang tidak sedikit jumlahnya. Di luar ini banyak pengusaha rokok telah menyumbangkan dana untuk keperluan olah raga dan sosial lainnya, walaupun segala itu dilakukan demi promosi perusahaannya.

Kampanye anti merokok adalah baik, tetapi hendaknya jangan dilakukan dengan cara memperkosa hukum, a.l. dengan mengajukan gugatan ganti rugi tersebut diatas, walaupun pengacara yang bersangkutan menjanjikan, bahwa bilamana usahanya berhasil akan disumbangkan seluruhnya pada masyarakat.

Hakim dalam kasus ini sudah menjatuhkan putusannya, dan sebagaimana telah diduga, gugatan tersebut tidak dikabulkan alias ditolak. Apakah pengacara yang bersangkutan sebagai penggugat tidak memperhitungkan hal ini? Hampir pasti, bahwa ia sebagai ahli hukum sudah mengetahui dan memperhitungkan bahwa gugatannya tidak akan berhasil. Lalu apakah kiranya yang dijadikan motif perbuatannya? Mungkin ingin tampil sebagai pembela kepentingan masyarakat atau juga demi popularitas. Kalau hal ini yang dijadikan motif gugatannya, boleh dikatakan ia telah berhasil, karena kasus ini dapat pemberitaan yang cukup luas oleh media massa.

Saling Gugat di PDI

Kasus ini merupakan kasus yang sangat menarik dan akan memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan praktek litigasi pada khususnya. Seorang tokoh partai telah menggugat dan menuntut ganti rugi terhadap Ketua Umum partai atas dasar bahwa ia dikeluarkan dari Partai, hal mana merugikan nama baiknya. Jadi konstruksi dalam gugatan ini adalah dengan mempergunakan Pasal 1365 KUH-Perdata. Suatu pertanyaan yang cukup mendasar adalah: dapatkah dalam kasus ini gugatan ganti rugi ex Pasal 1365 KUH-Perdata digunakan?

Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat bukanlah hubungan hukum perdata. Hubungan ini menyangkut hubungan intern organisasi kekuatan sosial politik. Ini menyangkut hubungan antar warga negara dalam melaksanakan hak-hak politiknya. Untuk mengatur masalah ini sudah diadakan Undang-Undang tersendiri, ialah Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Hubungan antar anggota, antara anggota dan pengurus dan antar pengurus di dalam Partai Politik dan Golongan Karya dalam menjalankan hak-hak politiknya, baik yang bersifat formal yaitu masalah keanggotaan dan kepengurusan organisasi maupun yang bersifat material, yaitu kegiatan politik menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban organisasi, adalah hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum konstitusi negara.

Apakah kedudukan Ketua atau pengurus di dalam organisasi sosial politik dapat disamakan dengan penguasa, sehingga perbuatannya yang melanggar kecermatan dalam kehidupan organisasi, dapat digolongkan sebagai "onrechtmatige overheidsdaad"? Rasanya sulit untuk dapat diterima hal itu. Apakah kriteria tentang perbuatan melawan hukum sebagai yang dimaknakan dari Pasal 1365 KUH-Perdata dapat diterapkan pada mekanisme kegiatan Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan tugasnya pembinaan organisasi dapat digugat oleh anggota sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini merupakan konstruksi hukum yang aneh dan memang baru sekarang ini kita jumpai.

Partai Politik dan Golongan Karya merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikianlah bunyi Penjelasan Undang-Undangnya. Pelaksanaan asas demokrasi tersebut dilakukan melalui kegiatan organisasi baik yang ditujukan terhadap intern organisasi, ialah pembenahan konsolidasi organisasi, maupun tindakan organisasi ke luar dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya. Lalu siapakah yang akan menilai apakah perbuatan pengurus organisasi menyimpang atau tidak dari ketentuan Undang-Undang atau garis kebijaksanaan organisasi?

Hal ini dipulangkan pada para anggota organisasi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang menyatakan bahwa kedaulatannya berada di tangan anggota. Pada asasnya, pemerintah sendiri tidak mencampuri urusan organisasi, hanya dalam ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4, pasal 7 huruf a, dan pasal 12, Pemerintah, dalam hal ini Presiden/ Mandataris MPR mempunyai wewenang pengawasan terhadap Partai Politik dan Golongan Karya dan sebagai tindakan akhir dapat membekukan pengurus tingkat pusat organisasi yang bersangkutan.

Jadi kegiatan Partai Politik dan Golongan Karya tidak masuk dalam ruang lingkup kehidupan kemasyarakatan, tetapi ruang lingkup kehidupan kenegaraan, sehingga pasal 1365 KUH-Perdata walaupun diberikan makna seluas apapun tidak akan dapat menjangkau perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan Partai Politik dan Golongan Karya.

Dengan menyajikan expose konstruksi berpikir menanggapi kasus-kasus tersebut di atas, maka diharapkan pada masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung dalam pengembangan ilmumaupunyang bergerak dalam praktek hukum, akan tergugah perhatiannya. Dirasakan di sana-sini masih ada kerancuan pikir tentang hubungan antar bidang hukum. Pasal 1365 KUH-Perdata merupakan pasal yang sangat mudah untuk digunakan mengajukan gugatan ganti rugi pada hakim perdata. Jumlah ganti rugi yang dituntut seringkali tidak tanggung-tanggung. Tetapi biarlah hal ini kita biarkan berjalan seperti keadaannya yang sekarang ini. □

Digitized by Google

Drs. Cosmas Batubara

Pemanfaatan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Peningkatan Ekspor

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional, termasuk prasyarat keberhasilan peningkatan ekspor. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai negara maju dan negara tetangga seperti Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut, kini telah berkembang menjadi negara industri baru di Asia, bukan karena kekayaan alamnya, tetapi karena mutu tenaga kerjanya. Bila sumber daya manusia atau tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar seperti saat ini dapat ditingkatkan mutu dan pendayagunaannya, maka Indonesia dapat menjadi negara pengekspor yang berhasil dan dalam waktu yang relatif singkat perekonomian Indonesia akan dapat bertumbuh secara mantap dan memberikan tingkat pendapatan nasional yang relatif tinggi.

Dengan kemajuan teknologi produksi dan komunikasi sekarang ini, maka upah murah di suatu negara bukan lagi unggulan komperatif. Unggulan komperatif suatu negara sudah beralih kepada kualitas tenaga kerja, yaitu kemampuan menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Sebab itu tantangan utama yang kita hadapi sekarang ini dan untuk masa yang akan datang adalah bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga pelaksana pembangunan yang berkualitas, bukan saja yang mampu dan terampil melakukan pekerjaan, akan tetapi yang juga mempunyai inovasi dan kreativitas tinggi, serta mempunyai daya analisa dan pandangan jauh ke depan.

Dalam memasuki Pelita V yang akan datang dan menghadapi era tinggal landas, kita perlu memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja merupakan kenyataan hidup yang harus diterima dunia dewasa ini, akan tetapi juga sudah merupakan sarana yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan manusia.

Penemuan dan kemajuan teknologi di negara maju di bidang produksi, distribusi dan komunikasi, telah memungkinkan negara tersebut mampu bersaing dengan negara-negara lain, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara maju, merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka capai. Kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga berkualitas yang mengoperasikan peralatan canggih tersebut.

Dalam hubungan ini, maka dunia pendidikan mempunyai fungsi utama menyediakan lulusan, bukan saja dalam jumlah yang banyak, akan tetapi juga dengan kualitas dan disiplin yang tinggi, yang mampu menjadi dinamisator, inovator, motivator dan penggerak pembangunan.

Kondisi Angkatan Kerja Indonesia

Rendahnya tingkat pendidikan dewasa ini merupakan petunjuk akan rendahnya produktivitas angkatan kerja Indonesia. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa sekitar 17,3 juta orang penduduk Indonesia dalam kelompok umur 10-44 tahun masih buta huruf. Sekitar 11,5 persen penduduk dalam usia sekolah 7-12 tahun sama sekali belum pernah bersekolah. Sejumlah 34,5 juta atau 66,2 persen angkatan kerja Indonesia tidak tamat Sekolah Dasar. Angkatan Kerja yang menamatkan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) bertambah hanya dari sekitar 200.000 orang (0,5%) dalam tahun 1980.

Masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Jumlah sekolah-sekolah kejuruan dan jumlah siswa yang mengikuti sekolah kejuruan jauh lebih sedikit dari sekolah-sekolah umum. Di samping itu sekolah kejuruan belum berarti jaminan untuk siap bekerja. Bursa tenaga kerja kita memperlihatkan besarnya pencari kerja lulusan SLTA, Sarjana Muda dan Sarjana jurusan-jurusan tertentu. Di satu pihak tingkat pendidikan di Indonesia pada umumnya rendah, akan tetapi di lain pihak kita saksikan bahwa sebagian tenaga terdidik sukar memperoleh pekerjaan yang sesuai. Tenaga lulusan dan putus sekolah umumnya dalam usia muda, belum memiliki keterampilan khusus dan belum mempunyai pengalaman kerja. Mereka membutuhkan latihan khusus mendekatkan pengetahuan mereka dengan dunia pekerjaan.

Dalam jangka panjang, memang diperlukan perencanaan dunia pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja. Namun betapapun pendidikan formal direncanakan, sangat sulit untuk mampu menyediakan tenaga yang otomatis cocok dengan dunia kerja. Dunia pendidikan umumnya memerlukan waktu yang relatif panjang sedang teknologi berubah dengan cepat. Sehingga dunia pendidikan yang didisain cocok dengan teknologi sekarang ini, 5 tahun yang akan datang sudah ketinggalan jaman. Di samping itu, sistim pendidikan yang demikian menjadi akan sangat mahal. Oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah peningkatan dan pengembangan latihan-latihan kerja.

Masalah tenaga kerja bukan saja

Digitized by Google

menyangkut masalah peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja, akan tetapi juga menyangkut dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan dan keterampilan, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan dan jaminan sosial, lingkungan dan kondisi kerja, teknologi dan prasarana ekonomi, serta supra prasarana sosial dan kebijaksanaan Pemerintah.

Keterbatasan Daya Serap

Struktur perekonomian Indonesia masih berat agraris, walaupun sudah ada sedikit pergeseran selama periode 1971-1980. Peranan sektor pertanian dalam arti kontribusinya terhadap pendapatan nasional sudah turun dari 44,8 persen dalam tahun 1971 menjadi 24,8 persen dalam tahun 1980. Namun, proporsi tenaga-tenaga yang bekerja di sektor ini hanya sedikit berkurang dari 67,3 persen dalam tahun 1971 menjadi 56,3 persen dalam tahun 1980.

Di lain pihak, sektor industri yang sering didambakan sebagai tulang punggung perekonomian masih perlu didorong supaya mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Konstribusi sektor ini terhadap pendapatan nasional baru sekitar 11,6 persen dalam tahun 1980 naik dari 8,4 persen dalam tahun 1971. Demikian juga penyerapan tenaga kerja di sektor ini baru mampu naik dari 6,8 persen dalam tahun 1971 menjadi 9,1 persen dalam tahun 1980.

Sektor industri dalam Pelita I dan II pada dasarnya masih bersifat rehabilitasi dan stabilisasi untuk mempertahankan kepastian sektor industri sekaligus untuk mendukung perkembangan sektor pertanian. Dalam kurun waktu tersebut, alokasi investasi terbesar adalah berturut-turut dalam bidang tekstil, industri kimia termasuk farmasi, industri makanan, kehutanan dan industri mineral non logam. Dalam Repelita III dan IV, prioritas dan jumlah investasi bergeser ke bidang-bidang usaha industri mineral non logam industri kimia termasuk farmasi, industri logam dasar, pertanian, kehutanan dan pertambangan termasuk pertambangan dengan teknologi tinggi.

Dalam Repelita IV sekarang ini dan Repelita yang akan datang, orientasi investasi cenderung untuk lebih menggunakan peralatan teknologi canggih. Sebagaimana dikemukakan dalam

Sumber daya manusia

GBHN Repelita IV dan Repelita V yang akan datang, akan lebih menitikberatkan pengembangan industri-industri berat penghasil mesin-mesin dan industri yang dapat menjamin pengadaan bahan baku/penolong bagi industri lainnya. Industri-industri berat seperti itu umumnya mempunyai ciri-ciri seperti: Membutuhkan dana investasi yang cukup besar, baik investasi langsung maupun untuk penyiapan prasarana; Memerlukan tenaga ahli dan terampil, baik ditingkat manajemen maupun tenaga teknisi atau operasional; Membutuhkan teknologi dan peralatan yang modern dan mahal; Penyerapan tenaga kerja langsung relatif kecil; Pemasaran hasilnya sangat tergantung pada pertumbuhan industri-industri dalam negeri atau prospek ekspor, dan Jangka waktu memperoleh hasil investasi relatif panjang.

Sebagaimana dikemukakan di atas, masalah ketenagakerjaan yang paling besar untuk waktu yang akan datang ini adalah persoalan perluasan kesempatan kerja. Selama Repelita IV diperkirakan angkatan kerja akan bertambah dengan sekitar 9,3 juta orang. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 5 persen setiap tahun, diperkirakan hanya mampu menciptakan maksimum 7,3 juta tambahan kesempatan kerja. Perkiraan pesimis menunjukkan hanya sekitar 6,1 juta kesempatan kerja. Dalam Repelita V, pertambahan angkatan kerja diperkirakan 11,2 juta orang. Di lain pihak dengan asumsi pertumbuhan 5% setahun, diperkirakan hanya dapat diciptakan sekitar 7 juta kesempatan kerja baru.

Penghasilan masyarakat Indonesia masih relatif sangat rendah, sehingga daya beli masyarakat juga sangat rendah. Sebab itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pasar dalam negeri tidak bisa diandalkan. Sasaran utama adalah peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas. Untuk itu, perlu ditingkatkan daya saing produk-produk Indonesia, yaitu dalam bentuk kualitas tinggi dan harga relatif murah. Prasyarat untuk itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga-tenaga manajerial maupun tenaga pelaksana.

Ekspor Non Migas

Perdagangan internasional sangat penting bukan saja dalam meningkatkan kerjasama antar negara, akan tetapi terutama untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara. Supaya mencapai sasarannya, maka arus barang dan jasa yang diperdagangkan oleh setiap negara harus seimbang antara yang diekspor dan diimpor. Selama 20 tahun terakhir ini, ekspor utama Indonesia masih terbatas pada migas. Namun, akhir-akhir ini harga minyak di pasar dunia sudah mulai tidak stabil. Sehingga Indonesia harus mendorong ekspor nonmigas. Untuk itu beberapa langkah perlu dilaksanakan.

Pertama, kita perlu mengetahui potensi dan keunggulan sumber-sumber yang kita miliki, yang memungkinkan kita mampu bersaing di pasar internasional. Dalam hal ini dapat kita sebutkan misalnya kekayaan sumber daya tambang dan sumber daya pertanian, termasuk tenaga kerja dengan catatan bahwa kualitasnya harus ditingkatkan.

Kedua, kualitas produksi perlu tetap dijaga dan terus ditingkatkan, baik dengan sistem quality control maupun dengan peningkatan keterampilan karyawan melalui program-program latihan.

Ketiga, kita perlu selalu waspada dengan loncatan kemajuan yang dimiliki negara-negara pesaing kita, baik karena penemuan sumber-sumber baru yang mereka temukan maupun karena kemajuan teknologi yang mereka capai, supaya dengan demikian barang-barang yang kita ekspor pasti terpasarkan di luar negeri.

Keempat, kita perlu mengembangkan diversifikasi pasar, supaya bila pasar di satu negara mengalami kejenuhan, kita dapat segera memanfaat-

Digitized by Google

kan pasar di negara lain. Untuk itu, kita perlu mengetahui daya serap tiap-tiap daerah atau negara pemasaran kita.

Kelima, kita perlu mengembangkan kerjasama dan saling pengertian dengan negara-negara sasaran pemasaran, supaya perdagangan yang kita kembangkan saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu dengan menetapkan *terms of trade* yang lebih rasional selama ini, negara-negara berkembang sering merasa dirugikan karena harga barang-barang ekspor mereka turun di pasar dunia. Di lain pihak harga barang-barang yang diimpor dari negara maju terus meningkat.

Dalam hubungan perdagangan ke negara-negara maju, ekspor nonmigas Indonesia masih dibatasi melalui kuota dan standar kualitas yang sangat kaku, ekspor jasa tenaga kerja juga belum memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Di satu pihak, kita telah mengirimkan tenaga kerja Indonesia menimba ilmu di negara tersebut, dan kita telah menerima tenaga-tenaga ahli mereka bekerja di Indonesia, kita mengharapkan kehadiran mereka di Indonesia dapat mempercepat proses ahli pengetahuan dan teknologi.

Di lain pihak, kita memiliki sejumlah tenaga-tenaga unskilled dan semi-skilled yang sesungguhnya dibutuhkan di negara-negara maju, karena negara tersebut sudah kekurangan tenaga untuk itu. Sebab itu perlu kita jajaki bersama bagaimana mengembangkan pemasaran tenaga kerja Indonesia di berbagai negara.

Bagi Indonesia perlu membuka alternatif ekspor jasa tenaga kerja di samping ekspor nonmigas lainnya. Contohnya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah. Misalkan masing-masing tenaga kerja dapat mengirimkan sebagian dari penghasilannya sekitar $1.500 setahun, dan tenaga kerja yang bekerja di sana diperkirakan sekitar 90.000 orang, maka mereka dapat menghasilkan devisa sekitar 135 juta dolar setahun. Jadi ekspor jasa tenaga kerja ini dapat merupakan ekspor nonmigas yang potensial.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk dan angkatan kerja Indonesia cukup besar. Sehingga bila kualitasnya dapat ditingkatkan, Indonesia akan mempunyai unggulan komparatif di bidang tenaga kerja. Tingkat upah masih rendah, sehingga walaupun secara bertahap dinaikkan dengan 100-200 persen, unggulan komparatif tersebut masih dapat dipertahankan, misalnya bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, produktivitas kerja akan meningkat dan kualitas produksi juga akan meningkat. Didukung oleh tingkat upah yang masih rendah, maka daya saing produk Indonesia di pasar internasional akan cukup tinggi. Dengan daya saing tersebut ekspor dapat ditingkatkan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Dengan peningkatan kualitas, tenaga kerja Indonesia akan dapat merebut kesempatan kerja di luar negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, di samping membantu pemecahan masalah penganggur di Indonesia, juga membantu mendatangkan devisa.

Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan melalui sistim pendidikan formal dan program latihan kerja. Pendidikan formal memberikan dasar-dasar — pengetahuan, logika dan kemampuan analisa. Perguruan Tinggi menghasilkan tenaga-tenaga sarjana yang diharapkan mampu sebagai tenaga ahli dengan kreativitas dan inovasi tinggi. Sebaliknya program latihan kerja memberikan dasar-dasar keterampilan melakukan pekerjaan secara teknis. Latihan kerja lebih diarahkan kepada pemenuhan persyaratan kerja, pendidikan formal dan latihan kerja saling melengkapi.

Program latihan kerja mempunyai dua sasaran yaitu tenaga-tenaga yang sudah bekerja dan tenaga-tenaga yang segera akan bekerja. Program latihan bagi yang sudah bekerja dimaksudkan untuk lebih memantapkan ketrampilannya di pekerjaan yang sudah ada, atau untuk dapat mengambil tanggungjawab yang lebih besar, atau supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi. Latihan-latihan seperti ini sebagian dapat dilakukan dalam perusahaan sendiri (on-the-job-training) terutama oleh perusahaan-perusahaan besar.

Latihan kerja bagi angkatan kerja baru dan putus Sekolah sebaiknya diarahkan kepada dua sasaran: pertama, latihan kerja dilakukan hanya bila sudah ada permintaan dan sesuai dengan permintaan tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan permintaan merupakan pemborosan dan dapat menimbulkan frustasi bagi yang dilatih dan keresahan masyarakat. Kedua, latihan dilakukan untuk menjadi wiraswasta, atau kerja mandiri di sektor informal.

Dalam rangka menyongsong kemajuan ilmu dan teknologi, perlu dipersiapkan tenaga-tenaga ahli dan trampil untuk seluruh bidang kejuruan dan tingkatan. Keberhasilan kita mempersiapkan era lepas landas sangat tergantung pada tersedianya tenaga-tenaga trampil untuk berbagai sektor industri tersebut.

Untuk meningkatkan ekspor, daya saing harus diperbesar, yaitu dengan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi dan biaya produksi yang rendah. Sarana strategis untuk itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Jumlah penduduk dan angkatan kerja cukup besar. Bila kualitas tenaga kerja Indonesia meningkat, Indonesia akan mempunyai unggulan komparatif di bidang ini.

Dalam Repelita V yang akan datang, Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia sebagai keunggulan komparatif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat bagi kemajuan perekonomian setiap negara. Pengembangan industri berteknologi tinggi sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusianya, baik dalam mengoperasikan teknologi canggih dan peralatan modern tersebut, maupun untuk mendisain dan menciptakan teknologi sendiri yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan masyarakat negara yang bersangkutan.

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jalur latihan kerja. Kedua jalur tersebut saling melengkapi. Peningkatan kualitas melalui jalur latihan ditujukan bagi yang sudah bekerja, bagi pencari kerja di dalam dan di luar negeri, dan bagi mereka yang bermaksud bekerja mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa untuk secara khusus meningkatkan ekspor dan secara umum menghadapi Repelita V dan era tinggal landas pembangunan Indonesia, pertama-tama harus dilakukan terobosan baru dalam pembinaan dan pemanfaatan sumber daya manusia.[ ]

Digitized by Google

NYAI BLORONG

Dalam masyarakat Jawa, terkenal tokoh yang bernama Nyai Blorong, sebuah tokoh misteri, dan idola bagi siapa yang ingin kaya. Cerita tentang mencari kekayaan dengan jalan misterius memang terkenal di dunia yang mengenal mistik-mistik, karena kekayaan tersebut ingin diraih tanpa bekerja dengan layak. Di Indonesia, cerita mengenai hal ini seperti bukan rahasia lagi, dan beberapa versi mengembang di dalam masyarakat, sesuai dengan daerah-daerah tertentu, dimana para pemberi kekayaan itu disembah. Ada yang mengatakan bahwa Gunung Kawi adalah sumber dari mencari kekayaan, karena disana bersemayam semacam tokoh yang dapat memberikan sarana bagi kekayaan. Juga di tempat-tempat terpencil di Jawa Barat misalnya, terkenal bagi mereka yang mencari kekayaan dengan cara ngiprik.

Ngepet atau Babi Ngepet, adalah salah satu bentuk sarana kekayaan bagi masyarakat tertentu di Jakarta dan sekitarnya. Semua versi ini mengandung sangsi sama, ialah pengabdian kepada setan pemberi kekayaan, dan pengabdian mana harus dibayar oleh sipelaku dengan maut yang diminta sesuai perjanjian. Kekayaan memang diberikan, bahkan bisa melimpah-limpah. Tetapi ingat, semuanya ini dapat terjadi dengan batas waktu, seperti batas waktu yang diberikan oleh Bidadari kepada Cinderella dalam fabel Barat, dimana Cinderella diberi waktu sampai tengah malam untuk dapat menjadi seorang Princess, serta berpesta ke Istana Raja, berdansa dengan Sang Pangeran.

Pada masyarakat Jawa, berkembanglah apa yang dinamakan cerita rakyat dengan Nyai Blorong sebagai pemeran utamanya, si pemberi kekayaan. Cerita rakyat semacam ini berkembang dari tahun ke tahun bahkan dari abad ke abad memiliki data serta tempat yang nyaris akurat.

Terkisahlah sebuah sungai yang disebut Kali Blorong, terletak di Desa Ketapang, sebelah Timur Kendal, di Pantai Utara Jawa. Disana tinggal seorang petani bernama Ki Blorong, karena dia tinggal dekat dengan Kali Blorong. Ki Blorong sangat rajin mengerjakan sawahnya, sehingga jarang pulang. Makanan dan minuman baginya selalu dikirim oleh isterinya yang mendapatkan julukan Nyai Blorong. Ki Blorong terkenal karena baik budi, senang menolong, dan disegani oleh banyak orang di masyarakat sana. Pasangan Ki Blorong dan Nyi Sutami memiliki seorang anak gadis bernama Rara Kenges. Sawah dimana Ki Blorong bekerja masih dibatasi oleh hutan-hutan yang dihuni beberapa binatang buas, dan oleh karena itu Ki Blorong selalu menyandang senjata sumpitan, panah serta senjata angin lainnya.

Pada suatu hari, Ki Blorong menemukan sebutir telor, dan dikiranya sebutir telor angsa karena besarnya. Telor segera direbus dengan cara membungkusnya di dalam daun, dan ditaruh di atas api. Harapannya, dia akan makan nasi berlaukkan telor, bila Nyi Sutami datang mengirim makanan. Telorpun matang, tetapi Nyi Sutami tak kunjung tiba, sedangkan lapar Ki Blorong sudah tidak dapat ditunda lagi. Karena cinta dan setianya kepada isterinya, maka dia makanlah separuh telor itu, dengan menyisihkan separuh lagi buat isterinya nanti bila datang.

Usai makan telor, dia duduk bersantai digubugnya menunggu isterinya, ketika dirasakannya badannya kegerahan yang amat sangat, dan keringat mengucur dari tubuhnya. Karena tidak tahan atas kegerahan badannya serta terasa sangat panas, diapun berendam di telaga didekat sana. Terasa nyaman dan sejuk, ketika dia merendam dirinya di telaga tersebut. Dengan menggerak-gerakkan kakinya, rasa nyaman makin dinikmati, tetapi tiba-tiba saja kaki yang digerak-gerakkan tadi serasa menjadi satu. Menjadi sangat terkejut, ketika kakinya benar-benar menjadi

Nyai Blorong ***tokoh misteri***

Digitized by Google

satu, dan berbentuk memanjang seperti ekor ular. Pada tubuhnya tiba-tiba ditumbuhi sisik, dan Ki Blorong sadar bahwa dirinya telah menjelma menjadi ular berkepala manusia. Teriakan minta tolong tidak ada yang mendengarkannya. Diapun merasa nestapa serta malu, dan tinggal saja dengan kepala yang muncul dipermukaan air.

Nyai Blorong, mundur dan ketakutan

Nyi Sutami pun tiba membawa makanan untuk suaminya. Dia telah berpesan kepada puterinya Rara Kenges, untuk tidak meninggalkan rumah, karena tiada orang yang menungguinya. Ketika dilihatnya bahwa suaminya sedang berendam diempang, diapun meneriaki "Cepat naik ke atas suamiku, telah kubawakan makanan kesukaanmu. Ki Blorong tidak dapat menyahut, hanya matanya saja yang memberikan tanda duka nestapa atas perubahan raganya. Ketika Nyai Sutami menyadari atas perubahan tubuh suaminya, diapun mundur ketakutan. Ki Blorong pun dengan iba memanggil: "Jangan takut. Aku suamimu, datanglah mendekat". Maka diceritakannya tentang penemuannya, dan niat memakan telor rebus bersamasama. Separuh telor yang masih disisihkannya, dimintanya kepada Nyai untuk segera memakannya, agar Nyai Sutami bisa bersatu dengan Ki Blorong. Nyai Sutami pun menyadari cintanya terhadap sang suami, dan tidak mungkin untuk dipisahkannya, segera memakan telor sisanya, dan tidak lama kemudian rasa panas telah melandanya, dan diapun segera menceburkan dirinya di empang, bersatu dengan suaminya.

Ratu Kidul murka

Tersebutlah Rara Kenges yang ditinggalkan emaknya belum kembali juga, karena khawatir, akhirnya menyusul juga, melanggar perintahnya. Ketika akhirnya ditemui kedua orang tuanya telah menjadi ular bersembunyi di dalam telaga, Rara Kenges menangis sejadi-jadinya, merasa kehilangan orang tuanya. Ki Blorong dan Nyai Sutami menghibur puterinya dengan memberitahukan agar meneruskan hidup di dunia, dan mereka mendoakan agar Rara Kenges bekerja dengan baik, menjadi orang kaya yang sosial terhadap sesama. "Ambillah air dari telaga ini, isikan pada *pendaringanmu* (tempat beras), dan kabarkan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan kekayaan, agar mengambil air di telaga ini, serta menyimpannya. Aku akan menengokmu bila rindu kepadamu, di telaga ini, sementara itu, aku akan pindah ke telaga Pengilon". Demikianlah pesan kedua orang tua itu.

Tersebut kisah, kesosialan Ki Blorong dan Nyai Sutami terhadap rakyat dengan membagi-bagi kekayaannya, terdengar oleh *Ratu Kidul,* Sang Ratu yang menguasai Samudera Selatan. Dia tidak mau ditandingi oleh makhluk lainnya, sehingga murka atas kelakuan Ki dan Nyi Blorong, maka diutusnya dua makhluk kepercayaannya, Angga Inggi dan Belut Putih untuk memberitahukan kepada mereka agar tidak menyaingi eksistensi sang Ratu. Untuk itu, mereka harus memberikan *bulu bekti* kepada Kanjeng Ratu setiap saat sang Ratu membutuhkan. Bila bulu bekti ini tidak dipatuhi, maka keduanya harus dimusnahkan. Ki dan Nyai Blorong rupanya cukup berfikiran demokratis, karena tidak mau mematuhi instruksi Kanjeng Ratu. Mereka katakan kepada kedua delegasi Ratu, bahwa tindakan sosial mereka kepada manusia adalah wajar sebagai sarana bantuan dan pertolongan. Bahwasanya mereka berubah bentuk menjadi demikian, bukanlah kehendak mereka, tetapi merupakan kehendak dari Allah Sang Hyang Murbeng Dumadi. Singkat cerita, kedua utusanpun mencoba menaklukkan Ki Blorong, karena memang demikian perintah sang Ratu. Ki Blorong dapat dikalahkan oleh kedua utusan tersebut, sedangkan Nyi Sutami yang menyaksikan perkelahian yang tidak seimbang itu menjadi murka, serta membela suaminya yang gugur di medan laga, mengamuk terhadap kedua utusan yang tidak tahu diri itu. Si Belut Putih yang licin dan licik memang sulit dikalahkan, sedangkan Angga Inggi sudah menyerah kalah. Untuk mengelabuinya, Nyi Sutami berubah menjadi seorang tua yang peyot, sehingga Belut Putih mengira bahwa Nyi Sutami atau Nyi Blorong sudah mati.

Bila tidak ketahuan oleh Belut Putih, Nyi Blorong bertiwikrama menjadi wanita cantik sekali.

Merasa gagal tidak dapat menemukan Nyi Blorong, Belut Putih memilih minggat atau melarikan diri ke Kali Bodri, agak jauh dari pemukiman Nyi Blorong. Nyi Blorongpun setelah mengetahui Belut Putih raib dari situ, menjelma menjadi wanita cantik sekali, atas dasar permintaan kepada Sang Hyang Dumadi. Perubahan kecantikannya itu hanya untuk menghindarkan diri dari kejaran Belut Putih. Dan sampai kini, Nyi Blorong masih menghuni dilautan, dengan masih berkarya sosial, memberikan pertolongan kepada mereka yang ingin kaya.

Tugas Nyi Blorong ini agak berlainan dengan para pemberi kekayaan yang lainnya, yang menginginkan tebusan dari kekayaan atau berkah yang diberikan. Meskipun menjadi idola bagi mereka yang ingin kaya, tetapi bagi yang tidak percaya, beribu-ribu kali ingin bertemu dengan Nyi Blorongpun tidak akan terkabul. Cerita rakyat begini masih lestari diantara rakyat yang mempercayainya, dan antara percaya dan tidak, orang toh setengahnya meng-iya-kan atas eksistensinya.□

Digitized by Google

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

P.T. KRAKATAU STEEL

MENGUCAPKAN :

SELAMAT ATAS TERPILIHNYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA
MASA BHAKTI 1988 – 1993

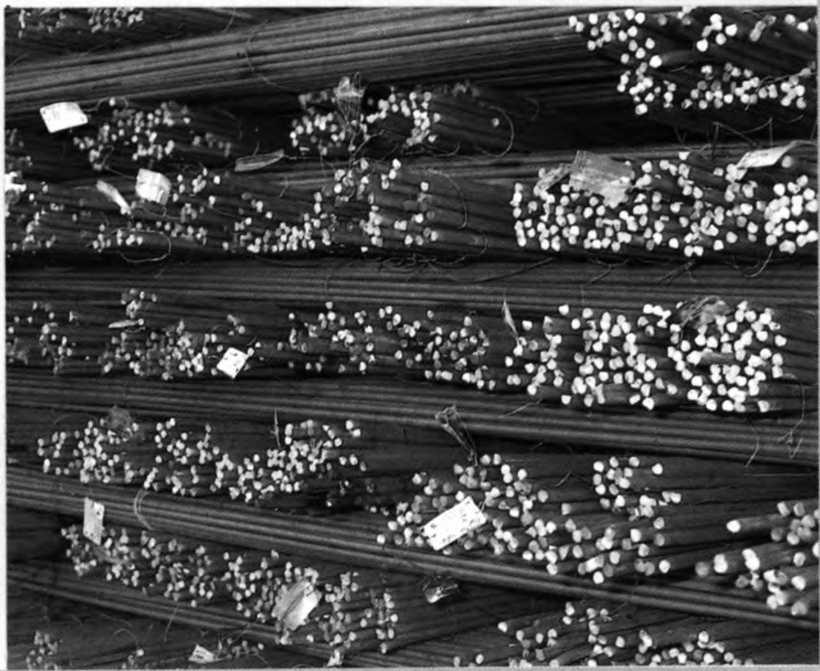

Semoga tercapai cita-cita perjuangan GOLKAR
dalam rangka kesinambungan PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

Berkat HONDA Panen melimpah

Pompa Air serbaguna HONDA paling disukai karena telah teruji ketangguhannya, disamping sparepart - nya terjamin.
Daya hisap lebih kuat, pemakaian bahan bakar irit, berkat penerapan teknologi maju HONDA.
Sangat cocok untuk meningkatkan produktivitas disektor pertanian, perikanan dan sebagainya.

Pompa Air Honda yang dapat menggunakan **bahan bakar minyak tanah** memudahkan pengoperasian di daerah-daerah terpencil.

Pilihlah yang sesuai: kapasitas 3,5 PK yaitu type WB 20 & WBK 20, maupun 5 PK yaitu type WB 30 & WBK 30.

Spesifikasi :

	WB 20	WBK 20	WB 30	WBK 30
Berat kosong	20 kg	23,8 kg	25 kg	27 kg
Total daya angkat	32 m	32 m	28 m	28 m
Kapasitas maksimum	500 l/mnt	500 l/mnt	1.000 l/mnt	1.000 l/mnt

Hubungilah dealer kami di daerah Anda

AGEN TUNGGAL SELURUH INDONESIA
PT IMORA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA No. 50, 3rd Fl. Telp. 6394044
Telex 63720, Fax : 6393990, JAKARTA 10730.

Digitized by Google

No. 57 Desember 1988

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

HAK ASASI MANUSIA LAIN DI SANA LAIN DI SINI

... Dwibulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Selamat Hari Natal 1988

Dan

Tahun Baru 1989

PT Enka Parahiyangan
offset printing & publishing

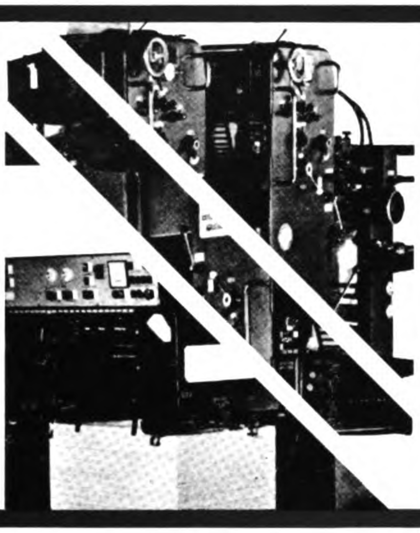

Partner Anda dalam bidang cetak offset warna maupun hitam putih untuk :

* kop surat
* memo
* sticker
* brosur
* buku
* majalah
* kalender
* leaflet

Hubungi :

P.T. Enka Parahiyangan
Offset Printing & Publishing

Jl. Raya Cibubur No. 1 Telp 870142 - 870985 - Jakarta 13720

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.

Staf Redaksi :
Sudarsono SH
T Anono Poernomo
Subandrio
Djonharro
Rum Aly
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noenjathy
Robert Puang Sunur
Issidarto BA
Subyanto SP
Untung Djumadi
H Mesri Pasanbu

STT NO 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Catatan Akhir Tahun

FOKUS

Kesetiakawanan Sosial selalu diperingati tiap tahun pada 20 Desember. Ada yang menginginkan kesetiakawanan yang struktural. Apa itu?

LAPORAN UTAMA

Tiga bulan terakhir di tahun 1988, pemerintah mengeluarkan tiga paket deregulasi. Ada Pakto, kemudian disusul Paknov lalu terakhir muncul Pakdes. Akankah gebrakan deregulasi ini akan muncul lagi di tahun ular sekarang. Menurut janji pemerintah sih ya.

LAPORAN KHUSUS

Pertengahan Desember tahun lalu, Wakil Presiden Sudharmono SH mengadakan kunjungan kerja ke propinsi Jawa Tengah dalam rangka pengawasan. Dialog yang berkembang macam-macam, pertanyaan yang dilontarkan dari soal deregulasi sampai uang hansip.

NASIONAL

Tiap Negara Memiliki Kesadaran Hak Asasi; Pendidikan di Jawa Barat, Berpacu dalam Keselarasan Kualitatif dan Kuantitatif; Mendung Masih Menggantung; Masalah Tanah di Jawa Barat; Sotion Ardjanggi Ketua Umum KADIN dan AMPI, Nostalgia Pandaan.

KOMENTAR

ORGANISASI

Laporan tentang kegiatan HUT GOLKAR di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta Sumatera Selatan. Susunan Dewan Pembina GOLKAR dan Rekreasi Akhir Tahun Karyawan Sekretariat DPP.

SPEKTRUM

Pengembangan Hak & Kewajiban Asasi Warga Negara dalam Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, oleh Prof Padmo Wahyono SH.

SENI & BUDAYA

Ayahku, Adakah Hari Bapak? Oleh Maria Sugiharto.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

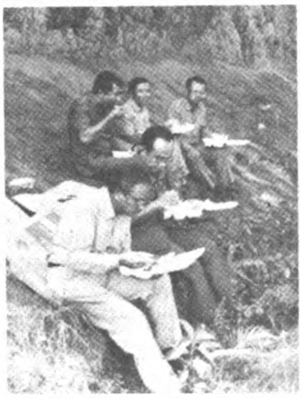

Digitized by Google

GOLKAR, Catatan Akhir 1988

Bagi Golongan Karya bulan-bulan terakhir 1988 ini ternyata penuh ujian. Adalah pada masa tersebut, organisasi politik berlambang pohon beringin ini menjadi sasaran sorotan tajam dari berbagai penjuru. Tajamnya sorotan itu banyak tercermin melalui pemberitaan pers. Sorotan itu terjadi justru di seputar waktu terselenggaranya Musyawarah Nasional Golongan Karya yang untuk pertama kalinya dalam lingkup mekanisme bottom up. Seakan-akan suatu kebetulan yang malang, yang melintang di hadapan upaya makin meningkatkan kadar demokratisasi dalam organisasi pemenang pemilihan umum ini.

Dapat dicatat bahwa baik menjelang maupun sesudah Munas, Golongan Karya digambarkan mengalami kebobolan-kebobolan politis yang dikaitkan dengan isu penyusupan sisa-sisa G30S/PKI. Beberapa tokohnya dalam kepengurusan di daerah berdasarkan pengungkapan aparat keamanan diberitakan punya keterlibatan dengan G30S/PKI. Belakangan, beberapa tokohnya di tingkat pusat — sebelum dan sesudah Munas — juga diberitakan 'tidak bersih'. Itu soal yang pertama. Pada sekitar waktu yang sama, terjadi pula riak yang berupa rentetan protes tentang tokoh-tokoh yang dikatakan duduk dalam kepengurusan DPP hasil Munas kendati tidak memenuhi kriteria Anggaran Dasar organisasi. Dan ini adalah soal kedua.

Kedua persoalan tersebut jelas merupakan 'pekerjaan rumah' di luar rencana yang terpaksa dihadapi oleh DPP baru Golongan Karya, khususnya oleh dua tokoh puncak yang baru — Wahono dan Witoelar. Akan tetapi pada hakekatnya kedua permasalahan mau tidak mau juga melibatkan rasa dan pikiran massa keluarga besar organisasi ini.

Terhadap yang pertama, timbul kebimbangan-kebimbangan. Ada rasa tercengang: Betulkah di antara kita ini terdapat penyusup-penyusup dari suatu organisasi terlarang yang pernah melakukan makar lebih dari 23 tahun lampau? Begitu rapuh 'sistim keamanan' organisasi politik yang terbesar sepanjang masa Orde Baru ini, sehingga orang-orang dari eks partai terlarang itu dapat masuk dan menduduki posisi-posisi yang cukup penting di organisasi kita ini? Ada pula rasa menyesali: Semua pasti percaya bahwa pihak aparat keamanan tidak mengada-ada dan tidak punya pamrih politik praktis, dan hanya punya satu pamrih yakni keamanan nasional. Akan tetapi, kenapa mereka begitu lamban dalam deteksi? Bukankah mereka yang kini diindikasikan itu sudah hampir tiba pada masa akhir periode kepengurusan? Dan lebih dari itu, sepanjang yang dapat diamati, tokoh-tokoh tersebut bukanlah 'baru' dikenali. Hampir seluruhnya pernah menjalani screening di masa lampau dan bahkan dikabarkan telah mendapat clearance dari instansi keamanan — setidak-tidaknya rekomendasi. Maka orang bisa bertanya, mana yang keliru, siapa yang teledor, yang dulu atau yang sekarang? Ada pula rasa cemas: Memang pepatah mengatakan, "berani karena benar takut karena salah". Jadi siapapun yang tidak bersalah, tak perlu merasa takut. Mantan Ketua Umum Golongan Karya misalnya, yang sempat jadi sasaran isu serupa, tidak ragu-ragu untuk membatah. Tentu karena beliau yakin tidak seperti yang dituduhkan lewat isu. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sepanjang pengalaman 23 tahun ini, tuduhan berindikasi itu menimbulkan *angstpsichose*, yang luar biasa. Mereka yang dituding, gemetar lututnya, sehingga untuk membela diri pun sudah tak berani, lagipula tuduhan seperti ini tak pernah sampai final di badan peradilan. Apalagi mengharapkan pembelaan dari orang lain, karena orang lain pun takut dilibat-libatkan.

Faktor *angstpsichose* dari tuduhan berindikasi, perlu dipikirkan oleh para pimpinan organisasi ini. Bukan soal solidaritas korps yang sempit, tetapi bilamana ada anggota yang terkena tuduhan terlibat, organisasi perlu 'mendampingi' dalam arti yang positif. Jika yang bersangkutan memang terbukti terlibat, organisasi harus tidak segan-segan membantu aparat keamanan. Tetapi sebaliknya, organisasi pun harus tegas menangkal bila ada anggotanya yang mau dijadikan sasaran fitnah (terlebih-lebih kalau kita mau belajar dari pengalaman bahwa bahkan sisa-sisa G30S/PKI pun terbukti tidak segan-segan menggunakan tudingan PKI terhadap orang lain sebagai salah satu senjata). Sikap tegas seperti itu tidak dapat diartikan bahwa organisasi pendukung utama Orde Baru ini kendor kewaspadaannya terhadap sisa-sisa G30S/PKI atau luntur ke-Ordebaru-annya.

Dan terhadap masalah yang kedua, pertama-tama harus diakui betapa dilematis persoalannya. Di satu pihak, DPP baru adalah hasil keputusan Munas sebagai pelaksana penuh kedaulatan seluruh anggota. Pada pihak lain, ada ketentuan yang disepakati bersama yang mengacu kepada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi, menyangkut kriteria syarat masa pengabdian bagi mereka yang akan duduk dalam kepengurusan. Dari sudut lain lagi, seakan-akan ada dilema untuk pilihan antara berkualitas namun bermasa pengabdian (masih) singkat dengan setia dan telah lama mengabdi namun sedikit kurang dalam kualitas. Untuk dilema yang disebut belakangan, perlu uraian dan telaah lanjut.

Dalam kurun waktu dua puluh tahun lebih ini, Golongan Karya mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup khas dalam rekrutmen untuk lapisan-lapisan tertentu di organisasi — calon-calon untuk diterjunkan di lembaga legislatif maupun untuk duduk dalam kepengurusan berbagai tingkat. Dari tahun ke tahun, sejalan dengan hasrat peningkatan kualitatif, Golongan Karya banyak merekrut tokoh-tokoh yang dianggap berkualitas dari kalangan masyarakat. Setelah memilih di antara mereka yang berkualitas dan loyal (diukur dari masa pengabdian yang memadai), organisasi menoleh kepada muka-muka baru yang potensial walaupun disadari akan mengecewakan mereka yang telah lama mengabdi (namun kurang memenuhi aspek kualitatif).

Adapun pada Munas yang baru lalu, tampaknya kuat keinginan untuk segera memberlakukan kriteria yang belum begitu lama disepakati yaitu masa pengabdian 5 dan 10 tahun untuk kepengurusan di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Dan segera saja timbul permasalahan akibat perbenturan antara keinginan taat penuh kepada kriteria versus kebutuhan yang masih dirasakan oleh sejumlah pemuka organisasi ini akan suatu rekrutmen yang berkaitan dengan benefit politis yang bertalitemali dengan taktik dan strategi organisasi pada pemilihan umum 1987 yang lalu maupun proyeksinya ke pemilihan umum 1992. Konsekuen terhadap kriteria, penting untuk menenangkan kader secara internal. Akan tetapi, memperhitungkan taktik dan strategi, juga adalah kunci keberhasilan yang tak kalah pentingnya bagi suatu organisasi politik yang mau tak mau terlibat dalam bentuk-bentuk 'deal' politik.

Lalu dimana 'salah'nya kita semua? Mungkin karena kita terlalu terburu-buru meletakkan kriteria waktu yang ketat dengan segera tanpa memberi waktu yang cukup untuk semua pihak menyesuaikan diri. Belum sampai lima tahun kita menterapkan keterbukaan organisasi — dengan pendaftaran anggota — kita sudah 'memasang' harga yang lebih tinggi. Padahal begitu banyak partisipan baru yang juga ingin ikut mengabdi. Kurang adil rasanya, kalau langsung jalan mereka untuk ikut mengabdi segera diberi pagar batas. Padahal dapat diperkirakan bahwa tak kecil pula peranan para anggota baru dalam memenangkan pemilihan umum yang lalu — dengan hasil melebihi kemenangan-kemenangan di masa lampau. Akan lebih adil bila pada lima tahun mendatang lagi baru kita mulai ketat dengan kriteria waktu itu. Ini semua perlu kita pikirkan bersama....□

Digitized by Google

Kesetiakawanan Sosial Yang Struktural

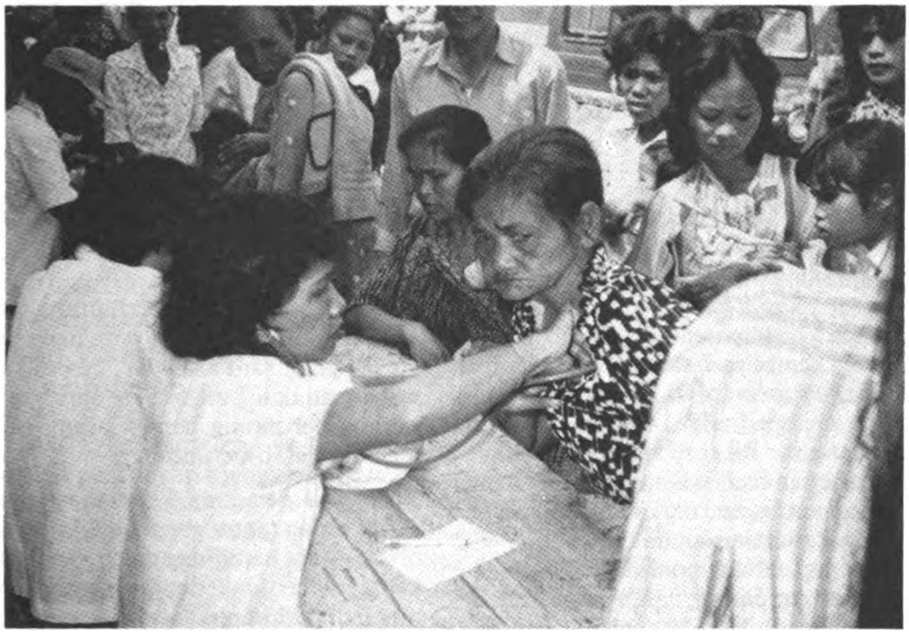

Solidaritas antar sesama sebagai warga negara

Bulan Desember mengukir banyak peristiwa yang patut dikenang. Pada bulan ini, tepatnya setiap tanggal 10 Desember umat manusia memperingati hari hak asasi (manusia) karena pada tanggal tersebut 40 tahun lalu PBB mensyahkan pengakuan atas hak-hak dasar manusia dalam bentuk Declaration on Human Rights. Bagi umat Kristen, bulan Desember mempunyai arti tersendiri karena ada peringatan hari Natal yang jatuh setiap tanggal 25. Belum lagi tanggal 31 Desember yang biasanya dilewatkan oleh umat manusia dengan cara-cara unik untuk menyongsong Tahun Baru.

Tanpa mengecilkan arti aneka peristiwa penting yang terjadi dan diperingati di bulan Desember, fokus kita kali ini menyoroti sebuah peristiwa - juga di bulan Desember - yaitu ditetapkannya tanggal 20 Desember sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, yang disingkat HKSN.

Pilihan tanggal 20 Desember sebagai HKSN, bermula dari sebuah peristiwa sejarah yang terjadi 40 tahun lalu. Pada waktu itu ibukota Republik Indonesia, Jogyakarta, diduduki oleh tentara Belanda dan sejumlah pimpinan Republik ditawan. Republik yang baru berusia tiga tahun berada dalam suasana sulit. Namun Jenderal Sudirman memutuskan tidak menyerah kepada tentara Belanda, tetapi melakukan perang gerilya untuk merebut kembali Jogyakarta, kelak. Dan tekad itu akhirnya terwujud dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto, kini Presiden Republik Indonesia.

Dalam aksi perang gerilya untuk merebut kembali Jogyakarta itulah semangat kesetiakawanan antara rakyat kecil dan miskin di pedesaan dengan tentara Republik mencuat nyata. Mereka (rakyat) memberi apa saja yang dipunyai untuk membantu tentara Republik meneruskan perang gerilya.

Kini, peristiwa pendudukan Jogyakarta dan Serangan Umum 1 Maret adalah catatan sejarah yang telah lampau. Kedua peristiwa itu mungkin dalam beberapa dekade mendatang akan semakin sirna dari ingatan. Tetapi sebuah nilai yang ingin diabadikan yang bersumber dari kedua peristiwa sejarah itu, adalah kesetiakawanan sosial. Agaknya nilai ini tetap akan aktual dalam rentang perjalanan Republik ini, hingga kapan pun.

Aktualitas kesetiakawanan sosial tidak lagi mengacu pada solidaritas perang gerilya, tetapi pada keadilan sosial. Artinya solidaritas antara sesama sebagai warga bangsa, diwujudkan dalam semangat dan persepsi kita tentang keadilan sosial.

Keadilan sosial kini menjadi aktual, dan agaknya akan tetap aktual, karena bersamaan dengan prestasi dan kegemilangan pembangunan, disparitas dalam berbagai aspek kehidupan masih mencuat cukup mencolok. Perbedaan peruntungan yang lazim dipercaya sebagai nasib, sehingga kita terbentur pada fakta-fakta dikhotomis seperti kaya dan miskin, pintar dan bodoh, kota dan desa dan sebagainya, merupakan tantangan berat dari tugas pembangunan yang salah satu misinya adalah pemerataan.

Disparitas yang masih mencolok itu, menyebabkan kepada Panitia HKSN 1988 yang diketuai Kharis Suhud dilontarkan sejumlah harapan dan saran. Ada yang meminta agar dalam berbagai bhakti sosial seperti kunjungan dan santunan kepada rumah-rumah jompo, aksi perbaikan lingkungan permukiman kumuh, sedekah kepada fakir miskin, kunjungan ke daerah-daerah terpencil, tidak menampilkan aspek hura-hura sebuah bhakti sosial. Ada juga yang menyarankan agar panitia HKSN tidak memberi ikan tetapi kail kepada kelompok yang patut dialamatkan karya solidaritas. Dan ada pula yang menyuarakan agar kesetiakawanan sosial dijadikan suatu gerakan yang struktural. Artinya, kesetiakawanan sosial harus menjadi tugas pengabdian yang melembaga atau berstruktur. Dia tidak boleh lagi hanya sekedar bhakti musiman, tetapi harus mempunyai program, metode

Digitized by Google

dan sasaran kesistiman. Atau gampangnya, jadikanlah kesetiakawanan sosial sebuah karya dan pengabdian yang bersistim dalam skala pembangunan nasional, sehingga dia mempunyai kontribusi nyata dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Harapan agar kesetiakawanan sosial di jadikan gerakan yang struktural, bukan insidental, berpangkal dari argumen bahwa solidaritas yang berwujud pemberian dari kelebihan seseorang atau kelompok yang lebih beruntung kepada kaum yang kurang beruntung, bisa menimbulkan ketergantungan. Disisi lain, solidaritas yang diwujudkan dalam bentuk derma sama saja dengan melemparkan recehan kepada para pengemis yang mengulurkan tangan mohon pengasihan di jalan raya. Solidaritas yang begini tidak ambil pusing dengan pemanfaatan recehan yang dilemparkan. Akhirnya pemberi recehan akan marah bila setiap kali melihat pengemis yang sama mengusik kenyamanannya dalam mobil di traffic light. Apa mau dikata, recehan telah menciptakan ketergantungan. Lebih celaka lagi kalau tumbuh sikap hipokrit yang mengkomersilkan kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak lagi dianggap sebagai dosa sosial, tetapi sumber nafkah.

Ekses-ekses seperti ini menyebabkan karya-karya yang berkharakter solidaritas kehilangan makna. Si miskin menjadi semakin tergantung, dan pelaku yang melempar recehan semakin bosan. Bila seorang direktur bank yang setiap hari dikerubuti temantemannya yang kurang beruntung, dan setiap kali harus mengeluarkan segepok recehan untuk rekan-rekannya yang bernasib malang, maka pada suatu saat sang direktur akan jenuh memberi apa-apa lagi. Mungkin suatu saat dia akan merogoh kantongnya yang terakhir kali sambil berkata, "harap ini adalah kesempatan terakhir saya diganggu. "Recehan akhirnya menjadi harga sebuah ketidakperdulian.

Namun kebosanan memberi karena keseringan, tidak lantas menyebabkan setiap pemberian kehilangan makna. Bagaimana pun juga pemberian adalah perbuatan yang pantas dihaturkan terimakasih. Hanya saja memberi dari kelebihan, kalah makna solidaritas dari yang memberi dalam kekurangan. Mereka yang memberi dari kekurangan, agaknya memenuhi syarat masuk surga.

Dalam pendekatan berstruktur terhadap karya-karya kesetiakawanan maka yang terpenting adalah bagaimana pemberian, santunan dan derma sanggup menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kualitas hidup si penerima. Bila sebaliknya, artinya pemberian hanya akan menumbuhkan ketergantungan, maka hal itu adalah dosa kesetiakawanan.

Kesetiakawanan yang operasional, yang diinginkan masyarakat

Setiap tahun, panitia HKSN melibatkan sejumlah nama yang dalam masyarakat kita dikenal sebagai mereka yang beruntung. Ada pengusaha yang sukses, ada pejabat tinggi pemerintahan, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Membengkaknya jumlah panitia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ada kesadaran yang makin meluas di kalangan yang berpunya untuk - minimal setahun sekali - mewujudkan rasa solidaritas sosial terhadap kelompok yang kurang beruntung.

Di pihak lain, membengkaknya nama-nama dalam daftar panitia HKSN menunjukkan bahwa pembangunan dengan segala kekurangan disana-sini, ternyata telah mampu memperbanyak daftar orang-orang sukses. Kesadaran untuk melakukan karya-karya yang bersifat kesetiakawanan mencerminkan juga pengakuan kita bahwa disparitas memang masih menjadi masalah bangsa. Kesadaran itu berpangkal pada pengakuan bahwa mereka yang beruntung mungkin saja dibiayai oleh pengorbanan mereka yang kurang beruntung. Nasib baik seseorang dibiayai oleh nasib buruk orang lain. Oleh karena itu sudah sewajarnya yang beruntung merelakan sedikit keuntungannya demi solidaritas kepada kaum yang kurang beruntung. Argumen seperti ini tentu tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan yang beruntung dengan yang malang. Sebab salah satu asas dari kesetiakawanan adalah pengakuan dari yang kurang beruntung bahwa orang lain memang lebih beruntung.

Dengan demikian kesetiakawanan sosial setiap tahun yang menghimpun orang-orang beruntung dalam susunan kepanitiaan tidak dengan sendirinya menjadi perhimpunan yang terus-menerus memberi. Kesetiakawanan sosial adalah arus nilai yang timbal balik dalam praktek. Yang kurang beruntung harus menghargai keberuntungan orang lain, sementara yang beruntung harus memperdulikan kemalangan orang-orang di sekitarnya.

Bila kita mengacu pada disparitas sosial, maka kesetiakawanan yang operasional adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Kesetiakawanan yang operasional itulah yang diinginkan oleh suara-suara dalam masyarakat yang menghendaki agar pendekatan terhadap HKSN sebaiknya struktural. Dia mungkin akan memberikan kontribusi terhadap upaya pemerataan yang terkadang buntu di jalur hukum ekonomi.

Pemerataan adalah salah satu cara mencapai keadilan sosial. Kita memang bangga bahwa potensi kekayaan alam baik yang renewable maupun yang unrenewable masih sangat besar. Namun betapapun besarnya potensi itu, dalam konteks pemerataan dia sebenarnya ibarat kue yang besarnya terbatas. Dengan demikian, pemerataan adalah bagaimana membagi kue yang besarnya terbatas itu. ☐

(Laurens Tato)

Digitized by Google

Arus Deregulasi Di Akhir Tahun Dari Pakto, Paknov Hingga Pakdes

Triwulan terakhir tahun 1988 silam rupanya benar-benar tahun paket. Dalam tiga bulan beruntun, pemerintah meluncurkan tiga paket kebijaksanaan. Yang pertama, di penghujung Oktober, tanggal 27, pemerintah menggelar Paket Oktober yang kini lazim disingkat Pakto itu. Sebuah paket baru di bidang moneter, khususnya perbankan. Dan agaknya, paket ini merupakan susulan dari sejumlah paket dalam bidang yang sama sebelumnya, deregulasi Juni 1983 misalnya.

Masih belum selesai kalangan perbankan menyambut paket tersebut, 26 hari kemudian pemerintah menggelar sebuah paket baru lagi: Paket November, lazim disingkat Paknov. Jika Pakto merupakan sarana baru yang memangkas berbagai regulasi yang berbelit-belit di dunia perbankan, Paknov datang untuk memangkas berbagai regulasi yang —setidak-tidaknya di mata pemerintah— menghambat kelancaran lalulintas perdagangan di dalam negeri. Salah satu sarana yang menunjang kelancaran perdagangan di dalam negeri itu antara lain tataniaga pengangkutan barang-barang dengan dan melalui kapal laut. Ini paket kedua di ujung tahun naga itu.

Belum habis orang menyambut Pakto dan Paknov, lima hari menjelang Natal pemerintah menyodorkan satu lagi paket baru, paket ketiga. Dikeluarkan tanggal 20 Desember, paket yang satu ini menghentak dunia pasar modal di dalam negeri. Suatu ladang mobilisasi dana masyarakat yang sejak dihidupkan sepuluh tahun lalu itu tetap saja **merem-melek-merem-melek** dalam etalase rimba bisnis kita, sejak paket itu disodorkan menjadi sangat bergairah. Bukan saja pasar modal sebetulnya yang terangkum dalam paket kebijaksanaan Desember yang lazim disebut Pakdes atau Pakde itu. Lebih dari itu, nampak ia merangkum sejumlah upaya mobilisasi dana melalui lembaga-lembaga keuangan nonbank. Pakdes itu sendiri merupakan paket deregulasi pasar modal, Lembaga Pembiayaan, dan Asuransi.

Maka di triwulan terakhir tahun naga itu lengkaplah sudah upaya pemerintah dengan tiga paket yang digelarnya untuk menunjang kelancaran upaya pembangunan yang sedang berjalan ini.

Tapi apapun cerita di balik itu, kehadiran ketiga paket tersebut merupakan cermin betapa keinginan pemerintah untuk memangkas berbagai regulasi yang sering menghambat proses pencapaian suatu sasaran khusus dan sasaran pembangunan ekonomi pada umumnya, memang benar-benar konsisten. Jadi, bukan sekedar dagelan warung kopi yang mengatakan bahwa keluarnya ketiga paket kebijaksanaan itu hanya untuk menghadapi tahun ular 1989 ini; tahun yang menurut almanak Cina dianggap sebagai tahun sulit dan berbelit-belit itu.

Bahkan sangat kuat kecenderungan di masa-masa yang akan datang pemerintah akan terus-menerus mendobrak berbagai hambatan di bidang lainnya dengan melakukan berbagai deregulasi lagi, dalam bidang apapun. Lagi pula, masyarakat memang senantiasa menunggu-nunggu dan senantiasa berharap-harap pada kesigapan pemerintah untuk memangkas berbagai kebijaksanaan yang dianggap menghambat. Terbukti kehadiran ketiga paket kebijaksanaan itu misalnya mampu mengundang antusiasme masyarakat pada umumnya dan masyarakat dunia usaha khususnya.

Selama ini, memang, disadari atau tidak, secara langsung atau tidak langsung hambatan pencapaian suatu sasaran sering karena beragamnya regulasi yang bahkan antara satu dengan yang lainnya saling tumpang-tindih. Tumpang-tindih karena pengaturannya dilakukan secara partial, sehingga tampak seperti hanya bersifat tambal-sulam. Dan itu hanya mungkin teratasi dengan menurunkan sejumlah kebijaksanaan dalam satu paket sekaligus. Karenanya, dari sisi itulah paket-paket kebijaksanaan yang diluncurkan pemerintah di ujung tahun 1988 silam itu mendapat sambutan positip dari berbagai kalangan.

Paknov

Kebetulan saja ketiga paket di ujung tahun naga itu semuanya menderegulasi bidang keuangan dan perdagangan. Dapat dimaklumi memang. Sebab di tengah-tengah fluktuasi harga migas yang beberapa waktu lalu menjadi sumber pembiayaan pembangunan — dan komoditi itu kini cukup riskan untuk menjadi andalan satu-satunya — pemerintah sudah selayaknya melakukan berbagai upaya lain yang bisa mengantisipasi kekurangan dana itu. Dan yang jelas terlihat adalah peningkatan lalulintas perdagangan komoditi nonmigas melalui Paket November, Pakto dan Pakdes untuk memobilisasi dana dari masyarakat yang selama ini tersimpan di bawah bantal.

Menyambut sambutan kedua paket terakhir — Paknov dan Pakdes — banyak pihak nampak antusias. Walau satu dua di antaranya tak urung menyampaikan sejumlah catatan kecil yang tentu saja seyogyanya mendapat perhatian pemerintah.

Ketika meluncurkan Paket November ke tengah-tengah masyarakat pelayaran nasional dua bulan lalu, Menteri Perhubungan Azwar Anas tak bisa menutup antusiasmenya menyambut dengan mengatakan "Silahkan saja bertarung, semuanya *free fighting*. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran yang memadai. Bagi yang tidak mampu, silahkan minggir."

Paknov itu sendiri se-

Digitized by Google

betulnya bukan sekedar mengatur lika-liku pelayaran nasional atau perhubungan tetapi juga berbagai persoalan yang terkait dengan masalah tersebut. Karena tampaknya kehadiran Paknov itu untuk meningkatkan arus lalulintas perdagangan komoditi nonmigas Paknov pun menjangkau bidang perdagangan, industri dan pertanian sekaligus.

Keseluruhan deregulasi yang termuat dalam Paknov itu meliputi tiga Peraturan Pemerintah, satu Keppres, satu Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Perdagangan, tujuh SK Menteri Perdagangan, dua SK Menteri Keuangan, dan empat SK Menteri Perhubungan.

Mungkin karena penting dan kebutuhan pada kepaduan Paknov itu, tak tanggung-tanggung pula sejumlah menteri sekaligus hadir memberikan keterangan kepada para Pemimpin Redaksi media massa di penghujung bulan November itu. Di sana selain Menko Ekuin Radius Prawiro, Menteri Perhubungan Azwar Anas, Menteri Pertanian Wardoyo, dan Menteri perdagangan Arifin Siregar; hadir pula Menpen Harmoko, Menperind Hartarto, Menpan Sarwono, Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Saleh Afiff, Menkeu Sumarlin, Mensesneg Moerdiono, Menmud Keuangan Nasarudin Sumintapura, Menmud Perdagangan Sudradjat Djiwandono, dan Menmud Perindustrian Tungky Ariwibowo.

Lantas dimana "keterbukaan" yang oleh Azwar Anas dianggap cukup "memadai" itu? Bukan saja cukup memadai sebetulnya, tetapi malah boleh dibilang sangat memadai. Sebab Paknov itu ternyata benar-benar memangkas berbagai regulasi yang menjadi momok di kalangan pengusaha angkutan kapal selama ini.

Tidak tanggung-tanggung, paket kebijaksanaan November itu menghapus ijin trayek bagi angkutan laut di dalam negeri. Lantas pola trayek itu dialihkan dan dibebankan untuk ditetapkan oleh perusahaan pelayaran sendiri. Lebih jauh bahkan ijin perubahan trayek tidak diperlukan lagi. Sebagai gantinya perusahaan pelayaran hanya melakukan kewajiban melaporkan soal perubahan trayek itu untuk tiga bulan berikutnya dengan menyebutkan nama-nama pelabuhan yang disinggahi.

Tinggal Dua

Hal lain yang sangat mendasar ialah terpangkasnya jumlah perizinan. Izin usaha pelayaran yang semula jumlahnya lima buah itu, setelah Paknov tinggal dua buah, yang sekaligus berfungsi sebagai Dispensasi Syarat Bendera (DSB). Dus, jika dikualifikasi, suatu penyederhanaan yang tidak tanggung-tanggung dalam soal perizinan, 60 persen. Ada juga persyaratan yang diperingan, yakni persyaratan usaha. Jika sebelum Paknov usaha pelayaran baru boleh berjalan jika memiliki minimal dua kapal, kini dipangkas menjadi satu kapalpun bolehlah. Jika kapal kurang perusahaan pelayaran tidak perlu repot-repot. Sewa saja (sewa guna usaha atau *leasing*) atau carter saja kapal asing.

Jika sudah begini agaknya tak ada lagi yang dapat mengingkari betapa kehadiran Paknov itu telah menghilangkan sejumlah beban regulasi yang menghambat bertumbuh dan berkembangnya usaha pelayaran nasional. Soal perizinan misalnya, selama ini menjadi obyek kalangan tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang yang tidak kecil.

Disinyalir, dalam urus-mengurus ijin yang dengan biaya mahal itu selama ini sering terjadi permainan un-

LEMBAGA MANAGEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA

Lembaga Management merupakan suatu badan otonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang didirikan pada tahun 1962 sebagai kelanjutan dari Latihan Pembangunan Ketatalaksanaan (Executive Development Program) dan dibina oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1959 dengan bantuan dari Ford Foundation, bekerjasama dengan University of California, Berkeley.

Lembaga Management FEUI memberikan pelayanan berupa Konsultasi, Penelitian, Pendidikan, Penerbitan Majalah "MANAGEMENT DAN USAHAWAN INDONESIA" dan Jasa Rekrutmen serta Seleksi kepada kalangan Usahawan dan Pemerintah. Kedudukan sebagai badan Otonom memungkinkan kepada Lembaga Managemen FEUI ini untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan para langganan.

JALAN SALEMBA RAYA 4,
JAKARTA 10430,
KOTAK POS 404 JKT.
TELP. 330211; 331610; 334142; 337929

Digitized by Google

tuk memperoleh jalur atau trayek gemuk dan menghindari trayek kurus. Akibatnya, mereka yang tak kuat "bermain" bisa gulung tikar. Kehadiran Paknov itu diibaratkan sebagai "melepas belenggu pelayaran nasional." Karena dengan kehadiran paket itu berbagai kekurangan yang berlangsung selama ini bisa dipangkas habis. Tinggal lagi bagaimana kebebasan dan keterbukaan itu tadi dapat dimanfaatkan semaksimal dan seefisien mungkin oleh Kalangan dunia usaha pelayaran sendiri.

Tetapi justru di situlah sejumlah catatan terhadap Paknov tampak ke permukaan. Sejumlah pengusaha pelayaran yang selama ini menangani trayek gemuk misalnya tak urung mengatakan, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah itu bakal mengundang perebutan trayek gemuk yang sekaligus berarti meninggalkan trayek kurus. Disinyalir, ketika bersaing merebut trayek gemuk itulah bakal terjadi pelanggaran-pelanggaran operasional. Karena itu, Hartoto Hadikusumo, ketua INSA Mengharapkan peran pemerintah sebagai wasit resmi untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran operasional.

Di mata ketua INSA itu, Paknov memang positif. "Tetapi secara khusus untuk menghadapi tahap-tahap tertentu perlu diberikan batasan pada kebebasan itu, dan sudah tentu peran pemerintah sangat dibutuhkan," katanya. Dan peran yang ia maksud, ya antara lain itu tadi, kehadiran pemerintah sebagai wasit resmi.

Dirjen Perhubungan Laut sendiri, JE Habibie mengakui pihak INSA telah menghubunginya untuk perannya sebagai wasit resmi dalam sistem trayek tersebut. Tapi, "Saya katakan, bahwa saya tidak punya wewenang untuk itu. Tunggu saja kalau ada Juklak dari menteri,"

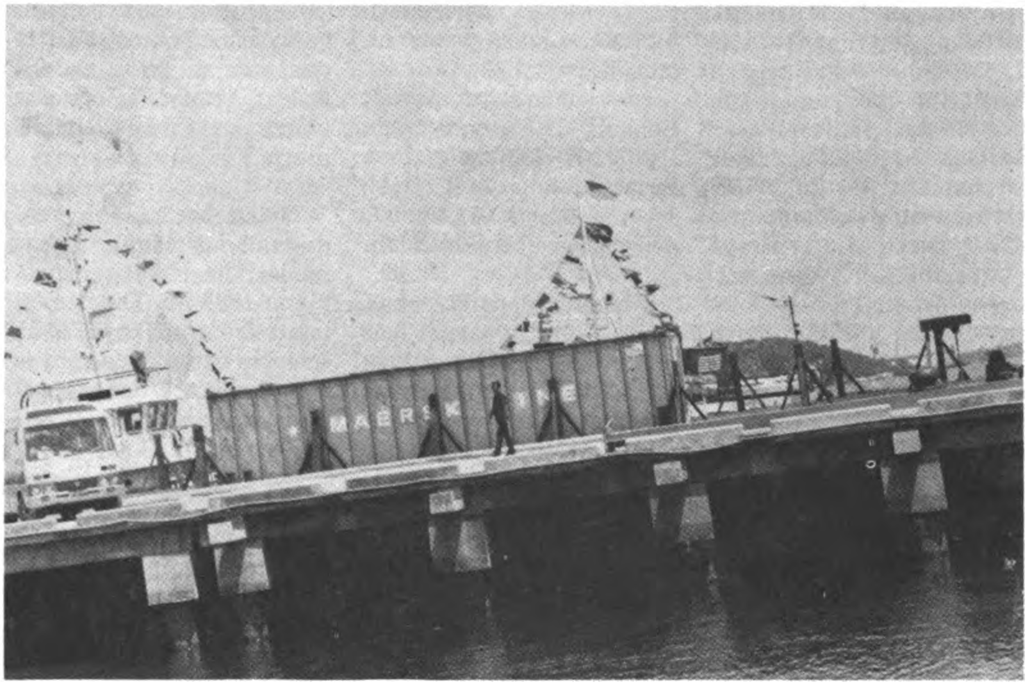

Kelancaran arus barang komoditi nonmigas

kata JE Habibie, sambil memberikan prakiraan bahwa kesibukan *(rush)* kapal-kapal niaga berebut jalur gemuk akan terjadi tiga bulan setelah Paknov 21 dikeluarkan, atau antara bulan Januari hingga Maret 1989.

Boleh jadi karena belum adanya Juklak menteri itu, sebagaimana sedang ditunggu JE Habibie, pihak INSA sendiri untuk sementara sepakat untuk mempertahankan trayek pelayaran yang sudah ada. Sambil menanti Rapat Umum Anggota (RUA) luar biasa yang sedianya berlangsung 9 Januari lalu dan ternyata tertunda itu, konon sikap Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia (INSA) diambil karena dua alasan. Pertama, sistem trayek itu selama ini mampu mengatur ketimpangan pola distribusi barang yang hingga saat ini terjadi di seluruh Indonesia. Disamping itu, kedua, sistem trayek ini juga mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di jalur gemuk dan sekaligus menjaga kemungkinan mengurangi pelayaran di jalur-jalur kurus.

Jika sudah begini, sebetulnya, Paket November 21 itu sebagai salah satu paket deregulasi pada dasarnya tetaplah positip. Tinggal lagi bagaimana para pengusaha pelayaran nasional bisa mengatur dirinya sendiri. Toh sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa jalur-jalur kurus yang bakal dihindari perusahaan pelayaran bakal ditanggulangi pemerintah, dalam hal ini Pelni dengan deretan armadanya. Lagi pula, jika dipahami benar-benar, bagi pemerintah yang lebih penting adalah kelancaran arus barang atau komoditi nonmigas, ketimbang harus selalu memikirkan perusahaan-perusahaan pelayaran yang gurem-gurem dengan kontribusi yang sangat kecil dalam kerangka itu. Karena itu perlu diberi kesempatan untuk bersaing secara lebih bebas dan terbuka dengan memangkas hambatan-hambatan yang ada. Sehingga tak salah jika Azwar Anas bilang "Yang tidak mampu, silakan minggir!" •

Pakdes

Untuk para investor dan traders di bursa, Paket Desember yang diluncurkan Menteri Keuangan Sumarlin tahun silam itu boleh jadi merupakan puncak dari serangkaian upaya deregulasi yang secara langsung mempengaruhi pasar modal.

Sejak dihidupkan kembali sebelas tahun silam, pasar modal kita memang tampak lesu darah, tak bergairah. Selama bertahun-tahun pasar modal diaktifkan kembali, pasar tetap saja sepi. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pernah mencapai titik terendah, turun hingga 66,53 di akhir tahun 1985. Volume perdagangan saham antara tahun 1977-1987 tidak pernah melampaui Rp 57,7 juta. Angka-angka ini disodorkan sekedar menunjuk betapa memang lesunya dunia pasar modal kita.

Tetapi di akhir 1987 kemarin itu, keadaannya justru berbalik. Tak pernah diduga sebelumnya, dunia pasar modal kita menjadi amat bergairah. Suasana pasar modal menjadi begitu ramai. Konon, suasana itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah encim dan encek-encek dari kawasan Kota mengalir ke pasar modal.

Bukan saja semakin banyaknya orang memadati pasar modal, omzetnya pun

Digitized by Google

ternyata merambat naik tak tanggung-tanggung. Tanggal 21 Desember, sehari setelah Sumarlin mengumumkan paket deregulasi *Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan dan Asuransi* itu, IHSG membubung mencapai 422,7. Dan walau beberapa hari kemudian sedikit menurun namun indeksnya tetap di atas 300. Omzetnya menggila, menjadi Rp 4,2 milyar. Mengenai Omzet dan tingginya IHSG itu, Kepala Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), Marzuki Usman cuma bilang "Suatu angka yang tak terbayangkan sebelumnya." Bahkan, 23 Desember lalu 1.003.800 lembar saham Sucaco disapu orang. Dana sebesar Rp 3.504.462.000 dengan cepat berpindah laci.

Menurut Marzuki Usman, loncatan harga saham luar biasa itu disebabkan oleh lonjaknya permintaan. Padahal, katanya, pasar saham di Indonesia masih terbatas, perusahaan yang *go public* baru 24 buah di bursa dan satu di bursa paralel dengan total nilai perdana saham cuma sekitar Rp 200 milyar.

Walau begitu, toh kuat dugaan, suasana pasar modal kita bakal ramai di tahun 1989 ini. Di sisi permintaan tampaknya akan semakin banyak perusahaan yang mencari dana lewat pasar modal itu, sebagai akibat dari naiknya harga saham secara drastis di bulan-bulan terakhir di tahun naga kemarin itu. Apa lagi persyaratan untuk menjual saham dan surat berharga di bursa itu semakin dipermudah. Sementara cukup banyak dana tersedia, termasuk dana yang berasal dari pemodal asing yang belakangan ini mengambil bagian secara aktif di pasar bursa Indonesia itu.

Gong Sumarlin dengan Pakdes-nya itu tampaknya

GOLONGAN KARYA

Dewan Pimpinan Pusat
Golongan Karya

Mengucapkan

Selamat Hari Natal
dan

Tahun Baru 1989

Ketua Umum
Wahono

Sekretaris Jenderal
Ir. Rachmat Witoelar

Digitized by Google

tepat waktu. Sumarlin memang mencari-cari dana jangka panjang guna membiayai investasi. Bahkan jika perlu mengorek-ngorek dana yang ditaruh di bawah bantal begitu saja. Sementara masyarakat yang menyimpan uangnya toh juga memerlukan sarana untuk memutar uangnya. Dan klop saja dengan prakondisi yang dilakukan oleh paket-paket kebijaksanaan sebelumnya, Pakto misalnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal memang sedang naik daun setelah melalui Pakto 27, penangguhan atas pajak bunga deposito dicabut. Dengan begitu, deviden maupun deposito sama-sama kena pajak. Cuma, jika deviden kena pajak progresif 15,25 dan tertinggi 35 persen deposito hanya kena pajak final 15 persen. Tapi bagi pemegang uang, bermain di pasar modal dalam kondisi pajak seperti itu toh belum tentu rugi. Malah, siapa tahu, untung seratus persen? Mungkin saja jika di pasar modal.

Maka keluarnya Pakdes itu agaknya tidak bakal siasia untuk kepentingan mobilisasi dana dari masyarakat. Tujuan Pakdes itu, "memobilisasi dana masyarakat. Supaya dana itu tidak ngang gur percuma di bawah bantal maka Pasar Modal perlu dideregulasi. "Swasta diberikan kesempatan mendirikan pasar modal sehingga perusahaan yang ingin memperoleh pembiayaan gampang mendapatkan sarananya," kata Marzuki Usman.

Ada kesan memang akhir-akhir ini dana jangka panjang untuk membiayai investasi agak seret. Banyak yang ketarik ke bank-bank sejak diberlakukannya deregulasi perbankan 1 Juni 1983. Walau pada mulanya deregulasi itu hanya mampu menumpuk jumlah deposito Rp 3 trilyun, kini khabarnya angka-angka itu sudah mencapai Rp 21 trilyun. Sialnya, sebagaimana dana deposito, sebagian besar tertumpuk pada simpanan jangka pendek. Padahal di sisi lain permintaan kredit jangka panjang begitu banyaknya.

Lantas Sumarlin pun mengais-ngais dana jangka panjang melalui Paket Desember itu tadi, untuk mencari alternatif pembiayaan jangka panjang. Dan itu berarti harus melakukan deregulasi di pasar modal. Untuk itu, Pakdes bakal memperkenankan ruang gerak untuk diadakan swastanisasi pasar modal. Walau tidak berarti "sesuka hati" dalam menyelenggarakan bursa efek karena sejumlah pembatasan yang memang mutlak perlu, swastanisasi itu toh mengisyaratkan betapa memang deregulasi itu dibuat sedemikian rupa sehingga tetap mampu meraih sasarannya. Ya itu tadi, dana dari masyarakat.

Melalui Pakdes itu pemerintah juga mendorong munculnya berbagai lembaga pembiayaan jangka panjang misalnya *Leasing*, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga (Securities Company), *Factoring* (Anjak Piutang), Credit Card Company dan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company). Dengan sejumlah pembatasan yang memang dianggap perlu, alat-alat ini juga dimaksud sebagai bagian dari usaha mobilisasi dana dari masyarakat.

Tidak cukup sampai di situ, Paket Desember itu juga berupaya untuk menjaring dana lewat perusahaan-perusahaan asuransi. Artinya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan kelonggaran-kelonggaran tertentu diharapkan industri asuransi kita dapat memainkan perannya yang lebih besar dalam rangka memobilisir dana-dana dari masyarakat itu.

Caranya, membuka kembali izin usaha baru pendirian usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker asuransi, usaha adjuster, dan usaha aktuaria. Bahkan untuk menggairahkan industri asuransi ini, larangan yang pernah dikeluarkan tahun 1983 — pertanggungan tidak boleh dengan dolar Amerika — kini boleh dilakukan dengan valuta asing.

Dunia industri asuransi yang nyata-nyata memang menjadi sumber pembiayaan jangka panjang selama ini memang nampak kurang digali secara efektif. Konon, hanya 2 persen dari 170 juta jiwa warga negara kita yang ikut asuransi. Suatu prosentase yang cukup jauh berbeda dibanding Filipina dan Muangthai yang 7 persen penduduknya mengikuti asuransi. Walau begitu, Dirut Bumiputera1912, Sugiarto memperkirakan dengan Pakdes 20 persaingan bisnis asuransi bakal meningkat. Dengan deregulasi orang diharapkan semakin suka pada asuransi. Makin banyak yang ikut makin banyak dana terkumpul.

Tapi di atas semuanya itu, salah satu khabar yang menggembirakan, konon, dengan Paket Desember itu, keaktifan pihak asing dalam pasar modal Indonesia sejak beberapa waktu belakangan ini akan bakal meningkat pula di masa yang akan datang. Sejumlah *fund manager* asing terkemuka seperti Nomura dan Flemming sudah membeli saham melalui pialang bursa. Dan itu berarti "Pihak asing mulai percaya akan masa depan Indonesia setelah melihat usaha serius pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian lewat paket deregulasi dan debirokratisasinya," kata Marzuki Usman. Sementara Sumarlin bilang "Juga untuk menunjukkan, kita sudah cukup mantap dalam mengelola moneter. Ini merupakan sinyal kepada investor dan kreditur luar negeri." Akankah? Kita tunggu hasilnya di paruh pertama tahun ular ini. (LT)

P.T.Inbritex

astra

tiger

Digitized by Google

Paket Kebijakan 27 Oktober 1988

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi yang telah ditempuh sebelumnya, pemerintah mengambil langkah kebijakan baru. Kebijakan baru yang diambil pada 27 Oktober 1988 yang baru lalu merupakan paket kebijakan di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yang oleh masyarakat pers dipopulerkan dengan istilah "Pakto", akronim dari Paket Kebijakan Ekonomi Oktober 1988.

Pakto dituangkan dalam 49 ketentuan yang terdiri atas Keputusan Presiden, pelbagai Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direksi Bank Indonesia dan seperangkat surat-surat edaran yang berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan keputusan.

Materi Pakto terdiri atas lima kelompok pengaturan yang secara keseluruhan berisi kemudahan kepada para perbankan dan lembaga keuangan nonbank untuk bergerak lebih leluasa dalam meningkatkan kegiatan termasuk peluang untuk mendirikan bank, baik bank nasional maupun bank campuran antara Indonesia dan asing. Bahkan dana BUMN dan BUMD bukan bank yang tadinya harus ditempatkan dalam bank-bank pemerintah, kini diperbolehkan untuk ditempatkan pada bank swasta dan lembaga nonbank, namun tidak boleh melebihi 50 persen dari dana yang ditempatkan. Likuiditas wajib minimum untuk perbankan, yang tadinya 15 persen, dengan kebijakan baru diturunkan menjadi hanya 2 persen dari jumlah kewajiban kepada pihak ketiga.

Kebijakan baru juga memberikan kesempatan kepada bank-bank devisa untuk memperluas jangkauan operasinya sehingga dunia perbankan pada hakikatnya di satu pihak memperoleh kesempatan untuk beroperasi dengan jangkauan yang lebih luas dengan dukungan berbagai kemudahan, di lain pihak bank-bank dan lembaga keuangan non bank dituntut untuk bekerja lebih efisien karena kompetisi pengerahan dana dari masyarakat makin ketat.

Kebijakan baru itu menerapkan pengenaan pajak sebesar 15 persen atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Pajak ini dipotong oleh bank dan langsung disetor ke kas negara. Sifat pengenaan pajak ini final dengan kemungkinan bisa diminta kembali atau restitusi jika masih di bawah batas keharusan kena pajak.

I. Sasaran

Kebijakan di bidang keuangan, moneter dan perbankan itu diambil dengan tujuan untuk makin meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor nonmigas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, dan iklim pengembangan pasar modal.

II. Pengerahan Dana Masyarakat

Langkah kebijakan dibidang pengerahan dana masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut: ***1. Kemudahan Pembukaan Kantor Bank:*** a. Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional maupun Bank Koperasi yang telah ada diberi kemudahan untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. b. Syarat pembukaan: Bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir dalam 20 bulan tergolong sehat termasuk permodalannya dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong sehat. c. Untuk pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya dibawah kantor cabang dapat dilakukan cukup dengan memberitahukan kepada Bank Indonesia.

2. Pembukaan Kantor Cabang LKBB; a. LKBB diperkenankan untuk mendirikan satu kantor cabang di masing-masing kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan Denpasar. b. Syarat pembukaan: LKBB yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir minimal dalam 20 bulan tergolong sehat termasuk permodalannya dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat.

3. Pendirian Bank Swasta Baru: a. Pendirian bank umum dan bank pembangunan oleh swasta nasional dan koperasi dibuka kembali. b. Syarat-syarat: (1). Untuk bank umum dan bank pembangunan swasta, modal disetor minimal Rp 10 milyar. (2). Untuk bank umum dan bank pembangunan koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib minimal Rp 10 milyar. c. Bank tabungan dan bank perkreditan rakyat yang telah ada dapat ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi syarat-syarat permodalan (ad b.)

4. Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat; a. Bank perkreditan rakyat dapat didirikan di kecamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi dan ibukota Dati II. b. Syarat permodalan: (1). Untuk yang berbentuk hukum PT atau PD, modal disetor minimal Rp 50 juta. (2). Untuk yang berbentuk hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib minimal Rp 50 juta.

c. Bank perkreditan rakyat boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan, tanpa izin dari Menteri Keuangan, tetapi harus melaporkan kepada Bank Indonesia setempat. d. Bank perkreditan rakyat dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

e. Bank perkreditan rakyat yang telah ada di ibukota negara, ibukota propinsi atau di ibukota Dati II harus ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan, atau dipindahkan ke kecamatan. Batas waktu penyesuaian tersebut adalah 2 tahun sejak berlakunya peraturan.

5. Penerbitan Sertifikat Deposito; a. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang selama ini tidak diizinkan untuk menerbitkan sertifikat deposito, sekarang diperkenankan dan tidak diperlukan izin baik dari Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia. b. Penerbitan sertifikat deposito

Digitized by Google

oleh bank tidak lagi memerlukan izin.

6. Perluasan Tabungan; Semua bank dapat menyelenggarakan program Tabanas dan tabungan lain.

III. Peningkatan Ekspor Nonmigas.

Peningkatan ekspor nonmigas memerlukan pelayanan perbankan yang makin baik dan lebih luas. Untuk ini diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

(1). Perluasan Bank Devisa; a. Syarat untuk menjadi bank devisa diperingan, yaitu: hanya dikaitkan dengan tingkat kesehatan, di mana bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir minimal 20 bulan tergolong sehat serta volume usahanya harus mencapai sekurang-kurangnya sebesar Rp 100 milyar. b. Cabang-cabang dari bank devisa nasional yang semula perlu izin untuk berfungsi sebagai bank devisa, kini dapat secara otomatis berfungsi sebagai bank devisa. Bank devisa yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Bank Indonesia.

(2). Pendirian Bank Campuran; Dibuka kemungkinan untuk mendirikan bank campuran dengan syarat: a. Didirikan bersama oleh satu atau lebih nasional Indonesia dan satu atau lebih bank asing di luar negeri, b. Bank nasional yang dapat ikutserta mendirikan harus selama 24 bulan terakhir, minimal 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya tergolong cukup sehat, termasuk permodalannya. c. Bank asing yang dapat menjadi partner dalam bank campuran adalah bank asing yang: (1) telah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia; (2) termasuk peringkat besar di negara asalnya; (3) negara asalnya menganut asas resiprositas.

d. Modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50 milyar, di mana penyertaan pihak bank nasional minimal 15 persen dan pihak asing maksimal 85 persen.

e. Bank campuran dapat memilih tempat kedudukan di salah satu dari kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujungpandang dan Denpasar.

f. Setelah 12 bulan sejak didirikannya, posisi kredit ekspor dari bank campuran tersebut harus mencapai sekurang-kurangnya 50 persen dari kredit yang diberikannya.

(3). Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing; a. Bank asing yang telah ada dan tergolong sehat, termasuk permodalannya dapat membuka kantor cabang pembantu baik di Jakarta maupun di 6 kota besar lainnya di luar Jakarta, yakni Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Ujungpandang. b. Setelah 12 bulan sejak dibukanya kantor cabang pembantu, posisi kredit ekspor dari kantor cabang pembantu tersebut harus mencapai sekurang-kurangnya 50 persen dari kredit yang diberikan.

(4). Penyempurnaan Mekanisme Swap; a. Jangka waktu swap diperpanjang dari maksimal 6 bulan menjadi maksimal 3 tahun. b. Premi swap didasarkan pada keadaan pasar, yaitu perbedaan antara rata-rata suku bunga deposito di dalam negeri dan LIBOR. Contoh: rata-rata sukubunga deposito 6 bulan per 30 September 1988: 16,96 persen. LIBOR US dolar 6 bulan per 30 September 1988: 8,69 persen. Perbedaannya sebesar 8,27 persen adalah tingkat premi swap. c. Apabila bank mengenakan premi tinggi, maka premi swap ulang ke Bank Indonesia disesuaikan dengan premi tersebut.

(5). Pedagang Valuta Asing; a. Izin untuk pedagang valuta asing (money changer) yang selama ini hanya berlaku untuk satu tahun, diubah menjadi izin tanpa batas waktu, namun dapat dicabut apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. b. Bank-bank bukan bank devisa juga diperkenankan melakukan usaha pedagang valuta asing. c. Usaha pedagang valuta asing mencakup jual beli uang kertas/logam asing (bank notes) dan pembelian traveller's cheque.

IV. Peningkatan Efisiensi

Dalam rangka peningkatan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, perlu diciptakan iklim berusaha yang lebih mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk dapat bersaing secara sehat. Iklim ini diciptakan melalui:

(1). Penempatan Dana BUMN dan BUMD Bukan bank pada Bank Swasta dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. a. BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan dananya pada semua bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan serta lembaga keuangan bukan bank. b. Penempatan dana tersebut pada bank-bank yang bukan milik Pemerintah

GOLONGAN KARYA

Selamat
Atas Terpilihnya Dewan Pimpinan Pusat
Golongan Karya Masa Bhakti 1988 - 1993

ASTEK
PERUSAHAAN UMUM
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79
Tlp. 5207797 - Jakarta

Digitized by Google

atau Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi 50 persen dari jumlah dana yang ditempatkan. c. Penempatan dana tersebut pada masing-masing bank swasta, tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah dana yang ditempatkan.

(2). Kantor Jumlah Bank dan Kantor Cabang (seperti telah diuraikan pada angka II dan III). a. Kepada semua bank dan LKBB diberi kemudahan untuk membuka cabang. b. Pendirian bank baru, baik bank nasional maupun bank campuran dimungkinkan.

(3). Batas Maksimum Pemberian Kredit. Untuk meningkatkan daya tahan bank dan LKBB dalam memelihara kesehatannya, maka bank dan LKBB dikenakan batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit) kepada debitur dan debitur grup, serta pemegang saham dan pengurus. Adapun maksimum fasilitas pemberian kredit tersebut adalah sebesar: a. 20 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, untuk fasilitas yang disediakan bagi satu debitur. b. 50 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, untuk fasilitas yang disediakan bagi suatu debitur grup. c. 5 persen dari modal sendiri bank atau LKBB untuk fasilitas kredit bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya. d. 15 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, untuk fasilitas kredit bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimiliki-

APKINDO

ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA
(INDONESIAN WOOD PANEL ASSOCIATION)
Forestry Centre, Block IV, Wing A, 9th. floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
JAKARTA – 10270 INDONESIA
Phone : 583011, 583015, 583017, 588623 Telex: 46977 INDWPA IA

ASMINDO

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN & KERAJINAN INDONESIA
INDONESIAN FURNITURE INDUSTRY & HANDICRAFT ASSOCIATION
• JL. PEGAMBIRAN NO. 5A • PHONE 4893056, 4896942 • TELEX 45695 STARTEK IA ATTN ID-0710 • P.O. BOX 289/JAT • JAKARTA 13001
• GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV LANTAI 8, JL. JENDRAL GATOT SUBROTO, SENAYAN - JAKARTA 10270, TLP. 584640-49, EXT. 5455, 5456, 587888, TLX. 46977 IWPA IA FAX. 583017

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
GEDUNG PUSAT KEHUTANAN "MANGGALA WANABAKTI" LANTAI 9, WING C, Km. 925 – BLOK IV
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO, SENAYAN – JAKARTA 10270 – INDONESIA
TELEPON 584640 - 584649 PESAWAT 5433

PERHIMPUNAN PENGUSAHA KILANG KAYU TERPADU INDONESIA (ISA)
(INDONESIAN SAWMILLERS & WOOD PRODUCT MANUFACTURERS' ASSOCIATION)
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV, LANTAI 9, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO,
SENAYAN, JAKARTA 10270, KOTAK POS 50 JKWB. TLP. 583018, TELEX 62448 ISA. IA.

MENGUCAPKAN :
SELAMAT ATAS TERPILIHNYA
BAPAK LETJEN. TNI. (PURN) WAHONO
Sebagai Ketua Umum DPP Golkar
dan
BAPAK Ir. RACHMAT WITULAR
Sebagai Sekretaris Jenderal
DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA
MASA BHAKTI 1988 - 1993

Digitized by Google

nya. e. 10 persen dari jumlah penyertaannya pada bank atau LKBB, bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya. f. 25 persen dari penyertaannya pada bank atau LKBB, untuk fasilitas kredit bagi pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan. g. Jumlah kemampuan pengembalian dari pendapatan yang berasal dari bank atau LKBB yang bersangkutan, bagi anggota direksi dan pegawai.

V. Peningkatan Kemampuan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Dalam rangka peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, dipandang perlu untuk menyempurnakan beberapa peralatan kebijakan moneter sebagai berikut:

(1) Likuiditas Wajib Minimum: a. Likuiditas wajib minimum untuk perbankan diturunkan dari 15 persen menjadi 2 persen dari jumlah kewajiban kepada pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan). b. Likuiditas wajib sebesar 2 persen dari jumlah kewajiban pada pihak ketiga juga berlaku bagi LKBB. (2) Operasi Pasar Terbuka: a. SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan yang berjangka panjang sampai dengan 6 bulan. b. Lelang SBI yang sekarang hanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berupa lelang harian, ditambah dengan lelang tetap mingguan. c. Pembelian dan penjualan SBPU oleh Bank Sentral dilakukan secara lelang. d. Dilakukan penyempurnaan penyediaan fasilitas diskonto. e. Batas maksimum pinjaman antar bank (15 persen dari dana pihak ketiga) ditiadakan.

VI. Iklim Pengembangan Pasar Modal

Dalam rangka peningkatan pengembangan pasar modal diperlukan antara lain perlakuan perpajakan yang seimbang terhadap penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan terhadap penghasilan dari saham/surat berharga lainnya.

Langkah-langkah untuk tujuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pajak atas bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Tabungan;

a. Terhadap bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif 15 persen dan bersifat final dengan kemungkinan restitusi.

b. Apabila penghasilan wajib pajak (WEP) termasuk bunga deposito ternyata termasuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu misalnya penghasilannya sampai dengan Rp 2.880.000,00 per tahun untuk keluarga dengan tiga anak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan restitusi.

c. Tetap ditangguhkan pengenaan PPh atas penghasilan yang berasal dari bunga: (1) Tabanas/Taska; (2) Simpedes; (3) Tabungan Uang Muka Pemilikan Rumah (TUM-KPR); (4) Tabungan Naik Haji (TNH); (5) Tabungan kecil lainnya. d. Terhadap sumber dan asal-usul deposito serta tabungan tetap tidak diadakan pengusutan fiskal (Keppres Nomor 68 Tahun 1983) dan 2. Peningkatan Partisipasi Bank dan LKBB dalam menunjang Pasar Modal.

Perluasan modal Bank dan LKBB dapat dilakukan dengan cara penerbitan/penjualan saham baru melalui pasar modal disamping peningkatan penyertaan oleh para pemegang saham yang ada.

Restitusi

Sehubungan dengan ketentuan bahwa pajak yang dikenakan bagi bunga deposito yang tidak terkena wajib pajak, pemerintah kini sedang menyiapkan prosedur sederhana bagi penabung kecil. Bahkan lebih dari itu, pemerintah sedang mengusahakan adanya restitusi otomatis. Restitusi otomatis itu akan diberikan kepada penabung yang mempunyai bunga deposito maksimal Rp 10.000 per bulan.

Bagi mereka yang terkena PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) atas bunga deposito di atas Rp 10.000 per bulan, permohonan restitusi diajukan ke Kantor Inspeksi Pajak dengan mengisi formulir dan kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan akan memproses surat keputusan memperoleh restitusi paling lambat satu bulan. Dengan surat keputusan itu, yang bersangkutan dapat memperoleh atau menguangkan restitusinya di bank. ☐

(Sgt/SK)

pertani

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN PT. PERTANI (PERSERO)
MENGUCAPKAN

SELAMAT ATAS TERPILIHNYA

BAPAK LETJEN. TNI (PURN) WAHONO

Sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR

Beserta

SELURUH JAJARAN DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLKAR

MASA BHAKTI 1988 - 1993

Kantor Pusat
Jalan Pertani No. 1 s/d 6 Durentiga
Kalibata PO. Box 247 KBY Jakarta Selatan
Telepon. 7993108 (5 saluran)
Telex. 47249 PERTAN IA.

Digitized by Google

Kunjungan Pengawasan Wapres di Jawa Tengah

Dari Deregulasi Sampai Uang Hansip

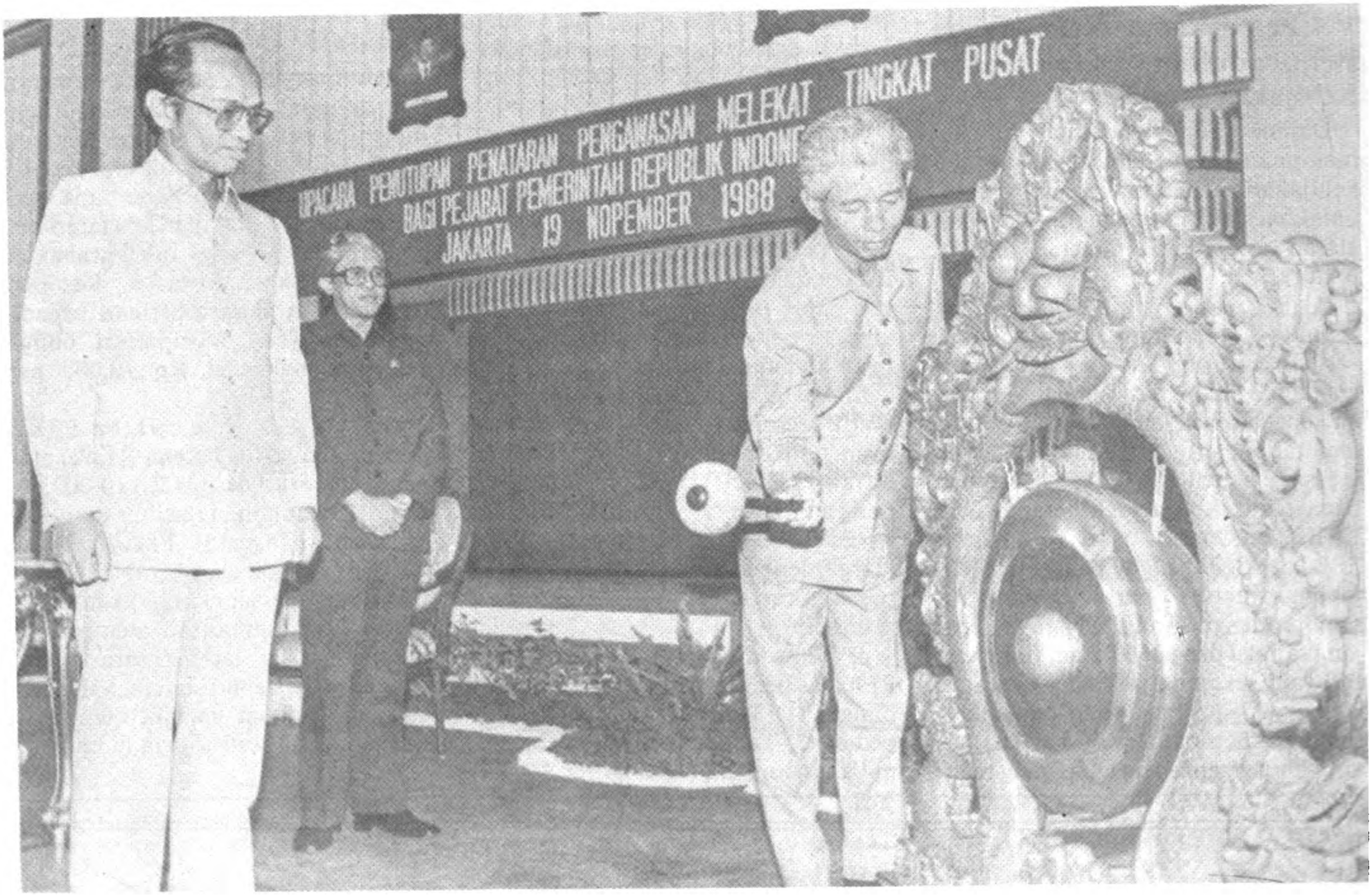

Harus sering turun ke lapangan

Tugas pengawasan yang dibebankan oleh Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden Sudharmono SH, bukan pekerjaan ringan. Pengawasan yang dalam Kabinet Pembangunan V diberi bobot sama dengan perencanaan dan pelaksanaan, ternyata telah menyebabkan Wapres Sudharmono harus sering turun ke lapangan memimpin rapat dinas dan berdialog langsung dengan aparat terkait di daerah guna memperoleh "the first hand information" tentang berbagai masalah.

Semenjak dipilih rakyat menjadi Wakil Presiden dalam Sidang Umum MPR Maret tahun lalu, terhitung sudah empat kali Sudharmono melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka pengawasan ini. Pertama di Jawa Timur, kedua Aceh, ketiga Jombang dan Pasuruan dan terakhir 16-17 Desember 1988 di Jawa Tengah. Bila rencana kunjungan kerja ke Propinsi Bengkulu pertengahan Januari ini terlaksana, maka itu merupakan kali kelima Wakil Presiden turun ke daerah dalam rangka pengawasan.

Rapat dinas adalah kegiatan yang rutin bagi sebuah instansi pemerintah. Yang agak "luar biasa", mungkin, sebuah rapat dinas di tingkat propinsi bahkan kabupaten dipimpin langsung oleh seorang Wakil Presiden. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah pertengahan Desember itu, Wakil Presiden selain memimpin rapat dinas tingkat propinsi di Semarang juga memimpin rapat serupa di Kabupaten Magelang. Dalam kunjungan kerja di Jawa Timur Agustus tahun lalu, Wapres juga memimpin rapat dinas tingkat kabupaten yaitu di Bojonegoro dan Sidoarjo.

Bagi pemerintah daerah, rapat kerja yang dipimpin langsung oleh seorang Wakil Presiden merupakan kesempatan yang langka. Karena dalam rapat dinas Wakil Presiden selalu membuka dialog dengan para peserta, maka

Digitized by Google

Gairah pembangunan rakyat Jateng terasa lebih tinggi

kemungkinan terkuaknya beberapa informasi daerah baik berupa penyimpangan maupun prestasi, terbuka luas. Oleh karena itu rapat dinas menjadi "pertarungan" tersendiri antara wartawan dengan dinas penerangan setempat yang menginginkan forum dialog terbuka itu "off the record". "Soalnya kita tidak ingin nanti ada berita yang aneh-aneh di surat khabar tentang rapat dinas ini," ujar seorang petugas dinas penerangan Jawa Tengah ketika beradu mulut dengan seorang rekan.

Pemda memang pantas khawatir bila dialog dengan Wapres dalam rapat dinas bisa menjadi bahan berita di surat khabar. Soalnya Wapres menanyakan hal-hal yang menurutnya mungkin terjadi penyimpangan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana. Tidak mengherankan bila ada pejabat kanwil yang menjawab "tidak memiliki data" padahal pertanyaan yang diajukan Wapres menyangkut bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Galang Potensi Daerah

Ketika memimpin rapat dinas di Gedung BPD Jawa Tengah, Semarang, Wakil Presiden menguraikan panjang lebar tentang esensi pengawasan. Pengawasan, kata Wapres, adalah bagian yang sangat penting dari suatu program. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah sebuah rencana dilaksanakan sesuai dengan sasarannya atau tidak.

Beberapa kondisi obyektif baik yang disebabkan oleh faktor ekstern, seperti gejolak harga minyak yang terus merosot serta gejolak kurs sejumlah mata uang kuat dunia ditambah dengan peningkatan kesadaran rakyat tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah, menyebabkan pengawasan terasa semakin penting.

Rakyat yang semakin kritis akibat sukses pembangunan, kian jeli menilai apakah aparat pemerintah telah menunaikan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak. Harga minyak yang terus merosot dalam lima tahun terakhir ini menyebabkan dana yang bisa diperoleh untuk membiayai pembangunan semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan efisiensi dalam segala sektor kegiatan pembangunan menjadi penting.

Penerimaan dari ekspor migas memang terus menurun. Tetapi Indonesia, seperti kata Wapres, memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan daya pembangunan. Untuk itu kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing harus digali dan digalang lewat partisipasi setiap unsur pelaku ekonomi, yaitu swasta, anggota masyarakat dan pemerintah sendiri.

Pemerintah daerah sebagai administrator wilayah bertugas menggalang pelaku-pelaku ekonomi ini agar bergiat melakukan produksi, apa saja. "Oleh karena itu semua peraturan yang berbelit-belit dan bersifat menghambat agar ditiadakan, sesuai dengan semangat deregulasi yang kini sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah pusat," pinta Wapres.

Sebab bila potensi daerah digalakkan melalui peraturan yang mendukung, maka aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat yang pada gilirannya akan merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pajak. "Bila tidak ada kegiatan produksi dan investasi, dari mana pemerintah menarik pajak?".

Laporan Gubernur Jawa Tengah Ismail tentang gerak pembangunan di daerahnya, terutama yang menyangkut delapan sukses memang tidak semuanya mencatat prestasi yang memuaskan. Tapi Wapres nampak gembira bahwa gairah membangun rakyat Jawa Tengah dewasa ini terasa lebih tinggi bila dibanding satu dasawarsa lalu.

Sudharmono hanya memberi catatan khusus tentang pengembangan beberapa potensi nonmigas di wilayah itu yang pada hakekatnya masih bisa ditingkatkan lagi, seperti produksi udang di Jepara dan Banjarnegara dan hasil kerajinan rakyat di Plered.

Nomor 4

Dalam kesempatan itu Wapres Sudharmono juga mengungkapkan bahwa Jawa Tengah menduduki posisi ke-4 dalam jumlah surat/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Tromolpos 5000, setelah DKI, Jawa Timur dan Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memang menyimpan sejumlah masalah

Digitized by Google

Mengecek sendiri sampai seberapa jauh kebenaran yang disampaikan masyarakat

yang harus diatasi. Dan rapat dinas itu, menurut Wapres, diadakan juga dalam rangka mengecek sendiri sampai seberapa jauh kebenaran yang disampaikan masyarakat lewat surat-surat ke Tromolpos 5000.

Setelah diadakan bulan April tahun lalu, hingga sekarang telah masuk ke Tromolpos 5000 sejumlah 13.000 surat. Dari jumlah ini sebagian besar berisi laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan. Dan dari jumlah itu, 60 persen benar. Biasanya surat-surat yang masuk diperiksa. Dan apabila benar, maka kantor Wakil Presiden mengirim surat kepada instansi bersangkutan untuk membereskan keluhan seperti yang tertera dalam surat yang masuk ke Tromolpos 5000 itu.

Sejak dibuka, jumlah surat yang masuk ke Tromolpos ini selalu naik dari bulan ke bulan, termasuk yang datang dari luar negeri. Dari dalam negeri, Tromolpos rata-rata menerima 60 surat setiap hari. Masukan-masukan dari masyarakat lewat tromolpos ini ternyata sangat bermanfaat, dan merupakan salah satu sarana informasi yang menentukan kapan dan kemana Wapres akan melakukan kunjungan kerja berikutnya.

Usai memimpin rapat dinas tingkat propinsi, Wakil Presiden Sudharmono SH membuka rapat dinas Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh semua unsur pimpinan pemerintah Dati II, termasuk para lurah. Rapat dinas disini dinyatakan off the record, tetapi wartawan yang tidak diperbolehkan memasuki ruangan rapat dinas, bisa mendengar dengan jelas isi dialog di

Membereskan keluhan

Digitized by Google

dalam ruangan, karena gedung pusat pemerintahan kabupaten Magelang yang terletak di Mungkid/Sawitan itu strukturnya seperti stadion yang terbuka cukup lebar di bagian atasnya.

Dalam dialog di tempat ini Wapres menaruh perhatian khusus terhadap bidang pendidikan, kesehatan, koperasi dan pembangunan desa. Untuk bidang pendidikan, pembangunan gedung sekolah, terutama sekolah dasar, terasa cukup, tetapi yang dikeluhkan adalah dana perawatan yang terus menciut dari tahun ke tahun. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sektor kesehatan. Sedangkan di bidang koperasi, Wapres agak terkejut mendengar laporan bahwa di seluruh Kabupaten Magelang hanya terdapat 24 KUD. "Harap lebih digalakkan lagi agar jumlah KUD di Magelang ini terus meningkat," pesannya.

Dialog agak alot, ketika Wapres menanyakan seorang kepala desa tentang dana pembangunan desa yang diterima untuk tahun anggaran 1988/1989. Kepala desa itu mengakui bahwa dana yang diterima sebanyak Rp. 1.500.000. Hanya saja jumlah itu tidak diterima utuh, karena ada pemotongan disana sini, termasuk untuk kegiatan PKK. Kepala desa tersebut begitu berat menyebut jumlah yang persis yang sampai ke tangannya dari pihak kecamatan. Dia hanya mengungkapkan, potongan untuk kegiatan PKK serta dana administrasi lainnya bisa mencapai Rp. 300.000 lebih. Setelah tergagap-gagap menjawab kejaran Wapres tentang dana pembangunan desa ini, akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwa dia hanya wakil kepala desa, sedangkan kepala desa berhalangan hadir. Dengan demikian, maaf, saya tidak mengetahui angkanya yang lebih pasti," ujarnya.

Wapres agaknya menangkap bahwa memang terdapat ketidakberesan dalam penyaluran dana bantuan desa ini. Untuk itu ia berpesan dana bantuan desa harus sampai utuh kepada kepala desa yang berkepentingan. "Tidak ada istilah biaya administrasi itu," tegasnya.

Seorang kepala desa yang lain meminta kepada Wapres agar dana bantuan desa untuk tahun anggaran mendatang hendaknya dinaikkan, karena kepala desa cukup repot mengalokasi dana yang terbatas itu untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk pembayaran hansip. Wapres sambil tersenyum menjawab bahwa pemerintah pada hakekatnya ingin meningkatkan jumlah dana bantuan desa ini, bila keadaan keuangan negara memungkinkan. Namun Wapres memberi catatan khusus kepada kepala desa tersebut bahwa untuk pembayaran hansip, jangan diambil dari dana bantuan desa, tetapi harus digali dana dari masyarakat itu sendiri yang memanfaatkan jasa hansip.

Sementara Wakil Presiden memimpin rapat dinas, Ibu EN Sudharmono baik di Semarang maupun di Magelang mengadakan tatap muka dengan ibu-ibu Dharma Wanita setempat. Dalam pengarahannya Ibu EN Sudharmono selalu menekankan bagaimana para ibu yang tergabung dalam organisasi Dharma Wanita bisa berperanan aktif baik dalam menunjang kerja suami maupun dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan bangsa pada umumnya.

Muktamar Pesantren

Dalam bagian akhir kunjungan dinasnya di Jawa Tengah itu, Wakil Presiden yang didampingi oleh Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono dan Menteri Agama MUnawir Sjadzali serta anggota rombongan lainnya berkesempatan membuka Muktamar III Perhimpunan Pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kabupaten Muntilan.

Di hadapan sekitar 500 peserta muktamar dan para undangan, Wakil Presiden menegaskan bahwa pesantren memainkan peranan yang semakin penting dalam konteks pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu pesantren diminta agar terus meningkatkan partisipasinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya sukses pembangunan.

Sedangkan Ketua Umum PBNU Abdurachman Wahid mengungkapkan bahwa pesantren dengan NU mempunyai hubungan simbiotik yang tak terpisahkan. "NU adalah pesantren kecil, sedangkan pesantren adalah NU besar," ujarnya. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ismail menilai, tema muktamar "Meningkatkan Kualitas Manusia" merupakan acuan yang tepat, karena masalah pembangunan di kemudian hari akhirnya terletak dalam hal mutu manusia itu sendiri.

Menurut Wapres, sebagai lembaga yang tumbuh dan tersebar di tengah-tengah dan di akar-akar masyarakat, pondok pesantren yang semula dikenal sebagai lembaga keagamaan, dewasa ini telah banyak berkembang sebagai lembaga pendidikan yang tidak saja memberikan pendidikan agama, tetapi telah dipadukan dengan pendidikan umum dan ketrampilan yang memberikan manfaat praktis kepada para santri, anak didiknya. "Langkah ini sungguh merupakan kemajuan dan makin dirasakan manfaatnya bagi kehidupan praktis dalam masyarakat," ujar Wapres.

Dalam kunjungan dinas di Jawa Tengah itu, Wakil Presiden dan rombongan juga meninjau KUD Borobudur dan pabrik tekstil Texmaco di Kabupaten Kendal. KUD Borobudur dinilai berhasil karena sanggup memanfaatkan industri jasa pariwisata yang ditimbulkan oleh candi Borobudur, disamping sukses koperasi ini di sektor pertanian dan pengadaan saprodi.

Sedagkan PT Texmaco yang sejak lama telah mengekspor tekstil ke mancanegara dianggap mencatat sukses tersendiri karena berhasil memproduksi mesin-mesin industri, khususnya untuk kepentingan industri tekstil. Sebelum meninggalkan Magelang kembali ke Jakarta via Yogyakarta, rombongan Wapres meninjau candi Borobudur pada senja hari untuk menyaksikan sunset dari candi kebanggaan tersebut. Hanya sayang, mendung tebal yang menyelimuti udara candi sore itu, menyebabkan sunset tidak bisa dinikmati.

Sebuah kunjungan dinas dengan acara yang begitu padat dalam tempo yang singkat, memang menguras tenaga dan pikiran. Aspek pengamanan merupakan salah satu yang meletihkan para petugasnya. Namun kunjungan ke daerah oleh orang nomor dua di negeri ini, ternyata mempunyai manfaat tersendiri. Selain untuk memperoleh the first information dalam rangka pengawasan, kunjungan kerja Wapres ke daerah ternyata mempunyai dampak psikologis yang positif.

Daerah ingin tampil serba sempurna dalam berbagai aspek. Jalan kota yang tadinya berlobang-lobang terlihat mulus lewat kerja siang malam. Ketimpangan-ketimpangan yang bisa tertangkap mata telanjang dibereskan segera. Kota dan kabupaten dikunjungi nampak bersih dan teratur.

Rakyat di daerah bukan saja butuh informasi, tetapi komunikasi. Dan kunjungan ke daerah oleh Wapres memenuhi kebutuhan mereka akan komunikasi itu. Bila kesempatan berkomunikasi dengan rakyat di daerah semakin reguler, alangkah baiknya.☐ (LT)

Digitized by Google

Tiap Negara Memiliki Kesadaran Hak Asasi

Empat puluh tahun lalu, tepatnya 10 Desember 1948, PBB mencatat sebuah peristiwa yang pantas digoresi tinta emas yaitu disyahkannya apa yang dikenal dengan *Declaration on Human Rights* (Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia). Kini setelah 40 tahun banyak orang terusik untuk mengevaluasi, sudah sampai sejauh mana perkembangan hak asasi manusia di tiap-tiap negara yang menjadi anggota PBB?

Menjawab pertanyaan seperti ini memang tidak mudah. Hak asasi manusia belum dihormati secara sempurna hampir di semua negara di dunia ini, termasuk negara-negara

Barat yang mengklaim diri sebagai kampiun di bidang ini.

Karena ada yang merasa lebih baik menghormati hak asasi pada yang lain, maka tidak mengherankan jika ada sejumlah negara yang menuduh bahwa negara lain mengabaikan hak asasi manusia. Pada masa pemerintahan Jimmy Carter, presiden AS yang satu ini, menggunakan hak asasi sebagai bargaining politik dengan pihak Soviet. Bargaining dengan subyek hak asasi ini pun dipergunakan AS dan sejumlah negara MEE untuk menyalurkan bantuan ke negara-negara berkembang yang di mata mereka paling rajin bahkan berstruktur dalam pelanggaran hak asasi. Lembaga seperti

Digitized by Google

Amnesti Internasional pun merasa berhak untuk melakukan evaluasi pelaksanaan hak asasi di berbagai negara, sehingga terkadang penilaian mereka membuat negara-negara bersangkutan berang. Lembaga independen ini dicap telah melanggar kedaulatan negara lain dengan mencampuri urusan dalam negeri orang. Ini prinsip yang asasi dalam hubungan antar negara.

Declaration on Human Rights sebenarnya sebuah kesepakatan moril anggota PBB untuk memiliki komitmen yang kukuh dalam penghargaan terhadap hak asasi. Atau lebih sederhana, deklarasi ini sebenarnya rincian daftar hak asasi manusia yang diharap bisa menjadi patokan dalam pelaksanaannya. Deklarasi itu sendiri tidak menggurui bagaimana hak asasi seharusnya dilaksanakan, karena PBB juga yakin bahwa tidak ada negara atau pemerintahan di dunia mana saja yang begitu gigih mencampakkan hak asasi warganya.

Dalam sistim pemerintahan, negara-negara yang menganut sistim demokrasi dianggap sebagai negara yang paling sempurna menghargai hak asasi warganya. Sistim-sistim totaliter dengan demikian dicap sebagai sistim yang mencurangi hak asasi. Benarkah demikian?

Bila menilai hak asasi dalam semangat perbandingan konfrontatif, maka tema yang satu ini akan mengundang perdebatan panjang. Kita ingat bahwa negara-negara yang kini mengklaim diri sebagai jagoan hak asasi (umumnya negara Barat) dahulu adalah negara-negara kolonial yang membangun penjajahan bersistim. Tetapi pada saat negara-negara bekas jajahan berusaha membangun diri dari puing-puing penjajahan, mereka malah dicap melanggar hak asasi. Mereka yang pesimis terhadap derap pembangunan di negara berkembang menilai pembangunan telah kehilangan tujuan utamanya, karena yang terjadi justru *a continuing process of becoming less human*.

Bagaimana dengan di Indonesia? Kita sependapat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang begitu sempurna menghormati hak asasi manusia, dan tidak ada negara yang menciptakan sistim yang sengaja menginjak hak asasi warganya. Setiap negara menghormati hak asasi dengan karakter sistim dan persepsinya masing-masing. Uni Soviet misalnya, menghormati hak asasi seperti termaktub dalam alinea penutup mukadimah konstitusinya yang antara lain berbunyi "telah dilahirkan hak milik masyarakat atas alat-alat produksi dan demokrasi yang sejati bagi kaum pekerja."

Dalam mukadimah UUD 1945 terbaca jelas bahwa "sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena dia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Semangat UUD 45 pun tidak mengamanatkan pembentukan sistim negara sebagai klasse staat. Negara kita adalah negara Pancasila yang berasaskan kekeluargaan. Esensi kekeluargaan adalah penghargaan yang sangat utuh terhadap hak asasi.

Faham kebebasan yang dikembangkan di Indonesia bukanlah kebebasan seperti yang berlaku di negara barat dimana kebebasan individu menjadi tujuan utama. Namun jangan lalu timbul anggapan, kemerdekaan seperti yang dicantumkan dalam mukadimah UUD'45 tidak ada tempat bagi kebebasan perorangan. Tidak! Kebebasan perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa.

Penjabaran Pancasila

Dengan demikian, kata Joewono, Ketua umum Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PUSBHADI), hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaknya diperjuangkan sebagai penjabaran dan pengamalan Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi "Perikemanusiaan yang adil dan beradab", bukan berdasar deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB.

Oleh karena itu menurutnya Indonesia perlu ikut memperjuangkan pelaksanaan hak asasi manusia yang bukan didasarkan pada deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB, melainkan Pancasila.

Hak Asasi Manusia (HAM), dalam usianya yang ke 40, menjadi menarik untuk diperhatikan. Berbagai tokoh dan pengamat masalah sosial dan para pelaku di bidang hukum juga angkat bicara. Belum lama ini, sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta menyelenggarakan diskusi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tentu, hal ini untuk menggali lebih dalam, sejauh mana pelaksanaan hak asasi manusia ini sudah berjalan.

Mahbub Djunaidi dalam sebuah ceramahnya di Lembaga Bantuan Hukum, belum lama ini menyoroti prospek realisasi hak asasi manusia. "Sebenarnya Indonesia tidak mempunyai masalah. Dengan falsafah Pancasila, maka persoalan kebebasan pendapat dan demokratisasi di segala bidang sudah terjawab secara konsepsional. Mungkin yang menjadi soal adalah derajad pelaksanaannya.

Kemudian Dr. TB Simatupang, mengenai masalah HAM ini lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan HAM dalam perjalanannya selama 40 tahun ini. Ia mengatakan, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai rumusan yang pada dasarnya menunjukkan pengakuan perlindungan terhadap HAM, namun, kata Simatupang, selama perjalanan bangsa ini masih terdapat pelanggaran -pelanggaran terhadap HAM tersebut. Baik itu secara disengaja maupun tidak.

Menurutnya, agar "kecelakaan" tidak sering terjadi, Indonesia harus memperbaharui komitmennya terhadap berbagai rumusan tentang perlakuan dan perlindungan HAM, yang pada dasarnya sejalan dengan deklarasi universal PBB.

Albert Hasibuan juga demikian. Dia menilai bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia perlu mendapat perhatian, karena, pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM tersebut masih saja terjadi. Kemudian, Albert yang pernah berjuang untuk pembebasan Sengkon dan Karta ini menilai, sektor ekonomi, hukum perlu mendapat perhatian ekstra.

Namun, Roeslan Abdulgani, salah seorang tokoh dari generasi tua ini menyoroti aparatur pemerintah. Dia mengatakan, Indonesia perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh dan menilai apakah pengakuan terhadap hak asasi manusia ini sudah berjalan dengan baik atau belum.

Untuk mendorong ke arah penyempurnaan pelaksanaan HAM tersebut, aparatur pemerintah harus berinisiatif. Mereka, kata Roeslan, harus diingatkan agar dalam menjalankan *security approach* juga memperhatikan harkat dan martabat warga negara sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang manusiawi.☐ (BM)

Digitized by Google

Pendidikan di Jawa Barat :

Berpacu Dalam Keselarasan Kualitatif dan Kuantitatif

Pendidikan adalah sektor yang amat pelik. Kerumitan dalam sektor ini tidak saja menyangkut aspek kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Tetapi menurut Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, Drs Tating Karmadinata,seni dalam pendidikan justru terletak disini, yaitu bagaimana mengusahakan imbangan antara diwujudkannya pembangunan pendidikan yang berpedoman pada asas pemerataan, dus kuantitatif, serentak dengan usaha peningkatan mutu pendidikan (kualitatif). "Sungguh bukan seni bila pendekatan selektif dan diskriminatif dalam pengelolaan pendidikan dibenarkan hanya karena alasan pemeliharaan mutu," ujarnya.

Asas keselarasan antara mutu dan pemerataan ini mengacu pada amanat UUD 1945 yang menyatakan, "tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran." Dan syukur bahwa amanat UUD itu kini mulai terlaksana, karena anak usia sekolah (7-12 tahun) telah memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan sekolah dasar lewat ketentuan wajib belajar.

Bagaimana di Jawa Barat? Tating Karmadinatamembeberkan setumpuk data di sektor pendidikan ini yang mencerminkan upaya Kanwil Depdikbud di propinsi ini mencari perimbangan antara tuntutan mutu pendidikan dan asas pemerataan. Tentu upaya di sektor pendidikan ini dilaksanakah dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait.

Dari data-data yang dikemukakannya, terlihat peningkatan luar biasa di bidang prasarana sekolah, jumlah murid dan guru untuk berbagai jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar sampai menengah, termasuk pendidikan kejuruan.

Untuk sekolah Taman Kanak-Kanak yang pada tahun 1984/85 baru mencapai 1953 buah, pada tahun 1987/88 (akhir pelita IV) melonjak menjadi 2051 buah, dengan jumlah murid sebesar 116.497 orang dan guru 7050 orang. Padahal dalam tahun 1984/85 jumlah murid TK di Jawa Barat baru 99.657 orang, dan guru 4282 orang. Peningkatan sekolah TK yang begitu pesat menyebabkan di Jawa Barat sekarang ini TK tidak hanya monopoli kota-kota besar saja tetapi sudah menjamur hingga di desa-desa.

Peningkatan juga terlihat di sektor sekolah dasar. Jika pada tahun 1984/85 jumlah sekolah dasar adalah 22.677 buah dengan murid 4.512.716 dan guru 151.789 orang, maka pada akhir Pelita IV jumlahnya meningkat menjadi 24.271 SD, 4.813.899 siswa dan 175.404 guru. Sekolah dasar telah ada di semua desa, dan secara kuantitatif telah mendekati kebutuhan.

Sedangkan jumlah SMP negeri maupun swasta pada akhir Pelita IV mencapai 2088 buah dengan siswa 804.557 orang serta guru 18.483 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu, maka sampai dengan akhir Pelita IV ini telah dibangun 32 unit laboratorium IPA, 37 unit perpustakaan sekolah, 51 unit ruang ketrampilan, 1271 set alat ketrampilan dan 968.904 eksemplar buku untuk perpustakaan.

Sementara itu untuk SMA negeri maupun swasta (akhir Pelita IV) mencapai 786 buah, dengan menampung 289.957 siswa serta mempekerjakan 7532 guru. Untuk menunjang peningkatan mutu SMA dibangun juga 11 unit gedung baru, 7 unit laboratorium IPA, 6 unit perpustakaan SMA dan 5 unit ruang ketrampilan, 432 unit laboratorium bahasa, 584 set alat ketrampilan SMA serta 224.087 eksemplar buku perpustakaan SMA.

Di bidang pendidikan menengah kejuruan pada tahun ajaran 87/88 terdapat 64.069 siswa STM, 68.827 siswa SMEA dan 7161 siswa sekolah kejuruan lainnya. Selama Pelita IV telah dibangun 7 STM, 2 SMT Pertanian dan 5 SMEA. STM itu dibangun di Purwakarta, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Kuningan dan Garut. Sedangkan 2 SMT Pertanian dibangun di Subang dan Garut dan SMEA di Rangkasbitung, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta dan Bandung. Sedangkan sekolah kejuruan yang dikelola swasta terlihat ada peningkatan luar biasa untuk SMEA yang pada akhir Pelita III baru berjumlah 73 buah, pada akhir Pelita IV ini menjadi 111 buah. Untuk memenuhi kekurangan tenaga guru, selama Pelita IV ini telah diangkat 960 guru baru. Dan untuk peningkatan mutu guru, telah ditatar 1503 guru.

Khusus mengenai pendidikan guru (SPG negeri maupun swasta) terdapat 76 buah, SGO negeri dan swasta 14 buah, dengan jumlah siswa 34.325 untuk SPG dan 6983 untuk SGO.

Luar Sekolah

Tugas dan aktivitas pendidikan tidak saja terbatas pada kegiatan belajar mengajar di bangku sekolah. Untuk kegiatan luar sekolah yang bersifat pembinaan generasi muda Kanwil Depdikbud Jawa Barat telah melakukan sejumlah kegiatan, antara lain latihan kepemimpinan bagi para pengurus OSIS sebanyak 600 orang di tingkat kabupaten dan kotamadya, sedangkan di tingkat propinsi diikuti 200 orang. Juga melaksanakan program pertukaran pemuda antarpropinsi, program pertukaran pemuda Indonesia-Australia, Indonesia-Kanada dan juga mengikutkan pemuda Jawa Barat dalam program Kapal Pemuda ASEAN.

Selain itu Kanwil Depdikbud juga telah menerbitkan hasil penelitian tentang Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Jawa Barat dan Sejarah Pendidikan Jawa Barat. Juga telah dibuat patung tiga tokoh sejarah daerah Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Haji Prawatasari dari Bogor dan Bagus Rangin dari Majalengka.

Untuk pelestarian kebudayaan, maka selama Pelita IV telah dilakukan sejumlah upaya seperti pemugaran

Digitized by Google

Gua Sunyaragi di Cirebon, pemugaran kompleks prasasti Astana Gede di Ciamis, pemugaran Kompleks Megalih Gunung Padang di Cianjur serta pemugaran kota lama Banten di kabupaten Serang.

Di bidang pendidikan masyarakat giat digalakkan pemberantasan tiga buta dengan peserta kejar paket A sebanyak 1.329.736 orang, kejar usaha biasa 16.260 kelompok, Kejar Usaha induk 120 kelompok dan magang 3600 orang, latihan penilik 1700 orang dan tutor 17.280 orang. Berkat upaya itu, maka peserta program ini berhasil menjuarai sejumlah perlombaan baik di tingkat propinsi maupun nasional.

Peningkatan Mutu

Sektor pendidikan memang mencakup spektrum aktivitas yang cukup luas dan rumit. Khusus mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat, Tating Karmadinata mengatakan bahwa langkah yang ditempuh Jawa Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu diambil sejumlah langkah seperti pemerataan tenaga pendidik secara kualitatif maupun kuantitatif. Langkah ini menurutnya diambil karena berdasarkan penelitian, terdapat kepincangan penyebaran tenaga guru. Ada wilayah yang kelebihan guru, sementara wilayah lain sekolah-sekolah kekurangan guru. Langkah pemerataan ini dilakukan dengan pendekatan manusiawi, sehingga guru secara sadar mau bertugas di wilayah yang membutuhkan guru, tanpa menimbulkan keluhan bagi yang bersangkutan.

Peningkatan mutu pegawai

Hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan mutu pegawai, sehingga aparat Depdikbud Jawa Barat nantinya siap melaksanakan program-program yang mengarah ke peningkatan mutu pendidikan dalam Pelita V nanti. Para guru pun diikutkan dalam program penataran tentang kurikulum dan pengetahuan lainnya, sehingga selalu up to date dengan perkembangan dan tuntutan yang tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta dilaksanakan akreditasi.

Tetapi pada akhirnya, mutu pendidikan, demikian Tating Karmadinata, tergantung pada dukungan semua pihak yaitu instansi yang terkait, orang tua murid dan masyarakat pada umumnya. ☐ (LT)

PT TASPEN (PERSERO)

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 812/KMK.03/1988 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 842 - 1 - 755 PT TASPEN (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan Pembayaran Pensiun Wilayah Jawa dan Madura yang pelaksanaannya dimulai pada bulan April 1989.
2. Pembayaran Pensiun dibayarkan kepada Pensiunan yang berasal dari :
   - 2.1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
   - 2.2. Purnawirawan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil Hankam yang dipensiun sebelum 1 April 1989.
   - 2.3. Pejabat Negara.
   - 2.4. Veteran Republik Indonesia.
   - 2.5. Perintis Kemerdekaan Kebangsaan/Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Jenis Pensiun yang dibayarkan meliputi :
   - 3.1. Pensiun sendiri.
   - 3.2. Pensiun Janda/Duda.
   - 3.3. Pensiun Janda/Duda yang diberikan kepada anak Yatim/Piatu dan anak Yatim Piatu.
   - 3.4. Pensiun orang Tua.
   - 3.5. Uang Tunggu.
4. Pembayaran pensiun oleh PT TASPEN (Persero) dapat berjalan lancar, tepat waktu apabila Pemangku Delegasi Wewenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pensiun atau dari Biro Kepegawaian Instansi calon pensiunan mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Pertama beserta lampiran yang terdiri dari :
   - a. S.K.P.P.S.
   - b. Pas photo 4 lembar ukuran 4 x 6 tanpa tutup kepala.
   - c. Daftar susunan keluarga.
   - d. Photo copy K.P.T (bagi Pegawai Negeri Sipil).
   - e. S.K. Pertama.

   kepada Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero) sesuai dengan domisili terakhir calon pensiunan yang terdapat dalam S.K. Pensiun.
   Perlu diketahui bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil, pembayaran Pensiun Pertama akan dibayarkan sekaligus dengan pembayaran Tabungan Hari Tua.
5. Pengalihan Pembayaran Pensiun dari K.P.N./K.K.N. kepada PT TASPEN (Persero) masih tetap mempedomani ketentuan/prosedur yang selama ini berjalan, dengan demikian diharapkan para pensiunan tidak mengalami keresahan.
6. Waktu pembayaran adalah sebagai berikut:
   - a. Tanggal 4 s/d 7 sebagai hari utama.
   - b. Tanggal 8 s/d 9 sebagai hari cadangan.
   - c. Tanggal 10 s/d 20 hari pembayaran bagi yang belum menerima pensiun pada hari utama dari hari cadangan pembayaran.
7. Kantor Bayar adalah:
   - a. Kantor Pos & Giro.
   - b. Bank Pembangunan Daerah.
   - c. Bank Rakyat Indonesia.
   - d. Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (PERSERO)
8. a. Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO).
   - — DKI Jakarta, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih.
   - — Bandung, Jl. Diponegoro No. 23.
   - — Semarang, Jl. Pandanaran No. 123 A.
   - — Surabaya, Jl. Diponegoro No. 182.

   b. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO)
   - — Yogyakarta, Jl. Atmo Sukarto No. 2 - 4.

 Digitized by Google

Mendung Masih Menggantung Tapi Tidak Suram dan Gelap

Presiden Soeharto dalam pidato menyambut Tahun Baru 1989 yang disiarkan TVRI ke seluruh penjuru tanah air menegaskan, umum Indonesia selama 1988 menunjukan bahwa mendung perekonomian masih menggantung, tapi semestinya tidaklah suram dan gelap "karena kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya."

Dengan pikiran jernih demikian Kepala Negara, kita mengambil pelajaran berharga dari segala peristiwa dan pengalaman di sepanjang tahun yang baru saja lewat.

Dengan wawasan sejarah pelajaran itu tidak kita tarik secara terpisah dan tersendiri, melainkan dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa dan pengalaman masa sebelumnya.

Dengan sikap bijaksana pelajaran yang kita tarik kita jadikan bekal untuk melanjutkan perjuangan bangsa.

Selama perjalanan bangsa dan negara, kita terus menerus mengembangkan wawasan mendasar yang luas dan dalam, dengan melihat jauh ke depan dan berpikir dalam kerangka dunia. Dalam perjuangan bangsa, kita tidak henti-hentinya melakukan penyegaran. Pengembangan wawasan dan penyegaran inilah yang menjadi kekuatan hidup bangsa kita, dan akan mewarnai langkah-langkah yang akan kita tempuh di tahun 1989 dan dalam tahun-tahun yang akan datang.

Tahun 1988 kita lewati dengan rasa lega, dalam suasana kegembiraan, keakraban dan kesegaran. Tahun 1989 kita songsong dengan penuh harapan dan semangat juang berwawasan sejarah dalam upaya kita untuk terus giat melaksanakan pembangunan.

Di tahun 1988 kalbu kita diliputi suasana kegembiraan, karena kita bersama telah berhasil menyelenggarakan Sidang Umum MPR secara lancar, sukses dan selamat, berkat tekad kita untuk terus mengembangkan tradisi konstitusional kita. Hati kita diselimuti suasana keakraban dan persaudaraan, karena keputusan Sidang Umum MPR yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat, telah kita tuangkan

Presiden Soeharto

dengan ikhlas dan pikiran jernih dalam semangat persatuan dan kesatuan nasional yang makin kokoh. Kesegaran kita rasakan karena dalam menjawab tantangan dan aspirasi baru kita mampu mengembangkan wawasan mendasar yang semakin luas dan dalam.

Jawaban terhadap tantangan dan aspirasi baru telah kita rumuskan dalam konsensus nasional, yang dituangkan di dalam GBHN 1988 dan keputusan-keputusan MPR lainnya. Jawaban itu akan selalu kita pegang dalam setiap langkah yang akan kita tempuh, dalam memenuhi tugas utama dan mewujudkan kebulatan tekad kita bersama untuk mengisi cita-cita kemerdekaan melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Dan GBHN 1988 telah memberikan arah yang makin jelas bagi pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Dengan GBHN 1988 itu makin bulat tekad kita semua bahwa pembangunan yang kita pikirkan, pembangunan yang kita laksanakan, bukanlah sembarang pembangunan; melainkan pembangunan nasional yang harus selalu berlandaskan Pancasila dalam melanjutkan, meningkatkan dan memperbaharui perjuangan bangsa.

Yakin Akan Berhasil

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang harus selalu berlandaskan Pancasila, tahun 1988 kita tinggalkan dengan rasa lega. Kita merasa lega, karena setelah dua dasawarsa membangun, ada tanda-tanda yang jelas bahwa kita akan berhasil meletakkan kerangka landasan pembangunan dalam Repelita IV yang beberapa bulan lagi akan kita akhiri. Selanjutnya kita akan maju selangkah lagi dalam menghadapi tugas baru untuk memulai memantapkan landasan pembangunan itu.

Dengan keberhasilan peletakan kerangka landasan di bidang ideologi dan politik, maka tingkah laku dan budaya politik lama telah dapat kita gantikan dengan yang baru, yang bersuasana kekeluargaan dan lebih bermartabat. Tingkah laku dan budaya politik lama, yang didasarkan pada anggapan bahwa politik adalah pembentukan dan pengerahan kekuatan untuk memenangkan diri dalam adu kekuatan, terbukti mengandung benih-benih yang dapat memecah belah serta menimbulkan ketegangan, pertentangan dan pergolakan bangsa. Sebaliknya, dalam tingkah laku dan budaya politik baru, pengerahan kekuatan sosial politik dapat kita pusatkan untuk bersama-sama memberikan sumbangan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang sebaik-baiknya, dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam suasana kekeluargaan.

Kita merasa lega, karena, walaupun dihadang oleh rintangan dan hambatan serta berbagai pukulan berat yang datang dari luar, kita bersama telah berhasil meletakkan kerangka landasan di bidang ekonomi. Tahun 1988 kita lewati dalam situasi ekonomi yang relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan membaik. Kerangka landasan di bidang ekonomi ini mutlak kita perlukan dalam rangka mencapai sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Ini merupakan konsekuensi logis penetapan bidang ekonomi sebagai titik berat pembangunan jangka panjang.

Kerangka landasan bidang ekonomi yang kita letakkan bersama mempunyai landasan ideologis yang kokoh

Digitized by Google

dengan ditetapkannya secara konstitusional pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan makin berakar pada nilai-nilai sosial budaya kita sendiri serta pada struktur ekonomi yang makin tangguh.

Kita juga merasa lega, karena dengan kerangka landasan politik yang kita letakkan, mekanisme kepemimpinan nasional dapat kita pelihara sesuai dengan aturan-aturan konstitusional.

Proses regenerasi terus berlangsung secara wajar dan alamiah dalam suasana kekeluargaan secara tertib, teratur, lancar dan penuh pengertian. Kita bersyukur bahwa selama ini Generasi Pembebas dan Generasi Penerus telah bekerjasama bahu-membahu, dengan kesadaran tanggung jawab bersama untuk melangsungkan regenerasi secara sebaik-baiknya. Kedua generasi itu berjuang berdampingan bahu-membahu karena memiliki konsepsi, persepsi dan pegangan serta tolok ukur yang sama mengenai pembangunan nasional.

Kesemuanya tadi berhasil kita capai berkat kekokohan bangun politik yang kita susun, kemantapan ketahan nasional yang kita kembangkan dan keberhasilan pembangunan disemua bidang yang kita capai. Semua perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita yang terjadi hingga akhir tahun 1988 telah memberikan keyakinan kepada kita bahwa proses peralihan ketahap pemantapan kerangka landasan serta era tinggal landas, dan proses regenerasi dalam kehidupan bangsa dan negara, akan dapat berlangsung tertib, lancar dan teratur. Keyakinan inilah yang akan menjadi bekal dan kekuatan kita dalam menyongsong tahun 1989.

Di sela-sela kelegaan, di akhir tahun 1988 ini hati kita diliputi keprihatinan dan kesedihan karena terjadinya bencana alam yang melanda beberapa wilayah Tanah Air kita dan beberapa negara lain, yang telah merenggut nyawa manusia dan kerusakan harta benda. Walaupun keadaan kita sendiri masih serba terbatas, namun panggilan kemanusiaan telah mendorong kita mengulurkan tangan meringankan beban penderitaan bangsa lain dan sebagai ungkapan rasa keprihatinan bangsa Indonesia.

Bertambah Tangguh

Dari sekarang kita menyadari sedalam-dalamnya bahwa dalam tahun 1989 yang segera kita masuki, kita masih tetap akan menghadapi masalah-masalah sosial ekonomi yang besar dan tantangan-tantangannya yang berat.

Kita memang telah mengambil langkah-langkah penyesuaian, sehingga struktur ekonomi kita makin sehat dan kuat dengan topangan kekuatan sendiri yang makin luas. Kita bertambah tangguh dalam meredam goncangan-goncangan yang datang dari luar. Namun kita harus siap siaga berjaga-jaga dan waspada, sebab pukulan dan goncangan ekonomi dunia, bila nanti muncul, masih akan terasa berat bagi kita.

Walaupun kita bersyukur bahwa telah tercapai kesepakatan OPEC, kita belum dapat memastikan bahwa tingkat harga rata-rata minyak bumi di tahun yang akan datang tidak lebih rendah dari tahun ini. Perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang asing yang kuat di dunia juga masih belum menentu.

Kita memang telah mulai berhasil menganekaragamkan sumber-sumber penerimaan negara dan devisa dalam era pasca minyak. Penerimaan negara dan ekspor nonmigas telah makin besar; melampaui penerimaan negara dari ekspor migas. Namun pengaruh migas masih besar dalam perekonomian negara kita. Setiap satu dolar penurunan harga minyak bumi berakibat besar bagi anggaran negara dan penerimaan devisa.

Karena belum ada jaminan mantapnya harga minyak bumi dan karena belum ada tanda-tanda mantapnya nilai tukar sejumlah mata uang asing yang kuat di dunia, maka kita harus selalu menjaga anggaran negara dan neraca pembayaran dengan penuh kewaspadaan.

Sementara itu, membaiknya perkembangan perekonomian di tahun-tahun terakhir Pelita IV akan kita pertahankan, terutama karena kita telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat dan dinamis melalui rangkaian langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi. Dengan terpeliharanya stabilitas moneter dan stabilitas neraca pembayaran, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan makin bangkit dan makin luas. Oleh karena itu kita dapat menyongsong tahun 1989 ini dengan rasa lega, walaupun menghadapi kemungkinan pukulan dari luar dan keterbatasan keuangan negara.

Tahun 1989 yang kita masuki ini, mempunyai makna khusus bagi perjalanan bangsa dan negara kita. Beberapa bulan lagi, kita akan merampungkan peletakan kerangka landasan pembangunan. Setelah itu kita sambung dengan melaksanaan Repelita V, yang akan merupakan pemantapan kerangka landasan yang telah kita letakkan dalam Repelita IV. Repelita V merupakan tahap penutup bagi Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama; sekaligus ancang-ancang persiapan ke era tinggal landas yang menjembatani tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Pada akhir tahun ini kita bersyukur bahwa kita sudah mempunyai gambaran akan dapat menyelesaikan tugas kita bersama dalam melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama.

Pembangunan kita khususnya dan pembangunan semua bangsa umumnya memerlukan suasana yang damai. Harapan perdamaian di kawasan sekitar kita nampak lebih terang dengan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah Kampuchea. Di berbagai kawasan dunia masih terdapat ketegangan yang tidak habis-habisnya, terutama di kawasan Timur Tengah, dan kita berharap bahwa pendekatan-pendekatan ke arah penyelesaiannya dapat membawa hasil. Sementara itu kita merasa lega bahwa telah terdapat saling pendekatan di antara negara-negara adi kuasa, yang kita harapkan akan lebih memantapkan lagi peredaan ketegangan di dunia.

Gambaran umum di akhir tahun ini menunjukkan bahwa mendung perekonomian masih menggantung. Namun gambaran tahun depan semestinya tidaklah suram dan gelap, karena kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahkan, kalau angin segar sempat menghalau awan gelap perekonomian dunia, kita dapat mengharapkan masa yang cerah.

Kita akhiri perjalanan dalam tahun 1988 ini dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rakhmat dan keselamatan kepada bangsa Indonesia.

Marilah kita masuki tahun 1989 dengan membulatkan tekad untuk bekerja sebaik-baiknya dan dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas, untuk meningkatkan disiplin nasional serta untuk mengembangkan dan mempertebal rasa kesetiakawanan sosial. Marilah kita masuki tahun 1989 dengan tekad untuk menanggulangi bersama masalah yang akan kita hadapi. □

Digitized by Google

Penyelesaian Masalah Pertanahan Harus Dilakukan Secara Manusiawi

Masalah tanah/keagrariaan hingga sekarang masih merupakan problem yang sangat rumit. Berbagai ketimpangan masih terdengar di mana-mana, dari masalah ganti rugi yang tidak dibayarkan sampai dengan sertifikat ganda pada sebidang tanah sehingga tanah yang sama bisa dijualbelikan si pemilik berulang kali. Belum lagi penyerobotan tanah-tanah rakyat oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan spekulasi maupun untuk kepentingan pribadi.

Kerumitan dalam masalah pertanahan ini seperti lingkaran yang tak ada ujung pangkalnya. Maka ketika Mendagri Rudini mensinyaliradanya bandit bandit tanah masyarakat seakan mendapat angin segar bahwa tindakan di bidang pertanahan ini bakal diambil pemerintah. Dan benar juga, Direktorat Agraria kini dihapus dan diganti dengan Badan Pertanahan Nasional yang diketuai oleh Ir Sony Harsono.

Masalah pertanahan seperti diakui oleh Dr Ir M Nad Darga Talkurputra, Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat, adalah persoalan yang ruwet. "Tapi untuk kasus-kasus pertanahan di Jawa Barat, bila ada perselisihan maka selalu diusahakan agar penyelesaiannya dilakukan secara manusiawi dengan tetap melindungi rakyat yang lemah ekonominya," ujarnya.

Kasus-kasus pertanahan di Jawa Barat, menurutnya, disebabkan oleh berbagai faktor. Sertifikat ganda misalnya, terjadi karena belum ada atau belum lengkapnya peta pendaftaran tanah di tiap-tiap kabupaten/kotamadya, sehingga setiap pengeluaran surat ukur/gambar situasi dan sertifikat hak atas tanah tidak bisa diplot ke dalam peta. Dengan demikian bila ada pengukuran dan sertifikat tanah yang telah ada sertifikatnya, kurang bisa diketahui letaknya yang tepat.

Selain itu administrasi pertanahan di desa umumnya belum tertib, sehingga bisa terjadi bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait seperti kepala desa, camat dsb, ganda. Di samping itu memang adanya kesengajaan dari para oknum dan spekulan yang ingin mencari keuntungan dari sertifikat ganda.

Dr Ir M Nad Darga Talkurputra

Untuk mencegah hal serupa ini, maka kepada seluruh kantor Agraria Dati II/kotamadya dikirimkan alat deteksi (alat ultra violet) untuk mengecek keaslian blanko sertifikat. Selain itu menertibkan penyimpanan arsip dan warkah-warkah serta buku tanah. Juga dilakukan pembinaan kepada para petugas Agraria agar memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi.

Dia mengakui bahwa dalam beberapa kasus pertanahan di Jawa Barat, terlibat di dalamnya oknum-oknum Agraria sendiri. "Tapi setiap oknum Agraria yang diketahui terlibat dalam masalah tanah, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Bandit-bandit tanah seperti yang disinyalir oleh Rudini pun ada di Jawa Barat. Talkurputra menunjuk kasus Jakasampurna di Bekasi yang kini sedang diproses oleh pengadilan sebagai contoh sinyalemen Rudini itu. Dia juga mengakui bahwa masalah tanah di Tangerang, Bekasi dan Bogor yang semuanya ada di wilayah Jawa Barat, cukup ramai. Bagaimanapun juga penyelewengan atau manipulasi tanah harus diselesaikan. Untuk menangani ini semua harus dipisahkan kasus-kasus mana yang bisa diselesaikan secara kasustis dengan menggunakan cara fungsional teknis seperti pengadilan, atau melalui tim khusus Agraria untuk kasus-kasus yang bersifat strategis.

Masalah tanah yang muncul, tidak hanya menyangkut sertifikat ganda. Kelambatan pengeluaran sertifikat oleh kantor-kantor Agraria pun banyak dikeluhkan. Menurutnya, kelambatan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya permo-

Pembinaan kepada petugas Agraria

Digitized by Google

Menyelesaikan kasus pertanahan harus ditempuh cara yang manusiawi

honan sertifikat oleh pemilik tanah tidak dilengkapi dengan semua syarat yang diminta. Kelambatan ini bisa saja terjadi akibat kealpaan si pemohon, maupun karena kelambatan dari instansi yang terkait seperti dari kelurahan dan kecamatan. Sementara itu menurut PP 10/1961, untuk melakukan gambar ukur harus dengan syarat contradictoir delimitasi (pengukuran itu harus disaksikan oleh tetangga sebelah menyebelah). Tetapi dalam praktek sulit menghadirkan para tetangga ini.

Sedangkan sengketa tanah antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan pengusaha, menurutnya, sering timbul karena bukti pemilikan tanah belum dijamin kepastian hukumnya. Selain itu unsur spekulasi dari oknum-oknum tertentu pun berpengaruh dalam sengketa itu.

Untuk menjamin kepastian hukum pemilikan atas tanah, maka di Jawa Barat selama Pelita IV dilaksanakan sistim Prona yang meliputi 20 kabupaten dan 4 kotamadya yang mencakup 901 kecamatan dengan 1567 desa. Prona yang menghabiskan biaya lebih dari Rp 2 milyar itu, berhasil menyelesaikan 197.165 sertifikat.

Salah satu cara untuk mencegah kasus-kasus pertanahan ini ialah dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah pertanahan dan pembangunan kepadamasyarakat,mengadakan koordinasi yang baik dengan instasi terkait serta mencegah secara dini agar tidak munculnya para bandit dan mafia tanah yang pada gilirannya merugikan para pemilik. Caranya? Tidak lain kecuali menegakkan peraturan yang berlaku. Dan Kanwil Agraria Jawa Barat ini tetap berpegang pada pendirian bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan harus ditempuh cara-cara yang manusiawi dengan tetap melindungi rakyat yang lemah ekonominya.

Profil

Luas wilayah Jawa Barat adalah 44.354,61 km2. Dari luas wilayah ini, 916 ha adalah hutan produktif, sedangkan untuk perkebunan baik swasta nasional maupun asing atau patungan, termasuk perkebunan daerah sampai dengan Oktober 1988 tercatat sebanyak 378 buah perkebunan dengan luas keseluruhan 311.363,54 ha. Dari seluruh perkebunan tersebut yang berstatus HGU ada 267 buah dengan luas 133.323,66 ha, sedangkan yang belum ber-HGU ada 111 buah dengan luas 178.039,87 ha. Dengan demikian perkebunan memakan 7,47 persen dari seluruh luas Jawa Barat.

Pemanfaatan selengkapnya luas tanah wilayah Jawa Barat adalah: perkampungan 349.962,44 ha (7,89%); sawah 1.193.224,63 ha (26,90%); tegalan/ladang 385.954,41 ha (8,70%); kebun campuran 844.825,73 ha (19,05%); tanah tandus/rusak 8.862,53 ha (0,20%); padang rumput 53.671,03 ha (1,21%); danau/kolam/rawa 99.828,83 ha (2,25%); hutan 916.436,96 ha (20,66%) dan untuk industri 15.608,69 ha (0,35%).

Menurut Talkurputra luas ideal untuk hutan di Jawa Barat seharusnya 30 persen dari total wilayah. Ini berarti masih dibutuhkan 10 persen lagi luas wilayah yang dibutuhkan untuk hutan.

Jumlah HGU yang dikeluarkan di Jawa Barat sampai dengan saat ini adalah 268 buah Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jawa Barat dan Surat Menteri Dalam Negeri dengan luas 135.897,696 ha. Sedangkan HGU yang dipergunakan secara baik sebanyak 310 buah untuk perkebunan/perikanan dan peternakan dengan luas 274.719,725 ha atau 88,23 persen. Sementara HGU yang ditelantarkan ada 68 buah perkebunan dengan luas 36.643,817 ha atau 11,8 persen.□ (LT)

Digitized by Google

Sotion Ardjanggi, Ketua Umum Kadin

Probosutedjo, salah seorang pengusaha nasional terkemuka mundur menjelang final pemilihan Ketua Umum Kadin. Sotion Ardjanggi, mantan Dirjen Aneka Industri menjadi mulus menduduki jabatan paling terhormat dalam wadah tersebut. Mengapa Probo Mundur?

Munas Kadin (Kamar Dagang dan Industri), yang dilaksanakan 15-17 Desember lalu, agak lain dari biasa. Calon-calon yang akan duduk dalam kepengurusan wadah tersebut, tidak hanya dari pengusaha swasta. Namun, dua calon dari wadah yang lain juga ikut mengambil peranan dalam Munas tahun ini. Sebagaimana diketahui, bahwa Kadin setelah mempunyai Undang-Undang yaitu UU No.1 Tahun 1987, keanggotaannya tidak hanya dari pengusaha swasta saja. Akan tetapi dua pelaku ekonomi lain, yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Koperasi, ikut didalamnya.

Bertambahnya, dua wadah pelaku ekonomi dalam Kadin, menjadikan pemilihan, khususnya Ketua Umum bertambah seru dan hangat. Masing-masing kubu, kecuali Koperasi mencalonkan jagonya. Dua kubu, yaitu Swasta dan BUMN bersaing ketat untuk menarik simpatisan dari peserta Munas tersebut, seperti para pimpinan Kadinda (Kamar Dagang dan Industri Daerah), serta tokoh-tokoh lain yang dianggap mempunyai pengaruh.

Munas yang berlangsung selama 3 hari ini, seolah menjadi ajang perebutan di antara dua kubu yang menginginkan jagonya terpilih menjadi orang yang paling terhormat dalam organisasi tersebut. Swasta, mencalonkan pengusaha nasional yang sukses dan mempunyai reputasi Internasional. Dia, adalah H Probosutedjo, yang dalam kepengurusan sebelumnya menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Kadin, untuk mendampingi Sukamdani Sahid Gitosardjono (Ketua Umum Kadin selama dua periode sebelumnya).

Tampilnya, H Probosutedjo dalam pemilihan Ketua Umum Kadin ini, memang tidak sendirian. Beberapa pengusaha nasional yang sukses ada di belakangnya. Misalnya, Sukamdani, dengan terang-terang menyatakan berada di bawah Probo, Tony Agus Ardie dan bahkan Eric Samola, yang kini juga menjabat Bendahara DPP GOLKAR jauh-jauh hari telah menyatakan sikapnya dan mendukung Probosutedjo duduk sebagai Ketua Umum Kadin.

Di tengah santernya persaingan yang ketat dari calon lainnya, yaitu Sotion Ardjanggi, dari kubu BUMN dan semakin dekatnya waktu yang dinanti-nantikan, secara mendadak, Probo menyatakan mundur dari kompetisi. Dengan demikian, berakhirlah kompetisi sebelum pertandingan dimulai. Dan Sotion Ardjanggi memenangkan kompetisi itu dan duduk di kursi yang paling terhormat dalam organisasi tersebut.

Bukan Pertama

Meskipun demikian, munculnya Ardjanggi di pucuk pimpinan itu dilalui dengan penuh liku dan kerja keras para pendukungnya. Sotion, yang selama Munas berlangsung dan tidak pernah muncul itu terus saja memonitor jalannya Munas di kamar suit dimana Munas itu berlangsung. Sotion selain didukung oleh BUMN,

Sotion Ardjanggi

pengusaha swasta seperti Bob Hasan, dan pengusaha lainnya juga mendapat restu dari Menteri Perindustrian, Hartarto.

Namun, yang kemudian menjadi buah bibir adalah mundurnya Probo, menjelang pertandingan final dimulai. Gaya Probo yang mengundurkan diri pada saat-saat terakhir pemilihan pengurus Kadin, bukan baru kali ini. Dua kali Munas yang lalu, Probo juga mundur dari pencalonan. Pertama tahun 1982, Probo mundur sebelum pemungutan suara. Namun, Sukamdani tetap memberi jabatan terhormat, yaitu Wakil Ketua.

Tiga tahun berikutnya — juga dalam Munas Kadin — Probo juga sempat membuat heboh pendukungnya dengan menyatakan pengunduran dirinya dalam pencalonan bursa Ketua Umum, yang kemudian diralatnya dan ikut kembali dalam perebutan kursi terhormat dalam wadah tersebut. Dalam pemilihan, Probo dikalahkan saingan beratnya, yaitu Sukamdani Sahid Gitosardjono. Dalam pemilihan demokratis ala Kadin ini, Probo dikalahkan dengan angka tipis, yaitu 5 suara.

Lagi-lagi dalam Pemilihan tahun ini, Probo yang didukung oleh Sukamdani kembali mundur sebelum pelaksanaan pemilihan dimulai. Kenapa?

Dalam sebuah pertemuan di kamar President Suit No 601 Hotel Horison, secara dramatis Probo menyatakan pengunduran dirinya dan mengemukakan alasannya. "Pengunduran saya dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Kadin dan untuk memenuhi permintaan dari atas" walau permintaan itu bukan paksaan.

Kemudian dalam bagian lain keterangannya, seusai pengumuman kepengurusan DPH Kadin Indonesia, Probo, mengucapkan maaf kepada para pendukungnya. "Saudara-saudara tidak perlu kecewa, meski saya tidak menduduki ketua umum. Saya mundur demi dunia usaha. Disamping itu demi kemajuan koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pembangunan nasional. Yang penting, BUMN jangan diswastakan dan pe-

Digitized by Google

serta daerah dapat pulang tanpa ada tekanan" ujar Probo.

Pengunduran Probo dalam perebutan ketua Umum ini menjadi buah pembicaraan di kalangan peserta Munas dan mengundang berbagai komentar. Baramuli, misalnya pengusaha nasional yang kini duduk di Ketua Kopwir (Koperasi dan Wiraswasta) DPP GOLKAR itu mengatakan, "Pak Probo tokoh yang arif dan berjiwa besar. Beliau tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan yang lebih luas.

Sedangkan Sri-Edi Swasono, Ketua Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) yang juga dekat dengan Probo ini mengatakan, pengunduran diri Probosutedjo, sebagai cerminan jiwa besar Pak Probo. Sebenarnya, kata Edi Swasono, Koperasi ingin jadi juru damai antara kubu Swasta dan BUMN. Namun, ternyata yang jadi juru damai itu Pak Probo sendiri yang dengan jiwa besar mengundurkan diri menjadi Ketua Umum.

Namun ada juga yang merasa kecewa atas pengunduran dirinya itu. Seperti yang dikatakan salah satu anggota Kadin yang enggan disebut namanya, pengunduran Pak Probo sebagai sangat mengecewakan. Untuk yang ketiga kalinya, Pak Probo mundur dari pencalonan Ketua Umum Kadin pada saat yang terakhir. "Pengunduran diri kali ini benar-benar menghancurkan unsur swasta, yang selama ini mendukung Probo secara penuh" katanya.

H. Probosutedjo

Bagaimanapun, semua ini telah terjadi. Apa yang selama ini menjadi pembicaraan, tentang pengunduran diri Probo, telah berakhir dan Sotion Ardjanggi, mantan Dirjen Aneka Industri yang dicalonkan dari unsur BUMN, telah terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masa bhakti tiga tahun mendatang, yaitu 1988-1991.

Perhatian Pemerintah

Sejak awal, Kadin dinyatakan sebagai patner pemerintah. Dalam Munas Kadin tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memberi perhatian cukup besar terhadap wadah pengusaha ini. Terbukti, sejumlah menteri hadir dan memberi pengarahan.

Perhatian lain yang tidak kalah menariknya, yaitu Munas yang berlangsung di Hotel Horison ini, dibuka langsung oleh Wapres Sudharmono. Dan Presiden Soeharto sendiri, juga menaruh perhatian cukup besar. Hal ini terbukti, ketika Ketua Dekopin (Dewan Koperasi Nasional) Sri-Edi Swasono menghadap Presiden menjelang Munas ini dimulai.

Presiden berpesan agar siapa saja nanti yang akan menjadi Ketua Umum Kadin harus mampu bersama dengan pihak Koperasi mengembangkan Koperasi. Kadin dan semua pihak, kata Presiden harus menyadari masalah Koperasi adalah masalah prioritas penting di masa yang akan datang terutama dalam kepengurusan Kadin.

Dan Kadin, sebagai wadah dari tiga unsur pelaku ekonomi nasional untuk kepengurusan tiga tahun mendatang telah terbentuk. Sotion Ardjanggi, sebagai ketua umum tiga tahun mendatang bersama seluruh jajaran kepengurusannya, ditantang untuk ikut menjadikan Koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional menjadi terwujud. Dan banyak lagi, tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dikerjakan Kadin. Tidak hanya Koperasi, sejumlah tantangan ke depan juga menghadang. Misalnya, ikut menggairahkan ekonomi nasional dan ikut meningkatkan ekspor nonmigas. □

(BM)

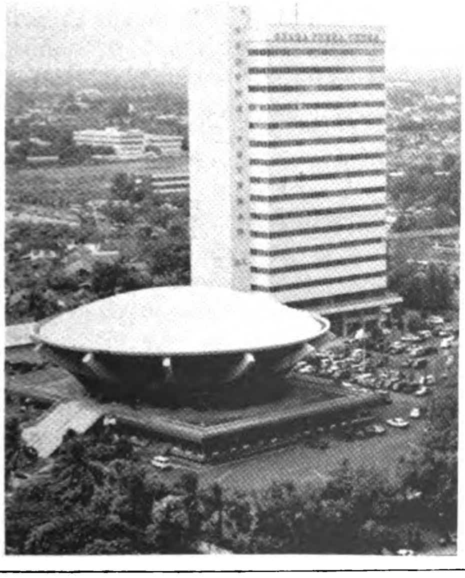

DIREKSI DAN KARYAWAN
P.T. GRAHA PURNA YUDHA
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jak-Sel.
mengucapkan
SELAMAT TAHUN BARU 1989.

MENYEWAKAN

- Ruangan untuk kantor yang representatip bagi setiap Pengusaha, aman, nyaman, fasilitas memadai dengan A.C. Central, Lift Otis tempat parkir luas dengan tarip sewa yang menarik.
- Ruangan untuk pertemuan, pesta dan lain-lain berikut perlengkapannya dengan kapasitas ruangan masing-masing ± 500 dan 1.700 undangan.

Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Niaga di Gedung Graha Purna Yudha — lantai IX telp. 510909 ext. 1312.

Digitized by Google

AMPI dan Nostalgia Pandaan

Arti sebuah monumen bagi manusia dan kepentingan bangsa tidak terlepas dari unsur nilai-nilai perjuangan. Terkadang mengandung nilai sejarah yang perlu diabadikan, agar dapat terbaca keberadaan nilai perjuangan dan sejarah itu oleh masyarakat secara benar. Kota Pandaan (Jawa Timur) sepuluh tahun yang lalu (28 Juni 1978) menjadi saksi sejarah bagi perjuangan sekelomok pemuda yang telah mengikrarkan 'Deklarasi Pandaan' untuk membentuk wadah atau organisasi kepemudaan di jalur karya dan kekaryaan. Mereka terpanggil untuk memantapkan langkah sebagai cermin pembaharuan. Baik pembaharuan mekanisme pengorganisasian, aspirasi maupun pembaharuan dalam arti penyegaran di lingkungan generasi muda yang berorientasi karya dan kekaryaan. Lalu lahirlah AMPI- (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) dengan segala konsekuensinya terhadap kepemudaan Indonesia, termasuk pembangunan Taman Monumen AMPI sebagai lambang bahwa AMPI pernah lahir di Pandaan dan tetap ada selama hayat di kandung badan.

Meninjau monumen Ampi

Peresmian Taman Monumen AMPI yang dilengkapi jam tenaga matahari ini sebagai tanda pembukaan Rapat Pimpinan Paripurna II, yang oleh Menteri Sarwono Kusumaatmadja selaku anggota Dewan Pembina AMPI dinilai sangat tepat diselenggarakan di Pandaan. Bahkan, simbol itu merupakan alat untuk mengingatkan bahwa AMPI lahir di sini. "Deklarasi itu sendiri sangat baik, idealis dan relevan bagi GOLKAR dan bangsa," ujar Sarwono yang Menpan itu.

Dalam usia sepuluh tahun ini yang sangat penting bagi AMPI, ide dasar diuji di lapangan. Untuk itu Sarwono Kusumaatmadja mengingatkan AMPI supaya merenungkan perjalanan bersama itu, disamping menatap masa depannya sebagai perwujudan kepentingan bangsa dan negara. AMPI bukan 'kandang' ayam negeri melainkan 'kandang' pejuang, sehingga AMPI perlu memikirkan segala prospek yang ada di Indonesia serta mampu menterjemahkannya dan merumuskan permasalahan generasi muda. "Soal positif atau negatif itu tergantung kita," kata Sarwono.

Sedangkan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno, dalam pengarahannya di depan Rapim menegaskan tentang pentingnya unsur pemuda dalam pembangunan. Mengaitkan pemuda dengan segala aspek perkembangan dan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini, sangat relevan, khususnya keterlibatan pemuda dalam rangka pembangunan nasional menuju pencapaian cita-cita bangsa Indonesia. Sebab unsur-unsur kekuatan pemuda yang ada sangat potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, sebagai modal dasar pembangunan.

Wawasan Kabangsaan

Pemuda memegang peranan yang sangat besar di dalam usaha pembangunan yang tengah digalakkan serta sangat menonjol menduduki posisi dalam struktur dan mekanisme pembangunan nasional. AMPI sebagai

Digitized by Google

Ampi, sebagai kandang pejuang

generasi muda merupakan salah satu potensi dalam kehidupan dan struktur masyarakat, bangsa dan negara termasuk bagian dari modal dasar pembangunan nasional itu. Juga menjadi tumpuan harapan masa depan dan penerus generasi bangsa selanjutnya. Oleh karena itu generasi muda mutlak perlu membekali dirinya agar dapat menggantikan peranan generasi sebelumnya dalam pembangunan dalam mencapai masa depan serta cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang semakin berat ini.

Try Sutrisno mengakui generasi muda sebagai kader-kader penerus cita-cita bangsa harus dibina dan diarahkan menjadi kader perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang memiliki jiwa Pancasila serta wawasan kebangsaan yang luas dan utuh. Adapun wawasannya adalah wawasan nasional, yaitu memandang seluruh wilayah nasional sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Secara substantif telah ditetapkan didalam rumusan wawasan nusantara bagi setiap aspek kehidupan mengenai pokok-pokok penjabaran dari prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan tersebut. Sehingga generasi muda yang demikian ini diharapkan sudah tidak lagi berpikir terkotak-kotak karena berlatar belakang kedaerahan yang sempit. Juga, mereka tidak mempersalahkan perbedaan asal-usul yang berlatar belakang 'sara', yaitu suku, agama, ras dan antar golongan. Sebab, bila masalah sara ini masih menjadi persoalan maka sebenarnya kita mengalami kemunduran.

Amanat tertulis Panglima ABRI

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

CATUR YASA P.T.

INDUSTRY – CONTRACTOR – TRADE

HEAD OFFICE : Jl. Kapten. P. Tendean No. 30 Jakarta 12720 Phone: (021) 799.4075-799.6969. Fax. (021)-799.3515. Tlx: 48596 CATURJ IA INDONESIA

BRANCHES : MEDAN, L. SEUMAWE, PALEMBANG, SOLO, CILACAP.

MENGUCAPKAN
SELAMAT ATAS TERPILIHNYA
BAPAK LETJEN. TNI (PURN) WAHONO
Sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR
Dan
BAPAK Ir. RACHMAT WITULAR
Sebagai Sekretaris Jenderal
Beserta
SEGENAP JAJARAN DPP. GOLKAR
MASA BHAKTI 1988 - 1993

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai tugas dan perjuangan GOLKAR dalam mewujudkan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Digitized by Google

yang disampaikan dalam Rapim II AMPI ini menantang kader-kader AMPI untuk membuktikannya dalam uji lapangan seperti diungkapkan Sarwono Kusumaatmadja. Apalagi AMPI menurut Try Sutrisno sangat terikat dengan perkembangan bangsa, termasuk pembangunan politiknya. Tidak berlebihan bila dinilai sejauh ini AMPI mempunyai kesadaran dan partisipasi positif dalam kehidupan politik di Indonesia. Sehingga AMPI tetap menjadi contoh insan politik di Indonesia bila organisasi kepemudaan ini mampu menangkap aspirasi yang tumbuh di masyarakat pemuda dan dapat menyalurkannya melalui organisasi itu. Oleh karena itu, pertimbangan yang matang adalah mengutamakan persatuan bangsa dan akan menghasilkan produk politik yang bijaksana dan sehat. Dengan demikian tidak mengherankan pada saatnya, pimpinan AMPI dapat membawakan suasana politik yang lebih stabil dan mantap.

Forum Konsolidasi

Sementara itu Ketua Umum DPP GOLKAR, Wahono, dalam sambutannya di hadapan Rapim ini menilai, AMPI dilahirkan untuk mengemban misi perjuangan. Sebagaimana umumnya dalam setiap pertumbuhan organisasi, selalu ada titik terang dan gelap. Terkadang kita tiba pada suatu persimpangan jalan untuk memilih jalan mana yang harus kita lalui dengan mencari serta mempelopori terobosan baru. Ini tentu memakan waktu dan energi, tapi kita telah membuka jalan atau kesempatan pilihan baru bagi kepentingan orang lain. Untuk itu, dalam segala situasi kita harus mampu mempertahankan semangat juang untuk melawan hambatan-hambatan yang merintangi perjalanan itu. "Oleh karenanya, Rapim AMPI ini paling tidak merupakan forum konsolidasi untuk lebih mengukuhkan semangat juang kader-kader AMPI di manapun berada," pinta Wahono.

Menatap semangat juang AMPI yang demikian besar dan tinggi, GOLKAR sebagai organisasi yang telah melahirkan AMPI tetap membuka pintunya untuk menyalurkan dan memperjuangkan segenap aspirasi kader-kader AMPI. GOLKAR tetap memiliki komitmen untuk mengembangkan pertumbuhan AMPI menjadi organisasi yang kuat, sehat dan terus bergairah dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Apalagi sejarah telah membuktikan, bahwa AMPI telah konsekuen berpegang pada prinsip perjuangannya itu.

Dalam pembangunan, Ampi pegang peranan besar

Ampi dilahirkan untuk mengembang misi perjuangan

Lalu dalam rangka memantapkan konsolidasi GOLKAR, Wahono mengajak seluruh jajaran AMPI untuk meningkatkan semangat keterbukaan dan persaudaraan, agar terwujud suatu kerabat kerja yang utuh dan kompak. Ini perlu dijaga, baik oleh para pendukung AMPI maupun antara AMPI dengan segenap jajaran GOLKAR lainnya.

Dengan pengembangan sikap demikian, proses pengambilan keputusan dalam tubuh organisasi GOLKAR makin demokratis. Sikap ini akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan pengurus dan kader dalam menyumbang pengembangan organisasi, sehingga GOLKAR akan semakin kokoh, kuat dan dewasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan organisasi. Tradisi dan konvensi ini telah tumbuh serta melembaga, dan kepada para pelakunya harus diberikan makna yang lebih mendalam.

Pernyataan Politik

Rapim AMPI yang berlangsung 4-6 Desember 1988 itu, selain membahas kepentingan AMPI juga memberikan masukkan yang sangat strategis bagi GOLKAR. Antara lain tercermin dalam pernyataan politik dan memorandum AMPI hasil Rapim tersebut.

Pernyataan politik dan pokok-pokok pikiran AMPI itu terbagi menjadi lima bagian, yaitu masalah kepemudaan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, kesra dan sosial budaya serta pengusulan supaya Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX diberikan gelar Pahlawan nasional. Ini merupakan upaya AMPI dalam menangkap aspirasi dan semangat juang pemuda, di mana sejak kelahirannya selalu ikut berupaya meletakkan dasar-dasar bagi masa depan dan demi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itu, AMPI perlu menyimak dan mengamati perkembangan pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Rapim AMPI yang dibuka oleh Menteri Sarwono Kusumaatmadja sekaligus meresmikan pembukaan Taman Monumen AMPI diikuti seluruh pengurus DPP dan DPD I AMPI seluruh Indonesia. Dalam Rapim itu turut memberi pengarahan adalah Menteri pemuda dan Olahraga Akbar Tanjung, dan Gubernur Jawa Timur Soelarso.☐ (DT)

Digitized by Google

Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia

"Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan wujud cinta tanah air." Slogan ini pernah dipaparkan pada siaran TVRI beberapa waktu yang lalu. Tetapi apakah wujud cinta tanah air yang satu ini sudah benar-benar terrealisasikan, masih perlu kiranya ditelaah lebih lanjut. Yang jelas, masih sering kita dengar atau kita baca polemik yang mempersoalkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh masyarakat termasuk para tokohnya.

Bahasa Indonesia dalam usianya yang 60 tahun semenjak di canangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah mengalami perkembangan dengan berbagai permasalahannya. Namun tak dapat di ingkari bahwa dalam usia itu bahasa Indonesia telah mampu berbuat banyak. Patut dibanggakan bahwa kita sebagai bangsa yang bermasyarakat majemuk memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan yang benar-benar hidup dan berfungsi. Dari sekadar bahasa Melayu pasar bahasa Indonesia tumbuh menjadi bahasa politik, bahasa pemerintahan, bahasa sekolah, bahasa ilmu, bahasa kebudayaan.

Menghadapi perkembangan bahasa Indonesia itu lembaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak pernah tinggal diam. Selama sepekan, 28 Oktober hingga 3 November 1988, suatu perhelatan telah diselenggarakan oleh lembaga ini, yaitu Konggres Bahasa Indonesia ke-V (KBI-V) yang dibuka oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Selain para pakar bahasa Indonesia, tak kurang dari Menko Kesra Soepardjo Rustam, Mendikbud Fuad Hasan, Menpen Harmoko, Menteri Negara KLH Emil Salim dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono telah ikut ambil bagian sebagai pembicara dalam Konggres.

Tanggung jawab nasional

Kepala Negara dalam pengarahannya pada pembukaan KBI-V mengemukakan bahwa bahasa itu hidup dan berkembang sejalan dengan kehidupan dan perkembangan kebudayaan bangsa. Makin maju kehidupan kebudayaan, harus makin maju pula pembinaan yang diberikan terhadap bahasa. Melalaikan pembinaan tidak saja berarti menghalangi kemajuan perkembangan bahasa, tetapi juga berarti membiarkan rusaknya bahasa yang dibangga-banggakan dan dicintai. Pembinaan dan pengembangan bahasa nasional adalah mutlak, bahkan merupakan bagian dari pembinaan bangsa. "Karena itu pula pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab nasional, bukan hanya tanggung jawab para ahli bahasa saja," tandas Presiden.

Lebih lanjut Kepala Negara mengatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan peristiwa budaya yang khas Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah milik salah satu suku yang besar atau pun satu satuan budaya daerah. Sekalipun tergolong dalam rumpun bahasa Melayu, namun dalam perkembangannya bahasa Indonesia tak dapat dipisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa dan bangsa Indonesia memang benar-benar berjalan seiring. Demikian Presiden Soeharto.

Penalaran dan Komunikasi

Mendikbud Fuad Hassan pada sidang pertama Konggres mengungkapkan bahwa sekalipun bahasa Indonesia tumbuh dari masyarakat yang multilinguistik, namun bukan merupakan suatu rancangan semu dan bukan bahasa kedua. Ditegaskan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa pertama dalam komunikasi bangsa Indonesia.

Tentang pentingnya penguasaan bahasa sebagai sarana pengungkapan pemikiran Mendikbud mengatakan terdapatnya kaitan erat antara penalaran dan berbahasa. Paling tidak, ada kaitan antara fungsi berpikir dan fungsi berbicara. Fungsi berpikir didorong oleh proses penalaran dan fungsi berbicara dimungkinkan karena kita berbahasa. Untuk kecermatan dan kepastian berpikir diperlukan kecermatan dan kepastian berbahasa. Bagaimana orang dapat mengungkapkan gagasan dan konsepnya yang abstrak bila ia tidak menguasai bahasa dengan segala tatanan dan kosa katanya, lanjut Fuad. Mereka yang cermat dalam tatanan bahasa dan kaya akan kosa kata juga akan mampu mengungkapkan gagasan dan konsep yang lebih aktual. "Siapa yang tidak bisa menguasai bahasa dengan cermat berarti tak akan dapat berpikir cermat," kata Mendikbud.

Sementara itu Menteri Negara KLH Emil Salim dalam forum yang sama mengemukakan bahwa bahasa yang berlaku dalam masyarakat harus memenuhi 4 fungsi, yaitu fungsi sebagai wahana komunikasi antara anggota masyarakat, sebagai peyimpan pengetahuan, sebagai cermin keadaan lingkungan sosial, sebagai penggerak perubahan dan pendorong pembangun an.

Di samping itu menurut Emil Salim bahasa Indonesia haruslah luwes. Kalau tetap kaku ia akan tertinggal dan pembangunan pun akan terhambat. Munculnya dialek dan logat hendaknya dianggap sebagai pemerkayaan dan adaptasi bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dikatakannya pula bahwa pembangunan memerlukan ketrampilan dan pengetahuan yang untuk sebagian dikembangkan di berbagai lembaga pendidikan. Ilmu pengetahuan dikomunikasikan kepada para siswa dalam bahasa resmi yakni bahasa Indonesia. Dengan demikian kualitas lulusan lembaga pendidikan akan sangat tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi ilmiah.

Bahasa pers

Media massa dapat berperan sebagai pembina dalam penggunaan bahasa, tetapi dapat pula menjadi perusak bahasa yang baik dan benar. Hal ini diungkapkan oleh Menpen Harmoko di hadapan para peserta KBI-V. Dalam pengarahannya berjudul "Peningkatan Komunikasi yang Efektif dengan Bahasa Indonesia untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasio-

Digitized by Google

nal", Harmoko mengingatkan para pengelola media massa agar lebih memahami fungsi dan kedudukannya sebagai sarana pembinaan dan penyebaran bahasa Indonesia. Oleh sebab itu baik redaksi maupun para wartawan harus memiliki wawasan dan perbendaharaan penggunaan bahasa yang cukup luas serta kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Namun oleh Menpen hal itu tidak diartikan bahwa wartawan atau penulis harus menjadi seorang ahli bahasa.

Bidang pekerjaan kewartawanan mempunyai kriteria tersendiri. Karena itu pengetahuan berbahasa bagi seorang wartawan harus pula menyesuaikan diri dengn persyaratan bidang kegiatannya seperti yang dikenal dengan "bahasa pers", kata Menpen. Bahasa pers timbul dari penyesuaian berbahasa dengan kebutuhan teknik kewartawanan dan gaya berbahasa sebagian masyarakat yang kemudian disalurkan wartawan melalui pers kepada masyarakat luas. Bahasa pers harus mampu mentransformasikan bahasa yang digunakan kalangan tinggi (negarawan dan para pejabat) menjadi bahasa yang mudah dimengerti dan dicerna kalangan masyarakat awam, dan juga sebaliknya. "Pers dan media massa mutlak diwajibkan menggunakan bahasa yang sederhana dan wajar, serta tidak menyimpang dari kaidah tata bahasa yang baku," ujar Harmoko. Sejauh ini menurut Menpen sebagian dari bahasa pers telah memberikan andil bagi pembinaan bahasa Indonesia.

Tidak vulgar

Bahasa merupakan pula suatu sarana guna menyampaikan kritik. Sehubungan dengan itu Mensesneg Moerdiono mengemukakan bahwa penyampaian pandangan serta kritik perlu dilakukan secara objektif, terukur, adil, dan beradab. Masyarakat kita, termasuk pejabat pejabat pemerintah, tidak sudi dipermalukan di depan umum. Oleh karena itu perlu cara untuk menyampaikan esensi tantangan dan koreksi secara efektif tanpa tindakan mempermalukan di depan umum.

Menurut Moerdiono cara kontak pribadi dan perumusan yang subtil dari masalah serta diikuti oleh saran penyelesaian yang konstruktif tampaknya lebih efektif. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menganalisa esensi masalahnya secara mendalam, menampilkan berbagai kemungkinan pemecahannya serta menyampaikan pemecahan yang baik tanpa terlalu "menunjuk hidung".

Mengaitkan masalah penyampaian kritik dengan UUD, Moerdiono menyebutkan tantangan dan kritik perlu disampaikan secara objektif menurut dasar "kemanusiaan yang adil dan beradab", atau dengan istilah asingnya cultured and civilized, tidak vulgar. "Kelihatannya betapapun tajamnya tantangan dan kritik, bisa diterima sepanjang disampaikan secara cultured and civilized dibandingkan jika secara vulgar.

Dalam hubungan itu pula Mensesneg menganjurkan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa yang jelas menunjukkan pikiran yang jelas. Di samping itu orang yang menguasai persoalan dapat menjelaskan persoalan yang rumit secara jelas dan sederhana. Sebaliknya, orang yang tidak menguasai persoalan akan membuat persoalan yang jelas dan sederhana menjadi rumit.

Dalam makalahnya yang berjudul "Bahasa Indonesia dalam Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan" Mensesneg mengatakan lebih lanjut bahwa dampak politik dari bahasa yang digunakan akan semakin besar jika pejabat yang mengucapkannya menduduki jabatan pemerintahan yang semakin tinggi. Dampak politik ini bisa berupa dukungan dan tantangan. Dukungan dan tantangan adalah hal yangg wajar dalam demokrasi. "Tantangan dan koreksi merupakan bentuk umpan balik yang wajar dalam komunikasi politik yang dinamik,"kata Moerdiono.

Sementara itu di hadapan peserta Konggres Menko Kesra Soepardjo Rustam dalam uraiannya mengetengahkan bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi.

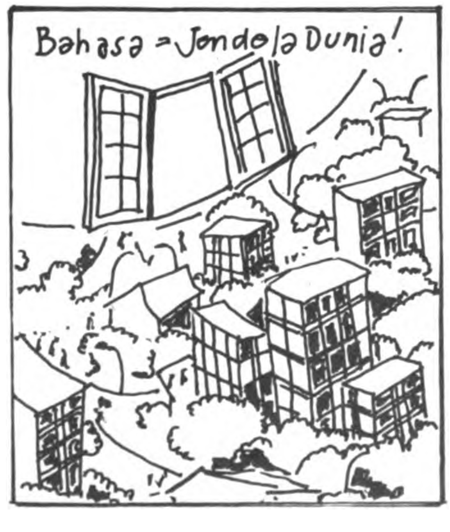

Menurut Soepardjo, menguasai bahasa adalah juga jendela menuju dunia. "Kalau Anda menguasai bermacam bahasa, Anda akan lebih mudah melihat seluruh dunia ini," tuturnya.

Bahasa Pejabat

Setelah membahas lebih dari 70 makalah, KBI-V yang diikuti oleh lebih dari 800 peserta itu berakhir dan ditutup oleh Mendikbud Fuad Hassan pada tanggal 3 November 1988.

Beberapa hal yang disimpulkan oleh Konggres antara lain penegasan kembali perlunya penertiban pemakaian bahasa asing pada nama-nama gedung umum, seperti toko dan lain sebagainya, dengan disertai ketegasan tindak dari Pemda dalam menerapkan peraturan yang ada.

Selain itu sorotan terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh para pejabat juga mendapat tanggapan Konggres. Salah satu kesimpulan Konggres berisi himbauan agar para pejabat tinggi lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.

Konggres juga menekankan hendaknya dalam mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah dan modern, para penutur bahasa tidak terjerumus dalam sikap kauvinistik. Para penutur bahasa tidak perlu takut memungut kata baru, baik yang digali dari bumi sendiri maupun dari luar sesuai keadaan dan keperluan.

Momentum diselenggarakan Konggres Bahasa Indonesia V juga dimanfaatkan untuk menerbitkan buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Hasil karya para pakar bahasa Indonesia itu diserahkan kepada Presiden Soeharto oleh Mendikbud Fuad Hassan di saat pembukaan Konggres di Istana Merdeka. Dr. Anton Moeliono, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang juga sekaligus penyunting buku tersebut mengatakan bahwa karya itu baru dapat diselesaikan setelah proses kerja selama 8 tahun. Cukup lama, memang.

Kamus bahasa itu menurut Kepala Negara akan menjadi acuan penting kosa kata bahasa Indonesia. Diharapkan kamus bahasa Indonesia ini dapat terus dimutakhirkan agar tidak tertinggal oleh pesatnya perkembangan bahasa Indonesia dan kemajuan kebudayaan bangsa. □ (TAP).

Digitized by Google

Ringkasan Peristiwa Nasional Tahun 1988

Tahun 1988 akan segera tutup. Waktu terus merangkak melalui satuan waktu detik per detik. Tiap jangka yang dilalui memberikan pengalaman hidup bagi manusia yang juga datang pergi silih berganti mengisi dunia. Tak terkecuali, bagi bangsa Indonesia. Kurun waktu tahun 1988 juga telah menggoreskan berbagai peristiwa yang tak terulang lagi, tetapi di antaranya ada yang terekam sebagai peristiwa yang perlu dikenang sebagai catatan sejarah perjalanan bangsa.

Presiden Soeharto menyampaikan RAPBN 1988-1989 dalam sidang pleno DPR

1 Januari 1988 – Tahun baru ditandai dengan guyuran hujan lebat di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Jakarta, Ibu kota RI. Namun cuaca buruk tidak mengurangi minat anggota masyarakat untuk merayakan pergantian tahun. Jalan-jalan utama Jakarta dipenuhi kendaraan warga yang ingin melewatkan malam pergantian tahun di luar rumah. Tempat-tempat hiburan pun baik yang berada di tempat tertutup maupun di tempat terbuka seperti taman-taman rekreasi, seperti di taman Monas dan Taman Impian Jaya Ancol dipenuhi pengunjung, meski tidak sedikit juga yang melewatkan acara tahun baru di rumah bersama keluarga sambil menikmati hiburan TVRI yang menayangkan acara hingga dinihari.

Pakar ekonomi, Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo dalam suatu wawancara di TVRI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun 1988 sebesar 3 persen. Tahun 1988 digambarkannya sebagai tahun yang berat.

Berita musibah mewarnai suasana awal tahun. Pesawat MNA jenis Twin Otter hilang di Kaltim beserta keempat belas penumpangnya. Pesawat itu sedang mengarungi route reguler, Balikpapan – Samarinda.

5 Januari 1988 – Presiden Soeharto menyampaikan RAPBN 1988/1989 di depan sidang pleno DPR. RAPBN yang disampaikan ditetapkan sebesar Rp 28,9 trilyun, yang berarti naik 27,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. RAPBN 1988/1989 diramalkan oleh Dr M Sadli bebas dari kemungkinan devaluasi.

Penerimaan APBN diluar minyak dan gas lebih besar dari penerimaan migas yaitu Rp 12,9 trilyun lebih berbanding dengan Rp 8,8 trilyun lebih. Cicilan hutang luar negeri mencapai Rp 10,6 trilyun lebih. Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan karena belum ada peluang. Posisi pinjaman luar negeri akhir tahun 1987 sebesar $35,2 milyar.

RAPBN 1988/1989 itu disetujui oleh DPR dalam sidang pleno 19 Februari 1988.

6 Januari 1988 – Jabatan Direktur Utama Garuda, perusahaan penerbangan milik pemerintah diserahterimakan dari RAJ Lumenta kepada Mohammad Soeparno. Lumenta mengakhiri masa jabatan yang dipegangnya sejak November 1984. Soeparno, Dirut yang baru adalah pejabat di Garuda yang memulai karier dari tingkat paling bawah.

– PM Italia Giovanni Goria dan istri berkunjung ke Indonesia untuk kunjungan 2 hari. Kerja sama kedua negara khususnya bidang ekonomi dan teknologi menjadi pokok pembicaraan antara PM Giovanni Goria dengan Presiden Soeharto.

18 Januari 1988 – PM PNG Paias Wingti berkunjung ke Indonesia selama 4 hari. Dalam pertemuan dengan tamu negara, Presiden menegaskan bahwa RI tidak pernah mempunyai niat untuk mengganggu PNG.

20 Januari 1988 – BP MPR menyelesaikan tugas dalam menyiapkan bahan-bahan untuk SU MPR. 5 Rantap belum mencapai mufakat bulat. Pernyataan FKP untuk mengadakan voting apabila kesepakatan tidak tercapai, tidak dilaksanakan. Rantap yang belum disepakati diselesaikan pembahasannya dan akan disampaikan kepada SU MPR.

22 Februari 1988 – Jendral Edi Sudradjat dilantik menjadi Kasad,

Digitized by Google

menggantikan Jendral Try Sutrisno. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara.

29 Februari 1988 – Berlangsung serah terima jabatan Pangab dari Jendral LB Moerdani kepada Jendral Try Sutrisno di Mabes ABRI, Cilangkap. Sesudah serah terima itu, kedua perwira tinggi ABRI melapor kepada Presiden Soeharto di kediaman, Jl. Cendana. Presiden berpesan agar ABRI memainkan peran dwi fungsi sebaik-baiknya.

– Suasana persiapan Sidang Umum MPR 1988 makin terasa. Fraksi-fraksi MPR telah berkumpul di Jakarta. FPP tampil sebagai pelopor dalam mengajukan calon Wakil Presiden. Ketua Umum DPP PPP Dr HJ Naro SH dicalonkan oleh fraksinya sebagai Wakil Presiden.

– Untuk jabatan Presiden hanya ada satu calon, Jendral Purnawirawan Soeharto.

1 Maret 1988 – Sidang Umum MPR 1988 dibuka. Presiden Soeharto, mandataris MPR menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Dilaporkan, pertumbuhan ekonomi rata-rata tiap tahun selama Repelita IV 3,8 persen.

– Presiden mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota kabinet yang disertai istri masing-masing. Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan terima kasih kepada para anggota kabinet atas kerjasama, dan minta maaf kepada istri mereka karena tugas yang dibebankan kepada para menteri telah menyita waktu yang semestinya tersedia untuk keluarga.

2 Maret 1988 – Fraksi-fraksi MPR kecuali Fraksi PPP mencalonkan Sudharmono SH (Ketua Umum DPP Golkar yang juga menjabat Mensesneg). Dengan pencalonan Sudharmono, MPR memiliki dua calon Wakil Presiden, karena fraksi PPP tetap mencalonkan HJ Naro.

4 Maret 1988 – 5 Fraksi MPR menerima pertanggungjawaban Presiden Soeharto.

– Upaya untuk melincinkan jalan pemilihan Wakil Presiden diupayakan, dan akan diusahakan, pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat bulat, tidak melalui voting, atau pemungutan suara.

Upaya untuk memperlicin pemilihan Wapres itu ditempuh dengan mempertemukan kedua calon, tetapi sebegitu jauh belum menunjukkan hasil konkret, bahkan isi pembicaraan kedua calon juga tidak diumumkan.

Persiapan untuk menghadapi kemungkinan voting ditempuh oleh Sekretariat MPR. Kotak-kotak suara dikeluarkan dari gudang dan siap dibawa ke ruang sidang apabila situasi memerlukannya.

11 Maret 1988 – Presiden terpilih, Jendral Purn Soeharto dilantik dan mengangkat sumpah untuk memangku jabatan sebagai Presiden periode 1988 – 1993 dalam upacara di depan sidang pleno MPR.

Jenderal Purn Soeharto dilantik dan mengangkat sumpah sebagai Presiden RI periode 1988-1993

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan, akan melaksanakan tugas sepenuhnya dalam masa jabatannya selama 5 tahun.

– Sementara itu FPP MPR menarik kembali pencalonan Naro sebagai Wapres. Dengan demikian tinggal 1 calon Wapres untuk dipilih, yakni Sudharmono SH. Ia dilantik sebagai Wapres pada malam harinya di depan sidang paripurna MPR.

21 Maret 1988 – Presiden membentuk Kabinet Pembangunan V dengan mengangkat 38 menteri yang terdiri atas 21 menteri yang memimpin departemen, 3 menteri koordinator, 8 menteri negara yang menangani bidang tertentu dan 6 menteri muda. Selain itu, dalam kabinet duduk pula pejabat tinggi setingkat menteri, yakni Panglima ABRI, Jaksa Agung, dan Gubernur Bank Sentral.

Dalam amanatnya pada pembentuk kabinet, Presiden Soeharto mengatakan bahwa sasaran tugas yang akan dicapai dirumuskan dalam Panca Krida Kabinet Pembangunan V. 1. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan ketahanan nasional. 2. Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 3. Membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 (Eka Prasetia Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. 5. Melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1992.

23 Maret 1988 – Presiden Soeharto melantik menteri-menteri Kabinet Pembangunan V dalam suatu upacara di Istana Negara. Upacara pelantikan yang ditandai dengan pengambilan sumpah berlangsung singkat tetapi khidmat. Seusai upacara para menteri baru bergambar bersama Presiden dan Wakil Presiden di tangga Istana Merdeka.

30 Maret Keppres 10/1980 dicabut. Kewenangan untuk pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dilaksanakan oleh pimpinan instansi mulai dari pimpinan proyek sampai tingkat menteri.

Digitized by Google

31 Maret 1988 – Wakil Presiden membuka Tromolpos 5000 untuk menampung pengaduan masyarakat. Kebijakan itu diambil dalam Rakor Pengawasan yang dipimpin oleh Wakil Presiden di Istana Merdeka Selatan.

8 April 1988 – Presiden Rumania Nicolai Ceausescu berkunjung ke Indonesia selama 3 hari untuk mempererat kerja sama kedua negara. Negara dari Eropa Timur itu bersedia menjual hasil industrinya dan sebaliknya akan membeli berbagai produk pertanian Indonesia. Kunjungan Presiden Rumania itu adalah untuk kedua kalinya.

13 April 1988 – Presiden Venezuela Jaime Lusinchi juga menjadi tamu negara selama 3 hari. Kedua kepala negara, Presiden Soeharto dan Presiden Jaime Lusinchi dalam pertemuannya bersepakat untuk meningkatkan kerjasama. Kedua negara yang sama-sama anggota OPEC akan bekerja keras untuk memperjuangkan terwujudnya harga minyak yang wajar di pasar internasional. Presiden dari Amerika Latin itu juga mengundang Presiden Soeharto untuk berkunjung ke negaranya.

28 April 1988 – Pemerintah melalui Menpan Sarwono Kusumaatmadja mencanangkan penataran Pengawasan Melekat (Waskat) untuk untuk 60 ribu pejabat eselon I, II, III seluruh Indonesia.

1 Mei 1988 – Bayi tabung pertama Indonesia lahir lewat operasi di RSAB Harapan Kita, Jakarta. Bayi tabung laki-laki itu anak pasangan suami istri Markus yang telah menikah selama 14 tahun. Proses bayi tabung itu dilakukan oleh tim dokter yang dipimpin oleh dr Daurie Mochren. Proses bayi tabung dipelopori oleh Dr Patrick Steptoe dari Inggris. Bayi tabung pertama di dunia lahir tahun 1978.

17 Mei 1988 – Hari Raya Idu Fitri dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Umat Islam berbondong-bondong melaksanakan shalat Ied. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono serta pejabat tinggi lainnya bersama umat warga masyarakat Jakarta bershalat Ied di mesjid Istiqlal. Meskipun suasana lebaran meriah, kesederhanaan terasa menonjol. Pejabat-pejabat tinggi negara tidak menyelenggarakan acara "open house" sebagai wujud penciptaan suasana kesederhaan.

13 Juni 1988 – PM Malaysia Mahathir Mohammad tiba di Indonesia untuk suatu kunjungan kerja. Ia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto di Yogyakarta. Pertemuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama terutama di bidang pendidikan dan pariwisata.

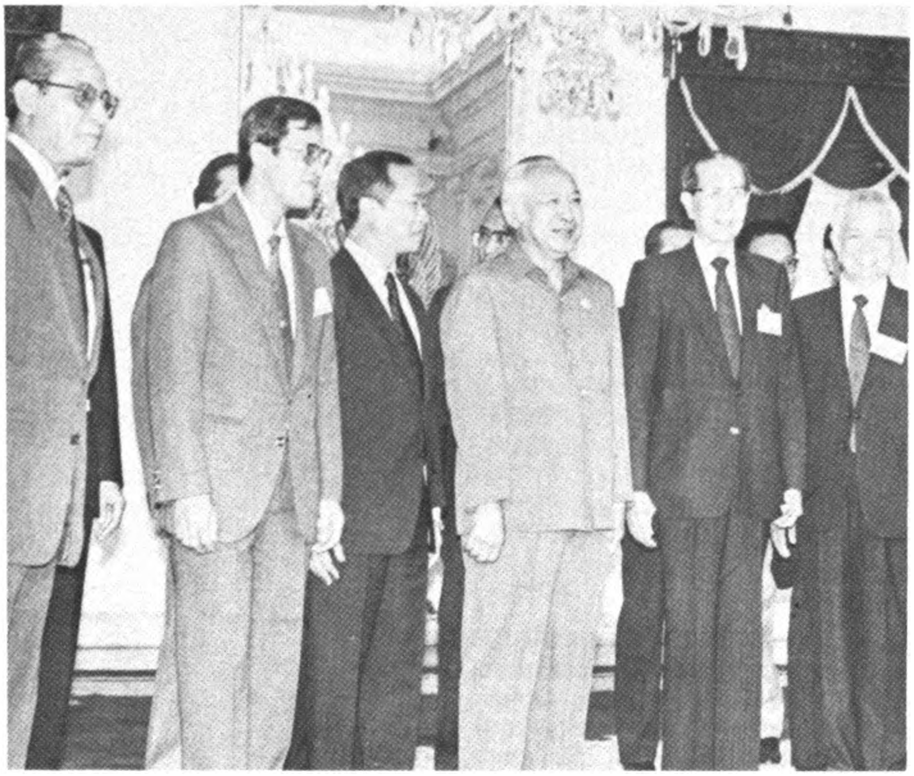

Kepala Negara Soeharto menerima peserta JIM (Jakarta Informasi Meeting)

26 Juni 1988 – FKP mengkhawatirkan dampak negatif KSOB dan TSSB. Keberatan itu disampaikan fraksi dalam pembahasan RUU APBN Tambahan Dan Perubahan. Keesokan harinya, Sekretaris FKP DPR, Ir Rachmat Witoelar menegaskan sikap fraksinya, menginginkan kedua bentuk undian itu dicabut karena dinilainya, dampak negatifnya terlalu besar.

– Menjelang akhir tahun, pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa KSOB dan TSSB dicabut sejak Januari 1989. Untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan olah raga diselenggarakan undian Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.

26 Juli 1988 – Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara JIM (Jakarta Informal Meeting) suatu pertemuan untuk mengupayakan penyelesaian masalah Kamboja. Pertemuan itu dihadiri oleh kelompok-kelompok yang bersengketa mengenai Kamboja antara lain Pangeran Norodom Ranariddh (ketua delegasi pendukung Sihanouk), Son Sanh (ketua delegasi Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer), Hun Sen (ketua delegasi rezim Pnom Penh yang didukung Vietnam, dan Khieu Samphan, ketua delegasi Khmer Merah.

Dalam rangkaian JIM itu hadir pula sejumlah menteri dari kawasan Asia Tenggara, yaitu Menlu Nguyen Co Thach dari Vietnam, Menlu Tongsavath Khaikhamphitoune dari Laos, sedang ASEAN diwakili secara individu yang dipimpin oleh Pangeran Mohammad Bolkiah (Menlu Brunei) dengan anggota Abu Hassan Omar (Menlu Malaysia), Suppiah Danabalan (Menlu Singapura), Kasem Kasmari (Sekjen Deplu Muangthai), dan Manuel T Yan (Deputy Menlu Pilipina).

Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara Bogor dibuka oleh Menlu Ali Alatas. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Indonesia mengharapkan agar pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja memanfaatkan JIM sebagai momentum untuk penyelesaian masalah secara tuntas demi kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja.

– Pada hari itu juga Presiden menerima tokoh Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk.

27 Juli 1988 – JIM berakhir dengan sejumlah kesepakatan antara lain mengenai penyelesaikan politik masalah Kamboja, perwujudan zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia

Digitized by Google

Tenggara, penarikan pasukan Vietnam dan pencegahan rezim Pol Pot berkuasa kembali.

– Peserta JIM diterima oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Presiden mengungkapkan bahwa alasan bagi Indonesia menyelenggarakan JIM untuk membantu penyelesaian masalah Kamboja adalah amanat UUD yang memerintahkan untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia, dorongan semangat Bandung, dan pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh rakyat Kamboja serta keinginan mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang stabil.

30 Juli 1988 – Ny KRA Siti Hatmanti Soemoharyomo, ibunda Ny Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto tutup usia di Jakarta. Almarhumah sebelumnya dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Almarhumah cicit KGPAA Mangkunegoro III ini menikah dengan RMNG Soemoharyomo tahun 1919, dikaruniai 11 putra dan putri, 4 di antaranya telah meninggal. Almarhumah dimakamkan di Astana Giribangun, Mangadeg, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

6 Agustus 1988 – Anggota DPA mengucapkan sumpah jabatan didepan Ketua Mahkamah Agung dalam acara pelantikan di Istana Negara. Acara itu dihadiri oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono, serta pejabat tinggi negara lainnya. Anggota DPA 40 orang, di antara mereka terdapat 7 mantan menteri, 3 mantan Gubernur dan sejumlah anggota DPA lama.

8 Agustus 1988 – Presiden menerima peserta Rapim ABRI yang dipimpin oleh Pangab Jendral Try Sutrisno. Dalam pesannya, Presiden mengharapkan agar jajaran ABRI makin matang dan lebih arih dalam mengembangkan stabilitas nasional yang dinamis. Diingatkan, ABRI perlu menyadari bahwa aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan menjadi sumber kerawanan. Karenanya semua pihak perlu mengupayakan agar aspirasi dan harapan rakyat dapat tersalur sebaik-baiknya.

16 Agustus 1988 – Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 43. Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi pada Repelita V mendatang adalah 5% DSR (Debt Service Ratio) 25%, lebih kecil dari sebelumnya yang mencapai angka di atas 30%. Untuk itu upaya peningkatan pendapatan devisa negara merupakan perjuangan habis-habisan. Hanya dengan cara itu DSR dapat ditekan. Presiden juga mengatakan bahwa jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin merupakan ancaman yang harus diatasi, karena merupakan salah satu tantangan untuk mencapai tahap tinggal landas. Ancaman lain yang perlu diatasi adalah kekosongan kehidupan moral, etik, dan spiritual, ancaman terhadap martabat serta hak dan kewajiban asasi, ancaman terhadap persatuan bangsa, otoriterisme, militerisme dan totaliterisme.

40 orang anggota DPA menggucapkan sumpah jabatan di depan Ketua MA

17 Agustus 1988 – Upacara kenegaraan untuk memperingati detik-detik proklamasi berlangsung di Istana Merdeka. Upacara ditandai dengan dentuman meriam, bunyi sirene serta beduk dan lonceng, mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan, pembacaan naskah Proklamasi, dan penaikan bendera Merah Putih dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

7 September 1988 – Presiden menghapus lembaga Kopkamtib dan bersamaan dengan itu membentuk Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan

Bendera Merah Putih diserahkan dalam peringatan 17 Agustus

Digitized by Google

Pemantapan Stabilitas Nasional). Berkenaan dengan keputusan itu, Presiden memberhentikan Jendral LB Moerdani dari jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib, dan mengangkat Panglima ABRI Jendral Try Sutrisno sebagai Ketua Bakorstanas.

– Futuris Dr Alfin Toffler memberikan ceramahnya di Indonesia atas undangan lembaga swasta Yayasan Panglaykim. Ceramahnya yang bertema Tantangan Gelombang Ketiga terhadap Dunia Ketiga menarik minat sejumlah besar pengamat.

2 Oktober 1988 – Sultan Hamengkubuwono IX wafat ketika sedang dalam perjalanan ke AS untuk kepentingan "check up" kesehatan. Sultan wafat di RS George Washington, di Washington DC, AS. Bangsa Indonesia kehilangan tokoh nasional yang sangat berjasa karena kegiatannya sejak sebelum kemerdekaan, saat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

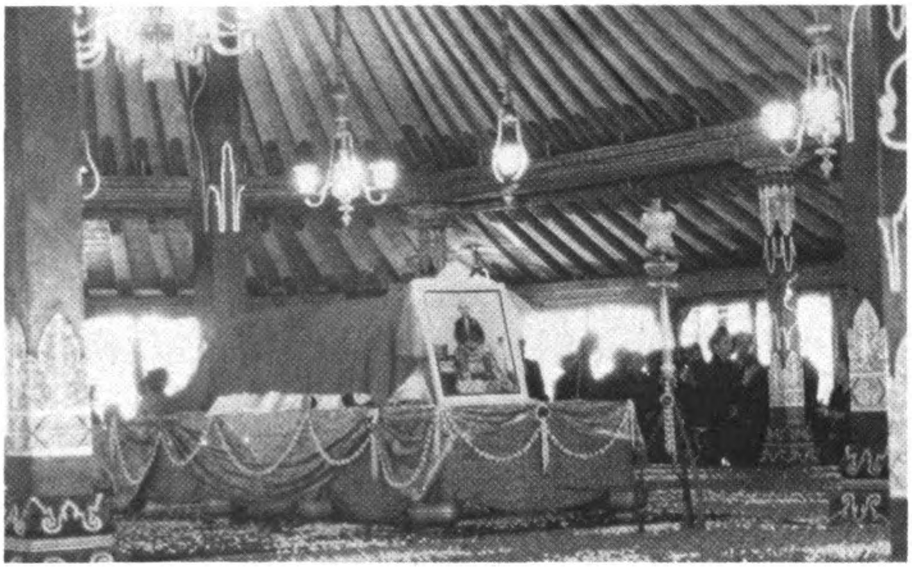

Jenazah almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX disemayamkan di aula Kraton Yogjakarta

Wahono terpilih sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR dalam MUNAS IV GOLKAR

Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman untuk raja-raja Jawa, Imogiri, Yogyakarta pada 8 Oktober. Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto melawat ke Kraton Yogyakarta, saat jenasah diberangkatkan. Lautan manusia mengiringi perjalanan kereta jenasah dari Kraton Yogyakarta ke Imogiri.

Pemerintah memberlakukan hari berkabung nasional selama satu minggu terhitung dari kedatangan jenasah dari Amerika Serikat, pada 5 Oktober.

Mangkubumi disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk menggantikannya, meski sampai laporan disusun, pemilihan Sultan Yogya belum dilaksanakan. Sri Paku Alam VIII yang selama ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan sebagai pejabat sementara selama hayatnya.

20 Oktober 1988 – Munas IV Golkar dibuka di Balai Sidang Jakarta. Presiden selaku Ketua Dewan Pembina Golkar hadir pada malam pembukaan Munas. Dalam amanatnya ia menegaskan bahwa Golkar bertugas untuk mengembangkan budaya politik dan demokrasi Pancasila. Sudharmono SH, Ketua Umum DPP Golkar periode 1983 – 1988 tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Ketua Umum.

– Munas berakhir 25 Oktober 1988. Wahono, mantan Gubernur Jawa Timur dipilih oleh formatur untuk menjabat sebagai Ketua Umum. Ir Rachmat Witoelar dipilih sebagai Sekjen dan Eric Samola SH terpilih sebagai Bendahara. Seluruh pengurus terdiri atas 45 orang. Ketua Dewan Pembina Golkar Jendral Purn Soeharto dipilih kembali sebagai Ketua Dewan Pembina.

27 Oktober 1988 – Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan bidang ekonomi yang populer disebut Pakto. Kebijakan itu antara lain menerapkan pajak 15% atas bunga deposito.

31 Oktober 1988 – PM Kerajaan Belanda Ruud Lubers beserta istri menjadi tamu negara. Dalam kunjungan kenegaraan itu PM Belanda memperkenalkan konsep tentang pembentukan pasar tunggal Eropa. Ia berada di Indonesia selama 6 hari.

8 November 1988 – Jajaran pahlawan nasional bertambah seorang lagi. Presiden Soeharto menganugerahkan gelar pahlawan kepada Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I. Pangeran Sambernyowo dinilai berjasa kepada bangsa karena kegigihannya melawan penjajah.

12 November 1988 – Festival Film Nasional berakhir. Christine Hakim berhasil merebut piala Citra sebagai pemrean wanita terbaik. Pemeran pria terbaik Mathias Muchus. Christine main di film berjudul Tjoet Nyak Dhien, sedangkan Mathias Muchus main di film Istana Kecantikan.

15 November 1988 – Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut isyu tentang makanan berkandungan lemak babi. Isyu yang

Digitized by Google

Menkopolkam Sudomo dan rombongan menghadap Presiden Soeharto membicarakan bandar judi

muncul sejak pertengahan Oktober itu dinilai meresahkan masyarakat, serta merugikan sejumlah perusahaan. Sejumlah oknum diperiksa oleh Jaksa Agung, termasuk 3 surat kabar yang melansir berita tentang lemak babi itu.

28 November 1988 – PWI menyelenggarakan Kongres XVIII di Samarinda. Kongres dibuka oleh Presiden Soeharto. Dalam pesannya, Presiden berharap agar pers dapat menjaga martabat dan kewibawaan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kongres memilih Sugeng Widjaja sebagai Ketua Umum.

– DPR mulai membahas RUU tentang Pendidikan dalam tingkat panitia khusus untuk perubahan dan penyempurnaan. Pembahasan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr Fuad Hassan bersama Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR. Pansus dipimpin oleh Dr. Bawadiman.

1 Desember 1988 – Menkeu Dr JB Soemarlin menegaskan, kenaikan gaji menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan APBN 1989/1990 mendatang.

7 Desember 1988 – Presiden Gambia Alhaj Dawda Jawara berkunjung ke Indonesia selama 6 hari. Ia akan belajar dari Indonesia mengenai teknologi pertanian.

9 Desember 1988 – Bandar judi buntut gelap dikategorikan sebagai pelaku subversi seperti halnya penyelundup. Menko Sudomo menegaskan, pemerintah akan menindak tegas keduanya. Pelaksanaan undian Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah yang mulai diberlakukan Januari tahun depan diharapkan tidak mengarah menjadi perjudian. □ (Sgt/SK).

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN

ARUN LNG

P.T. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION CO.

WISMA NUSANTARA 11th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 59
TROMOLPOS 3712 JAKARTA 10002 INDONESIA

MENGUCAPKAN :

SELAMAT HARI NATAL
dan
TAHUN BARU 1989

Digitized by Google

Menara Gading

Cukup menarik ungkapan-ungkapan Menteri Koperasi Bustanil Arifin baru-baru ini mengenai jurang kaya-miskin. Menarik, pertama-tama karena yang mengucapkan adalah Bustanil Arifin menteri Koperasi dan sekaligus Kepala Bulog — suatu badan yang dalam khayalan banyak orang adalah 'basah' (maaf...) terutama sejak kasus Budiaji beberapa tahun silam. Kedua, karena ucapan-ucapan yang dilontarkan cukup 'tajam'lah, dan boleh dibilang ucapan sejenis langka disampaikan beliau sebelum-sebelum ini.

Beliau bilang, seperti yang dikutip pers: Jurang antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin yang makin lama semakin lebar dan tajam, harus terus diusahakan untuk diperkecil. Agar, tidak muncul 'menara gading' di tengah-tengah kemiskinan.... Kita harus memperkecil jurang antara yang pakai Mercedes Benz dengan yang tidak memakai sepatu.

Terhadap ucapan ini, orang akan segera menoleh kepada diri pak Bus sendiri.

Bukan apa-apa, melainkan karena beliau lah orang yang ada dalam posisi dapat berperan banyak dalam soal menara gading ini. Kenapa?

Pertama, beliau adalah Menteri Koperasi. Kalau beliau berhasil menata lembaga-lembaga koperasi dengan baik sebagai salah satu alat pemerataan dan alat ekonomi rakyat sampai ke desa-desa, selamatlah negara ini.

Kedua, beliau adalah Kepala Bulog. Kalau beliau berhasil mengatur dengan baik badan yang menangani distribusi kebutuhan pokok rakyat banyak itu — dari beras hingga kedele — tenteramlah hati rakyat banyak yang secara umum ekonominya masih pas-pasan ini. Apalagi kalau beliau berhasil menggulung Budiaji-budiaji lainnya yang mungkin-mungkin saja masih ada. Dan yang tidak kurang pentingnya, bagaimana beliau dapat mengatur aparat-aparat beliau, termasuk yang duduk dalam BUMN-BUMN di lingkungan tersebut, justru tidak ikut dalam arus pembangunan 'menara gading di tengah kemiskinan'....

Rumah Mewah, Kontan

Dan ini, dari Menteri PAN. Tatkala ada anggota Komisi II DPR menyampaikan sinyalemen tentang adanya sejumlah pegawai negeri yang membeli rumah mewah secara tunai di kawasan real estate, Menteri tidak menyembunyikan rasa herannya.

"Saya tidak janji", ujarnya, "tapi saya akan berusaha berbuat sesuatu". Ia menegaskan bahwa jelas hal tersebut merupakan indikasi adanya sesuatu yang tidak beres, apalagi kalau rumahnya begitu mahal.

Meskipun baru sekedar ucapan awal, tapi pernyataan Menteri ini melegakan banyak orang. Karena, pada hakekatnya ia sedang menjurubicarai masyarakat banyak yang sebenarnya telah lama memendam rasa heran dan bertanya-tanya mengenai kemampuan yang tak masuk akal yang toh dimiliki oleh segelintir oknum pegawai negeri itu.

Masyarakat tentu tidak perlu tergelincir apriori kepada semua pegawai negeri. Karena begitu banyak pegawai negeri yang tetap jujur dan karenanya hidup prihatin. Tetapi karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitulah.

Lalu bagaimana? Barangkali, pegawai negeri golongan terjepit yang selalu kebagian getahnya, sudah saatnya mulai lebih aktif melibatkan diri dalam gerakan mawas diri dan membantu tugas pengawasan dan penertiban di lingkungannya masing-masing....

Hermansyah

Seorang pemuda bernama Hermansyah menjadi berita. Ia membedah sendiri perutnya untuk mengeluarkan 'Karang' dari saluran kemihnya. Agaknya ia tak tahan kepada penderitaan berkepanjangan yang menyiksanya selama ini, dan memutuskan mengakhiri segalanya, to be or not to be.

Kenapa ia nekad dan tidak di bedah di rumah sakit? Ia miskin dan tidak punya biaya untuk itu. Nasibnya dalam hal ini, tidak beda dengan nasib kebanyakan anggota masyarakat kita yang masih berkemampuan ekonomi rendah. Kesejahteraan bidang kesehatan belum cukup kuat menjangkau mereka. Bedanya adalah Hermansyah lebih nekad dan berani mengambil keputusan.

Hasilnya? Ia akhirnya mendapat pertolongan resmi dari Rumah Sakit dan bantuan simpati dari kalangan masyarakat lainnya. Ia tertolong dari penderitaannya.

Tapi apakah orang harus nekad dulu sebelum memperoleh perhatian dan pertolongan? pasti pak Adhyatma dan para bawahannya mulai juga berpikir-pikir.□

Digitized by Google

Lampu Daerah Aceh Telah Menyala Untuk GOLKAR

Pertengahan Desember lalu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono beserta fungsionaris DPP berada di Aceh, atas undangan DPD GOLKAR Tingkat I Aceh untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Golongan Karya yang dipusatkan di Takengon, Aceh Tengah.

Kehadirannya di daerah Istimewa Aceh ini demikian Wahono, memberi kesan tersendiri. Soalnya setelah 27 tahun, baru dapat berkunjung ke daerah ini kembali. Oleh karenanya dari Lhokseumawe menuju Kota Takengon ia memilih jalan darat seraya melihat kemajuan pembangunan daerah yang penduduknya relatif sedikit dibanding dengan luas daerah yang hampir sama dengan luas Jawa Barat itu.

Jalan sempit berliku-liku dengan tanjakan dan turunan yang menukik menyebabkan perjalanan terasa lama dan melelahkan. Rombongan Ketua Umum DPP GOLKAR yang ditemani Gubernur Aceh Prof Dr Ibrahim Hassan, Ketua GOLKAR Drs Yacob Tobing MPA, Ketua Dept Cendekiawan dan Hubungan Luar Negeri Aulia Rachman, SH, Kasdam Bukit Barisan harus turun melepas lelah di tepian jalan sambil menikmati makanan.

Kedatangan Wahono dan rombongan di Takengon disambut masyarakat dengan upacara adat dengan pantun-pantun yang mengalir deras di pelataran Kantor Daerah Tingkat II Takengon.

Acara pertama Ketua Umum GOLKAR yang dilakukan di daerah ini adalah mengadakan pertemuan dengan pengurus GOLKAR se-daerah Istimewa Aceh beserta pimpinan keluarga besar Golongan Karya setempat yang dihadiri pula oleh Kasdam Bukit Barisan dengan seluruh aparatnya. Dalam kesempatan ini ketua umum memberikan pengarahan dan menguraikan tata kerja DPP GOLKAR secara panjang lebar.

Ia menjelaskan ruang lingkup dan inti dari Program Umum GOLKAR, yang pada dasarnya adalah Tri Sukses GOLKAR, sebagaimana juga Program Umum GOLKAR pada periode masa Bhakti 1983-1988 lalu, dengan

Upacara adat turut menyambut kedatangan Wahono dan rombongan

lebih diberikan bobot pada tanggung jawab dan peranan GOLKAR dalam rangka memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menjawab tantangan dalam

Wahono menyerahkan bibit unggul

menghadapi pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap kedua.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dengan program umum itu menurut Wahono adalah, untuk lebih memantapkan keberadaan, fungsi dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan agar semakin dewasa, mandiri, berakar, berkualitas dan demokratis, sehingga GOLKAR lebih mampu menjadi pelopor pembaharuan dan pembangunan, dalam mewujudkan demokrasi Pancasila serta semakin meningkatkan peranan kader GOLKAR sebagai kader Pancasila, kader pembangunan, berikut meningkatnya peran semua perangkat organisasi GOLKAR di semua tingkatkan.

Penataan Diri

Mengingat banyaknya tugas, beratnya kewajiban dan tanggung jawab dan beraneka ragamnya tantangan yang dihadapi oleh GOLKAR, Ketua Umum mengharapkan seyogyanya para kader GOLKAR di daerah, dan khusus bagi DPD dapat lebih meningkatkan konsolidasi organisasi dalam berbagai aspeknya, sebagai

Digitized by Google

modal dasar untuk dapat mensukseskan Pelita V khususnya dan pembangunan nasional umumnya, serta mensukseskan Pemilu 1992.

Dalam kaitan ini DPD GOLKAR diminta meningkatkan upaya penataan diri dalam artian personal, kelembagaan, kader, mekanisme organisasi maupun yang berkenaan dengan kekompakan koordinasi keluarga besar GOLKAR. Dan juga perlu ditingkatkan pula penataan mekanisme hubungan, kerjasama dengan semua kader yang bergerak di luar DPD.

Sejalan dengan hal tersebut Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Aceh, Abdullah Moeda, melaporkan tentang keadaan Golongan Karya di daerahnya yang saat ini telah mencatat anggota sebanyak 234.620 orang, karakterdes 142.926 orang, kader fungsional 20.529 orang ditambah anggota DPRD Tk II dan I berjumlah 135 orang. Dengan bermodalkan kader sebanyak ini pada pemilu 87 yang lalu GOLKAR Aceh telah mengantongi suara 52,16 persen. Dalam laporan itu diisyaratkan pula oleh Abdullah Moeda bahwa "lampu seluruh daerah Aceh telah menyala" untuk GOLKAR

Keakraban antara jalur A dengan jalur G

"tinggal terangnya saja", katanya.

Untuk ini, Ketua Umum juga memberikan petunjuk, agar GOLKAR membenahi tertib administrasi organisasi, meningkatkan manajemen organisasi, menggali serta menggunakan secara rasional dan optimal semua sumber daya, sarana pendukung dan kemudahan-kemudahan yang ada secara berencana dan bertanggung

Menikmati makanan santai dan meriah.

Digitized by Google

Salah satu mesjid yang diresmikan Wahono

jawab. Tegasnya, dalam rangka Tri Sukses GOLKAR, berlaku motto "tiada kegiatan tanpa penggalangan; tiada penggalangan tanpa pemantapan".

Dalam kesempatan pertemuannya dengan seluruh pengurus dan pimpinan jajaran keluarga besar Golongan Karya itu Ketua Umum juga menjelaskan salah satu keputusan Munas IV yang menyangkut susunan kepengurusan DPP GOLKAR yang sudah dapat diselesaikan dengan baik, "dan sudah tidak ada masalah lagi bagi kita," ujarnya.

Atas penjelasan tersebut Wakil Ketua DPD Abdullah Masry dan GOLKAR Aceh merasa lega, mengingat GOLKAR Aceh merasa mempunyai beban karena ketuanya duduk sebagai anggota formatur yang memilih personal kepengurusan DPP tersebut.

Sementara dalam sambutan peringatan HUT GOLKAR pada malam itu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, menyerukan kepada seluruh kader dan anggota GOLKAR di mana pun ia berada untuk memperkokoh semangat kejuangan GOLKAR, tanpa dapat tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh apapun. Karena, menurut Wahono, pada tahun-tahun mendatang akan banyak tantangan dan pengaruh yang pasti berupaya untuk menggoyahkan sikap dasar GOLKAR, baik dengan cara pendekatan yang halus maupun dalam bentuk-bentuk lain.

Anggota GOLKAR harus memperkokoh semangat kejuangan GOLKAR

Seruan Ketua Umum itu juga diulangi lagi ketika ia berada di Medan, dalam pertemuannya dengan para

Digitized by Google

pengurus GOLKAR Sumatera Utara ketika memanfaatkan waktu luang dalam perjalanan pulang dari Aceh menuju Jakarta.

Selanjutnya, Wahono mengatakan, sikap dan nilai dasar kejuangan GOLKAR adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 45, melalui fungsinya sebagai organisasi sosial politik. Sikap dasar itulah yang harus disadari dan selalu didasarkan pada setiap warga GOLKAR. Terlebih pada saat memperingati kelahiran GOLKAR seperti sekarang ini, kata Wahono, di hadapan ribuan kader GOLKAR yang memadati Gedung Olah Seni Takengon.

Wahono dan Ibu Mientarsih S Wahono dengan pakaian adat

Masjid YAMP

Dalam kunjungan kerjanya ke Aceh selama dua hari Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono yang juga selaku Irjenbang, meresmikan secara simbolis empat buah masjid hasil sumbangan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) masing-masing di

Aceh mengalami kemajuan dalam pembangunan daerah

Aceh Tengah 2 buah, Aceh Besar 1 buah dan Aceh Selatan 1 buah. Peresmian itu dipusatkan di Masjid Allatifah, Kecmatan Pegasing, Aceh Tengah.

Pada kesempatan itu, Wahono selaku Irjenbang menyatakan kekagumannya atas kemajuan pembangunan yang dicapai rakyat Aceh, dan membeberkan akan kegigihan kepahlawanan orang Aceh. Kepeloporan dan kepahlawanan rakyat Aceh itu dikemukakan oleh Wahono antara lain ditandai dengan monumen hidup, yang diberikan oleh rakyat Aceh yaitu lahirnya perusahaan penerbangan nasional "Garuda" dengan pemberian pesawat terbang yang pertamakalinya dioperasikan dengan nama pesawat terbang RI, 01 Seulawah, yang dari hasil penerbangannya itu dibelikan senjata untuk memperkuat persenjataan kita merebut kemerdekaan dari penjajah. Pada waktu itu Wahono ditugaskan di Aceh.

Dijelaskan pula oleh Wahono akan tujuan pembangunan yang sedang giat dilaksanakan sekarang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata materiil dan spirituil dengan memperhatikan aspek fisik maupun aspek mental secara terpadu, seiring, sejalan, serasi dan sehat.

Memang, masyarakat Aceh adalah masyarakat pemeluk agama Islam yang taat. Agama dan adat telah menyatu sebagai modal dasar rohaniah yang kuat dalam jiwanya. Ini tercermin dalam pola pikir dan tingkah laku mereka sehari-hari, tak mudah dipengaruhi oleh pola-pola yang bersifat pembaharuan.

Oleh sebab itulah, Gubernur Aceh Ibrahim Hassan dalam kesempatan itu menjelaskan akan arti dan makna susunan bangunan Masjid yang dibangun oleh YAMP tersebut secara gamblang yang intinya melambangkan kehidupan manusia dari alam barzah, dunia dan akherat. Dan dipilihnya bentuk tersebut sekaligus melestarikan arsitek budaya bangsa sendiri, seraya menguraikan sejarah kedatangan Islam ke tanah air. Dikatakan, Islam pertama kali datang ke Indonesia melalui Aceh dan pertama-tama yang dibangun adalah masjid yang bentuk atapnya bersusun tiga pada abad XV, dan oleh orang Aceh, Islam dibawa ke Jawa pada abad ke-XVI. Disana pertama-tama dibangun juga masjid yang atapnya bersusun tiga, yaitu masjid Demak.

Selain itu, Ketua Umum DPP GOLKAR dalam perjalanannya pulang berkesempatan singgah di Biruen, Aceh Utara, untuk menyerahkan sumbangan beras sebanyak 5 ton dan uang tunai Rp 1 juta secara spontan untuk korban banjir di kabupaten tersebut baru baru ini.

Selain itu juga menyumbangkan semen sebanyak 400 zak, ketika berkesempatan meninjau dam irigasi di Kecamatan Peusangan yang jebol akibat banjir.

Hadir menyertai rombongan Ketua Umum DPP GOLKAR ke daerah Istimewa Aceh tersebut adalah Ny Mientarsih S Wahono, Drs.Jakob Tobing MPA. Ketua, Oertoyo Oesman, SH, Ketua, Ir Usman Hasan dan Drs Freddy Latumahina kedua Wakil Sekjen, Hatta, BBA, Zulharmans, Postdam Hutasoit, dan Aulia Rachman.☐ (wt)

Digitized by Google

GOLKAR Tidak Ingin Campuradukkan Fungsi Perguruan Tinggi dan Organisasi Politik

Jawa Timur Masuk Daftar Unggulan

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kaderisasi bangsa. Oleh karena itu pendidikan politik dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila, tentunya perlu melibatkan unsur-unsur generasi muda dan perguruan tinggi sebagai pewaris kehidupan bangsa. Menyadari hal ini, Presiden Soeharto pun menyerukan supaya generasi muda mendapatkan pendidikan politik yang sehat serta berlandaskan sikap dan motivasi politik yang positif untuk mengambil bagian dalam kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan dan pembangunan nasional.

Berangkat dari pemikiran ini Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono yang didampingi Sekjen DPP GOLKAR Ir. Rachmat Witoelar, para ketua DPP dan DPD I GOLKAR Jawa Timur bertatap muka langsung dengan Civitas Academica Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam rangkaian peringatan HUT GOLKAR ke-24 awal Desember lalu. Pertemuan ini mempunyai makna khusus bagi perjuangan GOLKAR dalam dunia pendidikan politik dan kaderisasi. Perguruan tinggi dan GOLKAR adalah asset nasional yang sedang ditantang untuk menjawab persoalan bangsa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Wahon memandang bahwa ada persamaan tugas serta tanggung jawab antara lembaga Perguruan Tinggi dengan GOLKAR atau organisasi kekuatan sosial politik lainnya. Namun, hal ini tidak berarti perguruan tinggi adalah organisasi politik dan sebaliknya, organisasi politik bukanlah perguruan tinggi. GOLKAR dalam hal ini tidak ingin mencampur-adukkan fungsi-fungsi yang telah ada, agar tidak membahayakan tatanan masyarakat dan negara modern seperti Indonesia. Masing-masing fungsi mempunyai tata aturan dan etika yang berbeda. Sedang sikap GOLKAR terhadap perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah adalah tetap konsisten menjaga, agar lembaga ini berjalan sesuai dengan fungsinya.

Di depan kader-kader muda GOLKAR di lingkungan kampus tersebut Wahono menganggap pertemuan seperti ini sangat strategis dalam pembinaan kaderisasi. Karena, melalui upaya yang sedemikian mampu melahirkan suatu pendekatan yang efektif dan komunikatif. "Memang pada hakekatnya, pendidikan adalah suatu upaya terpadu untuk membentuk manusia pengamal Pancasila berkualitas tinggi serta bagian penting untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," katanya.

Sementara pada kunjungan di Gresik, Jawa Timur, dalam acara yang sama, Wahono bukan orang asing lagi bagi keluarga besar GOLKAR Jawa Timur, karena dia mantan gubernur Jatim, yang ditantang oleh M. Said agar lebih meningkatkan prestasi dan pengabdian. Moh Said, Ketua DPD I GOLKAR Jawa Timur, merasa optimis bahwa GOLKAR Jawa Timur mampu meningkatkan prestasinya pada masa mendatang, karena ketua jalur A (Try Sutrisno), Jalur B (Rudini) dan jalur C (Wahono), adalah putera-putera Jawa Timur.

Tantangan ini menjadi tanggungjawab bagi warga GOLKAR Jawa Timur sekaligus menjadi tekad bersama, agar program TRI SUKSES II GOLKAR mampu dilaksanakan dan disukseskan secara keseluruhan dan termasuk kegiatan di segala bidang yang tersirat dalam program ketiga jalur tersebut.

Jaminan Warga GOLKAR

Adapun sasaran untuk memperoleh suara pemilih dalam Pemilu mendatang. Moh. Said memberikan jaminan kepada Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang lain, yaitu PPP dan PDI bahwa GOLKAR tidak akan mentargetkan supaya memperoleh suara pemilih 100 persen. Janji dan jaminan ini bukan hanya disampaikan kepada warga GOLKAR Jawa Timur saja, tapi juga disampaikan langsung kepada wakil PPP dan PDI yang hadir dalam peringatan HUT GOLKAR ke-24 di Gedung Petro Kimia Gresik. Sehingga Jawa Timur yang telah sukses dalam Pemilu 1987 lalu, agar bisa dijadikan unggulan karena sudah siap memenangkan Pemilu 1992 dengan target 72 persen.

Sedangkan Wahono percaya bahwa GOLKAR makin mantap dan mempunyai kemampuan untuk menjabarkan aspirasi rakyat. Karena, sejak kelahirannya perjuangan GOLKAR adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan atau perorangan. Sikap dasar perjuangan ini harus disadari oleh setiap kader GOLKAR di Jawa Timur maupun di daerah yang lain.

Juga dalam mengemban tugas TRI SUKSES II GOLKAR harus dilandasi keterbukaan diri dan semangat kepahlawanan. Sikap ini tidak mustahil akan menghadirkan warga GOLKAR yang mampu mengerjakan semua tugas dengan seluruh potensi yang ada dan sekaligus menghantarkan warga GOLKAR Jawa Timur untuk mewujudkan cita-citanya sebagai daerah unggulan dalam Pemilu 1992 mendatang.

Peringatan HUT GOLKAR ke-24 di Gresik ini merupakan kunjungan pertama kali Wahono selaku Ketua Umum DPP GOLKAR dan dihadiri selain unsur-unsur DPP GOLKAR seperti Ir. Rachmat Witoelar, Freddy Latumahina, Postdam Hutasoit, Eric Samola, SH, T.S. Darsoyo, Ir. Tati Sumiarno, Drs. Didiet Haryadi, Sugeng Wijaya dan yang lainnya, juga hadir pinisepuh GOLKAR Moh. Noor, Gubernur Soelarso, Ketua DPD I, seluruh Ketua DPD II serta warga keluarga besar GOLKAR Jawa Timur lainnya. □ (DT)

Digitized by Google

HUT GOLKAR di Semarang :

Berlomba Dalam Lima Menit

Dalam kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah 26 November lalu, Ketua Umum GOLKAR, Wahono disambut dengan hiburan yang menyegarkan. Tidak saja dengan munculnya pelawak Subur Cs, tapi juga tampilnya dua tokoh di luar Golkar (PPP dan PDI) yang ikut memberi sambutan dalam HUT GOLKAR ke-24 di kota tersebut.

Tampilnya kedua tokoh tersebut, HUT GOLKAR ke-24 yang dilakukan secara sederhana di halaman gedung DPD tingkat I itu menjadi agak hidup. Karmani SH, Ketua DPW PPP Jawa Tengah memecah keheningan dengan berkata, "Saya diberi kesempatan lima menit untuk memberi sambutan." Hadirin tersenyum. Setiap kata yang diucapkannya sering membuat hadirin tertawa. Terlebih tatkala dia mengatakan harapannya agar GOLKAR tambah mampu menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk warga PPP.

Ketua Umum Golkar disambut dengan hangat

Giliran sambutan berikutnya adalah Ketua DPD PDI Jawa Tengah Soemario, yang tampil penuh humor. Tidak saja penampilannya yang mengundang tawa, tapi kalimat-kalimatnya juga demikian. "Saya juga akan memberi sambutan lima menit," katanya yang disambut tawa hadirin. Lebih-lebih, tatkala tokoh tua yang dialek Tegalnya masih kental ini mengucapkan kata GOLKAR makin lama makin besar saja. "Mudah-mudahan tidak hanya warga Golkar saja yang tertampung aspirasinya. Semisal ada warga PDI yang nakal, tolonglah GOLKAR membimbingnya ke jalan yang baik. Kami orang kecil, tetapi ingin sejajar dengan kekuatan sospol lainnya untuk membangun masa depan yang lebih baik" kata Mario.

Jawa Tengah selalu tunjukkan prestasi

Mendengar sambutan dari dua temannya itu, Ketua DPD I GOLKAR Jawa Tengah Drs H Soeparto, juga tidak kalah gesitnya. "Saya juga akan membatasi diri untuk berbicara lima menit saja." Hadirin kembali tertawa. Dalam pidatonya yang tanpa teks itu, Soeparto bertekad untuk meningkatkan kemenangan GOLKAR dalam Pemilu yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, dalam empat kali Pemilu, GOLKAR Jawa Tengah selalu menunjukkan prestasi meningkat. Dalam Pemilu 1971 daerah tersebut meraih 50,32 persen dari keseluruhan jumlah suara (5.174.182 suara). Pemilu 1977 perolehan suara bertambah lagi menjadi 52,62 persen atau 5735.379 suara. Pemilu berikutnya (1982) juga demikian, kenaikan dari perolehan suara bertambah me-

Digitized by Google

yakinkan yaitu mencapai 60,47 persen atau 7.940.158 suara. Dan lonjakan kenaikan dalam perolehan suara juga diperoleh dalam Pemilu 1987 yang mencapai 71,21 persen atau 9.734.228 suara.

Pemilu '87 harus dijawab dengan nilai tambah

Mampukah Jawa Tengah meningkatkan kemenangannya dalam Pemilu berikut? Hal ini masih harus dibuktikan dalam Pemilihan Umum 1992 yang akan datang. "Yang jelas, kata Seoparto, semua (PPP, GOLKAR dan PDI) juga kepingin menang."

Sambutan keempat jatuh kepada H Ismail, Gubernur Jawa Tengah. Mendengar dari tiga pembicara sebelumnya yang membatasi waktunya dengan lima menit itu, Ismail juga dalam sambutannya juga membatasi diri. Dalam bagian pidatonya yang singkat itu, H Ismail mengingatkan agar mawas diri dan pandai-pandai dalam membaca tanda-tanda jaman.

Tampaknya, sambutan yang singkat dari pembicara sebelumnya untuk memberi keleluasaan bagi ketua Umum GOLKAR Wahono yang baru terpilih Oktober lalu itu, untuk memberikan pengarahannya. Dalam sambutannya di hadapan warga GOLKAR Jawa Tengah itu, Wahono menyinggung tentang sejarah singkat lahirnya GOLKAR dan TRI SUKSES GOLKAR - Sukses konsolidasi idiil, dan sukses organisasi.

Tentang sukses kedua, yaitu sukses Repelita V, menurut Wahono ada dua hal penting yang akan dilakukan GOLKAR. Pertama, sesuai dengan fungsi sebagai kekuatan sosial politik, GOLKAR akan meningkatkan upaya menampung, menganalisa serta memutuskan masalah, problema yang dihadapi bangsa dan negara menjadi berbagai konsep kebijaksanaan organisasi, guna diperjuangkan melalui saluran konstitusional baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Organ utama yang akan mendapat tugas memperjuangkan konsep kebijaksanaan ini, menurut Wahono adalah Fraksi Karya pembangunan di DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Tentu, katanya lebih lanjut, ini mengandung amanat bahwa anggota FKP harus lebih meningkatkan peranan politiknya secara bertanggung jawab.

Di samping itu dalam mensukseskan Repelita V ini kader GOLKAR yang berada di keluarga besar GOLKAR yang sehari-harinya merupakan aparatur pemerintah, sangat diharapkan selalu meningkatkan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menggerakkan pembangunan. Pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah harus dapat ditegakkan sesuai dengan rasa keadilan.

Menurut Wahono, hal tersebut di atas sangat perlu. Sebab keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan telah menumbuhkan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tentu saja, tuntutan tersebut harus tetap dijaga jangan sampai menyimpang dari nilai-nilai idiologi nasional yaitu, Pancasila.

Sedangkan peranan kedua yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan Sukses Repelita V itu adalah melaksanakan program-program untuk mendinamisasikan masyarakat melalui kegiatan kekaryaan di berbagai bidang kehidupan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Untuk itu, kata Wahono, GOLKAR akan memobilisasi potensi sumber daya yang ada secara maksimal, menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi profesi dan fungsional yang telah mempunyai ikatan sejarah dalam jajaran keluarga besar GOLKAR, maupun dengan organsiasi kemasyarakatan lain atau berbagai lembaga dan instansi. Di sini, kata Wahono, GOLKAR terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh potensi masyarakat dalam program karya dan kekaryaan demi kepentingan masyarakat.

Menyinggung tentang Sukses Pemilu 1992, kata Wahono, GOLKAR tidak ada alternatip lain kecuali harus mensukseskannya dan agar Pemilu dapat tetap terselenggara dengan aman, tertib dan damai sesuai dengan peraturan perundangan dan tentu saja GOLKAR harus tetap berjuang agar dapat mempertahankan kemenangan.

Lebih lanjut dikatakan, dalam menghadapi Pemilu 1992 nanti, GOLKAR semakin menyadari bahwa rakyat sebagai pemilih telah semakin dewasa dan mampu mengukur serta menimbang-nimbang secara rasional dalam menentukan pilihannya. "Mereka tidak dapat lagi diberikan janji-janji kosong maupun ucapan-ucapan yang tidak realistis.

Selama empat tahun ini, kata Wahono, Organisasi peserta Pemilu akan dinilai oleh rakyat dalam membawakan aspirasinya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Hal tersebut tidak terkecuali bagi GOLKAR juga akan dinilai oleh rakyat selaku pemilih dan pendukungnya.

Menurut Wahono, kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1987 harus dijawab dengan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dan untuk itu, katanya lebih lanjut kita harus mampu melaksanakan keseluruhan program, baik kedalam maupun keluar secara terpadu dan disertai dengan semangat pengabdian serta kerja keras demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. □ (BM)

Digitized by Google

Sehari Dalam Kesederhanaan di Jawa Barat

Tidak lama setelah pelantikan, sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono yang mantan Gubernur Jawa Timur ini mengadakan kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan menuju kota Kembang, bersama dengan beberapa pengurus lainnya ditempuh dengan kereta api melalui stasiun Gambir. Ketua Umum yang berangkat dengan sejumlah pengurus itu naik satu gerbong dengan penumpang umum yang lain. Rombongan berbaur akrab.

Setiba di stasiun Bandung, tidak ada upacara pengalungan bunga serta kemeriahan lainnya. Hanya beberapa orang pengurus yang dapat dihitung dengan jari datang menjemput rombongan Ketua Umum Golkar ini, untuk kemudian mengantarkannya sampai ke penginapan.

Dalam kunjungan kerjanya di Semarang Jawa Tengah demikian pula.

Melihat dari dekat kader Golkar

Di Bandara Soekarno Hatta Ketua Umum bersama beberapa pengurus berangkat tidak dari ruang tunggu VIP. Ketua Umum masuk pintu yang biasa digunakan penumpang umum, kemudian langsung menuju ruang tunggu di dalam bandara tersebut.

Kunjungan Sehari

Kunjungan Ketua Umum GOLKAR di Bandung ini merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di beberapa daerah. Sebelumnya, beberapa daerah seperti Surabaya, Palembang dan 21 Nopember adalah giliran Bandung. Kunjungan ke daerah tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan setelah Wahono terpilih menjadi Ketua Umum GOLKAR.

Di kota Bandung, maupun di kota-kota yang lainnya itu kunjungan kerja Ketua Umum ini, selain ingin melihat dari dekat kader-kader GOLKAR di

Peringatan ini mempunyai tiga ciri

Digitized by Google

Bukan sekedar kegiatan rutin

daerah dan sekaligus untuk memenuhi undangan untuk menghadiri hari ulang tahun GOLKAR yang diselenggarakan daerah tersebut.

Hari ulang tahun GOLKAR ke-24 yang diperingati daerah tersebut dilakukan dengan sederhana. HUT, yang dilaksanakan di gedung Pusbangsisop itu, selain menyajikan hiburan-hiburan dari kesenian daerah seperti tari Jaipong, juga sambutan-sambutan. Misalnya Ketua panitia yang memberikan laporan tentang berbagai kegiatan dalam ikut memeriahkan ulang tahun tersebut di antaranya gerak jalan, lomba mengarang dan yang lainnya.

Sambutan lain juga datang dari ketua DPD tingkat I, Agus Muhyidin, Ketua Dewan Penasehat H.R. Moh. Yogie SM dan tidak ketinggalan Ketua Umum GOLKAR sendiri, yaitu Wahono. Agus Muhyidin, dalam sambutannya melaporkan berbagai kegiatan yang dilakukan, juga tekad GOLKAR Jawa Barat untuk meningkatkan lagi kemenangan dalam Pemilu yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, dalam empat kali Pemilu Golkar, Jawa-Barat selalu menempati posisi paling atas. Pemilu 1972 meraih 76,12 persen suara. Kemudian dua kali Pemilu setelah itu meskipun GOLKAR tetap meraih kemenangan, namun perolehan suaranya turun dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 1977 suara yang diperoleh menjadi 66,27 persen. Dan Pemilu 1982 kembali turun meskipun tidak banyak, yaitu menjadi 63,34 persen. Sedangkan dalam Pemilu 1987, GOLKAR Jawa Barat kembali bangkit dan memperoleh suara yang mengesankan, yaitu 71,31 persen.

Tiga Ciri

Ulang tahun yang mengambil tempat di pinggiran kota Bandung ini tetap saja mendapat perhatian warga GOLKAR setempat. Gedung di Pusbangisop yang digunakan untuk memperingati HUT tersebut dipadati oleh segenap warga GOLKAR. Sedangkan tempat duduk yang disiapkan panitia penuh sesak. Diperkirakan sekitar 4000 warga GOLKAR hadir dalam acara tersebut.

Agus Muhyidin dan HR.Moh Yogie SM, dalam kata sambutannya menyebut, Ulang tahun GOLKAR yang diselenggarakan ini bukan hanya sekedar kegiatan rutin, namun merupakan ibadah.

Lebih jauh dari itu, Yogie SM menyebut, hari ulang tahun ini akan lebih bermakna, apabila peringatan ini mempunyai tiga ciri. Pertama, kesediaan untuk melakukan evaluasi apa yang telah dilakukan, kedua, adanya niat dan rencana untuk berbuat sesuatu yang lebih baik pada tahun berikutnya, dan ketiga, adanya kesiapan untuk bertindak yang lebih baik bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

Kemudian, Yogie SM menyebut dua hal yang dapat menjadi referensi bagi tercapainya makna yang paling baik dalam peringatan ini. Pertama, sukses konsolidasi, sukses Repelita V dan Sukses Pemilu tahun 1992. Kedua, adalah realisasi keputusan-keputusan Munas dan daerah. Sedangkan, Kata Yogie, modal moril utama yang telah kita dapat adalah kepercayaan dan sekaligus harapan masyarakat yang tercermin dengan kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1987, sampai beberapa jauh dapat dipenuhi harapan tersebut dan merealisasikan program kerja yang telah disepakati. Hal ini, kata Yogie akan merupakan indikator keberhasilan GOLKKAR pada masa yang akan datang.

Sementara, Ketua Umum GOLKAR Wahono, yang memberi kata sambutan terakhir dan merupakan puncak acara bagi kegiatan HUT GOLKAR ini memberikan pengarahan dan sekaligus petunjuk bagi pengurus serta warga GOLKAR lainnya. Dalam uraiannya, Ketua Umum memberikan berbagai masalah seperti Tri Sukses GOLKAR, khususnya yang menyangkut kemenangan GOLKAR dalam tahun 1992.

"Menghadapi Pemilu 1992 mendatang GOLKAR tidak punya pilihan lain kecuali mensukseskannya. Pemilu nanti agar tetap terlaksana dengan tertib dan damai. Dan sudah barang tentu kita harus berjuang untuk mempertahankan kemenangan Golongan Karya" ujarnya.

Menyinggung tentang DPD GOLKAR Jawa Barat, Ketua Umum menilai GOLKAR daerah tersebut cukup mantap dan pasti mau menjawab tantangan dan melaksanakan program-programnya.

Dan dalam lima tahun mendatang, Wahono optimis dan yakin bahwa GOLKAR Jawa Barat akan tampil dengan optimis dan dinamis. Dengan semangat kekeluargaan yang mantap, tidak ada tantangan yang tidak bisa dihadapi dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. □ (BM)

Digitized by Google

DKI Agar Mantapkan Posisi

Ini merupakan kesempatan yang pertama bagi Wahono, Ketua Umum DPP GOLKAR, berhadapan dengan para kader dan warga GOLKAR DKI Jakarta yang dinilainya merupakan kader-kader yang militan, karena GOLKAR DKI pada Pemilu yang lalu berhasil mengangkat kekalahan GOLKAR pada pemilu-pemilu sebelumnya di Wilayah DKI Jakarta. Dengan ini berarti GOLKAR telah memperlihatkan kemampuannya dan berhasil menempati posisi yang mantap, kata Wahono.

Oleh karenanya ia menyerukan kepada para kader dan warga GOLKAR DKI Jakarta untuk dapat mempertahankan kemenangan dan kebesaran GOLKAR pada Pemilu 1992 mendatang.

Untuk ini Ketua Umum mengharapkan agar GOLKAR DKI tetap mempertahankan semangat kekeluargaan, keterbukaan dan kolektivitas mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat serta koordinasi tiga jalur yang mantap. Dengan demikian akan tumbuh keyakinan "tiada tantangan yang tak terselesaikan, dan tak ada masalah yang terbiarkan tetap jadi masalah dalam menghadapi Pemilu mendatang," kata Wahono di hadapan sekitar 3000 kader GOLKAR DKI di Gedung Pertamina Simpruk, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketika memperingati HUT GOLKAR ke-24 yang diselenggarakan DPD GOLKAR tingkat I DKI Jakarta, Desember lalu.

Diingatkannya pula, kegiatan yang hendak dilakukan GOLKAR pada masa mendatang hendaknya benar-benar bermakna bagi masyarakat banyak. "GOLKAR harus mampu melaksanakan program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.

Dalam sambutan pengarahannya Wahono juga mengutip harapan Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina GOLKAR, yang mengatakan bahwa GOLKAR harus terus memperjuangkan semua masalah yang dihadapi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Perjuangan GOLKAR, terutama dalam ikut membantu pemerintah dalam memecahkan kesulitan ekonomi, lapangan kerja dan masalah lainnya hendaknya selalu disalurkan melalui lembaga legislatif yakni Fraksi Karya Pembangunan baik DPRD Tingkat II, DPRD Tingkat I maupun DPR RI.

Golkar dituntut perkokoh solidaritas

Untuk ikut mengatasi masalah itu, GOLKAR dituntut memperkokoh solidaritas sosial dan membentuk perangkat kerja yang kompak dan bersatu.

Makin Maju

Agar mencapai keberhasilan GOLKAR dalam pemilu 1992 mendatang, Wahono minta kepada kader-kader GOLKAR di DKI supaya meningkatkan semangat kebersamaan. "Sikap demokratis dalam jajaran GOLKAR harus dikembangkan," pinta Wahono.

Sekarang ini, katanya, rakyat pemilih dan pendukung kekuatan politik di Indonesia sudah semakin maju dalam berpikir. Mereka akan memilih kekuatan politik yang benar-benar bisa membawakan aspirasi rakyat dan mampu melaksanakan program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. "Rakyat jangan diberikan janji-janji kosong belaka. Akan tetapi, hendaknya apa yang dilakukan GOLKAR adalah merupakan karya-karya nyata. GOLKAR DKI hendaknya dapat membina sikap keterbukaan, kebersamaan dengan segenap potensi rakyat terutama dalam menghadapi Pemilu 1992 mendatang," pinta Ketua Umum mengakiri sambutannya.

Sementara itu, turut memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, Ketua DPD GOLKAR Tingkat I DKI Jakarta, Moch Basofi Soedirman. Dalam sambutannya ia mengajak seluruh kader GOLKAR dan segenap jajarannya, untuk menjadikan GOLKAR lebih berbobot, besar dan juga "berat". Ia juga mengajak warga GOLKAR di wilayahnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Marilah kita langkahkan sesuai dengan langkah kita", pinta Basofi.

Turut hadir menyertai Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam acara itu, selain Ibu Mientarsih Wahono, juga Sekjen Ir Rachmat Witoelar beserta Ny Erna Witoelar, dan segenap pengurus DPP GOLKAR Koordinator Wilayah III, DKI Jakarta dan Jawa Barat.☐ (wt)

Digitized by Google

Menggalang Tekad di Bumi Sriwijaya

Pada tanggal 25 November lalu, Ketua Umum DPP GOLKAR, Wahono dan rombongan berkunjung ke Sumatera Selatan, untuk merayakan HUT GOLKAR ke-24, yang diselenggarakan DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan mengambil tempat di Taman Budaya Sriwijaya, Palembang.

Kedatangannya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang dulu lebih dikenal dengan nama Talang Betutu, disambut dengan amat sederhana. Di Tangga pesawat GA 136 yang ditumpangi Ketua Umum GOLKAR dan rombongan, dua gadis manis menyodorkan untaian bunga tangan masing-masing untuk Ny. Mientarsih S Wahono dan Ny. Erna Witoelar, begitu menjejakkan kaki di Bumi Sriwijaya.

Sementara itu, puluhan pemuda berseragam hijau, loreng dan berbaret, menunggu di pelataran bandara Sultan Mahmud Badarudin, dengan membentangkan sebuah spanduk bertuliskan "Selamat Datang Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan Ibu beserta rombongan di Bumi Sriwijaya". Mereka adalah generasi muda yang tergabung dalam FKPPI, AMPI, Gema MKGR dan Pemuda Pancasila yang pada hakekatnya adalah Generasi Muda GOLKAR.

Dari Lapangan Udara, rombongan Ketua Umum yang hanya terdiri 8 orang itu, dibagi dua. Ibu Mientarsih S Wahono dan Ibu Erna Witoelar meninjau kegiatan pengrajin Ibu-ibu rumah tangga. Sementara Ketua Umum Wahono, Waskito, Rachmat Witoelar, Ponco Sutowo, Sri Redjeki dan Irsyad Sudiro menuju Kantor DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Selatan yang diantar Ketua Dewan Pertimbangan/Gubernur H Ramli Hasan Basri, Ketua DPD I Sumsel Hatta Mustafa dan segenap fungsionaris DPD GOLKAR setempat.

Di Aula Kantor DPD GOLKAR telah menunggu para Ketua dan Sekretaris DPD GOLKAR Tingkat II dari 10 Kabupaten dan Kotamadya se-Sumatera Selatan serta segenap pengurus DPD GOLKAR Tk I dan Pimpinan Orsosmasinal dan orsinalmas Kodya Palembang. Di hadapan sekitar 60 kader pimpinan yang memadati aula itu, Wahono memberi pengarahan tentang berbagai hal secara panjang lebar.

Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan Ketua DPD I GOLKAR Sumsel Hatta Mustafa

Dalam pengarahannya itu Wahono antara lain mengatakan, untuk melaksanakan kegiatan operasional 5 tahun mendatang, tugas kita telah ditetapkan oleh MUNAS melalui keputusan-keputusan MUNAS. Adapun yang menjadi sasarannya adalah melaksanakan TRI SUKSES GOLKAR yang ke II, yang meliputi Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita V, Sukses Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1993, yang kesemuanya merupakan kelanjutan, pengembangan, peningkatan, pembaruan dan penyempurnaan dari program GOLKAR 5 tahun

Ibu Mientarsih S Wahono menerima seuntai bunga dari kader GOLKAR

Digitized by Google

Semangat keterbukaan, kebersamaan dan kekompakan turut mewarnai pejuang GOLKAR

lalu yang telah dilaksanakan dengan sukses.

Untuk melaksanakan tugas-tugas itu semua, Ketua Umum GOLKAR mengharapkan, agar Pimpinan GOLKAR di segala tingkatan pertama-tama membina semangat keterbukaan, kebersamaan, kekompakan. Dengan bekal semangat yang demikian itu, dan dibarengi semangat kepahlawanan yang menggelora, menurut Wahono, tugas-tugas yang membentang di hadapan kita akan terasa ringan.

Tantangan ke depan menurutnya adalah bagaimana tanggungjawab GOLKAR dalam rangka memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila dan peningkatan pengabdiannya kepada masyarakat, serta mensukseskan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua, yang merupakan inti dari Program Umum GOLKAR.

Intern-Ekstern

Untuk itu, Wahono mencanangkan dua sasaran yang hendak dicapai yaitu sasaran secara intern dan sasaran secara ekstern.

Sasaran intern dalam Program Umum dimaksudkan untuk lebih memantapkan keberadaan, fungsi dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan agar semakin dewasa, mandiri, berakar, berkualitas dan demokratis, sehingga lebih mampu menjadi pelopor pembaruan dan pembangunan, dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila serta semakin meningkatnya peranan kader GOLKAR sebagai Kader Pancasila dan Kader Pembangunan, serta meningkatnya peranan semua perangkat organisasi GOLKAR di semua tingkatan.

Generasi muda GOLKAR tegar dalam menyambut kedatangan rombongan DPP GOLKAR

Digitized by Google

Sedang sasaran ekstern yang dimaksud adalah, tetap tegaknya negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Suksesnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya Pelita V untuk memantapkan landasan guna memasuki tahap tinggal landas, meningkatnya kegairahan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, serta kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1992.

Kepada semua jajaran dan segenap warga GOLKAR Wahono mengingatkan bahwa "pelaksanaan Program Umum GOLKAR ini memang menjadi tanggung jawab DPP GOLKAR, tapi dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisai, anggota, kader serta segenap Keluarga Besar GOLKAR baik di pusat maupun didaerah. "dalam rangka Tri Sukses GOLKAR berlaku motto "tiada kegiatan tanpa penggalangan, tiada penggalangan tanpa pemantapan".

Wahono berada di tengah-tengah kader GOLKAR Sumsel

Tiada kegiatan tanpa penggalangan, tiada penggalangan tanpa pemantapan

Motto Wahono ini adalah kelanjutan dari motto Golkar sebelumnya yang dikenal dengan "tiada hari tanpa karya" atau yang populer dengan "kerja keras".

Komisaris

Dalam kerangka itulah maka, Ketua Umum GOLKAR meminta kepada jajaran fungsionaris DPD GOLKAR Tingkat II untuk dapat secara sungguh-sungguh membina Komisaris-komisaris di tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan, mengingat Komisaris sebagai pelaksana dari DPD II yang mempunyai tugas menggalang, membina serta mengarahkan anggota GOLKAR dan menjadi titik pusat kegiatan serta koordinator para organisasi di semua bidang, fungsi/profesi di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Usai memberikan pengarahan, Ketua Umum DPP Golkar Wahono pada malam itu menghadiri perayaan HUT GOLKAR ke-24 yang diselenggarakan oleh DPD GOLKAR Tk I Sumsel dan sekaligus memberikan sambutannya. Kehadirannya dalam acara seperti ini merupakan yang ketiga kalinya setelah ia terpilih sebagai pucuk pimpinan GOLKAR sejak 25 Oktober lalu. Kehadirannya yang pertama diberikan untuk daerah Jawa Timur, kedua daerah Jawa Barat dan yang ketiga Sumatera Selatan.

Di hadapan sekitar tiga ribu kader GOLKAR yang memadati Gedung Taman Budaya Sriwijaya, Palembang itu, Ketua Umum mencanangkan Program Tri Sukses GOLKAR ke-II agar dimasyarakatkan. Tri Sukses GOLKAR ke-II yang telah menjadi keputusan MUNAS IV GOLKAR tersebut merupakan peningkatan dari apa yang telah dicapai oleh Tri Sukses pertama.

Wujud pelaksanaan dari Tri Sukses ke-II tersebut oleh Wahono disimpulkan menjadi dua program, yaitu program kedalam dan prgoram ke luar GOLKAR.

Kedalam, wujud pelaksanaan sukses Konsolidasi. Program yang bersifat kedalam ini amat penting, kata Wahono, bukan saja bagi GOLKAR, melainkan juga bagi perkembangan masyarakat, karena bila program ini menyentuh pada kader, apalagi anggota GOLKAR secara keseluruhan, maka pada gilirannya kader dan anggota GOLKAR tersebut akan merupakan potensi aktual bangsa yang pasti dapat ikut berkiprah mengabdikan dirinya bagi pembangunan bangsa dan negara, ujarnya.

Adapun program sukses Konsolidasi dari Tri Sukses ke-II ini menurut Wahono tetap meliputi konsolidasi idiil, wawasan dan organisasi, yang merupakan penningkatan dari apa yang telah tercapai sebelumnya. Dan selanjutnya akan dititikberatkan pada peningkatan kualitas kader yang telah tersusun selama ini. "Program yang satu ini tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegas Ketua Umum GOLKAR, karena jumlah kader yang sedemikian banyak itu harus segera dibarengi dengan upaya peningkatan pengetahuan ketrampilan, wawasan serta peran.

Peran itu menurut Wahono adalah, peran politik kader GOLKAR yang memiliki tiga demensi yang tidak terpisahkan yaitu, menjaga ideologi Pancasila dan wawasan nasional,

Digitized by Google

mendinamisasi lingkungan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional bagi kesejahteraan bersama dan menjadi tenaga inti organisasi untuk mendukung dan menggerakkan organisai dalam rangka lebih mengakarkan GOLKAR di masyarakat.

Sedang mengenai sukses kedua, sukses Repelita V, Wahono mengatakan, ada dua peran pokok yang hendak dilakukan GOLKAR yaitu, GOLKAR akan meningkatkan upaya menampung, menganalisa serta merumuskan problema yang dihadapi bangsa dan negara menjadi konsep kebijaksanaan organisasi, guna diperjuangkan melalui saluran konstitusional baik tingkat nasional maupun daerah.

Organ utama yang akan mendapat tugas memperjuangkan konsep kebijaksanaan ini menurut Ketua Umum adalah Fraksi Karya Pembangunan (FKP) di DPR, DPRD I dan DPRD II. Disamping itu melalui kader GOLKAR yang berada di Keluarga Besar GOLKAR yang sehari-hari merupakan aparatur pemerintah, juga akan sangat diharapkan selalu meningkatkan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menggerakkan pembangunan.

Peran lain ialah, melaksanakan program-program untuk mendinamisasikan masyarakat melalui kegiatan kekaryaan dibarengi bidang kehidupan yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

Untuk itu GOLKAR akan memobilisasi potensi sumber daya yang ada secara maksimal, menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi profesi fungsional yang telah mempunyai ikatan sejarah dalam jajaran Keluarga Besar GOLKAR, maupun dengan organisasi kemasyarakatan lain atau lembaga, dan instansi, kata Wahono.

Dalam kaitan ini Wahono mengemukakan, GOLKAR terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh potensi masyarakat dalam program karya dan kakaryaan, demi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya mengenai sukses yang ketiga, sukses Pemilu 1992, Wahono menegaskan bahwa bagi GOLKAR tidak ada alternatif lain kecuali harus menyukseskannya, agar pemilihan umum dapat tetap terselenggara dengan aman, tertib dan damai sesuai dengan peraturan perundangan," dan tentu saja kita harus tetap berjuang agar dapat mempertahankan kemenangan GOLKAR," katanya.

Untuk ini Ketua Umum mengharapkan agar warga Golkar menjawabnya dengan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Rakyat, katanya, tidak lagi dapat diberikan janji kosong maupun ucapan yang tidak realistis, karenanya kita harus mampu melaksanakan keseluruhan program, baik ke dalam maupun ke luar secara terpadu, disertai semangat pengabdian serta kerja keras, demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Kepada seluruh jajaran DPD GOLKAR Sumsel, Ketua Umum GOLKAR mengajak agar selalu berada dalam semangat kebersamaan dan membina koordinasi sesama Keluarga Besar GOLKAR. Dengan mengembangkan semangat demikian, proses pengambilan keputusan dalam tubuh organisasi menjadi makin demokratis. Dengan demikian akan mendorong kreativitas dan keterbukaan pengurus dan kader dalam menyumbang pengembangan organisasi, sehingga GOLKAR makin kokoh, kuat dan dewasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan organisai. Untuk ini posisi Sumatera Selatan dipandang dari skala nasional menurut Ketua Umum GOLKAR, dinilai mantap dan mampu menjawab berbagai tantangan dengan pelaksanaan program-programnya.

Sementara itu, Ketua DPD GOLKAR Tk I Sumatera Selatan Hatta Mustafa, dalam sambutannya mengatakan, Kunjungan Ketua Umum DPP GOLKAR pertama kali ke Sumsel ini mempunyai arti penting dan nilai khusus bagi kemajuan dan pengembangan GOLKAR di daerah tersebut.

Dalam peringatan HUT GOLKAR ke-24 DPD GOLKAR Tk I Sumsel tersebut, GOLKAR menganugerahkan/menetapkan sesepuh GOLKAR Sumsel yang terdiri dari 5 orang, yaitu KH.AA. Rifai, Sufyan Dana (Alm), H.M. Noordin, H Ramli Raju dan Abdul Halim.□ (wt)

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA DASAR
P.T. INDUSTRI SODA INDONESIA (PERSERO)
JL. RAYA WARU 31, WARU SIDOARDJO

MENGUCAPKAN
SELAMAT ATAŞ TERPILIHNYA
BAPAK LETJEN. TNI (PURN) WAHONO
Sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR
Dan
BAPAK Ir. RACHMAT WITULAR
Sebagai Sekretaris Jenderal

DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLKAR
MASA BHAKTI 1988 - 1993

Digitized by Google

Susunan Dewan Pembina GOLKAR

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pembina GOLKAR dalam melaksanakan Keputusan MUNAS IV GOLKAR, khususnya keputusan nomor V, VI, VIII, IX tentang penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Pernyataan Politik dan Penetapan Ketua Dewan Pembina - Golongan Karya, Ketua Dewan Pembina GOLKAR Bapak **Soeharto** mengangkat pembantu-pembantunya yang dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas kewajiban Dewan Pembina GOLKAR seperti yang diputuskan oleh MUNAS IV GOLKAR dalam rangka mencapai tujuan Golongan Karya demi terciptanya tujuan Nasional.

Yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pembina Golongan Karya nomor 1/DP - GOLKAR tahun 1988, tentang susunan dan tatakerja Dewan Pembina Golongan Karya itu adalah; **Soeharto** sebagai Ketua merangkap anggota; **Sudharmono, SH** sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai Pengamat Umum; **Bustanil Arifin, SH** sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Sumatera bagian Utara: Daerah tingkat I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau; **Soesilo Soedarman** sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Sumatera bagian Selatan meliputi Daerah Tingkat I Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung;

Soepardjo Roestam, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Jawa; **Drs. Radius Prawiro**, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Nusa Tenggara meliputi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur; **Sudomo**, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Kalimantan; **Harmoko**, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Sulawesi; **L.B. Moerdani**, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah Indonesia Bagian Timur meliputi Daerah Tingkat I Maluku dan Irian Jaya.

Prof.Dr.Ing. B.J. Habibie sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Ilmuwan dan Cendekiawan; **H. Munawir Sjadzali, MA**, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Rohaniawan; **Prof. Dr. Saleh Affif**, sebagai anggota yang ditugaskan sebgai pengamat Daerah Tingkat I Aceh; **Ir. Akbar Tandjung**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sumatera Utara; **Prof.Dr. Awaloedin Djamin, MPA**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sumatera Barat; **Dr. Arifin M. Siregar**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Riau;

Ir. Radinal Moochtar, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Jambi; **Ir. Hasjrul Harahap**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan; **Ir. T. Ariwibowo**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat daerah Tingkat I Lampung: **Soegiarto**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Bengkulu: **Ir. Azwar Anas**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I DKI Jakarta; **Ir. Sarwono Kusumaatmadja**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Jawa Barat; **Ir. Hartarto**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Prof. Dr. Haryati Soebadio, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I D.I. Yogyakarta; Ny. **A. Sulasikin Moerpratomo**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Jawa Timur; **Ismail Saleh, SH**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Kalimantan Barat; **Dr. Adhyatma, MPH**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah; **Prof. Dr. Fuad Hassan**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan; **Ir. Drs Ginandjar Kartasasmita**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur:

Prof. Dr. Emil Salim, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; **R. Soekardi**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah; **Ir. Siswono Yudohusodo**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara; **Ir. Wardoyo**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; **Drs. Moerdiono**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Bali; **Makmun Murod**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat; **Dr. J. Soedradjad Djiwandono**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur; **Drs. Cosmas Batubara**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Maluku; **Prof. Dr. J.B. Sumarlin**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Irian Jaya; **Ali Alatas, SH**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Daerah Tingkat I Timor Timur;

Try Sutrisno, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat jalur A: **Rudini**, sebagai anggota yang ditugaskan sebagai pengamat Jalur B; **Gatot Suherman**, sebagai Sekretaris I merangkap Anggota; **Drs. Nasrudin Sumintapura, MA**, sebagai Sekretaris II merangkap anggota; **Prof. Dr. B.S. Mulyana**, sebagai Sekretaris III merangkap anggota; **Dr. Ir. Syarifudin Baharsjah**, sebagai Sekretaris IV merangkap anggota; **Drs. Saadilah Mursjid, MPA** sebagai Sekretaris V merangkap anggota.

Tatakerja Dewan Pembina Golongan Karya yang keputusannya dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 1988 tersebut berbeda dengan tata kerja Dewan Pembina sebelumnya, dimana yang berlaku sekarang semua Wakil Ketua merupakan Ketua Presidium Harian dan Semua Sekretaris juga menjadi Sekretaris Presidium Harian, sedang Koordinator Presidium Harian masih akan diatur atau ditunjuk dengan keputusan tersendiri, dan mengenai Kepala Sekretariat Dewan Pembina GOLKAR masih dijabat **Sukarton Marmosudjono, SH.**□ (wt)

Digitized by Google

Rekreasi Akhir Tahun Karyawan DPP

Bagi karyawan sekretariat jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, apa yang namanya rekreasi bersama boleh dibilang langka. Sejak lahirnya Sekretariat Bersama Golongan karya tahun 64 hingga sekarang (telah dirayakan HUT nya yang ke-24,) karyawan sekretariat DPP GOLKAR baru terhitung dua kali mengadakan rekreasi bersama.

Pertama, diadakan tahun 73, seusai GOLKAR punya gawe, mensukseskan Pemilu, Sidang Umum dan Munas pertamanya. Karyawan rekreasi bersama ke Puncak — 80 km arah Tenggara Jakarta — untuk menghibur diri, melepaskan lelah melupakan sejenak hiruk-pikuk yang terjadi di kantor saat itu.

Kedua, rekreasi bersama itu diadakan pada akhir tahun 88. — 15 tahun kemudian. Inipun terselenggara berkat budi baik pribadi Kepala Sekretariat. Acara ini diselenggarakan juga setelah GOLKAR usai punya gawe besar: Pemilu, Sidang Umum dan Munas ke IV.

Rekreasi kedua kalinya ini, memilih tempat tepi barat Selat Sunda, "Pantai Salira Indah" 125 km arah barat Jakarta. Di tempat ini sekitar 80 orang karyawan sekretariat Dewan Pimpinan Pusat organisasi terbesar itu melepaskan lelah, bergembira-ria bersama sehari semalam, memecah sepinya alam dan gelapnya malam pantai ujung barat pulau Jawa yang masih sepi akan pengunjung, baik turis lokal, apalagi turis asing.

Hujan lebat yang tak kunjung henti malam itu, tak mengurangi kegembiraan. Setelah santap malam pesta kebun bersama melahap habis 5 kambing guling mereka menghibur diri berbaur menjadi satu, joget bersama, berdendang riang, tak peduli dengan tetesan air hujan yang membasahi tubuhnya. Usai joget tengah malam itu dilanjutkan dengan aneka permainan hingga pagi hari, yang terus dilanjutkan dengan lari pagi menyusuri pantai, sepak bola dengan bola plastik, berenang, mancing dan sebagainya.

Biasa, dialami setiap kehidupan manusia, ada kalanya senang, ada kalanya susah. Begitu juga kegembiraan malam itu, akhirnya sedih datang juga tanpa disengaja. Mengapa, lantaran hanya ia tidak dapat berbagi senang dengan keluarga, tak dapat membekali sedikit jajan sekedar ole-ole yang di rumah, "beginilah orang kecil" keluh salah seorang teman. Tapi tak apalah, toh masih dapat berbagi kenangan yang tak habis dibicarakan, tak seperti jajan makanan, sekali makan habis tanpa kenangan.

Perlu diadakan dalam kesempatan tertentu

Terbatas fasilitas

Berekreasi (berwidyawisata) semacam ini memang perlu diadakan, Kata Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, dalam memberikan surpraise pertamanya terhadap karyawan di lingkungan kantor organisasi yang ia pimpin, akhir Desember. Usaha semacam ini perlu dilanjutkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu yang sekaligus dapat menambah pengetahuan dan dalam lingkup yang lebih besar, ujarnya.

Namun ia mengingatkan, GOLKAR adalah suatu organisasi sosial politik, bukan aparat pemerintah yang untuk menjalankan misinya, segalanya disediakan oleh pemerintah, baik anggaran maupun fasilitas. Dan GOLKAR juga bukan perusahaan atau suatu usaha yang tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi Golongan Karya adalah organisasi sosial politik yang tujuan pokoknya adalah mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara untuk mengangkat harkat, derajad dan martabat bangsa kita untuk mengajak rakyat berpartisipasi dalam pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah dan rakyat untuk mencapai cita-cita perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur.

Sudah barang tentu sebagai organisasi sosial politik yang menyandarkan kemampuan keuangannya dari iuran anggota dan bantuan donatur yang tidak mengikat dan juga dari usaha-usaha yang syah, maka tentunya terbatas pula kemampuan kantor menyediakan fasilitas untuk petugas staf sekretariat sebagai unsur pendukung DPP.

Oleh karena itu Wahono dalam kesempatan itu mengingatkan, yang penting bagi staf adalah keinginan untuk mengabdi melalui staf pendukung dari Dewan Pimpinan Pusat ini. Dan dalam situasi yang serba terbatas dan kurang itu, yang terpenting perlu kita ciptakan adalah kerukunan, rasa persatuan dan kesatuan, rasa kesetiakawanan di dalam memelihara semangat kerja, katanya mengakhiri silaturrahmi dengan karyawan sekretariat Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR. □ wt

Digitized by Google

Oleh : Prof.Padmo Wahyono SH

Pengembangan Hak & Kewajiban Asasi Warga Negara Dalam Mengamalkan Pancasila dan UUD'45

Berbicara mengenai pengembangan hak dan kewajiban asasi waga negara sebagai pengamalan Pancasila dan UUD'45, memerlukan kejelasan tentang beberapa masalah dasar seperti: a) Apakah yang pada umumnya dianggap sebagai hak asasi manusia; b) Apakah yang merupakan hak dan kewajiban asasi menurut UUD'45 sebagai penjabaran daripada Pancasila dan c) Apakah yang merupakan masalah dalam pengembangannya, sebagai pengamalan Pancasila.

Dengan memahami konsep ini maka pengembangannya lebih diarahkan kepada operasionalisasi konsep tersebut di dalam kehidupan hukum di dalam praktek, baik dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan maupun di dalam pendidikan hukum formal atau nonformal seperti penyuluhan hukum, bantuan hukum dan sebagainya.

Di dalam kaitannya dengan pengembangan ini maka petunjuk Penjelasan UUD'45 mengenai *"semangat"* menjadi relevan, yang apabila kita terapkan di dalam permasalahan yang kita hadapi akan berbunyi sebagai berikut: "bahwa yang penting dalam hal penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara ialah semangat para pelaksananya. Sekalipun dibuat atau ada suatu konsepsi yang indah tentang hak dan kewajiban warga negara yang bersumber pada UUD'45, namun semua itu tidak ada artinya *apabila semangat* para pelaksana tidak mendukungnya." Sebaliknya sekalipun rumusan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD'45 tidak sempurna, tapi hal ini tidak menjadi penghalang apabila semangat para pelaksananya sejalan dengan Pancasila dan UUD'45.

Faham Hak Asasi

Pengertian tentang hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana lazim kita pelajari dari kepustakaan dan seringkali dianggap sebagai teori yang universal atau kadang-kadang

Padmo Wahyono SH

dianggap sebagai bersumber pada pola pikir liberal (individualistik) ialah bahwa pada dasarnya hak asasi manusia secara pokok meliputi: jiwa seseorang, kebebasan seseorang dan hak milik seseorang atau seringkali dirumuskan pula dengan ungkapan kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan atau kesejahteraan. *(life, liberty and property* atau *the pursuit of happiness)*

Ketiga hal yang fundamental ini dikembangkan di dalam aspek-aspek kehidupan yang meliputi hal-hal yang pokok sebagai berikut: (1) aspek ideologis & politik menumbuhkan hak-hak politik; (2) aspek ekonomi menumbuhkan hak-hak ekonomi; (3) aspek sosial - budaya menumbuhkan hak-hak sosial-budaya. Teori "umum" ini ditambah di Indonesia dengan: (4) aspek HANKAM sehingga membentuk panca-gatra; yang kemudian dikembangkan lagi dengan menambah aspek kehidupan di darat, laut dan udara, sehingga menjadi hasta-gatra.

Pola pikir ini sudah "membudaya" di dalam dunia pemikiran di Indonesia, yang kadang-kadang sulit untuk dipahami dan dihayati oleh orang awam, apalgi apabila dituangkan ke dalam bentuk-bentuk yuridis yang canggih.

Dengan demikian tidak mengherankan pula apabila pola pikir ini tercetus di dalam pemikiran-pemikiran tentang hukum dan pengayoman hukum (rechtshantering) di Indonesia. Adakah pola pikir yang lain daripada pola yang lazim ini? Dengan mendalilkan bahwa ada pengembangan hak dan kewajiban asasi warga negara dalam mengamalkan Pancasila dan UUD'45, maka tercermin adanya sifat khusus daripada hak dan kewajiban asasi tersebut, setidak-tidaknya di dalam pengembangannya.

Demikian pula dengan mencantumkan Pancasila dalam masalah mengembangkan hak dan kewajiban warga negara, maka dapat kita katakan bahwa pandangan hidup bangsa yang menjadi ukuran pembeda dari ukuran yang ada selama ini.

Dengan demikian dapat kita dalilkan bahwa ada perbedaan dalam konstruksi-filsafati yang timbul dari suatu pandangan hidup, yang akan melandasi pemikiran tentang hak asasi.

Di dalam pola pikir individualistik termasuk liberalisme, yang di dalam Penjelasan UUD'45 disebutkan dengan istilah asas/semangat perseorangan maka diasumsikan manusia dilahirkan bebas di dalam status belum bernegara (status naturalis), kemudian melampaui suatu perjanjian bermasyarakat (social contract dengan volonte de tous dan volonte generale-nya) memperoleh kebebasannya tersebut kembali dalam bentuk hukum di dalam status bernegara (status civil is dengan civil rights-nya)

Dengan demikian hak asasi yang dimiliki manusia semenjak "kelahiran" nya menjadi pembatas daripada kekuasaan negara (pola pikir dualistis dalam bernegara). Karena menjadi pembatas maka secara konsekuen harus dituangkan ke dalam satu per-

Digitized by Google

aturan perundang-undangan hak-hak asasi tersebut.

Di dalam pola pikir integralistik Indonesia, yang di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan juga di dalam Penjelasan UUD'45 dirumuskan dengan istilah asas/semangat kekeluargaan maka konstruksi filsafati-nya manusia tidak dilahirkan bebas, melainkan terikat/tergantung pada manusia lain, atau integral dengan orang lain dalam hidup berkelompok.

Sehingga hak dan kewajibannya tergantung pada "keberadaannya" dalam kelompok, dimana haknya sebagai individu diakui dalam kaitannya dengan kewajibannya dalam hidup berkelompok (secara serasi, selaras dan seimbang).

Oleh karena itu di dalam pola pikir yang integralistik yang nondualistik, maka penyelenggara negara (istilahnya di UUD'45, sekalipun belum konsisten, bukan penguasa atau pemerintah) harus berdasarkan "musyawarah". Arti bermusyawarah secara ketatanegaraan tersirat di dalam penjelasan pasal 3 UUD'45, yaitu merupakan ciri kegiatan MPR untuk : a) memperhatikan segala yang terjadi dan; b) memperhatikan segal aliran-aliran yang ada. (jadi berbeda dengan konstruksi volunte generale) untuk kemudian sampai pada mufakat, suara terbanyak atau pola 2/3 dalam pengambilan keputusannya.

Jelaslah dengan demikian bahwa di dalam pola pikir integralistik hak dan kewajiban warga negara, tergantung pada keberadaannya dalam hidup berkelompok yang dalam hal ini lazim diungkapkan dalam berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan-keberadaan tersebut diatur dengan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Dasar 1945, yang sekaligus menjadi tolok ukur pengembangannya.

Berdasarkan Penjelasan UUD'45; Umum No. IV Undang-undang Dasar bersifat singkat dan supel, dinyatakan antara lain :

"Maka telah cukup jikalau Undang Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial."

Dari rumusan tersebut maka secara ringkas ada dua lingkup kegiatan yang akan menentukan keberadaan warga negara dan sekaligus hak dan kewajibannya yaitu : (a) dalam hal penyelenggaraan kehidupan negara atau tertib bernegara; dan (b) dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian akan kita peroleh keberadaan atau tatanan dalam lingkup penyelenggaraan kehidupan dan tatanan dalam lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebagai contoh daripada perbedaan dalam menerapkan konstruksi filsafati perseorangan dan kekeluargaan dalam pengembangan hukum perdata ialah : Secara perseorangan atau individualistik: a) yang pertama ditentukan ialah tentang orang (personen recht); b) orang berkeluarga menumbuhkan hukum keluarga (familie recht); c) orang mempunyai hak milik menumbuhkan hukum benda (zaken recht); d) orang meninggal menumbuhkan hukum waris (erfrecht) e) orang mengadakan hubungan dengan orang lain menumbuhkan hukum perikatan (verbintenissen recht).

Secara asas kekeluargaan atau integralistik Indonesia: (misalnya hukum adat) a) ada hak ulayat; b) ada hak perorangan bertumpu pada hal ulayat tersebut (hak pakai dsb) c) hubungan dengan orang lain dimana terkait masyarakat (tanah) dan seterusnya.

Di samping penerapan dalam struktur, tentu ada pula penerapan dalam asas-asasnya. Demikian pula pembandingan ini mungkin dapat dilakukan pula pada bidang-bidang tata hukum lainnya dan merupakan tugas para ahli di bidang masing-masing dalam rangka penyusunan suatu hukum nasional sebagai sumber hak dan kewajiban warga negara.

Penjabaran Pancasila

Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD'45, tepatnya kita sebut sebagai: hak dan kewajiban konstitusional warga negara berdasarkan UUD'45; sedangkan masalah asasinya akan dibahas lebih lanjut.

Berpangkal tolak pada pandangan ini maka kita harus melihat Undang-Undang Dasar 1945, sebagai suatu rangkaian instruksi yang berisikan hak dan kewajiban baik untuk warga negara maupun untuk penyelenggara negara.

Dengan kaca mata hak dan kewajiban ini, maka mungkin suatu hak bagi seseorang atau lembaga akan menumbuhkan kewajiban baginya atau suatu hak (tuntutan) pada pihak lain.

Secara ringkas maka kewajiban bagi penyelenggara negara (lembaga negara) akan dapat menumbuhkan hak pada warga negara. Sebaliknya hak pada penyelenggara negara dapat pula menumbuhkan kewajiban pada warga negara.

Di samping itu ada pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan hak dan kewajiban, khusus bagi warga negara. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas maka dapat dikemukakan contoh hak dan kewajiban konstitusional warga negara maupun penyelenggara negara (lembaga negara) antara lain sebagai berikut:

Kewajiban-kewajiban penyelenggara negara; **MPR:** 1 Melaksanakan kedaulatan atas nama rakyat ps. 1 ayat (2), 2. Bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun ps. 2 ayat (2), 3. Mengadakan sidang istimewa bila perlu penjelasan pasal 2 ayat (2), 4. Menetapkan UUD dan GBHN pasal 3, 5. Bermusyawarah penjelasan pasal 3, 6. Memilih Presiden dan wakil Presiden dan mengambil sumpahnya dan seterusnya

DPR: 1. Bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ps. 19 ayat (2), 2. Memberikan persetujuan agar RUU menjadi UU dan dapat pula menolak (Ps. 20), 3. Memberikan persetujuan agar RAPBN menjadi APBN dan dapat pula menolak (Ps. 23), 4. Mengawasi jalannya pemerintahan penjelasan UUD'45 dan seterusnya.

Presiden : 1. Mendasarkan kekuasaan pemerintahannya pada UUD'45, (pasal 4), 2. Mengajukan rancangan UU dan membuat Perpu serta Peraturan Pemerintah, 3. Meminta persetujuan DPR dalam hal membuat UU, APBN, Pajak, Mata Uang menyatakan perang, perjanjian dengan negara lain dan, 4. Melaksanakan GBHN dan memberikan pertanggungjawaban dan seterusnya.

DPA: 1. Wajib memberikan jawab atas pertanyaan Presiden, 2. memajukan usul kepada pemerintah.

BPK: 1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara, 2. Memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR.

MA : 1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman bersama-sama lain-lain badan kehakiman.

Pemerintah Daerah : memperhatikan prinsip musyawarah Demikian pula halnya dalam hal hak-hak yang pada penyelenggara negara, dapat merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mentaatinya.

Dengan demikian dapat kita katakan, sebagai kelompok pertama yaitu

Digitized by Google

hak dan kewajiban warga negara yang "bersumber" dari hak dan kewajiban penyelenggara negara yang konstitusional. Kelompok yang kedua ialah yang secara jelas ditujukan bagi para warga negara, yang dapat kita sebut sebagai hak kemanusiaan (human rights) yang konstitusional pula.

Dalam hal ini UUD'45 menggunakan pola yang membedakan antara hak warga negara dan kedudukan penduduk yang tidak terbatas pada warga negara saja melainkan mungkin warga negara lain tetapi penduduk. Dengan demikian menurut pola UUD'45, ada hak kemanusiaan yang bersifat "universal" (yang juga berlaku bagi warga negara) ada pula yang bersifat nasional, dan kedua-duanya adalah konstitusional dalam arti diakui sebagai hukum positif.

Menurut penjelasan pasal 27 UUD'45, maka hak warga negara ialah: 1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali; (pasal 27), 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 3. Hak dan wajib bela negara (pasal 30), 4. Hak mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Menurut penjelasan pasal 28 kedudukan penduduk (hak dan kewajiban yang diakui) ialah: 1. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya (pasal 28); 2. Kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (pasal 29 ayat 2); 3. Kesejahteraan sosial khususnya yang mengenai anak-anak terlantar dan fakir miskin. Dengan demikian ada tujuh hak dan kewajiban bagi warga negara yang dirumuskan di dalam UUD '45.

Apabila kita konsisten pada penjelasan umum no IV, Pembukaan UUD'45 bahwa instruksi UUD'45 pada dasarnya meliputi dua hal yaitu: a) penyelenggaraan kehidupan negara; dan b) penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka semua hak dan kewajiban baik yang bagi penyelenggara negara maupun yang untuk warga negara, juga dapat kita golongkan ke dalam dua kelompok tersebut.

Kegiatan penyelenggaraan kehidupan negara dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada hakekatnya membentuk tatanan-tatanan tertentu, apabila kita konsisten pada cara pandang integralistik atau asas kekeluargaan, yaitu bahwa hak dan kewajiban tersebut erat kaitannya dengan keberadaan.

Tatanan-tatanan yang dapat kita telusuri di dalam UUD'45 antara lain ialah : 1. Tatanan penyelenggaraan negara (Bab, I.II.III.IV, dan VII UUD'45), 2. Tatanan gerak kegiatan kenegaraan (sistem GBHN) (pasal 3 UUD), 3. Tatanan Pemerintahan Daerah (pasal 18), 4. Tatanan Keuangan Negara (pasal 23 UUD), 5. Tatanan kewarganegaraan (pasal 26), 6. Tatanan kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25), 7. Tatanan hukum (Sistem Pemerintahan Negara I, dan pasal 27), 8. Tatanan lapangan pekerjaan dan penghidupan (lingkungan hidup) ps. 27, 9. Tatanan hidup beragama (pasal 29 ayat 1), 10. Tatanan berkelompok dan mengeluarkan pendapat (pasal 28), 11. Tatanan bela negara (pasal 30), 12. Tatanan pendidikan dan kebudayaan (pasal 31 dan 32), 13. Tatanan kesejahteraan sosial/perekonomian (pasal 33 dan 34), 14. Tatanan hubungan luar negeri pasal 11) dan 15. Tatanan persatuan bangsa dan tatanan gelar (pasal 35, 36 dan 15).

Apabila kita kaji lebih seksama penjelasan pasal 28,29 ayat 2 dan 34 yang berbunyi: "Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun(kan) negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan," maka dari rumusan tersebut menurut hemat kami yang paling asasi dalam hal hak warga negara dan kedudukan penduduk, menurut UUD'45 ialah: 1) Kehidupan yang demokratis; 2) Kehidupan yang berkeadilan sosial; 3) Kehidupan yang berperikemanusiaan.

Orientasi ini lebih sesuai dengan orientasi kekeluargaan atau integralistik Indonesia, ketimbang orientasi perseorangan yang menekankan *life, liberty* dan *property*. Hukum yang akan mencerminkan hak asasi integralistik seperti itu akan mencerminkan sifat atau fungsi pengayoman. Sehingga pada penjelasan pasal 28 tersebut dapat kita katakan pula tersirat

p.t. bhineka usada raya CABANG SURABAYA

KOMPLEK PERTOKOAN DARMO PARK I. BLOK IB 5
JL. MAY. JEN. SUNGKONO SURABAYA - PHONE : 65391 - 9 EXT 316. DIRECT LINE : 60878
KANTOR PUSAT : JL. PINANGSIA TIMUR 4L JAKARTA BARAT - INDONESIA
PHONE : 673818 - 632014 TELEX 42723 BUR IA CABLE : PETEBUR JAKARTA

supplier of medical & hospital equipment, general trade

MENGUCAPKAN :

SELAMAT ATAS TERPILIHNYA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA MASA BHAKTI 1988 – 1993

Semoga tercapai cita-cita perjuangan GOLKAR
Dalam rangka kesinambungan PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

unsur-unsur daripada pengayoman yang tidak lain daripada hak asasi menurut bangsa Indonesia.

Untuk lebih memahami ketiga hak asasi tersebut marilah kita telusuri makna pengertian tersebut di dalam UUD'45. Yang pertama ialah suatu kehidupan yang demokratis. Bahwa kehidupan ini harus bersumber pada Sila keempat daripada Pancasila tak dapat disangkal lagi, namun yang perlu kita jabarkan ialah maknanya dalam konteks akademik. Demokrasi secara akademik dapat kita artikan sebagai ide maupun sebagai bentuk atau struktur kehidupan. Dengan demikian kehidupan yang demokratis sebagai hak asasi menurut hemat kami harus mengemban ide maupun struktur atau isi dan bentuk.

Demokrasi sebagai ide, terumus di dalam Sila 4 Pancasila yang disebut dengan istilah kerakyatan. Lengkapnya: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Apabila kita uraikan maka: (a) "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan", memberikan ciri khas Indonesia pada ide demokrasi pada umumnya, dengan rumusan ini lazimnya diartikan bahwa hikmat kebijaksanaan "mengakomodir empat sila lainnya; (b) sedangkan "dalam permusyawaratan/perwakilan" diartikan bahwa (sifat) demokratis atau kerakyatan ditampilkan (terutama) di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan (untuk operasionalnya).

Demokrasi sebagai struktur dapat kita telusuri unsur-unsurnya di dalam UUD'45, dimana yang terutama ialah: (1) Kekuasaan tertinggi dalam hidup berkelompok ialah pada rakyat dengan rumusan Kedaulatan Rakyat yang didasarkan pada Pancasila; (ps. 1 ayat 2 dan alinea ke 4 Pembukaan). (2) organisasi negara berbentuk Republik, artinya untuk kepentingan Umum (Res Publica) (pasal 1 ayat (1) dan Pokok pikiran pertama yang terkandung di dalam Pembukaan). (3) Menggunakan sistem perwakilan (pasal 2 dan pasal 19). (4) Ada pola tentang hak kemanusiaan (pasal 28,29,30,31,34). (5) Kepala Negara adalah mandataris rakyat (sistem mandataris) Sistem Pemerintahan Negara III,IV,V,VI,VII. (6) Negara berdasar atas hukum (Sistem Pemerintahan Negara I). (7) Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (Sistem Pemerintahan Negara II). (8) Kelembagaan negara didasarkan pada suatu interelasi tertentu (bukan trias politica) yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada rakyat (ps. 2,3,4,16,19,24). (9) Memiliki pola pelestarian pola bernegara (pasal 37). (10) Demokrasi bukan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan bernegara (Alinea ke IV Pembukaan). Demikian beberapa unsur demokrasi yang terumus di dalam UUD'45 sehingga dapat kita sebut sebagai mekanisme demokrasi Pancasila yang konstitusional.

Hak asasi yang kedua ialah kehidupan berkeadilan sosial. Pokok-pokok ketentuan yang ada di dalam UUD'45 yang dapat kita pakai untuk menjelaskan keadilan sosial menurut hemat kami ialah pasal 27 dan pasal 33 serta 34. Apabila ketiga pasal tersebut kita gabungkan maka unsur-unsur keadilan sosial yang pokok ialah: (1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum; (2) Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan kewajiban menjunjung pemerintahan tersebut tanpa kecuali; (3) Berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (4) Berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; (5) Perekonomian merupakan usaha bersama berdasar atas asas integralistik Indonesia (kekeluargaan); (6) Penyelenggaraan produksi: - yang penting bagi negara, - yang menguasai hajat hidup orang banyak, - bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara.. (7) Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah penilikan anggota masyarakat; (8) Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang; (9) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Demikian beberapa patokan gambaran suatu keadilan sosial secara konstitusional, yang sudah barang tentu memerlukan pengembangan secara kongkrit dalam kehidupan. Di samping itu ada tiga hal lain yang ikut mempengaruhi yaitu usaha swasta yang menurut UUD'45 dibenarkan sejauh tidak menguasai hajat hidup orang banyak; masalah bangun/bentuk perusahaan dan masalah keuangan negara.

Hak asasi yang ketiga ialah kehidup-

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN

Rumah Sakit Umum Daerah

Dr.SOETOMO

MENGUCAPKAN :

SELAMAT ATAS TERPILIHNYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA
MASA BHAKTI 1988 – 1993

Semoga tercapai cita-cita perjuangan GOLKAR
Dalam rangka kesinambungan PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

an yang berperikemanusiaan. Di dalam pokok pikiran ke 4 yang terkandung di dalam Pembukaan maka kemanusiaan dikaitkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan rumusan: "Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam Pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. Oleh karena itu Undang Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dari rumusan di kedua alinea tersebut dapat kita tarik beberapa faktor yang menentukan perikemanusiaan yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Keadilan; 3) Peradaban; 4) Budi pekerti yang luhur; dan 5) Cita-cita moral rakyat yang luhur.

Secara akademik maka manifestasi kelima faktor tersebut adalah pada kebudayaan, sehingga menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana petunjuk UUD'45 tentang kebudayaan yang dirumuskan di dalam pasal 32 dan penjelasannya dan penjelasan pasal 36 yang pokok-pokoknya ialah bahwa: 1) Kebudayaan ialah: a) budaya yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat seluruhnya; b) Kebudayaan lama dan kebudayaan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai budaya bangsa. c) Bahasa daerah yang dipelihara rakyatnya merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. 2) Usaha kebudayaan - harus menuju ke arah kemajuan adab dan 3) Kebudayaan asing - Tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan Indonesia serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pengembangan

Di dalam mengembangkan hak dan kewajiban asasi warga negara maka kita akan berhadapan dengan beberapa masalah yang utama ialah: a) Bagaimana mekanisme pengembangannya sehingga dapat ditegakkan hak asasi tersebut; b) Apa tolok ukur daripada isi yang harus dikembangkan; c) Bagaimana mekanisme penjabaran bentuk dan isi tersebut secara terpadu, dan e) Apa kondisi manusianya yang akan menegakkan maupun menjabarkan hak dan kewajiban asasi tersebut.

Mengenai mekanisme pengembangan hak dan kewajiban warga negara agar dapat ditegakkan maka kita tidak dapat terlepas dari Sistem Undang-Undang Dasar kita yang di dalam Penjelasan Umum no IV antara lain menjelaskan sebagai berikut: "..." lebih baik hukum dasar yang tertulis ini hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut".

Dengan demikian wadah utama di dalam menjabarkan hak dan kewajiban warga negara dalam tatanan-tatanan tertentu ialah undang-undang, atau dengan perkataan lain pemerintah bersama-sama wakil rakyat.

Sesuai dengan ragam hak dan kewajiban berdasarkan undang undang dasar, yang membedakan antara hak dan kewajiban warga negara dan hak kewajiban penyelenggara negara, maka sekalipun secara hukum positif setiap undang-undang adalah sama, namun dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, kita dapat membedakan antara: a) undang undang yang nada utamanya ditujukan kepada penyelenggara negara seperti misalnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan b) undang-undang yang nada utamanya ditujukan kepada warga negara seperti Undang-Undang Pajak.

Ragam teoretis mengenai undang-undang ini pasti mempunyai dampak dalam perancangannya maupun dalam pembahasannya sebelum menjadi suatu peraturan yang dapat ditegakkan dengan sanksi.

Dengan demikian dalam cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG

ANDA MEMBUTUHKAN LISTRIK ?

Segera hubungi langsung kantor-kantor cabang kami, dengan alamat sebagai berikut :

1. PLN CABANG GAMBIR
   Jl. M.Ikhwan Ridwan Rais No.1
   Jakarta Pusat.
2. PLN CABANG KOTA
   Jl. Bandengan Utara No.79
   Jakarta Barat.
3. PLN CABANG KEBAYORAN
   Jl. Sisingamangaraja No.1
   Jakarta Selatan.
4. PLN CABANG JATINEGARA
   JL. D.I.Panjaitan Kav.3-4
   Jakarta Timur.
5. PLN CABANG KRAMATJATI
   Jl. Otto Iskandardinata No.80A
   Jakarta Timur.
6. PLN CABANG TANJUNG PRIOK
   Jl. Yos Sudarso No.30
   Jakarta Utara.
7. PLN CABANG TANGERANG
   Jl. Daan Mogot No.34
   Tangerang.

Untuk mempercepat penyambungan listrik ke alamat calon pelanggan, hendaknya dalam mengajukan permintaan dilampirkan pula sket lokasi. Untuk menghidarkan hal-hal yang tidak diinginkan, jangan melalui calo dan kepada petugas PLN yang melaksanakan survai penyambungan diminta menunjukkan surat tugas atau kartu identitas yang masih berlaku.

Digitized by Google

menurut hemat kami lebih tepat menuangkan hak dan Kewajiban asasi warga negara maupun penyelenggara negara ke dalam suatu peraturan perundang-undangan mengenai tatanan-tatanan tertentu ketimbang menuangkannya dalam satu peraturan perundang-undangan tanpa terkait dengan suatu tatanan. Karena dengan cara yang berdasarkan cara pandang berasas kekeluargaan, hak dan kewajiban asasi akan lebih kongkrit dirumuskan sesuai dengan keberadaan seseorang dan tidak abstrak tanpa lingkup waktu dan lingkup soal yang tertentu.

Masalah yang kedua ialah apakah yang akan dikembangkan dan apa yang menjadi tolok ukur pengembangan materinya? Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tatanan-tatanan yang disebutkan di dalam UUD'45, telah dirumuskan nilai-nilai patokannya misalnya dalam hal hukum dan pemerintahan -nilai kesamaan kedudukan dan kepatuhan, dalam hal tatanan perekonomian nilai asas-kekeluargaan sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 33, dalam hal tatanan pekerjaan -layak dari segi kemanusiaan demikian pula dalam hal tatanan penghidupan dan sebagainya.

Jelas bahwa nilai-nilai yang dikembangkan ialah nilai-nilai yang telah dirumuskan dan nilai-nilai ini sekaligus menjadi tolok ukur pengembangannya.

Dalam hal nilai-nilai tersebut belum cukup dirumuskan atau belum dirumuskan, maka pola UUD'45 dalam hal ini ialah menginstruksikannya agar dituangkan ke dalam undang-undang. Artinya rakyat sendiri dilibatkan dalam menentukan nilai-nilai tersebut. Dalam hubungan ini sangat penting posisi daripada lembaga-lembaga perwakilan yang mengatasnamakan/mewakili rakyat. Disini akan berperan ideologi negara sebagai kristalisasi daripada pandangan hidup dan falsafah bangsa dan negara yaitu Pancasila.

Tibalah kita pada permasalahan bagaimana mekanisme penjabaran bentuk dan isi secara terpadu dalam gerak kegiatan kenegaraan. Mekanisme ketatanegaraan kita untuk itu ialah mekanisme atau sistem Garis Besar Haluan Negara. Haluan Negara ialah kongkretisasi daripada tujuan bernegara secara berkesinambungan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan dan sesuai dengan petunjuk UUD'45 ditetapkan garis-garis besarnya dalam waktu-waktu tertentu, (kurun lima tahun).

Dengan demikian apa yang telah dituangkan ke dalam suatu undang-undang termasuk hak dan kewajiban asasi, akan mendapatkan petunjuk-petunjuk atau pedomannya dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi setiap lima tahunnya. Dengan demikian merupakan suatu "commitment" yang berat apabila merumuskan pedoman di dalam GBHN yang situasi dan kondisinya belum memungkinkan untuk pelaksanaaannya dalam kurun waktu lima tahun yang bersangkutan. Indikator yang menunjukkan belum adanya kesiapan pelaksanaan ialah apabila apa yang direncanakan sebagai pedoman di dalam GBHN dan dikembangkan ke dalam PELITA, ternyata tidak dapat diselesaikan sekalipun ada dananya. (SIAP).

Keadaan semacam itu harus kita hindarkan agar pengembangan hak dan kewajiban asasi tidak hanya menjadi ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dioperasionalkan.

Dengan demikian kita akan berhadapan dengan masalah pedoman pembangunan hukum yang secara garis besar antara lain adalah sebagai berikut; 1. Pembangunan hukum yang meliputi pembinaan tata hukum, penegakan hukum, penerapan dan pelayanan hukum dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan hukum, dituangkan dalam program-program nasional dengan tujuan menciptakan masyarakat yang semakin adil dan sejahtera yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Kebijaksanaan pembangunan hukum tertuju pada: a) perwujudan hukum: nasional sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tertib dunia yang adil sejahtera. b) Terjaminnya pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan hukum. c) Pemantapan dan pengamanan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. d) Terciptanya kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim pengayoman hukum dalam partisipasi yang aktif

UNIVERSITAS SURABAYA

Kantor Pusat : Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169 Telp. 60866 Surabaya

MENGUCAPKAN :

SELAMAT ATAS TERPILIHNYA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA MASA BHAKTI 1988 – 1993

Semoga tercapai cita-cita perjuangan GOLKAR
Dalam rangka kesinambungan PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

dan kreatif dalam pembangunan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang bertanggungjawab. e) Pemberian dukungan, pengarahan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang lebih adil dan merata.

3. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui program-program: a) peningkatan dan pembaharuan hukum agar tercipta tata hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan antara lain mengusahakan unifikasi serta kodifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dan dinamika kehidupan masyarakat. b) Pemantapan kedudukan dan fungsi badan serta pranata penegak hukum sesuai dengan wewenang dan kewajiban masing-masing serta peningkatan yurisprudensi dalam proses pembangunan hukum. c) Pemantapan sikap dan perilaku para penegak hukum serta peningkatan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum. d) Peningkatan pengembangan ilmu hukum dan pendidikan hukum, serta peningkatan dan perluasan pemberian bantuan hukum terutama bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu, demi pemerataan keadilan dalam masyarakat. e) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana hukum yang diperlukan pembangunan.

4. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi warga masyarakat dan aparat negara, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman serta kepastian hukum.

5. Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam setiap usaha pembangunan hukum perlu diambil dan ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan hak dan kewajiban asasi warga negara dan penduduk.

Masalah selanjutnya ialah bagaimana kondisi manusianya akan menegakkan maupun menjabarkan hak dan kewajiban asasi tersebut.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, maka sekalipun dirumuskan hak dan kewajiban asasi yang katakatanya bersifat kekeluargaan (integralistik) namun apabila *semangat* manusianya bersifat perseorangan maka rumusan hak dan kewajiban tersebut tidak akan ada gunanya dalam praktek. Oleh karena itu yang penting ialah semangat manusianya.

Dalam kaitannya dengan semangat ini maka menurut hemat kami adalah relevan untuk mengetahui sejarah ketatanegaraan yang menunjukkan interelasi antara tatanan perekonomian, tipe negara dan tipe atau sistem pemerintahan, sebagai pencerminan dua aspek yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok yaitu: a) manusia sebagai insan yang hidup berkelompok (homo politicus); dan b) manusia sebagai insan usaha (mencari nafkah) - (homo economicus).

Interelasi tersebut adalah sebagai berikut: **Tatanan perekonomian:** 1. Merkantilisme; 2. Liberalisme; 3. Komunisme; 4. Sistem perekonomian berdasarkan pasal 33 UUD'45.

Type Negara; Polizeistaat (Etatism); Rechtsstaat liberal sampai Socialeverzorgings staat; Negara Komunis (Socialist legality); Negara Hukum berdasarkan Pancasila.

Sistem Pemerintahan; Monarkhi absolut; Sistem parlementer (negara hukum yang demokratis); Daktur proletariat; Demokrasi Pancasila.

Apabila hal ini kita kaitkan dengan masalah semangat sebagaimana diungkapkan di dalam UUD'45, maka kita akan memperoleh: a) semangat merkantilistik - (melihat keuntungan materiil); b) semangat individualistik - (persaingan bebas-survival of the fittest) c) semangat komunistik - (mengutamakan kelas buruh) dan d) semangat integralistik Indonesia. Jelaslah bahwa ketiga macam semangat yang pertama tidak akan sesuai untuk manusia yang akan mengadakan pembangunan hukum.

Oleh karena itu di dalam arah pembangunan jangka panjang disebutkan bahwa "Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan unsur-unsur Manusia Indonesia yang utuh dapat kita telusuri di dalam arah pembangunan jangka panjang tersebut yang antara lain ialah: 1) mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, secara selaras, serasi dan seimbang dengan, 2) kepuasan bathiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya. 3) Ada keselarasan hubungan antara manusia dengan TuhanNya; 4) Ada keselarasan antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya; 5) keserasian hubungan antar bangsa-bangsa; 6) keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat; 7) Kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras.

Gambar manusia Indonesia yang utuh ini dilengkapi dengan antara lain 36 butir sikap perilaku yang dapat mempedomani kita agar bersemangat Pancasila. (TAP/II/MPR/1978-Ekaprasetia Pancakarsa) di mana unsur Ekaprasetia mencerminkan tekad dan niat untuk bersemangat demikian.

Demikianlah beberapa permasalahan dalam mengembangkan hak dan kewajiban asasi berdasarkan UUD'45 dan Pancasila khususnya dalam hal semangat pada masa sekarang masih nampak semangat merkantilisme yang mendasarkan setiap langkah kegiatan hukum pada imbalan materiil, sehingga menumbuhkan ketertiban hukum dan kesejahteraan berdasarkan hukum "biaya tinggi", KUHP adalah ungkapan kiasan atau sindirannya. Demikian pula kadangkala masih tumbuh semangat liberalistik yang mengumbar prinsip survival of the fittest, tanpa mengayomi secara hukum fihak yang lemah.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa, apabila di dalam pola pikir perseorangan (individualistik) hak asasi berkisar pada *life, liberty* dan *property* yang dikembangkan di bidang IPOLEKSOSBUD, dan menumbuhkan hak asasi di bidang politik, ekonomi sosial dan budaya, maka dalam pola pikir integralistik Indonesia (asas kekeluargaan) maka merupakan hak asasi ialah: kehidupan yang demokratis, kehidupan yang berkeadilan sosial dan kehidupan yang berperikemanusiaan.

Hak asasi ini menumbuhkan hak dan kewajiban konstitusional baik bagi penyelenggara negara maupun bagi warga negara dan penduduk, yang meliputi penyelenggaraan kehidupan negara dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penjabaran hak dan kewajiban konstitusional tersebut ialah dengan undang undang dalam rangka pengaturan tatanan-tatanan yang diinstruksikan UUD'45 berdasarkan nilai-nilai dasar dan aspirasi rakyat yang berkembang di dalam rangka penyusunan undang-undang yang bersangkutan. Pedoman untuk itu ialah pembangunan hukum sebagaimana dirumuskan di dalam Garis Besar Haluan negara, didukung oleh semangat ke-Pancasilaan.□

Digitized by Google

Maria Sugiharto

AYAHKU, ADAHKAH HARI BAPAK?

Marilah kita merenungkan ''Nasib'' Bapak, pada hari-hari kita memperingati hari kebesaran bagi wanita Indonesia, ialah Hari Ibu.

Oh, My Papa, To me He was so wonderful...
Oh My Papa, To Me He was so good,
No one could be, so gentle and so lovable,
Oh, My Papa, He always understood...

artinya :

Ayahku, bagiku dia adalah istimewa
Ayahku, bagiku dia baik sekali
Tiada seorangpun selembut dan memiliki kasih sayang seperti dia,
Ayahku, Dia selalu mengerti.

Ini adalah cuplikan dari sebuah lirik lagu Amerika yang sudah tidak canggih lagi, bila dibandingkan dengan lagu-lagu Amerika yang kini melanda dunia, seperti lagunya *Duran-Duran*, ataupun *Michael Jackson*. Tetapi yang jelas lagu ini adalah pengungkapan cinta kasih kepada Ayah. Saya sungguh lupa siapa nama penyanyi yang mendendangkan lagu yang sangat berkesan ini. Lagu untuk ayah tersebut mengukir kesan tersendiri.

Ketika itu, saya sedang menginap di rumah saudara di Belanda. Di kamar tidur saya, tergantung sebuah panel, tidak berisi lukisan, tetapi barisan kata-kata mutiara:

4 Jaar... Die pappa van mij kan alles, Alles !.
Usia 4... tahun, ayahku tahu segala-

Digitized by Google

nya;
9 Jaar ... Vader weet natuurlijk ook niet alles.
Pada usia 9... tahun, ayah toh tidak mengetahui semuanya;
15 Jaar... Daar weet die ouwe heer van mij geen barst van.
Usia 15... tahun ternyata orang tua itu (ayah), kurang mengerti jiwaku;
17 Jaar... Och die man is uit de tijd, wat wil je.
Usia 17 tahun... Oh, ayah tokh sudah ketinggalan jaman. Apa maunya dia?
25 Jaar... Toch 'ns horen wat vader daar van vindt.
Usia 25 tahun... Sekali-sekali dengarkanlah pendapatnya.
35 Jaar... Wat zou vader daarvan gedacht habben. Hij wist zoveel.
Usia 35 tahun... Apa yang akan diberikan dari benaknya adalah baik. Dia mengetahui banyak.
50 Jaar... Vader? Die wist nou letterlijk alles
Usia 50 tahun...Ayah? Adalah seorang yang secara harfiah tahu segala-galanya.

Setelah panel tersebut saya baca, saya renungkan, sayapun tersenyum sendiri, karena ternyata pendapat tentang ayah secara normal, universil. Baik orang Indonesia, Afrika ataupun Eropa maupun Amerika, pendapat mengenai seorang ayah adalah sama. Pagi harinya, ketika hal itu saya ceritakan kepada tuan rumah, maka dengan kebapakan, tuan rumah yang Belanda totok itu Menghadiahkan panel tulisan tersebut kepada saya, dan sampai kini menjadi hiasan dinding kamar kerja saya.

Ungkapan perasaan sentimentil tentang kecintaan anak, banyak ditujukan kepada ibu, sampai-sampai diadakan hari khusus untuk ibu, untuk memperingati jasa ibu. Baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang teman, sebagai seorang pejuang, serta bermacam-macam predikat lainnya yang dirangkum di dalam hari ibu tersebut, karena pada hakekatnya orang ingin memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kaum ibu. Nah, kaum bapak?

Di dalam konteks ini, kadang-kadang kaum Bapak seperti "diharuskan" mengerti tentang ibu, karena ibulah yang harus mendapatkan perhatian khusus. Adanya pendapat bahwa emansipasi wanita (ibu) belum dilaksanakan benar-benar, serta bahwasanya ada pendapat *Swargo Nunut Nroko Katut* (Surga hanya ikut, tetapi keneraka pun dia harus terikut sertakan), memang memojokkan peranan bapak.

Ayahku

Tetapi memang sudah jamak, dan agaknya adil, karena di dunia manapun juga, kaum Adam selalu masih mendapatkan tempat yang di depan daripada kaum Hawa. Memang rupanya demikianlah hidup ini. Terlepas dari semuanya ini, tidak ada jeleknya bila kita sekali-sekali mengingat juga tentang eksistensi bapak sebagai pemimpin sebuah rumah tangga, serta peran sertanya yang sebenarnya memegang kunci dari adanya generasi yang berupa anak-anak yang harus menghormati ibu dan bapak.

Teman akrab saya suatu hari berkomentar, saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saja dia mengucapkan komentar ini, apakah dia saking kesalnya kepada kaum pria atau bagaimana (dia ini seorang wanita karir), begini komentarnya: "... tetapi masih ada di dunia ini laki-laki yang baik sekali dan masih selalu kucintai dengan segenap hatiku, ialah satu, **ayahku**, dan kedua, **adikku**, atau saudaraku laki-laki. Pernyataan yang kelihatannya agak ekstrim, tetapi pada hakekatnya memang demikian.

Pada saat memperingati Hari Ibu, yang diadakan secara reguler setiap 20 Desember, maka ijinkanlah kini saya sekali-sekali mengingat jasa bapak, yang menjadi pendamping ibu. Tanpa Bapak, fungsi ibu kurang lengkap bukan?

Ungkapan-ungkapan cinta kasih, biasanya diwujudkan di dalam syair-syair, karangan, juga lagu. Saya sungguh tersentuh, mendengarkan lagu ciptaan, serta sekaligus dibawakan, Daniel Guichard, penyanyi dan komponis Perancis. Lagunya adalah ungkapan rasa kasih sayang kepada Ayah, dibawakan dengan gaya yang sentimentil dan sangat menyentuh. Bagi yang menyukai musik permainan piano Richard Clayderman, maka dia ini membawakan lagu tersebut dengan sangat indah.

Lagunya berjudul *Mon Vieux* yang artinya *Orang tuaku*, atau *Ayahku*. Lirik-lirik yang menghanyutkan serta menyentuh tersebut, bisa saya rangkum di dalam satu pengertian demikian : "Selalu dengan mantel yang usang, dia pergi bekerja dari hari ke hari, tidak mengenal musim, baik itu musim dingin maupun musim panas.

Dia hanya beristirahat setiap hari Minggu, karena hari-hari lain adalah hari-hari untuk mencari roti (sesuap nasi). Bila musim panas, orang-orang pergi ke pantai, dia tidak mengeluh meskipun tidak seperti mereka itu. Namun demikian, diapun tidak berada di surga.

Setiap hari, selama bertahun-tahun, dia pergi dan pulang dengan kendaraan bis yang sama, menelusuri pinggiran kota sampai ke kota dimana dia bekerja. Malam hari, bila tiba dari pekerjaannya, diapun tidak pernah mengeluh. Dia adalah orang yang serius dan diam.

Hari-hari Minggu serasa hari-hari yang seirama, meskipun tanpa kunjungan dari teman-temannya. Namun demikian dia tidak merasa malang.

Bila hari gajian tiba, orang di rumah menunggu, untuk makan yang agak istimewa, Dia mengenal semuanya, kaum borjuis (yang kaya), para direktur, yang kiri, yang kanan, tetapi dia selalu pasrah.

Dalam tahun-tahun hidupku bersamanya, disampingnya, tanpa melihat keseluruhan, kita rasakan kebersamaan, meskipun kita hampir tidak membuka mata kita masing-masing.

Dia tidak memandang semuanya sebagai kesialan, maka... kuinginkan bersamanya mengukir jalan, untuk bisa berjalan bersamanya yang kuharapkan akan memberinya suatu kebahagiaan. Tetapi bila seseorang masih berusia lima belas tahun, tidak cukup memiliki kebesaran jiwa dan hati untuk berbuat semuanya. Kini, dia telah jauh dari sisiku. Dan bila kukenang semuanya itu, aku hanya ingin agar *dia* selau dekat denganku... ayahku.

Demikianlah apa yang dikatakan oleh Daniel Guichard, yang cukup menyentuh hati siapapun juga yang pernah memiliki ayah. Tidak hanya Daniel Guichard yang mengenang ayah dengan lagu-lagunya. Masih banyak lainnya lagi, yang kesemuanya memberikan kesan, bahwa adanya ayah, baik untuk dikenang, meskipun tidak perlu harus diadakan hari untuk ayah tersendiri. Dan para ibupun, saya yakin, bahwa apa yang dikatakan teman saya yang wanita tentang pria yang baik di dunia ini adalah ayahnya, akan setuju sekali, sebab setiap ibu pun pernah memiliki ayah.□

Digitized by Google

PEMILIK dan MENEJEMEN

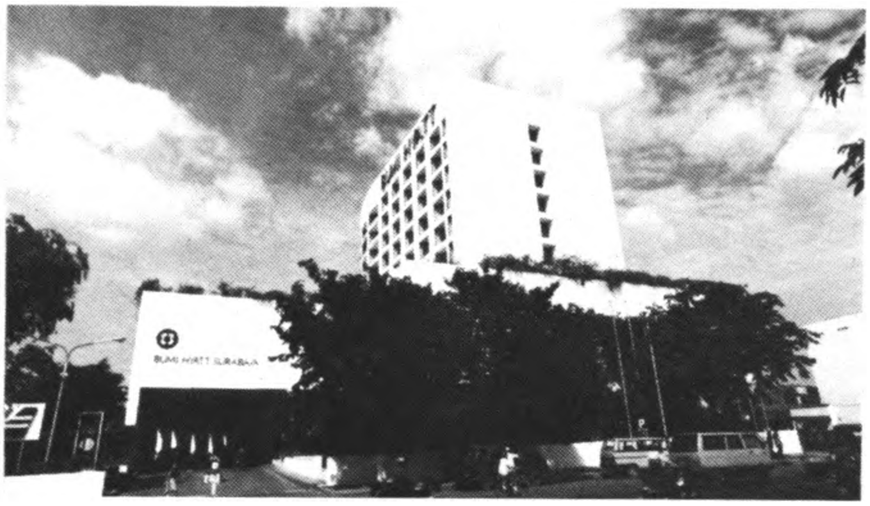

HYATT BUMI SURABAYA®

MENGUCAPKAN :

SELAMAT ATAS TERPILIHNYA

BAPAK LETJEN. TNI (PURN) WAHONO

Sebagai Ketua Umum DPP Golkar

D a n

BAPAK Ir. RACHMAT WITULAR

Sebagai Sekretaris Jenderal

Beserta

SEGENAP JAJARAN DPP GOLKAR
MASA BHAKTI 1988 – 1993

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai
Tugas dan Perjuangan-Perjuangan GOLKAR
Mewujudkan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila

Hyatt Bumi Surabaya, Jl. Jend. Basuki Rakhmat 124 – 128,
Telp. (031) 511234, Telefax (062) 31 – 470508, Telex 34316

Digitized by Google

WE SPECIALIZE FOR SECURITY PRINTING

Happy New Year 1989

PT. CICERO INDONESIA
Security printing
Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Pasar Rebo
(Jalan Raya Jakarta – Bogor Km 25) Jakarta 13740
Telp : 8400256, 8400851, 8400836, 8400640 Telex : 48392 CICEIN IA

Digitized by Google